



Laporan Tahunan
2018
Annual Report



Focus on Growth

Sanggahan Dan Batasan Tanggung Jawab

Disclaimer

Laporan tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, kebijakan, proyeksi, strategi, serta tujuan Perseroan yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek resiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang serta lingkungan bisnis dimana Perseroan menjalankan kegiatan usaha. Perseroan tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

Laporan Tahunan ini memuat kata "Perseroan", "Perusahaan", "PT PP Presisi Tbk" dan "PP Presisi" yang didefinisikan sebagai PT PP Presisi Tbk yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbasis pada diferensiasi produk yaitu jasa konstruksi sipil dan gedung. Adakalanya kata "kami" digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT PP Presisi Tbk secara umum.

This annual report contains financial conditions, operation results, projections, plans, strategies, policy, as well as the Company's objectives, which are classified as forward-looking statements in the implementation of the applicable laws, excluding historical matters. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks (prospective), uncertainties, and other factors that could cause actual results to differ materially from expected results.

Prospective statements in this annual report are prepared based on numerous assumptions concerning current conditions and future events of the Company, and the business environment where the Company conducts business. The Company shall have no obligation to guarantee that all the valid documents presented will bring specific results as expected.

This annual report contains the word "the Company", "PT PP Presisi Tbk", and "PP Presisi" hereinafter referred to PT PP Presisi Tbk as the company that runs business in construction service sector based on product differentiation namely civil and building construction services. The word "we", "our", and "us" are at times used to simply refer to PT PP Presisi Tbk in general.



Tentang Laporan Tahunan 2018

About 2018 Annual Report



Selamat datang pada Laporan Tahunan 2018 PT PP Presisi Tbk dengan tema **Focus on Growth**. Tema tersebut dipilih berdasarkan kajian dan fakta dari perkembangan bisnis Perseroan pada 2017 serta masa depan keberlanjutan bisnis Perseroan. Tujuan utama penyusunan Laporan Tahunan ini adalah untuk meningkatkan keterbukaan informasi Perseroan kepada publik dan otoritas terkait. Laporan Tahunan ini diterbitkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Laporan tahunan ini menyajikan uraian kinerja Perseroan dari aspek bisnis, operasional, tata kelola serta peningkatan peran Perseroan bagi pelanggan, lingkungan, dan sosial kemasyarakatan. Segala yang disampaikan dalam Laporan Tahunan diharapkan mampu memberikan informasi yang memadai terkait kebijakan yang telah dilakukan selama tahun 2018, serta menjadi sarana evaluasi bagi peningkatan kinerja Perseroan agar lebih baik di masa yang akan datang.

Welcome to the 2018 Annual Report of PT PP Presisi Tbk with **Focus on Growth** as the theme. This theme was selected based on reviews and facts on the Company's business development in 2017 as well as future business sustainability. The main purpose of the Annual Report's composition is to improve the Company's information disclosure to the public and relevant authorities. The Annual Report is issued pursuant to the Regulation of the Financial Services Authority No. 29/POJK.04/2016 on the Annual Report of Issuers or Public Companies and the Circular Letter of the Financial Services Authority No. 30/SEOJK.04/2016 on Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies. This Annual Report presents description of the Company's performance on business, operational, and governance aspects as well as improvement on the Company's role for customers, environment, and communities. Matters stated in the Annual Reports shall provide adequate information regarding policies implemented in 2018 and serves as an evaluation method for further improvement on the performance of the Company in the years to come.

Kesinambungan Tema Laporan Tahunan (2017-2018)

Theme Continuity (2017-2018)

Business Transformation for Rapid Growth 2017



Pada umumnya transformasi bisnis dilakukan oleh perusahaan – perusahaan ketika industri yang digeluti perusahaan-perusahaan tersebut, dan atau perusahaan yang bersangkutan sedang berada di dalam masa penuh tantangan. Tetapi PT PP Presisi Tbk (“Perseroan”, “PP Presisi”) justru melakukan transformasi bisnis pada saat industri yang ditekuni sedang booming dan Perseroan juga sedang tumbuh pesat untuk mencapai pertumbuhan yang signifikan. Hal ini dilakukan Perseroan untuk memperoleh percepatan di dalam pertumbuhan Perseroan.

Perseroan dari tahun 2014 hingga tahun 2017 telah melakukan transformasi bisnis dari bisnis *formwork* dan penyewaan alat berat yang merupakan *core business* Perseroan menjadi Perusahaan konstruksi terintegrasi berbasis alat berat yang terkemuka di Indonesia yang mampu memberikan *value added* kepada para konsumennya melalui 5 lini bisnis yang dimilikinya, yaitu *civil work*, *ready mix*, *foundation*, *formwork* dan penyewaan alat berat. Transformasi bisnis yang telah dilakukan Perseroan dalam kurun waktu 2014 hingga 2017 telah mengantarkan Perseroan pada Tingkat Pertumbuhan Tahunan Majemuk/*Compound Annual Growth Rate* (CAGR) Pendapatan sebesar 115%. Sebuah pertumbuhan yang sangat pesat.

Transformasi bisnis yang dilakukan Perseroan mencapai puncaknya pada tahun 2017 dengan diakuisisinya PT Lancarjaya Mandiri Abadi (“LMA”) yang menandakan tonggak sejarah Perseroan melakukan pertumbuhan secara inorganik untuk melengkapi pertumbuhan secara organik yang selama ini dilakukan. Pertumbuhan secara inorganik tersebut mendorong Perseroan untuk bertumbuh lebih cepat karena adanya peningkatan *engineering capacity* dan terciptanya *value*.

In general, business transformation is pursued by companies when those companies and or their industries are in a challenging period. However, PT PP Presisi Tbk (“the Company”, “PP Presisi”) is transforming its business when its business is booming and the Company is also growing rapidly to achieve significant growth. This is conducted to accelerate the Company’s growth.

From 2014 to 2017, the Company has transformed its business from formwork and heavy equipment rental business as the Company’s core business into a leading integrated heavy equipment-based construction company in Indonesia that is able to provide added value to consumers through its 5 business lines, namely civil work, ready mix, foundation, formwork, and heavy equipment rental. Business transformation that has been carried out by the Company from 2014 to 2017 has ushered the Company to a significantly rapid growth at 115% of Compound Annual Growth Rate (CAGR), a very rapid growth.

The Company’s business transformation culminated in acquisition of PT Lancarjaya Mandiri Abadi (“LMA”) in 2017 that served as a milestone to inorganic growth of the Company to complement the Company’s organic growth that has been pursued. Such inorganic growth encouraged the Company to grow rapidly due to increase in engineering capacity and creation of value.

Focus on Growth 2018



Fundamental yang telah dibangun, ditumbuhkembangkan oleh Perseroan melalui business transformation yang terus dilanjutkan. PT PP Presisi Tbk fokus pada peningkatan *engineering capability* dan *engineering capacity* baik secara organik maupun anorganik mengacu kepada *value creation*.

Perseroan fokus pada pertumbuhan paska keberhasilan *business transformation* tahap pertama & pencatatan perdana saham di Bursa Efek Indonesia pada tahun lalu. Perseroan mengalami gelombang pertumbuhan yang pesat, dipicu oleh peningkatan *engineering capability* dengan membentuk lini bisnis erector dan peningkatan *engineering capability* PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA), entitas anak, dengan meningkatkan ruang lingkup jasa *coal hauling* menjadi *integrated mining services*. Di samping itu, gelombang pertumbuhan yang pesat juga dipicu oleh peningkatan *engineering capacity* melalui penambahan alat berat yang dapat diandalkan untuk mendukung bisnis konstruksi & pertambangan, serta dipicu juga oleh inovasi yang dilakukan secara berkelanjutan, antara lain inovasi pada *formwork* yang melahirkan Presisi Formwork (Preform) yang dikembangkan melalui kerjasama dengan Kumkang Kind Co., Ltd, South Korea. Perseroan juga banyak melakukan *feasibility studies* untuk peningkatan *engineering capability* dan *engineering capacity* di bidang konstruksi, jasa pertambangan, *dredging* dan bidang-bidang lain yang berkorelasi dengan konstruksi.

Sebagai bagian dari peningkatan *stakeholder value*, PP Presisi juga berkomitmen untuk menerapkan *Safety Health & Environment (SHE)* dan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Berbekal aspek fundamental yang telah dibangun dengan kokoh serta fokus Perseroan pada pertumbuhan, PP Presisi optimis mampu menciptakan nilai bagi para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan secara berkelanjutan. Semangat PP Presisi untuk fokus pada pertumbuhan demi menciptakan nilai positif bagi *shareholders* dan *stakeholders* dituangkan dalam tema Laporan Tahunan 2018 "**Focus on Growth**".

The Company develops its established foundation through continuous business transformation. PT PP Presisi Tbk is focused on engineering capability and engineering capacity improvement in both organic and inorganic manner by referring to value creation.

The Company is focused on growth after the success of the first phase of business transformation & initial public offering in Indonesia Stock Exchange last year. The Company's wave of rapid growth is triggered by engineering capability enhancement by establishing business line of erector and improvement of engineering capability of PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA), a subsidiary, through expanding scope of business of coal hauling services into integrated mining services. In addition, the wave of rapid growth is also prompted by engineering capacity improvement through addition of heavy equipment that can be relied upon for supporting construction & mining businesses. It is also generated from sustainable improvement, among others innovation on formwork resulting in establishment of Presisi Formwork (Preform) which is developed through cooperation with Kumkang Kind Co., Ltd, South Korea. The Company also conducted a number of feasibility studies for improvement of engineering capability and engineering capacity in the sectors of construction, mining services, dredging, and other sectors in correlation with construction.

As part of stakeholder value increase, PP Presisi is committed to implement Safety, Health, & Environment (SHE) and Corporate Social Responsibility (CSR).

Through sturdy foundation and the Company's focus on growth, PP Presisi is optimistic in being able to generate added value for Shareholders and Stakeholders in a sustainable manner. The spirit of PP Presisi to focus on growth for generating positive value to shareholders and stakeholders is expressed in the 2018 Annual Report "**Focus on Growth**".

Pencapaian 2018

2018 Achievement

Laba Bersih Yang Dapat
Distribusikan Kepada Pemilik
Entitas Induk /
Net Profit Attributable to the
Owner of the Company

Rp
326,4
miliar / billion

73%



Kontrak Yang Dihadapi /
Order Book

14.200,0
miliar / billion

32%



EBITDA /
EBITDA

Rp
926,9
miliar / billion

59%



Ekuitas Yang Dapat
Distribusikan Kepada Pemilik
Entitas Induk /
Equity Attributable to
the Owner of the Company

Rp
2.282,3
miliar / billion

15%

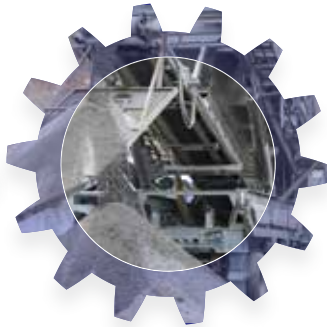


Integrated Business Model

Civil Work



Ready Mix



Foundation



Formwork



Mining Services



Erector



Rental



Integrated To Serve



Infrastructure



Building



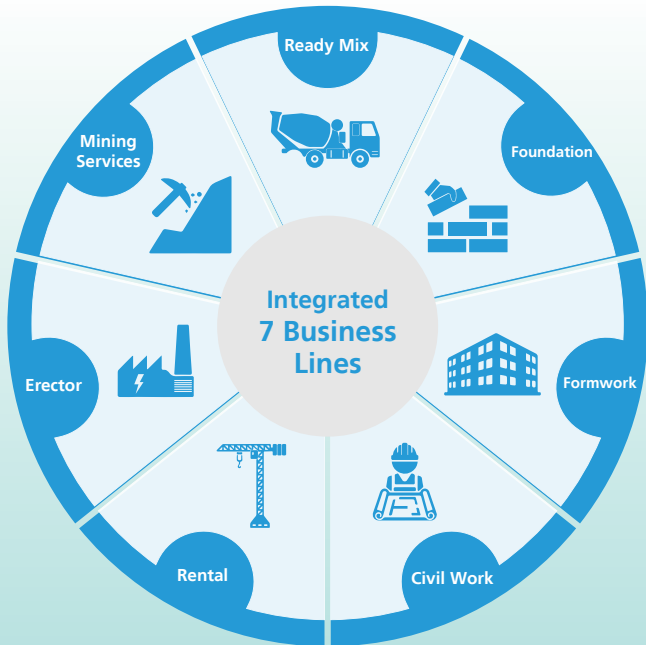
Power Plant



Mining

Roadmap Transformasi Usaha

Business Transformation Roadmap



- Merambah lini bisnis *civil work* lalu *foundation* untuk mendukung bisnis *civil work*, sehingga Perseroan mampu memberikan layanan pekerjaan konstruksi terintegrasi (*integrated construction*) melalui 5 bidangnya, yaitu *civil work*, *ready mix*, *foundation*, *formwork* & *equipment rental*.
 - Mengakuisi PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA) untuk pertumbuhan inorganik
 - IPO 23%
 - Merambah bisnis *coal hauling*
 - Melakukan inovasi pada *formwork*
 - Merambah bisnis *erector*
 - Meningkatkan bisnis *coal hauling* menjadi jasa pertambangan terintegrasi (*integrated mining services*)
 - Perluasan pasar melalui sinergi antar BUMN serta sektor swasta
-
- Entering civil work then foundation to support it, therefore the Company is able to serve integrated construction works through our 5 business lines : civil work, ready mix, foundation, formwork & rental
 - Acquiring PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA) as inorganic growth
 - IPO 23%
 - Entering coal hauling
 - Innovating formwork
 - Entering erector
 - Improving coal hauling to integrated mining services
 - Expanding market through SOEs synergy as well as private sector

Konstruksi Skala Menengah & Rental / Medium Scale Construction & Rental (2013 - 2015)

Leading Integrated Construction (2016 - 2018)

HORIZON II

- Peningkatan *full system structures based formwork* yang kualitasnya telah diterima oleh BUMN lainnya dan perusahaan swasta
 - Merambah lini bisnis ready mix (model B2B)
-
- Improving full system structures based formwork which its quality accepted by other SOEs & private companies
 - Entering ready mix business (B2B model)



HORIZON III

Integrated Construction In Regional (2019 - 2023)

- Meningkatkan kemampuan & kapasitas teknik dalam bidang konstruksi dengan mengakuisisi perusahaan yang bergerak dalam bidang pengusahaan lahan & fondasi & merambah bisnis mekanika kelistrikan untuk bangunan tipe *high rise*
- Mengembangkan & memperluas bisnis non-konstruksi dengan cara :
 - Merambah bisnis *dredging* melalui sinergi antar BUMN
 - Merambah bisnis transportasi & logistik
 - Meningkatkan kapasitas jasa pertambangan terintegrasi (*integrated mining services*) melalui sinergi antar BUMN
- Mengembangkan kerja sama strategis dengan pelaku usaha regional & global
- Sustainable improving engineering capability & capacity in construction related businesses by acquiring soil improvement & foundation company & entering mechanical electrical for high rise building
- Developing & expanding non-construction related businesses by
 - Entering dredging through SOEs synergy
 - Entering transportation & logistic
 - Increasing capacity of integrated mining services through SOEs synergy
- Developing strategic alliances with regional & global players

HORIZON I

Small Scale Construction & Rental (2004 - 2012)

- Penyewaan alat berat & *Formwork* untuk PTPP Group
- Perluasan pasar ke BUMN lain dan perusahaan swasta
- Peningkatan lingkup kerja dari *formwork* ke *full system structures*
- Heavy equipment rental & Formwork to PTPP Group
- Expanding market to other SOEs & private companies
- Improving scope of work from formwork to full system structures



Analisis Dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and
Analysis

106	Tinjauan Umum General Overview	121	Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal Capital Structure and Management Policy on Capital Structure	126	Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi dan Restrukturisasi Utang/Modal Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/Consolidation, Acquisition and Capital/Debt Restructuring
106	Tinjauan Ekonomi Global Global Economic Overview	122	Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal Material Commitment for Capital Goods Investment	126	Informasi Material Mengenai Transaksi Afiliasi dan Mengandung Benturan Kepentingan Material Information on Affiliated Transaction and Transaction Containing Conflict of Interest
107	Tinjauan Ekonomi dan Industri Nasional National Economic and Industrial Overview	122	Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan Material Fact and Information Subsequent to Accountant Reporting Date	127	Perubahan Ketentuan Perundang- Undangan yang Berpengaruh Signifikan Changes in Laws with Significant Impact
108	Tinjauan Industri Konstruksi Nasional Overview on National Construction Industry	123	Analisis Pencapaian Target dengan Realisasi Tahun 2018, dan Proyeksi Tahun 2019 Analysis on Achievement of Target with Realization in 2018 and Projection for 2019	127	Perubahan Kebijakan Akuntansi Changes in Accounting Policy
108	Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha Operational Overview per Business Segment	124	Aspek Pemasaran Marketing Aspect	128	Kelangsungan Usaha Business Continuity
110	Kinerja Anak Perusahaan Performance of Subsidiary	124	Kebijakan Dividen Dividend Policy		
111	Tinjauan Keuangan Financial Overview	125	Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen yang Dilaksanakan Perusahaan (ESOP/ MSOP) Employee and/or Management Stock Option Program (ESOP/MSOP)		
111	Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Consolidated Statements of Financial Position	125	Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Realization of the Use of Proceeds from Public Offering		
115	Laporan Laba / (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income				
117	Laporan Arus Kas Konsolidasian Consolidated Statements of Cash Flows				
119	Rasio Keuangan Financial Ratio				
120	Kemampuan Membayar Utang Solvency				
121	Tingkat Kolektibilitas Piutang Receivables Collectability Rate				

DAFTAR ISI

Table of Contents

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

132	Tujuan Implementasi Tata Kelola Perusahaan Objectives of Good Corporate Governance Implementation	147	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders (GMS)	172	Komite Audit Audit Committee
133	Prinsip Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance Principles	153	Dewan Komisaris The Board of Commissioners	175	Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee
135	Dasar Hukum Penerapan Tata Kelola Perusahaan Legal Basis of Good Corporate Governance Implementation	157	Komisaris Independen Independent Commissioner	178	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
136	Roadmap Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance Roadmap	161	Direksi The Board of Directors	180	Hubungan Investor Investor Relations
137	Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Tahun 2018 Development of Good Corporate Governance Implementation in 2018	168	Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors	181	Satuan Pengawasan Intern Audit Unit
138	Penilaian Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Assessment on Good Corporate Governance Implementation	169	Penilaian terhadap Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Assessment on Performance of The Board of Commissioners and Board of Directors	186	Auditor Eksternal External Auditors
140	Penerapan Aspek Dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Terbuka Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Implementation of Aspects and Principles of Good Corporate Governance in Public Company According to Provisions of Financial Services Authority on Good Corporate Governance Manual of Public Company	170	Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Remuneration Policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors	187	Sistem Pengendalian Internal (SPI) Internal Control System (SPI)
146	Struktur Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance Structure	171	Pengungkapan Hubungan Afiliasi Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali dan/atau Anak Perusahaan Disclosure of Affiliations of the Board of Directors, the Board of Commissioners. And Majority and/or Controlling Shareholders and/or Subsidiaries	187	Sistem Manajemen Risiko Risk Management System
		172	Komite-Komite Di Bawah Dewan Komisaris Committees under the Board of Commissioners	193	Perkara Hukum Tahun 2018 Significant Cases in 2018
				193	Sanksi Administratif Administrative Sanctions
				193	Akses Informasi dan Data Perusahaan Access to Information and Data of the Company
				195	Kode Etik Perseroan Code of Conduct
				198	Kebijakan Anti-KKN Anti-Corruption and Anti-Fraud Policy
				198	Kebijakan terkait Aktivitas Politik Policy on Political Activities
				198	Kebijakan Pencegahan <i>Insider Trading</i> Policy on Insider Trading Prevention
				199	Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

- 206 Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Policy on Corporate Social Responsibility
- 206 Tujuan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Objectives of Corporate Social Responsibility Implementation
- 207 Dasar Hukum Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Legal Basis of Corporate Social Program Implementation
- 207 Target dan rencana kegiatan csr 2018
Target and Plan of CSR in 2018
- 207 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Lingkungan
Corporate Social Responsibility on Environment
- 208 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja
Corporate Social Responsibility on Manpower, Occupational Health and Safety
- 211 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial dan Masyarakat
Corporate Social Responsibility on Social and Community Development
- 212 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pelanggan
Corporate Social Responsibility to Customers

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2018 PT PP Presisi Tbk
Board of Commissioners' and Board of Directors' Statement Regarding Responsibility for PT PP Presisi Tbk Annual Report 2018



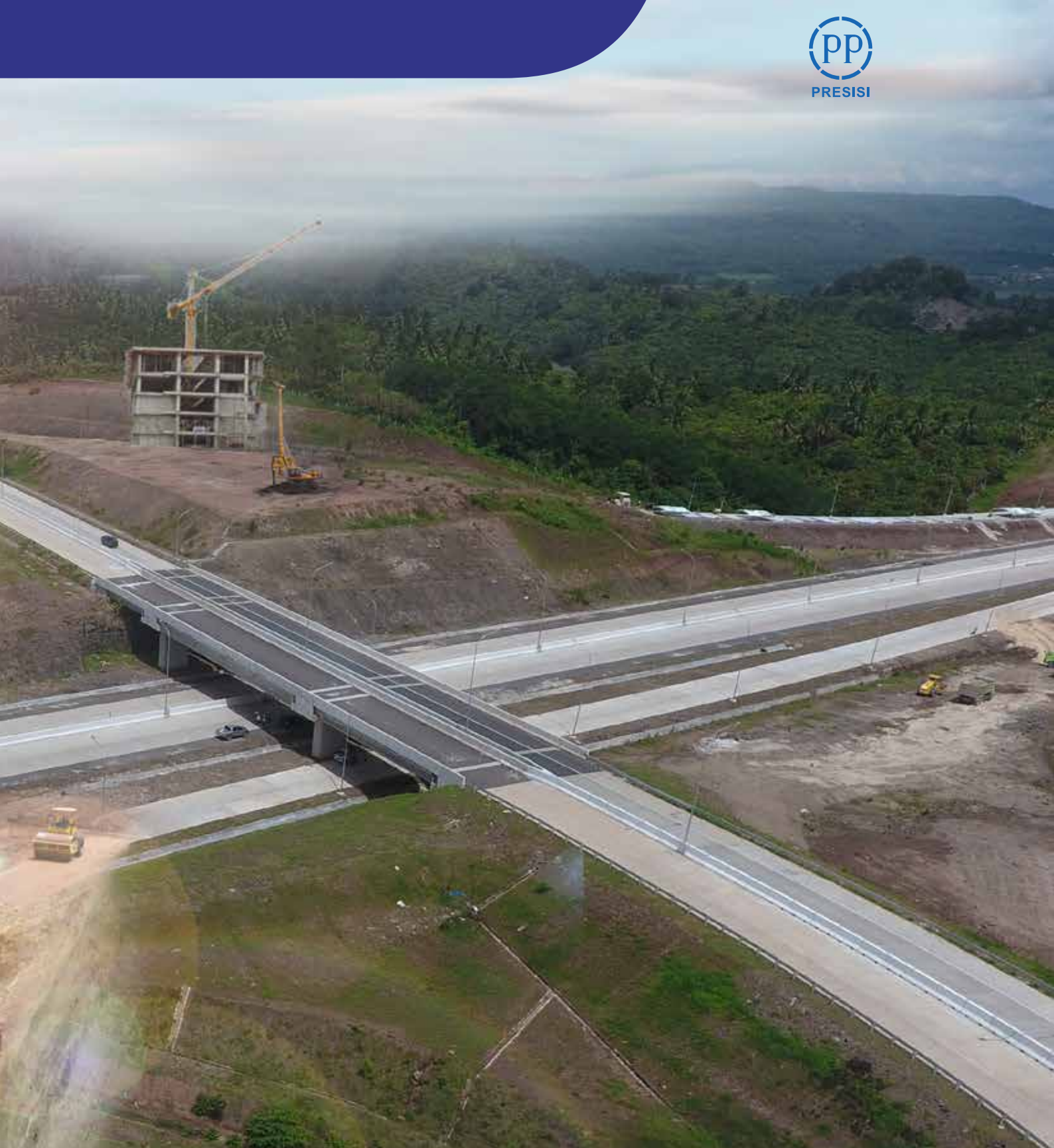
“

Pendapatan bersih PT PP Presisi Tbk tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 68,0% dari tahun sebelumnya, sehingga menjadi Rp3,0 triliun.

Net revenue of PT PP Presisi Tbk grew by 68.0% to Rp3.0 trillion from the previous year.

01





Kilas Kinerja 2018

2018 Flashback Performance

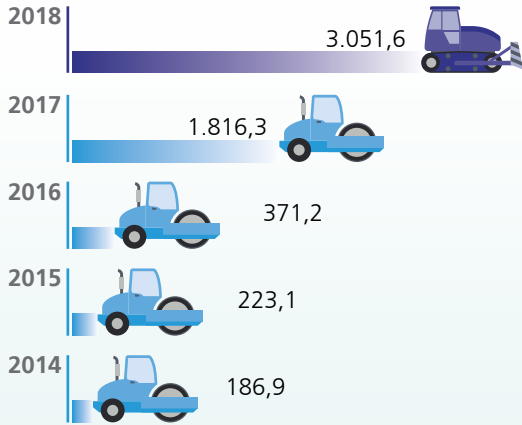


Grafik Ikhtisar Keuangan

Financial Highlights Charts

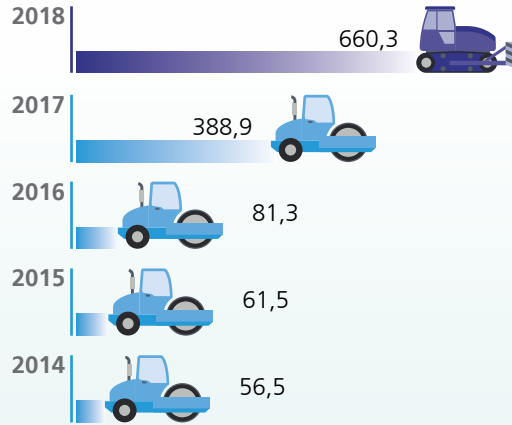
Pendapatan

Revenue



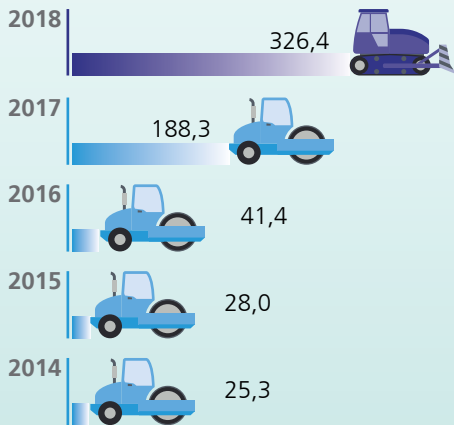
Laba Usaha

Operating Profit

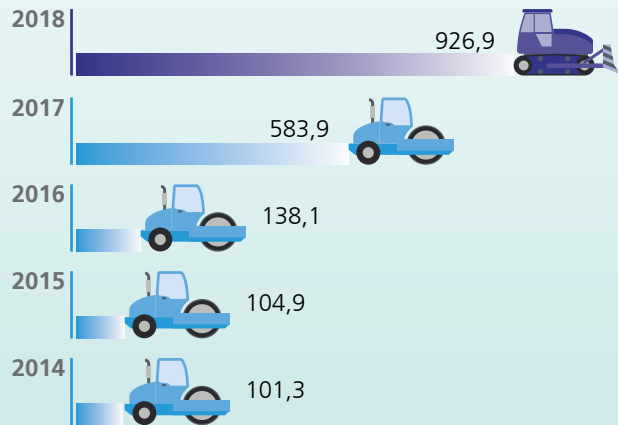


Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk

Net Profit Attributable to the Owner of the Company

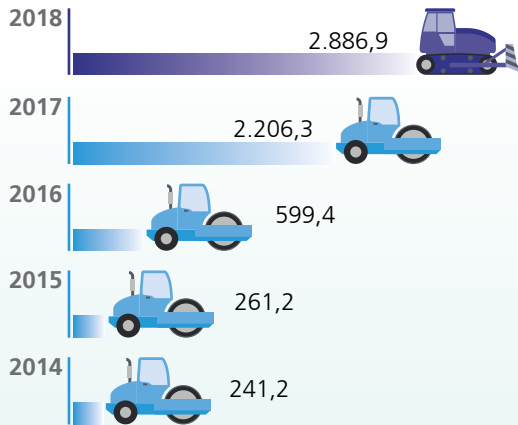


EBITDA



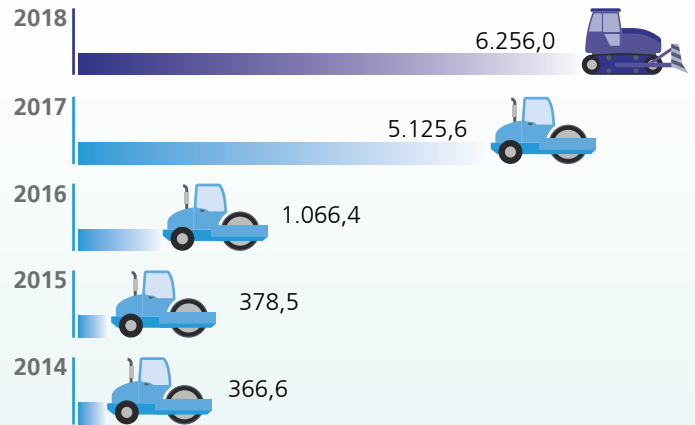
Aset Tetap - Bersih

Net Fixed Asset

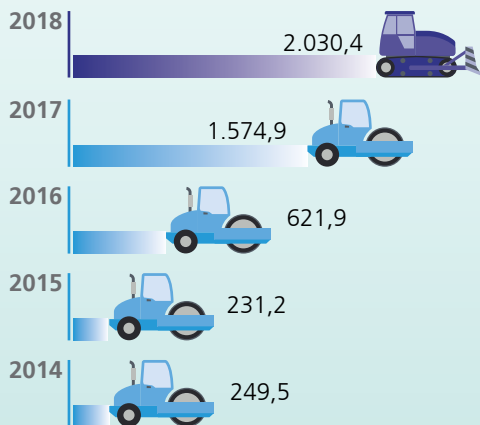


Jumlah Aset

Total Assets

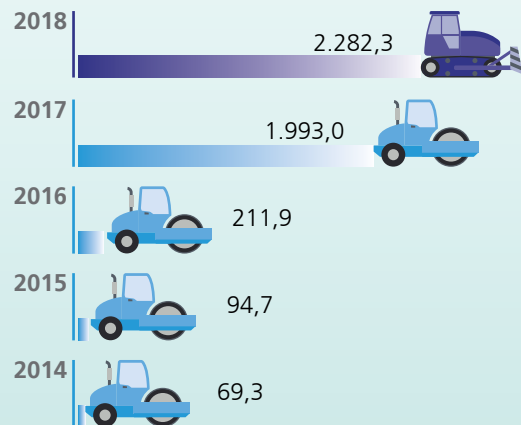


Debt



Jumlah Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk

Total Equity Attributable to the Owner of the Company



Ikhtisar Keuangan Penting

Key Financial Highlights

Dalam miliar Rupiah / In billion Rupiah

Uraian / Description	2014	2015	2016	2017*	2018
Laporan Posisi Keuangan / Statements of Financial Position					
Aset Lancar / Current Assets	125,5	117,3	467,0	2.661,1	3.118,8
Aset Tidak Lancar / Non-Current Assets	241,2	261,2	599,4	2.464,5	3.137,2
Jumlah Aset / Total Assets	366,6	378,5	1.066,4	5.125,6	6.256,0
Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities	100,1	115,0	558,8	1.408,2	1.740,8
Liabilitas Jangka Panjang / Non-Current Liabilities	197,2	168,9	295,6	1.277,2	1.678,4
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	297,3	283,9	854,4	2.685,4	3.419,2
Jumlah Ekuitas / Total Equity	69,3	94,7	211,9	2.440,1	2.836,8
Debt	249,5	231,2	621,9	1.574,9	2.030,4
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada : / Equity attributable to:					
Pemilik Entitas Induk / Owners of the Company	69,3	94,7	211,9	1.993,0	2.282,3
Keuntungan Non – Pengendali / Non-Controlling Interest	-	-	-	447,2	554,4
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas / Total Liabilities and Equity	366,6	378,5	1.066,4	5.125,6	6.256,0
Laporan Laba Rugi / Statements of Profit or Loss					
Pendapatan Bersih / Net Revenue	186,9	223,1	371,2	1.816,3	3.051,6
Harga Pokok Pendapatan / Cost of Revenue	(121,2)	(151,8)	(276,0)	(1.370,4)	(2.308,3)
Laba Kotor / Gross Profit	65,7	71,3	95,2	445,9	743,3
Beban Usaha / Operating Expenses	(10,2)	(10,1)	(13,9)	(57,0)	(83,0)
Laba Usaha / Operating Profit	56,5	61,5	81,3	388,9	660,3
Jumlah Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada: / Total Profit for the Year Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk / Owners of the Company	25,3	28,0	41,4	188,3	326,4
Keuntungan Non – Pengendali / Non-Controlling Interest	-	-	-	56,2	105,8
Jumlah Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada: / Total Comprehensive Income Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk / Owners of the Company	25,3	28,0	41,4	190,6	345,8
Keuntungan Non – Pengendali / Non-Controlling Interest	-	-	-	56,6	123,3
Laba Per Saham Dasar (Rp penuh) / Basic Earnings Per Share (Rp full amount)**	819.034,0	874.222,0	116,0	41,2	31,8
EBITDA	101,3	104,9	138,1	583,9	926,9
Laporan Arus Kas / Statements of Cash Flows					
Arus Kas dari Aktivitas Operasi / Cash Flows from Operating Activities	77,3	85,3	110,2	351,1	320,9
Arus Kas dari Aktivitas Investasi / Cash Flows from Investing Activities	(62,1)	(63,0)	(272,0)	(1.657,1)	(960,3)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan / Cash Flows from Financing Activities	(4,4)	(41,4)	362,8	2.211,5	137,9
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas / Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	19,6	(19,2)	201,0	905,5	501,5
Kas dan Setara Kas Yang Diperoleh Dari Akuisisi Entitas Anak / Cash and Cash Equivalent from Acquisition of a Subsidiary	-	-	-	160,0	-
Saldo Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun / Cash and Cash Equivalents Beginning	9,5	29,1	9,9	211,0	1.132,5
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun / Cash and Cash Equivalent Ending	29,1	9,9	211,0	1.132,5	630,9
Rasio Keuangan / Financial Ratios					
Pertumbuhan Pendapatan / Revenue Growth	63,0%	19,4%	66,4%	389,3%	68,0%
Marjin Laba Bruto / Gross Profit Margin	35,2%	32,0%	25,6%	24,5%	24,4%
Marjin Laba Usaha / Operating Profit Margin	29,7%	27,4%	21,9%	21,4%	21,6%
Marjin Laba Bersih / Net Profit Margin	13,5%	12,5%	11,1%	10,4%	10,7%
Marjin EBITDA / EBITDA Margin	53,9%	47,0%	37,2%	32,1%	30,4%
Rasio EBITDA terhadap Beban Bunga (X) / EBITDA to Interest Ratio (X)	4,5	4,1	5,2	6,5	5,5
Rasio Net Debt terhadap EBITDA (X) / Net Debt to EBITDA Ratio (X)	2,2	2,1	2,9	0,8	1,5
Rasio Laba Bersih terhadap Total Aset / Return on Total Assets	6,9%	7,4%	3,9%	3,7%	5,2%
Rasio Laba Bersih Terhadap Total Ekuitas / Return on Total Equity	36,5%	29,6%	19,5%	9,4%	14,3%
Rasio Lancar (X) / Current Ratio (X)	1,3	1,0	0,8	1,9	1,8
Rasio Kewajiban Berbunga terhadap Total Ekuitas (X) / Debt to Total Equity Ratio (X)	3,6	2,4	2,9	0,8	0,9
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Total Aset (X) / Total Liabilities to Total Assets Ratio (X)	0,8	0,7	0,8	0,5	0,5
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Total Ekuitas (X) / Total Liabilities to Total Equity Ratio (X)	4,3	3,0	4,0	1,3	1,5

* Consolidation since July 2017

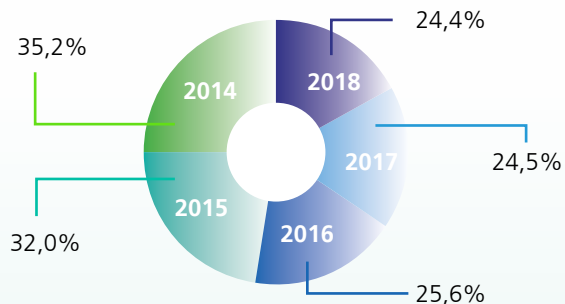
** average number of outstanding share (2017: 4,576,393,614 shares and 2018: 10,224,271,000 shares)

Grafik Rasio Keuangan

Financial Ratios Chart

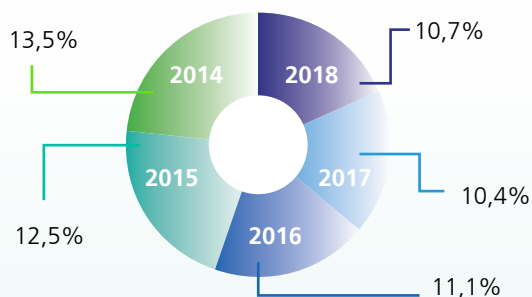
Marjin Laba Bruto

Gross Profit Margin

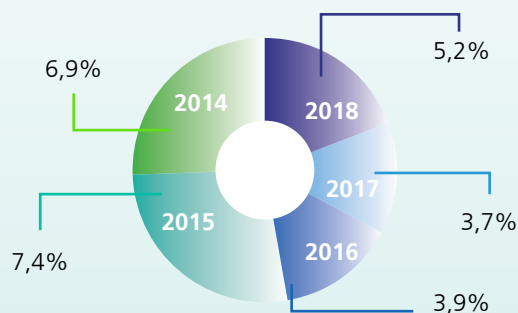


Marjin Laba Bersih

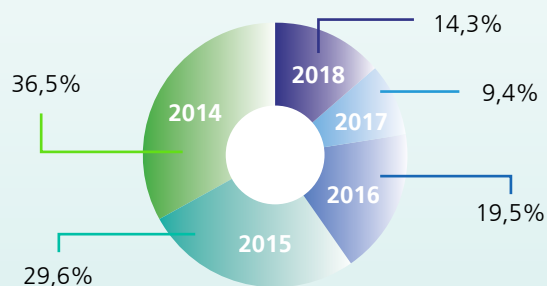
Net Profit Margin



ROA

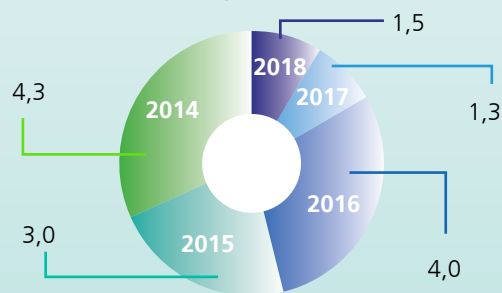


ROE



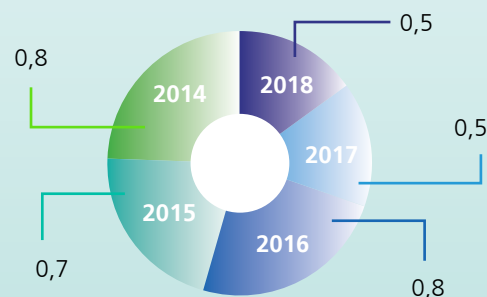
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Total Ekuitas (X)

Total Liabilities to Total Equity Ratio (X)

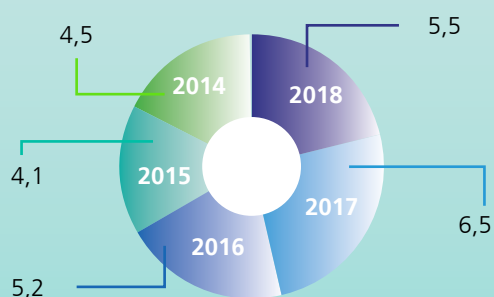


Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Total Aset (X)

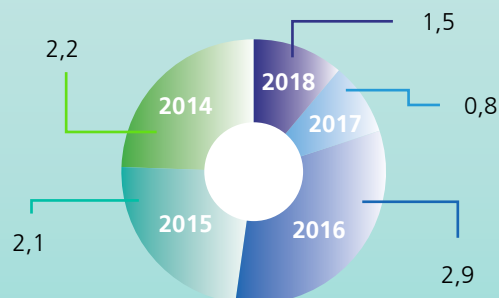
Total Liabilities to Total Assets (X)



EBITDA to Interest



Net Debt to EBITDA



Informasi Bagi Investor

Information for Investors

IKHTISAR SAHAM / SHARE HIGHLIGHTS

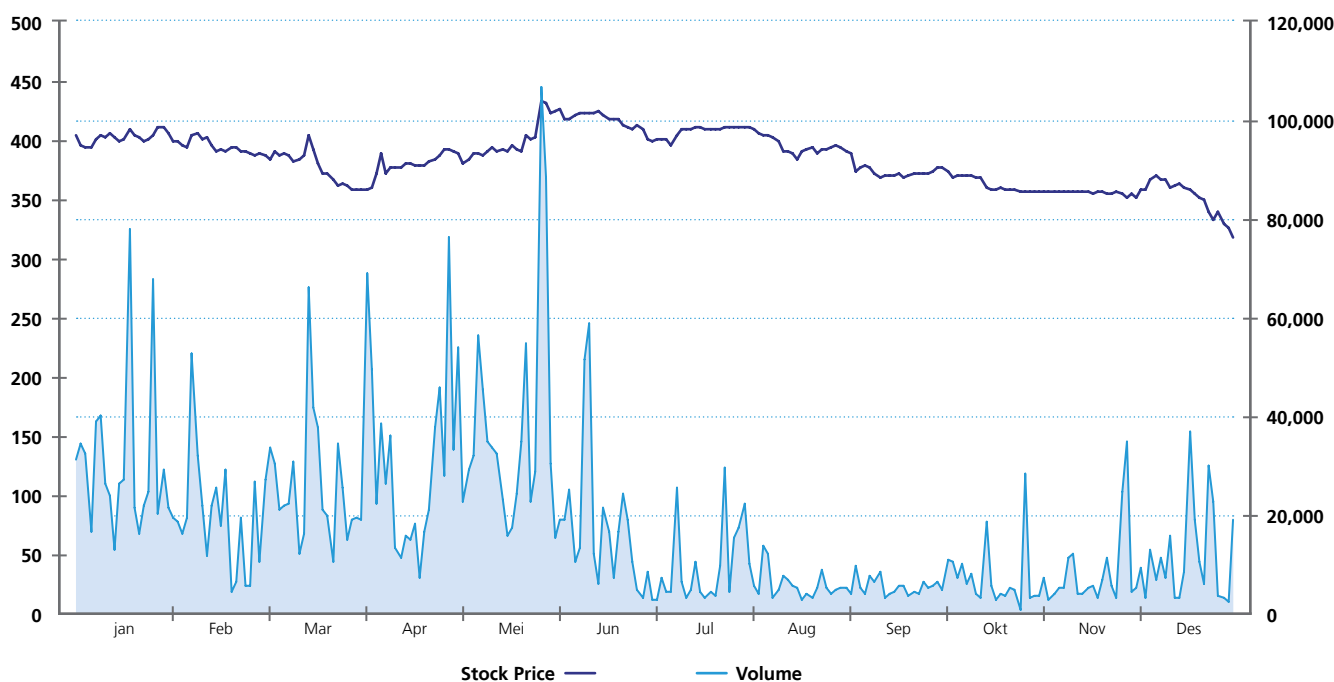
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia /
Share Listing Date on Indonesia Stock Exchange :
24 November 2017 / November 24, 2017

Kode Saham / Ticker Code :
PPRE

Jumlah Penawaran Umum Perdana /
Total Initial Public Offering :
2.351.221.000 (23%)
Jumlah saham tercatat di Bursa Efek Indonesia /
Shares Listed on Indonesia Stock Exchange :
10.224.271.000
Harga Penawaran Perdana Saham /
Initial Public Offering Price :
Rp430/lembar/share

Informasi Harga Saham / Share Price Information

Triwulan / Quarter	Jumlah Saham yang Beredar (Rp) / Total Outstanding Shares (Rp)	Harga Saham / Share Price			Volume Perdagangan (Dalam Lot) / Trade Volume (In Lot)	Kapitalisasi Pasar (Dalam Rp Triliun) / Market Capitalization (In Trillion Rp)
		Tertinggi (Rp) / Highest (Rp)	Terendah (Rp) / Lowest (Rp)	Penutupan (Rp) / Closing (Rp)		
2018						
I	10.224.271.000	420	354	360	1,641,014	3.7
II	10.224.271.000	446	360	408	1,597,562	4.2
III	10.224.271.000	420	364	374	431,981	3.8
IV	10.224.271.000	380	314	318	558,237	3.3
2017						
I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
II	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
III	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
IV	10.224.271.000	440	318	416	2,788,581	4.3



Aksi Korporasi

Corporate Action

Hingga akhir tahun 2018, Perseroan tidak memiliki Aksi Korporasi.

As of the end of 2018, the Company did not conduct any Corporate Actions.

Informasi Sanksi Perdagangan

Information On Trade Sanction

Hingga akhir tahun 2018, Perseroan tidak pernah dikenakan sanksi terkait penghentian sementara perdagangan saham (suspense) atau penghapusan pencatatan saham di bursa efek yang diakibatkan pelanggaran ketentuan yang berlaku di bursa.

As of the end of 2018, there were no sanctions imposed upon the Company regarding temporary suspension of share trading or delisting in stock exchange caused by violation on prevailing provisions in the exchange.

Ikhtisar Efek Lainnya

Other Securities Highlights

Hingga akhir tahun 2018, Perseroan tidak menerbitkan efek lain seperti obligasi/sukuk/obligasi konversi di bursa efek manapun, sehingga tidak terdapat informasi mengenai ikhtisar efek lainnya.

Until the end of 2018, the Company did not issue other securities, such as bonds/sukuk/convertible bonds in any stock exchange



Jejak Langkah

Milestones

Mei / May

Berganti nama menjadi PT PP Presisi ("PP Presisi")

Changed name to PT PP Presisi ("PP Presisi")

Juni / June

Mengakuisisi 51% saham PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("LMA")

Acquired 51% of shares of PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("LMA")

Juli / July

PTPP meningkatkan modal di PP Presisi
PTPP added capital in PP Presisi

November / November

PP Presisi tercatat sebagai Emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI)

PP Presisi listed as Issuer in Indonesia Stock Exchange (IDX)

Juni / June

Memulai transformasi bisnis dengan memasuki lini bisnis Formwork

Began business transformation by engaging in Formwork business line

September / September

Memasuki bisnis Ready Mix

Entered Ready Mix business

Mei / May

Didirikan sebagai PT Prima Jasa Aldodua (PT PJA) yang menyediakan jasa penyewaan peralatan

Established as PT Prima Jasa Aldodua (PT PJA) providing equipment rental services

2018

2017

2016

2015

2014

2004

Januari / January

Penandatanganan MoU dengan Perusahaan Korea Selatan, Kumkang Kind Co, Ltd. tentang Teknologi Baru Formwork
Signing of MoU with a South Korean Company, Kumkang Kind Co. Ltd. concerning new Formwork Technology

Juni / June

- Memasuki bisnis Erector
- Meningkatkan pengangkutan batubara (*coal hauling*) menjadi layanan penambangan terintegrasi
- Entering Erector business
- Improving coal hauling to be an integrated mining services

September / September

Memasuki usaha Pekerjaan Sipil dengan fokus pada Proyek Jalan Tol dan Bendungan
Entered Civil Work business by focusing on Toll Road Projects and Dam

Juni / June

Diakuisisi oleh PT PP (Persero) Tbk ("PTPP") dan diganti namanya menjadi PT PP Alat Konstruksi ("PP Alkon")

Acquired by PT PP (Persero) Tbk ("PTPP") and changed its name to PT PP Alat Konstruksi ("PP Alkon")

Juli / July

Berganti nama menjadi PT PP Peralatan Konstruksi ("PP Peralatan")

Changed name to PT PP Peralatan Konstruksi ("PP Peralatan")



Peristiwa Penting 2018

2018 Event Highlights

Januari / January



Penandatanganan MOU dengan Kumkang Kind Co. Ltd. Korea Selatan

Kumkang & PP Presisi akan mengembangkan Preform (Presisi *formwork*) di Indonesia dengan menggunakan teknologi mereka. Proyek The Aoyama Apartment & Evencio Apartment merupakan *Pilot Project* dari kerja sama ini diikuti oleh 11 proyek lain

MOU signing with Kumkang Kind Co.Ltd. South Korea

Kumkang & PP Presisi will develop Preform (Presisi *formwork*) in Indonesia by adopting their technology. The Aoyama Apartment & Evencio Apartment as Pilot Project followed by 11 other projects



Mendapatkan Kontrak Pengangkutan Batubara dengan Barasentosa Lestari, Sinarmas Mining

Obtained Coal Hauling Contract by Barasentosa Lestari, member of Sinarmas Mining

Februari / February



Mendapatkan Kontrak Pengangkutan Batubara dengan Triaryani, anggota Rajawali Resources

Acquired Coal Transportation Contract with Triaryani, a member of Rajawali Resources

Maret / March



Mendapatkan kontrak *ready mix* dengan PLTA Peusangan, Takengon, DI Aceh

Obtained ready mix contract supply by PLTA Peusangan, Takengon, DI Aceh



PP Presisi menjadi tuan rumah penyelenggaraan CEO Talk PT PP (Persero) Tbk yang bertema "Safety is Our Priority" diikuti oleh segenap manager dan project manager di lingkungan PT PP (Persero) Tbk beserta entitas anak.

PP Presisi hosted the CEO Talk PT PP (Persero) Tbk event with the theme "Safety is Our Priority", attended by all managers and project managers within PT PP (Persero) Tbk and subsidiaries.

April / April



Mendapatkan Kontrak *Formwork* dengan Pakuwono Menteng Apartment

Obtained Formwork Contract by Pakuwono Menteng Apartment

Mei / May



Mendapatkan Kontrak Pembuatan Jalan Akses PLTA Cisokan

Obtained Contract for Development of PLTA Cisokan Access Road

Juni / June



Mendirikan Usaha *Erector*

Established Erector Business



Mendapatkan kontrak *Erector* – PLTD Senayan & Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Bangkanai

Obtained Erector contract – PLTD Senayan & Gas Engine Power Plant (PLTMG) *Bangkanai*



Meningkatkan kemampuan teknik & kapasitas dari pengangkutan batubara menjadi jasa pertambangan terintegrasi

Improving engineering capability & capacity from coal hauling to integrated mining services

Juli / July



Mendapatkan kontrak Seksi 1 Landasan Pacu 3 Soetta

Obtained 3rd Runway Soetta Section 1 contract

Agustus / August



Mendapatkan kontrak tambahan Tol Pandaan Malang – *addendum*

Obtained additional contract Tol Pandaan Malang - addendum



PP Presisi berpartisipasi di dalam Investor Summit 2018 yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama dengan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), serta didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

PP Presisi participated in Investor Summit 2018 held by Indonesia Stock Exchange (IDX) with Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) and Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), and supported by Financial Services Authority (OJK)

September / September



Mendapatkan Kontrak *Formwork* Grand Dharmahusada Lagoon Surabaya – Olive Tower

Obtained Formwork Contract Grand Dharmahusada Lagoon Surabaya-Olive Tower



Membangun Aliansi Strategis dengan Pelaku Bisnis Regional & Global
Kunjungan Perusahaan ke Royal IHC, Belanda

Developing Strategic Alliances With Regional & Global Players
Company Visit to Royal IHC, Netherlands

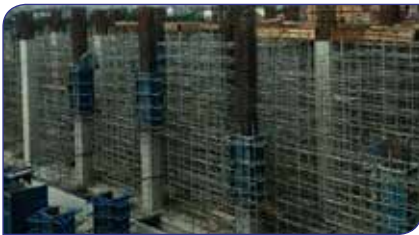
Oktober / October



Mendapatkan kontrak *Boredpile* – Grand Sungkono Lagoon

Obtained Boredpile contract -Grand Sungkono Lagoon

November / November



Mendapatkan kontrak *Formwork* – Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin

Obtained Formwork contract-Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin



Membangun Aliansi Strategis dengan Pelaku Bisnis Regional & Global
Kunjungan Perusahaan ke Sunward Intelligent Equipment Co. Ltd. Tiongkok

Developing Strategic Alliances With Regional & Global Players
Company Visit to Sunward Intelligent Equipment Co. Ltd. China

Desember / December



Mendapatkan Kontrak *Mining* – sebuah perusahaan di Kalimantan Timur

Obtained Mining Contract – a coal company at East Kalimantan

Penghargaan Dan Sertifikasi

Awards and Certifications



Penghargaan “Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan Hasil Pencapaian 89,06% untuk kategori tingkat awal” dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada tanggal 30 Juli 2018

“Occupational Health and Safety Management System, with achievement of 89.06% for early level category” from The Ministry of Manpower of The Republic of Indonesia on July 30, 2018



Sertifikasi BS EN ISO 14001 : 2015 dari NQA. Masa berlaku sampai tanggal 19 September 2018

BS EN ISO 14001 : 2015 Certification from NQA. Valid until September 19, 2018



Sertifikasi BS OHSAS 18001 : 2007 dari NQA. Masa berlaku sampai tanggal 24 Agustus 2018

BS OHSAS 18001 : 2007 Certification from NQA. Valid until August 24, 2018



Sertifikasi BS EN ISO 9001 : 2015 dari NQA. Masa berlaku sampai tanggal 24 Agustus 2018

BS EN ISO 9001 : 2015 Certification from NQA. Valid until August 24, 2018



Dengan mengusung visi sebagai perusahaan konstruksi berbasis alat berat terintegrasi yang terkemuka di Indonesia dan regional, Perseroan memiliki strategi jangka panjang untuk selalu tumbuh secara berkelanjutan melalui transformasi bisnis sebagai bagian dari proses penciptaan nilai (value creation) secara berkelanjutan.

By carrying out the vision as a leading integrated heavy equipment-based construction company in Indonesia and regionally, the Company has a long-term strategy to always grow sustainably through business transformation as part of a continuous process of value creation.





Laporan Manajemen

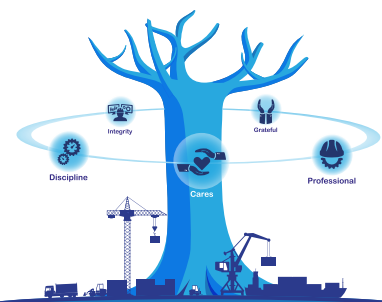
Management Report





Ir. M. Toha Fauzi, MT
Komisaris Utama
President Commissioner

Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report



Dewan Komisaris mengapresiasi upaya Direksi dalam meningkatkan hasil realisasi kinerja Perseroan, baik aspek operasional maupun keuangan secara signifikan.

The Board of Commissioners appreciates the efforts of the Board of Directors in improving the Company's performance, both in operational and financial aspects significantly.



Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Di tengah dinamika ekonomi dan persaingan bisnis yang semakin masif sepanjang tahun 2018, PP Presisi tetap mampu menorehkan catatan kinerja yang membanggakan melalui transformasi dan pengembangan bisnis. Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai pertumbuhan dan memberikan lebih banyak nilai bagi para pemangku kepentingan.

Pada kesempatan ini, kami selaku Dewan Komisaris akan menyampaikan laporan kinerja dan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan sepanjang tahun 2018, yang meliputi penilaian terhadap kinerja Direksi dalam menjalankan dan mengelola PP Presisi, pengawasan atas implementasi strategi bisnis, pandangan atas prospek usaha Perseroan ke depan, pandangan atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, penilaian atas implementasi *Whistleblowing System* (WBS) dan fungsi kami dalam pelaksanaan WBS di Perseroan, pandangan atas penerapan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, penilaian terhadap kinerja Komite Penunjang Dewan Komisaris.

Dear Valued Shareholders and Stakeholders,

Amid the increasingly massive economy dynamics and business competition in 2018, PP Presisi remained to be able to record satisfying performance through business transformation and development. This was conducted in order to achieve growth and generate more value for stakeholders.

On this occasion, we, the Board of Commissioners, would like to present report of performance and implementation of supervisory function on the Company's management in 2018 which include assessment on performance of the Board of Directors in running and managing PP Presisi, supervision on implementation of business strategy, views on the Company's business prospects in the futures, views on implementation of Good Corporate Governance, assessment on Whistleblowing System (WBS) implementation and our function in WBS implementation in the Company, views on implementation of Corporate Social Responsibility, assessment on Supporting Committees of the Board of Commissioners.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Secara rutin, Dewan Komisaris melaksanakan penilaian atas kinerja Direksi sepanjang tahun buku dalam rangka menyempurnakan kinerja Perseroan secara berkelanjutan. Hasil penilaian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan acuan bagi Direksi dalam menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan bisnis yang tepat dan akurat di masa depan. Guna menghasilkan penilaian kinerja yang kredibel dan komprehensif, Dewan Komisaris senantiasa bersandar pada beberapa instrumen dasar penilaian, yang meliputi *business development*, peningkatan *engineering capability & capacity*, *innovation*, *creating value*, peningkatan *internal control*, dan peningkatan praktik GCG.

Menurut penilaian kami, Direksi berhasil menjalankan pengelolaan bisnis Perseroan sepanjang tahun 2018 dengan sangat baik, meski kondisi perekonomian belum sepenuhnya membaik akibat adanya Perang Dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok sehingga berdampak pada melemahnya Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS di pertengahan tahun buku. Penilaian tersebut didasarkan pada hasil realisasi kinerja Perseroan, baik pada aspek operasional maupun keuangan yang mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Realisasi kinerja tahun ini juga banyak yang berhasil melampaui target Perseroan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2018.

Realisasi perolehan kontrak baru di tahun 2018 tercapai sebesar Rp5,2 triliun atau mencapai 104,0% dari target perolehan kontrak baru yang tercantum dalam RKAP 2018 yakni sebesar Rp5,0 triliun. Perolehan kontrak baru tersebut menyebabkan adanya peningkatan perolehan total nilai kontrak yang dihadapi atau *order book* sebesar Rp3,4 triliun dari nilai kontrak yang dihadapi tahun 2017 yakni sebesar Rp10,8 triliun menjadi Rp14,2 triliun pada tahun 2018.

Sedangkan realisasi pendapatan bersih di tahun 2018 tercapai sebesar Rp3,1 triliun atau mencapai 69,1% dari RKAP 2018. Untuk perolehan laba bersih yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sepanjang tahun 2018 tercatat sebesar Rp326,4 miliar atau mencapai 102,4% dari RKAP 2018.

Melihat pencapaian Direksi dalam menjalankan kinerja Perseroan sepanjang tahun buku, Dewan Komisaris memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas usaha yang dilakukan oleh seluruh jajaran Direksi dan bawahannya dalam rangka mewujudkan tercapainya target-target bisnis Perseroan.

Kedepannya, Dewan Komisaris berharap agar Direksi terus melakukan upaya terbaiknya dalam rangka meningkatkan kinerja Perseroan, tanggap dalam menghadapi perubahan baru maupun berbagai kendala bisnis demi mempertahankan keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan.

ASSESSMENT ON THE BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE

The Board of Commissioners routinely performs assessment on the Board of Directors' performance throughout the fiscal year in order to improve the Company's performance in a sustainable manner. The result of this assessment can be used as evaluation and reference materials for the Board of Directors in formulating proper and accurate policies as well as business management strategies in the years to come. In order to have credible and comprehensive performance assessment, the Board of Commissioners always refers to several basic assessment instruments, such as business development, improvement of engineering capability & innovation capacity, creating value, internal control improvement, and improvement of GCG practices.

In our assessment, the Board of Directors managed to run the Company's business management in an excellent manner in 2018 despite the economic condition that was not fully recovered due to Trade War between the United States and China which resulted in weakening of Rupiah Exchange Rate to US Dollar in the middle of fiscal year. Such assessment was based on result of the Company's performance, both in operational and financial aspects that had a significant increase compared to that of the previous year. There were many performance realizations that exceeded the Company's targets set in 2018 Work Plan and Budget (RKAP).

Realization of new contract acquisition in 2018 was recorded at 5.2 trillion or reached 104.0% from target of new contract acquisition stipulated in 2018 RKAP, namely amounting to 5.0 trillion. Acquisition of new contracts resulted in the increase of total order book amounted to Rp3.4 trillion from 2017 order book that was at Rp10.8 trillion to Rp14.2 trillion in 2018.

Meanwhile, realization of net revenue in 2018 was recorded at Rp3.1 trillion or reached 69.1% from 2018 RKAP. Net profit attributable to owners of the Company in 2018 amounted to Rp326.4 billion or 102.4% of 2018 RKAP.

Considering the achievement of the Board of Directors in managing the Company's performance throughout fiscal year, the Board of Commissioners would like to give the greatest appreciation for efforts exerted by the Board of Directors and their subordinates in reaching business targets of the Company.

Going forward, the Board of Commissioners expects the Board of Directors to continue to give their best effort in order to improve the Company's performance, responsive to new changes or various business issues to maintain business continuity and growth in a sustainable manner.

PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI PERSEROAN

Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan terhadap kebijakan dan strategi bisnis yang diterapkan oleh Direksi dalam menjalankan pengelolaan Perseroan. Pelaksanaan tugas pengawasan tersebut dilakukan antara lain melalui telaahan yang dilakukan oleh Komite Audit serta Komite Nominasi & Remunerasi. Di samping melalui mekanisme rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi.

Di samping itu, Dewan Komisaris senantiasa berkoordinasi dengan Direksi, baik melalui komunikasi formal maupun informal. Tak hanya dengan Direksi, kami juga terus membangun koordinasi yang baik dengan Entitas Induk Perseroan sekaligus pemegang saham utama PP Presisi, yakni PT PP (Persero) Tbk dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap implementasi strategi bisnis Perseroan agar sesuai dengan arahan dan kebijakan dari PTPP.

MEKANISME PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI

Dalam rangka menjaga kinerja Perseroan agar selalu sesuai dengan Anggaran Dasar PP Presisi, RKAP tahun 2018, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris selalu memberikan saran, arahan dan rekomendasi terhadap Direksi. Saran dan rekomendasi tersebut disampaikan melalui Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi, yang mana pada tahun 2018 telah melaksanakan Rapat Gabungan sebanyak 4 (empat) kali pertemuan.

SUPERVISION ON IMPLEMENTATION OF THE COMPANY'S STRATEGIES

Throughout 2018, the Board of Commissioners has carried out duties and responsibilities in supervision on business policies and strategies implemented by the Board of Directors in managing the Company. The supervisory duty was carried out through review conducted by Audit Committee as well as Nomination & Remuneration Committee, aside from joint meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors.

In addition, the Board of Commissioners continues to coordinate with the Board of Directors through both formal and informal communications. Other than the Board of Directors, we also continue to develop good coordination with Parent Entity of the Company as well as majority shareholder of PP Presisi, namely PT PP (Persero) Tbk in order to improve implementation of supervisory function on the Company's business strategy implementation so that it is in accordance with direction and policy of PTPP.

MECHANISM OF ADVISORY FUNCTION TO THE BOARD OF DIRECTORS

To maintain the Company's performance to be in accordance with the Articles of Association of PP Presisi, 2018 RKAP, as well as the prevailing laws and regulations, the Board of Commissioners always provides suggestions, directions, and recommendations to the Board of Directors. The suggestions and recommendations are delivered through Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors that were held 4 (four) times during 2018.



Beberapa saran yang diberikan oleh Dewan Komisaris terhadap Direksi terkait pengelolaan bisnis sepanjang tahun 2018 antara lain:

1. Kelangsungan transformasi bisnis;
2. Pertumbuhan yang berkelanjutan;
3. Penciptaan nilai dan inovasi yang dilakukan secara berkelanjutan; dan
4. Peningkatan internal kontrol & praktik GCG.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN DIREKSI

Menurut pandangan kami, Direksi telah melakukan penyusunan RKAP tahun 2019 dengan sangat strategis. Penyusunan tersebut dilakukan oleh Direksi dengan memperhatikan berbagai aspek seperti asumsi-asumsi makroekonomi yang kredibel, peluang dan potensi bisnis yang diperkirakan dapat dimanfaatkan oleh Perseroan berikut upaya-upaya strategis dan rencana bisnis yang tepat, serta aspek lainnya seperti tren kinerja industri konstruksi nasional seiring dengan adanya fokus kebijakan pemerintah terhadap penguatan dan percepatan pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam Program Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.

Berkaca pada portofolio kinerja yang sangat baik sepanjang tahun 2018, kami optimis Direksi mampu meningkatkan performa bisnis Perseroan di tengah dinamika dan perkembangan industri yang semakin progresif melalui berbagai langkah strategis, seperti peluncuran inovasi dan terobosan baru guna mendukung upaya pengembangan bisnis, penguatan aspek Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Perseroan, serta selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dalam melaksanakan investasi maupun kegiatan bisnis lainnya.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Dewan Komisaris berpandangan, penerapan prinsip-prinsip GCG secara menyeluruh dan konsisten mampu mendorong peningkatan kinerja Perseroan secara berkelanjutan dan menghindarkan Perseroan dari segala praktik-praktik *bad corporate governance*, sehingga mampu menciptakan nilai tambah bagi para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan.

Pemenuhan Infrastruktur GCG

Dewan Komisaris menilai, hingga tahun 2018 Perseroan telah merealisasikan komitmennya dalam menerapkan GCG di lingkungan PP Presisi dengan sangat baik. Komitmen tersebut dituangkan melalui pengesahan Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT PP Presisi Tbk oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai dasar pelaksanaan proses GCG di lingkungan Perseroan secara keseluruhan. Pedoman Pelaksanaan GCG ini berisikan kaidah, norma, ataupun

The suggestions from the Board of Commissioners for the Board of Directors in relation to business management throughout 2018, among others:

1. Business transformation continuity;
2. Sustainable growth;
3. Sustainable value creation and innovation; and
4. Internal control & GCG practices improvement.

VIEWS ON BUSINESS PROSPECT PREPARED BY THE BOARD OF DIRECTORS

We considered the Board of Directors has prepared 2019 Work Plan and Budget (RKAP) in a highly strategic manner. Such preparation was conducted by the Board of Directors by considering various aspects, such as macro economy assumptions that are credible, business opportunities and potentials that are expected to be able to be utilized by the Company, as well as strategic efforts and accurate business plans, and other aspects, such as trend of performance of national construction industry in line with the government's policy focus on strengthening and accelerating national infrastructure development as set in National Medium Term Development Program (RPJMN) of 2014-2019.

Reflected on performance portfolio throughout 2018 that was highly satisfying, we are optimistic that the Board of Directors is capable of improving business performance of the Company amid the increasingly progressive industrial dynamics and development through a number of strategic efforts, such as launching of new innovations and breakthroughs to support business development, strengthening of Information Technology and Human Resources (HR) aspects, as well as putting forward prudent principle in investment or other business activities.

VIEWS ON IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

The Board of Commissioners considered that comprehensive and consistent implementation of GCG implementation can boost the Company's performance in a sustainable manner and allow the Company to avoid all bad corporate governance practices that result in generating added value for Shareholders and Stakeholders.

Fulfillment of GCG Infrastructure

The Board of Commissioners assesses that up to 2018, the Company has realized its commitment in implementing GCG within PP Presisi magnificently. Such commitment was realized through ratification of Good Corporate Governance (GCG) Manual of PT Presisi Tbk by the Board of Commissioners and the Board of Directors as the basis of comprehensive GCG process implementation within the Company. GCG Manual contains corporate principles, norms, or guidelines necessary



pedoman korporasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan yang sehat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping itu, Perseroan telah menyusun *Road Map* GCG untuk periode 2016 hingga 2020 yang menjadi dasar Perseroan untuk menyempurnakan pelaksanaan implementasi GCG agar sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. PP Presisi juga berupaya untuk melengkapi pemenuhan infrastruktur GCG secara lengkap sesuai peraturan perundang-undangan, seperti membentuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, melengkapi seluruh *board charter* sebagai paduan pelaksanaan kinerja dan tanggung jawab bagi masing-masing organ tata kelola, menerapkan Sistem Pengendalian Internal, Sistem Manajemen Risiko, dan *Whistleblowing System* (WBS).

Menjaga Komitmen Implementasi GCG

Implementasi GCG di lingkungan Perseroan tidak hanya didasarkan pada pemenuhan infrastruktur GCG berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun juga harus ditopang oleh komitmen pengimplementasian yang berkualitas. Dengan kata lain, implementasi GCG dilakukan tidak hanya sekedar untuk mematuhi peraturan, tetapi juga telah menjadi budaya dan etika dasar yang dianut oleh seluruh Insan PP Presisi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan GCG di lingkungan PP Presisi, maka pada tahun 2018 Perseroan melaksanakan assessment GCG yang dilakukan oleh lembaga

in sound management system that complies with the prevailing laws and regulations.

Moreover, the Company has formulated GCG Road Map for period of 2016 to 2020 serving as a basis for the Company to improve GCG implementation to be in line with applicable standards and regulations. PP Presisi also strives to increase GCG infrastructure to be more complete in accordance with laws and regulations, such as establishing Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, improving all Board Charters as guidelines for performance and responsibility implementation of each governance organ, implementing Internal Control System, Risk Management System, and Whistleblowing System (WBS).

Maintaining GCG Implementation Commitment

GCG implementation within the Company is not only based on GCG infrastructure fulfillment pursuant to laws and regulations, but it is also must be supported by commitment of high quality implementation. In other words, GCG implementation is conducted not only to comply with regulations, but it has become a culture and basic ethical value embraced by all personnel of PP Presisi in performing their respective duties and responsibilities.

To find out the extent of the implementation of GCG in PP Presisi, in 2018 the Company carried out GCG assessment conducted by an independent appraisal institution, namely the

penilai independen, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dengan perolehan skor sebesar 77,628 dengan predikat Baik.

Menurut kami, hasil assessment GCG sudah menunjukkan keseriusan Manajemen Perseroan dalam mengimplementasikan GCG di setiap lini bisnis PP Presisi. Dewan Komisaris berharap agar kedepannya, Direksi senantiasa meningkatkan kualitas GCG di Perseroan secara konsisten dan berkesinambungan melalui tindak lanjut atas rekomendasi-rekomendasi GCG yang diperoleh dari hasil assessment GCG.

Dalam rangka memperkuat penerapan GCG di Perseroan, Dewan Komisaris menyarankan kepada Direksi maupun seluruh karyawan PP Presisi agar selalu menjunjung tinggi sikap profesionalitas, transparansi, integritas, dan loyalitas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, Perseroan dapat meminimalisir terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) di antara Insan PP Presisi maupun praktik-praktik *bad corporate governance* lain yang mampu menghambat kelancaran aktivitas bisnis Perseroan.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan, Dewan Komisaris dibantu oleh beberapa komite, yakni Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Kedua komite ini senantiasa menjalin koordinasi yang baik dengan Dewan Komisaris melalui pelaksanaan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Komite-komite Penunjangnya. Dalam rapat tersebut, komite-komite ini dapat menyampaikan usulan, rekomendasi, serta saran kepada Dewan Komisaris yang berguna bagi kelancaran dan keberlangsungan bisnis Perseroan di masa depan.

Sepanjang tahun 2018, baik Komite Audit maupun Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik, sehingga Dewan Komisaris mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dan pemberi nasihat secara tepat sehingga Direksi dapat menjalankan peran pengelolaan Perseroan dengan tepat dan sesuai peraturan yang berlaku.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) 2018

Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System* – WBS) merupakan bagian dari pengendalian internal dalam rangka mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan sehingga proses kegiatan usaha dapat berjalan lancar. WBS memungkinkan setiap Insan PP Presisi maupun pihak eksternal Perseroan untuk mengawasi serta melaporkan adanya tindakan penyimpangan (*fraud*) yang

Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), with a score of 77.628 with Good predicate.

In our opinion, the GCG assessment results have shown the seriousness of the Company's Management in implementing GCG in each PP Presisi business line. The Board of Commissioners hopes that in the future, the Board of Directors will continuously improve the quality of GCG in the Company consistently and continuously through follow-up on GCG recommendations obtained from GCG assessment results.

To strengthen GCG implementation in the Company, the Board of Commissioners suggests that the Board of Directors and all employees of PP Presisi to always uphold high level of professionalism, transparency, integrity, and loyalty in performing their respective duties and responsibilities. Therefore, the Company is able to minimize potential of conflict of interest between PP Presisi Personnel or other bad corporate governance practices that may hinder business activities of the Company.

ASSESSMENT ON PERFORMANCE OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

In performing supervisory function on the Company's management, the Board of Commissioners is assisted by several committees, namely Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee. Those committees always have good coordination with the Board of Commissioners through holding joint meetings of the Board of Commissioners and their Supporting Committees. In such meetings, the committees may provide suggestions, recommendations, and propositions to the Board of Commissioners that may prove to be useful for the Company's business continuity in the future.

Throughout 2018, Audit Committee as well as Nomination and Remuneration Committee have performed their duties and responsibilities very well so that the Board of Commissioners is able to carry out their duties and functions as supervisor and advisor accurately that enables the Board of Directors to manage the Company accurately and in accordance with prevailing regulations.

VIEWS ON IMPLEMENTATION OF WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) IN 2018

Implementation of Whistleblowing System (WBS) is part of internal control in order to prevent deviation and fraud so that business activities can run properly. WBS allows every Personnel of PP Presisi or external parties of the Company to supervise and report fraud that occurred in business management of the Company through flexible and transparent mechanism. Mechanisms for WBS management in PP Presisi has been

Ir. Nawang Sri Retno Kartiko, M. EngM

Komisaris
Commissioner



Ir. M. Toha Fauzi, MT

Komisaris Utama
President Commissioner



Ir. Ketut Darmawan

Komisaris Independen
Independent Commissioner



terjadi sepanjang pelaksanaan pengelolaan bisnis Perseroan melalui mekanisme yang fleksibel dan terbuka. Mekanisme pengelolaan WBS PP Presisi telah diformalisasikan dalam Surat Keputusan No. 048/SK/DIR/PPRE/X/2018.

Peran Dewan Komisaris atas Implementasi WBS PP Presisi 2018

Dalam rangka memperkuat fungsi WBS, Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan atas penerapan WBS di lingkungan PP Presisi. Segala bentuk laporan pelanggaran yang masuk akan dijadikan bahan referensi untuk Dewan Komisaris dalam mengoptimalkan pelaksanaan aktivitas pengawasan pengelolaan Perseroan. Oleh sebab itu, Dewan Komisaris tidak hanya melakukan pemantauan dari segi implementasinya saja, melainkan kesiapan unit kerja dalam menjalankan fungsinya serta melakukan penilaian dan evaluasi terkait seluruh aspek WBS yang ada.

Dewan Komisaris berpandangan bahwa Unit Kerja WBS telah menjalankan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2018 sesuai dengan Pedoman WBS yang berlaku di PP Presisi tahun 2018.

Kedepannya, Dewan Komisaris berharap bahwa Unit Kerja WBS dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam menangani dan menindaklanjuti laporan WBS yang masuk dalam rangka mewujudkan tatanan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan seimbang di lingkungan Perseroan demi mencegah terjadinya praktik penyimpangan dan kecurangan sehingga memperlancar proses pelaksanaan pengelolaan dan kegiatan usaha.

PANDANGAN ATAS PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Bagi kami, program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* – CSR) merupakan program yang wajib dilaksanakan oleh PP Presisi dalam rangka mewujudkan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Program CSR juga mampu menjadi sarana bagi Perseroan untuk memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat (*people*) dan lingkungan (*planet*), di samping berorientasi pada peningkatan keuntungan (*profit*).

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menjalankan program-program CSR-nya dengan sangat baik. Program-program CSR tersebut disusun dengan menyoroti pada elemen-elemen yang bersinggungan dengan aktivitas bisnis Perseroan, seperti ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan (K3), para konsumen, serta lingkungan dan masyarakat di sekitar wilayah kerja PP Presisi. Direksi juga selalu menyampaikan progres pelaksanaan CSR secara rutin dan *up-to-date* kepada Dewan Komisaris pada pelaksanaan rapat gabungan dan rapat kerja bersama Dewan Komisaris dan Direksi.

formalized in Decree No. 048/SK/DIR/PPRE/X/2018.

Role of the Board of Commissioners on WBS Implementation of PP Presisi in 2018

To strengthen WBS function, the Board of Commissioners is responsible to monitor WBS implementation within PP Presisi. Any form of whistleblowing report received will be used as reference materials for the Board of Commissioners in order to optimize supervisory activity on the Company's management. Therefore, other than monitoring its implementation, the Board of Commissioners also monitors readiness of the work unit in performing their functions as well as assessing and evaluation all aspects of WBS.

The Board of Commissioners observed that WBS Work Unit has carried out their duties and functions in accordance with the prevailing WBS Code in PP Presisi in 2018.

The Board of Commissioners hopes that WBS Work Unit can continue improving their performance in handling and following up WBS report that has been submitted in the future. It is expected that the Work Unit can help realizing balanced and good Corporate Governance within the Company to prevent any deviation and fraud that expedite process of business management and activities.

VIEWS ON IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

In our eyes, Corporate Social Responsibility (CSR) is a program that shall be implemented by PP Presisi in realizing sustainable business growth. CSR Program can also serve as a means for the Company to provide positive benefits for the community (people) and environment (planet), aside from increasing profit.

The Board of Commissioners assessed that the Board of Directors has performed CSR programs remarkably. Those CSR programs are prepared by targeting elements involved in business activities of the Company, such as manpower, safety, and health (K3), consumers, as well as surrounding environment and community of PP Presisi. The Board of Directors also always submits progress of CSR implementation routinely and up-to-date to the Board of Commissioners in joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Hingga 31 Desember 2018, tidak terdapat perubahan dalam susunan Dewan Komisaris Perseroan. Dewan Komisaris PP Presisi telah ditetapkan berdasarkan Akta No. 27 tanggal 14 Agustus 2017, dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Adapun komposisi Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position
Ir. Muhammad Toha Fauzi, MT	Komisaris Utama / President Commissioner
Ir. Nawang Sri Retno Kartiko, M. EngM	Komisaris / Commissioner
Ir. Ketut Darmawan	Komisaris / Commissioner

APRESIASI

Dengan berakhirnya laporan ini, kami segenap jajaran Dewan Komisaris PP Presisi memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan atas dukungan yang diberikan sehingga Perseroan dapat menjalankan seluruh aktivitas operasional sepanjang tahun buku 2018 dengan sebaik-baiknya serta mampu mencatatkan pertumbuhan kinerja bisnisnya secara berkelanjutan.

Secara khusus, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan atas dukungan materil maupun non-materil dalam mendorong peningkatan kinerja Perseroan secara berkelanjutan.

Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Direksi Perseroan atas kerja keras dan dedikasi yang diberikan dalam merealisasikan rencana bisnis yang ada serta selalu mengupayakan pertumbuhan dan peningkatan kinerja Perseroan. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari kerja keras dan integritas yang diberikan oleh Direksi, manajemen, serta seluruh Insan PP Presisi dalam rangka meraih kinerja Perseroan yang optimal.

Dewan Komisaris berharap, semoga kedepannya kinerja pengawasan dan pemberian saran yang kami berikan dapat membawa pada kemajuan Perseroan serta peningkatan reputasi Perseroan sebagai Perusahaan Konstruksi Terintegrasi Berbasis Alat Berat yang terkemuka dan terpercaya di Indonesia.

CHANGES IN COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

As of December 31, 2018, there were no changes in composition of the Board of Commissioners of the Company. The Board of Commissioners of PP Presisi has been determined pursuant to Deed No. 27 dated August 14, 2017 with the tenure of 5 (five) years.

Composition of the Board of Commissioners of PT PP Presisi Tbk in 2018 is as follows:

APPRECIATION

To conclude this report, as the Board of Commissioners of PP Presisi, we would like to express our greatest gratitude to stakeholders for their support that enables the Company was able to perform all operational activities throughout 2018 fiscal year in the most optimum manner and record sustainable business growth performance.

In particular, we would like to express our greatest gratitude to Shareholders of the Company for material and non-material supports in boosting the Company's performance in a sustainable manner.

We would also like to deliver our appreciation and gratitude to the Board of Directors of the Company for their dedication and hard work in realizing business plans as well as for always striving for growth and improvement on the Company's performance. Such achievement was inseparable from hard work and integrity of the Board of Directors, the management, as well as all Personnel of PP Presisi in reaching optimum performance of the Company.

Going forward, the Board of Commissioners expects that performance of supervisory and advisory duties can bring us to the Company's progress as well as reputation enhancement of the Company as a leading and trusted Integrated Heavy Equipment-Based Company in Indonesia.

Jakarta, Maret / March 2019
Atas nama Dewan Komisaris,
On behalf of the Board of Commissioners

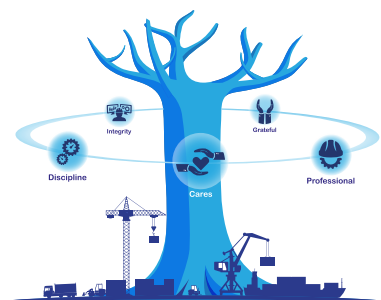
Ir. M. Toha Fauzi, MT
Komisaris Utama
President Commissioner



Ir. Iswanto Amperawan
Direktur Utama
President Director

Laporan Direksi

Board of Directors Report



Dalam RKAP PP Presisi 2019, Perseroan menargetkan perolehan laba bersih yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar Rp424,8 miliar, meningkat 30,1% dari realisasi di tahun 2018.

In 2019 RKAP of PP Presisi, the Company targeted Rp424.8 billion for net profit attributable to owners of the Company, an increase of 30.1% from realization in 2018.



Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia-Nya sehingga PP Presisi berhasil melewati tahun 2018 dengan berbagai perolehan prestasi yang membanggakan dalam rangka merealisasikan cita-cita dan visi Perseroan.

Dengan bangga, kami menyampaikan bahwa pelaksanaan kinerja Perseroan mampu menunjukkan peningkatan yang positif jika dibandingkan dengan kinerja tahun lalu serta berhasil mencapai RKAP 2018, meskipun kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya kondusif. Melalui peningkatan kinerja sepanjang tahun buku, kami optimis mampu mencapai pertumbuhan bisnis secara berkesinambungan dan menciptakan nilai tambah bagi para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan.

Melalui kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan Laporan Tahunan PT PP Presisi Tbk tahun buku 2018 yang berisi tentang uraian kinerja, baik kinerja operasional maupun keuangan beserta aspek-aspek pendukung lainnya yang dilakukan Perseroan selama tahun buku.

Dear Valued Shareholders and Stakeholders,

Praise be to the God Almighty for all His blessings given unto us so that PP Presisi was able to pass through 2018 with a number of satisfying achievements in order to realize the Company's goals and vision.

We proudly present our positive performance improvement compared to the previous year's performance as well as our capability to achieve target set in 2018 RKAP amid unstable economic conditions. Through such improvement during fiscal year, we are optimistic in being able to realize continuous business growth and generate added value for Shareholders and Stakeholders.

On this joyous occasion, allow us to present Annual Report of PT PP Presisi Tbk for 2018 fiscal year that contains descriptions of performances, both operational and financial performances as well as other supporting aspects conducted by the Company during the fiscal year.

TINJAUAN MAKROEKONOMI DAN INDUSTRI KONSTRUKSI NASIONAL

Berdasarkan laporan Bank Dunia yang berjudul “*Global Economic Prospects: Darkening Skies*,” pertumbuhan ekonomi global di tahun 2018 diestimasikan berada pada level 3,0%. Jika dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi global tahun 2017, angka pertumbuhan tahun ini mengalami penurunan sebesar 0,1%. Salah satu faktor utama melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2018 adalah adanya kebijakan normalisasi moneter Amerika Serikat (AS), baik itu melalui kenaikan suku bunga maupun pengurangan neraca bank sentral, yang menciptakan sentimen negatif di pasar keuangan global.

Ketidakondusifan ekonomi global juga dipengaruhi oleh Perang Dagang yang terjadi di antara dua negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi terkuat di dunia, yakni Amerika Serikat dan Tiongkok. Adanya perang dagang tersebut berdampak buruk terhadap likuiditas valuta asing (valas) di pasar modal beberapa negara, termasuk Indonesia.

Di tengah kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya kondusif, Indonesia justru mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil, meski belum mencapai angka pertumbuhan yang tercantum dalam RAPBN 2018, yakni sebesar 5,4%. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, realisasi pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun buku berada pada level 5,17%, meningkat jika dibandingkan dengan nilai pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2017, yakni sebesar 5,07%. Penguatan pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh adanya pertumbuhan konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah.

Dampak perang dagang antara AS dan Tiongkok menimbulkan tekanan bagi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS pada tahun 2018 yang sempat menembus hingga level Rp15.000 per dolar AS. Oleh sebab itu, Bank Indonesia secara agresif melakukan upaya untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah dan perekonomian nasional melalui peningkatan suku bunga acuan 7-Day (Reverse) Repo Rate sebesar 175 basis poin (bps) menjadi 6% dan perlambatan laju inflasi sebesar 3,13%.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia terus berfokus dalam melaksanakan akselerasi pembangunan infrastruktur di hampir seluruh pelosok negeri hingga tahun 2019 mendatang. Kebijakan ini bertujuan untuk mengembangkan kawasan industri dan pariwisata dan meningkatkan konektivitas antar daerah dalam rangka menumbuhkan perekonomian nasional. Guna merealisasikan program tersebut, pemerintah meningkatkan anggaran belanja infrastruktur nasional tahun 2018 sebesar Rp410 triliun, naik 5,1% dari alokasi dana

OVERVIEW ON MACROECONOMY AND NATIONAL CONSTRUCTION INDUSTRY

Based on the World Bank’s report entitled “*Global Economic Prospects: Darkening Skies*”, global economic growth in 2018 was estimated to be at the level of 3.0%. Compared with the realization of global economic growth in 2017, this year’s growth rate decreased by 0.1%. One of the main factors contributing to the weakening global economic growth in 2018 was the monetary normalization policy of the United States (US), both through rising interest rates and reducing the Fed’s balance sheet, which created negative sentiment on global financial markets.

The volatility in global economy was also influenced by the Trade War that took place between the two countries with strongest economic growth in the world, namely the United States and China. This trade war certainly had a negative impact on foreign exchange liquidity in the capital markets of several countries, including Indonesia.

Amid the global economic conditions that have not been fully conducive, Indonesia recorded a fairly stable economic growth, even though it failed to reach the growth rate stated in the 2018 State Budget Draft (RAPBN), which was 5.4%. Based on the report by Statistics Indonesia, the realization of national economic growth throughout the fiscal year was at the level of 5.17%, an increase compared to the value of national economic growth in 2017, which amounted to 5.07%. The strengthening of economic growth was supported by growth in household consumption, investment and government consumption.

The impact of trade war between the US and China created pressure for the exchange rate of Rupiah against US dollar in 2018 which had penetrated to the level of Rp15,000 per US Dollar. Therefore, Bank Indonesia aggressively made efforts to stabilize Rupiah and national economy through an increase in 7-Day (Reverse) Repo Rate by 175 basis points (bps) to 6%, as well as a slowdown in the inflation rate of 3.13% .

To boost national economic growth in 2018, the government of Indonesia continues to focus on implementing acceleration of infrastructure development throughout the nation until 2019. This policy is aimed to develop industrial and tourism areas as well as to improve connectivity between regions to improve national economic growth. In order to realize such program, the government increased the budget of national infrastructure expenditure in 2018 amounting to Rp410 trillion, increased by 5.1% from fund allocation for infrastructure in the previous year and for 2019 is budgeted to increase by 2.7% to Rp421

infrastruktur di tahun sebelumnya dan pada tahun 2019 ini masih dianggarkan meningkat 2,7% menjadi Rp421 triliun. Adanya penggalakan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur nasional secara masif dalam 5 tahun terakhir ini yang mendorong CAGR 10% pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur sebesar 19,3% disertai dengan alokasi pendanaan yang besar tentu berdampak positif bagi para pelaku industri yang bergerak di bidang konstruksi, termasuk PP Presisi.

ANALISIS KINERJA PP PRESISI 2018

Kebijakan Strategis

PP Presisi berkomitmen untuk senantiasa menjalankan setiap kegiatan usahanya dengan maksimal dalam rangka mengoptimalkan peluang bisnis demi mewujudkan visi dan misi Perseroan.

Dengan visi untuk menjadi perusahaan konstruksi berbasis alat berat terintegrasi yang terkemuka di Indonesia dan regional, Perseroan memiliki strategi jangka panjang untuk selalu bertumbuh secara berkelanjutan melalui transformasi bisnis sebagai bagian dari proses penciptaan nilai (*value creation*) secara berkelanjutan. Kami baru saja menutup Horizon ke-2 dengan keberhasilan pembentukan lini bisnis erector serta peningkatan *engineering capability* dan *capacity* dari *coal hauling* menjadi *integrated mining services*, yang mana masing-masing tambahan lini bisnis tersebut telah turut menyumbang perolehan kontrak baru.

Mulai tahun 2019, kami memasuki Horizon ke-3 yang lebih menantang dengan visi "Menjadi perusahaan konstruksi terintegrasi terkemuka, baik di Indonesia maupun di tingkat regional". Untuk mewujudkan visi tersebut, PP Presisi akan mengembangkan lini-lini bisnis yang berhubungan dengan konstruksi dan non-konstruksi secara simultan. Kedua jenis lini-lini bisnis tersebut masih berbasis pada alat berat yang menjadi core business Perseroan. Lini-lini bisnis yang akan dikembangkan di masa depan, antara lain *mechanical engineering*, *dredging*, serta transportasi dan logistik. Sementara itu, untuk menjadi pemain regional, kami telah merintis kerja sama dengan pelaku bisnis di tingkat global, yaitu dengan perusahaan asal Korea Selatan, yaitu Kumkang Kind, Co. Ltd, di samping telah melakukan peninjauan dan *feasibility studies* dengan para pelaku bisnis global lainnya.

Strategi yang dibangun oleh PP Presisi dalam rangka meningkatkan pertumbuhannya adalah sebagai berikut :

- Memperbesar kapasitas alat berat Perusahaan untuk memenuhi dan mengantisipasi permintaan proyek yang meningkat pesat.
- Mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang mempunyai posisi strategis dan fasilitas infrastruktur dengan kapasitas yang cukup besar.

trillion. Significant intensification of national infrastructure development in the last 5 years encouraged CAGR by 10% of government spending for infrastructure by 19.3% and large amount of fund allocation had a positive impact for players in construction industry, including PP Presisi.

ANALYSIS OF PP PRESISI PERFORMANCE IN 2018

Strategic Policies

PP Presisi is committed to always perform its business activities in an optimum manner in order to optimize business opportunities to realize vision and mission of the Company.

The Company's vision to be a leading heavy equipment-based integrated construction company in Indonesia and in regions, the Company has a long-term strategy to always grow in a sustainable manner through business transformation as part of sustainable value creation process. We have just closed the 2nd Horizon by successfully establishing an erector business line and improving engineering capability and capacity from coal hauling to integrated mining services, where each additional line of business has contributed to the acquisition of new contracts.

Starting in 2019, we entered the 3rd challenging Horizon with the vision "To become a leading integrated construction company, both in Indonesia and at the regional level". To realize this vision, PP Presisi will develop business lines related to construction and non-construction simultaneously. Both types of business lines are still based on heavy equipment which is the Company's core business. Business lines that will be developed in the future, including mechanical engineering, dredging, and transportation and logistics. Meanwhile, to become a regional player, we have pioneered cooperation with business people at the global level, namely Kumkang Kind, Co. Ltd., a South Korean company in addition to conducting assessments and feasibility studies with other global business players.

Strategies developed by PP Presisi in order to improve business growth are as follows:

- Expand the Company's heavy equipment capacity to meet and anticipate rapid demand for project's contracts.
- Acquire strategically position companies that have infrastructure facilities with sizable capacity.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> c. Tetap meningkatkan jumlah proyek yang dikerjakan, baik dari internal maupun eksternal. d. Meningkatkan inovasi untuk menghasilkan pelayanan dengan nilai tambah yang lebih tinggi kepada pelanggan. e. Melakukan ekspansi ke luar negeri melalui <i>Joint Operation</i> (JO) serta mencari kerja sama strategis dengan perusahaan-perusahaan multinasional. f. Mengoptimalkan sinergi antar grup dan menjadikan sinergi tersebut sebagai dasar untuk memperluas basis pelanggan dan meningkatkan eksposur terhadap pihak ketiga. g. Mempertahankan konsistensi pelayanan prima dalam hal waktu dan kualitas dengan menerapkan sistem manajemen ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, dan menggunakan sistem yang berintegrasi dengan ERP-SAP. | <ul style="list-style-type: none"> c. Continue to increase the number of internally and externally-sourced projects. d. Improve innovations to generate higher value added services to customers. e. Expand overseas via Joint Operation (JO) as well as seek strategic partnership with multinational companies. f. Optimize intra-group synergy and allow synergy as basis for expanding customer base and increasing exposure to third parties. g. Maintain consistency of excellent service delivery in terms of time and quality by implementing ISO9001, ISO140001, OHSAS18001 management systems and using ERP-SAP integrated system. |
|---|---|

Strategi-strategi tersebut dianalisis secara komprehensif dalam RKAP 2018, yang digunakan Perseroan sebagai pedoman dalam menjalankan pengelolaan bisnisnya baik pada tahun buku maupun dalam periode beberapa tahun ke depan (*multiyears*) agar dapat berjalan secara berkelanjutan.

Such strategies are analyzed comprehensively in the Company's 2018 RKAP which are used as guidelines in managing its business during the fiscal year or multiyear period in order to be sustainable.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas, PP Presisi berupaya untuk menciptakan katalis baru melalui transformasi dan pengembangan bisnis. Salah satu langkah strategis yang dijalankan Perseroan pada tahun 2018 adalah melakukan diversifikasi ke bidang usaha pertambangan melalui anak perusahaan PP Presisi, yakni PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA). Perseroan memandang bahwa industri jasa pertambangan saat ini memiliki prospek usaha yang menguntungkan seiring dengan adanya kenaikan harga komoditas tambang. Diversifikasi usaha ini juga didukung oleh adanya kepemilikan Perseroan atas sebagian besar alat berat yang dibutuhkan dalam jasa pertambangan seperti *excavator*, *bulldozer* dan *dump truck*.

In order to improve revenue and profitability growth, PP Presisi strives to create new catalyst through business transformation and development. One of the strategic measures carried out by the Company in 2018 was to perform diversification to business sector of mining through subsidiary of PP Presisi, namely PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA). The Company observes that mining services industry currently has profitable business prospect in line with increase of mining commodity prices. Such business diversification is also supported by the Company's ownership on most heavy equipment needed in mining services, such as excavator, bulldozer, and dump truck.

Sepanjang tahun 2018, PP Presisi berhasil memperoleh 2 kontrak *coal hauling* yang masing-masing bernilai Rp1,0 triliun, berlokasi di Sumatra Selatan. Setelah *coal hauling*, Perseroan memperluas ruang lingkupnya menjadi jasa pertambangan terpadu. PP Presisi pun telah mendapatkan 2 kontrak jasa pertambangan yang berlokasi di Kalimantan Timur, masing-masing bernilai Rp427 miliar & Rp210 miliar.

Throughout 2018, PP Presisi was awarded with 2 coal hauling contracts amounting to Rp1.0 trillion respectively, located in South Sumatera. After coal hauling, the Company expands its business scope to integrated mining services. PP Presisi also has acquired 2 mining services contracts located in East Kalimantan amounting to Rp427 billion & Rp210 billion respectively.

Untuk mendukung pengembangan bisnis, selama 2018 PP Presisi telah merealisasi belanja modal (*capital expenditure – capex*) sebesar Rp956,7 miliar yang digunakan tahun 2018 dialokasikan untuk penambahan alat berat dan sebesar Rp4,2 miliar untuk pembelian piranti lunak (software). Per 31 Desember 2018, PP Presisi telah memiliki *mobile fleet* dan *non mobile fleet* masing-masing sebanyak lebih kurang 2.400 units & 150 units.

In order to support business development, the Company has realized Rp956.7 billion for capital expenditure (capex) used in 2018 to be allocated as addition of heavy equipment and Rp4.2 billion for software purchase. As of December 31, 2018, PP Presisi has 2,400 units of mobile fleet and 150 units of non-mobile fleet.



Di samping mengembangkan bisnisnya di sektor kontraktor pertambangan, PP Presisi berupaya untuk merambah ke lini bisnis baru, seperti sektor pembangkit listrik sebagai erector, mechanical electrical untuk gedung, dan transportasi. Ekspansi bisnis tersebut dilakukan dengan mengembangkan strategi sinergi bisnis dengan Entitas Anak maupun Entitas Induk Perseroan, yakni PT PP (Persero) Tbk dalam rangka meningkatkan daya saing dan nilai tambah bagi para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan.

Perbandingan antara Hasil yang Dicapai dengan RKAP 2018

Sepanjang tahun 2018, PP Presisi telah menjalankan kegiatan bisnis dengan semaksimal mungkin, sehingga berhasil memperoleh pencapaian kinerja yang positif, baik pada aspek operasional maupun keuangan. Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan antara hasil realisasi jumlah perolehan kontrak baru, nilai kontrak keseluruhan (*order book*), pertumbuhan aset, pertumbuhan ekuitas, pendapatan usaha, laba bersih, dan laba komprehensif tahun berjalan dengan RKAP 2018.

Nilai perolehan kontrak baru PP Presisi per tanggal 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp5,2 triliun atau mencapai 104% dari target perolehan kontrak baru yang tercantum dalam RKAP 2018 yakni sebesar Rp5,0 triliun. Kontrak baru PP Presisi tahun 2018 didominasi oleh segmen konstruksi sebesar 88,4%, lalu diikuti dengan ready mix sebesar 9,8%, dan persewaan peralatan sebesar 1,8%.

In addition to developing its business in mining contractor sector, PP Presisi strives to penetrate to new lines of business, such as power generator sector as erector, mechanical electrical for buildings, and transportation sector. Such business expansion is performed to develop strategy of business synergy with Subsidiary or Parent Entity of the Company, namely PT PP (Persero) Tbk in order to enhance competitiveness and added value for Shareholders and Stakeholders.

Comparison between Results and 2018 RKAP

In 2018, PP Presisi has conducted business activities in the most optimum manner that resulted in positive performance, in terms of operational and financial aspects. This can be observed from comparison between realization result of new contract acquisition, total contract value (*order book*), asset growth, equity growth, revenue, net profit, and comprehensive income for the year with 2018 RKAP.

Total new contract acquisition of PP Presisi as of December 31, 2018 was recorded at Rp5.2 trillion or reached 104% of new contract acquisition target set in the 2018 RKAP, namely at Rp5.0 trillion. New contracts of PP Presisi in 2018 were dominated by construction segment at 88.4%, followed by ready mix at 9.8% and equipment rental at 1.8%.

Dengan adanya perolehan kontrak baru pada tahun 2018, secara keseluruhan PP Presisi berhasil memperoleh nilai kontrak yang dihadapi atau *order book* sebesar Rp14,2 triliun. Nilai kontrak tersebut merupakan gabungan dari nilai kontrak baru pada tahun buku sebesar Rp5,2 triliun dan nilai kontrak *carry over* di tahun 2017 sebesar Rp9 triliun.

Dari aspek kinerja keuangan, PP Presisi berhasil mencatat realisasi total aset tahun 2018 sebesar Rp6,3 triliun atau mencapai 102,0% dari RKAP 2018. Pencapaian target aset tahun buku ditopang oleh peningkatan aset tetap berupa alat berat untuk mendukung aktivitas operasi. Sementara itu, untuk jumlah ekuitas PP Presisi per 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp2,8 triliun atau mencapai 98,8% dari RKAP 2018. Tercapainya realisasi ekuitas tersebut disebabkan oleh peningkatan saldo laba sebagai hasil peningkatan laba bersih tahun berjalan.

Untuk pendapatan bersih, PP Presisi membukukan sebesar Rp3,0 triliun atau mencapai 69,1% dari RKAP 2018. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, pendapatan tahun buku mengalami pertumbuhan sebesar 68,0%. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan realisasi progress dari beberapa proyek yang sedang dikerjakan Perseroan. Sedangkan untuk perolehan realisasi laba bersih yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan sepanjang tahun 2018 tercatat sebesar Rp326,4 miliar atau mencapai 102,4% dari RKAP 2018 atau meningkat 73,4% dibandingkan dengan tahun 2017 yang membukukan laba bersih yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar Rp188,3 miliar. Pencapaian ini didukung oleh peningkatan progress

Through acquisition of new contracts in 2018, PP Presisi succeeded to acquire new contracts or order book amounting to Rp14.2 trillion in overall. The amount is a combination of new contract value in the fiscal year amounting to Rp5.2 trillion and contract value of carry over in 2017 amounting to Rp9 trillion.

In terms of financial aspect, realization of total assets in 2018 was recorded at Rp6.3 trillion or reached 102.0% from 2018 RKAP. Achievement of asset target for the fiscal year was supported by fixed asset improvement in the form of heavy equipment to support operational activities. Meanwhile, as of December 31, 2018, total equity of PP Presisi amounted to Rp2.8 trillion or reached 98.8% of 2018 RKAP. This realization of equity was due to increase in retained earnings as a result of increase in net profit for current year.

Net revenue of PP Presisi was recorded at Rp3.0 trillion or reached 69.1% of 2018 RKAP, increased by 68.0% compared to that of 2017. This was affected by improvement of realization of progress from several projects carried out by the Company. Meanwhile, net profit attributable to owners of the Company in 2018 was recorded at Rp326.4 billion or 102.4% of 2018 RKAP or increased by 73.4% compared to that of 2017 at Rp188.3 billion. Such achievement was supported by the progress of infrastructure projects, such as Pandaan-Malang toll road project, Manado-Bitung toll road project, Balikpapan-Samarinda toll road project, Way Sekampung dam project, Leuwi Keris dam project, taxiway & runway project at



penyelesaian proyek-proyek infrastruktur seperti proyek jalan tol Pandaan – Malang, proyek jalan tol Manado – Bitung, proyek jalan tol Balikpapan – Samarinda, proyek bendungan Way Sekampung, proyek bendungan Leuwi Keris, proyek *taxiway & runway* Bandara Soekarno Hatta, proyek jalan tol Serang – Panimbang, proyek jalan tol Gempol – Pasuruan, proyek bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin, *rest area* jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi dan proyek jalan Akses PLTA Cisokan.

Secara keseluruhan, pencapaian kinerja PP Presisi sepanjang tahun buku sangat memuaskan dan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kinerja di tahun sebelumnya. Meski demikian, jika dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan Perseroan, kinerja tahun 2018 masih belum sepenuhnya sempurna akibat faktor eksternal, diantaranya penundaan pelaksanaan beberapa proyek. Oleh sebab itu, Perseroan senantiasa berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja operasional maupun keuangan secara berkelanjutan.

Kendala yang Dihadapi dan Upaya Penyelesaiannya

Upaya Perseroan dalam menjalankan aktivitas pengelolaan usaha sepanjang tahun buku 2018 tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kendala yang ada. Kondisi perekonomian global yang fluktuatif dan belum sepenuhnya stabil menyebabkan Rupiah terdepresiasi. Melemahnya Nilai Tukar Rupiah (NTR) mengakibatkan kenaikan harga komoditas impor, termasuk harga material dan bahan baku impor yang mayoritas digunakan Perseroan dalam pengerjaan proyek-proyek konstruksinya.

Peningkatan harga material bangunan tersebut berpotensi meningkatkan beban keuangan Perseroan pada tahun buku. Oleh sebab itu, dalam rangka mencegah pembengkakan biaya bahan baku dan material impor, PP Presisi secara aktif menerapkan *Enterprise Risk Management* (ERM) untuk membantu memetakan risiko-risiko yang akan dihadapi beserta upaya mitigasi masing-masing risiko. PP Presisi juga menerapkan kebijakan *treasury* dalam rangka menjaga likuiditas perusahaan, mengelola aset dengan sebaik-baiknya, dan aktif melakukan pemasaran kepada pihak ketiga yang berada di luar lingkup perusahaan PT PP (Persero) Tbk.

PROSPEK USAHA 2019

Secara umum, kondisi perekonomian global maupun nasional di tahun 2019 cenderung stagnan. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global berada pada level 2,9%, melemah jika dibandingkan dengan pertumbuhan yang dicatatkan pada tahun 2018. Prediksi tersebut dipengaruhi oleh adanya Perang Dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok yang diperkirakan akan terus berlanjut hingga tahun depan. Ketegangan hubungan dagang diantara kedua negara dengan pertumbuhan ekonomi terkuat di dunia tersebut menyebabkan Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2019 hanya berada di kisaran 5% - 5,3%.

Soekarno-Hatta Airport, Serang-Panimbang toll road project, Gempol-Pasuruan toll road project, Syamsudin Noor airport project, Banjarmasin, rest area on Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi toll road, and PLTA Cisokan Access road project.

In overall, the Company's performance throughout fiscal year was highly satisfactory and had an improvement compared to performance of the previous year. Nevertheless, compared to the budget set by the Company, 2018 performance was not entirely perfect due to external factors, one of which is in execution of several projects. Therefore, we are always committed to continue improving operational and financial performances in a sustainable manner.

Challenges Faced and Solutions

The Company's effort in performing business management activities throughout 2018 was inseparable from various challenges and issues. Fluctuating global economic conditions that were not fully recovered caused Rupiah to be depreciated. Weakening of Rupiah exchange rate (NTR) caused increased in import commodity prices, including import raw material and material prices which mostly used by the Company in its construction projects.

Such increase in construction material prices potentially results in an increase of the Company's financial expenses in the fiscal year. Hence, in order to prevent inflated raw material and material costs, PP Presisi actively implements Enterprise Risk Management (ERM) to assist in mapping potential risks and their mitigations. PP Presisi also carries out treasury policy to maintain the Company's liquidity, manage assets properly, and perform active marketing to third parties outside of the scope of PT PP (Persero) Tbk.

BUSINESS PROSPECTS IN 2019

Generally, global and national economic conditions in 2019 tend to be stagnant. World Bank projects global economic growth at the level of 2.9%, weaken compared to growth in 2018. Such prediction is affected by Trade War between the United States and China that is expected to continue until next year. Tension in trade relations between the two countries with strongest growth in the world causes Bank Indonesia to project national economic growth in 2019 only at the level of around 5% - 5.3%.

Meskipun demikian, Direksi memandang bahwa prospek usaha PP Presisi di tahun depan masih sangat baik dan menjanjikan. Pandangan tersebut didasarkan pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang akan terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia hingga tahun 2019 dalam rangka mengejar ketertinggalan pembangunan nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan industri Indonesia. Apalagi, kami melihat banyaknya peluang pengerjaan proyek-proyek pembangunan di Indonesia yang sebenarnya mampu dijalankan oleh perusahaan lokal, namun faktanya masih dikerjakan oleh perusahaan asing. Oleh sebab itu, kami berkomitmen untuk terus mengembangkan potensi di bidang konstruksi agar para pelanggan dapat mempercayai kami dalam mengerjakan proyek-proyek pembangunan yang berstandar internasional.

Sementara itu, kami juga menilai bahwa upaya pengembangan bisnis ke sektor jasa pertambangan masih memiliki prospek bisnis yang cerah di tahun depan. Hal ini disebabkan karena permintaan energi batu bara yang diprediksi akan terus meningkat di pasar global. Di samping itu, pemerintah juga turut menggalakkan peningkatan kegiatan ekspor hasil pertambangan dan hasil hilirisasi tambang di tahun depan.

Dengan adanya peluang bisnis yang menjanjikan bagi keberlangsungan usaha Perseroan di masa depan, Direksi beserta Manajemen Perseroan telah menyusun proyeksi usaha untuk tahun 2019 yang tercantum dalam RKAP Perseroan tahun 2019 berdasarkan asumsi kondisi eksternal maupun internal yang dapat mempengaruhi aktivitas Perseroan. RKAP 2019 ini akan digunakan sebagai acuan Perseroan dalam menjalankan aktivitas usahanya di tahun depan.

Dalam RKAP PP Presisi 2019, Perseroan menargetkan perolehan kontrak baru sebesar Rp5,8 triliun, total pendapatan sebesar Rp4,2 triliun, laba usaha sebesar Rp844,8 miliar, laba bersih yang diatribusikan ke pemilik Entitas Induk sebesar Rp424,8 miliar, dan EBITDA sebesar Rp1,2 triliun.

Selain menetapkan RKAP untuk tahun 2019, PP Presisi juga berupaya untuk membangun posisi Perseroan sebagai Perusahaan Konstruksi Terintegrasi Berbasis Alat Berat melalui peningkatan sinergi antar lini bisnis, Entitas Anak, dan Entitas Induk Perseroan yakni PT PP (Persero) Tbk. PP Presisi juga berusaha untuk menggali potensi dan peluang baru di luar ruang lingkup PTPP, melaksanakan transformasi bisnis melalui pemberdayaan berbagai inovasi dan menciptakan nilai tambah dalam rangka mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (*business sustainability*).

Despite such conditions, the Board of Directors views that business prospect of PP Presisi in 2019 remains to be excellent and promising. This is based on implementation of infrastructure development that will continue to be conducted by the government of Indonesia until 2019 in order to overcome underdeveloped national infrastructure as well as to boost Indonesia's economic and industrial growth. Moreover, we noticed many opportunities for construction projects in Indonesia that actually could be executed by local companies; however such projects were still executed by foreign companies in reality. Therefore, we are committed to continue developing our potential in construction sector in order to make customers trust us in carrying out construction projects with international standard.

In the meantime, we also assess that business development in mining sector remains to have bright prospect next year. This is caused by demand for coal energy that is predicted to increase in global market. In addition, the government also promotes increase in export activities of mining products and result of downstream mining next year.

With prospective business opportunities for the Company's business continuity in the future, the Board of Director and the Management has prepared business projection for 2019 contained in the Company's RKAP for 2019 based on the assumption that external and internal conditions may affect the Company's activities. Target of 2019 RKAP will be used as reference for the Company in conducting its business activities in the coming year.

In 2019 RKAP of PP Presisi, the Company targets the acquisition of new contracts amounting to Rp5.8 trillion, total revenue of Rp4.2 trillion, operating profit of Rp844.8 billion, net profit attributable to owners of the Company Entity of Rp424.8 billion, and EBITDA of Rp1.2 trillion.

In addition to determining RKAP for 2019, PP Presisi also strives to develop the Company's position as an Integrated Heavy Equipment-Based Construction Company through synergy enhancement between lines of business, Subsidiaries, and Parent Company, namely PT PP (Persero) Tbk. PP Presisi also exerts considerable effort in exploring potential and new opportunity outside of PT PP business scope, conducting business transformation through empowerment of various innovations and generating added value to achieve business sustainability.

Dengan posisi PP Presisi sebagai perusahaan konstruksi terintegrasi berbasis alat berat terkemuka di Indonesia, untuk mencapai target tersebut, Perseroan akan membidik proyek-proyek :

1. Infrastruktur strategis nasional : konektivitas (bandara, pelabuhan dan jalan tol),
2. Sarana penunjang swasembada pangan nasional (bendungan & irigasi),
3. Pekerjaan *erector* dalam pembangunan pembangkit listrik,
4. Pembangunan perumahan & kawasan seiring dengan peningkatan *captive market* bagi PP Presisi sebagai imbas pembentukan *holding* BUMN Perumahan & Kawasan, di samping pembangunan gedung yang dimiliki oleh swasta
5. *Mining services* seiring dengan peningkatan permintaan terhadap jasa pertambangan sebagai imbas peningkatan harga batu bara dan mineral.

Through position of PPRE as a leading integrated heavy equipment-based construction in Indonesia, to reach such targets, PPRE will aim the following projects:

1. National strategic infrastructure: connectivity (airports, ports, and toll roads),
2. Supporting facilities for national food self-sufficiency (dams & irrigations),
3. Erector works in construction of power plant,
4. Construction of housing & regions in line with improvement of captive market for PPRE as a result of the establishment of SOE holding for Housing & Regions, in addition to construction of buildings performed by private companies,
5. Mining services, in line with increase in demand for mining services as a result of rise in coal and mineral prices.

PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN

Dalam rangka mewujudkan visi untuk menjadi perusahaan konstruksi terintegrasi yang terkemuka di Indonesia dan regional serta mewujudkan pertumbuhan secara berkelanjutan demi menciptakan nilai bagi para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan, maka Perseroan menerapkan strategi transformasi bisnis untuk jangka pendek (2004 – 2021).

SUSTAINABLE GROWTH

In order to realize the vision of becoming a leading integrated construction company in Indonesia and regional as well as realizing sustainable growth to create value for Shareholders and Stakeholders, the Company implemented a business transformation strategy for the short term (2004 - 2021).



Small Scale Construction & Rental
(2004 - 2012)

Meningkatkan kemampuan dan kapasitas teknik dengan memasuki bidang konstruksi / To improve engineering capability & capacity by entering construction works



Konstruksi Skala Menengah & Rental /
Medium Scale Construction & Rental
(2013 - 2015)
Leading Integrated Construction
(2016 - 2018)

- Meningkatkan kemampuan dan kapasitas teknik dalam pekerjaan konstruksi terintegrasi (integrated construction) serta mulai merambah ke lini bisnis non-civil work / To improve engineering capability & capacity in integrated construction works as well as to enter related construction non civil work
- Menjadi perusahaan konstruksi terintegrasi yang terkemuka di Indonesia / To be a leading integrated construction company in Indonesia



Integrated Construction In Regional
(2019 - 2023)

- Meningkatkan kemampuan dan kapasitas teknik dalam pekerjaan non-konstruksi untuk mendukung pekerjaan konstruksi terintegrasi (integrated construction) / To improve engineering capability & capacity in non construction works to support integrated construction
- Menjadi perusahaan konstruksi terintegrasi yang terkemuka di Indonesia dan regional / To be a leading integrated construction company in Indonesia & regional

Berdasarkan info grafis di atas, pada tahun 2018 Perseroan mengakhiri Horizon ke-2, yang mana Perseroan berupaya untuk memperkuat fundamental kelima bisnis yang digeluti Perseroan, yakni *civil work*, *ready mix*, *foundation*, *formwork*, dan *heavy equipment rental* dalam rangka mewujudkan pemberian layanan pekerjaan konstruksi terintegrasi (*integrated construction*). Selain itu, Perseroan mulai merambah bisnis *non-civil work*, seperti bisnis *erector*, serta berupaya untuk meningkatkan bisnis *coal hauling* agar menjadi jasa pertambangan terintegrasi (*integrated mining services*).

Kedepannya, setelah berhasil membangun keunggulan dalam ketujuh lini bisnisnya, PP Presisi akan menyiapkan diri untuk merambah ke pasar Asia Tenggara melalui hubungan sinergi BUMN yang kuat dan menjalin aliansi dengan perusahaan-perusahaan sejenis di tingkat regional dan global.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Kami menyadari pentingnya implementasi prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) di setiap aktivitas bisnis Perseroan dalam rangka memperkuat keunggulan, membangun daya saing dan citra positif Perseroan secara berkelanjutan. Di samping itu, penerapan prinsip GCG juga dapat meningkatkan nilai Perseroan secara maksimal bagi para *shareholders* dan *stakeholders*. Oleh sebab itu, PP Presisi berkomitmen penuh dalam mengimplementasikan ke-5 (lima) prinsip GCG yang dirumuskan oleh OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) yakni transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.

Bagi PP Presisi, komitmen untuk mengimplementasikan GCG tidak hanya sebatas sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, tetapi juga diyakini sebagai kunci sukses dalam mewujudkan kinerja bisnis Perseroan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, sebagai wujud nyata implementasi kebijakan penerapan GCG, Perseroan berupaya untuk selalu menjalankan budaya Perseroan yang tercermin pada sikap dan tingkah laku sehari-hari di seluruh aktivitas bisnis yang dilakukan setiap insan PP Presisi.

Untuk memastikan agar implementasi GCG benar-benar dilakukan di seluruh level organisasi secara konsisten dan berkesinambungan, PP Presisi telah menetapkan Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan dan aktivitas Perseroan serta sebagai *Board Manual* bagi seluruh elemen Perseroan terkait pengaplikasian prinsip-prinsip GCG ke dalam seluruh kebijakan kerja sehari-hari. Selain itu, Perseroan juga telah membuat *Roadmap* GCG tahun 2016-2020 yang berisi tentang *grand strategy* dan *milestone*

Based on the graphic information above, the Company ended the 2nd Horizon in 2018, where the Company seeks to strengthen the fundamentals of the five businesses the Company engages in, i.e. *civil work*, *ready mix*, *foundation*, *formwork*, and *heavy equipment rental*, in order to realize integrated construction work services. In addition, the Company has begun to explore non-civil work, such as *erector* businesses, and strives to increase the *coal hauling* business to become integrated mining services.

Going forward, after successfully building excellence in its seven business lines, PP Presisi will prepare itself to penetrate into the Southeast Asian market through strong SOE synergy relationships and establishing alliances with similar companies at regional and global levels.

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

We are aware of the significance of Good Corporate Governance (GCG) implementation in each business activity of the Company in order to strengthen excellence, develop sustainable competitiveness and positive image of the Company. Moreover, implementation of GCG principles can also enhance the Company's value in an optimum manner for shareholders and stakeholders. Consequently, PP Presisi is fully committed in implementing the 5 (five) GCG principles formulated by OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) namely transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness.

For PP Presisi, the commitment to implement GCG is not only limited as a form of compliance with prevailing regulations, but also believed as key to success in realizing effective, efficient, and sustainable business performance of the Company. Hence, as a realization of GCG implementation policy, the Company strives to always conduct corporate culture that is reflected on daily manner and behavior in all business activities of PP Presisi personnel.

To ensure that GCG is properly implemented in all levels of organization in a consistent and continuously, PP Presisi has set Good Corporate Governance (GCG) Manual as guideline in carrying out the Company's management and activities as well as Board Manual for all elements of the Company in relation to GCG principles application in all work policies. In addition, the Company has formulated GCG Roadmap for 2016-2020 containing grand strategy and milestone of GCG implementation in a sustainable manner through integration of

Ir. Hasanin Ade Putra, MT

Direktur
Director



Benny Pidakso, SE, MM
Direktur
Director



Ir. Arief Subyandono
Direktur Independen
Independent Director



Ir. Iswanto Amperawan
Direktur Utama
President Director

implementasi GCG secara berkelanjutan melalui pengintegrasian aspek kepatuhan, pengendalian internal, manajemen risiko, dan tanggung jawab sosial Perseroan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan GCG, PP Presisi menjalin kerja sama dengan lembaga penilai independen dalam melakukan *assessment* GCG. Untuk *assessment* GCG periode tahun 2018, PP Presisi berhasil memperoleh skor sebesar 77,628 dengan predikat “Baik” yang telah dilakukan oleh lembaga penilai independen yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berkaca dari hasil *assessment* GCG tersebut, Perseroan berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi GCG dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan GCG di lingkungan PP Presisi secara berkesinambungan serta menciptakan nilai bagi para *stakeholders*.

PELAKSANAAN PROGRAM CSR 2018

Kami memandang bahwa program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility – CSR*) merupakan salah satu sarana bagi Perseroan untuk menyeimbangkan aspek keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*). Artinya, di samping meningkatkan kinerja dalam rangka memperoleh profitabilitas, PP Presisi juga bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi dan manfaat positif bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah kerja Perseroan dalam rangka membangun hubungan yang harmonis demi terciptanya keberlangsungan dan kesinambungan usaha. Oleh sebab itu, PP Presisi berkomitmen untuk melaksanakan program CSR secara konsisten dan berkelanjutan.

Untuk pelaksanaan program CSR tahun 2018, PP Presisi telah menunaikan tanggung jawabnya terhadap para karyawan melalui pengimplementasian sistem ISO & OHSAS, *Safety, Health & Environment*, dan Unit Reaksi Cepat dalam rangka menciptakan keamanan dan keselamatan bagi para pekerja dalam pelaksanaan berbagai proyek. Di samping itu, Perseroan juga telah melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar proyek pembangunan Perseroan melalui program-program Kepedulian Sosial dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar.

Alokasi dana yang digunakan PP Presisi dalam menjalankan seluruh program CSR di tahun 2018 adalah sebesar Rp1,3 miliar, meningkat dibandingkan dengan alokasi dana CSR di tahun sebelumnya. Kedepannya, kami berkomitmen untuk terus konsisten dalam melaksanakan program CSR demi mewujudkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan menciptakan nilai positif bagi seluruh *stakeholders*.

compliance, internal control, risk management, and corporate social responsibility aspects of the Company.

In order to improve quality of GCG implementation, PP Presisi cooperates with an independent assessor in performing GCG assessment. For 2018 GCG assessment, PP Presisi succeeded in obtaining a score of 77,628 with “Good” predicate which had been carried out by an independent appraisal agency namely the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP). Reflecting on the GCG assessment results, the Company is committed to following up all GCG recommendations in order to improve the quality of GCG implementation in the PP Presisi environment on an ongoing basis and create value for the shareholders and stakeholders.

IMPLEMENTATION OF 2018 CSR PROGRAM

We view Corporate Social Responsibility (CSR) program as one of the means for balancing profit, people, and planet aspects of the Company. This means that aside from enhancing performance to obtain profitability, PP Presisi is also responsible to provide positive contribution and benefit for the surrounding community and work environment of the Company in order to develop harmonious relationship for business sustainability and continuity. Therefore, PP Presisi is committed to conduct CSR program in a consistent and sustainable manner.

For 2018 CSR program, PP Presisi has fulfilled its responsibility towards employees through implementation of ISO & OHSAS systems, Fleet Management, SAP, Safety, Health & Environment, Project Management, and Quick Response Unit in creating safety and security for workers in execution of various projects. Moreover, the Company also has carried out social responsibility towards the surrounding community and environment of the Company’s construction projects through Social Care programs to maintain environment preservation and improve standard of life of the surrounding community.

Fund allocation used by PP Presisi in performing all CSR programs in 2018 amounted to Rp1.3 billion, increased compared to CSR fund allocation in the previous year.. Going forward, we are committed to remain consistent in performing CSR program to realize sustainable business growth and generate positive value for shareholders and stakeholders.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Hingga 31 Desember 2018, tidak terdapat perubahan dalam susunan Direksi Perseroan. Direksi PP Presisi telah ditetapkan berdasarkan Akta No. 27 tanggal 14 Agustus 2017, dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Adapun komposisi Direksi PT PP Presisi Tbk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position
Ir. Iswanto Amperawan	Direktur Utama / President Director
Benny Pidakso, SE, MM	Direktur / Director
Ir. Hasanin Ade Putra, MT	Direktur / Director
Ir. Arief Subyandono	Direktur Independen / Independent Director

APRESIASI

Akhir kata, kami segenap jajaran Direksi hendak menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para pemegang saham yang telah memberikan dukungan serta kritik dan saran yang berguna dalam menjaga kelangsungan dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan usaha PP Presisi agar selalu sesuai pada koridor yang ditetapkan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas segala pemberian nasihat dan arahan strategi kepada kami dalam rangka meningkatkan kinerja Perseroan selama tahun buku 2018.

Tak lupa, kami memberikan apresiasi kepada seluruh insan PP Presisi yang telah menyumbangkan tenaga, waktu dan ide-ide terbaiknya demi kemajuan Perseroan hingga mampu mencetak pencapaian dan prestasi kinerja yang memuaskan. Kami juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para pemangku kepentingan lain, baik regulator, pelanggan, maupun mitra kerja sama atas dukungan yang telah diberikan kepada kami sehingga kami mampu menjalankan pengelolaan bisnis dengan sangat baik. Semoga usaha dan kerja keras yang telah kami berikan tidak hanya berguna bagi kemajuan bisnis Perseroan, melainkan juga bagi para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan.

Jakarta, Maret 2019 / March 2019
Atas nama Direksi,
On behalf of the Board of Directors,



Ir. Iswanto Amperawan
Direktur Utama
President Director

CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS' COMPOSITION

As of December 31, 2018, there were no changes in composition of the Board of Directors of the Company. The Board of Directors of PP Presisi has been appointed based on Deed No.27 dated August 14, 2017 with the term of office for 5 (five) years.

Composition of the Board of Directors of PT PP Presisi Tbk in 2018 was as follows:

APPRECIATION

In conclusion, we, as the Board of Directors, would like to give our utmost appreciation to shareholders for their support, criticism, and suggestion that are useful in maintaining continuity of business activities of PP Presisi so that such activities are within the corridor that has been set. We also would like to express our heartfelt gratitude to the Board of Commissioners for their advices and directions to us in enhancing the Company's performance during 2018 fiscal year.

We also wish to convey our appreciation to all personnel of PP Presisi that have contributed their energy, time, and best ideas for the Company's progress that enable PP Presisi to record satisfying performance. We would also like to express our greatest appreciation towards other stakeholders, such as regulators, customers, or business partners for their support that enable us to perform business management properly. We hope that our effort and hard work are not only beneficial for the Company's business success, but also beneficial for Shareholders and Stakeholders.

“”

PT PP Presisi Tbk merupakan perusahaan konstruksi terintegrasi berbasis alat berat terkemuka di Indonesia yang memiliki kapabilitas untuk menyediakan jasa konstruksi dari tujuh (7) lini bisnis yaitu civil work, ready mix, foundation, formwork, erector, jasa pertambangan terintegrasi, dan penyewaan alat berat yang memberikan value added kepada para konsumen. Perseroan menerapkan ERP-SAP dan didukung oleh ISO Management System 9001:2015, Management Quality, ISO 14001:2007 Environmental Management System, serta OHSAS 18001:2015 Occupational Health and Safety sebagai bagian dari operational excellence improvement Perseroan

PT PP Presisi Tbk is a leading integrated heavy equipment-based construction company in Indonesia that has the capability to provide construction services from seven (7) business lines, namely civil work, ready mix, foundation, formwork, erector, integrated mining services, and heavy equipment rental that provides value added to consumers. The Company implements ERP-SAP and is supported by ISO Management System 9001:2015, Management Quality, ISO 14001:2007 Environmental Management System, and OHSAS 18001:2015 Occupational Health and Safety as part of the Company's operational excellence improvement.



03





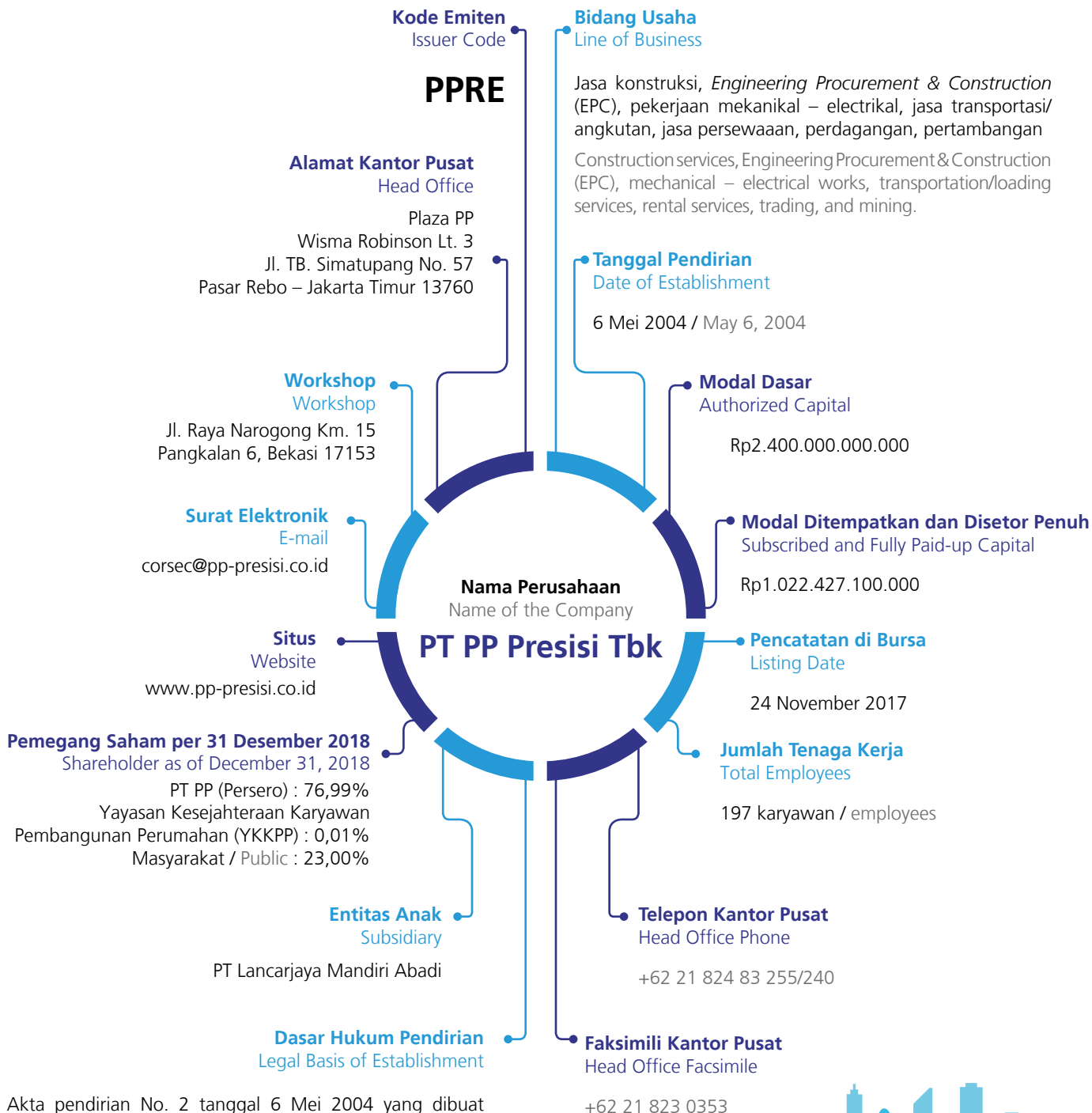
Profil Perusahaan

Company Profile



Informasi Perusahaan

Company Information



Akta pendirian No. 2 tanggal 6 Mei 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Chotib, SH dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. C-16498HT.01.01.TH.2004 tanggal 1 Juli 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 24 April 2012, Tambahan No. 20149

Deed of establishment No. 2 dated May 6, 2004, drawn up by Notary, Muhammad Chotib, SH and approved by the Minister of Law and Human Rights based on its Decree No. C-16498HT.01.01.TH.2004 dated July 1, 2004 and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 33 dated April 24, 2012, Supplement No. 20149.



Business Excellent

Business Excellent



Sekilas PP Presisi

PP PRESISI at a Glance



PT PP Presisi Tbk, yang semula dikenal dengan nama PT Prima Jasa Aldodua (PT PJA), didirikan berdasar Akta Notaris Muhammad Chotib S.H. No.02 tanggal 6 Mei 2004 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM tanggal 1 Juli 2004. Sejak Juni 2014, PT PP Presisi Tbk menjadi anak perusahaan PT PP (Persero) Tbk.

PT PP Presisi Tbk adalah perusahaan jasa konstruksi yang berbasis pada 7 (tujuh) lini bisnis utama yaitu *civil work, ready mix, foundation, formwork, equipment rental, erector, dan mining services*.

PT PP Presisi Tbk berkomitmen untuk terus mengembangkan bisnisnya di bidang konstruksi dengan menyediakan kebutuhan pelanggan secara terintegrasi, mengetahui kebutuhan pelanggan, dan meningkatkan pelayanan di semua bidang konstruksi.

PT PP Presisi Tbk, formerly known as PT Prima Jasa Aldodua (PT PJA), established based on the Deed drawn up by Notary, Muhammad Chotib S.H., No. 02 dated May 6, 2004 and approved by the Minister of Law and Human Rights on July 1, 2004. Since June 2014, PT PP Presisi Tbk became a subsidiary of PT PP (Persero) Tbk.

PT PP Presisi Tbk is a construction service company based on 7 (seven) main lines of business, namely *civil work, ready mix, foundation, formwork, equipment rental, erector, and mining services*.

PT PP Presisi Tbk is committed to continuously developing its business in construction sector by providing customer needs in an integrated manner, understanding customer needs, and improving services in all construction sectors.

Bidang Usaha

Line of Business

Kegiatan Usaha Sesuai Anggaran Dasar

Berdasarkan Anggaran Dasar PT PP Presisi Tbk No. No. 27 tanggal 14 Agustus 2017 maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan adalah untuk menjalankan usaha di bidang Konstruksi, Engineering Procurement and Construction (EPC), Jasa Mekanikal Elektrikal, Jasa Transportasi/Angkutan, Jasa Penyewaan, Perdagangan, Pertambangan, Layanan Jasa Peningkatan Kemampuan di Bidang Konstruksi, Jasa Engineering dan Perencanaan, Pengembangan serta Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat.

Kegiatan Usaha pada Tahun 2018

PP Presisi menjalankan 7 (tujuh) lini bisnis, yaitu *civil work*, *ready mix*, *foundation*, *formwork*, *equipment rental*, *erector* dan *mining services*, yang mana dua lini bisnis terakhir merupakan hasil ekspansi usaha yang dilakukan Perseroan tahun 2018.

Business Activities Pursuant to Articles of Association

Pursuant to the Articles of Association of PT PP Presisi Tbk No. 27 dated August 14, 2017, the purposes and objectives of the Company's establishment are to carry out business in the field of Construction, Engineering, Procurement, and Construction (EPC), Electric Mechanical Service, Transportation Service, Leasing, Trading, Mining Services, Competency Improvement Service in Construction, Engineering and Planning, Development and Optimization of Resources of the Company, to produce high quality goods and service with strong competitiveness.

Business Activities in 2018

PP Presisi engages in 7 (seven) lines of business, namely civil work, ready mix, foundation, formwork, equipment rental, erector, and mining services of which the last two business were the result of business expansion in 2018.



Lini Bisnis

Line of Business



CIVIL WORK

Di Indonesia, jenis pekerjaan konstruksi disebutkan dalam undang-undang jasa konstruksi (UU No. 18 Tahun 1999), salah satunya adalah Pekerjaan Sipil yang mencakup antara lain pembangunan pelabuhan, bandar udara, jalan kereta api, pengamanan pantai, saluran irigasi atau kanal, bendungan, terowongan, struktural gedung, jalan, jembatan, reklamasi rawa, pekerjaan pemasangan perpipaan, pekerjaan pemboran, dan pembukaan lahan.

Perseroan merupakan entitas anak dari PTPP yang bertanggung jawab dalam menjalankan Pekerjaan Sipil yang merupakan salah satu proses penting dalam keseluruhan proses konstruksi suatu proyek.

Saat ini Pekerjaan Sipil yang dilakukan oleh Perseroan meliputi pekerjaan proyek infrastruktur, diantaranya pekerjaan proyek jalan, bendungan, dan dermaga yang masing-masing Perseroan melakukan tipe pekerjaan *land clearing*, *cut and fill*, lapisan perkerasan jalan, *concrete*, dan *rigid/flexible pavement*. Proyek-proyek civil work yang dikerjakan oleh Perseroan antara lain Proyek Jalan Tol Pandaan Malang, Proyek Runway Soetta Sec 1, Proyek Jalan Tol Manado Bitung, Proyek Bendungan Way Sekampung, Proyek Runway Soetta Sec 2, Proyek Jalan Tol Serang Panimbang, Proyek Jalan Tol Pekanbaru Dumai.

Dalam pelaksanaannya, Perseroan bekerja sama dengan vendor-vendor seperti Kobelco, United Tractor, Lieber, Caterpillar, XCMG, Zoomlion, dan lainnya sebagai pemasok alat berat.

CIVIL WORK

In Indonesia, one of construction work types defined in the Law of Construction Services (UU No. 18 of 1999) is Civil Work that includes, among others, construction of ports, airports, railways, coastal management, irrigation channels or canals, dams, tunnels, building structures, roads, bridges, swamp reclamation, pipe installations, drillings, and land clearings.

The Company is a subsidiary of PTPP that is responsible for carrying out Civil Work, which is one of key processes in the overall construction process of a project.

At present, Civil Works conducted by the Company includes infrastructure projects, such as road, dam, and port projects. In each project, the Company performs land clearing, cut and fill, road paving, concrete, and rigid/flexible pavement. Civil work projects worked by the Company are among others Pandaan Malang Toll Road Project, Soetta Runway Sec 1 Project, Manado Bitung Toll Road Project, Way Sekampung Dam Project, Soetta Runway Sec 2 Project, Serang Panimbang Toll Road Project, Pekanbaru Dumai Toll Road Project.

In practice, the Company cooperates with vendors, such as Kobelco, United Tractor, Lieber, Caterpillar, XCMG, Zoomlion, and others as heavy equipment supplier.



READY MIX

Ready Mix merupakan istilah beton yang sudah siap untuk digunakan dalam proses konstruksi. Pada umumnya, beton yang digunakan dalam suatu proyek konstruksi dikirim dari pemasok utama, dimana dengan kondisi tersebut memerlukan waktu antar sesuai dengan jarak antara proyek dengan pabrik pemasok tersebut serta memerlukan armada angkut yang lebih banyak.

Perseroan melalui kegiatan usaha *ready mix*-nya, menyiapkan *batching plant* untuk masing-masing proyek, yaitu pabrik sementara yang memproduksi beton *ready mix*. Penggunaan *Ready Mix* dapat memangkas waktu antar dan tidak memerlukan armada angkut yang besar dalam transportasinya, dengan kualitas beton yang terjaga. Produksi beton dan agregat siap pakai ini dilaksanakan Perseroan untuk proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan gedung. Proyek-proyek *ready mix* Perseroan berbeda dengan perusahaan beton lain, dimana Perseroan fokus pada transaksi B2B dengan membangun *batching plant* di proyek-proyek pelanggan Perseroan. Pada umumnya, perusahaan beton lain menjual secara eceran produknya (B2C). Dalam pelaksanaannya, Perseroan bekerja sama dengan vendor-vendor seperti Semen Indonesia, semen Holcim, semen Merah Putih, dan lainnya sebagai pemasok semen.

Proyek-proyek *ready mix* yang telah dilaksanakan oleh Perseroan, diantaranya Proyek PLTA Takengon, Proyek Bendungan Way Sekampung, Proyek Nipa dan lainnya.

READY MIX

Ready Mix is a term for concrete that has been prepared to be used in construction process. In general, the concrete used in a construction project is delivered from the main supplier, which consumes time for delivery in accordance with the distance between project location and the supplier's plant as well as requires more transportation vehicles.

Through its ready mix business activities, the Company prepares batching plants form each project, which is a temporary plant that produces ready mix concrete. The use of Ready Mix is able to cut delivery time and do not require extensive transportation vehicles as well as maintain the quality of the concrete. The Company carries out the production of ready mix concrete and aggregate for infrastructure and building construction projects. The Company's ready mix projects differ from other concrete companies in the sense that the Company is focused on B2B transactions by building batching plants at the project sites of its customers. Generally, other concrete companies sell their products in retail (B2C). In its implementation, the Company cooperates with vendors, such as Semen Indonesia, Holcim Cement, Semen Merah Putih, and others as cement supplier.

The Company's ready mix projects are, among others, PLTA Takengon Project, Way Sekampung Project, Nipa Project, etc.



FOUNDATION

Pada pelaksanaan suatu proyek konstruksi, sebuah bangunan maupun suatu proyek infrastruktur tidak dapat begitu saja didirikan langsung diatas permukaan tanah, untuk itu diperlukan adanya struktur di bawah yang disebut pondasi. Pondasi adalah bagian dari konstruksi yang berfungsi mendukung seluruh berat dari bangunan dan meneruskannya ke tanah dibawahnya. Pembuatan pondasi juga didukung dengan pekerjaan galian tanah, karena diperlukan daya tanah yang kuat untuk menjamin kestabilan pondasi.

Kegiatan usaha Pondasi ini dimulai oleh Perseroan sejak tahun 2017, terutama untuk mendukung kegiatan usaha Pekerjaan Sipil yang dilakukan Perseroan. Diharapkan seiring dengan bertambahnya jenis kegiatan usaha konstruksi yang dilakukan Perseroan, pelanggan Perseroan dapat menggunakan jasa Perseroan sebagai *integrated heavy equipment based construction company*. Dalam pelaksanaannya, Perseroan bekerja sama dengan vendor-vendor seperti XCMG, Bauer, Lieber, dan lainnya sebagai pemasok alat berat.

Proyek-proyek *foundation* yang dikerjakan oleh Perseroan antara lain Proyek Westown Surabaya, Proyek Tana Babarsari Yogyakarta, Proyek jalan tol Pandaan-Malang, Proyek jalan tol Manado-Bitung, Proyek Apartement Green Park Terrace Cilegon.

FOUNDATION

In executing a construction project, a building or an infrastructure project is not built overnight above the ground. Therefore, an underground structured called foundation is required. The foundation is part of a construction that has the function to support the entire weight of a building and distribute the weight to the ground underneath it. Foundation's construction is also supported by soil excavation, due to the need of strong soil bearing capacity to ensure the stability of the foundation.

The Company started the business activity of Foundation in 2017, mainly to support the Civil Work activities of the Company. It is expected that along with the Company's construction business expansion, customers are able to utilize the Company's services as a integrated heavy equipment based construction company. In its implementation, the Company cooperates with vendors, such as XCMG, Bauer, Lieber, and others as heavy equipment supplier.

Foundation's projects that have been performed by the Company are, among others Westown Surabaya Project, Tana Babarsari Yogyakarta Project, Pandaan-Malang toll road Project, Manado-Bitung toll road Project, Green Park Terrace Cilegon Apartment Project.



FORMWORK

Bekisting atau *formwork* adalah suatu konstruksi pembantu sementara yang berupa sebuah cetakan yang digunakan untuk menahan beton selama beton dituang dan dibentuk sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Pada saat beton yang dituangkan telah mencapai kekuatan yang cukup, bekisting akan dilepas atau dibongkar. Pengerjaan Bekisting memerlukan kecermatan dalam perencanaan serta aplikasinya, karena bekisting harus didirikan dengan kekuatan yang terukur dan faktor keamanan yang memadai sehingga sanggup menyangga sebuah proyek bangunan tanpa mengalami keruntuhan atau berbahaya bagi pekerja dan konstruksi beton.

Kegiatan usaha *formwork* merupakan salah satu kegiatan usaha konstruksi Perseroan dalam mendukung misi Perseroan untuk menjadi *integrated heavy equipment based construction company* bagi pelanggan. Tidak hanya *formwork*, tapi Perseroan juga dapat memberikan jasa yang lebih lengkap dengan struktur *engineering*. Dalam pelaksanaannya, Perseroan bekerja sama dengan vendor-vendor seperti PCH Australia, Nanjing Wellmade, Papan Mandiri Cemerlang, CCI, Kumkang Kind Co., Ltd, South Korea dan lainnya.

Proyek-proyek *formwork* yang telah dilaksanakan oleh Perseroan, diantaranya Proyek Aeon Sentul, Proyek PIM 3 & Office Tower, Proyek Grand Darmahusada Lagoon, Proyek Pollux Batam, Proyek Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, Proyek Saumata Apartment, Proyek Evencio Apartment.

FORMWORK

Formwork is a temporary support structure in the form of a mold used to hold concrete while it is being poured and molded into the desired form. When the poured concrete has reached the sufficient strength, the formwork is dismantled or demolished. Formwork processing requires precision in planning and application because it must be built with measured strength and adequate safety factor that allow formwork to support a building project without risking any collapse or danger for workers and concrete structure.

The business activity of formwork is one of the Company's construction business activities in supporting its mission to become integrated heavy equipment based construction company for customers. In addition to formwork, the Company also provides more comprehensive service with engineering structure. In its implementation, the Company cooperates with vendors, such as PCH Australia, Nanjing Wellmade, Papan Mandiri Cemerlang, CCI, Kumkang Kind Co., Ltd, South Korea, and others.

Formwork's projects that have been carried out by the Company are, among others Aeon Sentul Project, PIM 3 & Office Tower Project, Grand Darmahusada Lagoon Project, Pollux Batam Project, Syamsudin Noor Airport Banjarmasin Project, Saumata Apartment Project, Evencio Apartment Project.



EQUIPMENT RENTAL

Pada awal berdiri Perseroan, kegiatan usaha utama yang dilakukan adalah penyewaan alat-alat konstruksi termasuk alat berat seperti *tower crane*, *passenger hoist*, *earth moving equipment*, genset dan perancah bekisting. Alat-alat konstruksi tersebut mengacu pada kendaraan dan peralatan *heavy-duty*, yang dirancang khusus untuk melaksanakan tugas konstruksi, yang paling sering melibatkan operasi pekerjaan tanah.

Kemudian pada tahun 2016, Perseroan melakukan transformasi bisnis dengan merambah lini bisnis *civil work* melalui pengembangan bisnis secara organik, sehingga alat berat yang semula disewakan digunakan untuk *civil work*.

Dalam menjalankan kegiatan usaha equipment rental, Perseroan memberikan jasa yang lengkap dengan memastikan ketersediaan alat-alat yang dapat diandalkan, perawatan berjangka untuk memastikan peralatan dalam kondisi prima, serta Quick Response Unit yang selalu siap dihubungi selama 24 jam. Perseroan bekerja sama dengan vendor-vendor seperti Potaindo Machinery Indonesia (*Tower Crane*), Tass Engineering (*Concrete Pump*), Putra Bangun Persada (*Tower Crane* dan *Passenger Hoist*), dan lainnya.

EQUIPMENT RENTAL

In the early years of the Company, the main business activity of the Company is construction equipment rental, including heavy equipment, such as tower crane, passenger hoist, earthmoving equipment, generator set and formwork scaffolding. The construction equipment refers to vehicles and heavy-duty equipment, especially-designed for performing construction duties that mainly involve earthwork operations.

Then in 2016, the Company carried out business transformation by expanding to civil work business line through organic business development, therefore the heavy equipment that previously rented are used for civil work.

In carrying out heavy equipment rental's business activities, the Company provides comprehensive services by ensuring the availability of reliable equipment, periodical maintenance to ensure that the equipment is in prime conditions, as well as Quick Response Unit that is available for 24 hours. The Company works with vendors for this business line, such as Potaindo Machinery Indonesia (*Tower Crane*, Tass Engineering (*Concrete Pump*), Putra Bangun Persada (*Tower Crane* and *Passenger Hoist*), and others.



ERECTOR

Erector merupakan lini bisnis baru Perseroan hasil transformasi bisnis yang dilakukan selama semester satu 2018 ini. Lini bisnis erector bukan hal yang baru bagi Perseroan. Selama ini Perseroan telah memiliki alat berat yang dibutuhkan untuk pekerjaan erector bahkan telah mengerjakan pekerjaan yang memiliki hubungan dengan pekerjaan erector. Tujuan Perseroan untuk merambah bisnis erector adalah untuk melayani pembangunan pembangkit listrik yang kini marak dilakukan di Indonesia.

Proyek Erector yang dikerjakan oleh Perseroan antara lain Proyek PLTD Senayan, Proyek PLTMG Bangkanai.

ERECTOR

Erector is the Company's new business line as resulting of business transformation carried out during the first semester of 2018. The erector business line is not new to the Company. So far, the Company has the heavy equipment needed for erector's work and even finished works that are related to erector's work. The Company's aim to expand the erector business is to serve the construction of power plants that are now rampant in Indonesia.

Erector projects worked by the Company are, among others PLTD Senayan Project, PLTMG Bangkanai Project.



MINING SERVICES

Mining Services merupakan hasil peningkatan engineering capacity, dari hanya memiliki kemampuan jasa angkut batu bara (*coal hauling*) menjadi memiliki kemampuan untuk melakukan jasa pertambangan secara terintegrasi. Lini bisnis jasa pertambangan bukan hal yang baru bagi Perseroan. Entitas anak Perseroan, LMA telah mengerjakan jasa pertambangan sejak tahun 2002, bahkan sebelum LMA memasuki bisnis civil work pada tahun 2004.

Perseroan memiliki proyek coal hauling antara lain *coal hauling* Sumatera Selatan; Atlas Group, Sinarmas Group, Rajawali Group dan *mining services* di Kalimantan Timur.

MINING SERVICES

Mining services is the Company's new business line as resulting of improved engineering capacity, from only having the capability of coal hauling to have the ability to carry out integrated mining services. The mining services business line is not new to the Company. The Company's subsidiary, LMA has been working on mining services since 2002, even before the LMA entered the civil work business in 2004.

The Company has coal hauling projects, some of them are South Sumatera coal hauling; Atlas Group, Sinarmas Group, Rajawali Group, and mining services in East Kalimantan.

Kepemilikan Alat Berat

Heavy Equipment Ownership

Large Scale Fleet (Mobile)

With Reputable Brands

Sub total: 2,388 units



361
Excavator



1.606
Dump Truck



92
Bulldozer



160
Roller, Loader &
Grader



131
Mixer Truck



13
Concrete Paver



11
Asphalt Mixer & Finisher



14
Stone Crusher

Large Scale Fleet (Non-Mobile)

With Reputable Brands

Subtotal: 149 units



Perkembangan Proyek Strategis Perseroan 2018

Development of the Company's Strategic Projects In 2018

Segmen Bisnis Konstruksi / Construction Business Segment	Nama Proyek/Kegiatan / Project Name/Activity	Status Pembangunan / Construction Status
Civil Work	1. Proyek Tol Bakauheni Sidomulyo - Lampung	Telah Selesai / Completed
	2. Proyek Bandara Kulon Progo	Sedang dalam tahap pembangunan / In Progress
	3. Proyek Jalan Tol Pandaan Malang	
	4. Proyek Runway 3 Bandara Soetta Sec 1 & 2	
	5. Proyek Jalan Tol Manado Bitung	
	6. Proyek Bendungan Way Sekampung,	
	7. Proyek Leuwi Keris	
	8. Proyek Jalan Tol Serang Panimbang	
	9. Proyek Jalan Tol Pekanbaru Dumai	
Ready Mix	1. Proyek Pandaan Malang	Sedang dalam tahap pembangunan / In Progress
	2. Proyek Manado Bitung	
	3. Proyek PLTA Takengon	
	4. Proyek Bendungan Way Sekampung	
Formwork	1. Proyek Apartemen The Verde	Telah Selesai / Completed
	2. Proyek PIM 3 & Office Tower	Sedang dalam tahap pembangunan / In Progress
	3. Proyek Grand Dharma Husada Lagoon	
	4. Proyek Pollux Batam	
	5. Proyek Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin	
	6. Proyek Saumata Suite Apartment	
	7. Proyek Evencio Apartment	
Foundation	1. Proyek Pandaan Malang	Sedang dalam tahap pembangunan / In Progress
	2. Proyek Manado Bitung	
	3. Proyek Weston Surabaya	
	4. Proyek Tana Babarsari Yogyakarta	
	5. Proyek Apartment Green Park Terrace Cilegon	
Erector	1. Proyek PLTD Senayan	Telah Selesai / Completed
	2. Proyek PLTMG Bangkanai	Sedang dalam tahap pembangunan / In Progress
Mining Services	1. Proyek coal hauling di Sumatera Selatan	Sedang dalam tahap pembangunan / In Progress
	2. Proyek coal services di Kalimantan Timur	

Visi dan Misi

Vision and Mission

Menjadi Perusahaan konstruksi terintegrasi berbasis alat berat terkemuka di Indonesia & regional

To be a leading integrated heavy equipment based construction company in Indonesia as well as regional

VISI

Vision

1. Menyediakan Jasa konstruksi spesialis dengan diferensiasi produk dan pelayanan prima
2. Meningkatkan bisnis terintegrasi yang memiliki layanan berdaya saing tinggi dan nilai tambah yang optimal bagi pemangku kepentingan
3. Mengedepankan QSHE dan tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan proses bisnis
4. Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan produktif dengan nilai-nilai perusahaan

1. To provide construction with distinguish and excellent products & services
2. To improve integrated business that has high-competitive services and optimal added value to stakeholders
3. To prioritize aspects of SHE and good corporate governance in running business processes
4. To develop professional and productive human resources in accordance with corporate values

MISI

Mission

Pernyataan / Statement

Visi dan Misi Perusahaan yang ditetapkan Direksi berdasarkan Keputusan Direksi PT PP Presisi Tbk No. 028/SK/PPRE/DIR/IX/2018 tentang Visi dan Misi Perusahaan.

The Company's Vision and Mission are formulated by the Board of Directors pursuant to the Decree of Board of Directors of PT PP Presisi Tbk No. 028/SK/PPRE/DIR/IX/2018 concerning Vision and Mission of the Company.

Budaya dan Nilai Perusahaan

Corporate Culture and Value

Budaya Perseroan ini, dihayati dan dijalankan dengan sukarela dan sukacita oleh Perseroan. Budaya Perusahaan ini meliputi 3 (tiga) hal: Budaya kerja keras, Budaya disiplin, Budaya bersyukur.

This Corporate Culture is upheld and carried out voluntarily and happily by the Company. This Corporate Culture includes 3 (three) matters: Culture of hard work, Culture of discipline, and culture of gratefulness.

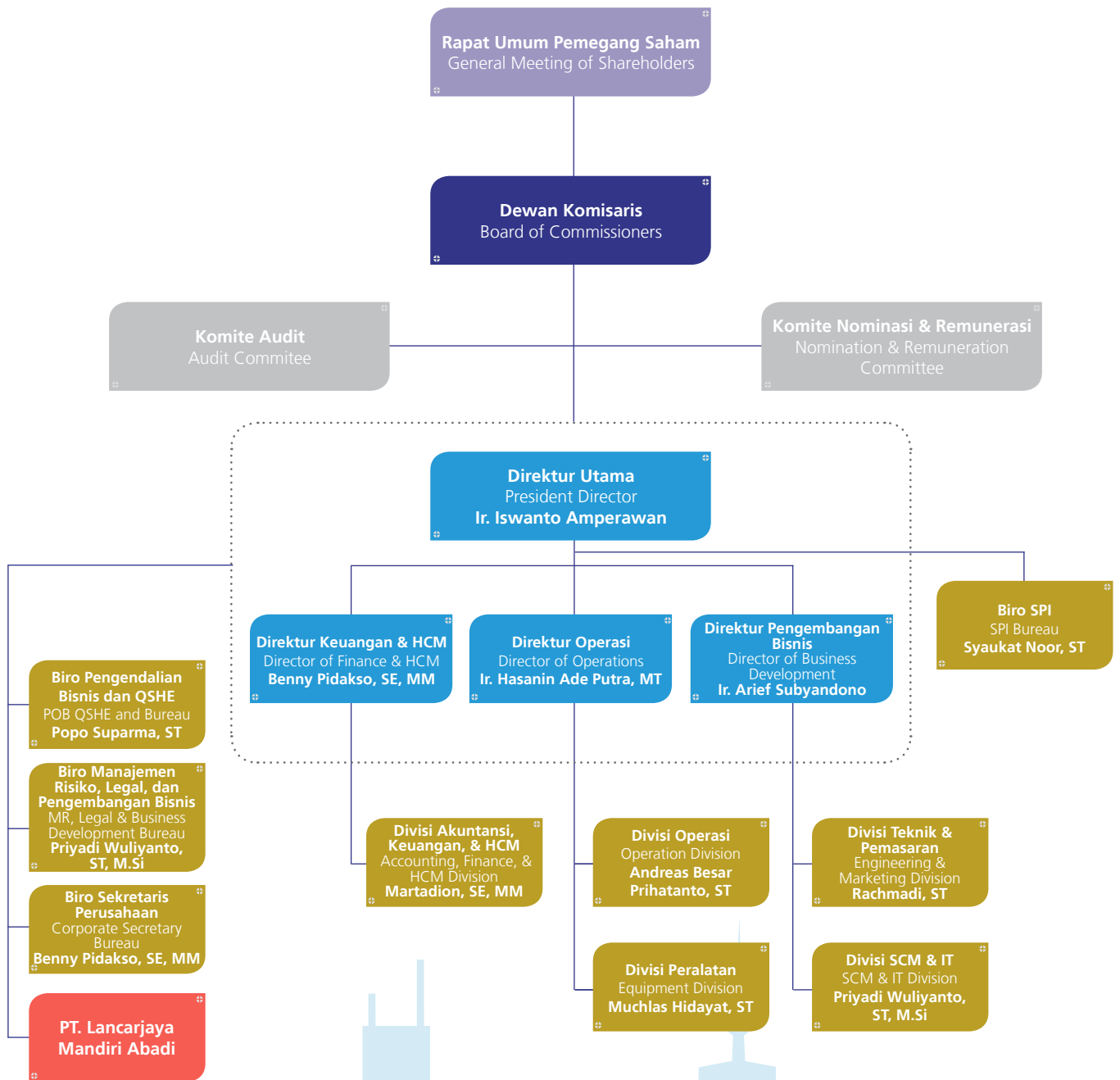
Sebagai penyempurnaan dari Budaya Perusahaan tersebut di atas, manajemen telah merumuskan nilai-nilai Perusahaan yang disingkat dengan sebutan "PPBID" terdiri dari:

As improvement from Corporate Culture, the management has formulated the Company's values, known as "PPBID" which consists of:

<p>PEDULI / CARE</p> <p>P</p>	<p>Berorientasi Pada Kepuasan Pelanggan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsif • Proaktif 	<p>Customer Satisfaction Oriented</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsive • Proactive
<p>PROFESIONAL / PROFESSIONAL</p> <p>P</p>	<p>Kompeten dan Bertanggung Jawab</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerja keras, kerja cerdas dan inovatif • Bertanggung jawab terhadap tugas • Fleksibel dan gesit • Keinginan belajar dan melakukan perbaikan terus menerus • Berwawasan global 	<p>Competent and Responsible</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hard work, smart and innovative work • Responsible for the task • Flexible and nimble • The desire to learn and make continuous improvement • Global perspective
<p>BERSYUKUR / BE GRATEFUL</p> <p>B</p>	<p>Berjiwa Besar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sopan santun, toleransi, saling hormat • Beriman dan bertaqwa • Berpikir positif • Kerja ikhlas 	<p>Having Great Soul</p> <ul style="list-style-type: none"> • Courtesy, tolerance, mutual respect • Faithful and devout • Positive thinking • Work sincerely
<p>INTEGRITAS / INTEGRITY</p> <p>I</p>	<p>Keselarasn Pikiran, Perkataan, Perbuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengutamakan kepentingan perusahaan • Jujur dan transparan • Amanah menjalankan tugas 	<p>Alignment of Mind, Words, Acts</p> <ul style="list-style-type: none"> • Give priority to the Company's interests • Honest and transparent • Amanah perform task
<p>DISIPLIN / DISCIPLINE</p> <p>D</p>	<p>Taat dan Tertib</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taat pada hukum, peraturan dan etika • Tepat janji, tepat waktu 	<p>Obedient and Orderly</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obey the laws, regulations and ethics • Exactly promise, on time

Struktur Organisasi

Organization Structure



Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Profile



Ir. Muhammad Toha Fauzi, MT
Komisaris Utama / President Commissioner

Diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Akta No. 27 tanggal 14 Agustus 2017.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1991) dan Magister Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (2003).

Mulai berkarier di PT PP (Persero) Tbk sejak tahun 1991, dengan jabatan pertama sebagai Site Engineer Manager Cabang II - Palembang hingga tahun 1993. Kemudian, beliau ditunjuk untuk menduduki beberapa posisi, antara lain sebagai Project manager Cabang V - Semarang dan Canag II - Palembang (1993-2006), Kepala Cabang II - Palembang (2006-2007), Kepala Cabang I - Medan (2007-2008), Kepala Divisi Operasi I Medan (2008-2011), Kepala Divisi Operasi II Jakarta (2011-2016), dan Direktur Operasi PTPP (2016-2017).

Di samping menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, beliau juga merangkap jabatan fungsional sebagai Direktur Infra sejak tanggal 16 Maret 2017.

Kewarganegaraan / Nationality :

Indonesia

Tempat, Tanggal Lahir / Place and Date of Birth :

Bangkalan, 28 Januari 1966 / Bangkalan, January 28, 1966

Usia / Age :

(52 tahun / 52 years old)

Domisili / Domicile :

Jakarta

Appointed as President Commissioner of the Company pursuant to Deed No. 27 dated August 14, 2017.

He earned Bachelor's Degree in Civil Engineering from Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1991) and Master's Degree in Civil Engineering from Bandung Institute of Technology (2003).

He joined PT PP (Persero) Tbk since 1991 with the first position as Site Engineer Manager of Branch II - Palembang until 1993. Then, he was appointed to occupy several positions, such as Project Manager of Branch V - Semarang and Canag II - Palembang (1993-2006), Head of Branch II - Palembang (2006-2007), Head of Branch I - Medan (2007-2008), Head of Operation Division I (2008-2011), Head of Operation II Division - Jakarta (2011-2016), and Director of Operation of PT PP (2016-2017).

In addition to serving as President Commissioner of the Company, he also serves as Director of Infrastructure since March 16, 2017.

Kewarganegaraan / Nationality :

Indonesia

Tempat, Tanggal Lahir / Place and Date of Birth :

Ngawi, 17 November 1964 / Ngawi, November 17, 1964

Usia / Age :

(54 tahun / 54 years old)

Domisili / Domicile :

Jakarta



Ir. Nawang Sri Retno Kartiko, M.EngM
Komisaris / Commissioner

Beliau diangkat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 27 tanggal 14 Agustus 2017.

Lulus dengan gelar Sarjana Teknik Arsitektur Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1988 dan *Master of Engineering Management* Melbourne University pada tahun 2008.

Beliau bergabung bersama PT PP Persero Tbk sejak tahun 1989 dengan jabatan pertama sebagai Site Engineer PT PP Persero Tbk Cabang III – Proyek Jakarta International Airport Cengkareng hingga tahun 1989. Kemudian, beliau ditunjuk untuk menduduki beberapa jabatan struktural, seperti Kasie Administrasi Kontrak dan Pemasaran Cabang III Jakarta (1992-1999), Contract Administration Manager Divisi Operasi II Jakarta (1999-2001), Staf Teknik, Quantity Surveyor, Site Engineering Manager Proyek Plaza Ciputat, Tol Ulujami, UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, FX Sudirman, JACC (2001-2006), Staf Asisten Direktur Operasi PTPP (2008-2010), Manager Analisis Operasi PTPP (2010-2015), dan Kepala Divisi Pengendalian Operasi dan Bisnis PTPP (2015-2016).

Hingga saat ini, beliau juga menjabat sebagai Kepala Divisi Supply Chain Management PT PP (Persero) Tbk sejak tahun 2016.

Appointed as Commissioner of the Company pursuant to Deed No. 27 dated August 14, 2017.

She earned Bachelor's Degree in Architecture Engineering from Universitas Gadjah Mada in Yogyakarta and Master of Engineering Management from Melbourne University in 2008.

She joined PT PP Presisi Tbk since 1989 with first position as Site Engineer at PT PP Persero Tbk of Branch III – Jakarta International Airport Cengkareng Project. Then, she was appointed for structural positions, such as Head of Contract Administration and Branch III Marketing Jakarta (1992-1999), Contract Administration Manager of Operation II Division Jakarta (1999-2001), Engineering Staff, Quantity Surveyor, Site Engineering Manager of Plaza Ciputat Project, Ulujami Toll, UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, FX Sudirman, JACC (2001-2006), Staff of Assistant to Director of Operation of PTPP (2008-2010), Operation Analysis Manager of PTPP (2010-2015), and Head of Business and Operation Control Division of PTPP (2015-2016)

Currently, she also serves as Head of Supply Chain Management Head of PT PP (Persero) Tbk since 2016.



Ir. Ketut Darmawan
Komisaris Independen / Independent Commissioner

Kewarganegaraan / Nationality :

Indonesia

Tempat, Tanggal Lahir / Place and Date of Birth :

Singaraja, 11 Juli 1959 / Singaraja, July 11, 1959

Usia / Age :

(59 tahun / 59 years old)

Domisili / Domicile :

Jakarta

Diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Akta No. 27 tanggal 14 Agustus 2017.

Lulus dengan gelar Sarjana Teknik Sipil di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1983 dan pernah menjalani pendidikan di luar negeri dalam bidang *Develop Breakthrough Business Strategy* di Swinburne University of Technology Melbourne.

Beliau telah mengabdikan diri di PT PP (Persero) Tbk sejak tahun 1983, dengan jabatan pertama sebagai staf di Cabang III, Jakarta hingga tahun 1990. Kemudian, beliau ditunjuk untuk menjabat sebagai Project Manager dan Koordinator Project Cabang III Jakarta (1990-1993), Wakil Kepala Cabang III (1993-1995), Manajer Pemasaran di Divisi Pemasaran (1995-1999), Kepala Divisi Pemasaran (1999-2006), Direktur Pemasaran PTPP (2006-2011), dan Direktur Operasi PTPP (2011-2015).

Penghargaan yang pernah beliau terima adalah Lencana Satya Jasa-Perunggu pada tahun 1993 & 2003, yang dianugerahi oleh PT PP (Persero) Tbk.

Saat ini, beliau tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan manapun.

Appointed as Independent Commissioner of the Company pursuant to Deed No. 27 dated August 14, 2017

He earned his Bachelor's Degree in Civil Engineering from Bandung Institute of Technology in 1983 and studied abroad for *Develop Breakthrough Business Strategy* in Swinburne University of Technology Melbourne.

He has devoted his career in PT PP (Persero) Tbk since 1983 with the first position as staff in Branch III, Jakarta until 1990. Then, he was appointed as Project Manager and Coordinator of Branch III Project, Jakarta (1990-1993), Deputy Branch Head III (1993-1995), Marketing Manager in Marketing Division (1995-1999), Head of Marketing Division (1999-2006), Director of Marketing of PTPP (2006-2011), and Director of Operation of PTPP (2011-2015).

He was awarded with Lencana Satya Jaya-Bronze in 1993 & 2003 by PT PP (Persero) Tbk.

Currently, he does not have concurrent position in other companies.

Profil Direksi

Board of Directors' Profile

Kewarganegaraan / Nationality :

Indonesia

Tempat, Tanggal Lahir / Place and Date of Birth

: Bengkulu, 30 Mei 1966 / Bengkulu, May 30, 1966

Usia / Age :

(52 tahun / 52 years old)

Domisili / Domicile :

Jakarta



Ir. Iswanto Amperawan
Direktur Utama / President Director

Diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan berdasarkan Akta No. 27 tanggal 14 Agustus 2017.

He was appointed as President Director of the Company according to Deed No. 27 dated August 14, 2017.

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1991.

He earned Bachelor's Degree in Civil Engineering from Universitas Gadjah Mada in Yogyakarta in 1991.

Beliau bergabung dengan PT PP (Persero) Tbk sejak tahun 1991 dan memulai kariernya sebagai *Site Engineering Manager* Divisi Operasi 1 hingga tahun 1992. Kemudian, beliau dipercaya untuk menjabat sebagai SEM Cabang 2 (1992-1996), SOM Cabang 2 (1994-1995), Project Manager Divisi Operasi 2 (1995-2001), Project Manager & General Manager Divisi Operasi 3 (2001-2005), dan Kepala Cabang 5 Semarang (2013-2015).

He joined PT PP (Persero) Tbk since 1991 and started his career as Site Engineering Manager of Operation Division 1 until 1992. Then, he served as SEM of Branch 2 (1992-1996), SOM of Branch 2 (1994-1995) Project Manager of Operation 2 Division (1995-2001), Project Manager & General Manager of Operation 3 Division (2001-2005), and Head of Branch 5 Semarang (2013-2015).

Selain menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, saat ini beliau juga menduduki posisi sebagai Komisaris Utama PT Lancarjaya Mandiri Abadi sejak tahun 2017.

In addition to serving as President Director of the Company, he also serves as President Commissioner at PT Lancarjaya Mandiri Abadi since 2017.



Benny Pidakso, SE, MM
Direktur Keuangan & HCM /
Finance & HCM Director

Kewarganegaraan / Nationality :

Indonesia

Tempat, Tanggal Lahir / Place and Date of Birth :

Madiun, 17 Februari 1983 / Madiun, February 17, 1983

Usia / Age :

(35 tahun / 35 years old)

Domisili / Domicile :

Jakarta

Diangkat sebagai Direktur Keuangan & HCM Perseroan berdasarkan Akta No. 27 tanggal 14 Agustus 2017. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan (dahulu bernama PT Prima Jasa Aldodua) sejak tahun 2013.

Lulus dengan gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2005 dan Magister Manajemen di Universitas Prasetiya Mulya tahun 2017.

Beliau bergabung bersama PT PP (Persero) Tbk sejak 1 Juni 2005, dengan jabatan pertama sebagai OJK UKP hingga 7 Desember 2005. Kemudian, beliau dipercaya menjabat sebagai Staf Akuntansi Divisi Operasi 3 (2005-2006), Site Administration Manager Divisi Operasi 3 (2006-2011), Staf Akuntansi UKP (2009), Site Administration Manager Divisi Operasi 3 (2009-2011), dan ASKU Cabang VII (2011-2013).

Hingga saat ini, beliau tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan manapun.

Appointed as Director of Finance & HCM of the Company pursuant to Deed No. 27 dated August 14, 2017. Previously, he served as Director of Finance of the Company (formerly PT Prima Jasa Aldodua) since 2013.

He earned Bachelor's Degree in Accounting Economy from Universitas Airlangga in Surabaya in 2005 and Master's Degree in Management from Universitas Prasetiya Mulya in 2017.

He joined PT PP (Persero) Tbk since June 1, 2005 with the first position as OJK UKP until December 7, 2005. Then, he served as Accounting Staff in Operation 3 Division (2005-2006), Site Administration Manager in Operation 3 Division (2006-2011), Accounting Staff in UKP (2009), Site Administration Manager in Operation 3 Division (2009-2011), and ASKU Branch VII (2011-2013).

Currently, he does not have concurrent position in other companies.

Kewarganegaraan / Nationality :

Indonesia

Tempat, Tanggal Lahir / Place and Date of Birth :

Oku Timur, 4 November 1965 /

Oku Timur, November 4, 1965

Usia / Age :

(53 tahun / 53 years old)

Domisili / Domicile :

Jakarta



Ir. Hasanin Ade Putra, MT

Direktur Operasi / Operation Director

Diangkat sebagai Direktur Operasi Perseroan berdasarkan Akta No. 27 tanggal 14 Agustus 2017. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Operasi Perseroan (dahulu bernama PT PP Peralatan Konstruksi) sejak tahun 2016.

Lulus dengan gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1991. Saat ini, beliau sedang menempuh pendidikan Magister Teknik Sipil di Universitas Lambung Mangkurat. Spesialisasi beliau adalah di bidang Sipil (Infrastruktur).

Beliau bergabung bersama PT PP (Persero) sejak Februari 1992, dengan jabatan pertama sebagai Staf Anggaran Divisi Operasi 1 hingga tahun 1993. Setelah itu, beliau dipercaya menduduki jabatan sebagai Project Manager K3 Divisi Operasi 1 (1993-1994), SOM Divisi Operasi 1 (1994-1996), Project Manager Divisi Operasi 1 (1996-2000), TS DVRT (2000), Project Manager Divisi Operasi 2 (2002), Project Manager Divisi Operasi 3 (2002-2006), Staf Anggaran UKP (2006), Project Manager Divisi Operasi 3 (2006-2007), Staf UKP (2007), Project Manager Divisi Operasi 3 (2007-2010), Marketing Manager-1 Divisi Operasi 3 (2009-2011), Project Manager EPC (2011-2015), Project Manager K1 EPC (2015-2016), Marketing Manager EPC (2016).

Hingga saat ini, beliau tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan manapun.

He was appointed as Operation Director based on Deed No. 27 dated August 14, 2017. Previously, he served as Director of Operation of the Company (formerly PT PP Peralatan Konstruksi) since 2016.

He earned Bachelor's Degree in Civil Engineering from Universitas Gadjah Mada Yogyakarta in 1991. Currently, he studies Master's Degree in Civil Engineering in Universitas Lambung Mangkurat. His specialization is in Civil (Infrastructure) sector.

He joined PT PP (Persero) since February 1992 with the first position as Budgeting Staff in Operation 1 Division until 1993. After that, he served as Project Manager of OHS in Operation 1 Division (1993-1994), SOM of Operation 1 Division (1994-1996), Project Manager of Operation 1 Division (1996-2000), TS DVRT (2000), Project Manager of Operation 2 Division (2002), Project Manager of Operation 3 Division (2002-2006), Budgeting Staff in UKP (2006), Project Manager in Operation 3 Division (2006-2007), UKP Staff (2007), Project Manager in Operation 3 Division (2009-2010), Marketing Manager-1 in Operation 3 Division (2009-2011), Project Manager of EPC (2011-2015), Project Manager of K1 EPC (2015-2016), Marketing Manager of EPC (2016).

Currently, he does not have concurrent position in other companies.



Ir. Arief Subyandono

Direktur Independen / Independent Director

Diangkat sebagai Direktur Independen Perseroan berdasarkan Akta No. 27 tanggal 14 Agustus 2017.

Lulus dengan gelar Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya pada tahun 1985.

Mulai berkarier di lingkungan PT PP sejak tahun 1986, dengan jabatan awal sebagai Site Engineering Manager Divisi Operasi 1 hingga tahun 1997. Kemudian, beliau menduduki beberapa jabatan struktural seperti Project Manager Divisi Operasi 1 (1997-2007), Kepala Divisi Teknik (2007-2008), Project Manager Divisi Operasi 1 (2008), General Manager Divisi Operasi 1 (2008-2011), Project Manager Divisi EPC (2011-2015), Direktur PT Muba Daya Pratama (2015-2016), dan Direktur Operasi PT PP Energi (2016-2017).

Beberapa prestasi yang beliau raih adalah Lencana Satya Jasa Perunggu-1997 dan Lencana Satya Jasa Perak-2007 dari PT PP (Persero) Tbk.

Saat ini, beliau tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan manapun.

Kewarganegaraan / Nationality :

Indonesia

Tempat, Tanggal Lahir / Place and Date of Birth :

Blitar, 02 Januari 1962 / Blitar, January 02, 1962

Usia / Age :

(56 tahun / 56 years old)

Domisili / Domicile :

Jakarta

Appointed as Independent Director of the Company based on Deed No. 27 dated August 14, 2017.

He earned Bachelor's Degree in Civil Engineering from Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya in 1985.

He initially joined PT PP in 1986 with the first position as Site Engineering Manager of Operation Division 1 until 1997. Then, he served in several structural positions, such as Project Manager of Operation 1 Division (1997-2007), Head of Engineering Division (2007-2008), Project Manager of Operation 1 Division (2008), General Manager in Operation 1 Division (2008-2011), Project Manager in EPC Division (2011-2015), Director at PT Muba Daya Pratama (2015-2016), and Director of Operation at PT PP Energi (2016-2017).

He received Lencana Satya Jasa – Bronze in 1997 and Lencana Satya Jasa – Silver in 2007 from PT PP (Persero) Tbk.

Currently, he does not have concurrent position in other companies.

Daftar Pejabat Perusahaan

List of Company's Officials

Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Jayabaya, Jakarta. Beliau diangkat menjadi Ketua Satuan Pengawas Internal PP Presisi berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. 001/KOM/PPRE/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Biro Satuan Pengawasan Internal.

Beliau telah menekuni karier di lingkungan PT PP (Persero) Tbk sejak tahun 1991 dengan berbagai jabatan strategis, diantaranya sebagai *Superintendence*, QC & K3L, *Site Engineering Manager*, dan Pengendalian Mutu & K3L. Pada tahun 2001 hingga 2011, beliau ditunjuk sebagai Manajer QSHE Divisi Operasi II, kemudian menjadi Manajer Pengembangan Sistem Perusahaan (2011-2017), dan Kepala Departemen *Knowledge Management* (2017). Saat ini, beliau tidak rangkap jabatan di perusahaan lain.

Warga Negara Indonesia, 42 tahun. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Ekonomi STIE Rawamangun (1999), kemudian melanjutkan studi S2 Manajemen Keuangan di Universitas Pancasila (2010). Beliau ditunjuk sebagai Kepala Divisi Akuntansi, Keuangan & Human Capital Management (HCM) PT PP Presisi Tbk sejak tahun 2014.

Beliau telah bergabung dengan PT PP (Persero) Tbk sejak tahun 2004, dengan posisi pertama sebagai Staf Akuntansi dan Keuangan. Kemudian, beliau bergabung di PT PP Presisi Tbk sebagai Staf Akuntansi dan Keuangan PT PP Presisi Tbk (2005 – 2010) dan Kepala Departemen Akuntansi, Keuangan, dan HCM (2010-2014). Saat ini, beliau tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain.

Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Merdeka, Malang pada tahun 2014. Beliau ditunjuk sebagai Kepala Divisi Operasi PT PP Presisi Tbk sejak tahun 2017.

Beliau telah bergabung dengan PT PP (Persero) Tbk sejak 28 tahun silam dengan menduduki jabatan strategis, antara lain sebagai Staf Metode, GSP, SEM, SOM, dan PM di Divisi I, Infra II, dan III. Saat ini, beliau tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain.

Indonesian citizen, 52 years old. He obtained his Bachelor's Degree in Civil Engineering from Universitas Jayabaya, Jakarta. He was appointed as the Head of Internal Audit Unit based on the Approval Letter of Board of Commissioners No. 001/KOM/PPRE/XII/2017 dated December 11, 2017, regarding Appointment and Dismissal of Bureau Head of Internal Audit Unit.

He has developed his career at PT PP (Persero) Tbk since 1991 and served various strategic positions, among others as Superintendence, QC & K3L, Site Engineering Manager, and Quality Control & HSSE. From 2001-2011, he served as Manager of QSHE Operation II Division, then, he served as Manager of Corporate System Development (2011-2017), and Head of Knowledge Management Department (2017). He has no concurrent position at other companies.

Indonesian citizen, 42 years old. He completed his undergraduate education at the Faculty of Economics of STIE Rawamangun (1999), and continued his study to Master Program of Financial Management at Universitas Pancasila (2010). He was appointed as the Head of Accounting, Finance & Human Capital Management (HCM) Division of PT PP Presisi Tbk in 2014.

He joined PT PP (Persero) Tbk in 2014 with an initial position as an Accounting and Finance Staff. He then joined PT PP Presisi Tbk as an Accounting and Finance Staff (2005-2010) and Head of Finance, Accounting, & HCM Division (2010-2014). He has no concurrent position at other companies.

Indonesian citizen, 54 years old. He obtained his Bachelor's Degree in Civil Engineering from Universitas Merdeka, Malang in 2014. He was appointed as the Head of Operations Division of PT PP Presisi Tbk in 2017.

He joined PT PP (Persero) Tbk 28 years ago and has held several strategic positions, among others, as Method Staff, GSP, SEM, SOM, and PM at Division I, Infra II, and III. He has no concurrent positions at other companies.



Syaukat Noor, ST

Ketua Satuan Pengawas Internal
Head of Internal Audit



Martadion, SE, MM

Kepala Divisi Akuntansi, Keuangan & Human Capital Management (HCM)
/ Head of Accounting, Finance & Human Capital Management (HCM) Department



Andreas Besar Prihatanto, ST

Kepala Divisi Operasi
Head of Operations Division



Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya pada tahun 1994. Beliau ditunjuk sebagai Kepala Divisi Peralatan PT PP Presisi Tbk sejak tahun 2017.

Beliau telah meniti karier di lingkungan PT PP (Persero) Tbk dengan menduduki jabatan strategis, antara lain sebagai Staf Site Engineer Manager ME (1996-2004), Staf Site Operational Manager ME (2004-2010), Quantity Surveyor Manager ME (2010-2015), dan Project Manager ME (2015-2017). Saat ini, beliau tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain.

Indonesian citizen, 52 years old. He obtained his Bachelor's Degree in Electrical Engineering from Sepuluh Nopember Institute of Technology, Surabaya, in 1994. He was appointed as the Head of Equipment Division of PT PP Presisi Tbk in 2017.

He began his career at PT PP (Persero) Tbk by serving in strategic positions, among others Staff of Site Engineer Manager ME (1996-2004), followed by serving as a Staff of Site Operational Manager ME (2004-2010), Quantity Surveyor Manager ME (2010-2015), and Project Manager ME (2015-2017). He has no concurrent position at other companies.

Muchlas Hidayat, ST
 Kepala Divisi Peralatan
 Head of Equipment Division



Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 1994. Saat ini beliau sedang menempuh pendidikan Magister Teknik Sipil dari Program Pasca Sarjana Teknik Jalan Raya Universitas Lambung Mangkurat. Beliau ditunjuk sebagai Kepala Divisi Teknik & Pemasaran PT PP Presisi Tbk sejak tahun 2017.

Beliau telah meniti karier di lingkungan PT PP (Persero) Tbk dengan menduduki jabatan strategis, antara lain sebagai Staf Site Engineer Manager ME (1994-2008), Construction Manager (2009-2011), Project Manager (2012-2013), dan Quantity Surveyor Manager (2014-2016) di PT PP (Persero) Tbk. Selain itu, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Operasi PT PP Peralatan yang masih merupakan anak perusahaan PTPP (2016-2017). Saat ini, beliau tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain.

Indonesian citizen, 50 years old. He obtained his Bachelor's Degree in Civil Engineering from Universitas Sebelas Maret in 1994 and currently studies for a Master's Degree in Civil Engineering at the Road Engineering Graduate Program of Universitas Lambung Mangkurat. He was appointed as the Head of Engineering & Marketing Division of PT PP Presisi Tbk in 2017.

He joined P PP (Persero) Tbk in 1994 and has developed his career by holding several strategic positions, such as Staff of Site Engineer Manager ME (1994-2008), Construction Manager (2009-2011), Project Manager (2012-2013), and Quantity Surveyor Manager (2014-2016) at PT PP (Persero) Tbk. In addition, he once served as the Head of Operations Department at PT PP Peralatan, which is also a subsidiary of PT PP (2016-2017). He has no concurrent position at other companies.

Rachmadi, ST
 Kepala Divisi Teknik & Pemasaran
 Head of Engineering & Marketing Division



Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Beliau memperoleh gelar S1 dari Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung pada tahun 1996. Beliau ditunjuk sebagai Kepala Biro Pengendalian Bisnis dan QSHE PT PP Presisi Tbk sejak tahun 2018.

Beliau telah meniti karier di lingkungan PT PP (Persero) Tbk sejak tahun 1985 dengan jabatan pertama sebagai Staf Teknik Cabang II hingga tahun 1987. Kemudian, beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Administrasi Kontrak Cabang II (1987-2000), Kepala Seksi Pengendalian Operasi Cabang II – Lampung (2000-2003), Site Engineering Manager (2003-2005), Project Manager (2005-2014), dan Asisten Operasi PT PP Cabang II – Palembang (2014-2017). Saat ini, beliau tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain.

Indonesian citizen, 55 years old. He obtained his Bachelor's Degree from the Faculty of Engineering of Universitas Bandar Lampung in 1996. He was appointed as the Head of POB and QSHE Bureau of PT PP Presisi Tbk in 2018.

His career within PT PP (Persero) Tbk started in 1985 when he served as Staff of Engineering at Branch II until 1987, followed by holding several positions at PT PP, among others, as the Head of Contract Administration Section at Branch II (1987-2000), Head of Operation Control Section at Branch II - Lampung (2000-2003), Site Engineering Manager (2003-2005), Project Manager (2005-2014), and Operation Assistant of PTPP at Branch II - Palembang (2014-2017). He has no concurrent position at other companies.

Popo Suparma, ST
 Kepala Biro Pengendalian Bisnis dan QSHE
 Head of POB and QSHE Bureau

Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Pengairan Universitas Brawijaya pada tahun 1996 dan Master Manajemen Keuangan PPIM Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2015. Beliau ditunjuk sebagai Kepala Divisi SCM & IT yang merangkap Kepala Biro Manajemen Risiko, Legal, dan Pengembangan Bisnis Perseroan sejak tahun 2017.

Beliau telah meniti karier di lingkungan PT PP (Persero) Tbk dengan jabatan pertama sebagai Quantity Surveying Manager Divisi Operasi II (2004-2008), Procurement Manager Divisi Operasi II (2008-2009), Procurement Manager Divisi Operasi I (2009-2012), Procurement Manager PTPP (2012 - 2016), dan Engineering Manager Divisi Gedung 2 (2016-2017).

Indonesian citizen. He earned Bachelor's Degree in Water Engineering from Brawijaya University in 1996 and Master's Degree in PPM Finance at Faculty of Economics from Universitas Indonesia in 2015. He was appointed as Head of SCM & IT Division cum Head of Risk Management, Legal, and Business Development Bureau since 2017.

He has worked at PT PP (Persero) Tbk with the first position as Quantity Surveying Manager of Operation II Division (2004-2008), Procurement Manager of Operation II Division (2008-2009), Procurement Manager of Operation I Division (2009-2012), PTPP Manager Procurement (2012-2016), and Engineering Manager (2016-2017).



Kepala Divisi SCM & IT merangkap Kepala Biro Manajemen Risiko, Legal, dan Pengembangan Bisnis
Head of SCM & IT Division cum Head of Risk Management, Legal, and Business Development Bureau

Komposisi Pemegang Saham

Shareholder Composition

Keterangan / Description	Jumlah Saham / Total Shares	Jumlah Nominal / Total Value	Persentase / Percentage	Status Kepemilikan / Ownership Status
PT PP (Persero) Tbk	7.871.480.000	787.148.000.000	76,99	BUMN / SOE
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan	1.570.000	157.000.000	0,01	Yayasan / Foundation
Masyarakat / Public	2.351.221.000	235.122.100.00	23,00	Individu dan institusi lokal dan asing / Individuals as well as local and foreign institutions

20 Pemegang Saham Terbesar Per 31 Desember 2018

Mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2016 tentang isi Laporan Tahunan, setiap Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan informasi 20 Pemegang Saham terbesar selama tahun buku. Berikut adalah Informasi 20 Pemegang Saham terbesar PT PP Presisi Tbk per 31 Desember 2018 berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PP Presisi, yakni PT Datindo Entrycom.

Top 20 Shareholders as of December 31, 2018

Referring to Circular Letter of Financial Services Authority Number 30 of 2016 on the content of Annual Report, each issuer or public company is required to disclose information on top 20 Shareholders for the fiscal year. The following is the top 20 Shareholders of PT PP Presisi Tbk as of December 31, 2018 based on report issued by Share Registrar of PP Presisi, PT Datindo Entrycom.

No	Pemegang Saham / Shareholder	Jumlah Lembar Saham / Number of Shares	Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage
1	PT PP (Persero) Tbk	7.871.480.000	76,99%
2	Koperasi KPS PT PP (Persero) Tbk	680.336.900	6,65%
3	PT Taspen (Persero)	230.255.500	2,25%
4	Asuransi Jiwasraya	116.279.000	1,14%
5	Minna Padi Pasopati Saham	86.046.500	0,84%
6	PT Tass Engineering	33.560.100	0,33%
7	Perum Jamkrindo	23.600.000	0,23%
8	PT Asabri (Persero)	23.255.800	0,23%

No	Pemegang Saham / Shareholder	Jumlah Lembar Saham / Number of Shares	Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage
9	PT Askrindo	23.014.300	0,23%
10	CV Prima Dinamika Abadi	16.561.500	0,16%
11	CV Dika Konstruksi	13.905.200	0,14%
12	DP-BTN	11.627.900	0,11%
13	BPJS Kesehatan (DH PT ASKES)	11.400.000	0,11%
14	PT Suprajaya Duaribu Satu	9.941.200	0,10%
15	CV Putra Jaya Group	9.654.000	0,09%
16	PT Indoflex Jaya Sakti	6.976.700	0,07%
17	PT Bahana Sekuritas Portofolio IV	5.941.300	0,06%
18	PT Trudif Omega Prima	5.740.800	0,06%
19	PT Casa Prima Indonesia	5.418.200	0,05%
20	Reksa Dana Sucorinvest Sharia Equity Fund	5.400.000	0,05%
Jumlah Saham dari 20 Pemegang Saham Terbesar / Total Shares of Top 20 Shareholders		9.190.394.900	89,89%
Jumlah Saham dari Pemegang Lainnya / Total Shares from other Shareholders		1.033.876.100	10,11%
TOTAL		10.224.271.000	100,00%

Komposisi Pemegang Saham yang Memiliki >5% Saham

Berikut adalah informasi pemegang saham yang memiliki lebih dari 5% saham berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PP Presisi, yakni PT Datindo Entrycom.

Shareholder Composition with Ownership of More Than >5% of Share

Based on report issued by Share Registrar of PP Presisi, PT Datindo Entrycom, information on shareholders with more than 5% of share ownership is as follows:

No	Pemegang Saham / Shareholder	Jumlah Lembar Saham / Number of Shares	Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage
1	PT PP (Persero) Tbk	7.871.480.000	76,99%
2	Koperasi KPS PT PP (Persero) Tbk	680.336.900	6,65%

Komposisi Pemegang Saham yang Memiliki <5% Saham

Berikut adalah informasi pemegang saham yang memiliki kurang dari 5% saham berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PP Presisi, yakni PT Datindo Entrycom.

Shareholder Composition with Ownership of Less Than <5% of Share

Based on report issued by Share Registrar of PP Presisi, PT Datindo Entrycom, information on shareholders with less than 5% of share ownership is as follows:

No	Pemegang Saham / Shareholder	Jumlah Lembar Saham / Number of Shares	Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage
1	Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan	1.570.000	0,01%
2	Masyarakat (<5% Saham) / Public (<5% Share)	2.351.221.000	23,00%

Dewan Komisaris dan Direksi yang Memiliki Saham Perusahaan

Berikut adalah informasi anggota Komisaris dan Direksi yang memiliki saham Perseroan berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh PT Biro Administrasi Efek PP Presisi, yakni PT Datindo Entrycom.

Pemegang Saham / Shareholder	Jabatan / Jabatan	Jumlah Lembar Saham / Number of Shares	Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage
Muhammad Toha Fauzi	Komisaris Utama / President Commissioner	0	0%
Nawang Sri Retno Kartiko	Komisaris / Commissioner	2.340.800	0,023%
Ketut Darmawan	Komisaris Independen / Independent Commissioner	0	0%
Iswanto Amperawan	Direktur Utama / President Director	0	0%
Benny Pidakso	Direktur / Director	0	0%
Hasanin Ade Putra	Direktur / Director	0	0%
Arief Subyandono	Direktur / Director	0	0%

Board of Commissioners and Board of Directors Members with Share Ownership in the Company

The following is information on the members of the Board of Commissioners and Board of Directors with share ownership in the Company based on report issued by Share Registrar of PP Presisi, PT Datindo Entrycom.

Komposisi Kepemilikan Lokal dan Asing

Berikut adalah informasi pemegang saham Perseroan berdasarkan kepemilikan lokal dan asing berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PP Presisi, yakni PT Datindo Entrycom.

Local and Foreign Ownership Composition

The following is information on shareholders of the Company based on local and foreign ownership according to a report issued by Share Registrar of PP Presisi, PT Datindo Entrycom.

Status Pemilik / Owner Status	Jumlah Pemegang Saham / Number of Shareholders	Jumlah Lembar / Number of Shares	Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage
Lokal / Local			
Individu / Individuals	2.949	941.056.100	9,2%
Institusi / Institutions			
a. Koperasi / Cooperative	1	680.336.900	6,7%
b. Yayasan / Foundation	1	4.070.000	0,0%
c. Dana Pensiun / Pension Fund	11	275.861.000	2,7%
d. Asuransi / Insurance	4	152.693.300	1,5%
e. Perseroan Terbatas / Limited Liability Company	35	8.040.044.600	78,6%
f. Reksa Dana / Mutual Fund	5	96.313.600	0,9%
Sub Total	3.006	10.190.375.500	99,7%
Asing / Foreign			
Individu / Individuals	3	271.600	0,0%
Institusi / Institutions	8	33.623.900	0,3%
Sub Total	11	33.895.500	0,3%
TOTAL	3.017	10.224.271.000	100%

Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Information on Majority and Controlling Shareholders

PT PP (Persero) Tbk merupakan Pemegang Saham Utama dan pengendali PP Presisi dengan kepemilikan sebesar 76,99%.

PT PP (Persero) Tbk is a major and controlling shareholder of the Company with ownership of 76.99%.

Sekilas tentang PT PP

PT PP (Persero) Tbk, atau "PTPP", merupakan entitas induk dari Perusahaan yang memiliki saham Perseroan sebesar 76,99%. PTPP didirikan dengan nama NV Pembangunan Perumahan pada tanggal 26 Agustus 1963. Berdasarkan akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan PT PP (Persero) Tbk No. 25 tanggal 21 Mei 2015, maksud dan tujuan PT PP ialah turut serta melakukan usaha di bidang industri konstruksi, industri pabrikan, jasa, penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, Engineering Procurement & Construction (EPC) perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi, kepariwisataan, perhotelan, jasa engineering dan perencanaan, pengembang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

PT PP At A Glance

PT PP (Persero) Tbk, or "PTPP", is the parent of the Company owning the Company's shares of 76.99%. PTPP was established under the name of NV Housing Development on August 26, 1963. Pursuant to the Amendment to Articles of Association of PT PP (Persero) Tbk. No. 25 dated May 21, 2015, the aim and objectives of PT PP are to carry out business in construction industry, manufacturing industry, services, rental, agency services, investment, agro-industry, Engineering, Procurement & Construction (EPC), trade, estate management, services in skill improvement in construction, information technology, tourism, and hotels sectors, as well as engineering, planning, and development services to produce high quality and competitive goods and/or services, and also to generate profit in order to enhance the Company's values by implementing the principles of Limited Liability Company.

Di tahun 2009, PTPP melaksanakan program Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO) kepada masyarakat. Seiring dengan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara, maka pada 9 Februari 2010 PTPP telah memenuhi kewajiban pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sejak tanggal tersebut, saham PTPP dengan kode saham PTPP secara resmi telah tercatat dan dapat diperdagangkan di BEI.

In 2009, PTPP conducted the Initial Public Offering (IPO) program to the public. In line with the Government Regulation on the Change of State Ownership Structure, on February 9, 2010 PTPP has fulfilled its listing obligation in Indonesia Stock Exchange (IDX). Since then, PTPP shares with PTPP share codes have been officially registered and may be traded on the IDX.

Per 31 Desember 2018, Pemerintah Republik Indonesia memegang saham PTPP sebesar 51,00%, sedangkan sisanya dimiliki oleh Publik (masing-masing kepemilikan kurang dari 5%) sebesar 49,00%.

As of December 31, 2018, the Government of the Republic of Indonesia owns 51.00% shares of PTPP; the remainder is owned by the public (each ownership less than 5%) of 49.00%.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk. Disingkat PT PP (Persero) Tbk. No. 54 tanggal 18 April 2017, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris dan PPAT di Jakarta, telah memperoleh (i) persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0008957.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 19 April 2017; dan (ii) telah diterima dan dicatat di dalam database SABH Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah No. AHU-AH.01.03-0128393 tanggal 19 April 2017 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0050763.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 19

Capital Structure and Shareholders' Composition

Pursuant to Deed of Statement of Meeting Decision of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk. abbreviated as PT PP (Persero) Tbk. No. 54 dated April 18, 2017, drawn up before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary and Land Titles Registrar in Jakarta, has obtained (i) approval of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia ("Menkumham") in accordance with Decree No. AHU-0008957.AH.01.02.Tahun 2017 dated April 19, 2017; and (ii) has been received and registered in SABH database of the Ministry of Law and Human Rights under No. AHU-AH.01.03-0128393 dated April 19, 2017 as well as listed in the Company Register under No. AHU-0050763.AH.01.11. Tahun 2017 dated April 19, 2017 ("Deed No. 54/2017") juncto.

April 2017 (“Akta No. 54/2017”) juncto Daftar Pemegang Saham per 31 Januari 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT PP Persero Tbk. adalah sebagai berikut:

As of January 31, 2018, capital structure and shareholders’ composition of PT PP Persero Tbk. are as follows:

Deskripsi / Description	Nilai Nominal Rp100 per Saham Dwiwarna Seri A dan Seri B / Nominal Value of Rp100,- per Share of Series A and Series B Dwiwarna		
	Jumlah Saham / Total Shares	Nilai Nominal (Rupiah) / Total Nominal Value (Rupiah)	Persentase (%) / Percentage (%)
Modal Dasar / Authorized Capital	Saham Dwiwarna Seri A / Series A Dwiwarna Shares: 1	100	-
	Saham Dwiwarna Seri B / Series B Dwiwarna Shares: 3.161.947.835	2.449.999.999.900	-
Modal Ditempatkan dan Disetor / Issued and Paid-Up Capital			
1. Pemerintah Republik Indonesia / Government of Republic of Indonesia	Saham Dwiwarna Seri B / Series B Dwiwarna Shares: 3.037.949.518	-	-
	Saham Dwiwarna Seri A / Series A Dwiwarna Shares: 1	316.194.783.600	51%
2. Masyarakat / Public	Saham Dwiwarna Seri B / Series B Dwiwarna Shares: 6.199.897.353	303.794.951.800	49%
Modal Disetor dan Dibayar Penuh / Issued and Fully Paid-up Capital	Saham Dwiwarna Seri B / Series B Dwiwarna Shares: 18.300.102.646		
	Saham Dwiwarna Seri B / Series B Dwiwarna Shares: 6.199.897.353	619.992.735.400	100%
Portofolio dalam Saham / Shares in Portfolio	Saham Dwiwarna Seri B / Series B Dwiwarna Shares: 18.300.102.646	1.830.007.264.600	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT PP (Persero) Tbk

Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors Members of PT PP (Persero) Tbk

Nama / Name	Jabatan / Position
Dewan Komisaris / Board of Commissioners	
Andi Gani Nena Wea, SH	Komisaris Utama / President Commissioner
Letjend. (Purn) Sumardi	Komisaris / Commissioner
M. Khoerur Roziqin, SE, M.Sc.	Komisaris / Commissioner
Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA	Komisaris / Commissioner
Irjen. Pol. (Purn) Drs. Aryanto Sutadi, M.Sc, M.Hum	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Dr. Ir. Arie Setiadi Moerwanto, M.Sc	Komisaris / Commissioner
Direktur / Board of Directors	
Ir. Lukman Hidayat	Direktur Utama / President Director
Ir. Abdul Haris Tatang, M.Sc	Direktur / Director
Ir. M. Toha Fauzi, MT	Direktur / Director
Ir. M. Aprindy, MT	Direktur / Director
Agus Purbianto, SE. AK. MM.	Direktur / Director
Ir. Anton Satyo Hendriatmo, M.Sc	Direktur / Director

Kronologi Pencatatan Saham

Sharelisting Chronology

Kronologi / Chronology	Keterangan / Description	Jumlah Saham / Total Shares	Nilai Nominal / Nominal Value	Harga Penawaran Awal / Initial Offering Price
IPO di Bursa Efek Indonesia / IPO at Indonesia Stock Exchange	24 November 2017 / November 24, 2017	10.224.271.000	Rp100 per saham / Rp100 per share	Rp430 per saham / Rp430 per share

Akses Informasi Daftar Pemegang Saham Bulanan, Triwulanan, dan Semester

Information on Monthly, Quarterly, and Semesterly Shareholder Register Information

Perseroan menampilkan informasi daftar pemegang saham kepada masyarakat, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dalam website resmi Perseroan dan laporan tahunan perusahaan serta keterbukaan informasi kepada OJK & BEI.

The Company presents shareholders register information to the public, shareholders and other stakeholders on the Company's official website and annual report, as well as information disclosure to OJK & IDX.

Kronologi Pencatatan Efek Lainnya

Other Securities Listing Chronology

Hingga 31 Desember 2018, PP Presisi tidak menerbitkan efek selain saham di bursa manapun.

As of December 31, 2018, PP Presisi did not issue any securities other than share on any stock exchange.

Struktur Grup Perusahaan

Corporate Group Structure



Informasi Entitas Anak Dan/Atau Asosiasi

Information on Subsidiaries and/or Associates

Nama / Name	Tahun Pendirian / Year of Establishment	Struktur Kepemilikan / Ownership Structure		Pengurus / Management	Bidang Usaha / Line of Business	Status Operasi / Operating Status
		Pemilik/ Pemegang Saham / Shareholders	%			
PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("LMA")	2017	PT PP Presisi Tbk	51.00	Komisaris Utama / President Commissioner : Ir. Iswanto Amperawan Komisaris / Commissioner: Supriyandi Direktur Utama / President Director: Afandi Tjandra Direktur / Director: Zainal Abidin Direktur / Director: Hadi Susanto	Pembangunan, Perdagangan, Industri, Pertanian, Bidang Jasa (kecuali Jasa Hukum dan Pajak), Pengangkutan Udara, Percetakan, Pertambangan dan Energi, serta Perbengkelan / Construction, Trading, Industry, Agriculture, Services (except Legal and Tax), Air Transportation, Printing, Mining and Energy, and Workshop	Beroperasi / Operating
		PT Lancarjaya Investama Abadi	49.00			

Informasi Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal

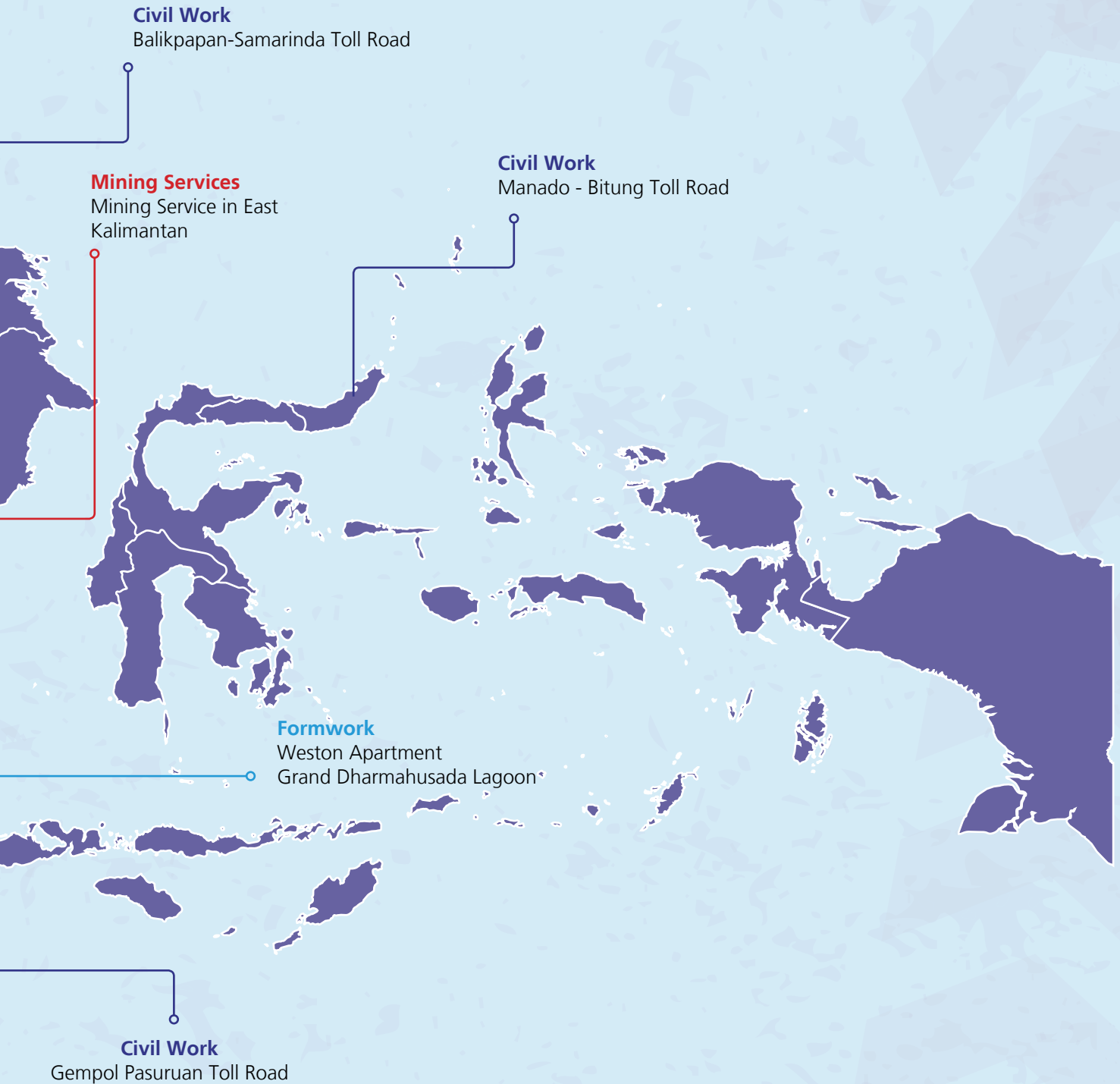
Information on Capital Market Supporting Institutions and Professionals

Lembaga atau Profesi / Institution or Professional	Nama Lembaga atau Profesi / Name of Institution or Professional	Alamat / Address	Jasa yang Diberikan / Rendered Service	Biaya / Fee	Periode Penugasan / Assignment Period
Kantor Akuntan Publik / Public Accounting Firm	KAP Hertanto, Grace, Karunawan	Palma Tower 18th Floor Lot. F & G, Jl. RA. Kartini II-S Kav. 06, RT.6/RW.14, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310	Melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan Tahun Buku 2018 / Auditing Consolidated Financial Statements of the Company of 2018 Fiscal Year	Rp250.000.000	2018
Notaris / Notary	Rita Permanasari, SH	Jl. Swadaya Raya No. 12A, RT.003/RW.001, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13440	Jasa Pelaksanaan RUPS / Implementation of AGM	Rp18.700.000	2018
Biro Administrasi Efek / Share Registrar	PT Datindo Entrycom	Jl. Hayam Wuruk No.28, RT.14/RW.1, Kebon Kelapa, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10120	Jasa administrasi efek untuk mengelola Daftar Pemegang Saham (DPS) dan mengadministrasikan pembagian hak-hak pemegang saham pelaksanaan aksi korporasi Perseroan, termasuk penyelenggaraan RUPS / Securities administration service to manage Shareholder Register (DPS) and administer rights of shareholders in corporate action, including GMS implementation	1. Rp44.000.000 (Jasa Pengelolaan DPS / DPS Management Service) 2. Rp89.100.000 (Penyelenggaraan RUPS / GMS Implementation)	2018

Wilayah Operasional Perusahaan

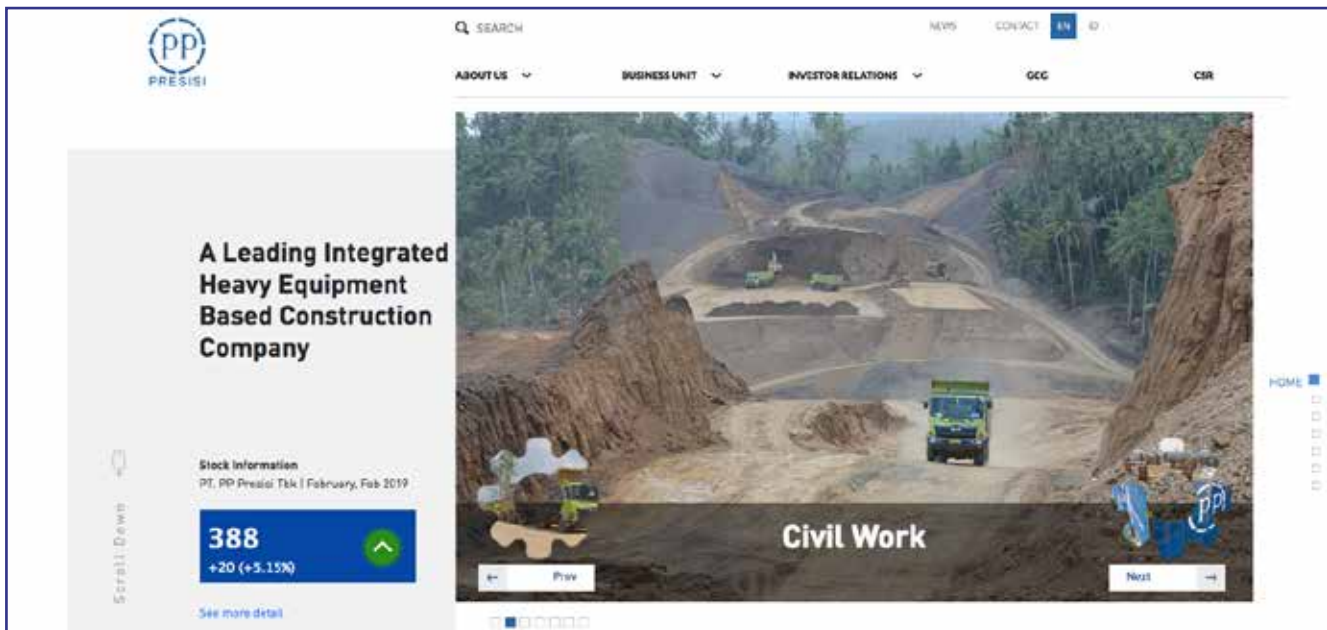
Operational Coverage Area





Informasi Pada Website Perusahaan

Information on the Company's Website



Perseroan memberikan kemudahan akses informasi secara transparan, tepat dan akurat kepada seluruh stakeholder baik pemegang saham, regulator, maupun masyarakat luas. Perseroan selalu berupaya untuk meningkatkan keandalan dalam penyediaan informasi secara terintegrasi melalui situs resmi Perseroan, www.pp-presisi.co.id. Situs resmi PP Presisi telah memenuhi informasi yang wajib dimuat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.8/POJK.4/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik yang telah ditetapkan pada tanggal 25 Juni 2015.

The Company provides ease of access for information in a transparent, proper, and accurate manner to all stakeholders, whether it is for shareholders, regulators, or general public. The Company always strives to improve reliability in presenting integrated information through the official website of the Company, www.pp-presisi.co.id. The official website of PP Presisi has contained mandatory information pursuant to the Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No. 8/POJK.4/2015 concerning Website of Issuers or Public Companies set on June 25, 2015.

Kesesuaian situs Perseroan dengan POJK No.8/POJK.4/2015:

The Company's website conformity with POJK No. 8/POJK.4/2015:

NO.	POJK No. 8/POJK.4/2015	Situs Perusahaan / Company's Website
1	Informasi Umum Emiten atau Perusahaan Publik / General Information of Issuers or Public Companies	✓
2	Informasi Bagi Pemodal atau Investor / Information for Investors	✓
3	Informasi Tata Kelola Perusahaan / Information on Corporate Governance	✓
4	Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / Information on Corporate Social Responsibility	✓

Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

Training of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary and Internal Audit Unit

Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris 2018

Dalam rangka meningkatkan kompetensi serta menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, selama tahun 2018, anggota Dewan Komisaris telah mengikuti program pelatihan baik berupa *workshop*, konferensi, maupun seminar, antara lain:

Education and/or Training of the Board of Commissioners in 2018

In 2018, the members of the Board of Commissioners participated in workshops or training programs, conferences, and seminars to improve competence and support duty implementation, among others:

Nama / Name	Jabatan / Position	Tema dan/atau Materi Pelatihan / Training Theme and/or Material	Waktu dan Tempat / Time and Place	Biaya Pelatihan / Training Fee
M. Toha Fauzi	Komusaris Utama / President Commissioner	Training Sertifikasi Ahli Madya K3 Konstruksi / Training for Associates Certificate in K3 Construction	5-6 Juni 2018 di Jakarta / June 5- 6, 2018 in Jakarta	Rp7.500.000
		The 13th, Batch in Depth Directorship Program	12 Desember 2018 di Jakarta / December 12, 2018 in Jakarta	Rp 10.000.000
Nawang Sri Retno Kartiko	Komusaris / Commissioner	The 13th, Batch in Depth Directorship Program	12 Desember 2018 di Jakarta / December 12, 2018 in Jakarta	Rp 10.000.000

Pendidikan dan/atau Pelatihan Direksi 2018

Dalam rangka meningkatkan kompetensi serta menunjang pelaksanaan tugas Direksi, selama tahun 2018, anggota Direksi telah mengikuti program pelatihan baik berupa *workshop*, konferensi, maupun seminar, antara lain:

Education and/or Training of the Board of Directors in 2018

In 2018, the members of the Board of Directors participated in workshops or training programs, conferences, and seminars to improve competence and support duty implementation, among others:

Nama / Name	Jabatan / Position	Tema dan/atau Materi Pelatihan / Training Theme and/or Material	Penyelenggara / Organized by	Biaya Pelatihan / Training Fee
Iswanto Amperawan	Direktur Utama / President Director	The 13th, Batch in Depth Directorship Program	12 Desember 2018 di Jakarta / December 12, 2018 in Jakarta	Rp10.000.000
Benny Pidakso	Direktur / Director	The 13th, Batch in Depth Directorship Program	12 Desember 2018 di Jakarta / December 12, 2018 in Jakarta	Rp10.000.000
Arief Subyandono	Direktur Independen / Independent Director	he 13th, Batch in Depth Directorship Program	12 Desember 2018 di Jakarta / December 12, 2018 in Jakarta	Rp10.000.000
Iswanto Amperawan	Direktur Utama / President Director	Training Sertifikasi Ahli Madya K3 Konstruksi / Training for Associates Certificate in K3 Construction	5-6 Juni 2018 di Jakarta / June 5- 6, 2018 in Jakarta	Rp7.500.000
Hasanin Ade Putra	Direktur / Director	Training Sertifikasi Ahli Madya K3 Konstruksi / Training for Associates Certificate in K3 Construction	5-6 Juni 2018 di Jakarta / June 5- 6, 2018 in Jakarta	Rp7.500.000

Pendidikan dan/atau Pelatihan Komite Audit 2018

Dalam rangka meningkatkan kompetensi serta menunjang pelaksanaan tugas Komite Audit, pada tahun 2018 anggota Komite Audit telah mengikuti program pelatihan dan seminar yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal.

Pendidikan dan/atau Pelatihan Sekretaris Perusahaan 2018

Dalam rangka meningkatkan kompetensi serta menunjang pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan, selama tahun 2018, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti program pelatihan baik berupa *workshop*, konferensi, maupun seminar, antara lain:

Education and/or Training of the Audit Committee in 2018

To increase competence and support implementation of duty of Audit Committee, members of Audit Committee participated in trainings and seminars held internally or externally in 2018.

Education and/or Training of the Corporate Secretary in 2018

In 2018, the Corporate Secretary participated in workshops or training programs, conferences, and seminars to improve competence and support duty implementation, among others:

Nama / Name	Jabatan / Position	Tema dan/atau Materi Pelatihan / Training Theme and/or Material	Penyelenggara / Organized by	Biaya Pelatihan / Training Fee
Bambang Suyitno	Staf Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary Staff	Budgeting Practices & cashflow forecasting	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)	Rp2.900.000
		Hal-hal yang perlu diwaspadai oleh Corporate Secretary dari peraturan BAPEPAM IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama / Matters that need to be taken into account by Corporate Secretary of BAPEPAM IX.E.2 regulations on Material Transactions and Changes in Main Business Activities	ICSA-BEI	Gratis / Free
		Sosialisasi e-Proxy and e-Voting Platform / Dissemination of e-Proxy and e-Voting Platform	KSEI-ICSA	Gratis / Free
		Konsekuensi UUPM bagi Perusahaan Publik-Corporate Secretary / Consequences of UUPM for Public Company - Corporate Secretary	ICSA	Gratis / Free
		Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama / Material Transaction and Changes in Main Business Activities	ICSA	Gratis / Free
		Sosialisasi T+2 / Dissemination of T+2	KSEI-BEI	Gratis / Free
		Workshop Holding & Subsidiary Governance	ICSA	Gratis / Free

Pendidikan dan/atau Pelatihan Satuan Pengawasan Intern 2018

Dalam rangka meningkatkan kompetensi serta menunjang pelaksanaan tugas Unit Audit Internal, selama tahun 2018, anggota Unit Audit Internal telah mengikuti program pelatihan baik berupa *workshop*, konferensi, maupun seminar, antara lain:

Education and/or Training of the Internal Audit Unit in 2018

In 2018, the members of the Internal Audit Unit participated in workshops or training programs, conferences, and seminars to improve competence and support duty implementation, among others:

Nama / Name	Jabatan / Position	Tema dan/atau Materi Pelatihan / Training Theme and/or Material	Penyelenggara / Organized by	Biaya Pelatihan / Training Fee
Syaukat Noor	Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) / Head of Internal Audit Unit	Diklat Khusus Kepala SPI / Education and Training Specifically for Head of Internal Audit Unit	PPA&K	Rp10.000.000
		Pelatihan A-Z GCG / Training of A-Z GCG	DPS	Rp5.040.000
		Seminar Nasional & Pengukuhan PIA 2018 / National Seminar & Inauguration of PIA	Asosiasi Auditor Internal / Institute of Internal Auditors of Indonesia	Rp15.250.000



Dalam rangka mencapai pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan, PP Presisi berkomitmen untuk mengembangkan kompetensi dan keahlian SDM serta penerapan Teknologi Informasi di setiap aktivitas bisnisnya.

To achieve sustainable business growth, PP Presisi is committed to developing competence and skill of HC as well as implementation of Information Technology in every business activity.





Tinjauan Pendukung Bisnis

Business Support Overview



Sumber Daya Manusia

Human Resources



Di tengah persaingan bisnis yang semakin kompetitif, setiap entitas usaha dituntut untuk dapat memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki agar dapat memberi kontribusi yang optimal bagi perusahaan. Tidak hanya terbatas pada peningkatan kapasitas alat produksi dan strategi pengembangan bisnis, optimalisasi juga dilakukan kepada seluruh pilar usaha yang ada, termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) di dalamnya.

Pengelolaan SDM yang tepat sebagai salah satu pilar penting perusahaan menjadi kunci penting dalam merealisasikan tujuan usaha berdasarkan visi bisnis yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan secara aktif dan terus-menerus mengembangkan sumber daya manusia yang ada dengan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan pemahaman nilai inovasi melalui berbagai program pelatihan baik yang diselenggarakan di dalam maupun luar negeri.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDM

Untuk mewujudkan visi Perseroan menjadi perusahaan jasa konstruksi terintegrasi terkemuka di Indonesia dan regional, dibutuhkan manajemen pengelolaan SDM yang baik dan sesuai dengan karakteristik bisnis Perseroan di bidang konstruksi. Landasan kebijakan pengelolaan SDM yang berlaku di Perseroan mengacu pada peraturan eksternal yakni Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan peraturan internal yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Perusahaan.

Amidst the increasingly competitive business competition, every business entity is required to be able to maximize its potentials to provide optimum contributions to the company. Optimization is not only limited to capacity improvement of production instruments and business development strategy, but it is also performed on the entire business pillars, including Human Resources (HR).

As one of the important pillars of a company, HR management is a significant key in realizing business objectives set in business vision. Therefore, the Company actively and continuously develops human resources by enhancing capability, knowledge, skill, and understanding of innovation value through various training programs held domestically or abroad.

HR MANAGEMENT POLICY

Proper and appropriate HR management is required for the Company's business characteristics in construction sector in order to realize the Company's vision to be a leading integrated construction services company in Indonesia and in regions. The applicable policy of HR management in the Company refers to an external regulation, namely Law No.13 of 2003 on manpower and internal regulations stipulated in Articles of Association of the Company.

Terkait hal tersebut, Perseroan memiliki 7 (tujuh) aspek utama dalam hal kebijakan pengelolaan SDM internal, yang meliputi *Talent Management, HR Planning, Placement, Recruitment, Training & Development, Performance Management, dan Career Success Plan*. Berikut ini merupakan Kebijakan Pengelolaan SDM PP Presisi tahun 2018 yang diuraikan dalam bentuk bagan:

In connection to that, the Company has 7 (seven) main aspects regarding internal HR management policies, including Talent Management, HR Planning, Placement, Recruitment, Training & Development, Performance Management, and Career Success Plan. The following is HR Management Policy of PP Presisi in 2018 in the form of chart:



PROFIL DAN DEMOGRAFI SDM

Per 31 Desember 2018, Perseroan memiliki 167 karyawan, meningkat sebesar 60% dibandingkan dengan jumlah karyawan di tahun 2017 yang tercatat sebesar 126 orang. Berikut jumlah dan komposisi karyawan yang berada dalam Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir:

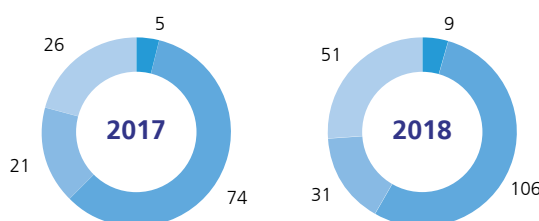
HR PROFILE AND DEMOGRAPHICS

As of December 31 2018, the Company has 167 employees, increased by 60% compared to the number of employees in 2017 which was recorded at 126 people. The composition and number of employees in the Company for the last 2 (two) years are as follows:

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Number of Employees by Education

- Magister (S2) / Master's Degree
- Sarjana (S1) / Bachelor's Degree
- D3 / Associate Degree
- Sekolah Menengah Umum (SMU) / High School

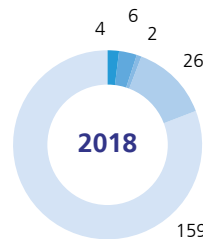
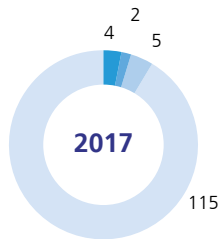


Pertumbuhan (%) / Growth (%)
80%
43.24%
47.62%
96.15%

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenjang Kepangkatan

Number of Employees by Position

- Direktur / Director
- Kepala Divisi / Division Head
- Kepala Biro / Bureau Head
- Manajer / Manager
- Staff / Staff

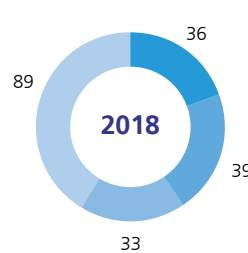
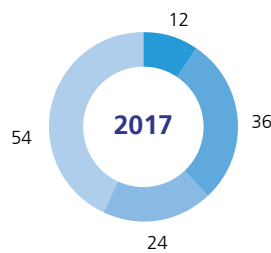


Pertumbuhan (%) / Growth (%)
0%
66.67%
200%
80.77%
27.67%
56.35%

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia

Number of Employees by Age

- >51
- 41 – 50 tahun / years old
- 31 – 40 tahun / years old
- 23 – 30 tahun / years old

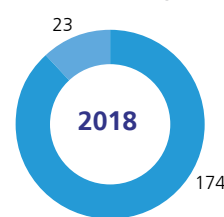
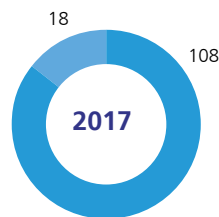


Pertumbuhan (%) / Growth (%)
200%
8.33%
37.50%
64.81%

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Number of Employees by Gender

- Laki-laki / Male
- Perempuan / Female

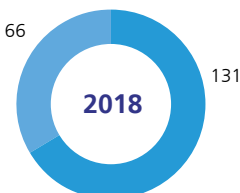
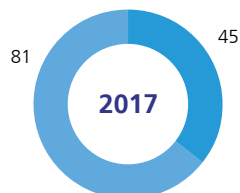


Pertumbuhan (%) / Growth (%)
61.11%
27.78%
56.35%

Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Number of Employees by Employment Status

- Karyawan Tetap / Permanent Employee
- Karyawan Kontrak / Non-Permanent Employee

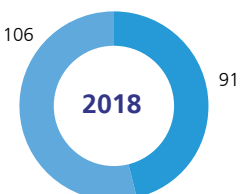
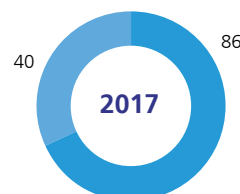


Pertumbuhan (%) / Growth (%)
61.11%
27.78%
56.35%

Jumlah Karyawan Berdasarkan Lokasi

Number of Employees by Location

- Unit Kantor Pusat (UKP) / Head Office Unit
- Proyek / Project



Pertumbuhan (%) / Growth (%)
5.81%
165%
56.35%

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM

Posisi strategis SDM dalam mewujudkan target kinerja perusahaan membuat program pengembangan SDM menjadi penting untuk dilakukan. Perseroan memiliki program pengembangan SDM yang dimulai dengan proses perekrutan

HR COMPETENCE DEVELOPMENT

The strategic position of HR in realizing the Company's performance target makes HR development performance important to be implemented. The Company's HR development program is started with employee recruitment process by taking

karyawan yang dilaksanakan dengan memperhatikan asas kesetaraan dan kualifikasi dari setiap kandidat yang mengirimkan aplikasi untuk posisi pekerjaan yang ditawarkan Perseroan. Selain itu program pengembangan SDM juga ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM tersebut secara berkelanjutan. Terkait hal tersebut, Perseroan telah melakukan berbagai upaya melalui pendidikan, dan pelatihan dengan materi-materi yang diberikan, yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas organisasi, meningkatkan keterampilan juga kepemimpinan dan profesionalisme kerja.

Program Pengembangan SDM

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM yang dimiliki, Perseroan memiliki program pengembangan dan peningkatan *soft skill* dan *hard skill* melalui pendidikan berkelanjutan, baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal.

Adapun program-program pelatihan dan pengembangan yang diselenggarakan Perseroan sepanjang tahun 2017 ialah sebagai berikut:

into account the principle of fairness and qualifications of every candidate that applies for positions offered by the Company. Moreover, HR development is also carried out through education and training that is aimed to improve HR competence in a sustainable manner. As such, the Company exerted all efforts through education and training with materials that were aimed to improve organization productivity and quality, enhance skills and leadership, as well as work professionalism.

HR Development Program

In order to increase HR competencies, the Company has soft skill and hard skill development and improvement program through internal and external continuing education.

Training and development programs held by the Company in 2018 is as follows:

No	Tema dan/atau Jenis Pelatihan / Theme and/or Type of Training	Penyelenggara / Organized by	Peserta / Participant
1	Pembinaan Tenaga Juru Ikat /Kemenaker RI / Development of Riggers / Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia	RSCI	4 orang / people
2	<i>Basic Warehouse Management</i>	United Tractors	2 orang / people
3	<i>Basic APAAB</i>	Trakindo	15 orang / people
4	<i>Erection Tower Crane</i>	Multicrane Perkasa	5 orang / people
5	Teknik Pengoperasian dan <i>Maintenance</i> Wirtgen 64 / Wirtgen 64 Operation and Maintenance Techniques	GMT	5 orang / people
6	Sosialisasi B20 terhadap Alat Berat / Dissemination of B20 on Heavy Equipment	Trakindo	10 orang / people
7	<i>Maintenance</i> dan Pengoperasian Excavator dan Dozer Caterpillar / Maintenance and Operation of Excavator and Dozer Caterpillar	Trakindo	5 orang / people
8	Teknik Pengoperasian dan <i>Maintenance</i> Excavator dan dozer Liebherr / Operation and Maintenance Techniques of Excavator and Dozer Liebherr	Multicrane Perkasa	5 orang / people
9	Pelatihan <i>Basic Concrete</i> / Basic Concrete Training	PT Holcim Beton	15 orang / people
10	Pelatihan POP / POP Training	<i>Inhouse</i>	10 orang / people
11	Pelatihan <i>Workshop</i> Beton / Concrete Workshop Training	Akademik Polinema	10 orang / people
12	Training <i>Tax Planning</i> serta <i>Update</i> Pemeriksaan Pajak / Training of Tax Planning and Tax Audit Update	Sinergi Solusi Bisnis	1 orang / person
13	<i>Corporate Tax</i> Manajemen / Corporate Tax Management	Ortax	1 orang / person
14	<i>Training Step By Step</i> Tatacara <i>Transfer Pricing</i> PMK 213/PMK.03/2016 / Step By Step Training of Procedure on Transfer Pricing PMK 213/PMK.03/2016	Sinergi Solusi Bisnis	1 orang / people
15	<i>Updating</i> Pengelolaan PPh Badan / Updating of Corporate Income Tax Management	Ortax	1 orang / person
16	<i>Basic Airport Training</i>	Ikatan Ahli Bandara Udara Indonesia	4 orang / people
17	<i>In-Depth Directorship</i> Program	<i>Indonesia Institute for Corporate Directorship</i>	5 orang / people
18	Sekolah Kandidat <i>Site Engineer Manager</i> Spesialisasi Infrastruktur / Training for Site Engineer Manager Candidate of Infrastructure Specialization	PT PP (Persero) Tbk	7 orang / people
19	Sekolah Kandidat <i>Site Administration Manager</i> / Training for Site Administration Manager Candidate	PT PP (Persero) Tbk	3 orang / people
20	CBM - <i>Financial Management</i>	Prasetya Mulya	1 orang / person

No	Tema dan/atau Jenis Pelatihan / Theme and/or Type of Training	Penyelenggara / Organized by	Peserta / Participant
21	Management Development Program	Prasetya Mulya	4 orang / people
22	CBM - Human Resources Management	Prasetya Mulya	1 orang / person
23	CBM To MBA	Prasetya Mulya	2 orang / people
24	Talent Management	Prasetya Mulya	1 orang / person
25	Work Breakdown Structure MS Project	PT Logos Teknologi Utama	2 orang / people
26	S-2 Ilmu Manajemen Keuangan / Master's Degree in Financial Management	Universitas Indonesia	1 orang / person
27	Merger, Akuisisi, Spin-Off (Disvestasi) dan Pengelolaan Holding Company / Merger, Acquisition, Spin-Off (Divestment and Holding Company Management)	PT Barkah Cahaya Mediatama	2 orang / people
28	(Dalam Perspektif Legal dan Manajemen Resiko) / In Legal and Risk Management Perspective	-	10 orang / people
29	Contract and Compliance Training	PT PP (Persero) Tbk	1 orang / people
30	Training Quality Control of Civil Work	Pusat Pelatihan MBT	2 orang / people
31	Diklat Dasar Audit / Basic Audit Training and Education	PPA&K	1 orang / person
32	Diklat Audit Operasional / Operational Audit Training and Education	PPA&K	1 orang / person
33	Diklat Komunikasi & Psikologi Audit / Communication & Psychology Audit Training and Education	PPA&K	1 orang / person

Biaya Program Pengembangan SDM

Sepanjang tahun 2018, Perseroan mengalokasikan dana untuk Program Pengembangan SDM sebesar Rp526 juta.

Rencana Pengembangan SDM

Dalam rangka meningkatkan keunggulan maupun kesejahteraan SDM-nya, PP Presisi telah menyusun Program Pengembangan SDM untuk tahun 2019, antara lain :

- Benefit & Facility
Upgrade Working Facility berbasis digital dan Worklife Balance
- Placement
Monitoring Progres Proyek
- Organization Development
- Talent Management, meliputi Peta Kompetensi, Career Path, Skema Promosi, Desain Kurikulum, Talent Pool & Development
- Training
Training Need Analysis, Training Calendar, Training Evaluation
- HC System
 - Penentuan Vendor (Syntech untuk Busdev Online dan RET untuk SDM Online, finalisasi dengan tim IT).
 - Pengembangan Proyek Fase 1 - HR Ops (Web Based), meliputi Database Pegawai, Employee Profile, Payroll, Employee Self Service, dll.
 - Pengembangan Proyek Fase 1 - HR Ops (Mobile Apps Version).
 - Sosialisasi Go Alive ke semua pegawai
 - Pengembangan Proyek Fase 2 - HR Strategic, meliputi training, talent management, performance management, on boarding.

Cost of HR Development Program

In 2018, the Company allocated Rp526 million as fund for HR Development Program.

HR Development Plan

To boost excellence and welfare of its HC, PP Presisi has prepared HC Development Program for 2019, among others:

- Benefit & Facility
Upgrade digital-based Working Facility and Worklife Balance
- Placement
Monitoring Progress of Project
- Organization Development
- Talent Management, including Competence Map, Career Path, Promotion Scheme, Curriculum Design, Talent Pool & Development
- Training
Training Need Analysis, Training Calendar, Training Evaluation
- HC System
 - Determination of Vendor (Syntech for Busdev Online and RET for Online HC, finalization with IT team).
 - Development of Phase 1 Project - HR Ops (Web Based), including Employee Database, Employee Profile, Payroll, Employee Self Service, dll.
 - Development of Phase 1 Project - HR Ops (Mobile Apps Version).
 - Dissemination of Go Alive to all employees
 - Development of Phase 2 Project - HR Strategic, including training, talent management, performance management, on boarding.

7. Performance Management, meliputi KPI Development, PA Tools, Performing Mapping & Development

KESEJAHTERAAN KARYAWAN

Perlakuan Adil dan Setara

Perseroan memberikan kesempatan yang sama bagi semua karyawan, baik pria dan wanita, tanpa memandang segala perbedaan baik etnik, agama, ras, kelas, gender, ataupun kondisi fisik untuk mengikuti program rekrutmen pekerja. Pengangkatan calon pekerja didasarkan atas hasil seleksi, hasil evaluasi pada masa percobaan dan orientasi pekerja.

Remunerasi

Sebagai bagian dari pemenuhan hak pegawai, Perseroan melalui Departemen SDM memiliki peran dalam melakukan pengelolaan terhadap mekanisme remunerasi pegawai. Pengelolaan remunerasi Perseroan senantiasa berpedoman pada strategi yang ditetapkan dengan memperhatikan beberapa aspek seperti pemenuhan regulasi minimum penggajian di tingkat daerah dan nasional.

Terkait hal tersebut, Perseroan telah memenuhi kewajiban upah minimum provinsi maupun regional yang mengacu pada Wajib Laporan Ketenagakerjaan ("WLTK") No. 2609/39012/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan. Perseroan telah memenuhi ketentuan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1191-Bangsos/2016 tertanggal 21 November 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Jawa Barat Tahun 2017.

Selain itu Perseroan juga menyediakan berbagai macam fasilitas dan program kesejahteraan yang diperuntukkan bagi seluruh karyawan. Adapun fasilitas dan program yang diberikan antara lain:

1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan)
2. Jaminan Kesehatan (Asuransi BNI Life dan BPJS Kesehatan)
3. Tunjangan Jabatan
4. Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR)
5. Tunjangan *variable*
6. Tunjangan Konsumsi (Natura)
7. Bantuan Duka Kematian
8. Bantuan Biaya Melahirkan
9. Bantuan Biaya Pernikahan
10. Gathering dan Outing kantor
11. Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan
12. Bonus (Kinerja)
13. Penghargaan Umroh (Karyawan Beragama Islam)
14. Cuti Tahunan
15. Fasilitas Olah Raga

7. Performance Management, including KPI Development, PA Tools, Performing Mapping & Development

EMPLOYEE WELFARE

Fair and Equal Treatment

The Company grants equal opportunities for all employees, both male and female, without discrimination based on ethnicity, religion, class, gender, or physical condition to participate in employee recruitment program. Appointment of candidates is based on selection result, evaluation result during probation and orientation.

Remuneration

As part of fulfillment of employee's rights, the Company has a role in managing remuneration mechanism through HR Department. The Company's remuneration management always refers to strategies that have been set by taking into account several aspects, such as compliance to regulations on regional and national minimum wage.

Related to this, the Company has fulfilled the obligation of provincial and regional minimum wage that refers to Compulsory Company Manpower Report ("WLTK") No. 2609/39012/2016 issued by Head of Manpower Oversight Division. The Company has fulfilled the Decree of West Java Governor Number 561/Kep.1191-Bangsos/2016 on Regency/City Minimum Wage in West Java Region in 2017.

In addition, the Company also provides various facilities and welfare program for all employees. Facilities and programs given, among others:

1. Manpower Social Security (BPJS Ketenagakerjaan)
2. Health Insurance (BNI Life Insurance and BPJS Kesehatan)
3. Position Allowance
4. Religious Day Allowance (THR)
5. Variable Allowance
6. Meal Allowance (Benefit-in-kind)
7. Condolence Allowance
8. Maternity Allowance
9. Wedding Allowance
10. Office Gathering and Outing
11. Training and Development Facilities
12. Bonuses (Performance-based)
13. Umroh Reward (Pilgrimage for Moslem Employees)
14. Annual Leaves
15. Sport Facilities

Kompensasi, program kesejahteraan, dan fasilitas pegawai Perseroan mengacu kepada Ketentuan dan Peraturan Departemen Tenaga Kerja, termasuk sudah memenuhi Upah Minimum yang berlaku.

Penggunaan Tenaga Kerja Lokal

Dalam menjalankan kinerjanya, Perseroan selalu mengedepankan penggunaan tenaga kerja lokal yang bersumber pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menegaskan bahwa penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program dan nasional. Komitmen penggunaan tenaga kerja lokal oleh Perseroan dibuktikan dengan nihilnya penggunaan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dalam Perusahaan, hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan.

Kebebasan Berserikat

Perseroan senantiasa menghargai kebebasan dan hak dasar setiap individu untuk berserikat, berkumpul, dan menyuarakan pendapatnya. Meski hingga 2018 Perseroan belum memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan, namun Perseroan senantiasa terbuka terhadap kritik dan saran yang berasal dari karyawan. Adapun mekanisme bagi karyawan PP Presisi untuk menyampaikan kritik maupun saran adalah sebagai berikut:

1. Pegawai yang bersangkutan membicarakan permasalahannya secara lisan dengan atasan langsung dan apabila dalam 1 (satu) minggu masih belum ada tindak lanjut, pegawai yang bersangkutan mengajukan persoalannya secara tertulis kepada atasan langsung tersebut dengan Batasan waktu penyelesaian 3 (tiga) hari;
2. Apabila dalam ayat (1) persoalan belum dapat diselesaikan oleh atasan langsung, maka persoalan ini oleh pegawai yang bersangkutan diajukan secara tertulis kepada atasan dari pejabat atasan langsung dengan batas waktu penyelesaian 1 (satu) minggu;
3. Apabila pada langkah kedua belum juga tercapai penyelesaian, maka pegawai yang bersangkutan dapat meneruskan persoalannya secara tertulis kepada Kepala Divisi Sumber Daya Manusia untuk selanjutnya menyampaikan persoalan ini kepada Rapat Direksi untuk diambil keputusan tentang penyelesaian persoalan;
4. Apabila usaha-usaha dalam ayat (3) masih belum juga berhasil, maka persoalan tersebut dapat diteruskan oleh pegawai yang bersangkutan kepada pihak ketiga (c.q. Dinas Tenaga Kerja setempat atau Pengadilan Hubungan Industrial) dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Compensation, welfare program, and facilities of the Company's employees refer to Provision and Regulation of the Department of Manpower, including fulfilling applicable minimum wage.

Use of Local Work Force

In conducting its business, the Company always prioritizes the use of local work force as stipulated in Law No.13 of 2003 on Manpower that emphasizes work force placement is carried out by taking into account equality on work opportunity and manpower provision according to needs of the program and national needs. The commitment of using local work force by the Company is demonstrated by not employing any foreign work force up to the issuance of this Annual Report.

Freedom of Association

The Company always respects the freedom and basic rights of each individual to associate, gather, and voice their opinion. Although the Company has no labor union established by the employees as of 2018, the Company remains open for critics and suggestions from employees. Mechanism for the employees of PT PP Presisi to submit their critics and suggestions is as follows:

1. The concerned employee shall talk about their problem with the direct supervisor, and if within 1 (one) week there is no follow-up action, the concerned employee may propose their problem in writing to their direct supervisor with settlement period of 3 (three) days;
2. If the problem persists despite having gone through the procedure contained in paragraph (1), the problem may be proposed in writing by the concerned employee to the supervisor of their direct supervisor with settlement period of 1 (one) week;
3. If the problem persists despite having gone through the procedure contained in paragraph (2), the concerned employee may forward their problem in writing to the Head of Human Resources Division who shall forward the matter to the Meeting of Board of Directors to be resolved;
4. If the efforts stipulated in paragraph (3) have not yielded results, the issue can be forwarded by the concerned employee to the third party (c.q. local Manpower Department or Industrial Relations Court) in compliance with the prevailing laws and regulations.

Teknologi dan Informasi

Information and Technology



Selain kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), PP Presisi juga berkomitmen untuk melakukan penerapan strategi dan kebijakan pengembangan teknologi informasi yang selaras dengan perkembangan bisnis Perseroan dalam rangka menciptakan perusahaan yang unggul dan berdaya saing tinggi. Di samping itu, penerapan langkah-langkah strategis di bidang pengembangan teknologi informasi juga dilakukan untuk membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan.

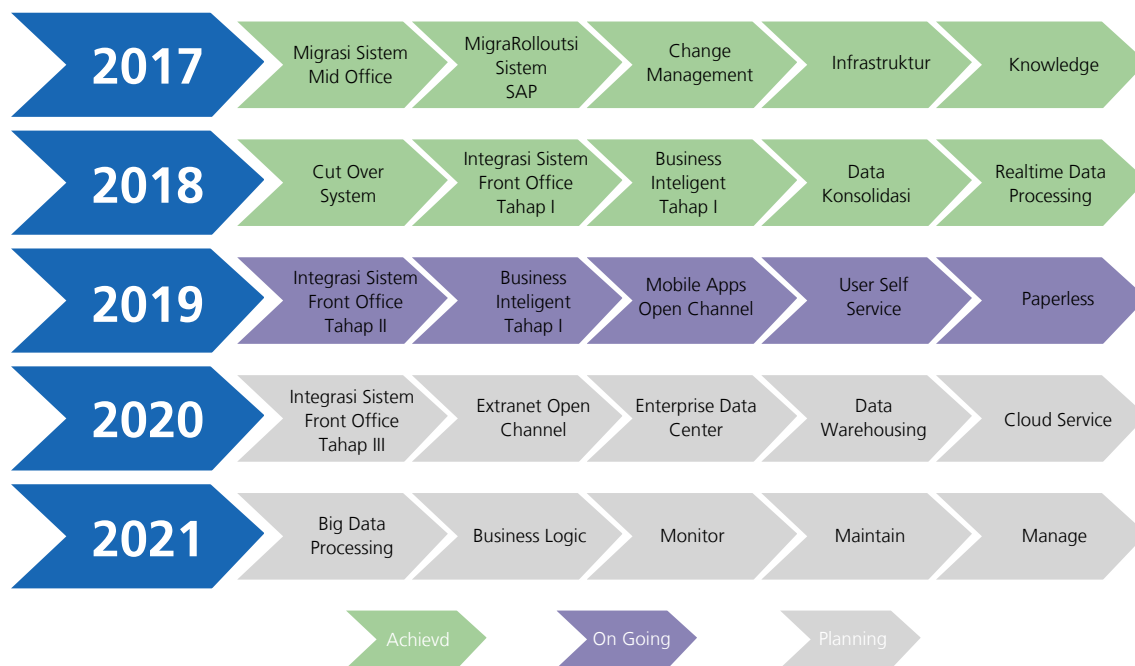
Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi

Dalam rangka menyelaraskan rencana pengembangan teknologi informasi dengan strategi dan kebutuhan bisnis Perseroan, maka PP Presisi menyusun *Roadmap* tentang jadwal pengembangan proyek-proyek berbasis Teknologi Informasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dimulai dari tahun 2017 hingga tahun 2021, yang dapat dilihat dalam infografis berikut ini:

In addition to policy on Human Resources (HR) development, PP Presisi is also committed to implement strategies and policies on information technology development in line with the Company's business development in order to create an excellent and highly competitive company. Moreover, implementation of strategic measures in information technology sector is also carried out to support efficiency and productivity improvement in conducting operational activities of the Company.

Information Technology Development Roadmap

In order to harmonize the plan for developing information technology with the Company's business strategy and needs, PP Presisi draws a Roadmap on the development schedule of Information Technology-based projects within a period of 5 (five) years, starting from 2017 to 2021, which can be seen in the following infographics:



Pengembangan Teknologi Informasi Tahun 2018

Perseroan berupaya secara berkesinambungan untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi yang dianggap mampu mendukung pelaksanaan proses bisnis Perusahaan agar lebih efektif, efisien, optimal, mampu memberikan nilai tambah serta mendukung manajemen Perseroan dalam mengambil keputusan dengan waktu yang relatif singkat.

Information Technology Development in 2018

The Company strives to continuously develop applications that are able to support implementation of the Company's business process to be more effective, efficient, and optimum as well as to generate added value and support the Company's management in making decision in a relatively short time.

Berikut ini adalah beberapa pengembangan aplikasi sistem TI yang dilakukan Perseroan hingga akhir tahun 2018:

Several IT application systems developed by the Company until the end of 2018 are as follows:

No	Uraian / Description	Kategori / Category	Status / Status
1.	Equipement Online System	Pengembangan Software / Software Development	Selesai / Completed
2.	<i>I-Matrix</i>	Pengembangan Software / Software Development	Sedang dalam Pengembangan / In Development
3.	<i>IT Training Course SAP Fiori</i>	Training	Selesai / Completed
4.	<i>SAP License</i>	Pemeliharaan Software / Software Maintenance	Selesai / Completed
5.	<i>Website Presisi V1</i>	Pemeliharaan Software / Software Maintenance	Selesai / Completed
6.	<i>Enhancement Presisi Online – Project Planning</i>	Pengembangan Software / Software Development	Tahap Pengujian / Testing
7.	<i>Wireless Network</i>	Pemeliharaan Software / Software Maintenance	Selesai / Completed
8.	<i>Enhancement Presisi Online – Project Planning</i>	Pengembangan Software / Software Development	Tahap Pengujian / Testing
9.	<i>Enhancement Presisi Online – Project Costing</i>	Pengembangan Software / Software Development	Tahap Pengujian / Testing
10.	<i>Enhancement Presisi Online – Project Monitoring & Evaluation</i>	Pengembangan Software / Software Development	Tahap Pengujian / Testing
11.	<i>Website Presisi V2</i>	Pengembangan Software / Software Development	Sedang dalam Pengembangan / In Development
12.	<i>Enhancement Presisi Online – QSHE (Customer complain)</i>	Pengembangan Software / Software Development	Selesai / Completed
13.	<i>Software License</i>	Pemeliharaan Software / Software Maintenance	Selesai / Completed
14.	<i>Inventaris Aset IT</i>	Barcode	Selesai / Completed

Pelatihan SDM di Bidang Teknologi Informasi

Dalam rangka memperkuat kompetensi dan keahlian SDM PP Presisi di bidang Teknologi Informasi, Perseroan telah menyelenggarakan program pelatihan di bidang TI, antara lain :

Uraian / Description	Waktu / Time	Penyelenggara / Organizer	Peserta / Participants
SAP Fiori Training Basic & Advance	Maret 2018 / March 2018	SCM PP	Perwakilan dari semua Proyek / Representative from all projects
Training Office 365	Agustus 2018 / August 2018	PP Presisi (in house)	Perwakilan dari semua Proyek / Representative from all projects
Introductory Workshop to Microsoft Project 2016	Batch 1 Agustus 2018 & 2 - September 2018 / Batch 1 August 2018 & 2 September 2018	PP Presisi (in house)	Perwakilan dari semua Proyek / Representative from all projects

Biaya Pengembangan Teknologi Informasi 2018

Perseroan meyakini bahwa pengembangan di bidang TI penting untuk dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka mendukung proses bisnis dan meningkatkan kinerja Perseroan. Oleh sebab itu, Perseroan mengalokasikan dana untuk pengembangan Teknologi Informasi pada tahun 2018 sebesar Rp4,2 miliar.

Rencana Pengembangan Teknologi Informasi Tahun 2019

Perseroan menyadari bahwa perkembangan TI akan terus terjadi di masa depan seiring dengan majunya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan pengembangan TI di lingkungan PP Presisi, Perseroan telah menyusun rencana strategis terkait pengembangan TI di tahun 2019 mendatang, yang meliputi:

Uraian / Description	Kategori / Category	Rencana / Plan	Status / Status
SMAP Online	Software Development	Triwulan I (Februari 2019) / Quarter I (February 2019)	Implementasi / Implementation
Enhancement Presisi Online	Software Development	Triwulan I (Januari 2019) / Quarter I (January 2019)	Testing
HEMS Mobile	Software Development	Triwulan I (Februari 2019) / Quarter I (February 2019)	Implementasi / Implementation
Batching Plant	Software Development	Triwulan I (Februari 2019) / Quarter I (February 2019)	Implementasi / Implementation
SDM Online	Software Development	Triwulan II (April 2019) / Quarter II (April 2019)	Testing
QSHE Online	Software Development	Triwulan I (Februari 2019) / Quarter I (February 2019)	Development
Marketing Progress Online	Software Development	Triwulan I (Januari 2019) / Quarter I (January 2019)	Gathering Requirement
New Corporate Website	Software Development	Triwulan I (Januari 2019) / Quarter I (January 2019)	Go Live
Warehouse Management System	Software Development	Triwulan II (April 2019) / Quarter II (April 2019)	Gathering Requirement
Internet Corporate	Infrastruktur / Infrastructure	Triwulan II (Juni 2019) / Quarter II (June 2019)	Preparation
Corporate Data Center	H/W Storage	Triwulan III (Juni 2019) / Quarter II (June 2019)	Preparation
Dashboard Room Control	Infrastruktur / Infrastructure	Triwulan IV (Oktober 2019) / Quarter IV (October 2019)	Preparation

Training for HC in Information Technology Field

To strengthen competence and skills of HC of PP Presisi in Information Technology field, the Company has held training program in IT field, among others:

Cost of Development Program in Information Technology in 2018

The Company believes that consistent and continuous development in IT sector is important to support business process and enhance the Company's performance. Hence, the Company allocated fund for development of Information Technology amounting to Rp4.2 billion in 2018.

Information Technology Development Plan in 2019

The Company is aware that IT development will continue in the future along with progress in Science and Technology. Therefore, to increase IT development within PP Presisi, the Company has formulated strategic plan regarding IT development in 2019, namely:

“ // Laba Bersih yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk meningkat 73,4% dari Rp188,3 miliar di tahun 2017 menjadi Rp326,4 miliar di tahun 2018.

Net Profit Attributable to Owners of the Company increased by 73.4% from Rp188.3 billion in 2017 to Rp326.4 billion in 2018.

Grafik Ikhtisar Keuangan Financial Highlights Charts

Perbandingan Perubahan



Laba Bersih Operating Profit



Laba Bersih yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk





Aset Tetap - Bruto
Net Fixed Asset



Jumlah Aset
Total Asset



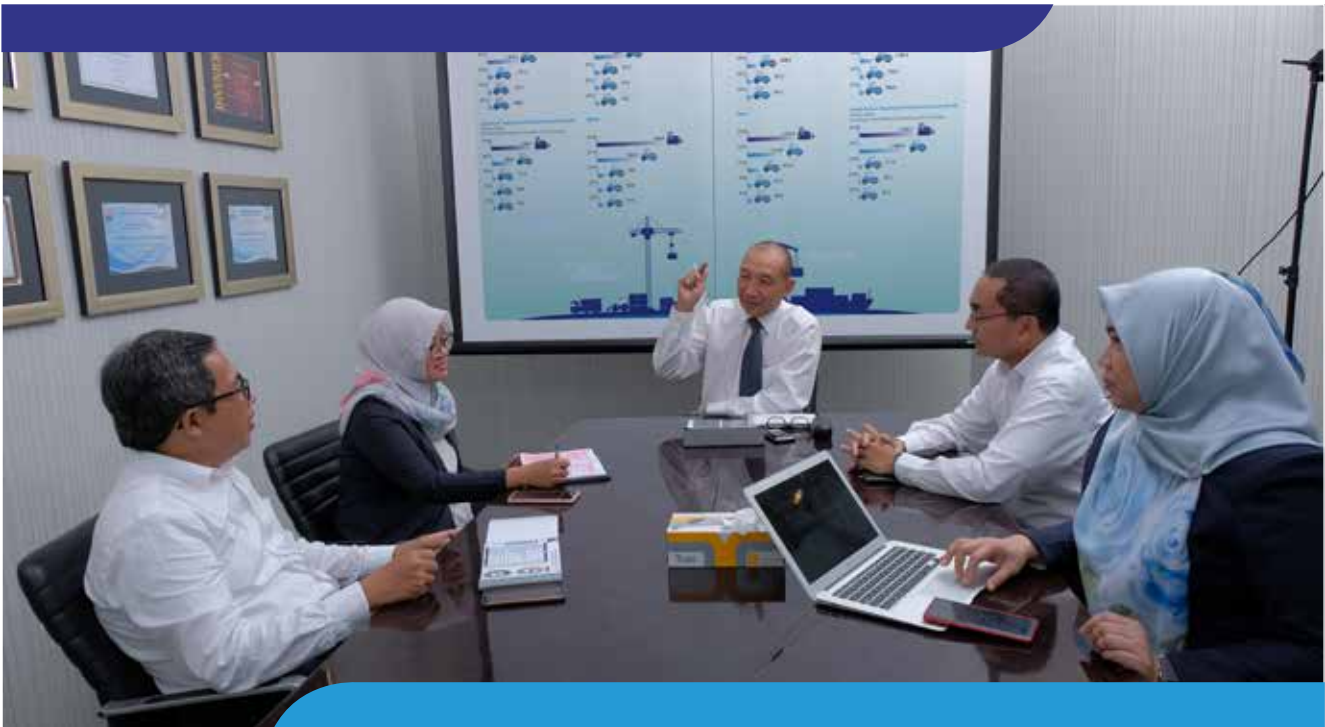
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diidentifikasi Sebagai Perolehan Induk
Total Equity Attributable to the Owner of the Company



Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis





TINJAUAN UMUM

Tinjauan Ekonomi Global

Berdasarkan laporan Bank Dunia yang berjudul “*Global Economic Prospects: Darkening Skies*,” pertumbuhan ekonomi global di tahun 2018 diestimasikan sebesar 3,0%. Jika dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi global tahun 2017 yang tercatat sebesar 3,1%, angka pertumbuhan tahun ini mengalami penurunan sebesar 0,1%.

Salah satu faktor utama melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2018 adalah adanya kebijakan normalisasi moneter Amerika Serikat (AS), baik itu melalui kenaikan suku bunga maupun pengurangan neraca bank sentral, yang menciptakan sentimen negatif di pasar keuangan global. Normalisasi kebijakan moneter tersebut berdampak pada berkurangnya aliran modal masuk (*net capital inflow*) ke beberapa negara, terutama ke negara-negara berkembang.

Perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok juga turut mengakibatkan kerugian finansial yang cukup signifikan bagi kedua negara tersebut. Berdasarkan hasil riset Biro Statistik Nasional China, indeks manufaktur *Purchasing Managers’ Index* (PMI) Tiongkok berada pada level 49,4 pada bulan Desember 2018. Angka tersebut merupakan level terendah sejak Februari 2016.

Adanya perang dagang tersebut mampu memberi dampak negatif terhadap likuiditas valas di pasar keuangan Indonesia dan berisiko menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah, khususnya dolar AS. Namun di sisi lain, perang dagang tersebut secara tidak langsung dapat memicu peningkatan jumlah investasi asing ke beberapa negara Asia

GENERAL OVERVIEW

Global Economic Overview

Based on World Bank report with the title of “*Global Economic Prospects: Darkening Skies*”, global economic growth in 2018 was estimated at 3.0%. Compared to realization of global economic growth in 2017 at 3.1%, the growth decreased by 0.1% this year.

One of the main factors for weakening of global economic growth in 2018 was monetary policy normalization in the United States (US), either through increase of interest rate or decrease of central bank balance, which created negative sentiment in global financial market. Such monetary policy normalization resulted in decrease of net capital inflow in several countries, particularly in developing countries.

Trade war between the United States and China also caused a quite significant financial loss for both countries. According to result from research of the National Bureau of Statistics of China, *Purchasing Managers’ Index* (PMI) of China was at a level of 49.4 on December 2018. The index was at its lowest level since February 2016.

The trade war had a negative impact to foreign exchange liquidity in Indonesia’s financial market and had risks of adding pressure to rupiah exchange rate, especially to US dollar. On the other hand, trade war was unable to directly trigger rise on total foreign investment to Southeast Asian countries, including Indonesia. This was because Southeast Asia region was the

Tenggara, termasuk Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena kawasan Asia Tenggara merupakan basis alternatif yang tepat bagi perusahaan-perusahaan asing yang hendak merelokasi basis produksi mereka di Tiongkok dalam rangka menghindari tarif impor yang semakin melambung.

Tinjauan Ekonomi dan Industri Nasional

Kondisi perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2018 tergolong cukup stabil meski belum sepenuhnya pulih. Berdasarkan pernyataan Kementerian Keuangan, realisasi pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun buku berada pada level 5,15%. Meskipun bila dibandingkan dengan angka pertumbuhan tahun 2017 yang tercatat sebesar 5,07% menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,8%, namun pencapaian tersebut belum mampu mencapai target pertumbuhan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 yakni sebesar 5,4%. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya kondusif akibat adanya tekanan perang dagang yang terjadi sepanjang tahun buku.

Penguatan pertumbuhan ekonomi tahun 2018 tersebut didukung oleh adanya pertumbuhan konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah. Sementara itu, kinerja ekspor justru mengalami stagnasi dikarenakan melambatnya pertumbuhan perdagangan dunia akibat eskalasi perang dagang serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sepanjang tahun 2018 rata-rata berada pada level Rp14.247. Angka tersebut berada di bawah asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang diprediksi berada di level Rp13.400 per dolar AS.

Dalam rangka menstabilkan perekonomian nasional dan nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2018, maka Bank Indonesia (BI) secara agresif meningkatkan suku bunga acuan *7-day (Reverse) Repo Rate* sebesar 175 basis poin (bps) menjadi 6%. Akibatnya, laju pertumbuhan inflasi berhasil mengalami perlambatan sepanjang tahun buku, dengan realisasi sebesar 3,04%. Tingkat inflasi yang cukup terkendali tersebut telah sesuai dengan prediksi dari Pemerintah dalam APBN 2018 yakni sebesar 3,5% maupun dari Bank Indonesia yang berada pada level 3,5% \pm 1%. Kondisi ekonomi nasional yang cukup stabil ini mampu mendorong peningkatan aliran investasi tahun buku. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, jumlah realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) selama Januari – September 2018 sebesar Rp535,4 triliun, naik 4,3% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017 yakni sebesar Rp513,2 triliun.

Sektor bisnis yang cukup menarik bagi para investor domestik maupun asing adalah sektor bisnis Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi dengan nilai realisasi investasi (PMDN & PMA) sebesar Rp70,7 triliun atau 13,2%; kemudian disusul sektor bisnis Listrik, Gas, dan Air sebesar Rp68,7 triliun atau 12,8%;

right alternative basis for foreign companies that would like to relocate their production basis in China in order to avoid rapid increase in import tariff.

National Economic and Industrial Overview

Indonesia's economic condition in 2018 was quite stable despite not fully recovered. Based on the statement of the Ministry of Finance, realization of national economic growth throughout fiscal year was at a level of 5.15%. Even though there was an increase of 0.8% compared to growth in 2017 at 5.07%, such achievement was unable to reach growth target stipulated in the 2018 State Budget, namely at 5.4%. This was affected by global economic conditions that were not fully conducive due to pressure from trade war throughout fiscal year.

Strengthening of 2018 economic growth was supported by growth in household consumption, investment and government consumption. Meanwhile, performance of export stagnated due to slowdown of global trade growth caused by escalation of trade war and weakening of rupiah exchange rate to US dollar. According to data from Ministry of Finance, on average, rupiah exchange rate to US dollar was at Rp14,247 throughout 2018. The number was below the assumption of 2018 State Budget predicted at Rp13,400 per US dollar.

To stabilize national economy and rupiah exchange rate in 2018, Bank Indonesia (BI) aggressively increased reference rate of *7-day (Reverse) Repo Rate* by 175 basis points (bps) to 6%. As a result, inflation growth rate had a slowdown throughout fiscal year, with realization of 3.04%. Inflation rate was controlled in accordance with predictions from the Government in 2018 APBN, namely at 3.5% and Bank Indonesia at a level of 3.5% + 1%. Such stable national economic condition was able to boost investment flows in fiscal year. Indonesian Investment Coordinating Board (BKPM) recorded that total investment realization of Domestic Investment (PMDN) and Foreign Investment from January-September 2018 was at Rp535.4 trillion, rose by 4.3% compared to the same period in 2017, namely at Rp513.2 trillion.

Business sectors that attracted domestic and foreign investors were Transportation, Warehouse, and Telecommunication business sectors with investment realization value (PMDN & PMA) amounting to Rp70.7 trillion or 13.2%; followed by Electricity, Gas, and Water business sectors at Rp68.7 trillion or

Pertambangan sebesar Rp58,5 triliun atau 10,9%; Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran sebesar Rp57,1 triliun atau 10,7%; dan Industri Makanan sebesar Rp43,1 triliun atau 8,1%.

Tinjauan Industri Konstruksi Nasional

Sepanjang tahun 2018, industri konstruksi nasional berhasil mencatatkan kinerja yang positif. Hal tersebut dibuktikan dari besarnya kontribusi pendapatan dari sektor industri konstruksi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sebesar 10,36%, menempati posisi kelima setelah sektor industri pengolahan migas dan non migas, perdagangan, dan pertanian.

Kebijakan akselerasi pembangunan infrastruktur yang digalakkan oleh Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mampu mendorong laju pertumbuhan industri konstruksi nasional. Keseriusan Pemerintah dalam mempercepat pembangunan nasional diperkuat dengan menaikkan anggaran infrastruktur yang tercantum dalam APBN 2018. Dalam laporan tersebut, anggaran dana untuk infrastruktur meningkat sebesar 5,2% dari alokasi dana infrastruktur di tahun 2017 yakni senilai Rp390,2 triliun menjadi Rp410,4 triliun di tahun 2018. Anggaran tersebut sebagian besar akan difokuskan untuk pembangunan proyek infrastruktur vital seperti jalan dan tol, jembatan, jalur kereta api, pelabuhan laut, hingga bandar udara.

Geliat industri konstruksi nasional yang semakin masif mampu membuka peluang bagi PP Presisi selaku anak perusahaan PT PP (Persero) Tbk yang bergerak di bidang konstruksi berbasis alat berat untuk mengembangkan bisnisnya ke lini bisnis konstruksi lain, seperti *civil work*, *foundation*, *ready mix*, *formwork*, *equipment rental*, *erector*, hingga sektor jasa pertambangan terintegrasi (*integrated mining services*).

Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha

Berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan, segmen operasi PP Presisi dikelompokkan berdasarkan aktivitas usaha yang dijalankan Perseroan, antara lain konstruksi, *ready mix*, dan *equipment rental*.

Deskripsi Usaha

Konstruksi

Segment usaha Konstruksi terdiri atas *civil work* (termasuk *rigid pavement*), *foundation*, *formwork*, dan *erector* yang melayani pekerjaan-pekerjaan konstruksi dalam pembangunan infrastruktur jalan tol dan jalan non-tol, bandara, pelabuhan, bendungan, bangunan bertingkat serta pembangkit listrik.

Ready Mix

Ready Mix merupakan istilah beton yang sudah siap untuk digunakan dalam proses konstruksi. Dalam menjalankan kegiatan usaha *ready mix*, Perseroan menyiapkan *batching plant* untuk masing-masing proyek, yaitu pabrik sementara yang memproduksi beton *ready mix*. Pendirian *batching plant*

12.8%; Mining amounting to Rp58.5 trillion or 10.9%; Housing, Industrial Area, and Office Complex amounting to Rp57.1 trillion or 10.7%; and Food Industry at Rp43.1 trillion or 8.1%

Overview on National Construction Industry

Throughout 2018, national construction industry recorded a positive performance. This was evidenced from the amount of revenue contribution from construction industry to Gross Domestic Products (GDP) of Indonesia at 10.36%, in the fifth place after oil and gas processing as well as non-oil and gas processing, trade, and agriculture industries.

The policy on acceleration of infrastructure development encouraged by the Government of Indonesia in the last several years was able to boost growth rate of national construction industry. The Government's seriousness in accelerating national development is strengthened by raising infrastructure budget stipulated in 2018 APBN. In that report, budget for infrastructure improved by 5.2% from infrastructure budget allocation in 2017 which was at Rp390.2 trillion to Rp410.4 trillion in 2018. The budget will mostly be focused on construction of vital infrastructure projects, such as roads and toll roads, bridges, railways, seaports, and airports.

The increasingly massive development of national construction provides opportunities for PP Presisi, as a subsidiary of PT PP (Persero) Tbk, which engages in heavy equipment-based construction sector to develop its business to other lines of construction business, such as *civil work*, *foundation*, *ready mix*, *formwork*, *equipment rental*, *erector*, and integrated mining services.

Operational Overview per Business Segment

Based on the Financial Statements audited by Public Accounting Firm Hertanto, Grace, Karunawan, operating segment of PP Presisi is grouped based on the business activities carried out by the Company, including construction, *ready mix*, and *equipment rental*.

Business Description

Construction

Construction business segment consists of *civil work* (including *rigid pavement*), *foundation*, *formwork*, and *erector* which serves construction works in the construction of infrastructure for toll roads and non-toll roads, airports, ports, dams, high rise buildings and power plants.

Ready Mix

Ready Mix is a term for concrete that is ready for use in the construction process. In carrying out *ready mix* business, the Company prepares a *batching plant* for each project, namely a temporary factory that produces *ready mix* concrete. The establishment of a *batching plant* in each project can cut

pada masing-masing proyek dapat memangkas waktu antar dan tidak memerlukan armada angkut yang besar dalam transportasinya, dengan kualitas beton yang terjaga. Produksi beton dan agregat siap pakai ini dilaksanakan Perseroan untuk proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan gedung.

Bisnis *Ready Mix* Perseroan berbeda dengan perusahaan beton lain, dimana Perseroan fokus pada transaksi B2B dengan membangun *batching plant* di proyek-proyek pelanggan Perseroan.

Equipment Rental

Saat ini, Perseroan memiliki persewaan peralatan konstruksi yang merupakan kegiatan utama pada saat pendirian. Jenis peralatan yang disewakan sebagian besar adalah alat-alat konstruksi, termasuk perancah bekisting dan alat berat seperti *tower crane*, *passenger hoist*, *earth moving equipment*, dan genset.

Produktivitas Per Segmen Tahun 2018

Sepanjang tahun 2018, Perseroan berhasil membukukan nilai *Order Book* sebesar Rp14,2 triliun. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 31,5% atau Rp3,4 triliun dibandingkan dengan perolehan *Order Book* di tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp10,8 triliun. Nilai *order book* Perseroan pada tahun buku terdiri dari nilai *carry over* sebesar Rp9,0 triliun atau 63,4% dari total *order book* dan nilai *new contracts* sebesar Rp5,2 triliun atau 36,4% dari total *order book*.

Berdasarkan segmen bisnis Perseroan, perolehan *new contracts* di tahun 2018 didominasi dari sektor konstruksi sebesar 88,4%, diikuti oleh *ready mix* sebesar 9,8%, dan *equipment rental* sebesar 1,8%. Sementara itu jika dilihat dari jenis perusahaan, *new contracts* Perseroan pada tahun 2018 mayoritas berasal dari sektor swasta sebesar 60,0%, diikuti oleh perusahaan PP Group sebesar 37,4% dan BUMN sebesar 2,6%.

Dari sisi *burn rate*, di tahun 2018 tercatat 21,1% lebih tinggi dari nilai *burn rate* di tahun 2017 yang tercatat sebesar 16,7%.

Pendapatan dan Profitabilitas Per Segmen Tahun 2018

Sepanjang tahun 2018, Perseroan berhasil membukukan pendapatan bersih sebesar Rp3,0 triliun. Kontributor terbesar terhadap pendapatan bersih Perseroan berasal dari segmen Konstruksi sebesar 81,4%, lalu diikuti dengan Equipment Rental sebesar 12,5%, dan Ready Mix sebesar 6,1%.

(dalam Miliar Rupiah)

Segmen Usaha / Business Segment	Pendapatan / Revenues		Pertumbuhan / Growth	
	2018	2017	Nominal	%
Konstruksi / Construction	2.483,7	1.412,3	1.071,4	75,9%
Equipment Rental	382,5	240,7	141,8	58,9%
Ready Mix	185,4	163,3	22,1	13,5%
Jumlah / Total	3.051,6	1.816,3	1.235,3	68,0%

the delivery time and not require a large transport fleet in its transportation, with the quality of the concrete being maintained. This ready-made concrete and aggregate production is carried out by the Company for infrastructure projects and building construction.

The Company's Ready Mix business is different from other concrete companies, where the Company focuses on B2B transactions by building a batching plant on the Company's customer projects.

Equipment Rental

At present, the Company has rental of construction equipment which is the main activity at the time of establishment. The types of equipment leased mostly are construction equipment, including formwork scaffolding and heavy equipment such as tower cranes, passenger hoists, earth moving equipment, and generators.

Productivity Per Segmen in 2018

Throughout 2018, the Company successfully booked an Order Book of Rp14.2 trillion, increased by 31.5% or Rp3.4 trillion compared to the acquisition of Order Book in 2017 which was recorded at Rp10.8 trillion. The Company's order book value in the fiscal year consisted of carry over value of Rp9.0 trillion or 63.4% of the total order book and the value of new contracts was Rp5.2 trillion or 36.4% of the total order book.

Based on the Company's business segment, the acquisition of new contracts in 2018 was dominated by the construction sector at 88.4%, followed by ready mix at 9.8%, and equipment rental at 1.8%. Meanwhile, when viewed from the type of company, the majority of the Company's contracts in 2018 came from the private sector at 60.0%, followed by PP Group companies at 37.4% and SOEs at 2.6%.

Burn rate in 2018 was 21.1% higher than the burn rate in 2017 which was recorded at 16.7%.

Revenues and Profitability per Segment in 2018

Net revenue of the Company in 2018 amounted to Rp3.0 trillion. The largest contributor to net revenue was Construction segment at 81.4%, followed by Equipment Rental at 12.5% and Ready Mix at 6.1%.

(in Billion Rupiah)

Sedangkan untuk kinerja profitabilitas per segmen diperoleh dari selisih antara pendapatan dan Harga Pokok Pendapatan (HPP) dari masing-masing segmen bisnis Perseroan.

Performance of profitability per segment is obtained from the difference between revenues and Cost of Revenue (HPP) of each of the Company's business segments.

(dalam Miliar Rupiah)

(in Billion Rupiah)

Uraian / Description	Segmen Usaha / Business Segment					
	Konstruksi / Construction		Equipment Rental		Ready Mix	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Pendapatan / Revenues	2.483,7	1.412,3	382,5	240,7	185,4	163,4
Harga Pokok Pendapatan (HPP) / Cost of Revenues						
Upah / Wage	491,5	231,9	38,8	11,7	5,0	3,5
Bahan / Material	944,9	481,6	107,6	47,3	85,0	93,9
Overhead	156,0	82,0	11,2	5,0	9,2	10,1
Penyusutan / Depreciation	179,8	108,9	57,4	75,4	23,4	9,6
Alat / Equipment	149,4	161,2	33,3	42,2	15,7	6,1
Jumlah HPP / Total HPP	1.921,6	1.065,6	248,3	181,6	138,3	123,2
Laba Kotor / Gross Profit	562,10	346,70	134,20	59,10	47,10	40,20
Marjin Kotor / Gross Margin	22,6%	24,5%	35,1%	24,5%	25,4%	24,5%

KINERJA ANAK PERUSAHAAN

PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA)

PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA) didirikan pada tanggal 13 Mei 1994. Bidang usaha LMA adalah jasa konstruksi. Perseroan memiliki kepemilikan langsung pada LMA sebesar 51%.

Aktivitas Usaha Tahun 2018

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar PT LMA sebagaimana termaktub dalam Akta No. 01/2017, maksud dan tujuan LMA ialah:

1. Berusaha dalam bidang pembangunan;
2. Berusaha dalam bidang perdagangan;
3. Berusaha dalam bidang industri;
4. Berusaha dalam bidang pertanian;
5. Berusaha dalam bidang jasa, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak;
6. Berusaha dalam bidang pengangkutan udara;
7. Berusaha dalam bidang percetakan;
8. Berusaha dalam bidang pertambangan dan Energi;
9. Berusaha dalam bidang perbengkelan.

Kinerja Usaha LMA Tahun 2017 – 2018

(Dalam Miliar Rupiah)

Uraian / Description	2018	2017	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Pendapatan Usaha / Revenue	1.300,9	1.190,6	110,3	9,3%
Laba Bersih Tahun Berjalan / Net Profit for the Year	216,1	164,3	51,8	31,5%
Jumlah Aset / Total Assets	1.808,1	1.407,3	400,8	28,5%

Sampai dengan akhir tahun 2018, LMA berhasil membukukan Laba Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp216,1 miliar, naik Rp51,8 miliar atau 31,5% bila dibandingkan akhir tahun 2017 sebesar Rp164,3 miliar. Perubahan tersebut disebabkan oleh kenaikan

PERFORMANCE OF SUBSIDIARY

PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA)

PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA) was established on May 13, 1994. Line of business of LMA is construction services. The Company has 51% direct ownership on LMA.

Business Activities in 2018

Pursuant to Articles 3 of Articles of Association of PT LMA as stated in Deed No. 01/2017, purpose and objective of LMA are:

1. Engaged in construction field;
2. Engaged in trading field;
3. Engaged in industry field;
4. Engaged in agricultural field;
5. Engaged in service field, except service in legal and taxation;
6. Engaged in air transportation field;
7. Engaged in printing field;
8. Engaged in mining and energy field;
9. Engaged in workshop field.

Business Performance of LMA in 2017-2018

(In Billion Rupiah)

Net Profit for the Year of LMA in 2018 amounted to Rp216.1 billion, increased by Rp51.8 billion or 31.5% compared to that of 2017 at Rp164.3 billion. Such change was caused by increase in revenue by 9.3% or Rp110.3 billion to Rp1.3 trillion.

pendapatan usaha sebesar 9,3% atau Rp110,3 miliar sehingga menjadi Rp1,3 triliun.

TINJAUAN KEUANGAN

Uraian mengenai kinerja keuangan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku umum di Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hartanto, Grace, & Karunawan dengan opini wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT PP Presisi Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Bahasan kinerja keuangan Perseroan, disampaikan dengan memperhatikan penjelasan pada catatan Laporan Keuangan Konsolidasi dari pihak auditor eksternal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Tahun 2017 – 2018

(Dalam Miliar Rupiah)

Uraian / Description	2018	2017	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Aset Lancar / Current Assets	3.118,8	2.661,1	457,7	17,2%
Aset Tidak Lancar / Non-Current Assets	3.137,2	2.464,5	672,7	24,3%
Jumlah Aset / Total Assets	6.256,0	5.125,6	1.130,4	22,1%
Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities	1.740,8	1.408,2	332,6	23,6%
Liabilitas Jangka Panjang / Non-Current Liabilities	1.678,4	1.277,2	401,2	31,4%
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	3.419,2	2.685,4	733,8	27,3%
Jumlah Ekuitas / Total Equity	2.836,8	2.440,2	396,6	16,3%

Sampai dengan akhir tahun 2018, Perseroan mencatatkan kenaikan aset sebesar Rp1,1 triliun atau 22,1% dari aset tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp5,1 triliun menjadi Rp6,2 triliun. Liabilitas per tanggal 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp3,4 triliun, naik sebesar Rp733,8 miliar atau 27,3% bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp2,7 triliun.

Perubahan pada nilai Aset dan Liabilitas per tanggal 31 Desember 2018 tersebut menyebabkan nilai Ekuitas meningkat sebesar Rp396,6 miliar atau 16,3% menjadi Rp2,8 triliun di akhir tahun 2018 bila dibandingkan dengan jumlah Ekuitas di tahun 2017 yakni sebesar Rp2,4 triliun.

Aset

Pada akhir tahun 2018, jumlah Aset Perseroan tercatat sebesar Rp6,2 triliun, yang terdiri dari 49,9% Aset Lancar dan 50,1% Aset Tidak Lancar.

FINANCIAL OVERVIEW

Description on this financial performance is prepared based on Consolidated Financial Statements presented according to the generally accepted Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) in Indonesia for fiscal year ended on December 31, 2018. The financial statements had been audited by Public Accounting Firm of Hartanto, Grace, & Karunawan with opinion of fair in all material respects for consolidated financial position of PT PP Presisi Tbk and Subsidiary dated December 31, 2018, as well as consolidated financial performance and cash flows for the year ended on that date, according to Financial Accounting Standards in Indonesia.

Discussion of financial performance of the Company is presented by taking into account explanation on Notes to Consolidated Financial Statements from external auditors as inseparable part of this Annual Report.

Consolidated Statements of Financial Position in 2017-2018

(In Billion Rupiah)

The Company's assets in 2018 increased by Rp1.1 trillion or 22.1% from Rp5.1 trillion in 2017 to Rp6.2 trillion. Liabilities as of December 31, 2018 amounted to Rp3.4 trillion. increased by Rp733.8 billion or 27.3% compared to that of 2017 at Rp2.7 trillion.

Changes in the Assets and Liabilities as of December 31, 2018 caused the Equity to increase by Rp396.6 billion or 16.3% to Rp2.8 trillion at the end of 2018 compared to total Equity in 2017 at Rp2.4 trillion.

Assets

The Company's Assets at the end of 2018 was posted at Rp6.2 trillion consisting of 49.9% Current Assets and 50.1% Non-Current Assets.

Aset Lancar

(Dalam Miliar Rupiah)

Current Assets

(In Billion Rupiah)

Uraian / Description	2018	2017	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalents	630,9	1.132,4	(501,5)	(44,3)%
Piutang usaha – bersih / Trade Receivables - Net	629,8	409,5	220,3	53,8%
Piutang retensi / Retention Receivables	170,3	32,7	137,6	420,5%
Tagihan bruto pemberi kerja / Gross Receivables from Project Owners	1.135,0	698,2	436,8	62,6%
Piutang Lain-lain / Other Receivables	32,7	52,2	(19,5)	(37,4)%
Persediaan / Inventories	79,2	58,5	20,7	35,3%
Uang muka / Advance	89,0	94,9	(5,9)	(6,2)%
Pajak dibayar dimuka / Prepaid Taxes	301,2	157,2	144,0	91,6
Biaya dibayar dimuka / Prepaid Expenses	50,7	25,6	25,1	98,3%
Jumlah Aset Lancar / Total Current Assets	3.118,8	2.661,1	457,7	17,2%

Per 31 Desember 2018, Perseroan berhasil mencatatkan jumlah Aset Lancar sebesar Rp3,1 triliun, naik Rp457,7 miliar atau 17,2% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp2,7 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh:

Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas Perseroan tercatat sebesar Rp630,9 miliar, turun 44,3% atau Rp501,5 miliar dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1,1 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh realisasi penggunaan dana IPO (24 November 2017) sepanjang tahun 2018.

Piutang Usaha - Bersih

Piutang Usaha tercatat meningkat sebesar Rp220,3 miliar atau 53,8% menjadi Rp629,8 miliar per 31 Desember 2018 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2017 sebesar Rp409,5 miliar.

Piutang Retensi

Piutang Retensi tercatat meningkat sebesar Rp137,6 miliar atau 420,5% menjadi Rp170,3 miliar per 31 Desember 2018 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2017 sebesar Rp32,7 miliar.

Tagihan Bruto Pemberi Kerja

Tagihan bruto pemberi kerja tercatat meningkat sebesar Rp436,8 miliar atau 62,6% menjadi Rp1.135,0 miliar per 31 Desember 2018 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2017 sebesar Rp698,2 miliar.

Persediaan

Persediaan sampai dengan akhir tahun 2018 tercatat sebesar Rp79,2 miliar, naik Rp20,7 miliar atau 35,3% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp58,5 miliar.

Pajak Dibayar Dimuka

Pajak dibayar dimuka tercatat meningkat sebesar Rp144,0 miliar atau 91,6% menjadi Rp301,2 miliar per 31 Desember 2018 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2017 sebesar Rp157,2 miliar.

The Company's total Current Assets in 2018 amounted to Rp3.1 trillion, increased by Rp457.7 billion or 17.2% compared to that of December 31, 2017 at Rp2.7 trillion. Such increase was mainly caused by:

Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents stood at Rp630.9 billion, decreased by 44.3% or Rp501.5 billion from the previous year at Rp1.1 trillion. Such decrease was mainly caused by realization of the use of IPO (November 24, 2017) throughout 2018.

Trade Receivables - Net

Trade Receivables increased by Rp220.3 billion or 53.8% to Rp629.8 billion as of December 31, 2018 compared to that of the end of 2017 at Rp409.5 billion.

Retention Receivables

Retention Receivables increased by Rp137.6 billion or 420.5% to Rp170.3 billion as of December 31, 2018 compared to that of the end of 2017 at Rp32.7 billion.

Gross Receivables from Project Owners

Gross receivables from project owners increased by Rp436.8 billion or 62.6% to Rp1,135.0 billion as of December 31, 2018 compared to that of the end of 2017 at Rp698.2 billion.

Inventories

Inventories as of the end of 2018 stood at Rp79.2 billion, increased by Rp20.7 billion or 35.3% compared to that of December 31, 2017 at Rp58.5 billion.

Prepaid Taxes

Prepaid taxes increased by Rp144.0 billion or 91.6% to Rp301.2 billion as of December 31, 2018 compared to that of the end of 2017 at Rp157.2 billion.

Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka sampai dengan akhir tahun 2018 tercatat sebesar Rp50,7 miliar, naik Rp25,1 miliar atau 98,3% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp25,6 miliar.

Prepaid Expenses

Prepaid expenses as of the end of 2018 was recorded at Rp50.7 billion, increased by Rp25.1 billion or 98.3% compared to that of December 31, 2017 at Rp25.6 billion.

Aset Tidak Lancar

(Dalam Miliar Rupiah)

Uraian / Description	2018	2017	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Aset Tetap – Bersih / Fixed Assets - Net	2.886,9	2.206,3	680,6	30,8%
Goodwill / Goodwill	246,9	246,9	-	-
Aset Tidak Berwujud – Bersih / Intangible Assets - Net	3,4	11,3	(7,9)	(70,0)%
Jumlah Aset Tidak Lancar / Total Non-Current Assets	3.137,2	2.464,5	672,7	27,3%

Non-Current Assets

(In Billion Rupiah)

Per 31 Desember 2018, Perseroan mencatatkan jumlah Aset Tidak Lancar sebesar Rp3,1 triliun, naik sebesar Rp672,7 miliar atau 27,3% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp2,5 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh:

Total Non-Current Assets of the Company as of December 31, 2018 stood at Rp3.1 trillion, increased by Rp672.7 billion or 27.3% compared to that of December 31, 2017 at Rp2.5 trillion. Such increase was mainly due to:

Aset Tetap – Bersih

Aset Tetap – Bersih sampai dengan akhir tahun 2018 tercatat sebesar Rp2,9 triliun, naik Rp680,6 miliar atau 30,8% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp2,2 triliun.

Fixed Assets - Net

Fixed Assets - Net as of the end of 2018 was recorded at Rp2.9 trillion, increased by Rp680.6 billion or 30.8% compared to that of December 31, 2017 at Rp2.2 trillion.

Liabilitas

Per 31 Desember 2018, Perseroan mencatatkan jumlah Liabilitas sebesar Rp3,4 triliun, yang terdiri dari 50,9% Liabilitas Jangka Pendek dan 49,1% Liabilitas Jangka Panjang.

Liabilities

As of December 31, 2018, the Company's Liabilities was recorded at Rp3.4 trillion which consisted of 50.9% Current Liabilities and 49.1% Non-Current Liabilities.

Liabilitas Jangka Pendek

(Dalam Miliar Rupiah)

Uraian / Description	2018	2017	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Utang usaha – pihak ketiga / Trade Payables – Third Parties	1.138,9	950,3	188,6	19,8%
Uang muka pemberi kerja / Advances from project owners	39,3	117,6	(78,3)	(66,6)%
Utang lain-lain / Other Payables	116,3	16,1	100,2	624,5%
Utang pajak / Taxes Payables	84,9	19,3	65,6	341,0%
Utang Bank Jangka Pendek / Current Bank Loans	196,6	200,0	(3,4)	(1,7)%
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun / Current Maturity of Long-Term Liabilities	164,8	105,0	59,8	56,9%
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek / Total Current Liabilities	1.740,8	1.408,2	332,6	23,6%

Current Liabilities

(In Billion Rupiah)

Per 31 Desember 2018, Perseroan mencatatkan jumlah Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp1,7 triliun, naik sebesar Rp332,6 miliar atau 23,6% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp1,4 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh:

Total Current Liabilities of the Company as of December 31, 2018 amounted to Rp1.7 trillion, increased by Rp332.6 billion or 23.6% compared to that of December 31, 2017 at Rp1.4 trillion:

Utang Usaha - Pihak Ketiga

Utang Usaha dari Pihak Ketiga tercatat mengalami kenaikan sebesar 19,8% atau Rp188,6 miliar dari tahun 2017 yakni sebesar Rp950,3 miliar menjadi Rp1,1 triliun di tahun 2018.

Trade Accounts Payables - Third Parties

Trade Accounts Payables from Third Parties increased by 19.8% or Rp188.6 billion from that of 2017 at Rp950.3 billion to Rp1.1 trillion in 2018.

Utang Lain-lain

Utang lain-lain tercatat meningkat sebesar Rp100,2 miliar atau 624,5% menjadi Rp116,3 miliar per 31 Desember 2018 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2017 sebesar Rp16,1 miliar.

Utang Pajak

Utang pajak tercatat meningkat sebesar Rp65,6 miliar atau 341,0% menjadi Rp84,9 miliar per 31 Desember 2018 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2017 sebesar Rp19,3 miliar.

Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun

Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sampai dengan akhir tahun 2018 tercatat sebesar Rp164,8 miliar, naik Rp59,8 miliar atau 56,9% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp105,0 miliar.

Liabilitas Jangka Panjang

(Dalam Miliar Rupiah)

Uraian / Description	2018	2017	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Liabilitas Imbalan Kerja / Employee Benefits Obligation	9,4	7,3	2,1	28,6%
Liabilitas Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun / Long-Term Liabilities - Net of Current Maturity	1.669,0	1.269,9	399,1	31,4%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang / Total Non-Current Liabilities	1.678,5	1.277,2	401,3	31,4%

Per 31 Desember 2018, Perseroan mencatatkan jumlah Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp1,7 triliun, naik Rp401,3 miliar atau 31,4% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp1,3 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh:

Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas imbalan kerja tercatat meningkat sebesar Rp2,1 miliar atau 28,6% menjadi Rp9,4 miliar per 31 Desember 2018 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2017 sebesar Rp7,3 miliar.

Liabilitas Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun

Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sampai dengan akhir tahun 2018 tercatat sebesar Rp1,7 triliun, naik Rp399,1 miliar atau 31,4% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp1,3 triliun.

Ekuitas

(Dalam Miliar Rupiah)

Uraian / Description	2018	2017	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Modal Saham / Capital Stock	1.022,4	1.022,4	-	-
Tambahan Modal Disetor / Additional Paid-In Capital	749,6	749,6	-	-
Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income	22,0	2,6	19,4	743,8%

Other Payables

Other payables increased by Rp100.2 billion or 624.5% to Rp116.3 billion as of December 31, 2018 compared to that of the end of 2017 at Rp16.1 billion.

Taxes Payables

Taxes payables increased by Rp65.6 billion or 341.0% to Rp84.9 billion as of December 31, 2018 compared to that of the end of 2017 at Rp19.3 billion.

Current Maturity of Long-Term Liabilities

Current maturity of long-term liabilities as of the end of 2018 stood at Rp164.8 billion, increased by Rp59.8 billion or 56.9% compared to that of December 31, 2017 at Rp105.0 billion.

Non-Current Liabilities

(In Billion Rupiah)

Total Non-Current Liabilities of the Company as of December 31, 2018 amounted to Rp1.7 trillion, increased by Rp401.3 billion or 31.4% compared to that of December 31, 2017 at Rp1.3 trillion. Such increase was mainly caused by:

Employee Benefits Obligation

Employee benefits obligation increased by Rp2.1 billion or 28.6% to Rp9.4 billion as of December 31, 2018 compared to that of 2017 at Rp7.3 billion.

Long-Term Liabilities - Net of Current Maturities

Long-term liabilities - net of current maturities as of the end of 2018 was recorded at Rp1.7 trillion, increased by Rp399.1 billion or 31.4% compared to that of December 31, 2017 at Rp1.3 trillion.

Equity

(In Billion Rupiah)

Uraian / Description	2018	2017	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Saldo Laba / Retained Earnings				
Ditentukan Penggunaannya / Appropriated	17,7	-	17,7	100,00%
Belum Ditentukan Penggunaannya / Unappropriated	470,7	218,4	252,3	115,5%
Jumlah Saldo Laba / Total Retained Earnings	488,4	218,4	270,0	123,6%
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada / Equity Attributable to				
Pemilik Entitas Induk / Owners of the Company	2.282,3	1.993,0	289,3	14,5%
Kepentingan Non-Pengendali / Non-Controlling Interests	554,4	447,2	107,2	24,0%
Jumlah Ekuitas / Total Equity	2.836,8	2440,2	396,6	16,3%

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2018 tercapai Rp2,8 triliun, naik Rp396,6 miliar atau 16,3% bila dibandingkan dengan nilai Ekuitas per 31 Desember 2017 sebesar Rp2,4 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan penghasilan komprehensif lain sebesar 743,8% dari tahun sebelumnya sehingga menjadi Rp22,0 miliar di tahun 2018 dan saldo laba sebesar 123,6% dari tahun 2017 sehingga menjadi Rp488,4 miliar di tahun 2018.

Total Equity as of December 31, 2018 stood at Rp2.8 trillion, increased by Rp394.6 billion or 16.3% compared to that of December 31, 2017 at Rp2.4 trillion. Such increase was caused by the increased other comprehensive income by 743.8% from the previous year to Rp22.0 billion and retained earnings by 123.6% from that of 2017 to Rp488.4 billion in 2018.

Laporan Laba / (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Tahun 2017 – 2018

(Dalam Miliar Rupiah)

Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income in 2017-2018

(In Billion Rupiah)

Uraian / Description	2018	2017	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Pendapatan Bersih / Net Revenue	3.051,6	1.816,3	1.235,3	68,0%
Harga Pokok Pendapatan / Cost of Revenue	(2.308,2)	(1.370,4)	(937,8)	68,4%
Laba Kotor / Gross Profit	743,3	445,9	297,4	66,7%
Beban Usaha / Operating Expenses	(83,0)	(57,0)	(26,0)	45,6%
Laba Usaha / Operating Profit	660,3	388,9	271,4	69,8%
Pendapatan (Beban) Lain-lain / Other Income (Expense)	(128,7)	(82,9)	(45,8)	55,3%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Profit Before Income Tax	446,6	257,4	189,2	73,5%
(Beban) Pajak Penghasilan / Income Tax (Expense)	(14,3)	(12,9)	(1,4)	11,3%
Laba Bersih Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada: / Net Profit Attributable to:				
Pemilik Entitas Induk / Owners of the Company	326,4	188,3	138,1	73,4%
Kepentingan Non-Pengendali / Non-Controlling Interests	105,9	56,3	49,6	88,2%
Jumlah Laba Bersih Tahun Berjalan / Total Net Profit of Current Year	432,3	244,6	187,7	76,8%
Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income	36,8	2,6	34,2	1.305,1%
Total Laba Komprehensif Pada Tahun Berjalan / Total Comprehensive Income for the Year	469,1	247,2	221,9	89,8%
EBITDA	926,9	583,9	353,0	59

Pendapatan Bersih

Selama tahun 2018, Perseroan berhasil membukukan Pendapatan Bersih sebesar Rp3,0 triliun, meningkat Rp1,2 triliun atau 68,0% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp1,8 triliun. Peningkatan Pendapatan Bersih tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan dari segmen bisnis konstruksi sebesar 75,9% menjadi Rp2,5 triliun akibat adanya

Net Revenue

The Company's Net Revenue in 2018 stood at Rp3.0 trillion, increased by Rp1.2 trillion or 68.0% compared to that of 2017 at Rp1.8 trillion. The increase in net revenue was mainly due to the increased revenue from construction segment by 75.9% to Rp2.5 trillion due to the progress of infrastructure projects, such as Pandaan-Malang toll road project, Manado-Bitung

peningkatan progress penyelesaian proyek-proyek infrastruktur seperti proyek jalan tol Pandaan – Malang, proyek jalan tol Manado – Bitung, proyek jalan tol Balikpapan – Samarinda, proyek bendungan Way Sekampung, proyek bendungan Leuwi Keris, proyek *taxiway & runway* Bandara Soekarno Hatta, proyek jalan tol Serang – Panimbang, proyek jalan tol Gempol – Pasuruan, proyek bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin, *rest area* jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi dan proyek jalan Akses PLTA Cisokan.

Harga Pokok Pendapatan

Secara keseluruhan, Harga Pokok Pendapatan (HPP) tahun 2018 tercatat meningkat Rp937,8 miliar atau 68,4% menjadi Rp2,3 triliun dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp1,4 triliun. Perubahan tersebut terutama didorong oleh adanya kenaikan HPP dari pekerjaan konstruksi sebesar 80,3% menjadi Rp1,9 triliun, persewaan peralatan sebesar 36,7% menjadi Rp248,3 miliar, dan ready mix sebesar 12,2% menjadi Rp138,3 miliar.

Komponen terbesar Harga Pokok Pendapatan adalah Biaya Bahan dan Biaya Upah masing-masing sebesar 49% & 23%. Biaya Bahan meningkat 83% YoY dari Rp623,1 miliar menjadi Rp1,1 triliun, sedangkan Biaya Upah meningkat 117% YoY dari Rp247,2 miliar menjadi Rp535,3 miliar. Kedua peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan volume pekerjaan konstruksi. Peningkatan Harga Pokok Pendapatan berhasil ditekan oleh Perseroan melalui praktik *business excellent* dengan menggunakan teknologi informasi & inovasi meliputi :

- Perencanaan dan kontrol proyek (*SAP & project management*)
- Perencanaan dan kontrol penggunaan sumberdaya (*equipment & fleet management*, serta *Internet of Things - IoT*) yang dapat mengontrol operasional *fleet* dan penggunaan bahan bakar
- Inovasi teknologi Preform (Presisi *Formwork*) yang berbasis aluminium yang dapat *reuse & recycle* sehingga dapat menghemat waktu pengerjaan & tenaga kerja serta menghilangkan biaya panel kayu (*wood board*)

Beban Usaha

Realisasi Beban Usaha tahun 2018 tercatat naik sebesar Rp26,0 miliar atau 45,6% dari Rp83,0 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp57,0 miliar. Perubahan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan biaya penyusutan gedung sebesar 369,3% menjadi Rp6,1 miliar, biaya pegawai sebesar 53,4% menjadi Rp48,2 miliar, biaya umum sebesar 28,2% menjadi Rp16,4 miliar, dan amortisasi aset tidak berwujud sebesar 12,5% menjadi Rp12,1 miliar.

Komponen terbesar Beban Usaha adalah Biaya Pegawai dan Biaya Umum yang masing-masing sebesar 58% dan 20%. Biaya Pegawai meningkat 53% YoY dari Rp31,4 miliar menjadi Rp48,2 miliar, sedangkan Biaya Umum meningkat 28% YoY dari Rp12,8 miliar menjadi Rp16,4 miliar.

toll road project, Balikpapan-Samarinda toll road project, Way Sekampung dam project, Leuwi Keris dam project, taxiway & runway project at Soekarno-Hatta Airport, Serang-Panimbang toll road project, Gempol-Pasuruan toll road project, Syamsudin Noor airport project, Banjarmasin, rest area on Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi toll road, and PLTA Cisokan Access road project

Cost of Revenue

Overall, Cost of Revenue (HPP) in 2018 increased by Rp937.8 billion or 68.4% to Rp2.3 trillion compared to that of the previous year at Rp1.4 trillion. Such change was due to increased HPP from construction work by 80.3% to Rp1.9 trillion, equipment rental by 36.7% to Rp248.3 billion, and ready mix by 12.2% to Rp138.3 billion.

The largest component of Cost of Revenue is Material Costs and Wage Costs of 49% & 23% respectively. Material costs increased by 83% YoY from Rp623.1 billion to Rp1.1 trillion, while Wage Costs increased by 117% YoY from Rp247.2 billion to Rp535.3 billion. Both of these increases are in line with the increase in the volume of construction work. Increased Cost of Revenue was successfully suppressed by the Company through excellent business practices using information technology & innovation including:

- Project planning and control (*SAP & project management*)
- Planning and control of resource usage (*equipment & fleet management*, as well as the *Internet of Things - IoT*) that can control fleet operations and fuel usage
- Innovation of aluminum-based Preform (Presisi *Formwork*) technology that can reuse & recycle so that it can save work time & labor and eliminate the cost of wood boards.

Operating Expenses

Operating expenses in 2018 increased by Rp26.0 billion or 45.6% from Rp83.0 billion in 2017 to Rp57.0 billion. Such change was caused by increase in depreciation building by 369.3% to Rp6.1 billion, employment expenses by 53.4% to Rp48.2 billion, other expenses by 28.2% to Rp16.4 billion, and amortization of intangible assets by 12.5% to Rp12.1 billion.

The largest component of Operating Expenses is Employee Costs and General Costs which were 58% and 20% respectively. Employee costs increased by 53% YoY from Rp31.4 billion to Rp48.2 billion, while General Costs increased by 28% YoY from Rp12.8 billion to Rp16.4 billion.

Laba Usaha

Laba Usaha Perseroan tercatat meningkat sebesar Rp271,4 miliar atau 69,8% menjadi Rp660,3 miliar pada tahun 2018 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2017 sebesar Rp388,9 miliar. Peningkatan tersebut merupakan keberhasilan Perseroan dalam menekan Beban Usaha yang meningkat hanya sebesar 46% YoY dari Rp57,0 miliar menjadi Rp83,0 miliar. Peningkatan laba usaha juga diiring dengan peningkatan margin laba usaha, yang semula tercatat sebesar 21,4% di tahun 2017 menjadi 21,6% di tahun 2018.

Peningkatan Laba Usaha ini mendorong peningkatan EBITDA yang dibukukan Perseroan sebesar 58,7% YoY dari Rp583,9 miliar menjadi Rp926,9 miliar.

Laba Bersih Tahun Berjalan

Laba Bersih Tahun Berjalan tercatat meningkat sebesar Rp187,7 miliar atau 76,8 % menjadi Rp432,3 miliar di tahun 2018 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2017 sebesar Rp244,6 miliar. Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan pertumbuhan pendapatan dan laba usaha Perseroan sepanjang tahun buku.

Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk meningkat 73,4% YoY dari Rp188,3 miliar menjadi Rp326,4 miliar.

Penghasilan Komprehensif Lain

Penghasilan Komprehensif Lain tercatat sebesar Rp36,8 miliar, tumbuh sebesar Rp34,2 miliar atau 1.305,1% di tahun 2018 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2017 sebesar Rp2,6 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya surplus penilaian kembali aset tetap sebesar Rp33,3 miliar atau 1.069,1% sehingga menjadi Rp36,4 miliar.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan tercatat meningkat sebesar Rp221,9 miliar atau 89,8% menjadi Rp469,1 miliar di tahun 2018 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2017 sebesar Rp247,2 miliar.

Laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (setelah kepentingan non-pengendali) tahun 2018 adalah sebesar Rp345,8 miliar atau meningkat sebesar 81,4% dari tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp345,8 miliar.

Laporan Arus Kas Konsolidasian Tahun 2017 – 2018

(Dalam Miliar Rupiah)

Uraian / Description	2018	2017	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi / Net Cash Provided by Operating Activities	320,8	351,1	(30,3)	(8,6)%
Kas Bersih (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi / Net Cash (Used in) Investing Activities	(960,3)	(1.657,1)	696,8	(42,1)%
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan / Net Cash Provided by Financing Activities	137,9	2.211,5	(2.073,6)	(93,8)%

Operating Profit

The Company's operating profit increased by Rp271.4 billion or 69.8% to Rp660.3 billion in 2018 compared to the end of 2017 of Rp388.9 billion. This increase was the success of the Company in reducing Operating Expenses which increased only by 46% YoY from Rp57.0 billion to Rp83.0 billion. The increase in operating profit was also accompanied by an increase in operating profit margin, which was originally recorded at 21.4% in 2017 to 21.6% in 2018.

This increase in Operating Profit led to an increase in the Company's EBITDA by 58.7% YoY from Rp583.9 billion to Rp926.9 billion.

Net Profit for the Year

Net Profit of Current Year increased by Rp187.7 billion or 76.8% to Rp432.3 billion in 2018 compared to that of 2017 at Rp244.6 billion. Such increase was in line with the growth of revenue and operating profit of the Company throughout the fiscal year.

Net Profit attributable to Owners of the Company increased by 73.4% YoY from Rp188.3 billion to Rp326.4 billion.

Other Comprehensive Income

Other Comprehensive Income was recorded at Rp36.8 billion, grew by Rp34.2 billion or 1,305.1% in 2018 compared to the end of 2017 of Rp2.6 billion. This increase was mainly due to a surplus of revaluation of fixed assets of Rp33.3 billion or 1,069.1% to Rp36.4 billion.

Total Comprehensive Income for the Year

Total Comprehensive Income for the Year increased by Rp221.9 billion or 89.8% to Rp469.1 billion in 2018 compared to that of the end of 2017 at Rp247.2 billion.

Comprehensive income attributable to owners of the company (after non-controlling interests) in 2018 amounted to Rp345.8 billion, an increase of 81.4% from the previous year, which was Rp345.8 billion.

Consolidated Statements of Cash Flows in 2017-2018

(In Billion Rupiah)

Uraian / Description	2018	2017	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas / Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	(501,5)	905,5	(1.407,0)	(155,4)%
Kas dan Setara Kas yang Diperoleh dari Akuisisi Entitas Anak / Cash and Cash Equivalents from Acquisition of Subsidiary	-	16,1	(16,01)	(100,00)%
Saldo Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun / Cash and Cash Equivalents - Beginning	1.132,5	211,0	921,5	436,8%
Saldo Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun / Cash and Cash Equivalents - Ending	630,9	1.132,5	(501,5)	(44,3)%

Saldo Kas dan Setara Kas Perseroan pada akhir tahun 2018 tercatat sebesar Rp630,9 miliar, turun 44,3% atau Rp501,5 miliar, bila dibandingkan dengan Arus Kas pada tahun 2017 sebesar Rp1,1 triliun. Penurunan tersebut terutama berasal dari realisasi penggunaan dana IPO (24 November 2017) sepanjang tahun 2018.

The Company's Cash and Cash Equivalents at the end of 2018 was recorded at Rp630.9 billion, decreased by 44.3% or Rp501.5 billion compared to Cash Flow in 2017 at Rp1.1 trillion. The decline mainly came from the realization of the use of IPO funds (November 24, 2017) throughout 2018.

Arus Kas Dari (Untuk) Aktivitas Operasi (Dalam Miliar Rupiah)

Uraian / Description	2018	2017	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Penerimaan kas dari pelanggan / Cash Receipts from Customers	2.187,6	1.333,6	854,0	64,0%
Pembayaran kas kepada pemasok dan subkontraktor serta karyawan dan pihak ketiga / Payments to Suppliers and Subcontractors as well as Employees and Third Parties	(1.570,8)	(747,7)	(823,1)	110,1%
Kas yang dihasilkan dari Operasi / Cash Generated from Operations	616,8	585,8	30,9	5,3%
Pembayaran pajak-pajak / Taxes Payment	(167,2)	(147,3)	(19,9)	(13,5)%
Pembayaran bunga / Payment of Interests Expense	(128,7)	(87,4)	(41,3)	47,3%
Kas Bersih Diperoleh untuk Aktivitas Operasi / Net Cash provided by Operating Activities	320,8	351,1	(30,3)	(8,6)%

Cash Flows from (Used in) Operating Activities (In Billion Rupiah)

Arus Kas Dari (Untuk) Aktivitas Operasi tahun 2018 tercatat sebesar Rp320,8 miliar, turun Rp30,3 miliar atau 8,6% bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp351,1 miliar. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pembayaran kas kepada pemasok dan subkontraktor sebesar 129,7% atau Rp845,4 miliar sehingga menjadi Rp1,5 triliun, sebagai implikasi dari komitmen Perseroan untuk melakukan pembayaran kepada pemasok dan subkontraktor secara tepat waktu.

Cash Flows from (for) Operating Activities in 2018 amounted to Rp302.8 billion, decreased by Rp30.3 billion or 8.6% compared to that of 2017 at Rp351.1 billion. This was mainly due to increase in cash payments to suppliers and subcontractors by 129.7% or Rp845.4 billion to Rp1.5 trillion as an implication of the Company's commitment to making payments to suppliers and subcontractors in a timely manner.

Arus Kas Dari (Untuk) Aktivitas Investasi (Dalam Miliar Rupiah)

Uraian / Description	2018	2017	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Akuisisi Entitas Anak / Acquisition of a Subsidiary	-	(798,0)	798,0	(100,0)%
Perolehan Aset Tetap / Acquisition of Fixed Assets	(956,7)	(872,1)	(84,6)	9,7%
Penerimaan Penjualan Aset Tetap / Proceed from Sale of Fixed Asset	0,7	7,8	(7,1)	(91,5)%
Penerimaan Piutang Lain-lain / Receipts from Other Receivables	-	5,1	(5,1)	(100,0)%

Cash Flows from (Used in) Investing Activities (In Billion Rupiah)

Uraian / Description	2018	2017	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Pembelian Software / Software Purchase	(4,2)	-	(4,2)	100,0%
Kas Bersih Digunakan untuk Investasi / Net Cash Provided by Investing Activities	(960,3)	(1.657,1)	696,8	(42,1)%

Arus Kas Dari (Untuk) Aktivitas Investasi tahun 2018 tercatat sebesar Rp960,3 miliar, turun Rp698,8 miliar atau 42,1% bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp1,7 triliun. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya akuisisi di tahun 2018. Aktivitas investasi selama tahun 2018 terutama berupa pembelian alat berat yang dibutuhkan dalam pekerjaan konstruksi, dan pembelian piranti lunak.

Cash Flows from (Used in) Investing Activities in 2018 was recorded at Rp960.3 billion, decreased by Rp698.8 billion or 42.1% compared to that of 2017 at Rp1.7 trillion. This was due to the absence of acquisitions in 2018. Investing activities in 2018 were mainly in the form of heavy equipment purchase needed in construction work, and software purchase.

Arus Kas Dari (Untuk) Aktivitas Pendanaan

(Dalam Miliar Rupiah)

Cash Flows from (Used in) Financing Activities

(In Billion Rupiah)

Uraian / Description	2018	2017	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Penerimaan setoran modal / Paid-up Capital	-	600,0	(600,0)	(100,0)%
Penerimaan pinjaman dari Induk / Loans from Parent Entity	105,3	-	105,3	100,0%
Setoran modal dari penawaran umum perdana saham / Addition of Share Capital from Initial Public Offering	-	235,1	(235,1)	(100,0)%
Agio saham dari penawaran umum perdana saham / Paid-in Capital in Excess of Par Value from Initial Public Offering	-	775,9	(775,9)	(100,0)%
Beban emisi saham / Share Issuance costs	-	(26,3)	26,3	(100,0)%
Pembayaran dividen / Dividend payment	(72,5)	-	(72,5)	100,0%
Penerimaan utang bank / Receipt of Bank Loans	363,7	800,4	(436,7)	(54,6)%
Pembayaran utang bank / Payment of Bank Loans	(58,4)	(203,5)	145,1	(71,3)%
Penerimaan utang non-bank / Receipt of Non-Bank Loans	-	98,8	(98,8)	(100,0)%
Pembayaran utang non-bank / Payment of Non-Bank Loans	(200,2)	(69,0)	(131,2)	190,2%
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan / Net Cash Provided by Financing Activities	137,9	2.211,5	(2.073,6)	(93,8)%

Arus Kas Dari (Untuk) Aktivitas Pendanaan tahun 2018 tercatat sebesar Rp137,9 miliar, turun Rp2,1 triliun atau 93,8% bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp2,2 triliun. Hal tersebut disebabkan pada tahun 2017 Perseroan menerima tambahan setoran modal dari PTTP sebesar Rp600,0 miliar, adanya tambahan setoran modal dan agio saham terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham, masing-masing sebesar Rp235,1 miliar dan Rp775,9 miliar. Arus Kas yang diterima dari Aktivitas Pendanaan selama tahun 2018 terutama berasal dari utang bank sebesar Rp363,7 miliar.

Cash Flows from (Used in) Financing Activities in 2018 amounted to Rp137.9 billion, decreased by Rp2.1 trillion or 93.8% compared to that of 2017 at Rp2.2 trillion. This is because in 2017 the Company received additional paid-up capital from PTTP of Rp600.0 billion, additional capital and paid-in capital in excess of par value from the Initial Public Offering, each amounting to Rp235.1 billion and Rp775.9 billion. Cash Flows received from Financing Activities throughout 2018 mainly came from bank loans amounting to Rp363.7 billion.

Rasio Keuangan

Rasio Keuangan Tahun 2017 - 2018

Uraian / Description	2018	2017
Rasio Laba Bersih terhadap Jumlah Aset (%) / Return on Assets (%)	5,2%	3,7%
Rasio Laba Bersih terhadap Jumlah Ekuitas (%) / Return on Equity (%)	14,3%	9,4%
Marjin Laba Bruto (%) / Gross Profit Margin (%)	24,4%	24,5%
Marjin Laba Usaha (%) / Operating Profit Margin (%)	21,6%	21,4%
Marjin Laba Bersih (%) / Net Profit Margin (%)	10,7%	10,4%

Financial Ratio

Financial Ratio in 2017 - 2018

Uraian / Description	2018	2017
Marjin EBITDA (%) / EBITDA Margin (%)	30,4%	32,1%
Rasio EBITDA terhadap Beban Bunga (x) / EBITDA to Interest Coverage Ratio (x)	5,5	6,5
Rasio Net Debt terhadap EBITDA (x) / Net Debt to EBITDA Ratio (x)	1,5	0,8
Rasio Lancar (x) / Current Ratio (x)	1,8	1,9
Rasio Cepat (x) / Quick Ratio (x)	1,7	1,8
Rasio Kas (x) / Cash Ratio (x)	0,4	0,8
Rasio Kewajiban Berbunga terhadap Jumlah Ekuitas (x) / Debt to Total Equity Ratio (x)	0,9	0,8
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas (x) / Total Liabilities to Total Equity Ratio (x)	1,5	1,3
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset (x) / Total Liabilities to Total Assets Ratio (x)	0,5	0,5

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Rasio Likuiditas

Dalam mengukur kemampuan Perseroan untuk membayar utang usahanya, Perseroan menggunakan Rasio Likuiditas yang terdiri dari Rasio Lancar dan Rasio Cepat. Besaran Rasio Likuiditas dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya.

Pada tahun 2018, Rasio Lancar tercatat sebesar 1,8x, lebih rendah dengan tahun 2017 yang tercatat sebesar 1,9x. Penurunan tersebut dianggap masih dalam batas wajar, karena berada di bawah 2%.

Penurunan Rasio Lancar disebabkan oleh peningkatan Aset Lancar sebesar 17,2% dari Rp2,7 triliun menjadi Rp3,1 triliun yang sebagian besar berasal dari peningkatan piutang usaha sebesar 53,8% YoY dari Rp409,5 miliar menjadi Rp629,8 miliar, serta pajak dibayar dimuka sebesar 91,6% dari Rp157,2 miliar menjadi Rp301,2 miliar. Sedangkan Liabilitas Jangka Pendek meningkat 23,6% dari Rp1,4 triliun menjadi Rp1,7 triliun, yang terutama disebabkan oleh adanya peningkatan utang usaha sebesar 19,8% dari Rp950,3 miliar menjadi Rp1,1 triliun serta utang bank & leasing jangka pendek 18% dari Rp305,0 miliar menjadi Rp361,4 miliar.

Rasio Cepat sampai dengan akhir tahun 2018 tercatat sebesar 1,7x, lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang tercatat sebesar 1,8x. Hal tersebut terjadi seiring dengan adanya kenaikan Aset Lancar sebesar 17,2% menjadi Rp3,1 triliun, persediaan sebesar 35,3% menjadi Rp79,2 miliar, dan Liabilitas Jangka Pendek sebesar 23,6% menjadi Rp1,7 triliun.

Rasio Solvabilitas

Perseroan juga memakai Rasio Solvabilitas untuk mengukur besarnya jumlah Aset Perseroan yang dibiayai oleh utang. Rasio Solvabilitas yang dipakai Perseroan adalah Rasio *Debt* terhadap Ekuitas (DER) dan Rasio *Debt* terhadap Jumlah Aset (DAR).

Rasio *Debt* terhadap Ekuitas (DER) sampai dengan akhir tahun 2018 tercatat sebesar 0,9x, lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang tercatat sebesar 0,8x. Untuk rasio *net*

SOLVENCY

Liquidity Ratio

In measuring the Company's ability to repay its debts, the Company uses Liquidity Ratio consisting of Current Ratio and Quick Ratio. The Liquidity Ratio can be used to measure a company's ability in fulfilling its liabilities or paying its short-term debt.

Current Ratio in 2018 was 1.8x, lower than that of 2017 which was 1.9x. The decrease is considered to be within reasonable limits since it is below 2%.

The decrease in Current Ratio was caused by an increase in Current Assets by 17.2% from Rp2.7 trillion to Rp3.1 trillion, most of which came from increase in trade receivables by 53.8% YoY from Rp409.5 billion to Rp629.8 billion, and prepaid taxes by 91.6% from Rp157.2 billion to Rp301.2 billion. Current Liabilities increased by 23.6% from Rp1.4 trillion to Rp1.7 trillion, which was mainly due to increase in trade accounts payables by 19.8% from Rp950.3 billion to Rp1.1 trillion and short-term bank loans & leasing by 18% from Rp305.0 billion to Rp361.4 billion.

Quick Ratio as of the end of 2018 was 1.7x, lower compared to that of 2017 which was 1.8x. This occurred in line with the increase in Current Assets by 17.2% to Rp3.1 trillion, inventories by 35.3% to Rp79.2 billion, and Current Liabilities by 23.6% to Rp1.7 trillion.

Solvency Ratio

The Company also uses Solvency Ratio to measure the amount of the Company's assets financed by debts. Solvency Ratio used by the Company is Debt to Equity Ratio (DER) and Debt to Assets Ratio (DAR).

The Debt to Equity Ratio (DER) up to the end of 2018 was recorded at 0.9x, higher compared to that of 2017 which was 0.8x. For the net gearing ratio, it was recorded at 0.6x in 2018,

gearing, tercatat sebesar 0,6x di tahun 2018, lebih tinggi dari tahun 2017 yakni sebesar 0,2x. Angka tersebut masih berada di bawah batas aman yaitu 3-4x, sehingga memiliki ruang *leverage* yang terbuka lebar untuk melakukan ekspansi bisnis.

Sedangkan untuk Rasio *Debt* terhadap Jumlah Aset (DAR) tahun 2018 tercatat sebesar 0,3x, sama dengan DAR tahun 2017 yang tercatat sebesar 0,3x. Rasio DAR ini telah sesuai dengan kebijakan struktur permodalan Perseroan, yaitu 30% *Debt* dan 70% ekuitas.

Dalam rangka memperbaiki performa Rasio Solvabilitas, Manajemen berupaya untuk meningkatkan Saldo Laba melalui peningkatan kinerja operasional.

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Tingkat kolektibilitas piutang Perseroan di tahun 2018 tercatat mengalami peningkatan, dari yang semula sebesar 101,7 hari di tahun 2017 atau A/R turnover 3,6X menjadi 62,2 hari atau A/R turnover 5,9X.

Peningkatan tersebut sebagai hasil peningkatan usaha-usaha penagihan serta lebih banyaknya (hampir sebagian besar) pembayaran dilakukan dengan menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau sering disebut LC local, yang merupakan instrumen yang diterbitkan oleh bank (Issuing Bank), atas permintaan Applicant yang berisi janji bank untuk membayar sejumlah uang kepada Beneficiary apabila Issuing Bank menerima dokumen yang sesuai dengan syarat SKBDN.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Tujuan Perseroan dalam mengelola permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perseroan guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Perseroan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola struktur permodalan untuk memastikan struktur modal dan hasil pengembalian ke pemegang saham yang optimal, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan efisiensi modal Perseroan, profitabilitas masa sekarang dan yang akan datang, proyeksi arus kas operasi, proyeksi pengeluaran barang modal dan proyeksi peluang investasi yang strategis. Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perseroan menerapkan kebijakan struktur permodalan Perseroan, yaitu 30% *Debt* dan 70% ekuitas.

Struktur Modal

Perusahaan memonitor permodalan berdasarkan *Net Gearing Ratio*, yang dihitung dengan membagi *net debt* dengan jumlah modal. *Net debt* dihitung dari jumlah *debt* (termasuk *debt* jangka pendek dan jangka panjang) dikurangi kas dan setara

higher than that of 2017 which was 0.2x. This figure is still below the safe limit of 3-4x, hence it has a wide open leverage space for business expansion.

Debt to Asset Ratio (DAR) in 2018 was 0.3x, the same as DAR in 2017. The DAR has been in accordance with capital structure policy, namely 30% debt and 70% equity.

To improve the performance of the Solvency Ratio, the Management strives to increase the Retained Earnings by improving operational performance.

RECEIVABLES COLLECTABILITY RATE

The Company's collectability rate in 2018 has increased, from 101.7 days in 2017 or the A/R turnover of 3.6X to 62.2 days or A/R turnover 5.9X.

The increase was the result of an increase in collection efforts and more (almost) payments were made using a Domestic Document Credit Letter (SKBDN) or often called local LC, which is an instrument issued by a bank (Issuing Bank), at the request of Applicant which contains the bank's promise to pay a sum of money to the Beneficiary if the Issuing Bank receives documents in accordance with the SKBDN requirements.

CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

Management Policy on Capital Structure

The Company's objective in managing structure is to maintain business continuity to provide return to shareholders and benefits to other stakeholders as well as maintain optimal capital structure to minimize capital expenses.

The Company actively and routinely reviews and manages the capital structure to ensure optimal capital structure and returns to shareholders by taking into account the future capital requirements and efficiency of the Company's capital, current and future profitability, operating cash flow projections, projected expenditure capital and strategic investment opportunity projections. To maintain or adjust the capital structure, the Company determined capital structure policy, namely 30% debt and 70% equity.

Capital Structure

The Company monitors capital based on the Net Gearing Ratio, which is calculated by dividing the net debt by the amount of capital. Net debt is calculated from the amount of debt (including short-term and long-term debt) minus cash and cash

kas. Jumlah modal mengacu kepada ekuitas yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk.

Net Gearing Ratio Perseroan per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

(dalam Miliar Rupiah)

Uraian / Description	2018	2017
Jumlah <i>Debt</i> / Total Debt	2.030,4	1.574,9
Kas dan setara kas / Cash and cash equivalents	(630,9)	(1.132,4)
Net Debt	1.840,4	442,4
Ekuitas yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk / Equity Attributable to Owners of Company	2.282,3	1.993,0
Net Gearing Ratio (x)	0,6	0,2

Manajemen Perseroan beranggapan bahwa *Net Gearing Ratio* sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2018 tersebut sudah sesuai dengan kebijakan manajemen atas struktur modal.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Sepanjang tahun 2018, Perseroan tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal.

Investasi Barang Modal

Sepanjang tahun 2018, Perseroan memiliki total investasi barang modal sebesar Rp960,9 miliar, yang terdiri dari alat berat dan pembelian *software*. Investasi barang modal tersebut ditujukan untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan.

Investasi Barang Modal Tahun 2018

(dalam miliar Rupiah)

Jenis Barang Modal / Type of Capital Goods	Nilai / Value
Alat Berat / Heavy Equipment	956,7
Pembelian <i>Software</i> / Software Purchase	4,2
Jumlah / Total	960,9

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Sepanjang tahun 2018, tidak terdapat informasi fakta material yang terjadi setelah tanggal pelaporan.

PROSPEK USAHA

Pemerintah Indonesia memproyeksikan kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2019 akan mengalami pertumbuhan mencapai 5,3%, seperti yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut juga didorong oleh adanya proyeksi pertumbuhan dari sisi inflasi mencapai 3,5% yoy, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS mencapai level 15.000, tingkat Suku Bunga SPN 3 bulan sebesar 5,3%, harga minyak dunia sebesar USD70/barel, *lifting* minyak dan gas masing-masing sebesar 775 ribu barel per hari dan 1.250 ribu barel per hari,

equivalents. Amount of capital refers to equity attributable to Owners of Company.

The Company's *Net Gearing Ratio* as of December 31, 2018 and December 31, 2018 are as follows:

(in billion Rupiah)

Uraian / Description	2018	2017
Jumlah <i>Debt</i> / Total Debt	2.030,4	1.574,9
Kas dan setara kas / Cash and cash equivalents	(630,9)	(1.132,4)
Net Debt	1.840,4	442,4
Ekuitas yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk / Equity Attributable to Owners of Company	2.282,3	1.993,0
Net Gearing Ratio (x)	0,6	0,2

The Company's management believes that the *Net Gearing Ratio* up to December 31, 2017 and 2018 is in accordance with management policies on the capital structure.

MATERIAL COMMITMENT FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT

Throughout 2018, the Company did not have material commitment for capital goods investment.

Capital Goods Investment

In 2018, the Company has a total of Rp960.9 billion of capital goods investment, consisting of heavy equipment and software purchase. The capital goods investment is aimed to support operational activities of the Company.

Capital Goods Investment in 2018

(in billion Rupiah)

Jenis Barang Modal / Type of Capital Goods	Nilai / Value
Alat Berat / Heavy Equipment	956,7
Pembelian <i>Software</i> / Software Purchase	4,2
Jumlah / Total	960,9

MATERIAL FACT AND INFORMATION SUBSEQUENT TO ACCOUNTANT REPORTING DATE

In 2018, there was/was no material information and fact subsequent to reporting ddate.

BUSINESS OUTLOOK

The Indonesian government projected that Indonesia's economic conditions in 2019 will grow by 5.3%, as stated in the 2019 State Budget (APBN). The projected economic growth is also driven by projections of inflation growth reaching 3.5 % yoy, the exchange rate of the Rupiah against the US Dollar that reached 15,000, the 3-month SPN interest rate of 5.3%, world oil prices of USD70/barrel, oil and gas lifting at 775 thousand barrels per day and 1,250 thousand barrels per day, and cost recovery of USD10.22 billion.

serta *cost recovery* sebesar USD10,22 miliar.

Melihat kondisi ekonomi nasional yang diperkirakan akan membaik, Perseroan optimis bahwa kegiatan usaha yang dijalankan masih memiliki prospek yang cerah. Pandangan tersebut diperkuat oleh adanya komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia, yang tercermin pada anggaran pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur sebesar Rp421 triliun, yang tetap menunjukkan peningkatan dibandingkan estimasi pengeluaran infrastruktur tahun 2018 sebesar Rp410 triliun.

Komitmen pemerintah tersebut dapat membawa dampak positif bagi pertumbuhan industri konstruksi di tahun depan. Kondisi ini dapat dijadikan sebagai peluang bisnis baru yang dapat dioptimalisasi oleh Perseroan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan bisnis yang positif dan berkelanjutan.

ANALISIS PENCAPAIAN TARGET DENGAN REALISASI TAHUN 2018, DAN PROYEKSI TAHUN 2019

Setiap tahunnya, Perseroan selalu menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan menjadikannya sebagai acuan pokok Perseroan dalam menjalankan aktivitas usahanya. Dalam merumuskan RKAP, Perseroan menggunakan berbagai asumsi kondisi eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi aktivitas Perseroan yang dianalisis secara komprehensif guna menghasilkan target bisnis yang tepat.

Berikut ini merupakan perbandingan antara target dengan realisasi kinerja Perseroan di tahun 2018, serta proyeksi kinerja untuk tahun 2019:

Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2018 serta Proyeksi Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)

Uraian / Description	Target 2018 / 2018 Target	Realisasi Tahun 2018 / 2018 Realization	Pencapaian (%) / Achievement (%)	Proyeksi 2019 / 2019 Projection	Peningkatan (%) / 2019 Increase (%)
Nilai Kontrak Baru (dalam Triliun Rupiah) / New Contract Value	5,0	5,2	104,0%	5,8	10,6%
Pendapatan Bersih / Net Revenue	4.417,6	3.051,6	69,1%	4.242,4	39,0%
Laba Usaha / Operating Profit	688,2	660,3	95,9%	844,8	27,9%
Laba Bersih Tahun Berjalan yang Diatribusikan kepada: / Net Profit for the Year Attributable to:					
- Pemilik Entitas Induk / Owners of the Company	318,6	326,4	102,4%	424,8	30,1%
- Kepentingan Non-Pengendali / Non-Controlling Interest	111,5	105,9	95,0%	135,2	27,7%
EBITDA	936,6	926,9	99,0%	1.219,3	31,5%
Aset / Assets	6.131,4	6.256,0	102,0%	7.633,4	22,0%
Liabilitas / Liabilities	3.259,3	3.419,2	104,9%	4.406,0	28,9%
Ekuitas / Equity	2.872,2	2.836,8	98,8%	3.227,4	13,8%

Given the national economic conditions that are expected to improve, the Company is optimistic that the business activities still have bright prospects. This view is reinforced by the government's commitment to accelerating infrastructure development in Indonesia, which is reflected in government spending budget in infrastructure amounting to Rp421 trillion which shows an increase compared to estimation of infrastructure spending in 2018 at Rp410 trillion.

The government's commitment may have a positive impact on the growth of construction industry in the next year. This condition can be used as a new business opportunity that can be optimized by the Company to realize positive and sustainable business growth.

ANALYSIS ON ACHIEVEMENT OF TARGET WITH REALIZATION IN 2018 AND PROJECTION FOR 2019

Every year, the Company always prepares a Company Work Plan and Budget (RKAP) and determines it as the Company's main reference in carrying out its business activities. In formulating the RKAP, the Company uses various assumptions on external and internal conditions that can affect the Company's activities which are analyzed comprehensively in order to produce the accurate business targets.

The following is a comparison between targets and realization of the Company's performance in 2018, as well as performance projections for 2019:

Comparison between Targets and Realization in 2018, as well as Projections for 2019: (in billion Rupiah)

ASPEK PEMASARAN

Strategi Pemasaran

Dalam menyikapi kondisi industri konstruksi yang semakin dinamis, Perseroan selalu melakukan upaya riset pasar guna mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan terbaru. Hasil riset tersebut kemudian dituangkan dalam strategi pemasaran, yang meliputi:

- Memperkuat sinergi dengan entitas induk, yaitu PT PP (Persero) Tbk melalui pengerjaan kontrak-kontrak PTPP.
- Menggarap terbukanya *captive market* pembangunan gedung dan infrastruktur dari perusahaan *holding* maupun anggota dari *holding* BUMN Perumahan dan Kawasan.
- Mendorong entitas anak, yaitu PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA) untuk mengembangkan lini bisnis jasa pertambangan sebagai diversifikasi usaha yang masih berbasis alat berat.

Pangsa Pasar

Secara konsolidasi, Perseroan selalu berupaya untuk menjaga proporsi pangsa pasar antara BUMN & Non-BUMN. Namun, pangsa pasar PP Presisi lebih difokuskan pada perusahaan BUMN & Entitas Anak BUMN, baik dari group PTPP maupun di luar group PTPP. Pemilihan pangsa pasar tersebut disebabkan karena *track record* PP Presisi yang telah diakui sebagai salah satu Anak Perusahaan PT PP (Persero) Tbk. Di samping itu, PP Presisi juga mendukung program Sinergi BUMN.

Sedangkan untuk pangsa pasar Anak Perusahaan PP Presisi, yaitu LMA adalah perusahaan-perusahaan swasta. Alasannya dipengaruhi oleh status LMA yang merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang konstruksi jalan, pematangan tanah, pengadaan tanah, serta rental alat-alat berat, sehingga diprediksi akan mampu melakukan pendekatan kepada perusahaan-perusahaan swasta dan telah memiliki *track record* yang diakui oleh perusahaan swasta maupun BUMN.

Meskipun masing-masing perusahaan telah memiliki fokus pangsa pasar yang telah digelutinya, namun baik PP Presisi ataupun LMA tidak menutup kemungkinan untuk menasar target pasar lainnya.

Pada tahun 2018, perolehan kontrak baru Perseroan mayoritas berasal dari sektor swasta, atau tepatnya sebesar 60,1% yang sebagian besar merupakan 3 (tiga) kontrak jasa pertambangan senilai Rp2,2 triliun dan beberapa kontrak pekerjaan konstruksi.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Kebijakan Dividen Tahun 2018 untuk Tahun Buku 2017

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT PP Presisi Tbk yang diselenggarakan pada tanggal 5 April 2018 yang dinyatakan dalam Akta No. 30/RP-Not/IV/2018 tanggal 5 April 2018 oleh Notaris Rita Permanasari, SH di Jakarta, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp56,4 miliar atau sejumlah Rp5,52 per saham, yang mencerminkan kurang lebih 30% dari laba bersih yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar Rp188,3 miliar.

MARKETING ASPECT

Marketing Strategy

In addressing the increasingly dynamic conditions of the construction industry, the Company always conducts market research to identify the latest customer needs and desires. The results of the research are then contained in the marketing strategy, which includes:

- Strengthening synergies with the parent entity, namely PT PP (Persero) Tbk through the execution of PTPP contracts.
- Working on opening the captive market for building and infrastructure development from holding companies and members of the Housing and Regional BUMN Holding.
- Encouraging subsidiaries, namely PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA) to develop the mining services business line as a business diversification that is still based on heavy equipment.

Market Share

On a consolidated basis, the Company always strives to maintain the proportion of market share between BUMN & Non-BUMN. However, PP Presisi's market share is more focused on SOEs & Subsidiaries of SOEs, both from the PTPP group and outside the PTPP group. The choice of market share is due to the PP Presisi's track record that has been recognized as one of the PT PP (Persero) Tbk subsidiary. In addition, PP Presisi also supports the Sinergi BUMN program.

Whereas for the market share of PP Presisi Subsidiaries, namely LMA, are private companies. The reason is influenced by the status of LMA which is a private company engaged in road construction, land maturation, land acquisition, and heavy equipment rental, so it is predicted that it will be able to approach private companies. and has been recognized by both private and state-owned companies.

Even though each company has a focus on the market share it has engaged in, neither PP Presisi nor LMA does not rule out the possibility of targeting the target market of other companies.

In 2018, the acquisition of the Company's new contracts came mostly from the private sector, or to be exact at 60.1% of which most of it was 3 mining service contracts worth Rp2.2 trillion, and several construction work contracts.

DIVIDEND POLICY

2018 Dividend Policy for 2017 Fiscal Year

Pursuant to Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) of PT PP Presisi Tbk held on April 5, 2018, stated in Deed No. 30/RP-Not/IV/2018 dated April 5, 2018, by Notary Rita Permanasari, SH in Jakarta, shareholders approved cash dividend distribution amounting to Rp56.4 billion or Rp5.52 per shares which reflects approximately 30% of net profit attributable to Owners of the Company by Rp188.3 billion.

Kebijakan Dividen Tahun 2017 untuk Tahun Buku 2016

Pada tahun buku 2016, PP Presisi belum melakukan kegiatan terkait pembagian dividen. Hal tersebut disebabkan karena Perseroan baru mencatatkan saham perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017, tepatnya pada tanggal 24 November 2017.

2017 Dividend Policy for 2016 Fiscal Year

In 2016, PP Presisi had not yet performed activities related to dividend distribution. This was due to the Company only conducted Initial Public Offering (IPO) at Indonesia Stock Exchange in 2017, specifically on November 24, 2017.

Dividen Tahun 2017- 2018

Uraian Pembagian Dividen / Description on Dividend Distribution	Tahun Buku / Fiscal Year	
	2018	2017
Jumlah Dividen (Rp/Lembar) / Total Dividend (Rp/Share)	5,52	-
Jumlah Saham (lembar) / Number of Shares (share)	10.224.271.000	-
Dividen Dibagikan (Rupiah penuh) / Distributed Dividend (Full amount of Rupiah)	56.437.975.920	-
Tanggal Pembayaran / Payment Date	09 Mei 2018 / May 9, 2018	-

Dividend in 2017-2018

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN YANG DILAKSANAKAN PERUSAHAAN (ESOP/MSOP)

Sampai dengan akhir tahun 2018, Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP). Oleh karena itu, Perseroan tidak memiliki informasi mengenai jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak dan harga exercise.

EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT STOCK OPTION PROGRAM (ESOP/MSOP)

As of the end of 2018, there was no employee and/or management stock option program (ESOP/MSOP) carried out by the Company. Therefore, the Company has no information on number of ESOP/MSOP shares and its realization, period, requirements for employee and/management to have the right and exercise price.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Perseroan memperoleh dana bersih hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang diselenggarakan pada tanggal 24 November 2017 sebesar Rp984,7 miliar. Hingga akhir tahun 2018, Perseroan telah menggunakan dana hasil penawaran umum tersebut untuk alokasi belanja modal sebesar Rp225,9 miliar atau 22,9% dari total dana dan modal kerja sebesar Rp295,4 miliar atau 30,0% dari total dana. Perseroan masih menyisakan dana sebesar Rp463,4 miliar yang kemudian disimpan dalam bentuk Giro, Deposito, dan rekening dana IPO.

REALIZATION OF THE USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

The Company's Proceeds from Initial Public Offering held on November 24, 2017, amounted to Rp984.7 billion. Until the end of 2018, the Company has used proceeds from public offer for capital expense allocation which was at Rp225.9 billion or 22.9% of total funds and working capital which was at Rp295.4 billion or 30.0% from total funds. The Company set aside Rp463.4 billion that subsequently saved in the form of Current Account, Time Deposits, and IPO balance fund.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Per 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah Penuh)

Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum / Realization Value of Proceeds from Public Offering			Realisasi Penggunaan Dana / Realization of the Use of Proceeds			Sisa Dana Hasil Penawaran Umum / Remaining Proceeds from Public Offering
Jumlah Hasil Penawaran Umum / Total Proceeds from Public Offering	Biaya Penawaran Umum / Cost of Public Offering	Hasil Realisasi Bersih / Net Proceeds Realization	Belanja Modal / Capital Expenses	Modal Kerja / Working Capital	Total Realisasi Penggunaan Dana / Total Realization of the Use of Proceeds	
1.011.025.030.000	26.342.768.461	984.682.261.539	225.902.440.794	295.404.678.461	521.307.119.255	463.375.142.283

Realization of the Use of Proceeds from Public Offering as of December 31, 2018

(In Full Amount)

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI DAN RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Investasi

Sepanjang tahun 2018, Perseroan melakukan investasi berupa pembelian alat berat sebesar Rp956,7 miliar.

Ekspansi

Sepanjang tahun 2018, Perseroan melakukan ekspansi berupa pembentukan lini bisnis *erector* dan pengembangan *coal hauling* menjadi *integrated mining services*.

Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/Modal

Sepanjang tahun 2018, Perseroan tidak melakukan Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/Modal.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI DAN MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Sepanjang tahun 2018, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi dan/atau mengandung benturan kepentingan.

a) Nama Pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi

MATERIAL INFORMATION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, BUSINESS MERGER/CONSOLIDATION, ACQUISITION AND CAPITAL/DEBT RESTRUCTURING

Investment

Throughout 2018, the Company invested in the purchase of heavy equipment amounting to Rp956.7 billion.

Expansion

Throughout 2018, the Company expanded in the form of erector business lines and hauling coal development into integrated mining services.

Divestment, Business Merger/Consolidation, Acquisition, and Debt/Capital Restructuring

Throughout 2018, the Company did not carry out Divestment, Business Merger/Consolidation, Acquisition, and Debt/Capital Restructuring.

MATERIAL INFORMATION ON AFFILIATED TRANSACTION AND TRANSACTION CONTAINING CONFLICT OF INTEREST

In 2018, there was/was no transaction with affiliated parties and/or containing conflict of interest.

a) Name of the Party conducted transaction and nature of affiliation

Pihak Berelasi / Related Party	Sifat dari Hubungan / Nature of Relationship	Sifat dari Transaksi / Nature of Transaction
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Pemegang saham pengendali langsung Perseroan, pemberi kerja / Direct controlling shareholder, project owner	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran dividen dan pinjaman / Loan and dividend payment • Pendapatan Usaha / Revenue • Piutang Usaha / Trade Accounts Receivables • Piutang Retensi / Retention Receivables • Tagihan Bruto / Gross Invoice • Uang Muka Pemberi Kerja / Advances from Project Owners
PT Pembangunan Perumahan Properti Tbk	Entitas sepengendali / Controlling Entity	<ul style="list-style-type: none"> • Piutang Usaha / Trade Accounts Receivables • Piutang Retensi / Retention Receivables • Tagihan Bruto Pemberi Kerja / Gross Receivables from Project Owners • Uang Muka Pemberi Kerja / Advances from Project Owners • Pendapatan Usaha / Advances from Project Owners • Revenue
PT Pembangunan Perumahan Urban	Entitas sepengendali / Controlling Entity	<ul style="list-style-type: none"> • Piutang Usaha / Trade Accounts Receivables • Piutang Retensi / Retention Receivables • Tagihan Bruto / Gross Invoice • Pendapatan Usaha / Revenue
PT Pembangunan Perumahan Infrastruktur	Entitas sepengendali / Controlling Entity	<ul style="list-style-type: none"> • Piutang Usaha / Trade Account Receivables • Revenue • Pendapatan Usaha / Controlling Entity
PT Pembangunan Perumahan Energy	Entitas sepengendali / Controlling Entity	<ul style="list-style-type: none"> • Piutang Usaha / Trade Accounts Receivables • Revenue • Pendapatan Usaha / Controlling Entity
Dewan Komisaris dan Direksi	Personil manajemen kunci / Key management personnel	<ul style="list-style-type: none"> • Kompensasi dan remunerasi / Compensation and Remuneration

- | | |
|--|--|
| <p>b) Penjelasan mengenai kewajaran transaksi
Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan secara transparan dan mengacu kepada arm length transaction principle.</p> <p>c) Alasan dilakukannya transaksi
Transaksi dengan pihak berelasi terjadi karena peran strategis PP Presisi sebagai sub-kontraktor yang mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang didukung oleh kepemilikan alat berat yang sangat dibutuhkan.</p> <p>d) Realisasi transaksi pada periode tahun buku 2018</p> | <p>b) Explanation on fairness of transaction
Transaction with related parties is conducted transparently and refers to arm length transaction principle.</p> <p>c) Reason for transaction
Transactions with related parties occur because of the strategic role of PP Presisi as a sub-contractor capable of carrying out construction works supported by the ownership of heavy equipment that is urgently needed.</p> <p>d) Realization of transaction during 2018 fiscal year</p> |
|--|--|

Uraian / Description	2018		2017	
	Jumlah / Total	%	Jumlah / Total	%
Aset / Assets				
Piutang Usaha / Trade Receivables	364,1	5,8%	133,5	2,6%
Piutang Retensi / Retention Receivables	116,8	1,9%	19,3	0,4%
Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja / Gross Receivables From Project Owner	661,1	10,6%	578,5	11,3%
Piutang Lain-lain / Other Receivables	0,05	0,001%	60,4	0,001%
Liabilitas / Liabilities				
Utang lain-lain / Other Payables	106,0	3,1%	6.043,4	0,2%
Uang Muka Pemberi Kerja - Berelasi / Advances From Project Owners - Related	8,8	0,3%	34,4	1,3%
Remunerasi / Remuneration	6,3	0,2%	5,2	1,2%
Pendapatan Usaha / Revenue	1.603,6	52,6%	939,2	51,7%

- | | |
|---|--|
| <p>e) Kebijakan Perseroan terkait dengan mekanisme <i>review</i> atas transaksi
Transaksi dengan pihak berelasi ini dilakukan secara transparan, tidak terjadi <i>conflict of interest</i>, menjunjung prinsip-prinsip GCG, serta berlandaskan pada penciptaan nilai (<i>creating value</i>).</p> | <p>e) Policy of the Company regarding review mechanism on transaction
Transactions with related parties are carried out transparently, without conflict of interest, upholding the principles of GCG, and based on creating value.</p> |
|---|--|

PERUBAHAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN

Sepanjang tahun 2018, tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap aktivitas bisnis Perseroan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Amandemen/ penyesuaian dan interpretasi standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Dalam tahun berjalan, Grup telah menerapkan, sejumlah amandemen dan interpretasi PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018.

Penerapan amandemen dan interpretasi PSAK berikut tidak menimbulkan dampak material terhadap pengungkapan atau jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan dan sebelumnya tetapi dapat mempengaruhi transaksi di masa depan.

CHANGES IN LAWS WITH SIGNIFICANT IMPACT

There were no changes in the laws and regulations with significant impact on the Company's business in 2018.

CHANGES IN ACCOUNTING POLICY

a. Amendments/improvements and interpretations to standards effective in the current year

In the current year, the Group has applied a number of amendments and interpretations to PSAK that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on or after January 1, 2018.

The application of the following amendments and interpretation to PSAK have not resulted to material impact to disclosures or amounts recognized in the current and prior year consolidated financial statements but may affect future transactions.

- PSAK 2 (amandemen), Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan;
- PSAK 13 (amandemen), Properti Investasi tentang Pengalihan Properti Investasi;
- PSAK 15 (penyesuaian), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 16 (amandemen), Aset Tetap – Agrrikultur: Tanaman Produktif;
- PSAK 46 (amandemen), Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi;
- PSAK 67 (penyesuaian), Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain.

b. Standar dan amandemen standar telah diterbitkan tapi belum diterapkan

Interpretasi standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- ISAK 34 Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan;
- PSAK 22 (penyesuaian), Kombinasi Bisnis;
- PSAK 26 (penyesuaian), Biaya Pinjaman;
- PSAK 46 (penyesuaian), Pajak Penghasilan;
- PSAK 66 (penyesuaian), Pengaturan Bersama;
- Amandemen PSAK 24, Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program.

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 15 (amandemen), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 62 (amandemen), Kontrak AsuransiMenerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi;
- PSAK 71, Instrumen Keuangan;
- PSAK 71 (amandemen), Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif;
- PSAK 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 73, Sewa.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, dampak dari standar dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

- PSAK 2 (amendment), Statement of Cash Flows about Disclosure Initiative;
- PSAK 13 (amendment), Transfers to Investment Property
- PSAK 15 (improvement), Investments in Associates and Joint Ventures;
- PSAK16 (Amendment): Property, Plant and Equipment – Agriculture: Bearer Plants;
- PSAK46 (amendment), Income Tax: Recognition on Deferred Tax Assets for Unrealized Losses;
- PSAK67 (improvement), Disclosures of Interest in Other Entities;

b. Standards and amendments to standards issued not yet adopted

Interpretations to standard effective for periods beginning on or after January 1, 2019,with early application permitted are:

- ISAK 34: Uncertainty Over Income Tax Treatments
- PSAK 22 (improvement), Business Combination
- PSAK 26 (improvement), Borrowing Cost
- PSAK 46 (improvement), Income Tax
- PSAK 66 (improvement), Joint Arrangement
- PSAK 24 (amendment), Plan Amendment, Curtailment or Settlement

Standard and amendment to standard effective for periods beginning on or after January 1, 2020, with early application permitted are:

- PSAK 15 (amendment), Investments in Associates and Joint Ventures: Long Term Interest in Associate and Joint Ventures;
- PSAK 62 (amendment), Insurance Contract: Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contracts;
- PSAK 71, Financial Instruments;
- PSAK 71 (amendment), Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation;
- PSAK 72, Revenue from Contracts with Customers;
- PSAK 73, Leases

As of the issuance date of the consolidated financial statements, the effects of adopting these standards, amendments and interpretation on the consolidated financial statements is not known nor reasonably estimable by management.

KELANGSUNGAN USAHA

Pada tahun 2018, Perseroan tidak memiliki hal-hal yang berpotensi memiliki pengaruh signifikan terhadap kelangsungan Usaha Perseroan. Hal ini didasari oleh adanya kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur yang masih akan menjadi prioritas kebijakan Pemerintah Indonesia di masa depan, dalam rangka mengejar ketertinggalan ketersediaan infrastruktur di Indonesia.

BUSINESS CONTINUITY

In 2018, the Company did not have matters that have the potential to have a significant influence on the Company's business continuity. This is based on the policy of accelerating infrastructure development which will still be a policy priority of the Indonesian Government in the future, in order to catch up with the availability of infrastructure in Indonesia.



Pada tahun 2018, PP Presisi berupaya untuk meningkatkan kualitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan melalui perbaikan *infrastruktur* dan *soft-structure* GCG.

PP Presisi strives to improve the quality of Good Corporate Governance (GCG) in the Company through enhancement of GCG soft-structure and infrastructure.





Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance





Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sebuah sistem sekaligus struktur untuk meyakinkan *stakeholders* bahwa perusahaan dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip GCG yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kepentingan para *stakeholders*. Konsep GCG juga mampu membantu Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya agar sesuai dengan tujuan, visi dan misi perusahaan serta selalu berada pada mekanisme yang benar dan adil.

PP Presisi memandang bahwa implementasi GCG sangat penting bagi keberlangsungan dan kelancaran jalannya kegiatan bisnis di tengah perkembangan industri yang semakin kompetitif. Oleh sebab itu, Perseroan berkomitmen untuk menerapkan GCG yang mengacu pada *best-practice* secara konsisten dan menyeluruh di setiap aktivitas pengelolaan bisnis.

Bentuk komitmen tersebut direalisasikan dalam bentuk penandatanganan Pedoman Kode Etik Perusahaan (*Code of Conduct*) yang dilakukan pertama kali pada tanggal 14 Agustus 2017 oleh Dewan Komisaris dan Direksi PP Presisi. Kode etik tersebut berisikan pedoman etika usaha dan kerja yang dijadikan sebagai acuan bagi seluruh Insan PP Presisi agar senantiasa menerapkan Budaya dan Nilai-Nilai Perusahaan di setiap pelaksanaan kinerjanya. Dengan kredibilitas yang dimiliki, PP Presisi optimis mampu meningkatkan kepercayaan para *shareholders* dan *stakeholders*.

TUJUAN IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan sistem GCG diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) melalui beberapa tujuan berikut:

Good Corporate Governance (GCG) is a system and a structure to reassure stakeholders that the company is managed according to applicable laws and regulations as well as GCG principles by taking into account the interests of stakeholders. GCG concept is also able to assist the Company in running its business to be in accordance with goals, vision, and mission of the Company as well as always in correct and fair mechanism.

PP Presisi considers that GCG implementation is significant for continuity of business activities amid the increasingly competitive industry development. Therefore, the Company is committed to implement GCG by referring to best practices in a consistent and comprehensive manner in every activity of business management.

Such commitment is realized through signing of Code of Conduct on August 14, 2017 by the Board of Commissioners and Board of Directors of PP Presisi. The Code of Conduct contains guidelines on business and work ethics that serves as a reference for all PP Presisi personnel in order to always implement Corporate Culture and Values in their performances. Through its credibility, PP Presisi is optimistic to be able to increase the trust of shareholders and stakeholders.

OBJECTIVES OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Implementation of GCG system is expected to enhance added value for all stakeholders through the following objectives:

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencapai pertumbuhan dan imbal hasil yang maksimal sehingga meningkatkan nilai (<i>value</i>) Perusahaan, serta mewujudkan kesinambungan Perseroan dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan Pemangku Kepentingan lainnya; 2. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan yang baik antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Pemangku Kepentingan Perseroan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Mendukung aktivitas pengendalian internal dan pengembangan Perseroan bagi tercapainya daya saing secara nasional maupun internasional sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan; 4. Mengelola sumber daya secara lebih amanah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian; 5. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada Pemangku Kepentingan; 6. Memperbaiki budaya kerja Perseroan; dan 7. Menjadikan Perseroan bernilai tambah yaitu meningkatkan kesejahteraan seluruh insan Perseroan berikut peningkatan kemanfaatan bagi Pemangku Kepentingan Perseroan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. To achieve optimum growth and yield resulting in increasing the Company's value and realizing the Company's continuity in the long term without disregarding interests of other Stakeholders; 2. To control and develop good relationship between Shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors, and all Stakeholders of the Company based on prevailing laws and regulations; 3. To support activities of internal control and the Company's development for creating competitiveness in national and international market to improve market trust encouraging continuous investment flow and national economic growth; 4. To manage resources with trustworthiness by implementing principles of prudence; 5. To increase accountability to Stakeholders; 6. To improve the Company's work culture; and 7. To generate added value to the Company, namely improving welfare of the Company's personnel and benefits for Stakeholders of the Company. |
|--|--|

PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Agar pengelolaan perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien, Perseroan berkomitmen penuh dalam menerapkan 5 (lima) prinsip GCG, yang meliputi:

GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES

In order to have an effective and efficient management, the Company is fully committed in implement 5 (five) principles of GCG, namely:

Prinsip GCG / GCG Principle	Definisi Prinsip GCG / Definition of GCG Principle	Bentuk Implementasi di Lingkungan PP Presisi / Implementation in PP Presisi
Transparansi / Transparency	Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang relevan mengenai Perusahaan. / Openness in carrying out process of decision making and openness in disclosing relevant information on the Company.	<ul style="list-style-type: none"> Proses pengambilan keputusan Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah memenuhi persyaratan Anggaran Dasar Perusahaan. / Decision making process of Shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS) has fulfilled requirements of the Company's Articles of Association. Proses pengambilan keputusan Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi telah dilaksanakan pada rapat Dewan Komisaris Internal dan rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi (Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris). / Decision making process of the Board of Commissioners with supervisory and advisory functions to the Board of Directors has been carried out in the Internal Board of Commissioners meeting and joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors. Proses pengambilan keputusan Direksi yang berfungsi untuk melakukan pengelolaan perusahaan telah dilaksanakan melalui mekanisme rapat Direksi, dan rapat Direksi yang mengundang Dewan Komisaris (Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris). / Decision making of the Board of Directors with the function of managing the company has been conducted through the Board of Directors meeting, and joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors. Perseroan telah memiliki prosedur standar untuk menetapkan visi, misi, strategi, kebijakan, dan sasaran yang telah diturunkan sampai dengan unit kerja terkecil serta dikelola menggunakan aplikasi software yang baik. / The Company has prepared standard procedures to determine vision, mission, strategy, policy, and target, which have been disseminated to all levels, including the smallest work unit, and managed using the appropriate software and applications. Laporan Keuangan diunggah di situs web Perseroan. / Financial Statements is uploaded in the Company's website. Seluruh kebijakan Perseroan telah dituangkan secara tertulis dan dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui saluran komunikasi yang telah disediakan Perseroan. / Policies of the Company has been stipulated in writing and communicated to all stakeholders through communication channel provided by the Company.

Prinsip GCG / GCG Principle	Definisi Prinsip GCG / Definition of GCG Principle	Bentuk Implementasi di Lingkungan PP Presisi / Implementation in PP Presisi
Akuntabilitas / Accountability	Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. / Clarity in function, implementation and responsibility of organization in order to have an effective management in the Company.	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan telah memiliki Struktur Organisasi, <i>Job Description</i> untuk masing-masing <i>Job Title</i> dan penilaian <i>Key Performance Indicator</i> untuk Direksi, Kepala Unit kerja dan masing-masing karyawan. / The Company has Organization Structure, Job Description for each Job Title and assessment using Key Performance Indicator for the Board of Directors, Head of Work Units, and employees. • Perseroan memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh RUPS/Dewan Komisaris dan telah dijelaskan secara rinci kepada seluruh Unit kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas setiap tahunnya. / The Company has Annual Work Plan and Budget that has been ratified by the GMS/Board of Commissioners and the breakdown has been given to all Work Units as reference in annual implementation of their duties. • Manajemen telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dan mempertanggungjawabkan kegiatannya secara transparan setiap triwulanan. / The Management has carried out their duties and responsibilities, and their activities has been accounted for in a transparent manner at every quarter. • Auditor eksternal telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan dengan opini auditor independen adalah wajar dalam semua hal yang material. / External independent auditor has audited Financial Statements of the Company with opinion of fair in all material respects. • Perseroan telah mempertanggungjawabkan dan mendapat pengesahan atas Laporan Tahunan oleh RUPS. / The Company has taken responsibility for and obtained ratification for the Annual Report by the GMS. • Perseroan telah memberikan penghargaan dan sanksi (<i>Reward and Punishment</i>) kepada karyawan yang berprestasi dan yang melakukan pelanggaran. / The Company has granted Reward and Punishment to employees with achievement and those committing violations.
Tanggung Jawab / Responsibility	Kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. / Conformity with prevailing laws and regulations as well as principles of sound corporate governance in managing the Company.	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan memiliki Anggaran Dasar, infrastruktur GCG, dan kebijakan pengelolaan <i>Corporate Sosial Responsibility (CSR)</i>. / The Company has Articles of Association, GCG infrastructures, and policies on management of Corporate Social Responsibility (CSR). • Manajemen dan seluruh karyawan selalu bersikap <i>prudent</i> sesuai dengan kebijakan manajemen risiko dan memastikan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan. / The Management and all employees are always prudent in accordance with risk management policies and ensures that implementation of their duties is in accordance with regulations. • Perseroan setiap tahun telah dilakukan audit kepatuhan oleh Auditor Eksternal dan tidak terjadi peningkatan yang signifikan dan material atas temuan audit kepatuhan. / Annually, the Company has compliance audit conducted by External Auditor and there was no significant improvement and material findings on compliance audit. • Perseroan telah berkontribusi kepada masyarakat di lingkungan Perseroan, melalui Program CSR dalam batas kewajaran dan kepatutan. / The Company has contributed to the surrounding community of the Company through CSR Program within fairness and propriety limitation. • Seluruh Karyawan dan Manajemen telah menandatangani pakta integritas untuk tunduk kepada <i>Code of Conduct</i> dan etika bisnis yang telah ditetapkan. / Employees and the Management has signed integrity pact to comply with Code of Conduct and business ethics.
Independensi / Independency	Suatu keadaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. / A condition in which the Company is managed professionally without any conflict of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with prevailing laws and regulations as well as principles of sound corporate governance.	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan telah memiliki kebijakan benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>). / The Company has policy on conflict of interest. • Perseroan telah memiliki budaya perusahaan yaitu Peduli, Professionalisme, Bersyukur, Integritas, dan Disiplin (PPBID). / The Company has corporate culture, namely, Care, Professionalism, Gratefulness, Integrity, and Discipline (PPBID). • Masing-masing organ Perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan masing-masing peranannya tanpa adanya intervensi dan mendominasi pihak lainnya. / Each organ of the Company, namely General Meeting of Shareholders, Board of Commissioners, and Board of Directors has carried out their respective roles without any intervention and domination from other parties. • Perseroan telah menerapkan <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> dengan hasil <i>assessment</i> yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. / The Company has implemented Good Corporate Governance (GCG) with assessment result that improves each year. • Pemegang Saham telah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional dan independen. / Shareholders have bestowed a part of their authorities to the Board of Commissioners and Board of Directors to boost the Company's management to be carried out in a professional and independent manner. • Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan fungsi <i>checks and balances</i> melalui komunikasi formal melalui rapat, persetujuan/penolakan Dewan Komisaris atas usulan Direksi. / Board of Commissioners and Board of Directors have performed checks and balances function through formal communication such as meeting, approval/disapproval of the Board of Commissioners on suggestions of the Board of Directors.
Kewajaran / Fairness	Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak setiap individu dan <i>stakeholders</i> lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. / Fairness and equality in fulfilling rights of individuals and stakeholders based on prevailing agreements, laws and regulations.	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan telah memiliki peraturan yang mengatur hak dan kewajiban yang berkaitan dengan seluruh pemangku kepentingan. / The Company has regulation for rights and obligations related to all stakeholders. • Perseroan telah memiliki kebijakan teknis operasional untuk memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. / The Company has technical operational policy to provide services to all stakeholders through ISO 9001:2008 Quality Management System. • Perseroan memberikan perlakuan yang proporsional kepada seluruh mitra kerja. / The Company treats all business partners proportionally. • Perseroan telah memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapat melalui forum pertemuan, saluran komunikasi elektronik (<i>website</i>) dan saluran pelaporan pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>). / The Company has provided opportunity to all stakeholders to submit opinions through meeting forums, electronic communication channel (<i>website</i>) and Whistleblowing System channel.

Perseroan meyakini dengan penerapan 5 (lima) prinsip GCG sebagai budaya dalam perusahaan maka akan tercipta nilai tambah untuk seluruh stakeholder serta dapat meningkatkan iklim investasi nasional yang kondusif.

DASAR HUKUM PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Terdافتarnya Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 lalu memberikan semangat baru bagi Perseroan untuk secara kontinyu meningkatkan praktik GCG di lingkungan PP Presisi. Oleh karena itu, Perseroan telah merumuskan berbagai inisiatif strategis untuk mengimplementasikan prinsip GCG ke dalam langkah-langkah operasional, termasuk membangun infrastruktur tata kelola yang dibutuhkan.

Sebagai Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pembangunan infrastruktur GCG Perseroan mengacu kepada:

- Undang-Undang Republik Indonesia, yang meliputi:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; dan
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Menteri dan Bursa Efek Indonesia (BEI), yang meliputi:
 1. Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan No. I-A Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang diterbitkan oleh Perseroan tercatat,
 2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Internal Audit;
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
 7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik;
 8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.

The Company believes that through implementation of 5 (five) GCG principles as a culture in the Company, it will generate an added value for all stakeholders as well as improve a conducive climate for national investment.

LEGAL BASIS OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

The listing of the Company in Indonesia Stock Exchange in 2017 provided a new spirit for the Company to continuously improve GCG practices within PP Presisi. As a result, the Company has formulated various strategic initiatives to implement GCG principles into operational processes which include developing the necessary governance infrastructures.

As a Subsidiary of a State-Owned Enterprise (SOE), development of the Company's GCG infrastructure refers to:

- Laws of the Republic of Indonesia, namely:
 1. Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1995 concerning Capital Market;
 2. Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1999 concerning The Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition;
 3. Law of the Republic of Indonesia Number 13 on 2003 concerning Manpower; and
 4. Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company; and
- Regulations of Financial Services Authority and Indonesia Stock Exchange (IDX), namely:
 1. Attachment to the Decision of the Board of Directors of PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 dated July 19, 2004 concerning Regulation No. I-A Listing of Shares and Equity Securities issued by Listed Company;
 2. Attachment to the Decision of Chairman of Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency No. Kep-496/BL/2008 dated November 28, 2008 concerning Implementation and Guideline on Formulation of Internal Audit Charter;
 3. Regulation of Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuer of Public Company;
 4. Regulation of Financial Services Authority No. 34/POJK.04/2014 concerning Nomination and Remuneration Committee of Issuer or Public Company;
 5. Regulation of Financial Services Authority No. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretary of Issuer of Public Company;
 6. Regulation of Financial Services Authority No. 21/POJK.04/2015 concerning Implementation of Good Corporate Governance Manual on Public Company;
 7. Regulation of Financial Services Authority No. 31/POJK.04/2015 concerning Information or Material Facts Disclosure of Issuer or Public Company;
 8. Circular Letter of Financial Services Authority (SEOJK)

- 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
 10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal; dan
 11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
 12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.
- Pedoman Umum GCG Indonesia, dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance yang diterbitkan oleh KNKG pada tanggal 17 Oktober 2006.
 - Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan PT PP Presisi Tbk No.2, tanggal 02-05-2004 yang dibuat oleh Muhammad Chotib, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan tanggal 01 Juli 2004 No. C-16498 HT.01.01.Th 2004 dengan nama PT Prima Jasa Aldo Dua, selanjutnya melakukan penyesuaian dengan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana tertuang dalam Akta No. 3 tanggal 25 Februari 2008 yang dibuat oleh Muhammad Chotib, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan tanggal 12 Mei 2008 No. AHU-24457.AH.01.02 Tahun 2008 dan telah mengalami beberapa perubahan yang terakhir berdasarkan Akta No. 27 tanggal 14-08-2017 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan dikenal dengan nama PT PP Presisi Tbk.

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan implementasi GCG, Perseroan telah menyusun *roadmap* penerapan GCG, yang menjadi landasan PP Presisi dalam menerapkan GCG agar lebih terarah dan sistematis.

- No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Good Corporate Governance Manual on Public Company;
9. Regulation of Financial Services Authority No. 55/POJK.04/2015 concerning Establishment and Guidelines on Audit Committee Work Implementation;
 10. Regulation of Financial Services Authority No. 56/POJK.04/2015 concerning Implementation and Guideline on Formulation of Internal Audit Charter; and
 11. Regulation of Financial Services Authority No. 10/POJK.04/2017 concerning Amendment to Regulation of Financial Services Authority No. 32/POJK.04/2014 concerning Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Company; and
 12. Regulation of Financial Services Authority No. 11/POJK.04/2017 concerning Report on Share Ownership or Share Ownership Change on Public Company.
- Indonesia GCG General Guideline issued by National Committee on Corporate Governance (KNKG) on October 17, 2006.
 - Articles of Association of the Company pursuant to the Deed of Establishment of Perseroan PT PP Presisi Tbk No. 2, dated 02-05-2004 drawn up by Muhammad Chotib, SH, a Notary in Jakarta and ratified by the Minister of Justice and Human Rights through the Decree dated July 1, 2004 No. -16498 HT.01.01.Th 2004 under the name of PT Prima Jasa Aldo Dua, subsequently conducted adjustment to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company as stipulated in Deed No. 3 dated February 25, 2008, drawn up by Muhammad Chotib, SH, a Notary in Jakarta and ratified by Minister of Justice and Human Rights through Decree dated May 12, 2008 No. AHU-24457.AH.01.02. of 2008 and its latest amendment pursuant to Deed No. 27 dated 14-08-2017 drawn up by Fathiah Helmi, SH, a Notary in Jakarta and under the name of PT PP Presisi Tbk.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP

In order to realize objectives of GCG implementation, the Company has prepared roadmap of GCG implementation that serves as a foundation for PP Presisi in implementing GCG so that it can be more directed and systematic.

Tahun	Roadmap GCG PP Presisi	PP Presisi GCG Roadmap
2016 - 2017	Meletakkan landasan dasar Penerapan GCG: <ul style="list-style-type: none"> Merumuskan Pedoman Kode Etik Perusahaan (<i>Code Of Conduct</i>) yang ditandatangani pada tanggal 14 Agustus 2017. Kode Etik tersebut merupakan wujud komitmen Perusahaan dalam menjalankan dan menjabarkan Budaya dan Nilai-Nilai Perusahaan, menjadi pedoman etika usaha dan etika kerja ini akan dijadikan sebagai acuan bagi Warga Perseroan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Melakukan <i>Business Process Mapping</i> untuk memastikan kebutuhan SOP. 	Established foundation for GCG Implementation: <ul style="list-style-type: none"> Formulated the Company's Code of Conduct signed on August 14, 2017. The Code of Conduct is a manifestation of the Company's commitment in conducting and stipulating Corporate Culture and Values, becoming guideline on business ethics and work ethics and it will be a reference for the Company's Personnel that must be complied with and carried out. Conducted Business Process Mapping to ensure the needs of SOP.
	Merumuskan & mengesahkan pedoman GCG.	Formulated & ratified GCG manual.
	Membentuk Infrastruktur GCG yang dibutuhkan, antara lain : a) Organ/Lembaga : Komisaris & Direktur Independen, Komite Audit dan Komite Nominasi & Remunerasi, serta Corporate Secretary. Di samping itu, meningkatkan Internal Audit mengacu kepada peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal; dan b) Charter.	Established required GCG infrastructures, among others: a) Organs/Bodies: Independent Commissioner & Director, Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee as well as Corporate Secretary. In addition, improved Internal Audit by referring to OJK Regulation No. 56/POJK.04/2015 concerning Implementation and Guideline on Formulation of Internal Audit Charter; and b) Charter.
	Sosialisasi Pedoman Kode Etik Perusahaan (<i>Code Of Conduct</i>) & pedoman GCG.	Dissemination of Code of Conduct & GCG manual.
	Menyiapkan <i>Annual Report</i> Tahun Buku 2017 mengacu kepada Peraturan OJK dan peraturan lainnya yang relevan.	Prepared the 2017 Annual Report by referring to OJK Regulations and other relevant regulations.
	<i>Self Assessment</i> terhadap praktik/pelaksanaan GCG.	Self-Assessment on GCG practices/implementation.
2018	Mengesahkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT PP Presisi Tbk pada tanggal 17 September 2018	Validated Code of Corporate Governance of PT PP Presisi Tbk on September 17, 2018
	Melakukan sosialisasi Pedoman Kode Etik Perusahaan (<i>Code of Conduct</i>) dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan kepada seluruh Warga PP Presisi	Disseminated the Company's Code of Conduct and Code of Corporate Governance to all Personnel of PP Presisi
	Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Insan PP Presisi.	Signing of Integrity Pact by all PP Presisi Personnel.
	Tindak lanjut terhadap hasil <i>Self Assessment</i> pelaksanaan GCG.	Follow up on Self-Assessment on GCG implementation.
	Mempersiapkan proses <i>assessment</i> terhadap praktik/pelaksanaan GCG oleh pihak ketiga/independen, yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Prepared assessment process on GCG practices/implementation by third/independent party, namely the Finance and Development Supervisory Board (BPKP)
	Penyempurnan situs web Perseroan berdasarkan Peraturan OJK dan peraturan lainnya yang relevan serta untuk meningkatkan aspek keterbukaan.	Improvement on the Company's websites based on OJK Regulations and other relevant regulations as well as to improve transparency aspect.
	Penyempurnan <i>Annual Report</i> Tahun Buku 2018 dengan mengacu kepada Peraturan OJK dan peraturan lainnya yang relevan serta meletakkan dasar yang kuat untuk penyusunan <i>Annual Report</i> yang mengacu kepada kriteria <i>Annual Report Award</i> (ARA).	Improvement on the 2018 Annual Report by referring to OJK Regulations and other relevant regulations as well as to establish firm foundation for preparation of Annual Report by referring to criteria of Annual Report Award (ARA).
2019	Tindak lanjut terhadap hasil <i>Assessment</i> GCG oleh pihak ketiga/independent.	Follow up on GCG Assessment result by third/independent party.
	Mempersiapkan proses <i>Assessment</i> GCG selanjutnya untuk meningkatkan <i>score</i> agar sama dengan <i>score</i> GCG yang diperoleh Entitas Induk.	Preparing subsequent GCG Assessment process to increase the score to be equal to GCG score achieved by Parent Company.
	Harmonisasi GCG antara Perseroan dengan Entitas Anak.	GCG Harmonization between the Company with Subsidiary.
	Pembuatan <i>Annual Report</i> dengan mengacu kepada kriteria <i>Annual Report Award</i> (ARA).	Preparation of Annual Report by referring to criteria of Annual Report Award (ARA).
2020	Meningkatkan kualitas implementasi GCG Perseroan dengan merujuk kepada ASEAN CG Scorecard	Improving quality of the Company's GCG implementation by referring to ASEAN CG Scorecard.
	Mempersiapkan proses <i>Assessment</i> terhadap praktik/pelaksanaan GCG oleh pihak ketiga/independen pada Entitas Anak	Preparing Assessment process on GCG practices/implementation by third/independent party to Subsidiary.

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TAHUN 2018

Selain *Code of Conduct*, Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan *Corporate Policy Manual* juga menjadi acuan perilaku bagi segenap insan PP Presisi dalam kegiatan pengelolaan perusahaan. Sosialisasi implementasi Tata Kelola menjadi sangat penting dan krusial, karena insan PP Presisi tersebar

DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION IN 2018

In addition to Code of Conduct, Good Corporate Governance Manual and Corporate Policy Manual also serve as references for conduct of PP Presisi personnel in the company's management activities. Dissemination of Good Corporate Governance implementation is key and crucial because PP Presisi personnel

di beberapa proyek di hampir semua wilayah Indonesia. Oleh karena itu, sosialisasi implementasi tata kelola juga secara berkesinambungan dilakukan kepada setiap karyawan baru. Adapun organ yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan penegakan tata kelola di lingkungan PP Presisi dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan. Melalui Sekretaris Perusahaan, Perseroan juga secara berkala mengadakan kegiatan yang bersifat informatif kepada pihak eksternal mengenai kinerja operasional dan keuangan Perseroan, melalui:

- Kegiatan hubungan investor (*analyst meeting* dan lainnya)
- Update website Perseroan secara berkala (www.pp-presisi.co.id)
- Penyebaran informasi secara berkala berupa *news release*, *Public Expose*, dan Keterbukaan Informasi kepada para pemangku kepentingan (publik, Otoritas Jasa Keuangan, maupun Bursa Efek Indonesia)
- Penyelenggaraan RUPS Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2017 pada tanggal 5 April 2018; dan
- Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasi baik dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan maupun 1 (satu) tahun serta Laporan Tahunan kepada publik dan Otoritas Regulator terkait.

PENILAIAN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dasar dan Metode Penilaian

Dalam menyusun pokok-pokok acuan/indikator evaluasi atas penerapan GCG, Perseroan mengacu pada Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MB/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Acuan tersebut diadopsi karena status Perseroan sebagai entitas anak dari PT PP (Persero) Tbk yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adapun beberapa aspek pokok pengukuran antara lain:

1. Komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan
2. Pemegang saham dan RUPS/pemilik modal
3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
4. Direksi
5. Pengungkapan informasi dan transparansi
6. Aspek lainnya

Penilaian terhadap implementasi GCG dalam lingkungan PP Presisi merupakan salah satu wujud komitmen Perseroan untuk menerapkan GCG dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, penilaian tersebut juga dibutuhkan untuk mengetahui tingkat kepatuhan (*score*) terhadap aspek pokok pengukuran dan *feedback* dari proses implementasi tata kelola. *Feedback* dalam hal ini tidak hanya dikumpulkan, tetapi juga ditindaklanjuti untuk memperbaiki pengelolaan perusahaan di masa-masa mendatang.

Penilaian Penerapan GCG PP Presisi Tahun 2018: Hasil dan Rekomendasi

Evaluasi penerapan GCG PP Presisi periode tahun 2018 dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

are located in several projects across Indonesia. Therefore, dissemination of good corporate governance implementation is also continuously given to new employees. The organ assigned to conduct supervision and enforcement of good corporate governance in PP Presisi is the Corporate Secretary. Through Corporate Secretary, the Company holds informative activities periodically for external parties on operational and financial performances of the Company through:

- Investor relations activities (analyst meeting and others)
- Updating the Company's website regularly (www.pppresisi.co.id)
- Regular information dissemination in the form of News Release, Public Expose, and Information Disclosure to stakeholders (public, Financial Services Authority, and Indonesia Stock Exchange)
- Held Annual GMS (AGMS) for 2017 Fiscal Year on April 5, 2018; and
- Preparation and submission of Consolidated Financial Statements within 3 (three) months and 1 (one) year as well as Annual Report to public and related Regulators.

ASSESSMENT ON GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Assessment Basis and Methods

In preparing points of reference/indicator of evaluation on GCG implementation, the Company refers to the Decision of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprise Number SK-16/S.MB/2012 on Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation on Implementation of Good Corporate Governance on State-Owned Enterprises. The reference is adopted due to the Company's status as a subsidiary of PT PP (Persero) Tbk, which is a State-Owned Enterprise (SOE). Several aspects of measurement points, among others:

1. Commitment to sustainable good corporate governance.
2. Shareholders and GMS/capital owners.
3. The Board of Commissioners/Supervisory Board.
4. The Board of Directors.
5. Information disclosure and transparency.
6. Other aspects.

Assessment on GCG implementation in PP Presisi is one of the realizations of the Company's commitment to implement GCG in a responsible manner. Moreover, such assessment is required to understand compliance level (*score*) to the aspect of measurement point and feedback from the process of good corporate governance implementation. In this regard, feedback is not only collected, but it is also followed up to improve the company's management in the coming years.

Assessment on GCG Implementation in PP Presisi in 2018: Result and Recommendation

Evaluation on the implementation of GCG of PP Presisi for the 2018 period is carried out by the Financial and Development

sejak tanggal 9 Januari sampai dengan 15 Februari 2019 dengan Surat Tugas No. ST-18/PW09/4.1/2019 tanggal 4 Januari 2019. Skor penilaian GCG yang berhasil diperoleh PP Presisi untuk tahun 2018 adalah sebesar 77,628 dengan predikat Baik.

Supervisory Agency (BKP) from January 9 to February 15, 2019 with Letter of Assignment No. ST-18/PW09/4.1/2019. The GCG assessment score that was successfully obtained by PP Presisi for 2018 was 77.628 with Good predicate.

Aspek Pengujian / Assessment Aspect	Bobot / Value	Pencapaian Tahun Buku 2018 / Achievement in 2018 Fiscal Year		Penjelasan / Explanation	
		Realisasi Nilai / Score Realization	Pencapaian (%) / Achievement (%)		
I	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan / Commitment to Sustainable Good Corporate Governance	7,000	6,189	88,414	Sangat Baik / Excellent
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal / Shareholders and GMS/Capital Owners	9,000	7,994	88,822	Sangat Baik / Excellent
III	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas / The Board of Commissioners/Supervisory Board	35,000	28,115	80,329	Baik / Good
IV	Direksi / The Board of Directors	35,000	29,135	83,243	Baik / Good
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi / Information Disclosure and Transparency	9,000	6,195	68,833	Cukup Baik / Fairly Good
Sub Total		95,000	77,628		
VI	Aspek Lainnya / Other Aspects	5,000	0,000		
Skor Keseluruhan / Total Score		100,000	77,628		Baik / Good

Adapun rekomendasi yang diberikan terkait penerapan GCG PP Presisi untuk periode tahun 2018, antara lain:

Recommendations for GCG implementation of PP Presisi for 2018, among others:

No.	Aspek Pengujian / Assessment Aspect	Rekomendasi	Recommendation
1.	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan / Commitment to Sustainable Good Corporate Governance	Menambahkan Pelaksanaan GCG menjadi salah satu indikator KPI	Include GCG Implementation to be one of KPI Indicators
2.	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal / Shareholders and GMS/Capital Owners	<ul style="list-style-type: none"> - Mengesahkan RJPP tepat waktu; - Mengesahkan kontrak Manajemen Direksi secara individu; - Pemegang Saham melakukan pembahasan, evaluasi menindaklanjuti <i>Area of Implementation</i> (AOI) atas pengelolaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Validate the RJPP on time; - Validate the Board of Directors Management contract individually - For Shareholders to conduct discussions, evaluations, follow up on <i>Area of Implementation</i> (AOI) for the management of Good Corporate Governance.
3.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas / The Board of Commissioners/ Supervisory Board	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris; - Dewan Komisaris membuat telaahan tentang penerapan manajemen risiko, dan menyampaikan ke Direksi; - Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK); - Mengusulkan kepada Pemegang Saham agar memasukkan dalam KPI/Kontrak Manajemen terkait penilaian individu Direksi; - Merevisi pengaturan benturan kepentingan untuk Dewan Komisaris dengan menambahkan klausul pengunduran diri komisaris jika terlibat TPPU sesuai aturan OJK; dan - Dewan Komisaris menyusun KPI Dewan Komisaris dan kriteria pengukuran capaian kinerja secara kolegiel dan individual. 	<ul style="list-style-type: none"> - Prepare guidelines for preparation of the Board of Commissioners' Work Plan and Budget (RKA); - For the Board of Commissioners to make a review of the implementation of risk management, and submit it to the Board of Directors; - For the Board of Commissioners to provide direction on accounting policies and preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting standards in Indonesia (SAK); - Propose to Shareholders to include in KPI / Management Contract related to assessment on individual of Board of Directors; - To revise the conflict of interest regulation for the Board of Commissioners by adding the clause of resignation of the commissioner in the event that a commissioner is involved in TPPU in accordance with OJK regulations; and - The Board of Commissioners to compile the Board of Commissioners' KPI and collegial and individual performance measurement criteria.

No.	Aspek Pengujian / Assessment Aspect	Rekomendasi	Recommendation
4.	Direksi / The Board of Directors	<ul style="list-style-type: none"> - Direksi melaksanakan program pelatihan dan anggaran pelatihan untuk masing-masing Direksi secara terpisah dengan anggaran pelatihan untuk Komisaris dan karyawan; - Menyosialisasikan Pedoman pengadaan barang dan jasa kepada pemasok/calon pemasok; - Direksi menetapkan Manual Akuntansi; - Perusahaan menyusun kebijakan yang mampu mendorong partisipasi karyawan dan meningkatkan kepuasan karyawan; - Menyusun rencana kerja untuk CSR, indikator keberhasilan pelaksanaan CSR, dan evaluasi atas pencapaian indikator keberhasilan dengan target-targetnya; - Sekretaris Perusahaan melengkapi muatan Risalah rapat dgn evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya maupun terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya yg belum selesai dilakukan pembahasan utk tindak lanjutnya; - Kepala SPI/fungsi Audit Internal melaksanakan program jaminan kualitas dan peningkatan fungsi Audit Internal secara keseluruhan; dan - SPI melakukan evaluasi terhadap keselarasan kegiatan operasional dengan sasaran dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 	<ul style="list-style-type: none"> - The Board of Directors to carry out training programs and training budgets for each Directors, they have not been made separate from the training budget for Commissioners and employees; - Disseminate Guidelines for the procurement of goods and services to suppliers/prospective suppliers; - The Board of Directors to determine an Accounting Manual; - The Company develops policies that are able to encourage employee participation and improve employee satisfaction; - To draw up a work plan for CSR, an indicator of the success of CSR implementation, and an evaluation of the achievement of indicators of success with its targets; and - The Corporate Secretary to complete the Minutes of Meeting with an evaluation on the implementation of the resolutions of the previous meeting and on the implementation of the resolutions from the previous meeting that have not been completed for discussion for follow-up; - The Head of the Internal Audit Unit/Internal Audit function to implement a quality assurance program and improve the functions of the Internal Audit as a whole; and - SPI to evaluate the alignment of operational activities with goals and objectives of the organization.
5.	Pengungkapan Informasi dan Transparansi / Information Disclosure and Transparency	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Laporan Tahunan yang memuat tentang : <ul style="list-style-type: none"> a) Komposisi Pemegang Saham b) Alamat anak perusahaan atau cabang - Perusahaan berusaha memperoleh penghargaan dalam bidang ARA 	<ul style="list-style-type: none"> - To prepare Annual Report that contains: <ul style="list-style-type: none"> a) Shareholder composition b) Address of subsidiary or branch office - The Company seeks for award in ARA
6.	Aspek Lainnya / Other Aspects	Berpartisipasi secara aktif dalam bidang CSR dan bidang lainnya, seperti Publikasi dan keterbukaan Informasi.	To actively participate in CSR and other fields, such as information transparency and publication.

PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA SESUAI KETENTUAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

PP Presisi berkomitmen untuk terus meningkatkan penerapan GCG berdasarkan POJK No.21/POJK.04/2015 dan SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015. Peraturan tersebut mencakup 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip, dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi OJK terkait penerapan aspek dan prinsip GCG yang harus dilaksanakan Perseroan. Adapun uraian penerapannya yakni sebagai berikut:

IMPLEMENTATION OF ASPECTS AND PRINCIPLES OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN PUBLIC COMPANY ACCORDING TO PROVISIONS OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY ON GOOD CORPORATE GOVERNANCE MANUAL OF PUBLIC COMPANY

PP Presisi is committed to keep improving GCG implementation based on POJK No. 21/POJK.04/2015 and SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015. Such regulations include 5 (five) aspects, 8 (eight) principles, and 25 (twenty five) OJK recommendations regarding implementation of aspects and principles of GCG that need to be implemented by the Company. The description of its implementation, namely:

Prinsip / Principle	Rekomendasi / Recommendation	Keterangan Rekomendasi OJK / Description of OJK Recommendation	Status / Status	Keterangan Penerapan / Description of Implementation
<p>I. Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham / Aspect 1: Relations of Public Company with Shareholders in Ensuring Rights of Shareholders</p>				
<p>Prinsip 1 / Principle 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS / Improving GMS implementation</p>	<p>Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham / Public Company has a method or technical procedure for both open and closed voting that prioritizes independency and shareholders' interest.</p>	<p>Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (<i>one share one vote</i>). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci. / Every share issued with voting right has one voting right (<i>one share one vote</i>). Shareholders may exercise their voting rights during decision making, especially in decision making through voting. Nevertheless, decision making mechanism through open and closed voting has not been regulated in details.</p> <p>Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (<i>voting</i>) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan <i>electronic voting</i>. / Public Company is recommended to have a procedure for voting in decision making for an agenda in GMS. The procedure of voting shall maintain independency or freedom of shareholders. For example, open voting is conducted by raising hands in accordance with instruction options offered by GMS chairman. Meanwhile, closed voting is carried out on decisions that require confidentiality or upon request of shareholders, by using voting card or electronic voting.</p>	<p>Sudah Menerapkan / Applied</p>	<p>Perusahaan telah memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) yang diatur dalam Anggaran Dasar sebagaimana tertuang dalam Akta No. 27 Tanggal 14 Agustus 2017 dan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. / The Company has established a technical method or procedure for voting as stipulated in the Articles of Association contained in the Deed No, 27 dated August 14, 2017, and Regulations of General Meeting of Shareholders of the Company.</p>
	<p>Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. / All members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of Public Company attend the Annual GMS.</p>	<p>Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS. / Attendance of all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of Public Company has a purpose to enable every member of the Board of Directors and the Board of Commissioners to directly observe, explain, and answer arising issues or questions asked by shareholders regarding agenda in the GMS.</p>	<p>Sudah Menerapkan / Applied</p>	<p>Pada penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017, seluruh Dewan Komisaris dan Direksi hadir. / In the convention of Annual GMS of 2017 Fiscal Year, all members of Board of Commissioners and Board of Directors attended</p>
	<p>Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. / Summary of minutes of GMS is available in Public Company website for at least 1 (one year).</p>	<p>Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui situs web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada situs web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut. / Public Company is required to make a summary of minutes of GMS in Indonesian and a foreign language (in English at the minimum) and it is announced to the public within 2 (two) business days subsequent to GMS implementation, one of which is through the website of Public Company. Availability of summary of minutes of GMS on the Public Company website provides an opportunity for shareholders that did not attend the meeting to obtain key information in GMS implementation in a convenient and quick manner. Therefore, provision on minimum duration of availability of summary of minutes of GMS in the Website is aimed to provide sufficient time for shareholders to obtain such information.</p>	<p>Sudah Menerapkan / Applied</p>	<p>Ringkasan risalah RUPS telah tersedia di web perusahaan setelah 2 (dua) hari kerja RUPS diselenggarakan. / Summary of GMS minutes is available on the Company's website within 2 (two) business days after the convention of GMS</p>

Prinsip / Principle	Rekomendasi / Recommendation	Keterangan Rekomendasi OJK / Description of OJK Recommendation	Status / Status	Keterangan Penerapan / Description of Implementation
Prinsip 2 / Principle 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor / Improving Communication Quality of Public Company with Shareholders or Investors.	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor / Public Company has a communication policy with shareholders or investors.	Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut. / Communication between Public Company with shareholders or investors is intended to allow shareholders or investors to obtain a more comprehensive understanding on information published to public, such as periodic report, information disclosure, business conditions or prospects and performances, as well as Good Corporate Governance Implementation of Public Company. Communication policy with shareholders or investors demonstrates the commitment of Public Company in developing communication with shareholders or investors. The policy contains strategies, programs, and time of communication as well as guidelines that support shareholders or investors to participate in the communication.	Sudah Menerapkan / Applied	Perusahaan mempunyai kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor yang dituangkan dalam WI Strategi Komunikasi dengan No. PPRE/SEK/P/001 tanggal 4 Juni 2018. / The Company has established a policy on communication with the shareholders or investors that is stipulated in the WI Communication Strategy under No. PPRE/SEK/P/001 dated June 4, 2018
	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs web. / Public Company discloses communication policy of Public Company with shareholders or investors in official website.	Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka. / Disclosure of communication policy is a form of transparency on the commitment of Public Company in providing equality to all shareholders or investors on implementation of communication. Such information disclosure is also intended to increase participation and role of shareholders or investors in implementation of communication program of Public Company.	Sudah Menerapkan / Applied	WI Strategi Komunikasi ini diungkapkan melalui Presisi Online dan Website Perusahaan. / WI Communication Strategy is disclosed through Presisi Online and Company's website
II. Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris / Aspect 2: Functions and Roles of the Board of Commissioners				
Prinsip 3 / Principle 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris / Strengthening Membership and Composition of the Board of Commissioners.	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. / Determination of the number of the Board of Commissioners members should consider the conditions of Public Company.	Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang berdasarkan ketentuan peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris. / Number of the Board of Commissioners members may influence effectiveness of duty implementation of the Board of Commissioners. Determination of the number of the Board of Commissioners members of Public Company is required to refer to prevailing laws and regulations, that at least consisting of 2 (two) people based on regulation of OJK concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuer or Public Company. Moreover, conditions of Public Company, consisting of characteristics, capacity, size, as well as objective achievement and fulfillment of business needs among Public Companies, shall be taken into consideration. Nevertheless, an oversized number of the Board of Commissioners members have the potential to disrupt effectiveness of duty implementation of the Board of Commissioners.	Sudah Menerapkan / Applied	Susunan Anggota Dewan Komisaris berdasarkan Akta No. 27 Tanggal 14 Agustus 2017 sebagai berikut : - Komisaris Utama : Ir. Muhammad Toha Fauzi, MT - Komisaris : Ir. Nawang Sri Retno Kartiko, M. EngM - Komisaris Independen : Ir. Ketut Darmawan / The composition of Board of Commissioners based on Deed No. 27 dated August 14, 2017 is as follows: - President Commissioner: Ir. Muhammad Toha Fauzi, MT - Commissioner: Ir. Nawang Sri Retno Kartiko, M. EngM - Independent Commissioner: Ir. Ketut Darmawan

Prinsip / Principle	Rekomendasi / Recommendation	Keterangan Rekomendasi OJK / Description of OJK Recommendation	Status / Status	Keterangan Penerapan / Description of Implementation
	<p>Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>/ Determination of composition of the Board of Commissioners members takes into account the required diversity, expertise, knowledge, and experience.</p>	<p>Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas. / Composition of the Board of Commissioners is a combination of characteristics in terms of the Board of Commissioners as an organ and members of the Board of Commissioners as individuals, in accordance with the needs of Public Company. Such characteristics can be reflected in determination of expertise, knowledge, and experience required in implementation of supervisory and advisory duties by the Board of Commissioners of Public Company. Composition that considers the needs of Public Company is a positive matter, especially related to decision making in implementation of supervisory function carried out by considering various wider aspects.</p>	<p>Sudah Menerapkan / Applied</p>	<p>Dewan Komisaris beranggotakan 3 (tiga) orang. Dewan Komisaris diketuai oleh seorang Komisaris Utama yang bertugas antara lain melakukan pengawasan dan jalannya pengurusan yang dilakukan Direksi, mengkoordinir tugas Dewan Komisaris, dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perusahaan. Sepanjang tahun 2018, jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang dan 1 diantaranya adalah anggota Komisaris Independen</p> <p>Ketiga anggota Dewan Komisaris tersebut telah menyelesaikan tingkat akademis S-2 dan S-1 dengan bauran kompetensi dan pengalaman yang saling melengkapi.</p> <p>/ The Board of Commissioners consists of 3 (three) people and is headed by the President Commissioner who is responsible for, among others, conducting supervision on the management of the Company carried out by the Board of Directors, coordinating the duties of Board of Commissioners and providing advice to the Board of Directors for the management of the Company. In 2018, total members of Board of Commissioners amounted to 3 (three) people; one of whom serves as an Independent Commissioner.</p> <p>All three members of Board of Commissioners have completed academic education level of Graduate (S2) and Undergraduate (S1) degrees with diverse competence and expertise that complement each other.</p>

Prinsip / Principle	Rekomendasi / Recommendation	Keterangan Rekomendasi OJK / Description of OJK Recommendation	Status / Status	Keterangan Penerapan / Description of Implementation
<p>Prinsip 4 / Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris / Improving Quality of Duty Implementation and Responsibility of the Board of Commissioners.</p>	<p>Dewan Komisaris memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris / The Board of Commissioners has their own self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners.</p>	<p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegal. <i>Self-assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya <i>Self-Assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. / Self-assessment policy of the Board of Commissioners is a guideline used as a form of accountability of performance assessment of the Board of Commissioners collegially. Self-assessment is intended to be carried out by each member to assess performance of the Board of Commissioners collegially, and not to assess individual performance of the Board of Commissioners members. Through such self-assessment, it is expected that the Board of Commissioners may contribute to improvement of the Board of Commissioners performance in a continuous manner. The policy contains assessment activities being carried out as well as their objectives and purposes, time of periodic implementation, and benchmark or assessment criteria being used is in accordance with recommendation from nomination and remuneration function of Public Company, of which such function is required in Regulation of OJK concerning Nomination and Remuneration Committee of Issuer or Public Company.</p>	<p>Sudah Menerapkan / Applied</p>	<p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris tertuang dalam Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk Tahun 2018. / The policy of self-assessment to evaluate the performance of Board of Commissioners is stipulated in the Work Guidelines of Board of Commissioners of PT PP Presisi Tbk of 2018</p>
	<p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self-Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka / Self-assessment policy to assess the Board of Commissioners is disclosed through the Annual Report of Public Company.</p>	<p>Pengungkapan kebijakan <i>Self-Assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga, untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Dewan Komisaris. / Disclosure of Self-Assessment policy on performance of the Board of Commissioners is carried out not only to fulfill aspect of transparency as a form of accountability for their duty implementation, but it is also to provide assurance, specifically for shareholders or investors for efforts that are necessary in improving the performance of the Board of Commissioners. Through such disclosure, shareholders or investors understand check and balance mechanism on the performance of the Board of Commissioners.</p>	<p>Belum menerapkan / Not applied yet</p>	<p>Kedepannya, Dewan Komisaris Perseroan akan menyusun KPI Dewan Komisaris dan kriteria pengukuran capaian kinerja secara kolegal dan individual dan melakukan self assessment atas capaian kinerja Dewan Komisaris. / In the future, the Board of Commissioners of the Company will compile the Board of Commissioners' KPI and collegial and individual performance measurement criteria and conduct self-assessments on the performance of the Board of Commissioners.</p>

Prinsip / Principle	Rekomendasi / Recommendation	Keterangan Rekomendasi OJK / Description of OJK Recommendation	Status / Status	Keterangan Penerapan / Description of Implementation
	<p>Dewan Komisaris memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. / The Board of Commissioners has a policy regarding resignation of the Board of Commissioners members when involved in financial crime.</p>	<p>Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. / Resignation policy of a member of the Board of Commissioners involved in financial crime is a policy that can increase the trust of stakeholders towards Public Company so that the company's integrity will be maintained. This policy is necessary to assist in legal process and so that such legal process does not interrupt business activities. In addition, in terms of morality, this policy develops culture of ethics within Public Company. The policy is included in Code of Conduct applicable for the Board of Commissioners. Furthermore, definition of being involved in financial crime is that a member of the Board of Commissioners has a status as convicted issued by the authority. Financial crimes mentioned are manipulation and various forms of embezzlement in financial services activities as well as Criminal Act of Money Laundering as stipulated in Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Criminal Act of Money Laundering.</p>	<p>Sudah Menerapkan / Applied</p>	<p>Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan tercantum dalam Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk. / Policy related to the resignation of members of Board of Commissioners involved in financial crime is stipulated in the Work Guidelines of Board of Commissioners of PT PP Presisi Tbk</p>
	<p>Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi / The Board of Commissioners or Committee that performs Nomination and Remuneration function prepares succession policy in Nomination process of the Board of Directors members.</p>	<p>Berdasarkan ketentuan Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan. / Pursuant to the Regulation of OJK on Nomination and Remuneration Committee of Issuer or Public Company, committee that performs nomination function has a duty to prepare necessary policy and criteria in process of Nomination of the Board of Directors candidates. One of the policies that may support the process of Nomination is succession policy of the Board of Directors members. Policy on succession is intended to maintain continuity of leadership regeneration in the company in order to maintain business continuity and long-term goals of the company.</p>	<p>Sudah Menerapkan / Applied</p>	<p>Pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan mengacu pada Pedoman Tata Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi. / The implementation of Nomination and Remuneration function of the Company refers to the Work Guidelines of Nomination and Remuneration Committee</p>

Prinsip / Principle	Rekomendasi / Recommendation	Keterangan Rekomendasi OJK / Description of OJK Recommendation	Status / Status	Keterangan Penerapan / Description of Implementation
III. Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi / Aspect 3: Functions and Roles of the Board of Directors				
Prinsip 5 / Principle 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi / Strengthening Membership and Composition of the Board of Directors.	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan / Determination of the number of the Board of Directors members should consider the conditions of Public Company as well as effectiveness in decision making.	Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka, meliputi karakteristik, kapasitas dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektifitas pengambilan keputusan Direksi. / As an authorized organ of the company in the company's management, determination of number of the Board of Directors members significantly affects the performance of Public Company. Hence, determination of the Board of Directors members shall be performed through proper consideration and refer to to prevailing laws and regulations, of which Regulation of OJK concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuer or Public consists of at least 2 (two) people. Moreover, determination of number of the Board of Directors members shall be based on necessities to achieve objectives and purposes of Public Company and adjusted with conditions of Public Company, including characteristics, capacity, and size of Public Company as well as achievement of effectiveness in decision making of the Board of Directors.	Sudah Menerapkan / Applied	Penentuan jumlah anggota Direksi terdapat pada Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 15 ayat 2 yang disebutkan bahwa Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yakni 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di pasar modal. / Determination of total members of Board of Directors is stipulated in the Company's Articles of Association Article 15 paragraph 2, which states that the Board of Directors consists of, at the very least, 2 (two) people, namely 1 (one) President Director and 1 (one) Director, by taking into account the prevailing capital market regulations
	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan / Determination of composition of the Board of Directors members takes into account the required diversity, expertise, knowledge, and experience.	Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegal. / Such is the case with the Board of Commissioners, diversity in composition of the Board of Directors members is a combination of desired characteristics of the Board of Directors as an organ and the Board of Directors as individuals, in accordance with the needs of Public Company. Such combination is determined by taking into account expertise, knowledge, and experience that are in accordance with distribution of duties and functions of the Board of Directors positions in achieving objectives of Public Company. Therefore, consideration of characteristics combination will affect accuracy in process of nomination and appointment of the Board of Directors members as individuals or collegially.	Sudah Menerapkan / Applied	Direktur Utama : Ir. Iswanto Amperawan (Keahlian Teknik Sipil) Direktur Keuangan dan SDM : Benny Pidakso, SE, MM (Keahlian Akuntansi dan Keuangan serta Bisnis) Direktur Operasi : Ir. Hasanin Ade Putra, MT (Keahlian Teknik Sipil) Direktur Pengembangan Bisnis : Ir. Arief Subyandono (Keahlian Teknik Sipil) / President Director: Ir. Iswanto Amperawan (Expertise: Civil Engineering) Director of Finance and HR: Benny Pidakso, SE, MM (Expertise: Accounting, Finance and Business) Director of Operations: Ir. Hasanin Ade Putra, MT (Expertise: Civil Engineering) Director of Business Development: Ir. Arief Subyandono (Expertise: Civil Engineering)

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

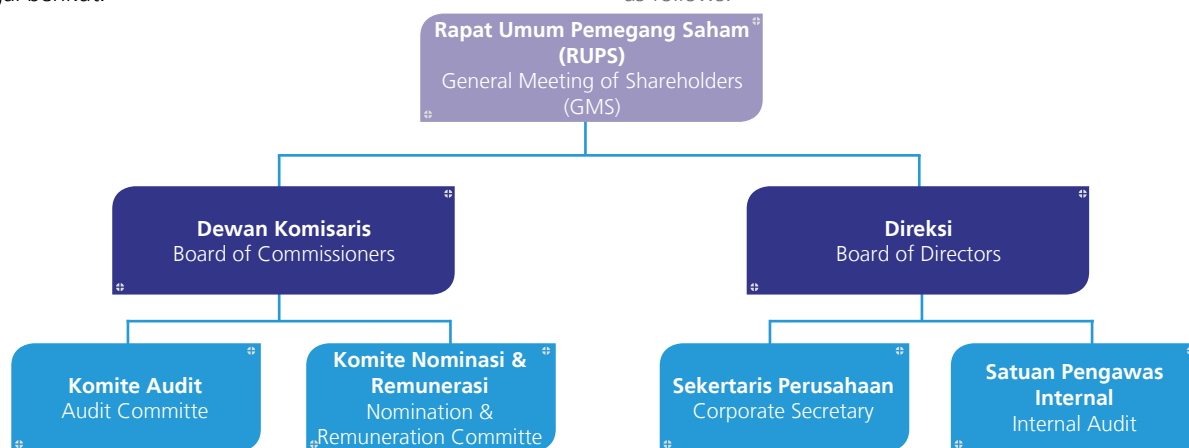
Organ Perseroan yang terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi, mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Organ Perseroan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perusahaan.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE

The Company's organs, consisting of the GMS, Board of Commissioners and Board of Directors, have important roles in implementing GCG in an effective manner. The Company's organs shall carry out their functions in accordance with applicable provisions on the basis that each organ has independency in performing its duties, functions, and responsibilities for the Company's interests.

Struktur Tata Kelola Perusahaan di PT PP Presisi Tbk adalah sebagai berikut:

Good Corporate Governance Structure in PT PP Presisi Tbk is as follows:



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan otoritas tertinggi di Perseroan dan memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan Komisaris dan Direksi serta meminta pertanggungjawaban keduanya atas pengelolaan Perseroan. RUPS berperan sebagai sarana pengambilan keputusan tertinggi guna membahas agenda-agenda terkait kepengurusan Perseroan.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest authority in the Company and has the right to appoint and dismiss the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as to request responsibility of both organs on the Company's management. The GMS has a role as a facility of the highest decision making in order to discuss agenda related to the Company's management.

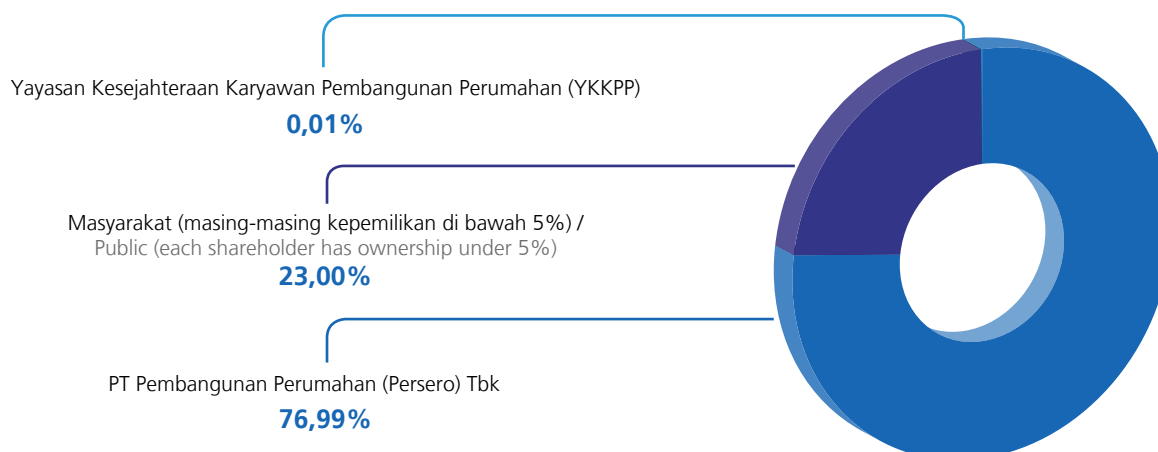
Informasi Pemegang Saham Perusahaan

Sebagai pemilik modal Perseroan, Pemegang Saham memiliki hak dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan. Pemegang Saham PT Presisi Tbk terdiri dari Pemegang Saham Utama/Pengendali dan Pemegang Saham Publik. Per tanggal 31 Desember 2018, Pemegang Saham Utama/Pengendali PT PP Presisi Tbk merupakan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) yang menguasai 76,99% saham Perseroan.

Information on the Company's Shareholders

As capital owners of the Company, Shareholders have rights and responsibilities stipulated in laws and regulations as well as the Company's Articles of Association. Shareholders of PT PP Presisi consist of Majority/Controlling Shareholders and Public Shareholders. As of December 31, 2018, the Majority/Controlling Shareholder of PT PP Presisi Tbk is PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) that controls 76.99% of the Company's shares.

Nama Pemegang Saham / Name of Shareholders	Persentase Kepemilikan Saham / Share Ownership Percentage
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	76,99%
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan (YKKPP)	0,01%
Masyarakat (masing-masing kepemilikan di bawah 5%) / Public (each shareholder has ownership under 5%)	23,00%



Hak Pemegang Saham

- Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
- Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- Dalam hal terjadi ralat pemanggilan RUPS, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.
- Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

Penyelenggaraan RUPS Tahun Buku 2017

Pada tahun 2018, PT PP Presisi Tbk menyelenggarakan RUPS sebanyak 1 (satu) kali, yaitu 1 (kali) RUPS Tahunan (RUPST) 2017. Adapun mekanisme pemberitahuan RUPS kepada Pemegang Saham hingga publikasi hasil dan keputusan RUPS PP Presisi dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Rights of Shareholders

- Shareholders attend the GMS in person or through representation with power of attorney.
- Shareholders that have the right to attend the GMS are shareholders whose names are listed in shareholder register of the Company 1 (one) business day prior to the GMS announcement.
- In the event of erratum of the GMS announcement, shareholders that have the right to attend the GMS are shareholders whose names are listed in shareholder register of the Company 1 (one) business day prior to erratum of the GMS announcement.
- During the GMS, shareholders have the right to acquire information on meeting agenda and materials related to the meeting agenda provided that such actions are not against the Company's interest.

Implementation of 2017 Fiscal Year GMS

In 2018, PT PP Presisi Tbk held 1 (one) GMS, namely the 2017 Annual GMS (AGMS). Mechanism for GMS notification for Shareholders until publication of GMS result and resolution of Attendance of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and Capital Market Supporting Institutions/Professionals in 2017 AGMS PP Presisi are described in the following table:

Pemberitahuan / Notification	Pengumuman / Announcement	Pemanggilan / Summon	Pelaksanaan / Implementation	Publikasi Hasil dan Keputusan RUPS / Publication of GMS Result and Resolution
Direksi telah memberitahukan kepada OJK tentang rencana dan mata acara RUPS ke OJK dengan No. Surat 011/Ext/CS/PPRE/II/2018 tanggal 26 Februari 2018. / The Board of Directors has notified OJK on plan and agenda of GMS to OJK with Letter No. 011/Ext/CS/PPRE/II/2018 dated February 26, 2018.	Memberitahukan kepada pemegang saham mengenai rencana penyelenggaraan Rapat dengan memasang iklan pada 2 (dua) surat kabar harian, yaitu Bisnis Indonesia dan Harian Kontan, serta situs web Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs web Perseroan pada tanggal 26 Februari 2018. / Notified Shareholders on plan of the Meeting implementation through advertisement on 2 (two) daily newspapers, namely Bisnis Indonesia and Kontan daily, as well as website of Indonesia Stock Exchange (IDX) and the Company's website on February 26, 2018.	Mengiklankan panggilan kepada pemegang saham mengenai rencana penyelenggaraan Rapat dengan memasang iklan pada 2 (dua) surat kabar harian, yaitu Bisnis Indonesia dan Harian Kontan, serta situs web Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs web Perseroan pada Tanggal 14 Maret 2018. / Advertised summon to the shareholders on plan of the Meeting implementation through advertisement on 2 (two) daily newspapers, Bisnis Indonesia and Kontan daily, as well as website of Indonesia Stock Exchange (IDX) and the Company's website on February 14, 2018.	RUPST 2017 diselenggarakan pada Kamis, 5 April 2018, bertempat di Auditorium Lantai 1, Plaza PP – Wisma Subiyanto Jl. Letjen. TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta, dan dihadiri oleh 8.718.149.500 saham atau 85,27% dari keseluruhan saham yang telah dialokasikan. / 2017 AGMS was held on Thursday, April 5, 2018, in 1st Auditorium, Plaza PP – Wisma Subiyanto Jl. Letjen. TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo – , Jakarta and attended by 8,718,149,500 shares or 85.27% of all allocated shares.	Dipublikasikan pada tanggal 9 April 2018 di 2 (dua) surat kabar harian, yaitu Kontan dan Bisnis Indonesia serta situs web Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs web Perseroan. / Published on April 9, 2018, on 2 (two) daily newspapers, namely Kontan dan Bisnis Indonesia as well as website of Indonesia Stock Exchange (IDX) and the Company's website.

Kehadiran Dewan Komisaris, Direksi, dan Lembaga/ Profesi Penunjang Pasar Modal dalam RUPST 2017

Attendance of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and Capital Market Supporting Institutions/ Professionals in 2017 AGMS

Nama / Name	Jabatan / Position	Kehadiran dalam RUPST 2017 / Attendance in 2017 AGMS
Dewan Komisaris / The Board of Commissioners		
Muhammad Toha Fauzi	Komisaris Utama / President Commissioner	✓
Ketut Darmawan	Komisaris Independen / Independent Commissioner	✓
Nawang Sri Retno Kartiko	Komisaris / Commissioner	✓

Nama / Name	Jabatan / Position	Kehadiran dalam RUPST 2017 / Attendance in 2017 AGMS
Direksi / The Board of Directors		
Iswanto Amperawan	Direktur Utama / President Director	√
Benny Pidakso	Direktur / Director	√
Hasanin Ade Putra	Direktur / Director	√
Arief Subyandono	Direktur Independen / Independent Director	√
Lembaga/Profesi Penunjang Pasar Modal / Capital Market Supporting Institutions/Professionals		
Rita Permanasari, SH	Notaris / Notary	√
Bambang Karunawan, CPA	Perwakilan dari KAP Hertanto, Grace, dan Karunawan selaku Akuntan Publik Perseroan / Representative of KAP Hertanto, Grace, and Karunawan as the Company's Public Accountant	√
Ester Agung Setiawati	Perwakilan dari PT Datindo Enrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan / Representative of PT Datindo Entrycom as the Company's Share Registrar	√

Tata Cara RUPST Tahun Buku 2017

- Rapat dipimpin Bapak Muhammad Toha Fauzi selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2014.
- Dalam pembahasan mata acara RUPST para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
- Untuk pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para pemegang saham dengan pilihan suara abstain, tidak setuju, sisanya akan diperhitungkan sebagai suara setuju.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Seluruh hasil keputusan RUPST Perseroan tahun buku 2017 dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak tercapai, maka akan dilakukan pemungutan suara.

Hasil RUPST Tahun Buku 2017

RUPST PT PP Presisi Tbk tahun buku 2017 dilaksanakan pada tanggal 5 April 2018 di Auditorium Lantai 1, Plaza PP – Wisma Subiyanto Jl. Letjen. TB Simatupang No.57, Pasar Rebo, Jakarta, dan dihadiri oleh 8.718.149.500 saham atau 85,27% dari keseluruhan saham. Para pemegang saham yang hadir dalam RUPST memiliki hak suara yang sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan pasal 14 ayat 2.

Risalah RUPST 2017 PT PP Presisi Tbk dipublikasikan melalui media cetak, yakni Kontan dan Bisnis Indonesia, serta media online, yakni di situs web resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs web milik Perseroan (www.pp-presisi.co.id). Risalah tersebut memuat rincian keputusan mata acara RUPST yang terdiri dari:

AGMS for 2017 Fiscal Year Procedure

- The Meeting was chaired by Mr. Muhammad Toha Fauzi as President Commissioner that was appointed by the Board of Commissioners' Meeting in accordance with POJK No. 32/2014.
- In discussion of AGMS agenda, shareholders were given the opportunity to ask questions in accordance with the Meeting agenda being discussed.
- Decision-making was carried out orally by raising hands and submitting voting card of shareholders with voting options of abstain, disagree, and the rest would be calculated as agree.

Decision-Making Mechanism

All resolutions of the Company's AGMS of 2017 fiscal year have been made through deliberation to reach consensus. If consensus is not reached, voting is undertaken.

Result of 2017 Fiscal Year AGMS

The AGMS of PT PP Presisi Tbk of 2017 fiscal year was convened on April 5, 2018 at Auditorium Lantai 1, Plaza PP – Wisma Subiyanto Jl. Letjen. TB Simatupang No.57, Pasar Rebo, Jakarta, and attended by 8,718,149,500 shares or 85.27% of the total shares of the Company. The shareholders attending the AGMS had valid voting rights in accordance with the Company's Articles of Association article 14 paragraph 2.

Minutes of 2017 AGMS of PT PP Presisi Tbk was published through printed media, namely Kontan and Bisnis Indonesia, and online media, namely on official website of Indonesia Stock Exchange (IDX) and website of the Company (www.pp-presisi.co.id). The minutes contains details on AGMS resolutions that consist of:

No	Mata Acara Rapat / Meeting Agenda	Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya / Number of Asking Shareholders	Hasil Perhitungan Suara / Voting Result			Keputusan RUPST / AGMS Resolution	Pelaksanaan Hasil Keputusan RUPS / Implementation of GMS Resolution
			Setuju / Agree	Tidak Setuju / Disagree	Abstain / Abstain		
1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan untuk Tahun Buku. / Approval of Annual Report of the Company, including Report of the Company's Activities, Supervisory Report of the Board of Commissioners, as well as validation of Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the Fiscal Year.	Tidak ada / None	8.718.149.500 saham atau 100% / 8,718,149,500 shares or 100 %	Tidak ada / None	Tidak ada / None	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017, yang terdiri dari Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan sesuai laporannya Nomor 024.03.01/LAI-PPRE/HGK.HO-2918 tanggal 9 Februari 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017. / Approved and validated Annual Report of the Company for 2017 Fiscal Year, consisting of Report of the Board of Directors, Supervisory of the Board of Commissioners, as well as Financial Statements of the Company for 2017 Fiscal Year that has been audited by Public Accounting Firm (KAP) of Hertanto, Grace, Karunawan, in accordance with report Number 024.03.01/LAI-PPRE/HGK.HO-2918 dated February 9, 2018, as well as granted full release and discharge to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervision during Fiscal Year ended on December 31, 2017, provided that such actions were not criminal acts and reflected in 2017 Fiscal Year Annual Report and Financial Statements of the Company.	Telah direalisasikan / Realized
2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 / Approval of the Use of Net Profit of the Company for Fiscal Year ended on December 31, 2017	Tidak ada / None	8.718.149.500 saham atau 100% / 8,718,149,500 shares or 100 %	Tidak ada / None	Tidak ada / None	<p>1. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2017 sebesar Rp188.300.612.373 (seratus delapan puluh delapan miliar-tiga ratus juta-enam ratus dua belas ribu-tiga ratus tujuh puluh tiga Rupiah) sebagai berikut: / Determined the Use of Net Profit for the Year Attributable to Owners of the Company for 2017 Fiscal Year amounting to Rp188,300,612,373 (one hundred eighty eight billion-three hundred million-six hundred twelve thousand-three hundred seventy three Rupiah) as follows:</p> <p>a. Sebesar Rp56.437.975.920 (lima puluh enam miliar-empat ratus tiga puluh tujuh juta-semilan ratus tujuh puluh lima ribu-semilan ratus dua puluh Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham. / Rp56,437,975,920 (fifty six billion-four hundred thirty seven million-nine hundred seventy five thousand-nine hundred twenty Rupiah) per share was distributed as cash dividends to shareholders.</p> <p>b. Sebesar Rp9.467.238.411 (sembilan miliar-empat ratus enam puluh tujuh juta-dua ratus tiga puluh delapan ribu-empat ratus sebelas Rupiah) atau lebih kurang 5% digunakan sebagai Cadangan Wajib dalam rangka memenuhi Pasal 70 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. / Rp9,467,238,411 (nine billion-four hundred sixty seven million-two hundred thirty eight thousand-four hundred eleven Rupiah) or approximately 5% was appropriated as Mandatory Reserve in order to comply with Article 70 Paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company.</p> <p>c. Sisa sebesar Rp122.395.398.042 (seratus dua puluh dua miliar-tiga ratus sembilan puluh lima juta-tiga ratus sembilan puluh delapan ribu-empat puluh dua Rupiah) atau 65% dibukukan sebagai Saldo Laba Ditahan. / The remaining Rp122,395,398,042 (one hundred twenty two billion-three hundred ninety five million-three hundred ninety eight thousand-forty two Rupiah) or 65% was booked as Retained Earning.</p> <p>2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun 2017 serta mengumumkannya dalam surat kabar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. / Granted authority and power to the Board of Directors of the Company with substitution rights to the Board of Directors of the Company to set schedule and procedure of cash dividends distribution of 2017 as well as announce it in newspaper in accordance with applicable provisions.</p>	Telah direalisasikan / Realized

No	Mata Acara Rapat / Meeting Agenda	Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya / Number of Asking Shareholders	Hasil Perhitungan Suara / Voting Result			Keputusan RUPST / AGMS Resolution	Pelaksanaan Hasil Keputusan RUPS / Implementation of GMS Resolution
			Setuju / Agree	Tidak Setuju / Disagree	Abstain / Abstain		
3	Persetujuan Tantiem Tahun Buku 2017, Gaji dan Honorarium berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2018. / Approval of Tantiem for 2017 Fiscal Year, Salary, and Honorarium as well as Facilities and other Allowances for the Board of Directors and the Board of Commissioners members of the Company for 2018 Fiscal Year.	Tidak ada / None	8.718.149.500 saham atau 100% / 8,718,149,500 shares or 100 %	Tidak ada / None	Tidak ada / None	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan Persetujuan secara tertulis dari Pemegang Saham Utama Perseroan dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2017, serta menetapkan Gaji dan Honorarium berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2018. / Granted authority and power to the Board of Commissioners of the Company with prior written Agreement from Majority Shareholders of the Company and by taking into account recommendation from Nomination and Remuneration Committee to determine Tantiem for 2017 Fiscal Year, as well as to determine Salary and Honorarium as well as Facilities and other Allowances for Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for 2018 Fiscal Year.	Telah direalisasikan / Realized
4	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018. / Appointment of Public Accounting Firm to audit Financial Statements of the Company for 2018 Fiscal Year.	Tidak ada / None	8.718.149.500 saham atau 100% / 8,718,149,500 shares or 100 %	Tidak ada / None	Tidak ada / None	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. / Granted authority and power to the Board of Commissioners to appoint Public Accountant to audit Financial Statements of the Company for 2018 Fiscal Year and granted authority to the Board of Commissioners to determine honorarium of the Public Accountant and other requirements for the appointment as well as to appoint Substitute Public Accountant in the event that the appointed Public Accountant due to any reason is unable to complete the audit of Financial Statements of the Company for 2018 Fiscal Year, provided that in appointing the Public Accountant, the Board of Commissioners is required to take heed of recommendations from the Audit Committee of the Company.	Telah direalisasikan / Realized
5	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. / Accountability Report of Realization of the Use of Proceeds from Public Offering.					Direksi Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan No. 3/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, telah melaporkan di dalam RUPST, penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham 24 November 2017, yang telah dilaporkan melalui Surat Perseroan No. 004/EXT/CS/PPRE//2018 tertanggal 15 Januari 2018. / In order to meet the Regulation No. 3/POJK.04/2015 concerning Report on Realization of the Use of Proceeds from Public Offering, the Board of Directors of the Company has presented the report on use of proceeds from Initial Public Offering on November 24, 2017 in AGMS, through the Company Letter No. 004/EXT/CS/PPRE//2018 dated January 15, 2018.	Telah direalisasikan / Realized

Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2017

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) atau *Recording Date* pada hari Selasa, 17 April 2018 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan pada tanggal 17 April 2018.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 9 Mei 2018. Bukti pembayaran dividen tunai

Procedure of Dividend Distribution in 2017 Fiscal Year

1. Cash dividends would be distributed to shareholders listed in Shareholder Register of the Company (DPS) or Recording Date on Tuesday, April 17, 2018 and/or share owners of the Company in Securities Sub Account in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on closing of stock trades of the Company on April 17, 2018.
2. For shareholders whose shares were listed in collective custody of KSEI, cash dividends payment would be conducted through KSEI and it would be distributed to Securities Company and or Custodian Bank on May 9, 2018. Proof of payment of cash dividends would be submitted

- akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
 - Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE), yakni PT Datindo Entrycom di alamat Hayam Wuruk No. 28 Lt. 2 Jakarta 10120 paling lambat hari Selasa, 17 April 2018 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
 - Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom sesuai peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
 - Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE mulai tanggal 25 Juni 2018.
- by KSEI to Shareholders through Securities Company and or Custodian Bank in which Shareholders opened their accounts. Meanwhile, for Shareholders whose shares were not listed in collective custody of KSEI, payment of cash dividends would be transferred to the accounts of Shareholders.
- Cash dividends would be taxed in accordance with prevailing taxing laws and regulations. The amount of tax charged would be borne by related Shareholders as well as deducted from total amount of cash dividends which was the right of related Shareholders.
 - For Shareholders that are Resident Taxpayers in the form of legal entities which have not included Taxpayer Identification Number (NPWP) are requested to submit NPWP to KSEI or Share Registrar (BAE), namely PT Datindo Entrycom with the address at Hayam Wuruk No. 28 at 2nd Floor, Jakarta, 10120 at the latest on Tuesday, April 17, 2018 at 16.00 Indonesia Western Time. Without the inclusion of NPWP, cash dividends paid to Domestic Taxpayers would be charged with higher Income Tax at 100% of normal tariff.
 - For Shareholders who are Non-Resident Taxpayers, their tax deduction will use the tariff based on Avoidance of Double Taxation Agreement (DTA) which shall fulfill requirements of the Regulation of the Director General of Taxation No. PER-10/PJ/2017 concerning Procedure of Implementation of Avoidance of Double Taxation Agreement as well as submission of Form DGT-1 or DGT-2 that has been legalized by Tax Service Office of Publicly Listed Companies to KSEI or BAE PT Datindo Entrycom in accordance with regulations and provisions of KSEI. Without the aforementioned documents, cash dividends that would be paid would be charged with article 26 of Income Tax at 20%.
 - For Shareholders whose shares were listed in collective custody of KSEI, proof of tax deduction of dividends could be taken at Securities Company and/or Custodian Bank in which the Shareholders opened their securities accounts and Shareholders of Non-Scriptless Shares could be taken at BAE dated June 25, 2018.

Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya Dan Realisasinya

Pada tahun 2017, Perseroan menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPST pada tanggal 5 Mei 2017 dan 1 (satu) kali RUPS Luar Biasa pada tanggal 14 Agustus 2017 untuk membahas agenda yang berbeda. Uraian mata acara RUPS Tahunan dimuat dalam tabel di bawah ini:

No	Mata Acara / Agenda	Tanggal Pelaksanaan / Date of Implementation	Status / Status
1	Perubahan nama PT Pembangunan Perumahan Peralatan Konstruksi Disingkat PT PP Alat menjadi PT Pembangunan Perumahan Presisi Disingkat PP Presisi / Change of name of PT Pembangunan Perumahan Peralatan Konstruksi abbreviated as PT PP Alat into PT Pembangunan Perumahan Presisi abbreviated as PP Presisi	5 Mei 2017 / May 5, 2017	Sudah Terlaksana / Implemented

Resolutions of Previous Year GMS and Realizations

In 2017, the Company held 1 (one) AGMS on May 5, 2017 and 1 (one) Extraordinary GMS on August 14, 2017 to discuss different agenda. Description on Annual GMS agenda is in the following table:

No	Mata Acara / Agenda	Tanggal Pelaksanaan / Date of Implementation	Status / Status
2	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan. Pemberian kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan IPO. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri mengenai realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan IPO. Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. <ul style="list-style-type: none"> Amendment to the entire Articles of Association Granting of authority to the Board of Directors of the Company to conduct all actions required in relation to the implementation of IPO Granting of authority to the Board of Commissioners of the Company to state in a separate Notary Deed regarding the realization of total shares issued and to carry out all actions required in relation to the implementation of IPO Change in the composition of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company. 	14 Agustus 2017 / August 14, 2017	Sudah Terlaksana / Implemented

DEWAN KOMISARIS

Komposisi dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris PP Presisi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 1 (satu) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang Komisaris Independen. Satu periode masa jabatan Dewan Komisaris terdiri dari 5 (lima) tahun masa jabatan. Namun, hal tersebut tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir apabila tidak lagi memenuhi kriteria dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan.

THE BOARD OF COMMISSIONERS

Composition and Term of Office of the Board of Commissioners

Composition of the Board of Commissioners of PP Presisi consists of 1 (one) President Commissioner, 1 (one) Commissioner, and 1 (one) Independent Commissioner. One period of the Board of Commissioners' term of office consists of 5 (five) years. However, this does not dismiss the right of GMS to dismiss the Board of Commissioners prior to the end of their term of office when the Board of Commissioners no longer fulfills the criteria by taking into account Articles of Association of the Company.

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Diangkat / Appointed	Berakhir / End of Tenure
1.	Ir.M.Toha Fauzi, MT	Komisaris Utama / President Commissioner	Keputusan RUPSLB yang tercantum dalam Akta No. 27 / Resolution of EGMS stipulated in Deed No. 27	14 Agustus 2017 / August 14, 2017	14 Agustus 2022 / August 14, 2022
2.	Ir. Nawang Sri Retno Kartiko, M.EngM	Komisaris / Commissioner	Keputusan RUPSLB yang tercantum dalam Akta No. 27 / Resolution of EGMS stipulated in Deed No. 27	14 Agustus 2017 / August 14, 2017	14 Agustus 2022 / August 14, 2022
3.	Ir. Ketut Darmawan	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Keputusan RUPSLB yang tercantum dalam Akta No. 27 / Resolution of EGMS stipulated in Deed No. 27	14 Agustus 2017 / August 14, 2017	14 Agustus 2022 / August 14, 2022

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- Melakukan pengawasan dan bertanggung-jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi termasuk Rencana Jangka Panjang Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan- ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan untuk menerapkan GCG secara konsisten dan memiliki moral tinggi dalam berusaha serta bertindak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPS dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

- Conducting supervision and responsibility on supervision on management policy, the course of management in general, both concerning the Company and business of the Company, and providing advices to the Board of Directors, including on the Company's Long-Term Plan, Implementation of the Company's Work Plan and Budget, provisions in Articles of Association and GMS Resolutions, as well as prevailing laws and regulations.
- Providing advices to the Board of Directors in running the Company to implement GCG consistently and to have high moral in business as well as to act in accordance with provisions in Articles of Association and prevailing laws and regulations.
- Performing duties, authorities, and responsibilities according to provisions in Articles of Association of the Company, GMS resolutions, and provisions in laws and regulations as well

wajib melaksanakan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban serta kewajaran.

4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
6. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
7. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.

Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan.
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan.
3. Meminta penjelasan tentang segala hal yang menyangkut Perseroan kepada Direksi.
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
5. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
6. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
7. Wewenang sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

Piagam Dewan Komisaris

Guna mengukuhkan kredibilitas Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kinerja Direksi, pengangkatan anggota serta penyelenggaraan kinerja Dewan Komisaris diatur dalam sebuah *charter* sebagai pedoman kerja Dewan Komisaris. Piagam Dewan Komisaris mengacu kepada Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sebagai dasar hukum perundang-undangan.

Kriteria Penentuan Dewan Komisaris

1. Memiliki akhlak, moral, dan integritas yang didukung oleh itikad yang baik dalam menjalankan tanggung jawab.
2. Memiliki kompetensi melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat, Dewan Komisaris:
 - (i) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - (ii) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima RUPS atau pernah tidak memberikan

as obligation to implement transparency, independency, accountability, responsibility and fairness principles.

4. In certain conditions, the Board of Commissioners is required to hold annual GMS and other GMS in accordance with their authority as stipulated in laws and regulations as well as Articles of Association.
5. The Board of Commissioners members are required to perform their duties and responsibilities with good faith, full of responsibility, and prudence.
6. The Board of Commissioners is required to establish Audit Committee and other committees to support effectiveness of implementation of their duties and responsibilities.
7. The Board of Commissioners is required to evaluate performance of committees that assist implementation of their duties and responsibilities at the end of every fiscal year.

Rights and Authorities of the Board of Commissioners

1. Viewing books, letters, and other documents, checking cash for verification purposes and others, securities, and checking the Company's assets.
2. Entering yard, building, and office used by the Company.
3. Requesting explanation from the Board of Directors regarding any issues related to the Company.
4. Being aware of all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors.
5. Having the authority to temporarily dismiss members of the Board of Directors by explaining the reason.
6. Managing the Company in certain conditions for certain period.
7. Having authorities as stipulated based on articles of association or GMS resolution.

The Board of Commissioners' Charter

In order to confirm the credibility of the Board of Commissioners in implementation of their supervisory function on the performance of the Board of Directors, appointment of members and performance of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners has a charter that serves as work guidelines of the Board of Commissioners. The Board of Commissioners' Charter refers to the Regulation of OJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuer or Public Company as legal basis of laws and regulations.

Selection Criteria of the Board of Commissioners

1. Having good characters, morals, and integrity in performing responsibilities.
2. Having competence in performing legal actions.
3. Within 5 (five) years prior to appointment and during the term of office:
 - (i) never held an Annual GMS;
 - (ii) accountability as a member of the Board of Directors and / or a member of the Board of Commissioners has not been accepted by the GMS or has not been granted

pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

(iii) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

4. Memiliki keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan bidang yang dibutuhkan Perseroan.
5. Berkomitmen mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian dilaksanakan melalui RUPS apabila tidak lagi memenuhi kriteria seperti yang disebutkan di atas.
7. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris harus mempertimbangkan rekomendasi dari anggota Dewan Komisaris lain.
8. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dalam 1 (satu) masa periode jabatan dan diberhentikan dalam RUPS tahun ke-5 (kelima) dengan memperhatikan peraturan perundangan Pasar Modal, tetapi tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatan selesai dengan alasan tertentu dan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan.
9. Anggota Dewan Komisaris dapat dipilih kembali melalui RUPS.
10. RUPS memiliki hak untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu apabila:
 - a. Anggota Dewan Komisaris tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris, antara lain melakukan tindakan atau perilaku yang merugikan Perseroan dan alasan lainnya;
 - b. Anggota Dewan Komisaris memiliki kesempatan untuk membela diri dalam RUPS; dan
 - c. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS.
11. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir dengan persyaratan:
 - Menyertakan pemberitahuan tertulis dengan alasannya kepada Perseroan;
 - Keputusan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris ditentukan melalui RUPS paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterima surat pengunduran diri;
 - Keputusan permohonan pengunduran diri yang telah ditetapkan oleh RUPS wajib dilaporkan kepada masyarakat dan pihak OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja sebagai langkah keterbukaan informasi;
 - Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri wajib menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku sebelum masa pengunduran diri efektif berlaku; dan
 - Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris

responsibility as a member of the Board of Directors and / or members of the Board of Commissioners to the GMS; and

(iii) Never caused a company obtaining license, approval or registration from OJK to not fulfill obligation to submit annual report and/or financial statements to OJK.

4. Having skills and knowledge in accordance with sectors required by the Company.
5. Having the commitment to comply with prevailing laws and regulations.
6. Mechanism of appointment and dismissal is carried out through the GMS when the Board of Commissioners member no longer fulfills criteria mentioned previously.
7. Appointment and dismissal of the Board of Commissioners member shall take into account recommendation from other members of the Board of Commissioners.
8. Term of office of the Board of Commissioners is 5 (five) years in 1 (one) period and dismissed in the GMS of the 5th (fifth) year by taking into account laws and regulations of Capital Market without dismissing the right of GMS to dismiss members of the Board of Commissioners prior to the end of term of office due to a particular reason and by taking heed to the Company's Articles of Association.
9. Members of the Board of Commissioners can be reappointed through the GMS.
10. The GMS has the right to dismiss a member of the Board of Commissioners at any time in the event of:
 - a. Member of the Board of Commissioners no longer fulfills the criteria and requirements as a member of the Board of Commissioners, among others by committing action or behavior that harms the Company and other reasons;
 - b. Member of the Board of Commissioners has the opportunity to defend himself/herself in the GMS; and
 - c. Dismissal of a member of the Board of Commissioners shall be effective since the date set in the GMS.
11. Member of the Board of Commissioners is entitled to resign prior to end of term of office with the requirements as follows:
 - Submitting notification of the reason in writing to the Company;
 - Decision on resignation application of a member of the Board of Commissioners is determined through GMS within 90 (ninety) calendar days subsequent to the receipt of resignation letter;
 - Decision on resignation application which has been determined by the GMS shall be reported to the public and OJK within 2 (two) business days as part of information transparency;
 - Member of the Board of Commissioners that submits the resignation shall complete duties and responsibilities in accordance with Articles of Association and prevailing laws and regulations prior to effective date of resignation; and
 - Release from responsibilities of the resigning member of

yang mengundurkan diri berlaku efektif setelah tanggal yang ditetapkan dalam RUPS.

12. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
 - Meninggal dunia;
 - Berada di bawah pengampunan sesuai putusan pengadilan; dan
 - Tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
13. Apabila komposisi Dewan Komisaris kosong sehingga menyebabkan jumlah anggota kurang dari 2 (dua) orang, maka Perseroan wajib mengangkat anggota Dewan Komisaris baru melalui RUPS paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
14. Apabila terjadi kekosongan jabatan Komisaris Utama, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk melalui Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan tugas dan tanggung jawab serta memiliki wewenang sebagai Komisaris Utama sebelum penggantinya diangkat.
15. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan dan/atau menyalahgunakan wewenang sebagai Dewan Komisaris untuk kepentingan pribadi.
16. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan apabila dilarang atau ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku, terutama peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

Prosedur Penunjukan/Pemilihan dan Pemberhentian/Pengunduran Diri Dewan Komisaris

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik. Mekanisme penunjukan/pemilihan serta pemberhentian Dewan Komisaris wajib diselenggarakan melalui RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari anggota Dewan Komisaris lainnya atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat memiliki 1 (satu) periode yang terdiri dari 5 (lima) tahun masa jabatan dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima). Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan dengan pertimbangan aspek kompetensi, integritas, dan reputasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Dalam kasus pemberhentian anggota Dewan Komisaris, wajib disertai dengan alasan pemberhentian, pemberian kesempatan untuk membela diri, dan keputusan pemberhentian setelah yang bersangkutan membela diri.

Program Orientasi bagi Dewan Komisaris Baru

PP Presisi menyadari bahwa pemahaman Dewan Komisaris terhadap Perseroan sangat penting bagi Dewan Komisaris

the Board of Commissioners is effective after the date set in the GMS.

12. Term of office of the Board of Commissioners members shall end when the member of the Board of Commissioners:
 - Passed away;
 - Stated as incapable under a court ruling; and
 - No longer fulfills criteria and requirements in accordance with applicable laws and regulations in Capital Market.
13. In the event that composition of the Board of Commissioners is vacant which causes the number of members is less than 2 (two) people, the Company shall appoint a new member of the Board of Commissioners through GMS within 90 (ninety) calendar days to fulfill the vacant position by taking into account the Articles of Association and prevailing laws and regulations in Capital Market.
14. In the event of the President Commissioner position is vacant, one of the Board of Commissioners members appointed through the Board of Commissioners Meeting will perform duties and responsibilities as well as to have authority as the President Commissioner prior to appointment of the substitute.
15. Member of the Board of Commissioners is prohibited from taking benefit and/or abusing authority as member of the Board of Commissioners for personal interest.
16. Member of the Board of Commissioners is prohibited from having concurrent positions when it is prohibited or stipulated in prevailing laws and regulations, particularly in Capital Market.

Procedure of Appointment/Selection and Dismissal/Resignation of the Board of Commissioners

Appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners are carried out based on principles of professionalism and good corporate governance. Mechanism of appointment/selection as well as dismissal of the Board of Commissioners is performed through the GMS in accordance with Articles of Association of the Company by taking into account recommendations from other members of the Board of Commissioners or the committee that performs nomination function. Appointed member of the Board of Commissioners has 1 (one) period that consists of 5 (five) years of term of office that ends during the closing of the 5th (fifth) Annual GMS. Member of the Board of Commissioners is appointed and dismissed with consideration of necessary competence, integrity, and reputation aspects in accordance with the needs of the Company. In the event of the dismissal of the Board of Commissioners member, reason for dismissal, opportunity to defend himself/herself, and decision of dismissal must be included after the related party defends himself/herself.

Orientation Program for the New Board of Commissioners

PP Presisi realizes that the Board of Commissioners' understanding on the Company is very important for the

untuk menjalankan fungsi pengawasan, karenanya Sekretaris Perusahaan melaksanakan program pengenalan bagi anggota baru Dewan Komisaris. Tujuan Program Pengenalan Perusahaan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan gambaran atas aktivitas bisnis, rencana perusahaan ke depan, pedoman kerja dan hal lainnya yang menjadi tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris.

Program Orientasi bagi Dewan Komisaris Baru

Setiap anggota Dewan Komisaris baru yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai Perseroan dan penanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perseroan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.

1. Materi untuk program pengenalan Perseroan meliputi:
 - a. Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)
 - b. Visi dan Misi Perusahaan
 - c. Budaya Perusahaan
 - d. Gambaran Umum Perseroan
 - e. Struktur Organisasi dan *Job Description*
 - f. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris dan Direksi
 - g. Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP)
 - h. Rencana Kerja Anggaran Perseroan (Target Bisnis)
 - i. Audit Internal dan Audit Eksternal
 - j. Komite Audit
 - k. Sistem-Sistem yang berlaku di Perusahaan
2. Program pengenalan Perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perseroan dan pengkajian dokumen.

Sepanjang tahun 2018, Sekretaris Perusahaan tidak melaksanakan program orientasi bagi Dewan Komisaris baru. Hal ini disebabkan karena tidak ada anggota Dewan Komisaris yang baru dilantik sepanjang tahun buku.

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun anggota Direksi sehingga bebas dari hubungan bisnis serta tidak mempengaruhi independensinya dalam menjalankan fungsi pengawasan. Per tanggal 31 Desember 2018, Komisaris Independen PP Presisi dijabat oleh Ir. Ketut Darmawan berdasarkan Akta No. 27 tanggal 14 Agustus 2017.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Dalam menjaga independensi Komisaris Independen dalam melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap Perseroan, Perseroan menyusun kriteria penentuan Komisaris Independen antara lain:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai

Board of Commissioners to perform their supervisory function. Therefore, the Corporate Secretary conducts an orientation program for new members of the Board of Commissioners. The objective of the Company's Orientation Program to the Board of Commissioners is to provide an overview of business activities, future corporate plans, work guidelines and other matters under the supervision of the Board of Commissioners.

Orientation Program for the New Board of Commissioners

Every new member of the Board of Commissioners who is appointed for the first time is required to be provided with orientation program concerning the Company and person in charge for the orientation program is the Corporate Secretary or any person carrying out the function of the Corporate Secretary

1. Materials for orientation program regarding the Company include:
 - a. Implementation of Principles of Good Corporate Governance (GCG)
 - b. Vision and Mission of the Company
 - c. Corporate Culture
 - d. General Description of the Company
 - e. Organization Structure and Job Description
 - f. Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors
 - g. Long-Term Plan of the Company (RJPP)
 - h. Work Plan and Budget (Target Bisnis)
 - i. Internal Audit and External Audit
 - j. Audit Committee
 - k. Applicable systems in the Company
2. The Company's orientation program can be in the form of presentation, meeting, visit to the Company, and document review.

In 2018, the Corporate Secretary did not carry out orientation program for new member of the Board of Commissioners. This was due to the fact that there was no new member of the Board of Commissioners appointed in the fiscal year.

INDEPENDENT COMMISSIONER

Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners that is unaffiliated with other members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors which makes the position is free from business relations as well as does not affect independency in performing supervisory function. As of December 31, 2018, Independent Commissioner of PP Presisi is held by Ir. Ketut Darmawan, pursuant to Deed No. 27 dated August 14, 2017.

Selection Criteria of Independent Commissioner

In maintaining independency of the Independent Commissioner in carrying out supervisory function on the Company, selection criteria of Independent Commissioner has been prepared, among others:

1. Not a person working or having authority and responsibility

- wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut.

Independensi Komisaris Independen

Guna menjaga independensi Komisaris Independen, Komisaris Independen bukan merupakan orang yang:

- a. memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin, mengelola, dan mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen;
- b. mempunyai saham langsung maupun tidak langsung dalam Perseroan;
- c. memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun para pemegang saham; dan
- d. mempunyai hubungan usaha dengan Perseroan.

Informasi Rangkap Jabatan

Dalam Anggaran Dasar Perusahaan pasal 18 ayat (22) menyebutkan bahwa Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap apabila dilarang dan/atau ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan pasar modal atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris memiliki keberagaman komposisi, baik dari segi usia, latar belakang pendidikan, maupun riwayat pekerjaan. Hal ini ditujukan untuk memberikan fleksibilitas serta keterampilan dalam menghadapi berbagai tantangan yang beragam di lapangan.

Nama / Name	Jabatan / Position	Usia / Age	Jenis Kelamin / Gender	Latar Belakang Pendidikan / Education
Ir. M. Toha Fauzi, M.T	Komisaris Utama / President Commissioner	52 tahun / 52 years old	Laki-laki / Male	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta / Bachelor's Degree in Civil Engineering from Universitas Gadjah Mada Yogyakarta • Magister Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung / Master's Degree in Civil Engineering from Institut Teknologi Bandung
Ir. Nawang Sri Retno Kartiko, M.EngM	Komisaris / Commissioner	54 tahun / 54 years old	Perempuan / Female	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Teknik Arsitektur Universitas Gadjah Mada Yogyakarta / Bachelor's Degree in Architectural Engineering from Universitas Gadjah Mada Yogyakarta • Master of Engineering Management Melbourne University

to plan, lead, control, or supervise the Company's activities in the last 6 (six) months, except for reappointment as Independent Commissioner of the Company in subsequent period;

2. Not having any share of the Company directly or indirectly;
3. Not having any Affiliation with the Company, the Board of Commissioners members, the Board of Directors members or majority shareholders of the Company; and
4. Not having any direct or indirect business relationship related to the Company's business activities.

Independency of Independent Commissioner

In order to maintain independency of Independent Commissioner, the person who holds the position does not:

- a. having authority and responsibility to lead, manage, and control the Company's activities within the last 6 (six) months, with the exception of reappointment as Independent Commissioner;
- b. having direct or indirect share in the Company;
- c. having affiliations with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or shareholders; and
- d. having business relations with the Company.

Information on Concurrent Positions

Article 18 paragraph (22) of the Company's Articles of Association states that members of the Board of Commissioners are prohibited to hold concurrent positions when it is prohibited and/or stipulated in prevailing laws and regulations, particularly in capital market regulations or other positions that may cause conflict of interest.

Policy on Composition Diversity of the Board of Commissioners

The composition of the Board of Commissioners has diversity in terms of age, education, and job history. This is aimed to provide flexibility as well as skills in facing various diverse challenges on the field

Nama / Name	Jabatan / Position	Usia / Age	Jenis Kelamin / Gender	Latar Belakang Pendidikan / Education
Ir. Ketut Darmawan	Komisaris Independen / Independent Commissioner	59 tahun / 59 years old	Laki-laki / Male	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Teknik Sipil di Institut Teknologi Bandung / Bachelor's Degree in Civil Engineering from Institut Teknologi Bandung Pendidikan luar negeri di bidang <i>Develop Breakthrough Business Strategy</i> di Swinburne University of Technology Melbourne / Foreign education in <i>Develop Breakthrough Business Strategy</i> in Swinburne University of Technology Melbourne

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Tahun 2018

Hingga 31 Desember 2018, Perseroan mencatat dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan Dewan Komisaris. Uraian mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dicantumkan pada tabel berikut.

Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners in 2018

As of December 31, 2018, the Company recorded and evaluated implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners. Description on implementation of duties and responsibilities is in the following table:

No	Uraian Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab / Description on Implementation of Duties and Responsibilities	Status / Status
1.	Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan yang dilakukan Direksi, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) serta ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. / Conducting supervision and being responsible for the supervision on the policy and implementation of management of the Company conducted by the Board of Directors, both regarding the Company and the Company's business, including the implementation of Long-Term Plan (RJPP) as well as provisions of Articles of Association, resolutions of GMS and the prevailing laws and regulations.	Sudah Terlaksana / Implemented
2.	Melakukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPS dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. / Conducting duties, authority, and responsibility in accordance with the provisions of Company's Articles of Association, GMS resolutions and provisions of the laws and regulations, and being obliged to implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independency, accountability, responsibility and fairness.	Sudah Terlaksana / Implemented
3.	Memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perusahaan untuk menerapkan GCG secara konsisten dan memiliki moral tinggi dalam berusaha serta bertindak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. / Providing advice to the Board of Directors in running the Company's management to implement GCG consistently, to have high moral values in conducting business, and to act according to the provisions of Articles of Association and the prevailing laws and regulations.	Sudah Terlaksana / Implemented

Keputusan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris menerbitkan 1 (satu) surat keputusan, yaitu Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/SK/PPRE-DEKOM/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk.

Decisions of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners issued 1 (one) decree in 2018, namely Decree of the Board of Commissioners No. 01/SK/PPRE-DEKOM/2018 dated February 27, 2018 on Distribution of Duty for Members of the Board of Commissioners of PT PP Presisi Tbk.

Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan rapat secara berkala guna membahas hal-hal terkait pengawasan kinerja Perseroan. Sepanjang tahun 2018 menyelenggarakan rapat rutin berkala sebanyak 4 (empat) pertemuan. Uraian mengenai tingkat kehadiran dirinci dalam tabel di bawah ini:

The Board of Commissioners Meetings

The Board of Commissioners always holds meeting periodically in order to discuss matters related to supervision on the Company's performance. In 2018, the Board of Commissioners held 4 (four) meetings. Description on attendance rate is detailed in the following table:

Nama / Name	Posisi / Position	Jumlah Rapat / Number of Meeting	Jumlah Kehadiran / Attendance Rate	Persentase Kehadiran / Attendance Percentage
Ir. M. Toha Fauzi, MT	Komisaris Utama / President Commissioner	4	4	100%
Ir. Nawang Sri Retno Kartiko, M.EngM	Komisaris / Commissioner	4	4	100%
Ir. Ketut Darmawan	Komisaris Independen / Independent Commissioner	4	4	100%

Agenda Rapat Dewan Komisaris

Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris memiliki agenda masing-masing di setiap pertemuannya. Agenda rapat Dewan Komisaris sepanjang tahun 2018 meliputi:

Agenda of the Board of Commissioners Meetings

Implementation of every meeting of the Board of Commissioners has its own agenda. Meeting agenda of the Board of Commissioners throughout 2018 include:

No.	Tanggal / Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participant
1.	17 Januari 2018 / January 17, 2018	Pembahasan mengenai : / Discussion <ul style="list-style-type: none"> Kinerja keuangan Perseroan. / Financial Statements of the Company Pembahasan penjajakan proyek <i>Dredging</i> dengan Rukindo. / Exploration of dredging project with Rukindo Rencana Kontraktor Tambang. / Mining Contractor Plan Target Pencapaian Kinerja 2018. / 2018 Performance Target SDM <i>Capacity</i>. / HC Capacity Pembangunan Presisi Tower. / Presisi Tower Development Rencana akuisisi beberapa perusahaan. / Plan of acquisition of several companies Prosedur tender. / Tender procedure Peningkatan <i>overhead</i>. / Overhead increase Management Risiko, <i>History</i> Akuisisi, Penerapan GCG, Pedoman GCG, <i>Charter</i> Dewan Komisaris dan Direksi, dan <i>Work Instruction</i> pada Anak Perusahaan. / Risk Management, Acquisition history, GCG Implementation, GCG Code, Board of Commissioners and Board of Directors Charter, and Work Instruction in Subsidiary. 	1. Ir. M. Toha Fauzi, MT 2. Ir. Nawang Sri Retno Kartiko, M.EngM 3. Ir. Ketut Darmawan
2.	12 April 2018 / April 12, 2018	Pembahasan mengenai Pemasaran Kuartal I tahun 2018 dan Prognosa untuk tahun buku 2018. / Discussion on Marketing for Q1 2018 and Prognosis for 2018 fiscal year.	1. Ir. M. Toha Fauzi, MT 2. Ir. Nawang Sri Retno Kartiko, M.EngM 3. Ir. Ketut Darmawan
3.	12 Juli 2018 / July 12, 2018	Pembahasan mengenai : / Discussion <ul style="list-style-type: none"> Kinerja keuangan Perseroan. / Financial Statements of the Company Pembahasan penjajakan proyek <i>Dredging</i> dengan Rukindo. / Exploration of dredging project with Rukindo Rencana Kontraktor Tambang. / Mining Contractor Plan Target Pencapaian Kinerja 2018. / 2018 Performance Target SDM <i>Capacity</i>. / HC Capacity Pembangunan Presisi Tower. / Presisi Tower Development Rencana akuisisi beberapa perusahaan. / Plan of acquisition of several companies Prosedur tender. / Tender procedure Peningkatan <i>overhead</i>. / Overhead increase Management Risiko, <i>History</i> Akuisisi, Penerapan GCG, Pedoman GCG, <i>Charter</i> Dewan Komisaris dan Direksi, dan <i>Work Instruction</i> pada Anak Perusahaan. / Risk Management, Acquisition history, GCG Implementation, GCG Code, Board of Commissioners and Board of Directors Charter, and Work Instruction in Subsidiary. 	1. Ir. M. Toha Fauzi, MT 2. Ir. Nawang Sri Retno Kartiko, M.EngM 3. Ir. Ketut Darmawan
4.	25 Oktober 2018 / October 25, 2018	Pembahasan mengenai : / Discussion on : <ul style="list-style-type: none"> Kinerja Perusahaan triwulan 1, 2, 3, dan 4. / Company's Performance in quarter 1, 2, 3, and 4 Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2019. / 2019 Company Work Plan and Budget (RKAP) Rencana Jangka Panjang Perusahaan (2019-2023). / Company Long-Term Plan (2019-2023) Aksi Korporasi dan Pengembangan Bisnis / Corporate Action and Business Development 	1. Ir. M. Toha Fauzi, MT 2. Ir. Nawang Sri Retno Kartiko, M.EngM 3. Ir. Ketut Darmawan

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menilai bahwa Komite di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit maupun Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan kerjanya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing komite.

Kedua komite tersebut senantiasa menjaga koordinasi yang baik dengan Dewan Komisaris melalui rapat formal. Di samping itu, kedua komite tersebut aktif dalam memberikan

Performance Assessment of Committees under the Board of Commissioners

The Board of Commissioners considers that the Committees under the Board of Commissioners, namely the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee, have carried out their performance in accordance with the duties and responsibilities of each committee.

Both committees always maintain good coordination with the Board of Commissioners through formal meetings. In addition, the two committees are active in providing recommendations

rekomendasi dan saran yang berguna bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan maupun Direksi dalam menjalankan proses pengelolaan bisnis.

DIREKSI

Komposisi dan Masa Jabatan Direksi

Komposisi Direksi PP Presisi adalah 4 (empat) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Direksi Utama, 1 (satu) orang Direktur Keuangan, 1 (satu) orang Direktur Operasi, dan 1 (satu) orang Direktur Independen. Satu periode masa jabatan Direksi terdiri dari 5 (lima) tahun masa jabatan, tetapi hal tersebut tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan Direksi sebelum masa jabatannya berakhir apabila tidak lagi memenuhi kriteria dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan.

and suggestions that are useful for the Board of Commissioners in carrying out their supervisory duties and the Board of Directors in carrying out the business management process.

THE BOARD OF DIRECTORS

Composition and Term of Office of the Board of Directors

Composition of the Board of Directors of PP Presisi consists of 4 (four) people, namely 1 (one) President Director, 1 (one) Director of Finance, 1 (one) Director of Operation, and 1 (one) Independent Director. One period of term of office of the Board of Directors consists of 5 (five) years of service. Nevertheless, this does not dismiss the rights of the GMS to dismiss the Board of Directors prior to end of term of office when the Board of Directors no longer fulfills criteria by taking into account Articles of Association of the Company.

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Diangkat / Appointed	Berakhir / End of Tenure
1.	Ir. Iswanto Amperawan	Direktur Utama / President Director	Keputusan RUPSLB yang tercantum dalam Akta No. 27 / Resolution of EGMS stipulated in Deed No. 27	14 Agustus 2017 / August 14, 2017	14 Agustus 2022 / August 14, 2022
2.	Benny Pidakso, SE, MM	Direktur Keuangan / Director of Finance	Keputusan RUPSLB yang tercantum dalam Akta No. 27 / Resolution of EGMS stipulated in Deed No. 27	14 Agustus 2017 / August 14, 2017	14 Agustus 2022 / August 14, 2022
3.	Ir. Hasanin Ade Putra, MT	Direktur Operasi / Director of Operations	Keputusan RUPSLB yang tercantum dalam Akta No. 27 / Resolution of EGMS stipulated in Deed No. 27	14 Agustus 2017 / August 14, 2017	14 Agustus 2022 / August 14, 2022
4.	Ir. Arief Subyandono	Direktur Independen / Independent Director	Keputusan RUPSLB yang tercantum dalam Akta No. 27 / Resolution of EGMS stipulated in Deed No. 27	14 Agustus 2017 / August 14, 2017	14 Agustus 2022 / August 14, 2022

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Keputusan RUPS. Direksi mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- Mempimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan;
- Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan;
- Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
- Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan;
- Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya;
- Menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten;
- Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

The Board of Directors shall be responsible for carrying out all actions related to the Company's management for the interest of the Company in accordance with purposes and objectives of the Company and representing the Company both inside and outside of the Court on all matters and events with limitations regulated in laws and regulations, the Company's Articles of Association, and/or GMS Resolutions. The Board of Directors has the following responsibilities:

- Leading and managing the Company in accordance with purposes and objectives of the Company and always striving to improve the Company's efficiency and effectiveness;
- Controlling, maintaining, and managing the Company's assets;
- Having full responsibility in performing their duties for the Company's interest in realizing its purposes and objectives;
- Having good faith and full of responsibility in carrying out their duties for the Company's interest and business by upholding laws and regulations;
- Having joint responsibility on the Company's loss due to mistake or negligence of the Board of Directors member in performing duties;
- Implementing *Good Corporate Governance* in a consistent manner;
- Not being responsible for the Company's loss when it is can

kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:

- i. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - ii. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perseroan Publik;
 - iii. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - iv. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- h. Melaksanakan kewajiban lainnya berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Hak dan Wewenang Direksi

1. Menetapkan kebijaksanaan dalam memimpin dan mengurus Perseroan.
2. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan pengaturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
4. Para anggota Direksi diberi gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya, termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
5. Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
6. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - i. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - ii. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
7. Apabila Direksi mengalami keadaan sebagaimana dimaksud pada no. 6, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - i. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan ;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Ruang Lingkup dan Tugas Masing-masing Direksi

Di samping menjalankan tugas dan tanggung jawab Direksi secara umum, masing-masing Direksi PP Presisi juga memiliki ruang lingkup pekerjaan dan tugas, antara lain sebagai berikut:

be proven that:

- i. The loss is not due to their mistake or negligence;
 - ii. Have conducted management in good faith, full of responsibility, and prudence for interest of and in accordance with purposes and objectives of Issuer or Public Company;
 - iii. Having no direct or indirect conflict of interest on management action causing the loss; and
 - iv. Have taken preventive action for creation or continuation of such loss.
- h. Implementing other obligations based on prevailing laws and regulations.

Rights and Authorities of the Board of Directors

1. Formulating policies in leading and managing the Company.
2. Regulating provisions on employment of the Company, including determination of salary, pension or old-age savings and other income for the Company's employees based on laws and regulations.
3. Appointing and dismissing the Company's employees based on regulation of the Company's employment as well as laws and regulations.
4. Members of the Board of Directors are provided with salary and other allowances, including post-employment allowance determined by the GMS and such authority is transferred to the Board of Commissioners by the GMS.
5. Having the right to represent the Company inside and outside of the court.
6. A member of the Board of Directors has no right to represent the Company when:
 - i. There is a case in the court between the Company and related member of the Board of Directors; and
 - ii. Related member of the Board of Directors has conflict of interest with the Company.
7. In the event of situation mentioned in point number 6, the one who has the right to represent the Company is:
 - i. Other member of the Board of Directors that has no conflict of interest with the Company;
 - ii. Board of Commissioners, in the event of all members of the Board of Directors have conflict of interest with the Company; or
 - iii. Other party appointed by the GMS in the event of all members of the board of Directors or the Board of Commissioners have conflict of interest with the Company.

Scope of Duties of the Board of Directors

In addition to general duties and responsibilities of the Board of Directors, each Director of PP Presisi also has their own scope of work and duty, among others:

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tugas / Scope of Work and Duty
1.	Ir. Iswanto Amperawan	Direktur Utama / President Director	<p>a. Penanggung jawab utama pengelolaan seluruh sumber daya sehingga efektif dan efisien guna tercapainya Visi dan Misi Perseroan. / In charge of management of all resources to be effective and efficient to achieve Vision and Mission of the Company.</p> <p>b. Penanggung jawab RKAP Tahunan dan RJPP lima tahunan perusahaan. / In charge of Annual RKAP and five yearly RJPP of the Company.</p> <p>c. Penanggung jawab utama dan pengelola sumber daya pada Struktur Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawas Internal sehingga efektif dan efisien guna mencapai visi dan misi Perseroan. / In charge of management of resources in Corporate Secretary Structure and Internal Audit Unit to be effective and efficient to achieve Vision and Mission of the Company.</p> <p>d. Membuat keputusan dan kebijaksanaan serta mempunyai hak prerogatif dalam segala hal yang berkaitan dengan seluruh aspek Perseroan. / Making decisions and policies, as well as having prerogative right in every matter related to all of the Company's aspects.</p> <p>e. Mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian-perjanjian untuk keperluan eksternal Perseroan. / Representing the Company, making agreements for the Company's external needs.</p> <p>f. Menandatangani permintaan pengeluaran kas yang jumlahnya sangat besar dan sifatnya sangat penting. / Signing cash spending proposal with significant amount and crucial in nature.</p> <p>g. Membuat dan menetapkan rencana pengembangan dan usaha Perseroan dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. / Preparing and determining business development plan of the Company for short-term, mid-term, and long-term.</p> <p>h. Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada Perusahaan yang bersangkutan, termasuk setiap perubahannya. / The Board of Directors shall report to the Company on its share ownership and/or his/her family's (wife/husband and children) to the concerned company, including any changes therein.</p>
2.	Benny Pidakso, SE, MM	Direktur Keuangan & HCM / Director of Finance & HC	<p>a. Bidang Keuangan dan Akuntansi. / Field of Business Development.</p> <p>b. Bidang Sumber Daya Manusia. / Field of SCM.</p> <p>c. Bidang Umum. / Field of System Management.</p> <p>d. Sekretariat Perusahaan dan Investor Relation. / Field of Engineering and Marketing.</p>
3.	Ir. Hasanin Ade Putra, MT	Direktur Operasi / Director of Operation	<p>a. Bidang Operasi. / Field of Operation</p> <p>b. Bidang Peralatan. / Field of Equipment.</p>
4.	Ir. Arief Subyandono	Direktur Independen / Independent Director	<p>a. Bidang Pengembangan Bisnis. / Field of Business Development.</p> <p>b. Bidang SCM. / Field of SCM.</p> <p>c. Bidang System Management. / Field of System Management.</p> <p>d. Bidang Teknik dan Pemasaran. / Field of Engineering and Marketing.</p>

Piagam Direksi

Perseroan menyadari pentingnya penggunaan pedoman bagi Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan membentuk sebuah *charter* yang mengatur tentang Kriteria Anggota & Pengangkatan Direksi dan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dengan mengacu kepada Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Kriteria Penentuan Direksi

Pemilihan dan pengangkatan anggota Direksi diperuntukkan bagi seseorang yang memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

- Memiliki komitmen, akhlak, moral, serta itikad yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
- Memiliki kompetensi melakukan perbuatan hukum.
- Dalam 5 (lima) tahun sebelum dan selama menjabat:
 - Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - Tidak pernah menjabat sebagai anggota Direksi yang terbukti melakukan kesalahan dan penyimpangan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit;

The Board of Directors' Charter

The Company realizes the importance of the use of manual for the Board of Directors in conducting their duties and responsibilities in managing the Company. Therefore, the Company formulated a charter that regulates Criteria & Appointment of the Board of Directors Members as well as Duties and Responsibilities of the Board of Directors by referring to Regulation of OJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuer or Public Company.

Selection Criteria of the Board of Directors

Selection and appointment of the Board of Directors are intended for people that fulfill the following requirements and criteria:

- Have good commitment, character, moral, and intention in executing duties and responsibilities.
- Have competency to perform legal actions.
- Within 5 (five) years prior and during term of office:
 - Have never been declared bankrupt;
 - Have never been members of the Board of Directors proven guilty of committing mistakes and deviations that caused a company to be bankrupt;

- Tidak pernah didakwa melakukan tindak pidana hukum yang merugikan negara;
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi yang selama menjabat pernah tidak menyelenggarakan RUPS dan/atau pertanggungjawabannya pernah tidak diterima dalam RUPS; dan
 - Tidak pernah melanggar kewajiban penyampaian laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
4. Siap berkomitmen untuk mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Telah dinyatakan lulus tes Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*).
 6. Rekomendasi pengangkatan maupun pemberhentian anggota Direksi harus mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau Komite Nominasi dan Remunerasi.

Prosedur Penunjukan/Pemilihan dan Pemberhentian/Pengunduran Diri Direksi

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik. Mekanisme penunjukan/pemilihan serta pemberhentian Direksi wajib diselenggarakan melalui RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari anggota Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. Anggota Direksi yang diangkat memiliki 1 (satu) periode yang terdiri dari 5 (lima) tahun masa jabatan dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima). Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan dengan pertimbangan aspek kompetensi, integritas, dan reputasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Dalam kasus pemberhentian anggota Direksi, wajib disertai dengan alasan pemberhentian, pemberian kesempatan untuk membela diri, dan keputusan pemberhentian setelah yang bersangkutan membela diri.

Program Orientasi Bagi Direksi Baru

Setiap anggota Direksi baru yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai Perseroan dan penanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perseroan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.

1. Materi untuk program pengenalan Perseroan meliputi:
 - a. Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)
 - b. Visi dan Misi Perusahaan
 - c. Budaya Perusahaan
 - d. Gambaran Umum Perseroan
 - e. Struktur Organisasi dan *Job Description*
 - f. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris dan Direksi
 - g. Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP)
 - h. Rencana Kerja Anggaran Perseroan (Target Bisnis)

- Have never been charged with criminal acts that caused the country to suffer a loss;
 - Have never been members of the Board of Directors that once did not held GMS and/or their accountability was not received in the GMS; and
 - Have never violated obligation to submit annual report and/or financial statements to OJK.
4. Are ready to comply with prevailing laws and regulations.
 5. Have been declared as passing Fit & Proper Test.
 6. Recommendation of appointment and dismissal of members of the Board of Directors shall consider recommendation from the Board of Commissioners or Nomination and Remuneration Committee.

Procedure of Appointment/Selection and Dismissal/Resignation of the Board of Directors

Appointment and dismissal of the Board of Directors members are carried out based on principles of professionalism and good corporate governance. Mechanisms of appointment/selection and dismissal of the Board of Directors shall be performed through GMS in accordance with Articles of Association of the Company by considering recommendation from the Board of Commissioners or committee that oversees nomination function. The appointed member of the Board of Directors has 1 (one) period of term of office consisting of 5 (five) years that ends in the closing of the 5th (fifth) Annual GMS. Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by taking into account the aspects of adequate competency, integrity, and reputation in accordance with the needs of the Company. In the event of dismissal of members of the Board of Directors, it requires reason for dismissal, opportunity to defend themselves and decision of dismissal after the related parties defend themselves.

Orientation Program for the New Board of Directors

Every new member of the Board of Directors who is appointed for the first time is required to be provided with orientation program concerning the Company and person in charge for the orientation program is the Corporate Secretary or any person carrying out the function of the Corporate Secretary

1. Materials for orientation program regarding the Company include:
 - a. Implementation of Principles of Good Corporate Governance (GCG)
 - b. Vision and Mission of the Company
 - c. Corporate Culture
 - d. General Description of the Company
 - e. Organization Structure and Job Description
 - f. Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors
 - g. Long-Term Plan of the Company (RJPP)
 - h. Work Plan and Budget (Target Bisnis)

- i. Audit Internal dan Audit Eksternal
 - j. Komite Audit
 - k. Sistem-Sistem yang berlaku di Perusahaan
2. Program pengenalan Perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perseroan dan pengkajian dokumen.

- i. Internal Audit and External Audit
 - j. Audit Committee
 - k. Applicable systems in the Company
2. The Company's orientation program can be in the form of presentation, meeting, visit to the Company, and document review.

Sepanjang tahun 2018, Sekretaris Perusahaan tidak melaksanakan program orientasi bagi Direksi baru. Hal ini disebabkan karena tidak ada anggota Direksi yang baru dilantik sepanjang tahun buku.

In 2018, the Corporate Secretary did not carry out orientation program for new member of the Board of Directors. This was due to the fact that there was no new member of the Board of Directors appointed in the fiscal year.

Direktur Independen

Direktur Independen adalah Direktur tidak terafiliasi dalam jajaran Direksi yang dipilih melalui RUPS. Pembentukan dan pemilihan Direktur Independen diatur dalam Surat Edaran PT Bursa Efek Indonesia No. SE-0001/BEI/02-2014 yang berlaku sejak tanggal 4 Februari 2014. Berikut adalah profil Direktur Independen Perseroan. Per tanggal 31 Desember 2018, Direktur Independen PP Presisi dijabat oleh Ir. Arief Subyandono berdasarkan Akta No. 27 tanggal 14 Agustus 2017.

Independent Director

Independent Director is a Director that is not affiliated with other members of the Board of Directors appointed through the GMS. Establishment and selection of Independent Director are regulated in Circular Letter of PT Bursa Efek Indonesia No. SE-0001/BEI/02-2014 which is effective since February 4, 2014. The following is the profile of the Independent Director. As of December 31, 2018, Independent Director of PP Presisi is held by Ir. Arief Subyandono pursuant to Deed No. 27 dated August 14, 2017.

Independensi Direksi

Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.

Independency of the Board of Directors

Every member of the Board of Directors is prohibited from taking any direct or indirect personal benefit from the Company's activities aside from legitimate income.

Informasi Rangkap Jabatan Direksi

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Information on Concurrent Positions of the Board of Directors

Members of the Board of Directors are prohibited from having concurrent positions if such concurrent positions are prohibited and/or against laws and regulations.

Kebijakan Keberagaman Komposisi Direksi

Direksi Perseroan telah menerapkan konsep keberagaman dalam baik dalam segi usia, jenis kelamin, pengalaman pekerjaan, maupun latar belakang pendidikan. Keberagaman komposisi dalam Direksi ditujukan demi menciptakan kontribusi positif dalam melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengurusan Perseroan.

Policy on Composition Diversity of the Board of Directors

The Board of Director has implemented diversity concept in terms of age, gender, professional experience and education. Diversity in the composition of the Board of Directors is aimed to generate positive contribution in performing the function of the Company's management.

Nama / Name	Usia / Age	Jenis Kelamin / Gender	Latar Belakang Pendidikan / Education
Ir. Iswanto Amperawan	52 tahun / 52 years old	Laki-laki / Male	Sarjana Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta / Bachelor's Degree in Engineering from Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Benny Pidakso, SE, MM	35 tahun / years old	Laki-laki / Male	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Airlangga Surabaya / Bachelor's Degree in Accounting from Universitas Airlangga, Surabaya • Magister Manajemen di Universitas Prasetiya Mulya / Master's Degree in Management from Prasetiya Mulya University
Ir. Hasanin Ade Putra, MT	53 tahun / years old	Laki-laki / Male	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada Yogyakarta / Bachelor's Degree in Civil Engineering from Universitas Gadjah Mada Yogyakarta • Magister Manajemen Universitas Prasetiya Mulya / Master of Business Administration from Prasetiya Mulya University
Ir. Arief Subyandono	56 tahun / years old	Laki-laki / Male	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya / Bachelor's Degree in Civil Engineering from Institut Teknologi Nopember Surabaya

Laporan Tugas Direksi Tahun 2018

Pada tahun 2018, Direksi telah melaksanakan fungsi kepengurusan dan pengelolaan Perseroan melalui perangkat kebijakan berupa Keputusan Direksi, yang meliputi:

Report on the Board of Directors Duties in 2018

In 2018, the Board of Directors has implemented the Company's organization and management functions through policies in the form of Decree of the Board of Directors, including:

No.	Nomor Surat Keputusan / Decree No.	Tanggal Penerbitan / Date of Issuance	Perihal / Subject
1	001/SK/PPRE/DIR/I/2018	4 Januari 2018 / January 4, 2018	Penetapan Tim Akuisisi / Determination of Acquisition Team
2	002/SK/PPRE/DIR/I/2018	4 Januari 2018 / January 4, 2018	
3	003/SK/PPRE/DIR/I/2018	9 Januari 2018 / January 9, 2018	Pengangkatan Kepala SPI Bpk. Syaikat Noor / Appointment of Head of SPI, Mr. Syaikat Noor
4	004/SK/PPRE/DIR/I/2018	11 Januari 2018 / January 11, 2018	Pembaruan Penetapan Hari Ulang Tahun Perusahaan / Renewal of Anniversary of the Company
5	005/SK/PPRE/DIR/I/2018	16 Januari 2018 / January 16, 2018	Penetapan Tim Divestasi Aset / Determination of Asset Divestment Team
6	006/SK/PPRE/DIR/I/2018	19 Januari 2018 / January 19, 2018	Penetapan Tim Sertifikasi SMK3 / Determination of SMK3 Certification Team
7	007/SK/PPRE/DIR/I/2018	6 Februari 2018 / February 6, 2018	Pengangkatan Pegawai Baru / Appointment of New Employees
8	008/SK/PPRE/DIR/I/2018		
9	009/SK/PPRE/DIR/I/2018		
10	010/SK/PPRE/DIR/I/2018		
11	011/SK/PPRE/DIR/I/2018		
12	012/SK/PPRE/DIR/I/2018		
13	013/SK/PPRE/DIR/I/2018		
14	014/SK/PPRE/DIR/I/2018		
15	015/SK/PPRE/DIR/I/2018		
16	016/SK/PPRE/DIR/I/2018		
17	017/SK/PPRE/DIR/I/2018		
18	018/SK/PPRE/DIR/I/2018		
19	019/SK/PPRE/DIR/I/2018		
20	020/SK/PPRE/DIR/I/2018		
21	021/SK/PPRE/DIR/I/2018	5 Januari 2018 / January 5, 2018	Surat Keputusan untuk Tim Investasi / Decree for Investment Team
22	022/SK/PPRE/DIR/I/2018	23 Maret 2018 / January 23, 2018	Surat Keputusan Pengangkatan <i>General Manager</i> / Decree on Appointment of General Manager
23	023/SK/PPRE/DIR/I/2018		Surat Keputusan Cuti Lebaran / Decree on Lebaran Leave
24	024/SK/PPRE/DIR/I/2018		Surat Keputusan <i>Grading</i> / Decree on Grading
25	025/SK/PPRE/DIR/I/2018	14 Mei 2018 / May 14, 2018	Surat Keputusan Perubahan Cuti Lebaran / Decree on Change of Lebaran Leave
26	026/SK/PPRE/DIR/I/2018	13 September 2018 / September 4, 2018	Pengangkatan Pegawai Baru / Appointment of New Employees
27	027/SK/PPRE/DIR/I/2018		
28	028/SK/PPRE/DIR/I/2018		
29	029/SK/PPRE/DIR/I/2018		
30	030/SK/PPRE/DIR/I/2018		
31	031/SK/PPRE/DIR/I/2018		
32	032/SK/PPRE/DIR/I/2018		
33	033/SK/PPRE/DIR/I/2018		
34	034/SK/PPRE/DIR/I/2018		
35	035/SK/PPRE/DIR/I/2018		
36	036/SK/PPRE/DIR/I/2018		
37	037/SK/PPRE/DIR/I/2018		
38	038/SK/PPRE/DIR/I/2018		
39	039/SK/PPRE/DIR/I/2018		
40	040/SK/PPRE/DIR/I/2018		

No.	Nomor Surat Keputusan / Decree No.	Tanggal Penerbitan / Date of Issuance	Perihal / Subject
41	043/SK/PPRE/DIR/I/2018	18 Oktober 2018 / October 18, 2018	Penerapan GCG PT PP Presisi Tbk / Implementation of GCG at PT PP Presisi Tbk
42	045/SK/PPRE/DIR/I/2018	23 Oktober 2018 / October 23, 2018	Sistem Remunerasi Berbasis Grading / Grading-based Remuneration System
43	046/SK/PPRE/DIR/I/2018		Penetapan Tunjangan Variabel / Determination of Variable Allowances
44	048/SK/PPRE/DIR/I/2018	25 Oktober 2018 / October 25, 2018	Penetapan Tim Pelaksana WBS / Determination of WBS Team
45	050/SK/PPRE/DIR/I/2018	14 November 2018 / November 14, 2018	Libur Cuti Bersama Natal & Tahun Baru / Christmas & New Year Mass Leave Holiday

Rapat Direksi

Hingga 31 Desember 2018, Direksi telah melaksanakan rapat sejumlah 24 (dua puluh empat) pertemuan yang dihadiri oleh setiap anggota Direksi, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama / Name	Posisi / Position	Jumlah Rapat / Number of Meeting	Jumlah Kehadiran / Attendance Rate	Persentase Kehadiran / Attendance Percentage
Ir. Iswanto Amperawan	Direktur Utama / President Director	24	24	100%
Benny Pidakso, SE, MM	Direktur Keuangan / Director of Finance	24	24	100%
Ir. Hasanin Ade Putra, MT	Direktur Operasi / Director of Operations	24	23	95.8%
Ir. Arief Subyandono	Direktur Independen / Independent Director	24	24	100%

The Board of Directors' Meetings

As of December 31, 2018, the Board of Directors has held 24 (twenty four) meetings attended by every member of the Board of Directors, with the following attendance rate:

Agenda Rapat Direksi

Pelaksanaan rapat Direksi memiliki agenda masing-masing di setiap pertemuannya. Agenda rapat Direksi sepanjang tahun 2018 meliputi:

Agenda of the Board of Directors' Meetings

Implementation of every meeting of the Board of Directors has its own agenda. Meeting agenda of the Board of Directors throughout 2018 include:

Tanggal / Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda
16 Januari 2018 / January 16, 2018	Progres kinerja Divisi Keuangan & Akuntansi, Divisi HCM, Divisi SCM & IT, Divisi Operasi, Divisi Peralatan, Divisi Teknik & Pemasaran, Sekretaris Perusahaan, <i>Business Development</i> / Progress of the performance of Finance & Accounting Division, HCM Division, SCM & IT Division, Operation Division, Equipment Division, Engineering & Marketing Division, Corporate Secretary, and Business Development
23 Januari 2018 / January 23, 2018	Progres kinerja Divisi Operasi, <i>Business Development</i> / Progress of the performance of Operations, Business Development Division
30 Januari 2018 / January 30, 2018	Progres kinerja Divisi Operasi, Divisi Keuangan, Divisi Peralatan / Progress of the performance of Operations Division, Finance Division, and Equipment Division
6 Februari 2018 / February 6, 2018	Progres kinerja Divisi Akuntansi, Keuangan & HCM / Progress of the performance of Accounting, Finance & HCM Divisions
20 Februari 2018 / February 20, 2018	Progres kinerja Divisi Akuntansi, Keuangan & HCM / Progress of the performance of Accounting, Finance & HCM Divisions
6 Maret 2018 / March 6, 2018	Progres kinerja Divisi SCM & IT / Progress of the performance of SCM & IT Divisions
20 Maret 2018 / March 20, 2018	Progres kinerja Sekretaris Perusahaan / Progress of the performance of Corporate Secretary
27 Maret 2018 / March 27, 2018	Progres kinerja Sekretaris Perusahaan / Progress of the performance of Corporate Secretary
10 April 2018 / 10 April 2018	Progres kinerja Departemen SDM / Progress of the performance of HR Department
25 April 2018 / April 25, 2018	<ul style="list-style-type: none"> Progres kinerja Divisi Teknik & Pemasaran, Divisi Peralatan, <i>Business Development</i> / Progress of performance of Engineering & Marketing Division, Tools Division, Business Development Progres kinerja Formwork dan <i>Workshop</i> / Progress of performance of Formwork and Workshop
9 Mei 2018 / May 9, 2018	Progres kinerja Sekretaris Perusahaan, Divisi Operasi, Divisi Teknik & Pemasaran, <i>Business Development</i> / Progress of performance of Corporate Secretary, Operation Division, Engineering & Marketing Division, Business Development
16 Mei 2018 / May 16, 2018	Progres kinerja Sekretaris Perusahaan, Divisi Teknik & Pemasaran, Tim PP Awards, Divisi AK & HCM, Divisi IT & Pengembangan Bisnis / Progress of performance of Corporate Secretary, Engineering & Marketing Division, PP Awards Team, AK & HCM Division, IT & Business Development Division
3 Juli 2018 / July 3, 2018	Progres kinerja Divisi Operasi, Divisi SCM & IT, Divisi Peralatan, Divisi Keuangan & HCM / Progress of performance of Operation Division, SCM & IT Division, Tools Division, Finance & HCM Division

Tanggal / Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda
17 Juli 2018 / July 17, 2018	Progres kinerja Divisi Operasi, Divisi SCM & IT / Progress of performance of Operation Division, SCM & IT Division
24 Juli 2018 / July 24, 2018	Progres kinerja Divisi Operasi, Departemen HCM / Progress of performance of Operation Division, HCM Department
2 Agustus 2018 / August 2, 2018	Progres kinerja Sekretaris Perusahaan, Panitia Lelang, Legal, Divisi Operasi, Divisi SCM & IT / Progress of performance of Corporate Secretary, Auction Committee, Operation Division, SCM & IT Division
9 Agustus 2018 / August 9, 2018	Progres kinerja Divisi Peralatan, Divisi Operasi, Divisi SCM & IT / Progress of performance of Tools Division, Operation Division, SCM & IT Division
21 Agustus 2018 / August 21, 2018	Progres kinerja Proyek Verde / Progress of performance of Verde Project
6 September 2018 / September 6, 2018	Progres kinerja Safety & Health Environment, Sekretaris Perusahaan, Divisi Peralatan, Divisi Operasi / Progress of performance of Safety & Health Environment, Corporate Secretary, Tools Division, Operation Division
13 September 2018 / September 13, 2018	Progres kinerja Departemen HCM, Divisi Keuangan dan Akuntansi, <i>Business Development</i> , Sekretaris Perusahaan, Divisi Operasi, Legal / Progress of performance of HCM Department, Finance and Accounting Division, Business Development, Corporate Secretary, Operation Division, Legal
25 September 2018 / September 25, 2018	Progres kinerja POB, Divisi Keuangan dan Akuntansi, Sistem IT & Pajak, Divisi Peralatan, Legal / Progress of performance of POB, Finance and Accounting Division, IT & Tax System, Tools Division, Legal
2 Oktober 2018 / October 2, 2018	Progres kinerja <i>Business Development</i> , Divisi SCM & IT / Progress of performance of Business Development, SCM & IT Division
9 Oktober 2018 / October 9, 2018	Progres kinerja Sekretaris Perusahaan, Departemen HCM, Biro MR, Legal & <i>Business Development</i> / Progress of performance of Corporate Secretary, HCM Department, MR Bureau, Legal & Business Development
8 November 2018 / November 8, 2018	Progres kinerja Sekretaris Perusahaan / Progress of performance of Corporate Secretary
4 Desember 2018 / December 4, 2018	Progres kinerja POB, Biro MR, Legal, <i>Business Development</i> , Divisi Teknik & Pemasaran / Progress of performance of POB, MR Bureau, Legal, Business Development, Engineering & Marketing Division
13 Desember 2018 / December 13, 2018	<ul style="list-style-type: none"> Progres kinerja Sekretaris Perusahaan, Biro POB, Divisi Teknik & Pemasaran / Progress of performance of Corporate Secretary, POB Bureau, Engineering & Marketing Division Progres kinerja Proyek Soekarno-Hatta dan Pembangunan <i>Workshop</i> / Progress of performance of Soekarno-Hatta Project and Workshop Development
18 Desember 2018 / December 18, 2018	<ul style="list-style-type: none"> Progres kinerja Proyek Kulon Progo / Progress of performance of Kulon Progo Project <i>Update Akuisisi</i> / Update on Acquisition

Kebijakan terkait Pengunduran Diri Anggota Direksi Apabila Terlibat dalam Kejahatan Keuangan

Dalam suatu kasus dimana anggota Direksi terbukti melakukan kejahatan keuangan dan/atau penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompoknya, maka anggota Direksi tersebut wajib mengajukan pengunduran diri tanpa melepas tanggung jawab atas konsekuensi kerugian yang ditimbulkan dari tindakan penyimpangan tersebut.

Policy on Resignation of the Board of Directors Members when Involved in Financial Crime

In the event of a member of the Board of Directors is proven to be guilty of committing financial crime and/or abuse of authority for personal and/or group interest, such member is required to submit resignation and be held liable for the consequence of loss caused by such deviations.

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris dan Direksi menyelenggarakan rapat gabungan sebanyak 4 (empat) pertemuan, dengan uraian tingkat kehadiran pada tabel berikut:

JOINT MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Throughout 2018, the Board of Commissioners and the Board of Directors held 4 (four) joint meetings with the attendance rate as follows:

Nama / Name	Posisi / Position	Jumlah Rapat / Number of Meeting	Jumlah Kehadiran / Attendance Rate	Persentase Kehadiran / Attendance Percentage
Ir. M. Toha Fauzi, MT	Komisaris Utama / President Commissioner	4	4	100%
Ir. Nawang Sri Retno Kartiko, M.EngM	Komisaris / Commissioner	4	4	100%
Ir. Ketut Darmawan	Komisaris Independen / Independent Commissioner	4	4	100%
Ir. Iswanto Amperawan	Direktur Utama / President Director	4	4	100%
Benny Pidakso, SE, MM	Direktur Keuangan / Director of Finance	4	4	100%

Nama / Name	Posisi / Position	Jumlah Rapat / Number of Meeting	Jumlah Kehadiran / Attendance Rate	Persentase Kehadiran / Attendance Percentage
Ir. Hasanin Ade Putra, MT	Direktur Operasi / Director of Operation	4	4	100%
Ir. Arief Subyandono	Direktur Independen / Independent Director	4	4	100%

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang dilaksanakan selama 2018 membahas beberapa mata acara terkait operasional maupun administrasi Perseroan, dengan uraian sebagai berikut:

Agenda of the Board of Commissioners and the Board of Directors Joint Meeting

Joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors in 2018 discussed several agenda regarding operation or administration of the Company, with the following description:

Tanggal / Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda	
18 April 2018 / April 18, 2018	1	Pemasaran Q1-2018 & Prognosa sd Des 2018 / Marketing of Q1-2018 & Prognosis until Dec 2018
	a	Target penambahan pendapatan dari Proyek-proyek Strategis / Target of additional income from Strategic Projects
	b.	Perkembangan Akuisisi Erector dan Fondasi / Development of Erector and Foundation Acquisition
	c.	Rencana pengembangan bisnis baru / New business development plan
	d.	Bisnis <i>Mining & Hauling</i> / Mining & Hauling Business
	e	Investasi peralatan sudah dilakukan namun proyek bisa didapatkan / Tools investment has been conducted however the project is obtainable
	f	Dibuatkan kebijakan terkait <i>ploting</i> pekerjaan/bisnis yang dikerjakan oleh masing-masing Anak Perusahaan / Preparation of policy related to business/work plotting worked by each Subsidiary
	g	Rencana mulai Bisnis <i>Dredging</i> / Plan to start Dredging Business
19 Juli 2018 / July 19, 2018	1	Kinerja Perseroan per Triwulan I - 2018 / The Company's performance as of Quarter I - 2018
	2	Piutang / Receivables
	3	Target Laba Tahun 2018 / Profit Target for 2018
	4	<i>Cashflow</i> / Cash flow
	5	Proyek <i>Dredging</i> / Dredging Project
	6	Kontraktor Tambang / Mining Contractor
	7	Target Kinerja 2018 / Performance Target for 2018
	8	SDM <i>Capacity</i> / HR Capacity
	9	Wacana Pembangunan Presisi Tower / Presisi Tower Development Discourse
	10	Rencana Akuisisi beberapa Perusahaan / Plan to Acquire several companies
31 Oktober 2018 / October 31, 2018	1	<i>Overview</i> Kinerja Perseroan per Triwulan III – 2018 / Overview on the Company's performance as of Quarter III - 2018
	2	<i>Business Plan</i> / Business Plan
	3	RJPP 2019 - 2023 / RJPP 2019-2023
	4	RKAP 2019 / RKAP 2019
	5	<i>Rebranding</i> Perseroan / Rebranding of the Company

PENILAIAN TERHADAP KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sebagai organ tata kelola tertinggi, para Pemegang Saham memiliki hak untuk menunjuk Dewan Komisaris dan Direksi melalui mekanisme RUPS. Dalam menunjuk Dewan Komisaris dan Direksi, para Pemegang Saham memiliki berbagai pertimbangan, salah satunya berasal dari hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara individual dan pencapaian bisnis yang berhasil diraih oleh Perseroan pada tahun buku dengan target bisnis yang telah ditetapkan.

ASSESSMENT ON PERFORMANCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

As the highest governance organ, the Shareholders have the right to appoint the Board of Commissioners and Board of Directors through GMS mechanism. In appointing the Board of Commissioners and the Board of Directors, the Shareholders have various considerations, one of which comes from the results of individual performance evaluations of each member of the Board of Commissioners and Board of Directors and the business achievements achieved by the Company in the fiscal year.

Selain sebagai dasar penunjukkan Dewan Komisaris dan Direksi, hasil evaluasi kinerja tersebut juga berpengaruh dalam proses penentuan skema remunerasi Dewan Komisaris maupun Direksi.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

1. Aspek pengawasan dan pengarahan
 - Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dan/atau gabungan Dewan Komisaris
 - Pemberian persetujuan atas hal-hal yang dimintakan Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
 - Pemberian arahan/rekomendasi atas keputusan strategis
 - Review terhadap hasil pelaksanaan dan laporan audit tahunan
 - Monitoring kinerja unit kerja/proyek dan kunjungan kerja lapangan
2. Aspek pelaporan
 - Penyusunan dan penyampaian Program Kerja Tahunan
 - Review terhadap hasil pelaksanaan dan laporan audit tahunan
 - Menyampaikan tanggapan, pendapat dan saran mengenai laporan triwulan perkembangan realisasi Perusahaan
 - Review atas Kinerja KAP
3. Aspek dinamis
 - Program Pelatihan Dewan Komisaris

Hasil KPI Direksi 2018

Penilaian kinerja Direksi berdasarkan kriteria umum yang dituangkan dalam Hasil KPI, yang meliputi:

- Kinerja Direksi secara kolektif terhadap pencapaian Perseroan sesuai RKAP dan atau kriteria lain yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris setelah didiskusikan dengan Direksi
- Performa Direktur secara individual dalam pencapaian kinerja Perseroan seperti yang tercantum dalam Kontrak Manajemen dan atau kriteria lain yang ditetapkan hasil diskusi dengan Dewan Komisaris dan Direksi
- Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG

KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi diusulkan oleh dan berdasarkan prosedur yang disusun oleh Komite Nominasi dan Remunerasi untuk disampaikan dan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Skema remunerasi turut mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Aside from being the basis for the appointment of the Board of Commissioners and the Board of Directors, the results of the performance evaluation also influence the process of determining the remuneration scheme for the Board of Commissioners and Board of Directors.

Criteria for Evaluating the Performance of the Board of Commissioners

1. Aspects of supervision and direction
 - Implementation of Board of Commissioners meetings and/or Board of Commissioners joint meeting
 - Granting approval for matters requested by the Board of Directors in accordance with the provisions of the Articles of Association
 - Giving direction/recommendations for strategic decisions
 - Review of the results of the implementation and annual audit report
 - Monitoring the performance of work units/projects and field work visits
2. Reporting aspects
 - Preparation and delivery of the Annual Work Program
 - Review of the results of the implementation and annual audit report
 - Delivering responses, opinions and suggestions regarding quarterly reports on the development of the Company's realization
 - Review of KAP Performance
3. Dynamic aspects
 - Board of Commissioners Training Program

Results of Board of Directors KPI in 2018

Evaluation on the Board of Directors performance is based on the general criteria outlined in the KPI Results, which include:

- The collective performance of the Board of Directors on the achievement of the Company in accordance with the RKAP and/or other criteria determined by the Board of Commissioners after being discussed with the Board of Directors
- Individual Director performance in achieving the Company's performance as stated in the Management Contract and/or other criteria determined by the results of discussions with the Board of Commissioners and Board of Directors
- Implementation of GCG principles

REMUNERATION POLICY FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Remuneration policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors is suggested by and based on procedures prepared by Nomination and Remuneration Committee to be submitted and discussed in the General Meeting of Shareholders. The scheme of remuneration also considers evaluation result of performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Struktur Remunerasi

Remuneration Structure

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris / Board of Commissioners Remuneration Structure	Struktur Remunerasi Direksi / Board of Directors Remuneration Structure
Gaji Dewan Komisaris / Board of Commissioners Salary <ul style="list-style-type: none"> Perhitungan gaji Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama / Calculation of salary of President Commissioner is 45% of President Director's Perhitungan gaji Komisaris sebesar 90% dari gaji Komisaris Utama / Calculation of salary of Commissioners is 90% of President Commissioner's 	Gaji Direksi / Board of Directors Salary <ul style="list-style-type: none"> Gaji Direktur Utama dijadikan sebagai acuan utama dalam menentukan gaji anggota Direksi maupun Dewan Komisaris. Perhitungan gaji Direktur Utama sesuai dengan Grade (Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap) yang ditetapkan melalui mekanisme RUPS. / Salary of President Director is the main reference in determining salary of members of the Board of Directors and Board of Commissioners. Calculation of salary of President Director is in accordance with Grade (Basic Salary and Fixed Allowances) that was determined through GMS mechanism. Perhitungan gaji Direktur sebesar 68,23% dari gaji Direktur Utama* / Calculation of salary of Board of Directors is 68.23% of President Director's*
Tunjangan Dewan Komisaris / Board of Commissioners Allowances <ul style="list-style-type: none"> Tunjangan Hari Raya (dibayarkan setahun sekali sebesar 1 x Gaji Pokok) / Religious Holiday allowance (paid once in a year amounting to 1x Basic Salary) Tunjangan Transportasi (20% dari Gaji Pokok) / Transportation allowance (20% of Basic Salary) 	Tunjangan Direksi / Board of Directors Allowances <ul style="list-style-type: none"> Tunjangan Hari Raya (dibayarkan setahun sekali sebesar 1 x Gaji Pokok) / Religious Holiday allowance (paid once in a year amounting to 1x Basic Salary) Tunjangan Perumahan (40% dari Gaji Pokok, maksimal Rp27 juta) / Housing allowance (40% of Basic Salary at maximum of Rp27 million) Tunjangan Operasional (transportasi, BBM, dan Komunikasi) / Operational allowance (transportation, fuel, and communication)
Tantiem Dewan Komisaris / Board of Commissioners Tantiem <p>Perseroan dapat memberikan Tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan Laporan Tahunan, yang penentuan jumlahnya dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris setelah mendapat rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. / The Company may provide Tantiem to members of the Board of Commissioners and Board of Directors pursuant to GMS in Annual Report validation of which the authority of determination of the amount is delegated to the Board of Commissioners after obtaining recommendation from Nomination and Remuneration Committee.</p>	Tantiem Direksi / Board of Directors Tantiem <p>Perseroan dapat memberikan Tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan Laporan Tahunan, yang penentuan jumlahnya dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris setelah mendapat rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. / The Company may provide Tantiem to members of the Board of Commissioners and Board of Directors pursuant to GMS in Annual Report validation of which the authority of determination of the amount is delegated to the Board of Commissioners after obtaining recommendation from Nomination and Remuneration Committee.</p>

Rincian terkait struktur dan jumlah remunerasi yang diterima Dewan Komisaris dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Detail on structure and total remuneration received by the Board of Commissioners can be seen in the table below:

No.	Struktur Remunerasi / Remuneration Structure	Nominal / Nominal	
		Dewan Komisaris / Board of Commissioners	Direksi / Board of Directors
1	Gaji / Salary	Rp803.555.916	Rp1.732.657.392
2	Tunjangan Hari Raya (THR) / Religious Holiday Allowance	Rp80.355.591	Rp517.387.794
3	Tunjangan Perumahan / Housing Allowance	-	Rp712.263.405
4	Tunjangan Operasional/Transportasi / Transportation/Operational Allowance	Rp80.355.591	Rp220.714.442
5	Fasilitas / Facilities	-	Kendaraan Dinas / Office car
6	Tantiem / Tantiem	Rp791.380.698	Rp1.432.785.672
Jumlah / Total		Rp1.755.647.796	Rp4.615.808.705

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI DAN/ATAU ANAK PERUSAHAAN

Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT PP Presisi Tbk tidak memiliki/memiliki hubungan keuangan maupun hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis vertikal maupun horizontal terhadap sesama anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Perseroan.

DISCLOSURE OF AFFILIATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS, THE BOARD OF COMMISSIONERS, AND MAJORITY AND/OR CONTROLLING SHAREHOLDERS AND/OR SUBSIDIARIES

Each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT PP Presisi Tbk has no/has financial or family relationship up to the third degree vertically or horizontally with other members of the Board of Commissioners and the Board of Directors or Shareholders of the Company.

Nama / Name	Jabatan / Position	Hubungan Keluarga dengan / Family Relationship with						Hubungan Keuangan dengan / Financial Relationship with					
		Dewan Komisaris / The Board of Commissioners		Direksi / The Board of Directors		Pemegang Saham / Shareholders		Dewan Komisaris / The Board of Commissioners		Direksi / The Board of Directors		Pemegang Saham / Shareholders	
		Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No
Dewan Komisaris / The Board of Commissioners													
Ir. M. Toha Fauzi, MT	Komisaris Utama / President Commissioner		√		√		√		√		√		√
Ir. Nawang Sri Retno Kartiko, M.EngM	Komisaris / Commissioner		√		√		√		√		√		√
Ir. Ketut Darmawan	Komisaris Independen / Independent Commissioner		√		√		√		√		√		√
Direksi / The Board of Directors													
Ir. Iswanto Amperawan	Direktur Utama / President Director		√		√		√		√		√		√
Benny Pidakso, SE, MM	Direktur Keuangan / Director of Finance		√		√		√		√		√		√
Ir. Hasanin Ade Putra, MT	Direktur Operasi / Director of Operations		√		√		√		√		√		√
Ir. Arief Subyandono	Direktur Independen / Independent Director		√		√		√		√		√		√

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Komite Audit

PP Presisi telah membentuk Komite Audit sebagai salah satu organ di dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) berdasarkan POJK Nomor 55 /POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Persyaratan keanggotaan, proses seleksi, dan tata cara pengangkatan, dilakukan merujuk kepada Peraturan OJK dan Peraturan Bursa yang berlaku serta *best practices* GCG yang berlaku umum untuk menjaga independensi dan integritas Komite Audit.

Profil Komite Audit

Hingga 31 Desember 2018, Komite Audit PP Presisi beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari seorang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, dan 2 (dua) orang anggota yang memenuhi kriteria integritas, kompetensi, akhlak, moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Profil ketua dan anggota Komite Audit diuraikan dalam rincian sebagai berikut:

Ir. Ketut Darmawan (Ketua Komite Audit)

Beliau diangkat menjadi Ketua Komite Audit Perseroan sejak tanggal 14 Agustus 2017 berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 001/SK/PP-RE/KOM/VIII/2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit Perseroan. Profil Ir. Ketut Darmawan telah diuraikan dalam pembahasan profil Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

Audit Committee

PP Presisi has established the Audit Committee as one of the organs in implementation of Good Corporate Governance (GCG) based on POJK Number 55/POJK.04/2015 concerning Establishment and Guidelines of Work Implementation of the Audit Committee.

Membership requirements, selection process, and procedure of appointment are performed by referring to applicable OJK Regulations and Stock Exchange Regulations as well as generally accepted best practices of GCG to maintain independency and integrity of the Audit Committee.

Audit Committee Profile

As of December 31, 2018, the Audit Committee of PP Presisi consists of 3 (three) people, namely a Chairman that is also an Independent Commissioner, and 2 (two) members that fulfill criteria of integrity, competency, characteristic, moral, as well as prevailing laws and regulations. Profile of the Audit Committee's chairman and members is described in the following details:

Ir. Ketut Darmawan (Audit Committee Chairman)

He was appointed as the Audit Committee Chairman of the Company since August 14, 2017 based on Decision Letter of the Board of Commissioners No. 001/SK/PP-RE/KOM/VIII/2017 concerning Appointment of Members of the Company's Audit Committee. Profile of Ir. Ketut Darmawan has been described in the discussion of the Board of Commissioners profile in this Annual Report.

Tri Sari Palupi, SE (Anggota Komite Audit)

Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Airlangga pada tahun 2013. Beliau ditunjuk sebagai Komite Audit di Perseroan sejak tanggal 14 Agustus 2017 berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 001/SK/PP-RE/KOM/VIII/2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit Perseroan.

Sebelumnya, beliau menjabat sebagai *Account Manager* di PTPP (2006-2010), *A/P Manager* di PTPP (2010-2013) dan *Procurement Manager* di PTPP (2013-2016).

Abdullah Sigit, SH (Anggota Komite Audit)

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1991. Beliau diangkat sebagai Komite Audit di Perseroan sejak tanggal 14 Agustus 2017 berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 001/SK/PP-RE/KOM/VIII/2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit Perseroan.

Sebelumnya, beliau pernah bekerja di PT Prakarsa Dirganeka (2001-2006), Patria Park (2006-2013), dan Legal di PTPP (2013-2016).

Masa Jabatan Komite Audit

Masa jabatan anggota Komite Audit tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Anggota Komite Audit dapat dipilih kembali hanya untuk masa 1 (satu) periode berikutnya. Masa jabatan Komite Audit terhitung sejak 14 Agustus 2017 sampai dengan paling lama 3 (tiga) tahun.

Piagam Komite Audit

Komite Audit telah memiliki Piagam Komite Audit sebagai panduan pelaksanaan tugas Komite Audit yang telah mengacu pada POJK Nomor 55 /POJK.04/2015. Piagam ini telah disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan tanggal 14 Agustus 2017 dengan menandatangani Piagam Komite Audit tersebut.

Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham baik langsung maupun tidak langsung dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen. Untuk menjamin independensi seluruh anggota Komite Audit, setiap tahun Perseroan melakukan evaluasi serta meminta seluruh anggota Komite Audit menandatangani pakta pernyataan independen dan integritas.

Di samping itu, seluruh anggota Komite Audit juga memiliki kompetensi dan pengalaman kerja yang panjang di bidang Akuntansi, Keuangan, Audit, GCG serta Menejerial Perusahaan.

Tri Sari Palupi, SA (Audit Committee Member)

An Indonesian citizen, 47 years old. She received Bachelor's Degree in Accounting from Universitas Airlangga in 2013. She was appointed as member of the Audit Committee in the Company since August 14, 2017 based on Decision Letter of the Board of Commissioners No. 001/SK/PP-RE/KOM/VIII/2017 concerning Appointment of Members of the Audit Committee of the Company.

Previously, she served as *Account Manager* at PT PP (2006-2010), *A/P Manager* at PT PP (2010-2013) and *Procurement Manager* at PT PP (2013-2016).

Abdullah Sigit, SH (Audit Committee Member)

An Indonesian citizen, 50 years old. He received Bachelor's Degree in Law from Universitas Gadjah Mada in 1991. He was appointed as a member of the Company's Audit Committee since August 14, 2017 based on Decision Letter of the Board of Commissioners No. 001/SK/PP-RE/KOM/VIII/2017 concerning Appointment of Members of the Company's Audit Committee.

Previously, he worked at PT Prakarsa Dirganeka (2001-2006), Patria Park (2006-2013), and as *Legal* at PT PP (2013-2017).

Term of Office of Audit Committee

Term of office of the Audit Committee shall not be longer than term of office of the Board of Commissioners, as stipulated in Articles of Association of the Company. Members of the Audit Committee shall only be reappointed for 1 (one) subsequent period. Term of office of the Audit Committee shall be effective since August 14, 2017 up to the maximum of 3 (three) years.

Audit Committee Charter

The Audit Committee has the Audit Committee Charter as guidelines for duty implementation of the Audit Committee that referred to POJK Number 55/POJK.04/2015. This charter has been validated by the Board of Commissioners of the Company on August 14, 2017 by the signing of the Audit Committee Charter.

Independency of Audit Committee

All members of the Audit Committee has no financial, management, direct or indirect share ownership and/or family relationships with the Board of Commissioners, the Board of Directors and/or Controlling Shareholders, that may affect their ability to act independently. To ensure independency of all members of the Audit Committee, the Company annually evaluates and requests all members of the Audit Committee to sign a pact of independent and integrity statements.

Moreover, the Audit Committee members also have extensive competence and work experience in sectors of Accounting, Financial, Audit, GCG, as well as Corporate Management.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Audit

1. Memastikan bahwa pelaksanaan dan penyelenggaraan kinerja Perseroan telah mengikuti *Standard Operating Procedures* (SOP) yang berlaku.
2. Melakukan tindak lanjut pelaksanaan dan penyelenggaraan audit yang dilaksanakan Auditor Internal (SPI) maupun Auditor Eksternal untuk mengawasi kinerja auditor telah memenuhi standar audit.
3. Melakukan penyempurnaan dalam penyusunan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
4. Melaporkan hasil kegiatan yang dilakukan dengan mencantumkan perbandingan realisasi kegiatan melalui Laporan Triwulan dan/atau Laporan Tahunan serta melaporkannya kepada Dewan Komisaris.
5. Menyusun rencana program kerja selama 1 (satu) tahun ke depan.
6. Melakukan pengkajian terkait informasi keuangan yang akan dikeluarkan kepada publik dan/atau OJK, seperti Laporan Keuangan, Proyeksi, Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja Dan Anggaran Perseroan, Laporan Manajemen, dll.
7. Melakukan pengkajian atas kepatuhan kepada peraturan perundangan dalam menjalankan kegiatan Perseroan.
8. Memberikan pendapat independen jika timbul perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntansi atas jasa yang diberikannya.
9. Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan kepada Dewan Komisaris beserta ruang lingkup penugasan dan fee.
10. Membantu proses pengkajian pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
11. Melakukan pengawasan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau di bawah Dewan Komisaris.
12. Mengkaji pengaduan yang berkaitan dengan keuangan dan akuntansi Perseroan.
13. Mengkaji dan memberikan rekomendasi atau saran kepada Direksi apabila terdapat benturan kepentingan Perseroan.
14. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2018, Komite Audit telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali pertemuan yang diikuti oleh seluruh anggota Komite Audit, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama / Name	Posisi / Position	Jumlah Rapat / Number of Meeting	Jumlah Kehadiran / Attendance Rate	Persentase Kehadiran / Attendance Percentage
Ir. Ketut Darmawan	Ketua Komite Audit / Chairman of Audit Committee	4	4	100%
Tri Sari Palupi, ST	Anggota Komite Audit / Member of Audit Committee	4	4	100%
Abdullah Sigit, SH	Anggota Komite Audit / Member of Audit Committee	4	4	100%

Duties, Responsibilities, and Authorities of Audit Committee

1. Ensuring that implementation and management of the Company's performance has complied with applicable Standard Operating Procedures (SOP).
2. Following up implementation and management of audit performed by Internal Auditors (SPI) and External Auditors to supervise performance of auditors has met with audit standards.
3. Improving preparation of management control system as well as its implementation.
4. Reporting result of activities through submitting and reporting comparison of activities' realization through Quarterly Report and/or Annual Report to the Board of Commissioners.
5. Preparing work program for 1 (one) year forward.
6. Reviewing financial information that will be issued to public and/or OJK, such as Financial Statements, Projections, Long-Term Plans, Work Plan and Budget, Management Report, and so on.
7. Reviewing compliance with laws and regulations in carrying out the Company's activities.
8. Providing independent opinion in the event of dissenting opinions between the management and Accounting for services rendered.
9. Providing recommendations for appointment of Accountants to the Board of Commissioners as well as scope of duty and fee.
10. Assisting in process of audit review by internal auditors and overseeing implementation of follow up by the Board of Directors for findings of internal auditors.
11. Supervising implementation of risk management activities performed by the Board of Directors if the Company has no supervision function under the Board of Commissioners.
12. Reviewing complaints related to finance and accounting of the Company.
13. Reviewing and providing recommendations or suggestions to the Board of Directors in the event of conflict of interest in the Company.
14. Maintaining confidentiality of documents, data, and information of the Company.

Audit Committee Meetings

Throughout 2018, the Audit Committee has held 4 (four) times meetings attended by all members of the Audit Committee, with the following attendance rate:

Agenda Rapat Komite Audit

Pelaksanaan rapat Komite Audit memiliki agenda masing-masing di setiap pertemuannya. Agenda rapat Komite Audit sepanjang tahun 2018 meliputi:

- Mempersiapkan Berita Acara Dewan Komisaris untuk penunjukan pimpinan RUPST tahun buku 2017;
- Mempersiapkan telaah kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP);
- Mempersiapkan pembuatan Laporan Tahunan tahun buku 2018; dan
- Mempersiapkan telaah aksi korporasi pinjaman oleh Perseroan.

Laporan Pelaksanaan Kinerja Komite Audit Tahun 2018

Sepanjang tahun 2018, Komite Audit telah melaksanakan beberapa program terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, yang diuraikan pada tabel berikut:

No.	Program yang Dilaksanakan pada Tahun 2018 / Program Implemented in 2018	Status / Status
1.	Memberikan telaah kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP) / Provided review on performance of Public Accounting Firm (KAP)	Sudah Terlaksana / Implemented
2.	Memberikan telaah aksi korporasi pinjaman oleh Perseroan / Provided review on loan corporate action by the Company	Sudah Terlaksana / Implemented

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) sesuai yang dipersyaratkan dalam POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Persyaratan keanggotaan, proses seleksi, dan tata cara pengangkatan, dilakukan merujuk kepada Peraturan OJK dan Peraturan Bursa yang berlaku serta *best practices* GCG yang berlaku umum untuk menjaga independensi dan integritas Komite Nominasi dan Remunerasi.

Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

Hingga tanggal 31 Desember 2018, keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari seorang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, dan 2 (dua) orang anggota yang semuanya merupakan Pihak Independen yang memenuhi kriteria integritas, kompetensi, akhlak, moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Profil ketua dan anggota KNR diuraikan dalam rincian sebagai berikut:

Ir. Ketut Darmawan (Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi)

Beliau diangkat menjadi Ketua KNR Perseroan sejak tanggal 14 Agustus 2017 berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 002/SK/PP-RE/KOM/VIII/2017 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi. Profil Ir. Ketut Darmawan telah diuraikan dalam pembahasan profil Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

Agenda of Audit Committee Meeting

The Audit Committee meeting has its own agenda for each meeting. In 2018, agenda of the Audit Committee meeting includes:

- Preparation the Minutes of the Board of Commissioners for the appointment of chairman of AGM of 2017 fiscal year;
- Preparation of a review of the performance of the Public Accounting Firm (KAP);
- Preparation of the 2018 Annual Report; and
- Preparation for a review of loan corporate actions by the Company.

Report on Performance of Audit Committee in 2018

In 2018, the Audit Committee has implemented several programs related to implementation of their duties and responsibilities as described in the following table:

Nomination and Remuneration Committee

The Company has established Nomination and Remuneration Committee (KNR) in accordance with requirements in POJK No. 34/POJK.04/2014 concerning Appointment of Nomination and Remuneration Committee of Issuer or Public Company.

Membership requirements, selection process, and procedure of appointment are performed by referring to applicable OJK Regulations and Stock Exchange Regulations as well as generally accepted best practices of GCG to maintain independency and integrity of the Audit Committee.

Membership of Nomination and Remuneration Committee

As of December 31, 2018, membership of Nomination and Remuneration consists of 3 (three) people, namely a Chairman that is also an Independent Commissioner, and 2 (two) members from Independent Parties that fulfill criteria of integrity, competency, characteristic, moral, as well as prevailing laws and regulations. Profile of KNR's chairman and members is described in the following details:

Ir. Ketut Darmawan (Nomination and Remuneration Committee Chairman)

He was appointed as Chairman of KNR of the Company since August 14, 2017 pursuant to Decision Letter of the Board of Commissioners No. 002/SK/PP-RE/KOM/VIII/2017 concerning Appointment of Nomination and Remuneration Committee. Profile of Ir. Ketut Darmawan has been described in discussion of the Board of Commissioners profile in this Annual Report.

Hendiarso, SE (Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi)

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta pada tahun 1992. Beliau diangkat menjadi Anggota KNR Perseroan sejak tanggal 14 Agustus 2017 berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 002/SK/PP-RE/KOM/VIII/2017 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Assistant Site Administration Manager di PT PP (1995-2001), Staf Keuangan di PT PP DVO II (2001-2004), Staff Keuangan di PT Prima Jasa Aldodua (2004-2010), Staf SDM di PT Prima Jasa Aldodua (2010-2014), dan Kepala Departemen SDM PT PP Peralatan Konstruksi (2014-2017).

Sri Bitia Sutia Selvi, ST (Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi)

Warga Negara Indonesia, 30 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Industri dari Telkom University pada tahun 2010. Beliau diangkat menjadi Anggota KNR Perseroan sejak tanggal 14 Agustus 2017 berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 002/SK/PP-RE/KOM/VIII/2017 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Staf HRD di PT PP (2012-2016) dan Staff Compensation, Benefit & Industrial Relation di PT PP (2016-2017).

Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dipilih kembali hanya untuk masa 1 (satu) periode berikutnya. Masa jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi terhitung sejak 14 Agustus 2017 sampai dengan paling lama 3 (tiga) tahun.

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi senantiasa memberikan penilaian secara wajar dan seimbang terhadap seluruh kondisi yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam menyampaikan pendapatnya.

Seluruh anggota KNR berasal dari pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen. Dalam hal ini, anggota KNR juga tidak merangkap menjadi anggota Komite lainnya.

Hendiarso, SE (Member of Nomination and Remuneration Committee)

An Indonesian citizen, 50 years old. He received Bachelor's Degree from Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta in 1992. He was appointed as Member of KNR of the Company since August 14, 2017 based on Decision Letter of the Board of Commissioners No. 002/SK/PP-RE/KOM/VIII/2017 concerning Appointment of Nomination and Remuneration Committee.

Previously, he served as Assistant Site Administration Manager at PT PP (1995-2001), Staff of Finance at PT PP DVO III (2001-2004), Staff of Finance at PT Prima Jasa Aldodua (2004-2010), Staff of HR at PT Prima Jasa Aldo dua (2010-2014), and Head of HC Department at PT PP Peralatan Konstruksi (2014-2017).

Sri Bitia Sutia Selvi, SE (Member of Nomination and Remuneration Committee)

An Indonesian citizen, 29 years old. She received Bachelor's Degree in Industrial Engineering from Telkom University in 2010. She was appointed as Member of KNR of the Company since August 14, 2017 pursuant to Decision Letter of the Board of Commissioners No. 002/SK/PP-RE/KOM/VIII/2017 concerning Appointment of Nomination and Remuneration Committee.

Previously, she served as Staff of HRD at PT PP (2012-2016) and Staff of Compensation, Benefit & Industrial Relation at PT PP (2016-2017).

Term of Office of Nomination and Remuneration Committee

The term of office of members of the Nomination and Remuneration Committee is no longer than the term of office of the Board of Commissioners, as stipulated in the Articles of Association of the Company. The Nomination and Remuneration Committee members can be reappointed only for the next 1 (one) period. The term of office of the Nomination and Remuneration Committee is from August 14, 2017 to a maximum of 3 (three) years.

Independency of Nomination and Remuneration Committee

Members of Nomination and Remuneration Committee always provides fair and balanced assessment to all relevant conditions and not affected by personal interest or other parties in providing their opinion.

All members of KNR are from independent parties that have no financial, management, share ownership and/or family relationships with the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or controlling shareholders or relations with Banks that may affect their ability to act independently. In this regard, members of KNR also have no concurrent positions in other committees.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

Tugas, tanggung jawab, serta wewenang KNR dapat dikategorikan dalam Kebijakan Secara Umum, Kebijakan Nominasi, dan Kebijakan Remunerasi.

1. Kebijakan Secara Umum

- Mengawasi tugas dan tanggung jawab Direksi terkait visi dan misi Perseroan;
- Mengembangkan kebijakan Sumber Daya Manusia, namun tidak terbatas pada kebijakan nominasi remunerasi semata, melainkan meliputi pengelolaan bakat, retensi, rencana suksesi, pelatihan, desain, organisasi dan rekrutmen; dan
- Mengevaluasi dan mengimplementasikan tata kelola perusahaan terkait kebijakan Sumber Daya Manusia dan Pedoman Perilaku.

2. Kebijakan Nominasi

- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan; dan
- Memberikan rekomendasi mengenai kriteria calon anggota Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Kebijakan Remunerasi

- Melakukan Evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi; dan
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
 - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Sepanjang tahun 2018, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan yang dihadiri oleh seluruh Anggota KNR, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama / Name	Posisi / Position	Jumlah Rapat / Number of Meetings	Jumlah Kehadiran / Attendance Rate	Persentase Kehadiran / Attendance Percentage
Ir. Ketut Darmawan	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi / Chairman of Nomination and Remuneration Committee	3	3	100%
Hendarso, SE	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Member of Nomination and Remuneration Committee	3	3	100%
Sri Bitia Sutia Selvi, SE	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Member of Nomination and Remuneration Committee	3	3	100%

Duties, Responsibilities, and Authorities of Nomination and Remuneration Committee

Duties, responsibilities, and authorities of KNR can be categorized as General Policies, Nomination Policies, and Remuneration Policies.

1. General Policies

- Supervising duties and responsibilities of the Board of Directors related to the Company's vision and mission;
- Developing Human Resources Policies, not only limited on remuneration policies as it also includes talent management, retention, succession plan, training, design, organization and recruitment; and
- Evaluating and implementing good corporate governance in relation to Human Resources and Code of Conduct.

2. Nomination Policies

- Preparing and providing recommendations on system and procedure of selection and/or substitution of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders; and
- Providing recommendations on criteria of candidates of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders.

3. Remuneration Policies

- Evaluating remuneration and nomination policies; and
- Providing recommendations to the Board of Commissioners concerning:
 - Remuneration policies for the Board of Commissioners and the Board of Directors to be submitted to the General Meeting of Shareholders;
 - Remuneration policies for Executives and employees as a whole to be submitted to the Board of Directors.

Nomination and Remuneration Committee Meetings

In 2018, the Nomination and Remuneration Committee held 3 (three) times meetings attended by all members of KNR, with the following attendance rate:

Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Pelaksanaan rapat KNR memiliki agenda masing-masing di setiap pertemuannya. Agenda rapat KNR sepanjang tahun 2018 meliputi:

- Membantu Dewan Komisaris dalam menentukan struktur Remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi.
- Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kesesuaian Remunerasi yang diterima oleh masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi.
- Kebijakan Remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Laporan Pelaksanaan Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2018

Sepanjang tahun 2018, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan beberapa program terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, yang diuraikan pada tabel berikut:

No.	Program yang Dilaksanakan pada Tahun 2018 / Program Implemented in 2018	Status / Status
1.	Penetapan struktur Remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi / Determination of Remuneration structure for the Board of Commissioners and Board of Directors	Sudah Terlaksana / Implemented
2.	Penetapan Remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi / Determination of Remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors	Sudah Terlaksana / Implemented

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan dibentuk untuk menjalankan fungsi sebagai fasilitator Perusahaan dan Direksi dengan pihak eksternal yang mencakup hubungan dengan semua pemangku kepentingan, termasuk publik. Sekretaris Perusahaan ditunjuk dan diangkat serta bertanggung jawab kepada Direksi.

Persyaratan, proses seleksi, dan tata cara pengangkatan Sekretaris Perusahaan PP Presisi dilakukan dengan merujuk kepada Peraturan OJK dan Peraturan Bursa yang berlaku serta *best practices* GCG yang berlaku umum.

Profil Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 004/SK/PPPRESISI/2017 tanggal 1 Agustus 2017, Perseroan telah menunjuk Benny Pidakso, sebagai Sekretaris Perusahaan PT PP Presisi Tbk. Profil Benny Pidakso telah diuraikan dalam pembahasan profil Direksi pada halaman 74.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan atau Pasar Modal.
3. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
4. Sebagai penghubung atau *contact person* atau Perseroan atau Perusahaan Publik dengan OJK dan masyarakat.

Agenda of Nomination and Remuneration Meeting

The Nomination and Remuneration Committee meeting has its own agenda for each meeting. In 2018, agenda of the Nomination and Remuneration Committee meeting includes:

- Assisting the Board of Commissioners in determining the structure of Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors.
- Assisting the Board of Commissioners in evaluating the suitability of Remuneration received by each Board of Commissioners and Board of Directors.
- Remuneration Policy for members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Report on Performance of Nomination and Remuneration Committee in 2018

In 2018, Nomination and Remuneration Committee has implemented several programs related to implementation of their duties and responsibilities as described in the following table:

CORPORATE SECRETARY

Corporate Secretary is established to perform the function as facilitators for the Company and the Board of Directors with external parties that include relations with all stakeholders, including the public. Corporate Secretary is selected and appointed as well as responsible to the Board of Directors.

Requirements, selection process, and procedures of appointment of Corporate Secretary of PP Presisi is conducted by referring to applicable OJK Regulations and Stock Exchange Regulations as well as generally accepted GCG best practices.

Corporate Secretary Profile

Pursuant to Decision Letter of the Board of Directors No. 004/SK/PPPRESISI/2017 dated August 1, 2017, the Company has appointed Benny Pidakso, as Corporate Secretary of PT PP Presisi Tbk. Profile of Benny Pidakso has been described in the Board of Director profile on page 74.

Duties and Responsibilities of Corporate Secretary

1. Following developments of Capital Market, particularly prevailing laws and regulations in Capital Market.
2. Providing services to the public on each information required by investors in relation to conditions of the Company or Capital Market.
3. Providing inputs to the Board of Directors of the Company or Public Company to comply with provisions of Law Number 8 of 1995 concerning Capital Market and its implementation regulations.
4. Acting as a liaison officer or contact person or the Company or Public Company with OJK and public.

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 5. Mengelola RUPS. 6. Mengelola Rapat Direksi. 7. Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dan merecord Agenda, Minute, Kebijakan, Keputusan dan data-data yang dihasilkan didalam Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi. 8. Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG. 9. Mengangani dan mengkoordinir Permasalahan Legal Perusahaan. 10. Menata-usahakan serta menyimpan dokumen-dokumen Perusahaan. 11. Mengikuti perkembangan Peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 12. Memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 13. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau stakeholder atas informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi perusahaan: <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Keuangan Tahunan (<i>Audited</i>); b. Laporan Kinerja Perusahaan Tahunan (<i>Annual Report</i>); c. Informasi Fakta Material; dan d. Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode khusus, dll). 14. Sebagai penghubung antara perusahaan dengan lembaga terkait dan masyarakat (luar dan lingkungan). | <ol style="list-style-type: none"> 5. Organizing the GMS. 6. Organizing the Board of Directors Meeting. 7. Organizing Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors and recording Agenda, Minutes, Policies, Decisions, and Data generated in Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors. 8. Supervising application of prevailing regulations by adhering to GCG principles. 9. Managing and coordinating Legal Issues of the Company. 10. Arranging and storing the Company's documents. 11. Following development of prevailing Regulations in Capital Market. 12. Providing inputs to the Board of Directors to comply with Law Number 8 of 1995 concerning Capital Market. 13. Providing services to the public or stakeholders on information required by investors related to the Company's conditions: <ol style="list-style-type: none"> a. Audited Annual Financial Statements; b. Annual Report of the Company; c. Material Facts and Information; and d. Significant products or findings (awards, flagship projects, findings of special methods, etc.). 14. Acting as a liaison officer between the company with related institutions and community (external parties and environment). |
|--|---|

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sekretaris Perusahaan Tahun 2018

Sepanjang tahun 2018, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan berbagai program kerja, yang diuraikan pada tabel berikut ini:

Report on Performance of Corporate Secretary Activities in 2018

Throughout 2018, Corporate Secretary has implemented several work programs, described in the following table:

No.	Program yang Dilaksanakan pada Tahun 2018 / Program Implemented in 2018	Status / Status
1.	Menyelenggarakan RUPS Tahun Buku 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 5 April 2018 dan mendokumentasikan risalah rapat, akta RUPST beserta hal-hal lain yang terkait pelaksanaan RUPST. / Implementation of GMS for 2017 Fiscal Year on April 5, 2018 and documentation of the minutes of meeting and other matters related to the implementation of the AGM.	Sudah Terlaksana / Implemented
2.	Membuat Risalah rapat Direksi serta menyimpan/mendokumentasikan Risalah Rapat tersebut. / Preparation of Minutes of Board of Directors Meeting and keeping/documenting the minutes of the Board of Directors meeting.	Sudah Terlaksana / Implemented
3.	Melakukan sosialisasi penerapan tata kelola perusahaan. / Dissemination of good corporate governance implementation.	Sudah Terlaksana / Implemented
4.	<p>Terkait kegiatan investor relation dan media relation :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sama dengan data pak bambang tolong ditambah melakukan Public Expose; b. Melaporkan kepada Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atas setiap kewajiban pelaporan maupun setiap informasi yang material; c. Menerbitkan Press Release; dan d. Melaksanakan kegiatan internal perusahaan dengan bekerja sama dengan unit terkait. <p>Related to investor relation and media relation:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Public Expose; b. Report to Indonesia Stock Exchange, Financial Services Authority on every reporting obligation and material information; c. Issue Press Release; and d. Implement internal activities by cooperating with related unit. 	Sudah Terlaksana / Implemented

Sasaran Kinerja Sekretaris Perusahaan Tahun 2019

Secara konsisten, Sekretaris Perusahaan PP Presisi berupaya untuk menyempurnakan kinerjanya di tahun depan melalui penyusunan target kinerja yang akan dicapai Biro Sekretaris Perusahaan pada tahun 2019 mendatang, yang meliputi:

1. Meningkatkan praktik Tata Kelola Perusahaan di seluruh lingkungan Perseroan.
2. Meningkatkan komunikasi dengan seluruh Pemangku Kepentingan.
3. Memberikan masukan & tindak lanjut kepada Direksi tentang praktik Tata Kelola Perusahaan dan feedback dari Pemegang Saham Publik serta semua pihak terkait.

HUBUNGAN INVESTOR

PP Presisi berkomitmen untuk terus memberikan informasi terkini terkait kegiatan pengelolaan bisnis Perseroan kepada seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Perseroan berupaya untuk selalu menjalin komunikasi rutin dengan para pemegang saham, investor, analis, dan media.

Komunikasi tersebut bertujuan untuk membangun dan mengembangkan kepercayaan publik serta meningkatkan pemahaman tentang kegiatan bisnis Perseroan. Komunikasi rutin ini diharapkan juga akan memperkuat *goodwill* dan reputasi Perseroan di kalangan investor, analis serta dengan media.

Aktivitas Hubungan Investor Tahun 2018

Selama tahun 2018, Hubungan Investor telah melakukan beberapa kegiatan, antara lain:

No.	Jenis Kegiatan / Type of Activity	Frekuensi / Frequency
1.	<i>Investor Gathering</i>	3 kali / times
2.	<i>Investor Conference</i>	3 kali / times
3.	<i>Investor Summit</i> yang diselenggarakan oleh IDX	1 kali / once
4.	<i>Site/Project Visit (Site/Project Visit ke pembangunan proyek 3rd Runway Project – Bandara Soekarno Hatta)</i>	2 kali / times
5.	<i>Small Group Meeting</i> di luar event <i>Investor Gathering & Investor Conference</i>	10 kali / times
6.	<i>One on One Meeting dan Conference Call</i>	48 kali / once
7.	<i>Media Gathering</i>	1 kali / times

Sebagai *update* kepada *Stakeholders*, Hubungan Investor mengeluarkan informasi berupa:

- a. *Company Update Presentation* secara *reguler* (per kuartal) dan *non-reguler*;
- b. *Investor Bulletin* (per bulan)
- c. *Press Release* secara *reguler* (per kuartal) dan *non-reguler*.

Seluruh informasi tersebut dapat diakses pada situs web PT PP Presisi Tbk, yaitu www.pp-presisi.co.id.

Corporate Secretary Performance Target for 2019

Corporate Secretary consistently strives to improve performance in the following year by preparing targets for 2019, such as:

1. Improving Corporate Governance practice in the Company's environment.
2. Improving communication with all Stakeholders.
3. Providing input & follow-up to the Board of Directors on Corporate Governance practice and feedback from Public Shareholders and all related parties.

INVESTOR RELATIONS

PP Presisi is committed to continue providing latest information related to business management of the Company to all shareholders and stakeholders. Therefore, the Company strives to always have routine communication with shareholders, investors, analysts, and media.

Such communication is aimed to build and develop public trust as well as enhance understanding on business activities of the Company. This routine communication is also expected to strengthen the Company's *goodwill* and reputation among investors, analysts, and media.

Investor Relations Activities in 2018

Throughout 2018, Investor Relations has carried out several activities, among others:

As an update to Stakeholders, Investor Relations publishes information in the form of:

- a. *Company Update Presentation* held regularly (per quarter) and non-regularly;
- b. *Investor Bulletin* (per month)
- c. *Regular Press Release* (quarter basis) and non-regular.

All of information regarding such activities are accessible on the website of PT PP Presisi Tbk at www.pp-presisi.co.id. Internal

SATUAN PENGAWASAN INTERN

Dasar Pembentukan Satuan Pengawasan Intern

PP Presisi membentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) berdasarkan:

- Undang-Undang RI No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 1998 tanggal 17 Januari 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), terutama pada BAB III – Satuan Pengawasan Intern;
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal; dan

Struktur dan Kedudukan Satuan Pengawasan Intern

Satuan Pengawasan Intern (SPI) merupakan unit satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama berdasarkan Piagam Unit Audit Internal pada tanggal 1 Agustus berdasarkan POJK No. 56/POJK.04/2015 dan Surat Persetujuan Dewan Komisaris No.001/KOM/PPRE/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017.

Hingga akhir tahun 2018, SPI beranggotakan 4 (empat) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala SPI, 1 (satu) orang *Assessor GCG*, 1 (satu) orang Auditor Internal bidang Operasional, dan 1 (satu) orang Auditor Internal bidang Keuangan. Hasil pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern dibahas di Rapat Direksi untuk dilaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Profil Kepala Satuan Pengawasan Intern

Syaukat Noor (Ketua SPI)

Profil Syaukat Noor telah diuraikan dalam pembahasan Daftar Pejabat Perusahaan yang terletak di halaman 77.

Kualifikasi/Sertifikasi Profesi Satuan Pengawasan Intern

Pelaksanaan fungsi audit internal telah merujuk kepada Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal oleh *The Institute of Internal Auditors*. Seluruh anggota auditor internal juga telah dinyatakan telah sertifikasi profesi audit internal yang dikeluarkan oleh lembaga PPAK sebanyak 5 orang, FKSPI sebanyak 5 orang, dan DPS Consulting sebanyak 1 orang. Sedangkan untuk Kepala SPI Perseroan, saat ini telah memiliki sertifikasi level Professional Internal Audit.

Independensi Satuan Pengawasan Intern

Perseroan menjaga independensi audit internal ditujukan demi mewujudkan penerapan GCG yang baik dalam Perseroan. Hal ini mendukung dan memastikan bahwa semua kegiatan operasional telah dikendalikan dan dikelola dengan efektif,

AUDIT UNIT

Basis of Establishment of Internal Audit Unit

PP Presisi established Internal Audit Unit based on:

- Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprise;
- Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 12 of 1998 dated January 17, 1998, concerning Perusahaan Perseroan (Persero), especially on Chapter III – Internal Audit Unit;
- Regulation of the Minister of SOE Number PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance on State-Owned Enterprise; and
- Regulation of Financial Services Authority Number: 56/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 concerning Establishment and Guideline on Formulation of Internal Audit Charter,

Internal Audit Unit Structure and Position

Internal Audit is a unit under and responsible to the President Director based on Internal Audit Charter on August 1, pursuant to POJK No. 56/POJK.05/2015 and Letter of Approval of the Board of Commissioners No. 001/KOM/PPRE/XXI/2017 dated December 11, 2017.

As of the end of 2018, Internal Audit Unit has of 4 (four) people, consisting of 1 (one) Head of Internal Audit Unit, 1 (one) GCG Assessor, 1 (one) Internal Auditor on Operations and 1 (one) Internal Auditor on Finance. Audit result from Internal Audit Unit is discussed in the Board of Directors Meeting to be reported to the President Director and the Board of Commissioners.

Head of Internal Audit Unit Profile

Syaukat Noor (Head of Internal Audit Unit)

Profile of Syaukat Noor has been presented in List of Company Officials on page 77.

Professional Qualification/Certification of Internal Audit

Implementation of internal audit function has referred to International Standards for Professional Practice of Internal Audit issued by The Institute of Internal Auditors. All internal auditors have been declared passed certification of professional internal audit issued by PPAK by 5 people, FKSPI by 5 people, and DPS Consulting by 1 person. Currently, Head of SPI has Professional Internal Audit certification.

Independency of Internal Audit

The Company maintains internal audit independency in order to realize proper GCG implementation in the Company. This supports and ensures that all operational activities have been controlled and managed in an effective, transparent, and

transparan, dan obyektif sesuai dengan pengetahuan serta keterampilan auditor dalam menjalankan tugas.

Kode Etik Satuan Pengawasan Intern

Dalam menjalankan tugasnya, Auditor SPI Perseroan harus tunduk kepada Kode Etik Profesi, yaitu:

- Menjaga kerahasiaan Perusahaan.
- Berperilaku dan bersikap jujur, disiplin, komunikatif, obyektif, cermat dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.
- Memiliki integritas yang tinggi terhadap perusahaan.
- Kepala SPI dan Auditor SPI dilarang merangkap tugas dan jabatan dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan.
- Menerapkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.
- Internal Auditor wajib bersikap jujur, objektif, hati – hati, bijaksana, bertanggung jawab, berani, dan memiliki integritas yang tinggi, serta harus mampu bertindak secara independen dalam menjalankan tugas maupun kewajibannya, dan harus mampu memelihara kepercayaan yang diberikan oleh Direktur Utama dan atau Kepala SPI.
- Internal Auditor harus mampu memelihara kepercayaan yang diberikan dalam rangka tugas pemeriksaan.
- Internal Auditor harus menggunakan semua kemampuannya untuk memperoleh bukti – bukti yang memadai guna mendukung pernyataannya.
- Internal Auditor harus berusaha untuk meningkatkan keahlian dalam melakukan pekerjaannya dengan memelihara kompetensi jabatan, moralitas dan menjunjung tinggi kehormatan.
- Internal Auditor harus mampu membangun komunikasi yang baik dan intens dengan sesama pemeriksa dan auditor eksternal, untuk kepentingan perusahaan dalam pelaksanaan tugas yang diembannya.
- Menghindari kegiatan atau perbuatan yang merugikan atau patut diduga dapat merugikan perusahaan.
- Memelihara dan mempertahankan moral dan martabat auditor SPI.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pengawasan Intern

Satuan Pengawasan Intern dibentuk untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab utama, yakni membantu Direktur Utama dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama dalam masalah pemeriksaan internal bidang operasional dan keuangan untuk memastikan bahwa peraturan perusahaan serta pengelolaan proyek berjalan sesuai dengan harapan Perusahaan. Pemeriksaan Internal dilakukan secara berkala sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan atau (Program Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan). Secara umum tugas dan tanggung jawab SPI Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) termasuk perhitungan anggaran biaya yang berkaitan dengan audit dan meminta arahan Direksi dalam penyusunan PKPT.

objective manner in accordance with knowledge and skills of auditors in performing their duties.

Code of Conduct of Internal Audit Unit

In implementing their duties, Internal Auditors of the Company must comply with Professional Code of Conduct, namely:

- Maintaining the Company's confidentiality.
- Behaving and being honest, discipline, communicative, objective, thorough, and responsible in performing their duties.
- Having high integrity towards the Company.
- Head of Internal Audit Unit and Internal Auditors are prohibited from having concurrent duties and positions in implementation of the Company's operational activities.
- Applying knowledge, expertise, and experience required in performing audit.
- Internal Auditors shall be honest, objective, prudent, discreet, responsible, courageous, and having high integrity, as well as capable of taking action independently in implementing duties and responsibilities. Internal Auditors also have to be capable in maintaining trust of the President Director and Head of Internal Audit Unit
- Internal Auditors shall be capable of maintaining trust in auditing duties.
- Internal Auditors must exert all of their skills to acquire sufficient evidence to support their statement.
- Internal Auditors must strive to improve capabilities in performing work by maintaining competency, morality, and upholding honor.
- Internal Auditors must be capable of developing good and intense communication with fellow auditors and external auditors for the Company's interest in performing their duties.
- Avoiding activities or action that may harm or allegedly may cause harm to the Company.
- Maintaining and upholding moral and dignity of Internal Audit Unit auditors.

Duties and Responsibilities of Internal Audit Unit

Internal Audit Unit is established to perform their main duties and responsibilities, namely assisting the President Director in performing responsibility on internal audit issues on operational and financial sector to ensure that the Company's regulations and project management are running in accordance with the Company's expectations. Internal Audit is conducted periodically in accordance with Annual Work Program and Budget of the Company. In general, duties and responsibilities of the Company's Internal Audit Unit are as follows:

1. Preparing Annual Audit Work Program (PKPT) including calculation of budget related to audit and requesting direction from the Board of Directors in preparation of PKPT.

2. Melakukan Identifikasi permasalahan perusahaan untuk dapat menetapkan obyek pemeriksaan di bidang operasional maupun keuangan perusahaan.
 3. Melakukan pemeriksaan terhadap obyek yang telah ditetapkan.
 4. Melakukan kajian untuk mengetahui akar permasalahan atas terjadinya penyimpangan.
 5. Melakukan penilaian kecukupan atas sistem pengendalian intern, melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai kebijakan perusahaan serta pengelolaan obyek yang diperiksa.
 6. Memberikan usulan perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa kepada Direktur Utama.
 7. Menyiapkan dan mendokumentasikan Kertas Kerja Pemeriksaan.
 8. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan menyampaikan ke Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
 9. Memonitor pelaksanaan rekomendasi (tindak lanjut) dari hasil pemeriksaan yang disampaikan ke auditee. Penanggung jawab memonitor pelaksanaan tindak lanjut adalah Ketua Tim.
 10. Bekerja sama dengan Komite Audit.
 11. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
 12. SPI melakukan penilaian atas program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal secara keseluruhan. Penilaian atau *assessment* dilakukan oleh *assessor* independen sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
 13. Menjadi *counterpart* saat dilakukan *assessment* penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) oleh *assessor* independen.
 14. Melakukan *self assessment* penerapan GCG setiap 2 (dua) tahun sekali.
 15. Memonitor pelaksanaan rekomendasi hasil *assessment* GCG.
 16. Me-review secara berkala buku pedoman yang berhubungan dengan pelaksanaan GCG PT PP Presisi Tbk dan melakukan revisi jika terjadi tidak kesesuaian dengan UU / Peraturan yang berlaku.
 17. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas, minimal pada bidang keuangan, akuntansi, operasional, Sumber Daya Manusia, pemasaran, *engineering*, produktifitas, teknologi informasi dan melakukan evaluasi sistem prosedur dan kebijakan operasi perusahaan yang dilakukan secara kesinambungan.
 18. Menyusun Program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
2. Identifying issues of the Company to determine audit objects in operational and financial sector of the Company.
 3. Auditing objects that have been determined.
 4. Conducting review to understand the root of the issue on deviation.
 5. Assessing adequacy of internal control system, evaluating implementation of internal control and risk management system in accordance with the Company's policies as well as management of audited objects.
 6. Providing suggestions for improvement and objective information on audited activities to the President Director.
 7. Preparing and documenting Audit Working Papers.
 8. Preparing Report on Audit Results and submitting it to President Director and Board of Commissioners.
 9. Monitoring implementation of recommendation (follow up) from audit result submitted to auditee. Person in charge for monitoring implementation of follow up is Team Leader.
 10. Cooperating with the Audit Committee.
 11. Performing special audit when required.
 12. Assessing program of quality assurance and improvement on Internal Audit Function in a comprehensive manner. Assessment is carried out by independent assessor for the minimum of once in 5 (five) years.
 13. Acting as a counterpart for assessment on implementation of Good Corporate Governance (GCG) by independent assessor.
 14. Conducting self-assessment on implementation of GCG once every 2 (two) years.
 15. Monitoring implementation of recommendation on GCG assessment result.
 16. Reviewing guidelines related to GCG implementation of PT PP Presisi Tbk and performing revision in the event of discrepancy with prevailing Laws/Regulations.
 17. Auditing and assessing efficiency and effectiveness, at minimum on sectors of financial, accounting, operational, Human Resources, marketing, engineering, productivity, information technology, and evaluating system of the Company's operational procedures and policies conducted in a continuous manner.
 18. Preparing Program to evaluate quality of internal audit activities.

Piagam Satuan Pengawasan Intern

Sebagai landasan legal formal dan pedoman bagi Unit Audit Internal dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Perseroan telah membentuk Piagam Audit Internal dengan persetujuan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 1 Agustus berdasarkan POJK No.56 dan Surat Persetujuan Dewan Komisaris No.001/KOM/PPRE/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017.

Internal Audit Charter

As formal and legal foundation as well as guidelines for Internal Audit Unit in performing their duties and authorities, the Company has established Internal Audit Charter with approval from the Board of Commissioners and the Board of Directors on August 1, pursuant to POJK No. 56 and Letter of Approval of the Board of Commissioners No. 001/KOM/PPRE/XII/2017 dated December 11, 2017.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Satuan Pengawasan Intern Tahun 2018

Pada tahun 2018, Satuan Pengawasan Intern telah melaksanakan kegiatan audit internal (*monitoring dan control*) yang meliputi:

Report on Implementation of Internal Audit Unit Activities in 2018

In 2018, Internal Audit Unit has implemented internal audit activities (monitoring and control) consisting of:

Kegiatan / Activity	Rencana / Plan		Realisasi / Realization	
Audit / Civil:	Divisi Peralatan / Equipment Division	8 – 19 Januari 2018 / January 8-19, 2018	Divisi Peralatan / Equipment Division	8 – 19 Januari 2018 / January 8-19, 2018
	Divisi Operasi / Operation Division	19 – 28 Februari 2018 / February 19-28, 2018	Divisi Operasi / Operation Division	21 – 28 Februari 2018 / February 21-28, 2018
				1 – 31 Maret 2018 / March 1-31, 2018
				1 – 30 April 2018 / April 1-30, 2018
	Divisi Rantai Pasok / Supply Chain Division	22 – 31 Januari 2018 / January 22-31, 2018	Divisi Rantai Pasok / Supply Chain Division	22 – 31 Januari 2018 / January 22-31, 2018
		1 – 2 Februari 2018 / February 1-2, 2018		1 – 2 Februari 2018 / January 1-2, 2018
	Divisi Akutansi & Keuangan / Accounting & Finance Division	20 – 31 Agustus 2018 / August 20-31, 2018	Divisi Akutansi & Keuangan / Accounting & Finance Division	28 – 31 Agustus 2018 / August 28-31, 2018
				1 – 19 September 2018 / September 1-19, 2018
	Divisi Sumber Daya Manusia / Human Capital Division	3 – 14 September 2018 / September 3-14, 2018	Divisi Sumber Daya Manusia / Human Capital Division	12 – 27 Februari 2018 / February 12-27, 2018
	Divisi Teknik & Pemasaran / Engineering & Marketing Division	5 – 15 Februari 2018 / February 5-15, 2018	Divisi Teknik & Pemasaran / Engineering & Marketing Division	5 – 15 Februari 2018 / February 5-15, 2018
	Divisi Sistem Manajemen & IT / Management System & IT Division	17 – 28 September 2018 / September 17-28, 2018	Divisi Sistem Manajemen & IT / Management System & IT Division	22 – 31 Januari 2018 / January 22-31, 2018
				1 – 2 Februari 2018 / February 1-2, 2018
	Biro Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary Bureau	20 – 29 Juni 2018 / June 20-29, 2018	Biro Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary Bureau	2 – 20 Juli 2018 / July 2-20, 2018
		2 – 3 Juli 2018 / July 2-3, 2018		
Bekisting : Proyek Amartha View Semarang / Formwork: Amartha View Semarang Project	2 – 12 April 2018 / April 2-12, 2018	Bekisting : Proyek Aoyama / Formwork: Amartha View Semarang Project	19 – 31 Maret 2018 / March 19-31, 2018	
			1 – 3 April 2018 / April 1-3, 2018	
Sipil : Proyek Normalisasi Banjir Kanal Jakarta & Sunter (JEDI) / Civil: Jakarta & Sunter Canal Flood Normalization Project (JEDI)	22 – 30 April 2018 / April 22-30, 2018	Sipil : Pandaan Malang / Civil:	6 – 27 April 2018 / April 6-27, 2018	
	1 – 4 Mei 2018 / May 1-4, 2018		Batching Plant : Proyek Pandaan Malang / Batching Plant: Pandaan Malang Project	
Sipil : Pandaan Malang / Civil: Pandaan Malang	1 – 12 Oktober 2018 / October 1-12, 2018			
Batching Plant : Grand Kamala Lagoon / Batching Plant: Pandaan Malang Project	9 – 20 Juli 2018 / July 9-20, 2018			

Kegiatan / Activity	Rencana / Plan		Realisasi / Realization	
Non-Audit	A. MONITORING		A. MONITORING	
	Hasil Audit / Internal Audit / Result of Audit/Internal Audit	14 – 30 Oktober 2018 / October 14-30, 2018 6 – 21 Desember 2018 / December 6-21, 2018	Hasil Audit / Internal Audit / Result of Audit/Internal Audit	8 – 20 Maret 2018 / March 8-20, 2018 9 – 10 April 2018 / April 9-10, 2018 17 – 28 Mei 2018 / May 17-28, 2018 27 – 31 Juli 2018 / July 27-31, 2018 1 – 2 Agustus 2018 / August 1-2, 2018 18 – 24 September 2018 / September 18-24, 2018 12 Desember 2018 / December 12, 2018
	Sosialisasi Penerapan GCG / Dissemination of GCG Implementation	5 – 9 Maret 2018 / March 5-9, 2018	Sosialisasi Penerapan GCG / Dissemination of GCG Implementation	19 Juli 2018 / January 19, 2018
			Rapat Review Hasil Internal Audit / Meeting on Review on Internal Audit Results	22 Oktober 2018 / October 22, 2018
	B. PROGRAM PELATIHAN / TRAINING PROGRAM		B. PROGRAM PELATIHAN / TRAINING PROGRAM	
	Audit Operasional / Operational Audit	7 – 16 Mei 2018 / May 7-16, 2018	Audit Operasional / Operational Audit	7 – 16 Mei 2018 / May 7-16, 2018
	Komunikasi dan Psikologi Audit / Audit Psychology and Communication	6 – 15 Agustus 2018 / August 6-15, 2018	Komunikasi dan Psikologi Audit / Audit Psychology and Communication	6 – 15 Agustus 2018 / August 6-15, 2018
	Penulisan Laporan Hasil Audit yang Efektif / Writing on Report on Effective Audit Results	7 – 10 Mei 2018 / May 7-10, 2018	Interpretasi KPKU / KPKU Interpretation	21 – 23 November 2018 / January 21-23, 2018
	Audit atas Laporan Keuangan / Audit on Financial Statements	9 – 14 Agustus 2018 / August 9-14, 2018	Seminar dan Pengukuhan PIA / PIA Inauguration and Seminar	2 – 6 Oktober 2018 / October 2-6, 2018
	C. PROSEDUR, WI & STANDAR / PROCEDURE, WI & STANDARD		C. LAIN - LAIN / OTHERS	
	Evaluasi Kebutuhan P, WI, dan Standar Perusahaan / Evaluation on Needs of Procedures, WI, and Company Standards	2 – 5 & 8 Januari 2018 / January 2-5 & 8, 2018	Penyusunan PKT / PKPT / KT/PKPT Preparation	18 – 31 Desember 2018 / December 18-31, 2018
	Memfasilitasi proses Pemetaan Kebutuhan Prosedur, WI, dan Standar / Facilitating Process of Mapping on Need of Procedures, WI, and Standards	2 – 5 & 8 Januari 2018 / January 2-5 & 8, 2018	Memahami Risiko Hukum dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa / Understanding Legal Risk in Goods and Services Procurement	8 November 2018 / November 8 2018
	Memberikan Konsultasi Proses Pembuatan P, WI & Standar / Providing Consultation for Preparation of Procedures, WI, & Standards	2 – 5 Januari 2018 / January 2-5, 2018	Memahami "A-Z GCG" / Understanding "A-Z GCG"	30 – 31 Mei 2018 / May 30-31, 2018
		5 – 9 Maret 2018 / March 5-9, 2018	Peran Auditor Internal Dalam Peningkatan Governance, Risk, And Control (GRC) di Era Disruptif / Role of Internal Auditor in Improving Governance, Risk, and Control (GRC) in Disruptive Era	8 – 10 Agustus 2018 / August 8-10, 2018
		22 – 23 Oktober 2018 / October 22-23, 2018	Focus Group Discussion (FGD) Penerapan GCG / Focus Group Discussion (FGD) on GCG Implementation	5 September 2018 / September 5, 2018
		5 – 12 November 2018 / November 5-12, 2018	Pengarahan kepada Tim Penerapan GCG PT PP Presisi Tbk / Direction for GCG Implementation Team of PT PP Presisi Tbk	17 September 2018 / September 17, 2018
	D. LAIN - LAIN / OTHERS		Memfasilitasi Proses Validasi GCG 1 – 5 Desember 2018 / Facilitating GCG Validation Process December 1-5, 2018	26 – 30 November 2018 / November 26-30, 2018
	Penyusunan PKT / PKPT / KT/PKPT Preparation	19 – 30 November 2018 / November 19-30, 2018	Sosialisasi WBS (Whistle Blowing System) / Whistleblowing System (WBS) Dissemination	25 Oktober 2018 / October 25, 2018
	Mengikuti Seminar dari luar / Participating in seminar from external party	15 – 26 Oktober 2018 / October 15-26, 2018	Membahas Progress hasil Audit KAP / Discuss on KAP Audit progress	14 Desember 2018 / December 14, 2018
	Pendampingan Audit Eksternal (jika ada) / External Audit Accompaniment (if any)	-		

AUDITOR EKSTERNAL

Guna memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan Perseroan, Perseroan menunjuk auditor eksternal sebagai pihak ahli dan independen untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kebenaran dan kewajaran laporan yang disajikan oleh Direksi. Penugasan auditor eksternal dilakukan untuk membantu Perseroan dalam melaksanakan audit terkait laporan keuangan konsolidasian untuk selanjutnya diberikan masukan oleh Dewan Komisaris atas hasil auditnya. Penentuan Kantor Akuntan Publik (KAP) dilakukan melalui keputusan RUPS.

Dalam menentukan KAP, Perseroan memiliki kriteria yang meliputi:

- Auditor Eksternal tidak memiliki hubungan afiliasi dan terbebas dari benturan kepentingan Dewan Komisaris, Direksi dan pihak lain yang memiliki kepentingan pada Perseroan.
- KAP harus memiliki reputasi yang baik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- KAP harus memiliki kinerja yang baik dan menjunjung tinggi kode etik profesi.

Nama Kantor Akuntan Publik dan Akuntannya Tahun 2017 - 2018

Dalam membantu Perseroan dalam melaksanakan audit terhadap Laporan Keuangan tahun buku 2018, PP Presisi menunjuk KAP Hertanto, Grace, Karunawan. Berikut ini merupakan Auditor Eksternal PT PP Presisi Tbk dalam 2 (dua) tahun terakhir:

Tahun Buku / Fiscal Year	Nama KAP / Public Accounting Firm	Nama Akuntan / Accountant
2017	KAP Hertanto, Grace, Karunawan	Bambang Karunawan, CPA
2018	KAP Hertanto, Grace, Karunawan	Bambang Karunawan, CPA

Efektivitas Dan Frekuensi Komunikasi Auditor Eksternal dan Direksi

Komunikasi yang memadai dan koordinatif senantiasa dipelihara dan dibina oleh Perseroan dengan pihak auditor eksternal demi mewujudkan sinergi dan kerja sama yang diinginkan sekaligus turut mengawasi efektivitas penyelenggaraan fungsi audit eksternal.

Jasa Lain yang Dilakukan KAP

Selain jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian, Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan tidak memberikan jasa audit lain untuk keperluan Perseroan.

Biaya Audit Tahun 2018

Besarnya fee Audit Eksternal Auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan untuk tahun buku 2018 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan jasa yang diberikan yaitu jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan Tahun Buku 2018.

EXTERNAL AUDITORS

In order to generate added value to the Company's Financial Statements, PP Presisi has appointed external auditors as experts and independent parties to perform audit on validity and fairness of reports provided by the Board of Directors. Assignment of external auditors is carried out to assist the Company in performing audit related to consolidated financial statements to be subsequently provided with inputs by the Board of Commissioners on the audit result. Determination of Public Accounting Firm (KAP) is conducted through resolution of GMS.

In determining KAP, the Company has criteria that includes:

- External Auditors have no affiliations and conflict of interests with the Board of Commissioners, the Board of Directors, and other parties with interests in the Company.
- KAP shall have good reputation and registered in Financial Services Authority (OJK).
- KAP shall have good performance and adhere to professional code of conduct.

Public Accounting Firm and Accountants in 2017-2018

In assisting the Company in performing audit to the Financial Statements of 2018 Fiscal Year, PP Presisi appointed KAP Hertanto, Grace, Karunawan. External Auditors of PT PP Presisi Tbk in the last 2 (two) years are as follows:

Communication Effectiveness and Frequency of External Auditors and the Board of Directors

Adequate and coordinative communication is always maintained and developed by the Company with external auditors in order to realize the desired synergy and cooperation as well as to participate in overseeing effectiveness of external audit function implementation.

Other Services Rendered by Public Accounting Firm

Other than audit service on Consolidated Financial Statements, Public Accounting Firm of Hertanto, Grace, Karunawan did not provide other audit services for the Company's needs.

Audit Fee in 2018

Audit fee for Public Accounting Firm (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan for 2018 fiscal year amounted to Rp250,000,000 (two hundred and fifty million), with service rendered was audit on Consolidated Financial Statements for 2018 Fiscal Year.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)

Manajemen Perseroan telah menyusun Sistem Pengawasan Internal sebagai bagian usaha untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sistem Pengawasan Internal yang memadai untuk mengidentifikasi bahwa kegiatan operasional dan keuangan telah berjalan secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan telah dapat diandalkan, aset perusahaan telah aman, kepatuhan terhadap SOP serta panduan pekerjaan lainnya telah dilakukan.

Implementasi Sistem Pengendalian Internal

Implementasi Sistem Pengendalian Internal yang telah dilakukan Perseroan meliputi:

1. Pelaksanaan audit berbasis risiko secara berkelanjutan.
2. Tindak lanjut temuan audit baik yang berasal dari audit internal maupun audit eksternal.
3. Komunikasi audit yang dilakukan secara aktif dengan audit internal, audit eksternal dan komite audit.
4. Pengawasan terhadap kegiatan usaha untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran, SOP yang telah ditetapkan, dan peraturan lainnya.
5. Review bulanan atas budget, realisasi, dan deviasinya serta penanganan masalah-masalah yang dihadapi.

Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan SPI Tahun 2018

Dalam rangka meningkatkan Sistem Pengendalian Internal, Perseroan mengedepankan prinsip-prinsip GCG yang mampu mendorong penerapan transparansi operasional dan keuangan untuk menanamkan integritas pada setiap aktivitas.

Selanjutnya Perseroan melakukan review atas efektivitas pengendalian internal, terutama melalui Unit Audit Internal yang memiliki tanggung jawab utama untuk melakukan audit operasional dan keuangan dan penilaian terhadap pengendalian internal di setiap lini bisnis dan unit operasional. Review atas efektivitas Sistem Pengendalian Internal dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari *early warning system* yang bersifat aktif.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko adalah bagian penting dari strategi manajemen semua Perseroan. Fokus dari manajemen risiko yang baik adalah identifikasi dan cara mengatasi risiko. Sasarannya untuk menambah nilai maksimum berkesinambungan (sustainable) perusahaan. Tujuan utama untuk memahami potensi upside dan downside dari semua faktor yang dapat memberikan dampak bagi bisnis PP Presisi. Manajemen risiko meningkatkan kemungkinan untuk sukses, mengurangi kemungkinan risiko kegagalan dan ketidakpastian dalam memimpin keseluruhan sasaran Perseroan.

Prinsip-prinsip manajemen risiko yang dijalankan Perseroan, antara lain sebagai berikut:

1. Pengelolaan risiko menciptakan dan melindungi nilai
Manajemen risiko memberikan kontribusi melalui

INTERNAL CONTROL SYSTEM (SPI)

The Company's management has prepared Internal Control System as part of its business to create sustainable growth. Adequate Internal Control System is required to identify that operational and financial activities has run in an effective and efficient manner, financial reporting is reliable, the company's assets are secure, and compliance with SOP as well as other work guidelines have been implemented.

Implementation of Internal Control System

Implementation of Internal Control System that has been conducted by the Company include:

1. Implementation of continuous risk-based audit.
2. Follow up on audit findings, both from internal audit and external audit.
3. Audit communication is carried out actively with internal audit, external audit and audit committee.
4. Supervision on business activities to ensure that all activities have been performed in accordance with budget, established SOP, and other regulations.
5. Monthly review on budget, realization, and its deviations as well as handling of issues faced.

Effectiveness of SPI Activities Implementation in 2018

In order to improve Internal Control System, the Company prioritizes GCG principles that are able to encourage implementation of operational and financial transparency to instill integrity in every activity.

Furthermore, the Company conducts review on effectiveness of internal control, particularly through Internal Audit Unit that has the main responsibility to perform operational and financial audits as well as assessment on internal control in every business line and operational unit. Review on effectiveness of Internal Control System is carried out continuously as part of active early warning system.

RISK MANAGEMENT SYSTEM

Risk management is an important part of all the Company's management strategies. The focus of good risk management is identification and how to deal with risks. The goal is to add to the Company's maximum sustainable value. The main objective is to understand the upside and downside potential of all factors that can have an impact on the PP Presisi's business. Risk management increases the likelihood of success, reduces the possibility of risk of failure and uncertainty in leading the overall objectives of the Company.

The principles of risk management in the Company are as follows:

1. Management of the risk of creating and protecting values
Risk management contributes by increasing the possibility

- peningkatan kemungkinan pencapaian sasaran perusahaan secara nyata. Selain itu juga memberikan perbaikan dalam aspek keselamatan, kesehatan kerja, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, perlindungan lingkungan hidup, persepsi publik, kualitas produk, reputasi, corporate governance, efisiensi dan operasi.
2. Pengelolaan risiko merupakan bagian yang terintegrasi dengan seluruh proses bisnis organisasi
Manajemen risiko bukan suatu aktivitas yang berdiri sendiri namun merupakan bagian dari tanggung jawab manajemen dan merupakan bagian proses organisasi, termasuk perencanaan strategis dan proyek serta proses perubahan manajemen.
 3. Pengelolaan risiko merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan
Pengelolaan risiko membantu memberikan informasi kepada pembuat keputusan, membantu menentukan prioritas dan menunjukkan semua risiko yang memerlukan tindakan pengendalian.
 4. Pengelolaan risiko secara eksplisit memperhitungkan ketidakpastian
Pengelolaan risiko eksplisit memperhitungkan ketidakpastian, memperkirakan sifat ketidakpastian dan bagaimana harus ditangani.
 5. Pengelolaan risiko dibangun melalui pendekatan yang sistematis, terstruktur dan tepat waktu
Secara sistematis, terstruktur dan tepat waktu merupakan pendekatan pengelolaan risiko yang dapat memberikan kontribusi secara efisien dan konsisten. Hasilnya dapat dibandingkan dan memberikan hasil serta perbaikan.
 6. Pengelolaan risiko membutuhkan ketersediaan informasi yang memadai
Informasi dalam proses manajemen risiko merupakan dasar sumber informasi yang berupa data historikal, respon pemangku kepentingan, pengalaman, observasi, estimasi dan pertimbangan ahli. Akan tetapi harus disadari bahwa semua informasi memberikan keterbatasan yang harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan, baik dalam membuat model risiko maupun perbedaan pendapat yang mungkin terjadi antara para ahli.
 7. Pengelolaan risiko membutuhkan kustomisasi
Manajemen risiko harus diselaraskan dengan lingkungan eksternal organisasi dan konteks internal serta profil risiko.
 8. Pengelolaan risiko mempertimbangkan faktor manusia dan budaya
Penerapan manajemen risiko disesuaikan dengan kapabilitas organisasi, persepsi dan tujuan individu secara internal maupun eksternal di luar organisasi yang dapat menunjang atau menghambat pencapaian tujuan organisasi.
 9. Pengelolaan risiko bersifat transparan dan inklusif
Untuk memastikan bahwa manajemen risiko masih tetap relevan, para pemangku kepentingan dari seluruh level organisasi dan pemangku kepentingan secara efektif. Keterlibatan para pemangku kepentingan harus dapat terwakili dengan baik dan mendapatkan kesempatan menyampaikan pendapat dalam menentukan kriteria risiko.
- of achieving corporate goals. In addition, it also provides improvements in aspects of occupational health and safety, compliance with laws and regulations, environmental protection, public perception, product quality, reputation, corporate governance, efficiency and operations.
2. Risk management is a part that is integrated with all organizational business processes
Risk management is not a stand-alone activity but is part of management responsibility and is part of the organizational process, including strategic planning and projects and management change processes.
 3. Risk management is part of the decision making process
Risk management helps provide information to decision makers, helps determine priorities and shows all risks that require control measures.
 4. Risk management explicitly takes into account uncertainty, estimates the nature of the uncertainty and how it must be handled.
 5. Risk management is built through a systematic, structured and timely approach
Systematic, structured and timely is a risk management approach that can contribute efficiently and consistently. The results can be compared and provide results and improvements.
 6. Risk management requires the availability of adequate information
Information in the risk management process is the basis of information sources in the form of historical data, stakeholder response, experience, observation, estimation and consideration of experts. However, it must be realized that all information provides limitations that must be considered in making decisions, both in modeling the risks and differences of opinion that may occur between experts.
 7. Risk management requires customization
Risk management must be aligned with the organization's external environment and the internal context as well as risk profile.
 8. Risk management considers human and cultural factors
The implementation of risk management is adjusted to the capabilities of the organization, individual perceptions and objectives internally and externally outside the organization that can support or hinder the achievement of organizational goals.
 9. Risk management is transparent and inclusive
To ensure that risk management is still relevant, stakeholders from all levels of the organization and stakeholders effectively. The involvement of stakeholders must be well represented and get the opportunity to express opinions in determining risk criteria.

10. Pengelolaan risiko bersifat dinamis, berulang dan tanggap terhadap perubahan

Ketika organisasi mengalami perubahan dan terjadi peristiwa baru, konteks dan pemahaman risiko juga akan mengalami perubahan. Dalam hal ini monitoring dan review berperan memberikan kontribusi atas perubahan yang terjadi sehingga muncul risiko baru, ada yang berubah frekuensi maupun dampaknya dan ada risiko yang sudah tidak muncul kembali. Sehingga manajemen risiko harus senantiasa tanggap terhadap perubahan yang terjadi.

11. Pengelolaan risiko dapat memfasilitasi pengembangan berkelanjutan dari organisasi

Organisasi mengembangkan dan menerapkan perbaikan strategi manajemen risiko serta meningkatkan kematangan pelaksanaan manajemen risiko dari seluruh proses bisnisnya.

Perseroan memiliki 5 (lima) tahapan yang diimplementasikan Perseroan dalam memajemen risiko-risiko perusahaan, antara lain:

1. Identifikasi Risiko

Tahap ini mengidentifikasi apa saja risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Langkah pertama dalam mengidentifikasi risiko adalah melakukan analisis pihak yang berkepentingan (stakeholders). Langkah kedua dapat menggunakan 7S dari McKenzie yaitu: shared value, strategy, structure, staff, skill, sistem, dan style.

2. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko mengacu pada dua faktor yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitas risiko menyangkut berapa banyak nilai atau eksposur yang rentan terhadap risiko. Sedangkan kualitatif menyangkut kemungkinan suatu risiko muncul, semakin tinggi kemungkinan risiko terjadi maka semakin tinggi pula risikonya.

3. Pemetaan Risiko

Pemetaan risiko ditujukan untuk menetapkan prioritas risiko berdasarkan kepentingannya bagi perusahaan. Adanya prioritas dikarenakan perusahaan memiliki keterbatasan dalam sumber daya manusia dan jumlah uang sehingga perusahaan perlu menetapkan mana yang perlu dihadapi terlebih dahulu mana yang dinomorduakan, dan mana yang perlu diabaikan. Selain itu prioritas juga ditetapkan karena tidak semua risiko memiliki dampak pada tujuan perusahaan.

4. Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko terdapat beberapa macam diantaranya pengelolaan risiko secara konvensional, penetapan modal risiko, struktur organisasi pengelolaan dan lain-lain.

5. Monitor dan Pengendalian Risiko

Fungsi monitor dan pengendalian risiko yaitu:

- Manajemen perlu memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan risiko berjalan sesuai dengan rencana.
- Manajemen juga perlu memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan risiko cukup efektif.
- itu sendiri berkembang, monitor dan pengendalian bertujuan untuk memantau perkembangan terhadap kecenderungan berubahnya profil risiko. Perubahan ini berdampak pada pergeseran peta risiko yang otomatis pada perubahan prioritas risiko.

10. Risk management is dynamic, repetitive and responsive to change

When organizations change and new events occur, the context and understanding of risk will change as well. In this case, monitoring and review play a role in contributing to changes that occur so that new risks emerge, some changes in frequency and impact and there are risks that have not reappeared. Therefore, risk management must always be responsive to changes that occur.

11. Risk management can facilitate the sustainable development of the organization

The organization develops and implements improvements in risk management strategies and increases the maturity of risk management implementation of all its business processes.

The Company has 5 (five) stages implemented by the Company in managing risks, including:

1. Risk Identification

This stage identifies what risks are faced by the Company. The first step in identifying risk is to analyze stakeholders. The second step can use McKenzie's 7S: shared value, strategy, structure, staff, skill, system, and style.

2. Risk Measurement

Risk measurement refers to two factors, namely quantitative and qualitative. The risk quantity involves how much value or exposure is vulnerable to risk, while the qualitative concerns the possibility of a risk arising, the higher the risk is likely to occur, the higher the risk.

3. Risk Mapping

Risk mapping is intended to prioritize risks based on their interests for the Company. There is a priority because the Company has limitations in human resources and the amount of money so that the Company needs to determine which one needs to be faced first, which one is dominated, and which one need to be ignored. In addition, priorities are also set because not all risks have an impact on the Company's goals.

4. Risk Management

Risk management consists of several types including conventional risk management, determination of risk capital, management organizational structure and others.

5. Risk Control and Monitor

Functions of risk monitor and control are as follows:

- The management needs to ensure that the implementation of risk management goes according to plan.
- The management also needs to ensure that the implementation of risk management is quite effective.
- itself develops, monitors and controls aim to monitor developments in changing risk profile. This change has an impact on shifting the risk map automatically to changes in risk priorities.

Jenis Risiko dan Upaya Mitigasi Risiko

1. Risiko Pelaksanaan Proyek

Risiko pelaksanaan proyek yang berdampak terhadap Perseroan terkait dengan keterlambatan proyek. Penyebabnya adalah ketersediaan sumber daya (*resources*) baik peralatan, material maupun tenaga kerja yang kurang, juga dapat disebabkan oleh kondisi iklim yang tidak mendukung. Pelaksanaan proyek Perseroan dilakukan di lapangan dalam keadaan terbuka, risiko curah hujan menimbulkan kendala pada proyek konstruksi dan kesulitan dalam beraktivitas yang dapat menyebabkan terjadinya kehilangan waktu kerja. Pada umumnya, kontrak kerja yang dimiliki oleh Perseroan memberikan kompensasi berupa perpanjangan waktu untuk kondisi cuaca yang tidak normal dan tidak dapat diantisipasi sebelumnya. Kendati pun demikian, hal tersebut tidak menghalangi kontraktor untuk menjadikan kehilangan waktu kerja akibat curah hujan sebagai salah satu penyebab keterlambatan proyek.

Selain dapat menyebabkan keterlambatan proyek, risiko curah hujan juga dapat menyebabkan terjadinya risiko longsor pada lokasi-lokasi tertentu yang memiliki elevasi yang beresiko. Risiko pelaksanaan proyek bisa berakibat pada bertambahnya biaya proyek, yang berakibat penurunan laba perusahaan.

Upaya Mitigasi Risiko:

Untuk mengurangi dampak risiko ini, perusahaan menerapkan SCM (*Supply Chain Management*), *scheduling*, *planning detail resources*, evaluasi cuaca dan iklim yang ada sehingga dapat memberikan perencanaan yang matang dan pelaksanaan proyek yang lebih optimal.

2. Risiko Persaingan Usaha

Persaingan usaha di sektor jasa konstruksi semakin ketat baik dengan sesama BUMN maupun dengan swasta yang berisiko pada semakin rendahnya *profit margin* yang didapat oleh perusahaan, bahkan dapat juga menyebabkan pada sedikitnya proyek yang akan diperoleh oleh perusahaan.

Upaya Mitigasi Risiko:

Upaya mitigasi yang dilakukan Perseroan untuk menanggulangi dan/atau meminimalisir dampak risiko ini antara lain:

- a. Memperkuat posisi keunggulan kompetitif sebagai perusahaan jasa konstruksi yang berintegrasi berbasis peralatan yang dapat menyediakan jasa konstruksi secara lengkap (*one stop solution*) bagi konsumen. Keunggulan kompetitif ini tidak dimiliki oleh para pesaingnya.
- b. Melakukan *project management* untuk menjamin proyek dapat *delivered* sesuai dengan jangka waktu proyek.
- c. Melakukan *cost management* untuk menjaga tingkat profitabilitas.

Types of Risks and Risk Mitigation

1. Project Execution Risk

Project execution risk that has an impact on the Company related to delay in project. The causes are availability of resources such as equipment, materials, and inadequate workforce, and also unfavorable climatic conditions. The Company's project execution is performed in open fields, therefore risk of rainfall causes issues on construction projects and difficulties in performing activities that may cause loss of work time. Generally, the Company's work contracts provide compensation in the form of time extension for abnormal weather conditions that cannot be anticipated previously. Nevertheless, it does not prevent contractors to make the loss of work time due to rainfall as one of the causes for project delays.

In addition to project delays, rainfall risk can also cause landslide risks on certain locations that have risk elevations. Project execution risk can lead to additional project cost that causes decrease in the company's profit.

Risk Mitigation:

To reduce the impact of such risk, the Company implements SCM (*Supply Chain Management*), *scheduling*, *planning detail resources*, weather and climate evaluation in order to provide careful planning and more optimum project execution.

2. Business Competition Risk

Business competition in construction services sector is increasingly strict with other SOE and private companies at risk of lower profit margin obtained by the Company and may even cause of low number of projects that will be acquired by the Company.

Risk Mitigation:

Risk mitigation taken by the Company to overcome and/or minimize impact of this risk, among others:

- a. Strengthening position of competitive edge as an integrated equipment-base construction services company that is able to provide one stop solution of construction services to consumers. The competitors do not have such competitive edge.
- b. Performing project management to ensure that the project is delivered in accordance with project duration.
- c. Conducting cost management to maintain profitability rate.

3. Risiko Pembayaran

Risiko pembayaran muncul akibat adanya pembayaran uang muka dan termin dari Pemilik Pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak. Umumnya risiko ini terjadi pada proyek-proyek dengan pemilik pekerjaan swasta dan BUMN tanpa uang muka. Dampak dari risiko ini berpengaruh ada terganggunya arus kas proyek dan juga *cash flow* perusahaan. Beberapa cara Perseroan untuk menangani risiko antara lain dengan menetapkan standar batas waktu maksimal periode pembayaran uang muka dan termin serta penerapan bunga bank atas keterlambatannya. Jika pembayaran sudah melebihi jangka waktu yang diperjanjikan, maka perusahaan akan menghentikan pelaksanaan proyek tersebut dengan semua akibat biaya yang muncul menjadi beban pemilik proyek.

Upaya Mitigasi Risiko:

Perseroan menerapkan beberapa strategi untuk mengurangi dampak kerugian yang ditimbulkan risiko ini, antara lain sebagai berikut:

- Perusahaan mengutamakan pembayaran melalui Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau sering disebut LC lokal.
- Perusahaan mengutamakan proyek-proyek yang mana posisi perusahaan sebagai subkontraktor, serta menghindari proyek-proyek *turnkey*.
- Perusahaan secara aktif memonitor *portofolio* proyek-proyek yang sedang dikerjakan dengan proyek-proyek yang akan diambil

4. Risiko Proses Tender dan Eksekusi Proyek

Risiko proyek dapat terjadi pada saat tender, pelaksanaan dan komisioning. Pada saat tender, risiko tinggi terjadi apabila Perseroan tidak bisa memenuhi kriteria yang disyaratkan dalam dokumen tender, seperti pengalaman dalam mengerjakan pekerjaan sejenis atau adanya personal dengan kemampuan tertentu. Hal ini berdampak buruk bagi Perseroan karena tidak mampu mencapai target pencapaian laba yang telah ditetapkan. Risiko pada tahap pelaksanaan antara lain pekerjaan desain dan waktu pengiriman bahan baku. Risiko tahap komisioning terjadi apabila kinerja tidak sesuai dengan spesifikasi. Risiko-risiko ini menyebabkan Perseroan harus membayar denda, sehingga otomatis dapat mengurangi perolehan laba perusahaan.

Upaya Mitigasi Risiko:

Dalam rangka merespon risiko-risiko tersebut, PP Presisi melakukan peningkatan kompetensi SDM, kerja sama operasi dengan perusahaan yang berpengalaman, kerjasama dengan pembuat peralatan/mesin, dan mengasuransikan semua pekerjaan.

5. Risiko Kelangkaan Sumber Daya dan Pasokan Bahan Baku

Risiko kelangkaan terjadi apabila terdapat kekurangan sumber daya, baik sumber daya manusia dan material,

3. Payment Risk

Payment risk arises as a result of advance payments and milestone payments from Employers that are not stipulated in contracts. Generally, this risk arises on projects with private and SOE employers without advance payments. The impact of this risk affects cash flow of projects and cash flow of companies. Several measures taken by the Company to overcome handle the risk, among others, by determining standard maximum deadline for advance payments and milestone payments as well as application of bank interests for the delay. When payment has exceeded contracted period, the company will terminate execution of the project with the cost incurred from termination become employers' expenses.

Risk Mitigation:

The Company implements several strategies to reduce impact of loss caused by this risk, among others:

- The Company prioritizes payment through Domestic Letter of Credit (SKBDN) or known as Local LC.
- The Company prioritizes projects that have the company as a subcontractor, as well as avoids *turnkey* projects.
- The Company actively monitors projects portfolio being undertaken with projects that will be acquired.

4. Tender Process and Project Execution Risk

Project risk may arise during tender, execution, and commissioning. During tender, it is highly that risk occurs when the Company is unable to fulfill criteria required in tender documents, such as experience in performing similar works or personnel with certain abilities. This has a negative impact for the Company due to inability in achieving profit target that has been set. Risks on execution phase among others, design works and delivery time of raw materials. Risk on commission phase arises when performance is not in accordance with specifications. Such risks cause the Company to pay for fines that automatically reduces the Company's profit.

Risk Mitigation:

In order to respond to such risks, PP Presisi carries out HR competency improvement, operational cooperation with experienced companies, cooperation with equipment/machinery manufacturers, and insures all projects.

5. Resource Scarcity and Raw Material Supply Risk

Scarcity risk arises when there is a lack of resources, both human and material resources, whether it is natural

baik material alam maupun produk pabrik. Kebutuhan sumber daya yang semakin meningkat sedangkan pasokan di lapangan terbatas menjadi salah satu penyebabnya. Hal ini sebanding dengan semakin meningkatnya proyek yang dikerjakan Perseroan. Oleh karena itu, kenaikan upah pekerja dan kenaikan harga material utama tidak dapat dihindari. Dampak risiko ini adalah berkurangnya pencapaian laba proyek dan perusahaan. Risiko bertambah apabila Perseroan tidak bisa mengajukan klaim akibat kenaikan tersebut.

Upaya Mitigasi Risiko:

Untuk mengatasi risiko ini, Perseroan menetapkan pengambilan proyek dengan nilai kontrak tertentu dan melakukan kontrak payung terhadap material utama guna mempertahankan kecukupan persediaan bahan baku dan stabilitas harga.

6. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik dan Mitigasi

Risiko ini berkaitan dengan dampak negatif dari perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan politik terhadap operasional Perseroan. Kondisi ekonomi seperti terjadinya krisis ekonomi di negara pengekspor produk yang diperlukan perseroan serta tidak adanya *tax treaty agreement* akan mengakibatkan naiknya harga produk. Kebijakan pemerintah serta kondisi politik memberikan dampak pada investasi dan pembangunan. Dampaknya, penurunan terhadap perolehan proyek Perseroan sehingga pencapaian laba perseroan juga tidak sesuai target. Risiko sosial terjadi pada proyek yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, baik itu keamanan, LSM, atau partisipasi yang diinginkan. Risiko ini berakibat pada terhambatnya pelaksanaan proyek dan keterlambatan penyelesaian proyek sehingga laba perusahaan bisa berkurang.

Upaya Mitigasi Risiko:

Perusahaan merespon hal tersebut dengan cara mencantumkan pasal eskalasi dalam kontraknya.

7. Risiko Kurs Valuta Asing

Perubahan kurs Rupiah terhadap mata uang asing dihadapi oleh Perseroan terutama pada proyek yang menggunakan material impor. Perubahan kurs Rupiah terhadap mata uang asing tersebut dapat meningkatkan rugi selisih kurs yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan laba Perseroan.

Upaya Mitigasi Risiko:

Untuk mengatasinya, perusahaan telah mempunyai *work instruction* tentang lindung nilai serta melakukan perjanjian dengan *vendor* untuk melakukan pembayaran secara *back to back* sesuai dengan mata uang dalam kontrak induk atau melakukan *hedging*.

resources or factory products. One of the causes for this is the need of resources increases while supply on site is limited. This is in line with increasing number of projects executed by the Company. Therefore, rise in labor wage and main materials are unavoidable. Impact of this risk is reduction in profits of projects and the Company. There is an additional risk if the Company is unable to claim due to the increase.

Risk Mitigation:

To overcome this risk, the Company sets acquisition of projects with certain contract value and performs umbrella contract on main materials in order to maintain sufficient raw materials stock and price stability.

6. Economic, Social, and Political Changes Risk and Mitigation

This risk has a relation to negative impacts of changes in economic, social, and political conditions towards the Company's operations. Economic conditions, such as economy crisis in a country that exports products required by the Company as well as absence of tax treaty agreement will result in the increase of product prices. Government policies and political conditions affect investments and developments. The impact is decrease in the Company's profit that does not reach the target. Social risk also arises on projects that directly involve the community, in terms of securities, NGOs, or desired participations. This risk results in hindering of project execution and delay of project completion that reduce the Company's profit.

Risk Mitigation:

The Company's response to such issue is by including articles of escalation in contracts.

7. Foreign Exchange Rate Risk

The Company faces risk of changes of Rupiah exchange rate to foreign currency, particularly on projects that use import materials. Changes of Rupiah exchange rate to foreign currency can increase loss of exchange difference which eventually resulting in decrease of the Company's profit.

Risk Mitigation:

To overcome such a risk, the Company has work instruction on hedging as well as agreement with vendor to conduct payment in back to back manner in accordance with currency in master contract or perform hedging.

8. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Risiko tuntutan atau gugatan hukum terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara kontrak dengan realisasi pelaksanaannya. Risiko ini bisa melibatkan Perseroan dengan pemilik pekerjaan atau dengan vendor. Dampak risiko ini adalah dapat menurunkan reputasi Perseroan di mata para *shareholders* maupun *stakeholders*.

Upaya Mitigasi Risiko:

Dalam merespon ini perusahaan mencantumkan pasal-pasal hak dan kewajiban secara detail dan pasal tentang cara penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam kontrak.

Evaluasi Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko Tahun 2018

1. Pelaksanaan *risk management* telah cukup memuaskan mengacu kepada *framework* yang telah dikembangkan selama ini.
2. Risk management *framework* masih membutuhkan peningkatan agar lebih terstruktur.
3. Risk management masih membutuhkan sosialisasi yang lebih intensif serta menjangkau tidak saja di unit kerja kantor pusat tetapi juga menjangkau ke unit-unit di daerah/proyek.
4. Mapping sebaiknya di-update secara reguler agar dapat mengikuti dinamika perkembangan ekosistem bisnis.

PERKARA HUKUM TAHUN 2018

Hingga 31 Desember 2018, Perseroan tidak menghadapi atau terlibat dalam perkara hukum yang bersifat material, baik sebagai penggugat, tergugat, pemohon, dan/atau termohon yang secara material dapat memengaruhi keberlangsungan kegiatan bisnis Perseroan.

SANKSI ADMINISTRATIF

Sampai dengan 31 Desember 2018, tidak terdapat sanksi administratif yang dijatuhkan kepada Perseroan, anggota Dewan Komisaris, maupun anggota Direksi oleh pihak otoritas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan, atau pihak otoritas lainnya.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Dalam rangka menjalankan kebijakan keterbukaan informasi, Perseroan menerapkan diversifikasi media penyampaian informasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai media yang dimanfaatkan Perseroan, antara lain:

1. Laporan Tahunan
Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara, Perseroan mengungkapkan kinerja keuangan maupun non-keuangan melalui Laporan Tahunan yang tersedia dalam *hardcopy* maupun versi digital yang diunggah pada <http://pp-presisi.co.id>.

8. Litigation or Lawsuit Risk

Litigation or lawsuit risk arises when there is a discrepancy between contract and realization of implementation. This risk may involve the Company with employer or vendor. The impact of this risk is the decrease of the Company's reputation before shareholders and stakeholders.

Risk Mitigation:

In responding to this risk, the Company includes articles of rights and obligations in detail and article concerning settlement in the event of disputes in contract.

Evaluation on the Effectiveness of Risk Management Implementation in 2018

1. The implementation of risk management has been quite satisfactory in reference to the framework that has been developed so far.
2. Risk management framework still requires improvements to be more structured.
3. Risk management still requires more intensive socialization and reaches out not only in the head office work unit but also reaches out to units in the area/project.
4. Mappings should be regularly updated so that they can keep up with the dynamics of the development of the business ecosystem.

SIGNIFICANT CASES IN 2018

As of December 31, 2018, the Company does not have/is facing or is involved in material legal cases, whether as plaintiff, defendant, appellant, and/or respondent which may materially affect the continuity of the Company's business activities.

ADMINISTRATIVE SANCTIONS

As of December 31, 2018, there were no administrative sanctions imposed upon the Company, members of the Board of Commissioners, or members of the Board of Directors by authorities of Capital Market, Financial Services Authority, or other authorities.

ACCESS TO INFORMATION AND DATA OF THE COMPANY

In order to apply information disclosure policy, the Company implements diversification of media for information disclosure in accordance with prevailing laws. Media utilized by the Company, among others:

1. Annual Report
Pursuant to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-01/MBU/2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance on State-Owned Enterprises, the Company discloses financial and non-financial performances through Annual Report that is available in the form of *hardcopy* and digital, which is upload on <http://pp-presisi.co.id>.

2. Situs Web Perusahaan

Situs Perseroan, yakni <http://pp-presisi.co.id> membuka seluruh informasi penting Perseroan bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih jauh tentang Perseroan. Informasi penting yang disediakan antara lain profil perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, program yang dikelola, tata kelola perusahaan yang baik, alamat kantor cabang, formulir dan tata cara klaim, Laporan Tahunan dan Keuangan Perseroan serta akses kepada aplikasi pendukung layanan terhadap peserta.

3. Media Cetak

Perseroan memanfaatkan media cetak antara lain surat kabar nasional, media internal mitra bayar, brosur dan *leaflet* sebagai sarana penyampaian informasi. Selain itu, Perseroan juga kerap mempublikasikan beberapa informasi dan kegiatan penting PP Presisi di beberapa surat kabar nasional.

4. Media Sosial

Instagram : [ptpp_presisi](#)

Youtube : [Corsec PT PP Presisi Tbk](#)

5. Paparan Publik (*Public Expose*)

Dalam rangka memaparkan tentang kinerja Perseroan kepada pemegang saham, Perseroan menyelenggarakan *Public Expose* atau Paparan Publik pada hari Selasa, 28 Agustus 2018 pukul 11.15-12.15 WIB di Ruang Seminar 3, Lt. 1, Gedung Bursa Efek Indonesia, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta. Acara tersebut dihadiri oleh Ir. Iswanto Amperawan selaku Direktur Utama dan Benny Pidakso, S.E. selaku Direktur Keuangan yang juga merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan. Selain itu, Perseroan juga mengundang Publik, beberapa wartawan media serta para investor yang keseluruhannya berjumlah 110 (seratus sepuluh) orang ke dalam Paparan Publik tahun 2018.

6. *Press Release*

Perseroan menerbitkan *press release* dengan tujuan untuk menyebarkan informasi berkaitan dengan kegiatan Perseroan. Sepanjang tahun 2018, Perseroan telah menerbitkan *press release* sebanyak 17 (tujuh belas) kali dengan rincian sebagai berikut:

2. Company Website

The Company website, namely <http://pp-presisi.co.id> opens all significant information of the Company for public that wish to know the Company further. Important information available on the Company, among others, the Company profile, vision and mission, organization structure, programs managed, good corporate governance, address of branch office, claim form and procedure, Annual Report and Financial Statements of the Company as well as access to supporting application for service to members.

3. Printed Media

The Company utilized printed media, among others, national newspapers, internal payment partner media, brochures and leaflets as means of information disclosure. In addition, the Company also continues to publish a number of key information and activities of PP Presisi in several national newspapers.

4. Social Media

Instagram : [ptpp_presisi](#)

Youtube : [Corsec PT PP Presisi Tbk](#)

5. Public Expose

In order to explain the Company's performance to shareholders, the Company held Public Expose on Tuesday, August 28, at 11.15-12.15 WIB in Ruang Seminar 3, Lt. 1, Gedung Bursa Efek Indonesia, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta. The event was attended by Ir. Iswanto Amperawan as President Director and Benny Pidakso, S.E. as Director of Finance that also holds concurrent positions as Corporate Secretary. In addition, the Company also invited the Public, media reporter and investors totalling to 110 (one hundred ten) people in 2018 Public Expose.

6. Press Release

The Company issues press release with the aim to disseminate information related to the Company's activities. Throughout 2018, the Company has issued 17 (seventeen) press release with the following details:

No.	Tanggal / Date	Judul Siaran Pers / Title of Press Release
1.	16 Januari 2018 / January 16, 2018	Kontrak Baru 2017 di Atas Target, PPRE Target Kontrak Baru Tumbuh Sampai dengan 35% di 2018 / New Contracts in 2017 Exceeded Target, PPRE Targets New Contracts to Increase up to 35% in 2018
2.	24 Januari 2018 / January 24, 2018	PPRE Mengestimasikan Pendapatan 2017 Meningkat 389% Menjadi Sebesar Rp1,8 Triliun / PPRE Estimated 2017 Revenue Increasing 389% to Rp1.8 Trillion
3.	5 Februari 2018 / February 5, 2018	PPRE Mengestimasikan Pendapatan Tahun 2017 Sebesar Rp1,8 Triliun / PPRE Estimated 2017 Revenue Amounting to Rp1.8 Trillion
4.	12 Maret 2018 / March 12, 2018	Laba Bersih Konsolidasian Auditan 2017 PP Presisi Meningkatkan Signifikan 498% Menjadi Sebesar Rp245 Miliar / 2017 Audited Consolidated Net Profit of PP Presisi Increased Significantly by 498% to Rp245 Billion
5.	5 April 2018 / April 5, 2018	PPRE Akan Bagikan Dividen Tunai Sebesar Rp5,52 per Saham / PPRE will Distribute Cash Dividends Amounting to Rp5.52 per Share
6.	4 Mei 2018 / May 4, 2018	Laba Bersih PP Presisi per 31 Maret 2018 Meningkatkan Signifikan 560% Menjadi Sebesar Rp86,5 Miliar / Net Profit of PP Presisi as of March 31, 2018 Significantly Increased by 560% to Rp86.5 Billion
7.	31 Juli 2018 / July 31, 2018	PP Presisi Mendapatkan Kontrak Baru Sebesar Rp3,5 triliun hingga akhir Juli 2018 / PP Presisi Acquired New Contracts Amounting to Rp3.5 trillion until the end of July 2018
8.	7 Agustus 2018 / August 7, 2018	PP Presisi Membukukan EBITDA 1H18 Sebesar Rp381,1 Miliar, Meningkatkan Signifikan 240% / EBITDA 1H18 of PP Presisi Was Recorded at Rp381.1 Billion, Increased Significantly by 240%

No.	Tanggal / Date	Judul Siaran Pers / Title of Press Release
9.	28 Agustus 2018 / August 28, 2018	PPRE Optimistis Raih Pendapatan Rp4,9 Triliun / PPRE Is Optimistic on Achieving Revenue Amounting to Rp4.9 Trillion
10.	28 Agustus 2018 / August 28, 2018	PP Presisi (PPRE) Optimis Mengantongi Pendapatan Rp4,9 Triliun Hingga Akhir Tahun / PP Presisi (PPRE) Is Optimistic in Obtaining Revenue Amounting to Rp4.9 Trillion until the End of the Year
11.	28 Agustus 2018 / August 28, 2018	PP Presisi (PPRE) Bidik Akuisisi Perusahaan Soil Improvement / PP Presisi (PPRE) Aims to Acquire Soil Improvement Company
12.	28 Agustus 2018 / August 28, 2018	Pacu Pendapatan, PPRE Tambah 630 Unit Alat Berat / Boosting Revenue, PPRE Added 630 Heavy Equipment Units
13.	28 Agustus 2018 / August 28, 2018	PT PP Presisi Tbk (PPRE) Optimis Terkait Pendapatan Tahun Ini / PT PP Presisi Tbk (PPRE) Is Optimistic Regarding Income for the Year
14.	28 Agustus 2018 / August 28, 2018	PPRE Yakin Capai Pendapatan Rp4,9 T di Akhir Tahun / PPRE Believes to Achieve Revenue Amounting to Rp4.9 T at the End of the Year
15.	6 November 2018 / November 6, 2018	EBITDA 9M18 Meningkatkan Signifikan 80% / EBITDA 9M18 Increased Significantly by 80%
16.	12 Desember 2018 / December 12, 2018	PP Presisi Semakin Memantapkan Diversifikasi Usaha Jasa Pertambangannya / PP Presisi Strengthen its Business Diversification in Mining Services
17.	18 Desember 2018 / December 18, 2018	Kapasitas Alat Berat Yang Dimiliki PP Presisi Siap Mendukung Pertumbuhan Perseroan di Tahun 2019 / Capacity of Heavy Equipment Owned by PP Presisi is Ready to Support the Company's Growth in 2019

KODE ETIK PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, beretika, sehingga perlu penyesuaian etika usaha dan etika kerja dengan Visi dan Misi Perseroan serta Panduan Pelaksanaan GCG. Untuk itu Perseroan menyusun Kode Etik Perseroan (*Code of Conduct*) yang pada tanggal 14 Agustus 2017 ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Code of Conduct berisi tentang pedoman etika usaha dan etika kerja sebagai acuan bagi insan PP Presisi yang meliputi Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan Perseroan dalam menjalankan aktivitas bisnis serta berhubungan dengan para pemangku kepentingan.

Komitmen Kode Etik Perseroan

Agar seluruh insan PT PP Presisi Tbk memahami dan bersedia dengan penuh tanggung jawab melaksanakan *Code of Conduct* ini maka:

1. Seluruh Warga PT PP Presisi Tbk wajib menandatangani "Pernyataan Kepatuhan" yang merupakan komitmen Warga Perseroan untuk melaksanakan *Code of Conduct* yang diperbaharui setiap tahun.
2. Direksi bertanggung jawab atas terlaksananya Pernyataan Kepatuhan bagi seluruh Warga PT PP Presisi Tbk.
3. Setiap insan PT PP Presisi Tbk menerima satu salinan Pernyataan Kepatuhan dan menandatangani formulir Pernyataan Kepatuhan bahwa yang bersangkutan telah menerima, memahami dan setuju untuk mematuhi *Code of Conduct* yang didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan.
4. Seluruh Pejabat Perusahaan bertanggung jawab dan memberi keteladanan bagi bawahannya atas penerapan *Code of Conduct* tersebut.

CODE OF CONDUCT

The Company is required to always perform its business with full responsibility and in an ethical manner. Therefore, the Company's vision and mission need to be aligned with business ethics and work ethics as well as GCG Manual. Hence, the Company prepared Code of Conduct on August 14, 2017 signed by the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Code of Conduct contains guidelines on business ethics and work ethics as reference for PP Presisi personnel that include the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all employees of the Company in carrying out business activities as well as communicating stakeholders.

Commitment to Code of Conduct

In order to make all personnel of PT PP Presisi Tbk to understand and to be willing with full of responsibility to apply Code of Conduct:

1. All Personnel of PT PP Presisi Tbk are required to sign "Compliance Statement" which is the commitment of the Company's Personnel to implement Code of Conduct that is updated every year.
2. The Board of Directors is responsible for the implementation of Compliance Statement for all Personnel of PT PP Presisi Tbk.
3. Every personnel of PT PP Presisi Tbk receives one copy of Compliance Statement and sign Compliance Statement form that the related party has received, understood, and agreed to comply with Code of Conduct documented by Corporate Secretary.
4. All Corporate Officials are responsible to provide examples for their subordinates on implementation of Code of Conduct.

Pemberlakuan dan Penerapan Kode Etik bagi Seluruh Level Organisasi

Perseroan menyatakan bahwa Kode Etik berlaku bagi seluruh jajaran Perseroan dan setiap individu yang ada di Perseroan meliputi Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Perseroan. Seluruh Insan Perseroan diharuskan menandatangani Surat Pernyataan Kepatuhan Pegawai Melaksanakan Kode Etik (Code of Conduct).

Sosialisasi dan Internalisasi Kode Etik Perseroan

Upaya Perseroan untuk memberikan pemahaman dan mengingatkan kembali kepada karyawan tentang tata nilai dan Kode Etik dilakukan dengan sosialisasi melalui penyampaian materi yang berkaitan dengan pemahaman GCG, standar etika yang berlaku dan pemberian sanksi bagi yang melanggarnya, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan *best practices* GCG yang selanjutnya akan dilakukan evaluasi secara berkala untuk dilakukan penyempurnaan bila diperlukan.

Seluruh Pejabat Perseroan bertanggungjawab untuk memastikan bahwa *Code of Conduct* telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Adapun tujuan dari sosialisasi adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan pemahaman isi dari *Code of Conduct*
- Mewujudkan kesadaran dari seluruh Pegawai untuk melaksanakan *Code of Conduct* ini.
- Memberikan pengertian bahwa *Code of Conduct* merupakan bagian tak terpisahkan dari praktik bisnis dan penilaian kinerja seluruh Pegawai Perusahaan.

Pokok-pokok Kode Etik Perseroan

Code of Conduct memuat pedoman etika usaha dan etika kerja untuk diterapkan oleh seluruh insan PP Presisi dalam menjalankan aktivitas bisnis. *Code of Conduct* terbagi ke dalam dua kategori besar:

1. Etika Usaha

Etika usaha berkaitan dengan standar perilaku yang diterapkan oleh Perusahaan dalam berinteraksi dan berhubungan dengan stakeholders. Etika Usaha mengatur perihal terkait:

- Etika Perusahaan terhadap Pegawai
- Etika Perusahaan terhadap Pelanggan
- Etika Perusahaan terhadap Penyedia Barang dan Jasa (Pemasok)
- Etika Perusahaan terhadap Kompetitor (Pesaing)
- Etika Perusahaan terhadap Masyarakat Sekitar
- Etika Perusahaan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup
- Etika Perusahaan terhadap Media
- Etika Perusahaan terhadap Komunitas/Organisasi Seprofesi
- Etika Perusahaan terhadap Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
- Integritas dan Akurasi Pembukuan

Enforcement and Implementation of Code of Conduct for All Levels of Organization

The Company declares that the Code of Conduct applies to the entire components of the Company and each individual within the Company that include the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees of the Company. Every personnel of the Company are required to sign Compliance Statement of Employees Implementing Code of Conduct..

Dissemination and Internalization of Code of Conduct

The Company's efforts to provide understanding and remind its employees about values and Code of Conduct are carried out through dissemination of materials related to GCG understanding, applicable ethical standards, and imposition of sanctions for its violations as well as other matters related to best practices of GCG which subsequently will be evaluated periodically and to be improved when necessary.

All Officials of the Company are responsible for ensuring that Code of Conduct has been disseminated to all employees. Dissemination has the following objectives:

- Creating understanding on the contents of Code of Conduct
- Creating awareness from all Employees to implement Code of Conduct.
- Providing understanding that Code of Conduct is inseparable from business practices and performance of all Employees of the Company.

Principals of Code of Conduct

Code of Conduct contains guidelines on business ethics and work ethics to be applied by all personnel of PP Presisi in performing business activities. Code of Conduct is divided into two major categories:

1. Business Ethics

Business ethics are related to behavioral standards implemented by the Company in interacting and developing relationship with stakeholders. Business Ethics regulate following matters:

- The Company's Ethics towards Employees
- The Company's Ethics towards with Customers
- The Company's Ethics towards Goods and Services Providers (Suppliers)
- The Company's Ethics towards Competitors
- The Company's Ethics towards Surrounding Communities
- The Company's Ethics related to Occupational Health and Safety as well as Environment.
- The Company's Ethics towards Media
- The Company's Ethics towards Professional Communities/Organizations
- The Company's Ethics towards Anti-Corruption, Collusion, and Nepotism
- Integrity and Accuracy of Bookkeeping

2. Etika Kerja

Etika kerja berkaitan dengan standar perilaku warga PT PP Presisi Tbk dalam melaksanakan pekerjaan maupun dalam berinteraksi. Etika Kerja mengatur perihal terkait:

- Ketaatan terhadap Hukum
- Benturan kepentingan
- Pemberian dan Penerimaan Hadiah/Gratifikasi/Suap dan lainnya
- Persamaan dan Penghormatan pada HAM
- Kontribusi dan Aktivitas Politik
- Pengawasan dan Penggunaan Aset
- Kerahasiaan Data dan Informasi

Mekanisme Pelaporan Pelanggaran Kode Etik Perseroan

Pelaporan atas pelanggaran *Code of Conduct* dilakukan sebagai berikut :

1. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan maka pegawai wajib melaporkan pelanggaran tersebut melalui Kotak Pengaduan/*Whistle Blowing System*, kepada Atasan Langsung dan Kepala SPI.
2. Pengungkapan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.
3. Pelapor wajib mencantumkan identitasnya dengan jelas pada laporan yang dibuat, disertai dengan bukti pendukung yang relevan. Penerima laporan wajib merahasiakan identitas pelapor.
4. Perusahaan wajib menindaklanjuti setiap laporan yang diterima sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Sanksi atas Pelanggaran

Setiap warga PT PP Presisi Tbk yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap *Code of Conduct* ini akan diberikan sanksi sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Sanksi bagi Pegawai yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Atasan Langsung atau Direksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya setelah mendapat laporan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai yang bersangkutan.
2. Direksi memberikan arahan atas tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh Atasan Langsung di lingkungan masing-masing.
3. Sanksi bagi Direksi yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Dewan Komisaris.
4. Sanksi bagi Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham.
5. Bila Mitra Kerja atau *Stakeholders* yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik Perseroan Tahun 2018

Sepanjang tahun 2018, tidak terdapat pelanggaran *Code of Conduct* yang dilakukan oleh seluruh Insan PP Presisi.

2. Work Ethics

Work Ethics are related to behavioral standard of personnel of PT PP Presisi Tbk in performing work and interacting. Work Ethics regulate matters related to:

- Compliance with Laws
- Conflict of Interest
- Granting and Accepting Gratification, Bribery, and others
- Equality and Respect for Human Rights
- Political Contributions and Activities
- Asset Monitoring and Utilization
- Data and Information Confidentiality

Whistleblowing Mechanism of Code of Conduct

Whistleblowing of Code of Conduct violation is performed as follows:

1. In the event of any violation or deviation, the employee shall report the violation through Complaint Box / Whistleblowing System to Direct Superior and Head of SPI.
2. Disclosure shall be conducted with good intention and it is not a personal complaint or based on bad will/defamation.
3. Whistleblower shall include their clear identity on the report, along with relevant supporting evidence. Recipient of the report shall keep the identity of whistleblower confidential.
4. The Company shall follow up every received report in accordance with applicable procedures and mechanism.

Sanctions for Violation

Every personnel of PT PP Presisi Tbk that is proven to be guilty of committing any violation to Code of Conduct will be imposed with sanction in accordance with prevailing policies as well as laws and regulations, namely:

1. Sanction for Employee that commits any violation is decided by Direct Superior or the Board of Directors in accordance with the degree of violation subsequent to obtaining whistleblowing report against the related Employee.
2. The Board of Directors provides guidance on actions of development, discipline sanction, and/or other actions as well as prevention that shall be applied by Direct Supervisors within their respective work environment.
3. Sanction for a member of the Board of Directors that commits any violation is decided by the Board of Commissioners.
4. Sanction for a member of the Board of Commissioners that commits any violation is decided by Shareholders.
5. In the event of Business Partners or Stakeholders commit any violation, provisions stipulated in contract will be imposed. If it is in relation to any criminal act, it can be forwarded to the authorities.

Number of Code of Conduct Violation in 2018

There were no violation against Code of Conduct by personnel of PP Presisi throughout 2018.

KEBIJAKAN ANTI-KKN

Perusahaan mendukung upaya-upaya yang dilakukan semua pihak dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Berikut ini adalah kebijakan-kebijakan yang dimiliki perusahaan terhadap perilaku KKN:

- Kebijakan tentang Hadiah dan Sumbangan (Donasi)
Seluruh pengurus dan karyawan Perusahaan tidak dibenarkan secara hukum dan etika usaha menerima dan memberi hadiah, sumbangan dalam bentuk uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya (gratifikasi) yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, sesuai Pasal 12B ayat (1) UU No. 20/2001.

Ketentuan tersebut tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai Undang-undang No. 20 Tahun 2001 pasal 12C ayat (1).

- Kebijakan tentang Larangan Suap
Perusahaan mendefinisikan suap sebagai segala bentuk uang, komisi, pinjaman, hadiah, kenikmatan, fasilitas dan apapun yang bernilai manfaat ekonomi, yang diberikan atau diminta sebagai kompensasi secara langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau sikap yang memihak.

KEBIJAKAN TERKAIT AKTIVITAS POLITIK

Kebijakan pokok Perusahaan dalam hal ini, adalah dana atau sumber daya Perusahaan tidak diperkenankan untuk menyumbang kandidat partai dan non partai politik dimanapun diseluruh dunia. Kebijakan Perusahaan tidak mengizinkan penggunaan fasilitas ataupun sumber daya apapun oleh Insan Perusahaan untuk tujuan kampanye politik, penggalangan dana politik maupun untuk tujuan partisipasi politik. Keputusan yang diambil oleh seorang Insan Perusahaan untuk mengkontribusikan waktu, uang atau sumber daya personalnya bagi kampanye atau aktifitas politik harus benar-benar merupakan pilihan Insan Perusahaan itu sendiri.

KEBIJAKAN PENCEGAHAN *INSIDER TRADING*

Insider trading merupakan kegiatan ilegal dimana aktivitas jual beli saham atau sekuritas Perseroan dilakukan oleh orang dalam atau personil Perseroan. Aktivitas ini ilegal di lingkungan pasar finansial dikarenakan aktivitas ini dilakukan demi keuntungan pribadi dengan memanfaatkan informasi internal dan menyalahgunakan wewenang jabatan yang dimilikinya untuk mempengaruhi keputusan investor. *Insider trading* dapat menimbulkan benturan kepentingan serta kerugian bagi Perseroan.

ANTI-CORRUPTION AND ANTI-FRAUD POLICY

The Company supports efforts undertaken by all parties in creating sound business climate, free from Corruption, Collusion and Nepotism (KKN). The following are policies of the Company towards KKN behaviors:

- Policy on Gifts and Donation
The Company's management and employees are not legally and ethically justified to accept and give gifts or donation in the form of money, goods, discount, commission, loan without interest, travel ticket, lodging facilities, tour, free medication, and other facilities (gratification) accepted domestically or overseas as well as performed using electronically or non-electronic, according to Article 12B paragraph (1) Law No. 20/2001.

Such provision is not applicable when the receiver reports gratification to Corruption Eradication Commission (KPK) according to Law No. 20 of 2001 article 12C paragraph (1).

- Policy on Prohibition of Bribery
The Company defines bribery as all forms of money, commission, loan, gift, pleasure, facilities, and anything with economic value, given or requested as direct or indirect compensation, aimed to obtain special treatment or impartial attitude.

POLICY ON POLITICAL ACTIVITIES

Basic policy of the Company in this regard is that funds or resources of the Company are not allowed to be used as donation for candidates from a political party and non-party anywhere in the world. The Company's policy does not allow utilization of any facility or resource by the Company's personnel for the purpose of political campaign, political fundraising, or for political participation. Decision made by a personnel of the Company to contribute personal time, money, or resource for political campaign or activity shall truly be the choice of said personnel.

POLICY ON INSIDER TRADING PREVENTION

Insider trading is an illegal activity in which shares or securities trading activity of the Company is carried out by an insider or personnel of the Company. This activity is illegal within financial market because such activity is conducted for personal interest by utilizing internal information and abusing authority in their position to affect investors' decision. Insider trading can cause conflict of interest and financial loss for the Company.

Adapun yang dimaksud dengan Orang Dalam Perseroan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 95 sampai dengan Pasal 99 meliputi:

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan Perseroan.
2. Pemegang Saham Utama Perseroan.
3. Pihak perseorangan yang karena kedudukannya memiliki hubungan dengan Orang Dalam Perseroan sehingga memungkinkan untuk memperoleh informasi internal.

Orang Dalam Perseroan yang disebutkan diatas tidak diperbolehkan/dilarang untuk melakukan:

- a. Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek dimaksud.
- b. Memberi informasi orang dalam kepada pihak mana pun yang dapat menggunakan informasi tersebut untuk melakukan pembelian atau penjualan Efek.

Jika kedapatan melakukan *insider trading*, maka pelaku mendapat hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah), sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 104.

Dalam rangka menghindari benturan kepentingan, Perseroan senantiasa:

1. Menjalankan tugas dan kewajiban dengan mendahulukan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi atau keluarga maupun pihak lainnya.
2. Tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga dan pihak-pihak lainnya.
3. Apabila terdapat benturan kepentingan, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan.
4. Direksi membuat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan atas setiap keputusan yang dibuat olehnya.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan tatanan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan seimbang di lingkungan Perseroan, maka PT PP Presisi Tbk merumuskan suatu sistem bernama Sistem Pelaporan Pelanggaran terhadap Perseroan atau *Whistle Blowing System* (WBS). *Whistle Blowing System* merupakan sistem yang digunakan untuk menerima, mengelola dan menindaklanjuti serta membuat pelaporan atas informasi yang disampaikan oleh pelapor mengenai tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan PT PP Presisi Tbk, yaitu perbuatan melanggar standar etika perusahaan (*code of conduct*) yang dilakukan pegawai atau pimpinan perusahaan, yang dapat merugikan perusahaan maupun para pemangku kepentingan.

Sebagai wujud dari kesadaran perusahaan terhadap kebutuhan pengembangan etika dan perilaku bersih tersebut Direksi dan Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk mengeluarkan kebijakan untuk mengimplementasikan Sistem Pelaporan Pelanggaran di lingkungan Perseroan.

Pursuant to Law Number 8 in Article 95 to Article 99 of 1995 concerning Capital Market, an Insider of a Company includes:

1. Member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and an Employee of the Company.
2. Majority Shareholder of the Company.
3. Individual party, who is due to his/her position, has a relation with an Insider of the Company which enables such the individual to obtain internal information.

Insider of the Company mentioned above is not allowed/prohibited to:

- a. Influence other party to conduct purchase or sales of Securities.
- b. Provide insider information to any party that may use such information to conduct purchase or sales of Securities.

In the event of being found of committing insider trading, the perpetrator is sentenced with criminal imprisonment for the maximum of 10 (ten) years and maximum amount of fines at Rp15,000,000,000.00 (fifteen billion Rupiah), as stipulated in Law Number 8 of 1995 Article 104 concerning Capital Market.

In order to prevent conflict of interest, the Company always:

1. Carrying out duties and obligations by prioritizing the company's interests over personal or family interest or interest of other parties.
2. Not abusing position for personal or family or other parties' interest or benefit.
3. In the event of conflict of interest, the related party is not allowed in decision making process.
4. The Board of Directors issues statement of not having any conflict of interest on every decision.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

In order to realize the order of balanced and Good Corporate Governance within the Company, PT PP Presisi Tbk formulated a system called as Whistleblowing System (WBS). Whistleblowing System is a system that is used to receive, manage, and follow-up as well as prepare report on information submitted by whistleblower on violation in PT PP Presisi Tbk, namely violation against code of conduct by employee or leader that may harm the Company and stakeholders.

As the realization of the Company's awareness on the need of clean behavior and ethics, the Board of Directors and Board of Commissioners of PT PP Presisi Tbk issued policy to implement Whistleblowing System in the Company.

Dasar Hukum Sistem Pelaporan Pelanggaran

Kebijakan WBS Perseroan disusun dengan mengacu pada beberapa peraturan, diantaranya:

1. Peraturan Menteri Negara BUMN, No PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, Bagian Ketujuh "Sistem Pengendalian Intern", Pasal 27: Direksi menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan.
2. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008.
3. UU No.28 tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Bab VI: Peran Serta Masyarakat, Pasal 8 dan Pasal 9.
4. UU RI No.30 tahun 2002 tanggal 27 Desember 2002, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Peraturan Pemerintah RI No.71 tahun 2000 tanggal 21 Agustus 2000, tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
6. UU RI No.7 tahun 2006 tanggal 18 April 2006, tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003.
7. Panduan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT PP PRESISI Tbk yang berlaku.
8. Kode Etik Perusahaan (Code of Conduct) PT PP PRESISI Tbk yang berlaku.
9. Surat Edaran OJK nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka: 5 aspek, 8 prinsip, 25 rekomendasi.

Ruang Lingkup Pengaduan

Lingkup Pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah tindakan yang dapat merugikan Perusahaan, antara lain sebagai berikut :

1. Penyimpangan dari peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perusahaan;
3. Benturan Kepentingan; dan
4. Gratifikasi.

Cara Penyampaian Laporan Pelanggaran

Pelaporan Pelanggaran dilakukan secara tertulis.

1. Pelapor menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Perusahaan c.q Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran, dengan cara diantar langsung atau dikirim melalui e-mail yang khusus diperuntukkan media Sistem Pelaporan Pelanggaran, atau melalui pos ke Perusahaan.
2. Disampaikan ke alamat resmi:
Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran
PT PP PRESISI Tbk
BIRO SPI

Legal Basis of Whistleblowing System

Policy of WBS of the Company is prepared by referring to several regulations, among others:

1. Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 on Implementation of Good Corporate Governance in SOE, the Seventh Section "Internal Control System", Article 27; the Board of Directors prepares provision that regulate reporting mechanism for alleged violation in the concerned SOE.
2. Whistleblowing System Guidelines issued by National Committee of Governance Policy in 2008.
3. Law No. 28 year 1999 dated May 19, 1999 on Management of Clean Country that is Free from Corruption, Collusion, and Nepotism, Chapter VI: Public Participation, Article 8 and 9.
4. Law of the Republic of Indonesia No. 30 year 2002 dated December 27, 2002 on Eradication of Corruption.
5. Government Regulation No. 71 year 2000 dated Augustus 21, 2000 on Procedures for Public Participation and Rewarding in Preventing and Eradication Corruption.
6. Law of the Republic of Indonesia No. 7 year 2006 dated April 18, 2006 on Validation of United Nations Convention Against Corruption, 2003.
7. The prevailing Good Corporate Governance (GCG) Code of PT PP PRESISI Tbk.
8. The prevailing Code of Conduct of PT PP PRESISI Tbk.
9. Circular Letter of OJK No. 32/SEOJK.04/2015 on Good Corporate Governance Code of Public Company: 5 aspects, 8 principles, 25 recommendations.

Scope of Complaint

Scope of complaint that will be followed-up by Whistleblowing System is actions that may harm the Company, among others:

1. Violation against the prevailing laws and regulations;
2. Abuse of position for other interest outside the Company;
3. Conflict of interest; and
4. Gratuity.

Whistleblowing Submission Method

Violation is reported in writing.

1. Whistleblower submits official letter directly to the Company c.q Whistleblowing Team, or via e-mail specifically to Whistleblowing System media, or via post to the Company.
2. Submitted to official address:
Whistleblowing Team
PT PP PRESISI Tbk
BIRO SPI

Jl. Raya Narogong Km. 15 Pangkalan 6,
Bekasi, Indonesia
Telepon (021) 824 83255
e-mail: pengaduan@pp-presisi.co.id

3. Pengaduan Pelanggaran secara tertulis harus dilengkapi fotokopi identitas dan bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan pelanggaran yang akan disampaikan.
4. Pelapor anonim dapat diterima tetapi tidak ada kewajiban Perusahaan untuk memberikan tanggapan karena akan terdapat kesulitan untuk melakukan komunikasi dan klarifikasi atas laporan tersebut sehingga ada kemungkinan laporan tidak dapat diproses lebih lanjut.
5. Perusahaan memberikan tanda terima atas Pengaduan Pelanggaran yang diajukan secara tertulis dengan disertai identitas pelapor.

Prosedur Pengelolaan

1. Insan Perusahaan (Pelapor) wajib melaporkan secara tertulis kepada Perusahaan (Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran) jika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan usaha di lingkungan PT PP PRESISI Tbk.
2. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran menerima dan menyaring laporan Pengaduan Pelanggaran yang diterima sebagai tahap verifikasi awal, apakah terdapat indikasi awal atau sesuai dengan kriteria laporan Sistem Pelaporan Pelanggaran serta dapat ditindak lanjuti :
 - Pihak pelapor memiliki identitas,
 - Batas waktu peristiwa yang dilaporkan maksimal 1 (satu) tahun,
 - Terdapat permasalahan dugaan tindak pelanggaran, siapa yang terlibat, tempat dan tanggal peristiwa, kerugian yang ditimbulkan.Bila laporan pengaduan memenuhi kriteria di atas, maka akan diteruskan untuk ditindaklanjuti. Namun bila tidak, maka proses Sistem Pelaporan Pelanggaran selesai.
3. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran melaporkan hasil verifikasi awal tersebut dilaporkan kepada :
 - a. Dewan Komisaris dan Komite Audit (jika terlapor anggota Direksi);
 - b. Anggota Dewan Komisaris yang bukan terlapor (jika terlapor anggota Dewan Komisaris);
 - c. Komisaris Utama (jika terlapor anggota organ pendukung Dewan Komisaris);
 - d. Direksi (jika terlapor Pegawai); dan
 - e. Dewan Komisaris dan Direksi (jika terlapor Anggota Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran).
4. Pelaksanaan penanganan lebih lanjut, sesuai materi yang dilaporkan menjadi tanggung jawab dan atas arahan: Dewan Komisaris dan Komite Audit (jika terlapor anggota Direksi); Anggota Dewan Komisaris yang bukan terlapor (jika terlapor anggota Dewan Komisaris); Komisaris Utama (jika terlapor anggota organ pendukung Dewan Komisaris); Direksi (jika terlapor Pegawai); serta Dewan Komisaris dan

Jl. Raya Narogong Km. 15 Pangkalan 6
Bekasi, Indonesia
Telephone: (021) 82483255
e-mail: pengaduan@pp-presisi.co.id

3. Report in writing shall be equipped with copy of identity and supporting evidence, such as documents related to the violations that will be submitted.
4. Anonymous sender is acceptable, however the Company is not obliged to response due to difficulty in communication and clarification on the report, therefore there is possibility that the report will not be followed-up.
5. The Company receives receipt on complaint that is submitted in writings accompanied with whistleblower identity.

Management Procedure

1. The Company's personnel (whistleblower) shall report in writing to the Company (Whistleblowing Management Team) if there is any violation in business activity in PT PP PRESISI Tbk.
2. The Whistleblowing Management Team receives and filters reports on Complaints of Violations as the initial verification stage, whether there are initial indications or in accordance with the criteria of the Whistleblowing System and can be followed up:
 - The reporting party has an identity,
 - The deadline for the reported event is 1 (one) year,
 - There are problems with alleged acts of violation, who is involved, the place and date of the incident, the loss caused.If the Complaint report meets the above criteria, it will be forwarded for follow up. But if not, then the Violation Reporting System process is complete.
3. The Whistleblowing Management Team reports the results of the initial verification to:
 - a. Board of Commissioners and Audit Committee (if the reported party is member of the Board of Directors);
 - b. Members of the Board of Commissioners who are not the reported (if the reported party is member of the Board of Commissioners);
 - c. President Commissioner (if the reported party is member of the supporting organ of the Board of Commissioners);
 - d. Directors (if the reported party is Employees); and
 - e. Board of Commissioners and Directors (if the reported party is member of the Whistleblowing Management Team).
4. Implementation of further handling, in accordance with the material reported is the responsibility and direction from: Board of Commissioners and Audit Committee (if the reported party is member of the Board of Directors); Members of the Board of Commissioners who are not reported (if the reported is member of the Board of Commissioners); President Commissioner (if the reported party is member of

Direksi (jika terlapor Anggota Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran).

5. Direksi dan atau Dewan Komisaris menetapkan rekomendasi langkah selanjutnya. Bila tidak terbukti atau selesai, maka laporan Pengaduan akan ditutup. Apabila Pengaduan tersebut terbukti atau memerlukan tindak lanjut, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, atau diteruskan kepada pihak penyidik untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
6. Seluruh proses verifikasi awal dan penanganan lebih lanjut atas Pengaduan wajib dibuatkan Berita Acara.
7. Prosedur pengelolaan atas Pengaduan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran dilaksanakan sesuai dengan bagan alur yang telah diatur dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran Perseroan tahun 2018.
8. Seluruh proses Sistem Pelaporan Pelanggaran harus terdokumentasi dengan baik dan reliable (dapat dipertanggungjawabkan).

Perlindungan Bagi Pelapor

1. Identitas Pelapor dan Terlapor dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan.
2. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun.
3. Perusahaan memberikan perlindungan kepada pelapor terhadap perlakuan seperti:
 - o Pemecatan yang tidak adil.
 - Penurunan jabatan atau pangkat.
 - Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya.
 - Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*Personal File Record*).

Selain perlindungan di atas, untuk pelapor yang beriktikad baik, perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum (jika diperlukan).

4. Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan Pengaduan tersebut.

Tim Pelaksana Penerapan Kebijakan WBS

Pada tahun 2018, Direksi PP Presisi membentuk Tim Pelaksana Penerapan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 048/SK/DIR/PPRE/X/2018, dengan susunan sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Syaukat Noor | : Ketua Tim |
| 2. Sri Bitu Sutia Selvi | : Sekretaris merangkap Anggota |
| 3. Agil Ferzia | : Anggota |
| 4. Caroline Wahyuninggar | : Anggota |

the supporting organ of the Board of Commissioners); Board of Directors (if the reported party is Employee); and the Board of Commissioners and Board of Directors (if the reported party is members of Whistleblowing Management Team).

5. The Board of Directors and/or the Board of Commissioners determine the recommendations for the next steps. If not proven or completed, the Complaint report will be closed. If the Complaint is proven or requires follow-up, it will be subject to sanctions according to the applicable provisions, or forwarded to the investigating party for further processing in accordance with the applicable rules and regulations.
6. The entire initial verification process and further handling of the Complaint must be included in minutes.
7. Procedures for management on complaint through Whistleblowing System is implemented in accordance with flowchart regulated in Whistleblowing System of the Company in 2018.
8. All Whistleblowing System processes shall be properly documented and reliable.

Protection for Whistleblower

1. Confidentiality of identity of whistleblower and the reported is guaranteed by the Company.
2. The Company guarantees protection for whistleblower from any threat, intimidation, or other unpleasant action from any party as long as the Whistleblower keeps the secrecy of complaint from any party.
3. The Company provides protection to whistleblower whistleblower from actions such as: unfair dismissal,
 - Demotion
 - Abuse or discrimination in any form
 - Notes that harm the personal file record.

In addition to those protection, the Company will provide legal assistance (if any) for whistleblower with good will.

4. Protection for Whistleblower also prevails for party who implements Whistleblowing System as well as parties who provide information related to the report.

WBS Policy Implementation Team

In 2018, the Board of Directors of PP Presisi established Whistleblowing System Policy Implementation Team pursuant to Decree of the Board of Directors No. 048/SK/DIR/PPRE/X/2018 with composition as follows:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Syaukat Noor | : Team Chairman |
| 2. Sri Bitu Sutia Selvi | : Secretary cum Member |
| 3. Agil Ferzia | : Member |
| 4. Caroline Wahyuninggar | : Member |

Sanksi dan Apresiasi

1. Untuk pelapor yang beritikad baik, perusahaan juga dapat menyediakan perlindungan hukum sesuai peraturan yang berlaku.
2. Perusahaan dapat memberikan penghargaan kepada pelapor atas pelanggaran yang dapat dibuktikan sehingga aset/keuangan perusahaan dapat diselamatkan. Penghargaan diberikan melalui kebijakan Direksi dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan atau perlindungan pelapor.
3. Terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Terlapor yang tidak terbukti melakukan pelanggaran, ada kewajiban perusahaan untuk mengembalikan nama baik atau rehabilitasi.

Tindak Lanjut Atas Pengaduan Yang Telah Diproses Tahun 2018

Sepanjang tahun 2018, tidak terdapat laporan pelanggaran yang masuk ke Sistem Pelaporan Pelanggaran PP Presisi.

Evaluasi dan Pengembangan Sistem WBS

Pelaksanaan sistem WBS di Perseroan selama tahun buku telah berjalan sesuai dengan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran PP Presisi tahun 2018. Meski demikian, kedepannya Perseroan akan terus meningkatkan sosialisasi dan internalisasi terkait kebijakan WBS ke seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Sanction and Appreciation

1. For whistleblower with good intention, the Company provides legal protection in accordance with the prevailing regulations.
2. The Company may award the whistleblower for violation that can be proven, hence the Company's assets are saved. Award is given through the Board of Directors policy by taking into account confidentiality aspect or whistleblower protection.
3. In the event that the reported party is proven to conduct violation, the party will be imposed to sanctions in accordance with the prevailing provisions.
4. The Company shall restore the reputation of the reported party in the event that the reported party was not proven guilty.

Follow Up on Compliant Processed in 2018

Throughout 2018, the Company has handled and followed up complaints reported with the case detailed as follows:

Evaluation and Development of WBS System

The implementation of the WBS system in the Company during the fiscal year has been in accordance with the PP Presisi Guidelines for Whistleblowing System in 2018. However, in the future the Company will continue to improve dissemination and internalization related to WBS policies to all shareholders and stakeholders.



Di samping melakukan pengembangan usaha, PP Presisi juga berupaya untuk mengedepankan aspek keberlanjutan melalui pemenuhan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan hidup, karyawan, sosial kemasyarakatan, dan pelanggan.

In addition to developing business, PP Presisi also strives to prioritize sustainable aspect by fulfilling responsibility to environment, employees, social community, and customers.





Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility





KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Tanggung Jawab Sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) PP Presisi merupakan suatu bentuk komitmen yang terus menerus ditingkatkan melalui kegiatan operasional serta kinerjanya dan dikelola oleh Perseroan dengan tetap mengusung prinsip TARIF, khususnya prinsip *Responsibility*, yang mana dapat membuat perusahaan menjadi perusahaan yang berkelanjutan (*Sustainability*). PP Presisi percaya bahwa bisnis akan berkelanjutan apabila memberikan perhatian yang seimbang kepada aspek keuntungan (*profit*), kemanusiaan (*people*) dan lingkungan (*planet*). Oleh karena itu Perseroan menjadikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai bagian tidak terpisahkan dari operasional perusahaan untuk mendukung keberlanjutan usaha.

PP Presisi sangat menyadari bahwa implementasi tanggung jawab sosial dan hubungan yang harmonis kepada para Pemangku Kepentingan, seperti lingkungan, karyawan, dan masyarakat sekitar memiliki keterkaitan dengan kesinambungan usaha PP Presisi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, PP Presisi berkomitmen untuk berperan dalam pengembangan masyarakat melalui program peningkatan kesejahteraan serta kepedulian terhadap lingkungan.

TUJUAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Tujuan pelaksanaan program CSR PP Presisi secara eksternal adalah untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan secara internal adalah untuk membangun hubungan yang harmonis dan kondusif dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mendukung pencapaian tujuan korporasi, terutama dalam membangun reputasi korporasi.

POLICY ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Corporate Social Responsibility (CSR) of PP Presisi is a form of commitment continuously improved through operation activities and performance as it is managed by the Company by upholding TARIF principles, particularly the principle of Responsibility that enables a company to be a sustainable company. PP Presisi believes that a business will be sustainable when it takes into account the balance of profit, people, and planet aspects. Therefore, the Company set Corporate Social Responsibility as inseparable part from the Company's operations to support business sustainability.

PP Presisi is fully aware that implementation of social responsibility and harmonious relationship with Stakeholders, such as environment, employees, and surrounding community are related to business continuity of PP Presisi in a sustainable manner. Hence, PP Presisi is committed to play a role in community development through welfare improvement and environmental care programs.

OBJECTIVES OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IMPLEMENTATION

The external aim of implementation of CSR in PP Presisi is to assist the Government of Indonesia in improving Human Development Index (HDI). Meanwhile, internal objective of the program is to develop harmonious and conducive relationship with all stakeholders to support the achievement of corporate goals, especially in building corporate reputation.

DASAR HUKUM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Berbagai peraturan dan tanggung jawab sosial perusahaan PP Presisi didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Bab V Pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan aktivitas CSR yang bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perusahaan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

TARGET DAN RENCANA KEGIATAN CSR 2018

Perseroan telah menetapkan target-target yang hendak dicapai dalam pelaksanaan kegiatan CSR di tahun 2018, yang meliputi:

1. Pendirian Sarana Rumah Ibadah
2. Peningkatan sarana / pra sarana
3. Kesejahteraan masyarakat
4. Bencana Alam
5. Program pengolahan limbah
6. Program Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3)
7. Penguatan Sarana Pengaduan Pelanggan maupun Karyawan terkait produk dan jasa Perseroan (Quick Response Unit)

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN

Kebijakan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Lingkungan

Sebagai perusahaan konstruksi berbasis pada alat berat, PP menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan operasionalnya sering bersinggungan langsung dengan lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, Perseroan terus berupaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekitar lokasi operasional dan lokasi proyek Perseroan serta lingkungan tempat tinggal masyarakat setempat melalui berbagai implementasi program-program pelestarian lingkungan seperti pengelolaan limbah dan hemat energi.

Realisasi Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Lingkungan Tahun 2018

Proses Pengelolaan Limbah

Proses pengelolaan limbah Perseroan difokuskan pada pemanfaatan limbah-limbah yang dihasilkan dari proyek-proyek sipil (*civil works*) dan *ready mix* untuk merapikan *area plant*. Selain itu, Perseroan juga membuat sarana *Water Treatment* yang berfungsi untuk memisahkan air dengan beton yang tidak dipakai dalam rangka mencegah terbuangnya limbah ke area sekitar yang berdampak buruk terhadap lingkungan.

Program Hemat Energi

Perseroan sangat mendukung program pemerintah dalam penghematan penggunaan listrik dengan cara melakukan pemadaman listrik pada jam-jam tertentu. Biasanya pemadaman listrik dilakukan di waktu istirahat siang, yakni pada pukul 12.00 – 13.00 dan waktu tidak beroperasinya kantor, tepatnya pada pukul 20.00 - 06.00 WIB.

LEGAL BASIS OF CORPORATE SOCIAL PROGRAM IMPLEMENTATION

Various regulations of PP Presisi corporate social responsibility are based on provisions stipulated on Chapter V Article 74 on Social and Environmental Responsibility of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.

The Company is committed to perform CSR activities that are aimed to foster the Company's relationship to be harmonious, balanced, and in accordance with environment, values, norms, and local culture.

TARGET AND PLAN OF CSR IN 2018

The Company has set targets to be achieved in implementing CSR activities in 2018, which include:

1. Establishment of House of Worship Facilities
2. Improvement of facilities and infrastructures
3. Community welfare
4. Natural Disasters
5. Waste treatment program
6. Occupational Health and Safety Program (K3)
7. Strengthening Customer and Employee Complaints Facilities related to the Company's products and services (Quick Response Unit)

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON ENVIRONMENT

Policy on Corporate Social Responsibility Program on Environment

As a heavy equipment-based construction company, PP Presisi realizes that its operational activities are frequently in direct contact with the surrounding environment. To that end, the Company strives to prevent damage on environment and improve environmental quality surrounding operational location and project location of the Company as well as residence of the surrounding community through implementation of various environmental preservation programs, such as waste management and energy saving programs.

Realization of Corporate Social Responsibility Program on Environment in 2018

Waste Management Process

Waste management process of the Company is focused on utilizing wastes generated from civil works and ready mix to tidy up plant area. In addition, the Company also establishes Water Treatment facility with the function of separating water with unused concrete in order to prevent waste from polluting the surrounding area with negative impact to the environment.

Energy Saving Program

The Company is highly supportive of the government's program in energy saving through power outage in certain hours. Usually, it is conducted at lunch, namely at 12.00 – 13.00 and outside of business hours, at 20.00 – 06.00 to be exact.

Sertifikasi di Bidang Lingkungan

Usaha Perseroan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup telah dapat memenuhi standar internasional yaitu dengan diperolehnya Sertifikat ISO 14001:2007 – Environmental Management System. Kepatuhan terhadap ISO 14001:2007 – Environmental Management System dipantau oleh departemen Safety, Health & Environment (SHE).

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA

Kebijakan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap K3

Bagi PP Presisi, karyawan merupakan aset berharga yang memiliki peranan penting bagi keberlanjutan usaha Perseroan di masa depan. Menyadari hal tersebut, Perseroan berkomitmen untuk menunaikan tanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) melalui Program Peningkatan K3.

Implementasi tanggung jawab sosial PP Presisi yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja meliputi pemberian kesempatan kerja dan kesetaraan *gender*, program pendidikan dan pelatihan, penggunaan tenaga kerja lokal, jaminan kesehatan, dan implementasi keselamatan dan kesehatan kerja.

Realisasi Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap K3 Tahun 2018

Kesempatan Kerja dan Kesetaraan Gender

Perseroan telah membuka kesempatan bagi calon karyawan tanpa membedakan latar belakang identitas, khusus identitas *gender*. Terkait hal tersebut, PP Presisi telah memastikan bahwa tidak terdapat bentuk diskriminasi apapun terkait perbedaan *gender* karyawan pada tiap aktifitas operasional yang dijalankan.

Program Pendidikan dan Pelatihan

Program Pendidikan dan Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan dan ketrampilan serta profesionalisme para insan PP Presisi. Perseroan memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan untuk mengikuti Program Pendidikan dan Latihan dengan biaya penuh dari Perusahaan. Pendidikan dan Latihan dapat dilaksanakan di dalam negeri.

Sepanjang tahun 2018, Perseroan telah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan karyawan. Rincian mengenai mekanisme pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan pada tahun buku telah dijelaskan pada bab Sumber Daya Manusia yang terletak di halaman 89-91.

Penggunaan Tenaga Kerja Lokal

Pada pelaksanaan proses rekrutmen dan seleksi karyawan baru, PP Presisi memprioritaskan pemanfaatan tenaga kerja lokal yang berkompeten untuk bergabung dengan Perseroan. Kesempatan kerja yang diberikan PP Presisi kepada masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya merupakan wujud nyata atas komitmen Perseroan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup bagi masyarakat sekitar.

Certification in Environmental Sector

The Company's efforts to maintain environmental quality has fulfilled international standard, namely through obtaining Certificate of ISO 14001:2007 – Environmental Management System. Compliance with ISO 14001:2007 – Environmental Management System is monitored by Health, Safety, & Environment (HSE) department.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON MANPOWER, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Policy on Corporate Social Responsibility Program on OHS

PP Presisi considers its employees as valuable assets that have key roles for business sustainability of the Company in the future. With this in mind, the Company is committed to perform its responsibility in the sectors of Manpower as well as Occupational Health and Safety (OHS) through Manpower and OHS improvement Program.

Implementation of social responsibility of PP Presisi in relation to manpower, occupational health and safety includes providing equal work opportunity and gender equality, education and training programs, using local manpower, health insurance, and implementation of occupational health and safety.

Realization of Corporate Social Responsibility Program on OHS

Work Opportunity and Gender Equality

The Company has provided the opportunity for prospective employees without discrimination towards identity background, especially gender identity. To that end, PP Presisi has ensured that there was no any form of discrimination related to difference of employee genders in every operational activity.

Education and Training Program

Education and Training Program is aimed to improve quality, expertise, ability, and skill as well as professionalism of PP Presisi personnel. The Company provides equal opportunity to employees to participate in Education and Training Program with the full expense of the Company. Education and Training can be held domestically.

Throughout 2018, the Company held employee training and education activities. Details on mechanism of education and training activities on fiscal year have been described in Human Resources chapter on page 89-91.

Use of Local Manpower

In the process of new employee recruitment and selection, PP Presisi prioritizes utilization of competent local manpower to join the Company. Work opportunity provided by PP Presisi to the community surrounding its operational area is a manifestation of the Company's commitment in improving welfare and standard of living of the surrounding community.



Jaminan Kesehatan

Secara internal, PP Presisi memiliki kebijakan perlindungan terhadap seluruh karyawan dengan mengikutkan seluruh karyawan dalam Program Jaminan Kesehatan PP Presisi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang meliputi :

- a. Program Jaminan Kecelakaan Kerja,
- b. Program Jaminan Hari Tua
- c. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
- d. Program Jaminan Pensiun

Apabila terjadi kecelakaan kerja terhadap karyawan yang jumlah biaya pengobatan dan perawatan melebihi batasan maksimum Jaminan Kecelakaan Kerja PP Presisi, maka kelebihan biaya tersebut menjadi tanggungan PP Presisi. Beberapa program perlindungan kesehatan bagi karyawan PP Presisi antara lain :

Health Insurance

PP Presisi has internal policy for protection of all employees by including them in Health Insurance Program of PP Presisi as stipulated in Law Number 13 of 2003 on Manpower and Law No. 24 of 2011 on Social Security Administration Agency, which includes:

- a. Work Accident Insurance Program
- b. Old Age Savings Program
- c. Health Care Insurance Program
- d. Pension Program

In the event of work accident befalls on employees with the total cost for medication and treatment exceeds maximum limit of Work Accident Insurance of PP Presisi, the remaining cost will be borne by PP Presisi. Several health insurance program for PP Presisi employees are as follows:

1. Memberikan tambahan biaya perawatan/pengobatan bagi karyawan dan keluarganya
2. Mengikutsertakan seluruh karyawan dalam Program Asuransi yang ditanggung oleh PP Presisi.

Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja

PP Presisi memiliki perhatian yang besar terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk seluruh pegawai perusahaan dan mitra kerja. Berawal dari perhatian tersebut, PP Presisi membuat kebijakan dan prosedur-prosedur untuk menjaga implementasi K3 di setiap lokasi kerja sesuai dengan persyaratan regulasi. Kebijakan K3 Perseroan adalah sebagai berikut:

- Peningkatan yang berkelanjutan terhadap keselamatan, kesehatan, kerja dan pengelolaan lingkungan,
- Komitmen terhadap pencegahan pencemaran dan pengendalian dampak lingkungan,
- Penggunaan sumber daya alam yang efisien dalam setiap aktifitas,
- Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH) atau *Safety Health and Environment* (SHE) sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang berlaku.

Sebagai perusahaan jasa konstruksi, PP Presisi membentuk Departemen Quality, Safety & Health, Environmental (QSHE) yang bertugas untuk mengawasi dan mengelola aspek K3LH di perusahaan maupun area proyek. Departemen QSHE juga aktif dalam pengawasan penerapan K3L yang dilakukan oleh mitra kerja, yaitu kontraktor dan *supplier*.

Pada tahun 2018, PP Presisi aktif dalam melaksanakan sosialisasi K3LH kepada pegawai dan mitra kerja. Kegiatan yang dilakukan meliputi :

- Promosi dan kampanye K3LH yang lebih intensif dan efektif melalui poster, banner dan sebagainya .
- Rapat Departemen QSHE PP Presisi
- Rapat MR BIRO QSHE
- Sosialisasi K3LH pada mitra kerja dilaksanakan melalui safety induction, safety talk, serta pertemuan safety bulanan.
- Melaksanakan beberapa training K3LH secara rutin seperti cara menggunakan APAR serta simulasi keadaan darurat kecelakaan kerja dan kebakaran, *training* Petugas P3K, dan pelatihan bekerja di ketinggian
- Audit K3 melalui pengawasan harian, inspeksi terencana maupun inspeksi tidak terencana setiap bulan serta mengevaluasi kinerja K3L di area konstruksi setiap akhir tahun.

Pelatihan dan Sertifikasi K3 kepada Pegawai dan Pekerja

Perseroan selalu memastikan bahwa semua insan PP Presisi memiliki kompetensi atas dasar pendidikan, pelatihan, dan pengalaman sebelum bekerja. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, PP Presisi membutuhkan tenaga kerja yang berkompeten, menyadari tugas, dan tanggung jawab mereka. Mempertimbangkan kebutuhan tersebut, PP Presisi melalui

1. Providing additional cost for treatment/medication for employees and their families.
2. Including all employees in Insurance Program borne by PP Presisi.

Occupational Health and Safety Program

PP Presisi put the utmost attention on Occupational Health and Safety (OHS) of all employees of the company and business partners. From such concern, PP Presisi formulates policies and procedures to maintain OHS implementation in every work location in accordance with regulations of OHS Policy of the Company, as follows:

- Sustainable improvement to occupational health, safety and environmental management.
- Commitment to prevention of contamination and environmental impact control.
- Utilization of efficient natural resources in every activity.
- Implementation of Occupational Safety, Health, and Environmental (SHE) Management System in accordance with prevailing regulations and requirements.

As a construction services company, PP Presisi establishes Quality, Safety, Health & Environmental Department (QSHE) that has the duty to supervise and manage SHE aspect in the Company and project area. QSHE Department is also active in supervision of K3L implementation conducted by business partners, namely contractors and suppliers.

In 2018, PP Presisi is also active in implementing SHE dissemination to employees and business partners. The activities include:

- More intensive and effective SHE promotions and campaigns through poster, banner, and so on.
- Meeting of QSHE Department of PP Presisi
- MR BIRO QSHE Meeting
- Dissemination of SHE on business partners is conducted through safety induction, safety talk and monthly safety meeting.
- Conducting several SHE trainings routinely such as procedure of using APAR, simulation of work accident and fire emergency conditions, training of First Aid Officers, and training for working at height.
- OHS Audit through daily supervision, monthly announced and unannounced inspection as well as performance evaluation of SHE in construction are at the end of the year.

OHS Training and Certificate for Employees and Workers

The Company always ensures that all personnel of PP Presisi have competency on basic education, training, and experience prior to working. In order to achieve such goals, PP Presisi requires manpower that is competent and aware of their duties and responsibilities. Taking into consideration such needs, PP Presisi sets training and certification schedule on SHE through QSHE

Departemen QSHE membuat jadwal pelatihan dan sertifikasi di bidang K3LH dengan bekerja sama dengan pihak eksternal bersertifikat, Perusahaan Jasa K3 (PJK3), dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Bagian dari Rencana K3LH Proyek adalah mengatur cara, dimana PP Presisi memastikan kontraktor mengadakan identifikasi kebutuhan pelatihan dan diimplementasikan pada saat mengerjakan proyek. Kontraktor dipersyaratkan untuk membuat jadwal pelatihan rutin K3LH dan memperbaruinya secara berkala.

Sertifikasi di Bidang K3

Komitmen PP Presisi dalam meningkatkan dan menjamin aspek K3 bagi seluruh karyawannya berhasil mengantarkan Perseroan meraih Sertifikat BS OHSAS 18001 : 2007 - Occupational Health and Safety Management Systems dan Sertifikat Penghargaan "Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja" dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Kebijakan Program Kemitraan dan Pengembangan Sosial

PP Presisi berkomitmen untuk merealisasikan Visi dan Misi Perseroan, yaitu peduli pada lingkungan dan memberikan komitmen bagi perbaikan lingkungan sekitar melalui program Kepedulian Sosial. PP Presisi secara aktif berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang lebih baik

Realisasi Program Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan Tahun 2018

Sepanjang tahun 2018, Perseroan telah melaksanakan sejumlah program CSR yang berfokus pada pengembangan sosial dan kemasyarakatan, antara lain:

1. Pelaksanaan CSR di Proyek Tol Trans Sumatra, yang meliputi:
 - Membantu masyarakat dalam mengatasi banjir di sekitar lokasi proyek di Bakauheni Utara;
 - Memanfaatkan lahan yang ada untuk membuat lapangan sepak bola;
 - Pembuatan talud di sungai daerah Sidomulyo; dan
 - Bakti Sosial SDN 4 Tajimalela (TJM).
2. Pembangunan Rumah Wudhu Masjid Baeturrahman, Bekasi.
3. Pengerjaan timbunan tanah untuk Pembangunan Pondok Pesantren As-Shomadiyah, Bangkalan, Madura.
4. Pemberian donasi dalam Kegiatan KKN-PPM UGM di Kalimantan Barat.
5. Buka Puasa dan pemberian santunan kepada anak yatim di Bekasi.
6. Pemberian santunan kepada Karyawan dan Guru SMUN 1 Teladan, Yogyakarta.

Department with the cooperation certified external parties, OHS Services Companies (PJK3), and Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia.

Part of SHE Project Plan is to regulate procedure, in which PP Presisi ensures that contractors conduct identification of training needs and it is implemented when executing projects. Contractors are required to make routine SHE training schedule and update it periodically.

Certification in OHS Sector

PP Presisi's commitment to improve and guarantee OHS aspects for all its employees successfully led the Company to obtain the BS OHSAS 18001: 2007 Certificate - Occupational Health and Safety Management Systems and Certificate of Appreciation for "Occupational Health and Safety Management System" from the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

Policy on Community and Social Development Program

PP Presisi is committed to realize the Company's Vision and Mission, namely taking care of environment and committing to improvement of the surrounding environment through Social Care program. PP Presisi actively participates in the effort of community empowerment to create better environment.

Realization of Community and Social Development Program in 2018

Throughout 2018, the Company has implemented a number of CSR programs focusing on social and community development, among others:

1. Implementing CSR in Trans Sumatra Toll Project, including:
 - Assisting the community in overcoming flood around project location in North Bakauheni;
 - Utilizing empty land to construct football field;
 - Construction of Talud-tablero in rivers in Sidomulyo area; and
 - Social Service in SDN 4 Tajimalela (TJM).
2. Construction of Wudhu House in Baeturrahman Mosque, Bekasi.
3. Working on of landfill for Construction of Islamic Boarding School of As-Shomadiyah, Bangkalan, Madura.
4. Granting of donation in Activities of KKN-PPM UGM in West Kalimantan.
5. Breaking the Fast and giving compensation to orphans in Bekasi.
6. Giving compensation to Employees and Teachers of SMUN 1 Teladan, Yogyakarta.

7. Pelaksanaan CSR di Proyek Tol Manado – Bitung, yang meliputi:
 - Pemberian bantuan kepada Warga Desa Treman yang terkena bencana alam;
 - Pembagian *parcel* Lebaran;
 - Pembagian *parcel* Hari Raya Natal;
 - Pembuatan lapangan voli di Desa Treman;
 - Pemeriksaan kesehatan warga di sekitar lokasi Batching Plant 2;
 - Perbaikan jalan akses menuju kantor Proyek Tol Manado Bitung; dan
 - Berpartisipasi dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Adha.
8. Pelaksanaan CSR anak perusahaan PP Presisi, yakni PT Lancarjaya Mandiri Abadi yang berupa pembuatan akses jalan pesantren Al-Fath Jalen, Bekasi.
9. Pemberian Bantuan Bencana Alam Tsunami Selat Sunda berupa sembako dan alat berat.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PELANGGAN

Kebijakan Program Tanggung Jawab Sosial Terhadap Pelanggan

PP Presisi memandang bahwa pelanggan memiliki peran terpenting dalam keberlangsungan usaha Perseroan di masa depan. Oleh sebab itu, Perseroan telah berkomitmen untuk menjamin keamanan produk dan jasa yang dihasilkan dalam rangka meningkatkan kepuasan dan kepercayaan para pelanggan.

Sarana Pengaduan bagi Konsumen

Dalam rangka meningkatkan keamanan produk dan jasa yang ditawarkan serta keselamatan konsumen, Perseroan telah memiliki Quick Response Unit (Call Center) sebagai sarana pengaduan bagi konsumen atau karyawan untuk menyampaikan informasi berupa saran atau keluhan terhadap penggunaan alat berat yang digunakan dalam proyek konstruksi.

Sepanjang tahun 2018, tidak terdapat keluhan dari pelanggan yang ditujukan ke PP Presisi maupun yang masuk ke Quick Response Unit Perseroan.

Sertifikasi di Bidang Manajemen Mutu

PP Presisi berhasil meraih ISO 9001:2015 – Management Quality yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan program peningkatan keamanan produk dan jasa Perseroan.

Alokasi Biaya CSR Tahun 2018

Dalam rangka memenuhi Tanggung Jawab Perusahaan terhadap lingkungan, karyawan, masyarakat, dan pelanggan/konsumen, PP Presisi telah mengalokasikan biaya CSR sejumlah Rp1,3 Miliar di tahun 2018. Jumlah ini mengalami peningkatan dari biaya CSR di tahun 2017.

7. Implementation of CSR in Manado – Bitung Toll Project, including:
 - Providing assistance to People of Treman Village affected by natural disaster;
 - Distributing Eid Al-Fitr parcels;
 - Distributing Christmas parcels;
 - Constructing volleyball field in Treman Village;
 - Performing medical check-up on people in Batching Plant 2 location;
 - Repairing road for access to office of Manado Bitung Toll Project; and
 - Participating in Eid al-Adha Celebration.
8. Implementation of CSR on subsidiary of PP Presisi, namely PT Lancarjaya Mandiri Abadi in the form of road access construction for Al-Fath Jalen Islamic Boarding School, Bekasi.
9. Provision of Assistance for Sunda Strait Tsunami Disaster in the form of sembako and heavy equipment.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO CUSTOMERS

Policy on Corporate Social Responsibility to Customers

PP Presisi considers its customers to have the most important role in business continuity of the Company in years to come. Hence, the Company has committed to assure safety of generated products and services rendered in order to increase customers' satisfaction and trust.

Complaint Facility for Consumers

In order to improve safety of products and services offered as well as consumers' safety, the Company has Quick Response Unit (Call Center) as a complaint facility for consumers or employees to deliver information in the form of suggestions or complaints on use of heavy equipment in construction project.

In 2018, PP Presisi has received and followed up complaints from customers amounting to ... reports. This number was an increase/decrease compared to complaint reports followed up in previous year, namely reports.

Certification in Quality Management Sector

PP Presisi succeeded in achieving ISO 9001:2015 – Management Quality used as foundation for improvement on the Company's products and services.

CSR Cost Allocation in 2018

To fulfill the Company's Responsibility towards the environment, employees, community, and customers/consumers, PP Presisi has allocated CSR costs of Rp1.3 billion in 2018. This number has increased from the cost of CSR in 2017.

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2018 PT PP Presisi Tbk

Board of Commissioners' and Board of Directors' Statement Regarding
Responsibility for PT PP Presisi Tbk Annual Report 2018

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT PP Presisi Tbk tahun 2018 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan perusahaan.

We the undersigned declare that all information in the Annual Report of PT PP Presisi Tbk for 2018 has been fully disclosed and are fully responsible for the accuracy of the company's Annual Report content.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This is our declaration, which has been made truthfully.

DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS



Ir. Nawang Sri Retno Kartiko, M. EngM
Komisaris / Commissioner



Ir. Muhammad Toha Fauzi, MT
Komisaris Utama /
President Commissioner



Ir. Ketut Darmawan
Komisaris Independen /
Independent Commissioner

DIREKSI BOARD OF DIRECTORS



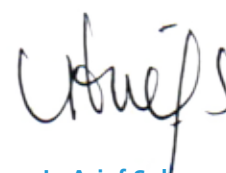
Ir. Iswanto Amperawan
Direktur Utama / President Director



Benny Pidakso, SE, MM
Direktur /
Director



Ir. Hasanin Ade Putra, MT
Direktur /
Director



Ir. Arief Subyandono
Direktur Independen /
Independent Director

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank



PRESISI

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND ITS SUBSIDIARY**

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

**FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

**DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
AND INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

**No. 00021/2.1000/AU.1/03/0912-3/1/II/2019
Tanggal 12 Februari/ February 12, 2019**

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

	<u>Halaman/ Page</u>	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		<i>DIRECTORS' STATEMENT LETTER</i>
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	1	<i>INDEPENDENT AUDITORS' REPORT</i>
LAPORAN KEUANGAN - Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017		<i>FINANCIAL STATEMENTS - For the years ended December 31, 2018 and 2017</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	3	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	5	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	6	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	7	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	8	<i>Notes to Consolidated Financial Statements</i>
INFORMASI TAMBAHAN		<i>SUPPLEMENTARY INFORMATION</i>
Lampiran 1 : Laporan Posisi Keuangan - Entitas Induk		<i>Appendix 1 : Statements of Financial Position - Parent Entity</i>
Lampiran 2 : Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain - Entitas Induk		<i>Appendix 2 : Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income - Parent Entity</i>
Lampiran 3 : Laporan Perubahan Ekuitas - Entitas Induk		<i>Appendix 3 : Statements of Changes in Equity - Parent Entity</i>
Lampiran 4 : Laporan Arus Kas - Entitas Induk		<i>Appendix 4 : Statements of Cash Flows - Parent Entity</i>



PT. PP PRESISI

Plaza PP - Wisma Robinson Lt. 3

Jl. TB. Simatupang No. 57

Pasar Rebo - Jakarta Timur.

Workshop :

Jl. Raya Narogong Km. 15 Pangkalan 6

Ciketing - Bekasi Timur, 17153

Telepon : (021) 824 83255/240, Fax : (021) 823 0353

Website : www.pp-presisi.co.id

Email : headoffice@pp-presisi.co.id

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
DAN INFORMASI TAMBAHAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AND SUPPLEMENTARY INFORMATION
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY**

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

For and on behalf of Board of Director, We, the undersigned:

- | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------------------|---|----|--------------------|
| 1. Nama | : | Ir. Iswanto Amperawan | : | 1. | Name |
| Alamat Kantor | : | Gedung Plaza PP | : | | Office Address |
| | | Jl. TB Simatupang No. 57 DKI Jakarta | : | | |
| Alamat Domisili Sesuai | : | Griya Taman Asri B-130 Kel. Donoharjo | : | | Domicile as Stated |
| Kartu Identitas | : | Kec. Ngaglik – Sleman | : | | in ID Card |
| Nomor Telepon | : | (021)-8414119 | : | | Phone Number |
| Jabatan | : | Direktur Utama / President Director | : | | Position |
| | | | | | |
| 2. Nama | : | Benny Pidakso, SE, MM | : | 2. | Name |
| Alamat Kantor | : | Gedung Plaza PP | : | | Office Address |
| | | Jl. TB Simatupang No. 57 DKI Jakarta | : | | |
| Alamat Domisili Sesuai | : | Jl. Koperasi No. 32 A Kel. Banjarejo | : | | Domicile as Stated |
| Kartu Identitas | : | Kec. Taman Kota Madiun | : | | in ID Card |
| Nomor Telepon | : | (021)-82483255 | : | | Phone Number |
| Jabatan | : | Direktur Keuangan / Finance Director | : | | Position |

Menyatakan bahwa :

State that :

- | | |
|---|--|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan; | 1. <i>We are responsible for the preparation and presentation of the Company's consolidated financial statements;</i> |
| 2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. <i>The Company's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i> |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. a. <i>All information contained in the Company's consolidated financial statements is complete and correct;</i> |
| b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan | b. <i>The Company's consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts and do not omit material information or facts; and</i> |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan entitas anak. | 4. <i>We are responsible for the Company and it's subsidiary's internal control system.</i> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

The Statement letter is made truthfully.

Jakarta, 12 Februari 2019 / Jakarta, February 12, 2019

Ir. Iswanto Amperawan
Direktur Utama/
President Director



Benny Pidakso, SE, MM
Direktur Keuangan/
Finance Director

No. 00021/2.1000/AU.1/03/0912-3/1/III/2019

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk dan entitas anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

No. 00021/2.1000/AU.1/03/0912-3/1/III/2019

Independent Auditors' Report

The Stockholders, Board of Commissioners and Directors

PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk and its subsidiary, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2018, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor's consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

Palma Tower, 18th Floor Lot F&G

Jl. RA Kartini II-S Kav. 06 TB Simatupang, Jakarta Selatan 12310

Phone : +6221-75930431, 75930432, 75930433 Fax : +6221-75930434

Email : info@hgkfirm.com Web : www.hgkfirm.com www.TIAGnet.com

NIUKAP : KEP-929/KM.1/2014 - S-30/MK.1/2015

No. 00021/2.1000/AU.1/03/0912-3/1/II/2019

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2018, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut diatas, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

No. 00021/2.1000/AU.1/03/0912-3/1/II/2019

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk and its subsidiary as of December 31, 2018, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other Matter

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk and its subsidiary as of December 31, 2018, and for the year then ended, was performed for the purpose of forming an opinion on the consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk (parent entity), which comprises the statement of financial position as of December 31, 2018, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, (collectively referred to as "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for purpose of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. This Parent Entity Financial Information is the responsibility of the management and was derived from and related directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. Such Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, such Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

HERTANTO, GRACE, KARUNAWAN



Bambang Karunawan, CPA
Izin Akuntan Publik No. AP.0912/
Public Accountant License No. AP.0912

12 Februari 2019/ February 12, 2019

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	5	630.943.315.426	1.132.459.133.995	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp32.243.823.639 pada 31 Desember 2018 dan Rp21.800.750.275 pada 31 Desember 2017	6			Trade accounts receivable - allowance for impairment losses of Rp32,243,823,639 at December 31, 2018 and Rp21,800,750,275 at December 31, 2017
Pihak berelasi		364.058.109.643	133.494.401.799	Related parties
Pihak ketiga		265.752.949.578	275.965.989.716	Third parties
Piutang retensi	7			Retention receivables
Pihak berelasi		116.845.728.431	19.335.017.660	Related parties
Pihak ketiga		53.506.050.888	13.396.481.139	Third parties
Tagihan bruto pemberi kerja	8			Gross receivables from project owners
Pihak berelasi		661.061.660.531	578.486.778.036	Related parties
Pihak ketiga		473.990.049.807	119.724.731.637	Third parties
Piutang lain-lain	9			Other receivables
Pihak berelasi		50.000.000	60.366.796	Related parties
Pihak ketiga		32.636.078.080	52.124.508.661	Third parties
Persediaan	10	79.172.142.400	58.514.079.891	Inventories
Uang muka	11	88.971.214.313	94.857.048.094	Advances
Pajak dibayar dimuka	12a	301.151.862.245	157.154.600.278	Prepaid taxes
Biaya dibayar dimuka	13	50.690.201.258	25.556.247.428	Prepaid expenses
Jumlah Aset Lancar		3.118.829.362.600	2.661.129.385.130	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.120.999.887.597 pada 31 Desember 2018 dan Rp845.734.200.455 pada 31 Desember 2017	14	2.886.918.307.456	2.206.321.174.798	Property and equipment - net of accumulated depreciation of Rp1,120,999,887,597 at December 31, 2018 and Rp845,734,200,455 at December 31, 2017
Goodwill	15	246.863.514.371	246.863.514.371	Goodwill
Aset tidak berwujud	16	3.385.009.200	11.273.230.535	Intangible assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		3.137.166.831.027	2.464.457.919.704	Total Non Current Assets
JUMLAH ASET		6.255.996.193.627	5.125.587.304.834	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of the consolidated financial statements

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	17			Trade accounts payables
Pihak ketiga		1.138.875.000.144	950.327.825.857	Third parties
Uang muka pemberi kerja	18			Advances from project owners
Pihak berelasi		8.792.057.502	34.434.880.452	Related parties
Pihak ketiga		30.516.575.148	83.147.253.205	Third parties
Utang lain - lain	19			Other short term liabilities
Pihak berelasi		106.034.385.162	6.043.378.223	Related parties
Pihak ketiga		10.304.884.432	10.014.069.374	Third parties
Utang pajak	12b			Taxes payable
Utang bank jangka pendek	20			Bank loans
		196.592.648.612	200.000.000.000	
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun				Current maturity of long-term liabilities
Utang bank	23			Bank loans
Sewa pembiayaan	21	164.772.442.213	50.007.083.747	Finance lease liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		1.740.789.211.959	1.408.225.004.242	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas imbalan kerja	22	9.415.744.699	7.324.002.515	Employee benefits obligation
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				Long-term liabilities - net of current maturity
Utang bank	23	1.359.675.968.534	995.964.245.624	Bank loans
Sewa pembiayaan	21	309.359.380.107	273.926.842.700	Finance lease liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		1.678.451.093.340	1.277.215.090.839	Total Non-current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		3.419.240.305.299	2.685.440.095.081	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp.100 per saham				Capital stock - Rp.100 per share
Modal dasar - 24.000.000.000 saham				Authorized capital - 24,000,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor - 10.224.271.000 saham	24	1.022.427.100.000	1.022.427.100.000	Subscribed and paid-up - 10,224,271,000 shares
Tambahan modal disetor	25	749.560.161.538	749.560.161.538	Additional paid-in capital
Penghasilan komprehensif lain		21.972.445.128	2.604.126.287	Other comprehensive income
Sado Laba:				Retained Earnings:
Ditentukan penggunaannya		17.686.041.287	-	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		470.701.722.763	218.400.998.025	Unappropriated
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		2.282.347.470.716	1.992.992.385.850	Equity attributable to owners of the Company
Kepentingan nonpengendali		554.408.417.612	447.154.823.903	Non-controlling interests
Jumlah Ekuitas		2.836.755.888.328	2.440.147.209.753	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		6.255.996.193.627	5.125.587.304.834	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of the consolidated financial statements

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
 LAIN KONSOLIDASIAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
 AND ITS SUBSIDIARY
 CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
 OTHER COMPREHENSIVE INCOME
 FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2018 AND 2017
 (Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2018	2017	
PENDAPATAN BERSIH	26	3.051.576.001.069	1.816.312.696.974	NET REVENUE
HARGA POKOK PENDAPATAN	27	(2.308.259.703.120)	(1.370.417.993.512)	COST OF REVENUE
LABA KOTOR		743.316.297.949	445.894.703.462	GROSS PROFIT
Beban usaha	28	(83.031.349.635)	(57.029.632.669)	Operating expenses
Beban penurunan nilai piutang		(10.443.073.364)	(4.666.854.628)	Provision for impairment losses on receivable
Pendapatan lain-lain	29	73.008.891.011	15.305.469.968	Other income
Beban lain-lain	29	(201.699.372.385)	(98.163.674.070)	Other expense
Beban pajak final	12c	(74.510.462.755)	(43.900.823.398)	Final tax expense
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		446.640.930.821	257.439.188.665	PROFIT BEFORE INCOME TAX
(BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX (EXPENSE)
Pajak kini	12c	(14.342.772.836)	(12.888.722.269)	Current tax
Jumlah (Beban) Pajak Penghasilan		(14.342.772.836)	(12.888.722.269)	Total Income Tax (Expenses)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		432.298.157.985	244.550.466.396	NET PROFIT CURRENT YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba (rugi)				Item that will not be reclassified subsequently to profit or loss
Selisih lebih nilai revaluasi aset tetap		36.444.761.246	3.117.386.346	Surplus of fixed assets revaluation
Pengukuran kembali atas program imbalan kerja		327.172.108	(500.303.790)	Remeasurement of employee benefit obligation
		36.771.933.354	2.617.082.556	
Pos yang akan direklasifikasi ke laba (rugi)		-	-	Item that will be reclassified subsequently to profit or loss
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		469.070.091.339	247.167.548.952	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
Jumlah Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:				Total Profit For The Year Attributable to
Pemilik entitas induk		326.424.741.945	188.300.612.373	Owners of the Company
Kepentingan non-pengendali		105.873.416.040	56.249.854.023	Non-controlling interest
		432.298.157.985	244.550.466.396	
Jumlah Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada:				Total Comprehensive income For The Year Attributable to
Pemilik entitas induk		345.793.060.786	190.605.335.908	Owners of the Company
Kepentingan non-pengendali		123.277.030.553	56.562.213.044	Non-controlling interest
		469.070.091.339	247.167.548.952	
LABA PER SAHAM DASAR		32	41	BASIC EARNINGS PER SHARE

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of the consolidated financial statements

	Distribusikan kepada pemilik entitas induk/ <i>Attributable to owners of the parent entity</i>									
	Penghasilan komprehensif lain/ <i>Other Comprehensive income</i>				Saldo laba/ <i>Retained earning</i>					
	Modal ditempatkan dan disetor/ <i>Issued and paid-up</i>	Tambahan Modal disetor/ <i>Paid-in Capital</i>	Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja/ <i>Remeasurement of Employee Benefit Liability</i>	Selisih lebih nilai revaluasi aset tetap/ <i>Surplus of fixed assets revaluation</i>	Ditentukan penggunaannya/ <i>Appropriated</i>	Belum ditentukan penggunaannya/ <i>Unappropriated</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	Kepentingan nonpengendali/ <i>Non-controlling interest</i>		Jumlah Ekuitas/ <i>Total Equity</i>
Saldo per 1 Januari 2017	110.760.000.000	-	(12.956.269)	-	-	101.198.588.785	211.945.632.516	-	211.945.632.516	Balance as of January 1, 2017
Dividen tahun 2016	-	-	-	-	-	(4.098.203.133)	(4.098.203.133)	-	(4.098.203.133)	<i>Dividend 2016</i>
Konversi modal disetor dari laba ditahan	67.000.000.000	-	-	-	-	(67.000.000.000)	-	-	-	<i>Conversion paid-in capital from retained earning</i>
Tambahan modal disetor	609.545.000.000	-	-	-	-	-	609.545.000.000	-	609.545.000.000	<i>Additional paid-in capital</i>
Penawaran umum perdana penerbitan saham	235.122.100.000	749.560.161.538	-	-	-	-	984.682.261.538	-	984.682.261.538	<i>Initial public offering Issuance of shares</i>
Bagian kepentingan non pengendali atas akuisisi entitas anak	-	-	-	-	-	-	-	390.592.610.859	390.592.610.859	<i>Non controlling interest from aquisition of subsidiary</i>
Laba komprehensif tahun berjalan	-	-	(500.303.790)	3.117.386.346	-	188.300.612.373	190.917.694.929	56.562.213.044	247.479.907.973	<i>Comprehensive income current year</i>
Saldo 31 Desember 2017	1.022.427.100.000	749.560.161.538	(513.260.059)	3.117.386.346	-	218.400.998.025	1.992.992.385.850	447.154.823.903	2.440.147.209.753	Balance as of December 31, 2017
Dividen tahun 2017	-	-	-	-	-	(56.437.975.920)	(56.437.975.920)	-	(56.437.975.920)	<i>Dividend 2017</i>
Pembagian dividen entitas anak	-	-	-	-	-	-	-	(16.023.436.844)	(16.023.436.844)	<i>Distribution of dividends of subsidiaries</i>
Cadangan	-	-	-	-	17.686.041.287	-	17.686.041.287	-	17.686.041.287	
Laba komprehensif tahun berjalan	-	-	334.286.624	19.034.032.217	-	308.738.700.658	328.107.019.499	123.277.030.553	451.384.050.052	<i>Comprehensive income current year</i>
Saldo 31 Desember 2018	1.022.427.100.000	749.560.161.538	(178.973.435)	22.151.418.563	17.686.041.287	470.701.722.763	2.282.347.470.716	554.408.417.612	2.836.755.888.328	Balance as of December 31, 2018

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of the consolidated financial statements

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
 AND ITS SUBSIDIARY
 CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
 FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018 AND 2017
 (Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2018	2017	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			Cash Flows From Operating Activities
Penerimaan kas dari pelanggan	2.187.547.075.184	1.333.575.594.687	Cash Receipts from Customers
Pembayaran kas kepada :			Payments to :
Pemasok dan subkontraktor	(1.497.297.927.213)	(651.920.688.497)	Supplier and Subcontractors
Karyawan dan Pihak Ketiga Lainnya	(73.502.774.936)	(95.815.252.355)	Employees and third party
Kas yang dihasilkan Operasi	616.746.373.035	585.839.653.835	Cash generated from operation
Pembayaran pajak-pajak	(167.199.792.196)	(147.336.996.485)	Taxes payment
Pembayaran bunga	(128.690.481.374)	(87.367.363.630)	Payments of interest expense
Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Operasi	320.856.099.465	351.135.293.720	Net Cash provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Akuisisi entitas anak	-	(798.000.000.000)	Acquisition of a subsidiary
Perolehan aset tetap	(956.696.244.272)	(872.072.498.477)	Acquisition of fixed assets
Penerimaan penjualan aset tetap	660.550.415	7.795.673.215	Proceed from sale of fixed asset
Penerimaan piutang lain lain	-	5.142.533.766	Receipts from other receivable
Pembelian software	(4.231.261.500)	-	Software purchase
Kas Bersih (digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(960.266.955.357)	(1.657.134.291.496)	Net Cash (used in) Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			Cash Flows From Financing Activities
Penerimaan setoran modal	-	600.000.000.000	Paid-up capital
Penerimaan Pinjaman dari Induk	105.291.644.425	-	Additional Liabilities from Parents
Setoran modal dari penawaran umum perdana saham	-	235.122.100.000	Addition of share capital from initial public offering
Agio saham dari penawaran umum perdana saham	-	775.902.930.000	Paid-in capital in excess of par value from initial public offering
Beban emisi saham	-	(26.342.768.461)	Share issuance costs
Pembayaran Dividen	(72.461.412.764)	-	Payment of Dividend
Penerimaan utang bank	363.711.722.910	800.440.816.114	Receipt of bank loans
Pembayaran utang bank	(58.407.351.388)	(203.509.037.351)	Payment of bank loans
Penerimaan utang non bank	-	98.830.023.511	Receipt of non bank loans
Pembayaran utang non bank	(200.239.565.859)	(68.988.885.602)	Payment of non bank loans
Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	137.895.037.324	2.211.455.178.211	Net Cash provided by Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(501.515.818.569)	905.456.180.435	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS YANG DIPEROLEH DARI AKUISISI ENTITAS ANAK	-	16.046.993.657	CASH AND CASH EQUIVALENT FROM ACQUISITION OF A SUBSIDIARY
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	1.132.459.133.995	210.955.959.903	CASH AND CASH EQUIVALENTS - BEGINNING
SALDO KAS DAN SETARA KAS - AKHIR	630.943.315.426	1.132.459.133.995	CASH AND CASH EQUIVALENTS ENDING

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of the consolidated financial statements

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk semula bernama PT Prima Jasa Aldodua merupakan Perusahaan yang didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris No. 2 dari Notaris Muhammad Chotib, S.H., tanggal 6 Mei 2004. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. C-16498 HT.01.01.TH.2004 tanggal 1 Juli 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 24 April 2012 tambahan No.20149.

Berdasarkan akta pernyataan Keputusan Diluar Rapat Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 54 tanggal 19 September 2014 oleh Notaris Ilmiawan Dekrit S., S.H., M.H. PT PP Alat Konstruksi (PP Alkon) berubah namanya menjadi PT PP Peralatan Konstruksi (PT PP Alat).

Berdasarkan akta No. 18 tanggal 5 Mei 2017 dari Notaris Andri Noverin Perdana, S.H., M.Kn., Notaris pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0011798.AH.01.02.TAHUN 2017 PT PP Peralatan Konstruksi (PT PP Alat) berubah namanya menjadi PT Pembangunan Perumahan Presisi (PT PP Presisi).

Anggaran Dasar telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir berdasarkan Keputusan Sirkular Pemegang Saham yang dituangkan dalam Akta No. 11 tanggal 17 Juli 2017 dari Notaris Ilmiawan Dekrit S, S.H., M.H., yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0014790.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 19 Juli 2017. Para pemegang saham antara lain menyetujui Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham dan menyetujui peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.

Sesuai dengan anggaran dasar, kegiatan usaha utama Perusahaan adalah bergerak dalam bidang industri konstruksi, *Engineering Procurement & Construction* ("EPC"), pekerjaan mekanikal-elektrikal, jasa transportasi/angkutan, jasa penyewaan, perdagangan, pertambangan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Perusahaan Terbatas.

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. GENERAL

a. The Company's Establishment

PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk was initially named PT Prima Jasa Aldodua a Company was established in Jakarta based on notarial deed No. 2 of Notary Muhammad Chotib, S.H., dated May 6, 2004. These amendments have been approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia with No. C-16498 HT.01.01.TH.2004 dated July 1, 2004 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 33 dated April 24, 2012, supplement No. 20149.

Based on the statement deed of Decision Outside General Meeting of Shareholders as a Substitution of an Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 54 dated September 19, 2014 by Notary Ilmiawan Dekrit S., S.H., M.H. PT PP Alat Konstruksi (PP Alkon) changed its name into PT PP Peralatan Konstruksi (PT PP Alat).

Based on notarial deed. No. 18 dated May 5, 2017 of Notary Andri Noverin Perdana, S.H., M.Kn., a notary substitute of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., which has obtained approval from the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, in his the Decision Letter No. AHU-0011798.AH.01.02.TAHUN 2017 PT PP Peralatan Konstruksi (PT PP Alat) changed its name to PT Pembangunan Perumahan Presisi (PT PP Presisi).

The Articles of Association has been amended for several times, most recently based on Circular Shareholder Decision as set forth in the Deed. No. 11 dated July 17, 2017 of Notary Ilmiawan Dekrit S, S.H., M.H., which has obtained approval from the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, in accordance with Decision Letter No. AHU-0014790.AH.01.02.TAHUN 2017 dated July 19, 2017. The shareholders approved, among other things, the Company to conduct the initial public offering of shares and approved the increase of Authorized Capital, Issued Capital and Paid-in Capital.

Based on the articles of association, the Company's principal business activities are engaged in the construction industry, Engineering Procurement & Construction ("EPC"), mechanical-electrical works, transportation / logistic services, rental services, trading, mining, by applying Limited Liability Company principles.

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN
 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
 TANGGAL TERSEBUT
 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
 AND ITS SUBSIDIARY
 NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
 STATEMENTS
 DECEMBER 31, 2018 AND 2017
 AND FOR THE YEARS THEN ENDED
 (Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

Kantor pusat PT Pembangunan Perumahan Presisi (PP Presisi) beralamat di Jalan Letjend TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo - Jakarta Timur.

The head office of PT Pembangunan Perumahan Presisi (PP Presisi) is located at Jalan Letjend TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo - East Jakarta.

Entitas induk langsung dan terakhir Perusahaan adalah PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, yang didirikan dan berdomisili di Indonesia.

The Company's immediate and the ultimate parent company is PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, incorporated and domiciled in Indonesia.

b. Penawaran Umum Saham Perusahaan

Saham Perusahaan ditawarkan perdana kepada masyarakat dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Nopember 2017 sejumlah 2.351.221.000 saham dengan nilai nominal Rp.100 per saham. Sesuai dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-442/D.04/2017 tanggal 16 Nopember 2017 seluruh saham ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan sejumlah 10.224.271.000 saham.

b. The Company Share's Public Offering

The Company's shares of stock were initially offered to the public and listed on the Indonesia Stock Exchange on November 20, 2017 totaling 2,351,221,000 shares with a nominal value of Rp.100 per share. In accordance with the approval of the Financial Services Authority (OJK) No. S-442 / D.04 / 2017 November 16, 2017, all issued and fully paid shares of the Company amounted to 10,224,271,000 shares.

c. Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PP Peralatan Konstruksi No. 07 tanggal 7 Februari 2017 oleh Notaris Ilmiawan Dekrit S., S.H., M.H., susunan Dewan Komisaris dan Direksi PP Presisi per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

c. Board of Commissioners and Directors

Circular Shareholder in lieu of the Extraordinary General Shareholders Meeting of PT PP Peralatan Konstruksi No. 07 dated February 7, 2017 by Notary Ilmiawan Dekrit S., S.H., M.H., the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PP Presisi as of December 31, 2018 and 2017 are as follows:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Muhammad Toha Fauzi
 Komisaris : Ir. Nawang Sri Retno Kartiko
 Komisaris : Ir. Ketut Darmawan

Board of Commissioner

President Commissioner
 Commissioner
 Commissioner

Dewan Direksi

Direktur Utama : Ir. Iswanto Amperawan
 Direktur Keuangan : Benny Pidakso, S.E
 Direktur Operasi : Ir. Hasanin Ade Putra
 Direktur Peralatan : Ir. Arief Subyandono

Board of Director

President Director
 Director of Finance
 Director of Operation
 Director of Equipment

d. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

d. Human Resource

Human Resources for the year ended December 31, 2018 and 2017 follows (unaudited):

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
Pegawai Bulanan Tetap	30	22	<i>Fixed Monthly Employee</i>
Pegawai Bulanan Khusus	7	9	<i>Monthly Special Employee</i>
Pegawai Bulanan Khusus Lokal	11	14	<i>Local Special Monthly Employee</i>
Perjanjian Kerja			<i>Uncertain Time</i>
Waktu Tidak Tertentu	83	46	<i>Working Agreement</i>
Perjanjian Waktu Tertentu	32	-	<i>Specific Time Agreement</i>
Pelatihan Manajemen	37	35	<i>Management Trainee</i>
	200	126	

Sumber Daya Manusia berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Human resource based on the level of education is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
Pasca Sarjana	10	4	<i>Post Graduate</i>
Sarjana	112	64	<i>Scholar</i>
Sarjana Muda	31	21	<i>Bachelor</i>
Non Akademi	47	37	<i>Non-Academic</i>
	200	126	

e. Entitas anak

Laporan keuangan konsolidasian meliputi akun-akun Perusahaan dan entitas anak yang signifikan sebagai berikut:

e. Subsidiary

The consolidated financial statements include the accounts of the Company and significant subsidiary, listed as follows:

Entitas anak/ Subsidiary	Kegiatan usaha/ Activity	Tempat kedudukan/ Domicile	Tahun memulai kegiatan komersil/ Commencement of commercial operations	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah aset/ Total assets	Jumlah pendapatan/ Total revenue
PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA)	Jasa konstruksi/ Construction services	Jakarta	1997	51%	1.808.065.843.234	1.300.892.545.172

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 7 tanggal 22 Juni 2017 dari Irfansah. S.H., M.K.n, Notaris di Karawang, Perusahaan telah mengakuisisi saham LMA sejumlah 331.500 lembar saham dari pihak ketiga, mewakili 51% kepemilikan saham dengan harga Rp.798.000.000.000.

Based on Deed of Sale and Purchase of Shares No. 7 dated June 22, 2017, of Irfansah. S.H., M.Kn., a Notary in Karawang, the Company acquired 331,500 shares of stock of LMA from a third party, representing 51% ownership interest at a purchase price of Rp.798,000,000,000.

(Lanjutan/Continued)

2. PERUBAHAN ATAS PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”)

a. Amandemen/ penyesuaian dan interpretasi standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Dalam tahun berjalan, Grup telah menerapkan, sejumlah amandemen dan interpretasi PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018.

Penerapan amandemen dan interpretasi PSAK berikut tidak menimbulkan dampak material terhadap pengungkapan atau jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan dan sebelumnya tetapi dapat mempengaruhi transaksi di masa depan.

- PSAK 2 (amandemen), Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan;
- PSAK 13 (amandemen), Properti Investasi tentang Pengalihan Properti Investasi
- PSAK 15 (penyesuaian), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 16 (amandemen), Aset Tetap - Agrikultur: Tanaman Produktif;
- PSAK 46 (amandemen), Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi;
- PSAK 67 (penyesuaian), Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain;

b. Standar dan amandemen standar telah diterbitkan tapi belum diterapkan

Interpretasi standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- ISAK 34 Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan
- PSAK 22 (penyesuaian), Kombinasi Bisnis
- PSAK 26 (penyesuaian), Biaya Pinjaman
- PSAK 46 (penyesuaian), Pajak Penghasilan
- PSAK 66 (penyesuaian), Pengaturan bersama
- Amandemen PSAK 24, Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program

2. CHANGES TO THE STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“PSAK”) AND INTERPRETATIONS OF STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“ISAK”)

a. Amendments/ improvements and Interpretations to standards effective in the current year

In the current year, the Group has applied a number of amendments and interpretations to PSAK that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on or after January 1, 2018.

The application of the following amendments and interpretation to PSAK have not resulted to material impact to disclosures or amounts recognized in the current and prior year consolidated financial statements but may affect future transactions.

- *PSAK 2 (amendment), Statement of Cash Flows about Disclosure Initiative;*
- *PSAK 13 (amendment), Transfers to Investment Property*
- *PSAK 15 (improvement), Investments in Associates and Joint Ventures;*
- *PSAK 16 (Amendment): Property, Plant and Equipment – Agriculture: Bearer Plants;*
- *PSAK 46 (amendment), Income Tax: Recognition on Deferred Tax Assets for Unrealized Losses;*
- *PSAK 67 (improvement), Disclosures of Interest in Other Entities;*

b. Standards and amendments to standards issued not yet adopted

Interpretations to standard effective for periods beginning on or after January 1, 2019, with early application permitted are:

- *ISAK 34: Uncertainty Over Income Tax Treatments*
- *PSAK 22 (improvement), Business Combination*
- *PSAK 26 (improvement), Borrowing Cost*
- *PSAK 46 (improvement), Income Tax*
- *PSAK 66 (improvement), Joint Arrangement*
- *PSAK 24 (amendment), Plan Amendment, Curtailment or Settlement*

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 15 (amandemen), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 62 (amandemen), Kontrak Asuransi Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi;
- PSAK 71, Instrumen Keuangan;
- PSAK 71 (amandemen), Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif;
- PSAK 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 73, Sewa.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, dampak dari standar dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

Standard and amendment to standard effective for periods beginning on or after January 1, 2020, with early application permitted are:

- PSAK 15 (amendment), Investments in Associates and Joint Ventures: Long Term Interest in Associate and Joint Ventures;
- PSAK 62 (amendment), Insurance Contract: Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contracts;
- PSAK 71, Financial Instruments;
- PSAK 71 (amendment), Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation;
- PSAK 72, Revenue from Contracts with Customers;
- PSAK 73, Leases

As of the issuance date of the consolidated financial statements, the effects of adopting these standards, amendments and interpretation on the consolidated financial statements is not known nor reasonably estimable by management.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi PSAK dan ISAK dan peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan OJK/Bapepam-LK No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah biaya historis, kecuali properti dan instrumen keuangan tertentu yang diukur pada jumlah revaluasi atau nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance

The consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which include the PSAK and ISAK and regulations in the Capital Market including Regulations of OJK/Bapepam-LK No. VIII.G.7 regarding guidelines for the presentation of financial statements, decree of Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 regarding presentation and disclosure of financial statements of the issuer or public company.

b. Basis of Preparation

The consolidated financial statements have been prepared on the historical cost basis except for certain properties and financial instruments that are measured at revalued amounts or fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

c. Dasar Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan (termasuk entitas terstruktur). Pengendalian tercapai jika Perusahaan memiliki kekuasaan atas *investee*; eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Perusahaan menilai kembali apakah entitas tersebut adalah *investee* jika fakta dan keadaan yang mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian yang disebutkan di atas.

Ketika Perusahaan memiliki hak suara kurang dari mayoritas di-*investee*, ia memiliki kekuasaan atas *investee* ketika hak suara investor cukup untuk memberinya kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak. Perusahaan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Perusahaan cukup untuk memberikan Perusahaan kekuasaan, termasuk (i) ukuran kepemilikan hak suara Perusahaan relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik hak suara lain; (ii) hak suara potensial yang dimiliki oleh Perusahaan, pemegang suara lain atau pihak lain; (iii) hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan (iv) setiap fakta dan keadaan tambahan apapun mengindikasikan bahwa Perusahaan memiliki, atau tidak memiliki, kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang relevan pada saat keputusan perlu dibuat, termasuk pola suara kepemilikan dalam RUPS sebelumnya.

Konsolidasi entitas anak dimulai ketika Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan akan dihentikan ketika Perusahaan kehilangan pengendalian pada entitas anak. Secara khusus, pendapatan dan beban entitas anak diakuisisi atau dijual selama

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

c. Basis of Consolidated

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities (including structured entities) controlled by the Company and its subsidiaries. Control is achieved where the Company has the power over the investee; is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and has the ability to use its power to affect its returns.

The Company reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control listed above.

When the Company has less than a majority of the voting rights of an investee, it has power over the investee when the voting rights are sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the investee unilaterally. The Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether or not the Company's voting rights in an investee are sufficient to give it power, including (i) the size of the Company's holding of voting rights relative to the size and dispersion of holding of the other vote holders; (ii) potential voting rights held by the Company, other vote holders or other parties; (iii) rights arising from other contractual arrangements; and (iv) any additional facts and circumstances that indicate that the Company has, or does not have, the current ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be made, including voting patterns at previous shareholders' meetings.

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Specifically, income and expense of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/*Continued*)

tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain dari tanggal diperolehnya pengendalian Perusahaan sampai tanggal ketika Perusahaan berhenti mengendalikan entitas anak.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan untuk kepentingan nonpengendali. Perusahaan juga mengatribusikan total laba komprehensif entitas anak kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan.

Seluruh aset dan liabilitas dalam intra Perusahaan, ekuitas, pendapatan, biaya dan arus kas yang berkaitan dengan transaksi dalam Perusahaan dieliminasi secara penuh pada saat konsolidasi.

Perubahan kepemilikan Perusahaan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian Perusahaan atas entitas anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jumlah tercatat dari kepemilikan Perusahaan dan kepentingan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepentingan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan dengan pemilik entitas induk.

Ketika Perusahaan kehilangan pengendalian pada entitas anak, keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi dan dihitung sebagai perbedaan antara (i) agregat nilai wajar pembayaran yang diterima dan nilai wajar sisa kepemilikan (retained interest) dan (ii) jumlah tercatat sebelumnya dari aset (termasuk goodwill), dan liabilitas dari entitas anak dan setiap kepentingan nonpengendali. Seluruh jumlah yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas anak yang dicatat seolah-olah Perusahaan telah melepaskan secara langsung aset atau liabilitas terkait entitas anak (yaitu

statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Company gains control until the date when the Company ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the noncontrolling interest. Total comprehensive income of subsidiaries is attributed to the owners of the Company and the noncontrolling interest even if this results in the non-controlling interest having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies in line with the accounting policies.

When necessary, adjustment are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies in line with the Company's accounting policies.

All intra Company assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Company are eliminated in full on consolidation.

Changes in the Company ownership interest in existing subsidiaries that do not result in the Company losing control over the subsidiaries are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Company's interest and the non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interest are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the Company.

When the Company losses control of a subsidiary, a gain or loss is recognized in profit or loss and is calculated as the difference between (i) the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest and (ii) the previous carrying amount of the assets (including goodwill), and liabilities of the subsidiary and any non-controlling interest. All amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that subsidiary are accounted for as if the Company had directly disposed of the related assets or liabilities of the subsidiary (i.e. reclassified to profit or loss or transferred to

(Lanjutan/Continued)

direklasifikasi ke laba rugi atau ditransfer ke kategori lain dari ekuitas sebagaimana ditentukan / diizinkan oleh standar akuntansi yang berlaku). Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal untuk akuntansi berikutnya dalam PSAK 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran atau, ketika berlaku, biaya perolehan pada saat pengakuan awal dari investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

d. Kombinasi Bisnis

Akuisisi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Perusahaan, liabilitas yang diakui oleh Perusahaan kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

Goodwill diukur sebagai selisih lebih dari nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada) atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih pada tanggal akuisisi. Jika, setelah penilaian kembali, jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih pada tanggal akuisisi melebihi jumlah imbalan yang dialihkan, jumlah dari setiap kepentingan non pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada), selisih lebih diakui segera dalam laba rugi sebagai pembelian dengan diskon.

Kepentingan non pengendali yang menyajikan bagian kepemilikan dan memberikan mereka hak atas bagian proposional dari aset neto entitas dalam hal terjadi likuidasi pada awalnya

another category of equity as specified/permitted by applicable accounting standards). The fair value of any investment retained in the former subsidiary at the date when control is lost is regarded as the fair value on initial recognition for subsequent accounting under PSAK 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement or, when applicable, the cost on initial recognition of an investment in an associate or a joint venture.

d. Business Combination

Acquisitions of businesses are accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Company, liabilities incurred by the Company to the former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Company in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized in profit or loss as incurred.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.

Goodwill is measured as the excess of the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree, and the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree (if any) over the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed. If, after the reassessment, the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and liabilities assumed exceeds the sum of the consideration transferred, the amount of any non controlling interests in the acquiree and the fair value of the acquirer's previously held interest in the acquiree (if any), the excess is recognized immediately in profit or loss as a bargain purchase option.

Non controlling interests that are present ownership interests and entitles their holders to a proportionate share of the entity's net assets in the event of liquidation may be initially

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/*Continued*)

diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional kepemilikan kepentingan nonpengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pilihan dasar pengukuran dilakukan atas dasar transaksi. Kepentingan nonpengendali jenis lain diukur pada nilai wajar atau, jika berlaku, pada dasar pengukuran lain yang ditentukan oleh standar akuntansi lain.

Bila imbalan yang dialihkan oleh Perusahaan dalam suatu kombinasi bisnis termasuk aset atau liabilitas yang berasal dari pengaturan imbalan kontinjen (*contingent consideration arrangement*), imbalan kontinjen tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis.

Perubahan dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap goodwill. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang berasal dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (yang tidak melebihi satu tahun sejak tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan kondisi yang ada pada tanggal akuisisi.

Akuntansi berikutnya untuk perubahan nilai wajar dari imbalan kontinjensi yang tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran tergantung pada bagaimana imbalan kontinjensi diklasifikasikan. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada setiap tanggal pelaporan dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas diukur kembali pada nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan, dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Perusahaan atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugian dihasilkan, jika ada, diakui dalam laba rugi. Jumlah yang berasal dari kepemilikan sebelum tanggal akuisisi yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi dimana perlakuan tersebut akan sesuai jika kepemilikan tersebut dilepas/dijual.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Perusahaan melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses

measured either at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. The choice of measurement basis is made on a transaction-by-transaction basis. Other types of non-controlling interests are measured at fair value or, when applicable, on the basis specified in another accounting standard.

When the consideration transferred by the Company in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration arrangement, the contingent consideration is measured at its acquisition-date fair value and included as part of the consideration transferred in a business combination.

Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

The subsequent accounting for changes in the fair value of the contingent consideration that do not qualify as measurement period adjustments depends on how the contingent consideration is classified. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured at subsequent reporting dates and its subsequent settlement is accounted for within equity. Contingent consideration that is classified as an asset or liability is remeasured subsequent to reporting dates at fair value, with changes in fair value recognised in profit or loss.

When a business combination is achieved in stages, the Company's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. Amounts arising from interests in the acquiree prior to the acquisition date that have previously been recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where such treatment would be appropriate if that interests were disposed of.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Company reports provisional

(Lanjutan/*Continued*)

akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan dimana aset dan liabilitas yang diperoleh dari kombinasi bisnis dicatat oleh pengakuisisi pada jumlah tercatatnya.

Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat disajikan sebagai tambahan modal disetor dan tidak diakui ke laba rugi.

Metode penyatuan kepemilikan diterapkan seolah-olah entitas telah bergabung sejak periode dimana entitas yang bergabung berada dalam sepengendali.

e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup (entitas pelapor):

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura

amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognized as of that date.

Business combination of entities under common control that qualifies as a business are accounted for under pooling of interest method where assets and liabilities acquired in the business combination are recorded by the acquirer at their book values.

The difference between the transfer price and the book value is presented as Additional Paid in Capital and is not recycled to profit or loss.

The pooling of interest method is applied as if the entities had been combined from the period when the merging entities were placed under common control

e. Transaction with Related parties

Related party is a person or entity that is related to the Group (reporting entity):

- a. *A person or a close member have a related to a reporting entity if that person:*
 - i. *Have joint control or control over the reporting entity;*
 - ii. *Have significant influence over the reporting entity;*
 - iii. *Is the key management personnel of the reporting entity or the parent of the reporting entity.*
- b. *An entity is related to the reporting entity if it meets one of the following:*
 - i. *The entity and the reporting entity are members of the same group (it means each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).*
 - ii. *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a group member which the other entity is the member).*
 - iii. *Both entities are joint ventures of the*

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

- bersama dari pihak ketiga yang sama.
- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian. (Khususnya disyaratkan untuk entitas Tbk).

f. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai berikut:

- Aset keuangan tersedia untuk dijual
- Pinjaman yang diberikan dan piutang

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau biaya selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan atau pembayaran kas masa depan

- same third party.
- iv. One entities is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is an entity that sponsored the program, so the sponsoring entity are also related to the reporting entity.
 - vi. Controlled entity or jointly controlled by a person identified in (a).
 - vii. A person identified in (a) (i) has a significant influence over the entity or key management member of an entity (or parent of the entity).

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements. (Specifically required for listed entities)

f. Financial Assets

All financial assets are recognized and derecognized on trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the timeframe established by the market concerned, and are initially measured at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as at fair value through profit or loss, which are initially measured at fair value.

The Company's financial assets are classified as follows:

- Available-for-sale (AFS) financial assets
- Loans and receivable

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and of allocating interest income or expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts or payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

(mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen utang selain dari aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai FVTPL.

Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS)

AFS aset keuangan adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan baik sebagai AFS atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) dimiliki hingga jatuh tempo atau (c) aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi.

Obligasi dan saham milik Perusahaan yang tercatat di bursa dan diperdagangkan pada pasar aktif diklasifikasikan sebagai AFS dan dinyatakan pada nilai wajar.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan di ekuitas sebagai akumulasi revaluasi investasi AFS kecuali untuk kerugian penurunan nilai, bunga yang dihitung dengan metode suku bunga efektif dan laba rugi selisih kurs atas aset moneter yang diakui pada laba rugi. Jika investasi dilepas atau mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakumulasi pada revaluasi investasi AFS direklas ke laba rugi.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak tercatat di bursa yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diklasifikasikan sebagai AFS, diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

Dividen atas instrumen ekuitas AFS, jika ada, diakui pada laba rugi pada saat hak Perusahaan untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Kas dan setara kas, kecuali kas, piutang pelanggan dan piutang lain-lain dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan

rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Income is recognized on an effective interest basis for debt instruments other than those financial assets classified as FVTPL.

Available-for-sale (AFS)

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are either designated as AFS or are not classified as (a) loans and receivables, (b) held-to-maturity investments or (c) financial assets at fair value through profit or loss.

Listed shares and bonds held by the Company that are traded in an active market are classified as AFS and are stated at fair value.

Gains and losses arising from changes in fair value are recognized in other comprehensive income and in equity as accumulated in AFS Investment Revaluation, with the exception of impairment losses, interest calculated using the effective interest method, and foreign exchange gains and losses on monetary assets, which are recognized in profit or loss. Where the investment is disposed of or is determined to be impaired, the cumulative gain or loss previously accumulated in AFS Investment Revaluation is reclassified to profit or loss.

Investments in unlisted equity instruments that are not quoted in an active market and whose fair value cannot be reliably measured are also classified as AFS, measured at cost less impairment.

Dividends on AFS equity instruments, if any, are recognized in profit or loss when the Company's right to receive the dividends are established.

Loans and receivables

Cash and cash equivalents, except cash on hand, receivable from customers and other receivables that have fixed or determinable

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/*Continued*)

tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang lancar dimana pengakuan bunga tidak material.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen utang selain dari instrumen keuangan FVTPL.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dinilai terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang dalam nilai wajar dari instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti obyektif terjadinya penurunan nilai.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak meminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak meminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang tidak akan dievaluasi secara individual akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

payments that are not quoted in an active market are classified as "loans and receivables". Loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method less impairment.

Interest is recognized by applying the effective interest method, except for short-term receivables when the recognition of interest would be immaterial.

Income is recognized on an effective interest basis for debt instruments other than those financial instruments at FVTPL.

Impairment of financial assets

Financial assets, other than those at FVTPL, are assessed for indicators of impairment at each reporting date. Financial assets are impaired when there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the investment have been affected.

For listed and unlisted equity investments classified as AFS, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered to be objective evidence of impairment.

For all other financial assets, objective evidence of impairment could include:

- *significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or*
- *default or delinquency in interest or principal payments; or*
- *it becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organisation.*

For certain categories of financial asset, such as receivables, assets that are assessed not to be impaired individually are, in addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Company's past experiences of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/*Continued*)

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

For financial assets carried at amortized cost, the amount of the impairment is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan, jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat imbal hasil yang berlaku di pasar untuk aset keuangan yang serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

For financial asset carried at cost, the amount of the impairment loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of the estimated future cash flows discounted at the current market rate of return for a similar financial asset. Such impairment loss will not be reversed in subsequent periods.

Jumlah tercatat aset keuangan dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas seluruh aset keuangan, kecuali piutang yang jumlah tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan jumlah tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in profit or loss.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi.

When an AFS financial asset is considered to be impaired, cumulative gains or losses previously recognized in equity are reclassified to profit or loss.

Kecuali instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya dibalik melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai, sepanjang nilainya tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

With the exception of AFS equity instruments, if, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed through profit or loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date the impairment is reversed does not exceed what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dibalik melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke penghasilan komprehensif lain.

In respect of AFS equity investments, impairment losses previously recognized in profit or loss are not reversed through profit or loss. Any increase in fair value subsequent to an impairment loss is recognized directly in other comprehensive income.

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/*Continued*)

Penghentian pengakuan aset keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

Penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Perusahaan masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Perusahaan mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan, dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

Derecognition of financial assets

The Company derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Company recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Company retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralised borrowing for the proceeds received.

On derecognition of financial asset in its entirety, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss.

On derecognition of financial asset other than its entirety (e.g., when the Company retains an option to repurchase part of a transferred asset), the Company allocates the previous carrying amount of the financial asset between the part it continues to recognize under continuing involvement, and the part it no longer recognizes on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.

(Lanjutan/Continued)

g. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajarnya. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, yang sesuai, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Instrumen utang dan ekuitas yang diterbitkan oleh Konsolidasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Pembelian kembali instrumen ekuitas Perusahaan (saham treasury) diakui dan dikurangkan secara langsung dari ekuitas. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan atau pembatalan instrumen ekuitas Perusahaan tersebut tidak diakui dalam laba rugi.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL atau pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan meliputi utang usaha dan lainnya, obligasi dan wesel bayar, bank dan pinjaman lainnya, pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

g. Financial Liabilities and Equity Instruments

Financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial liabilities (other than financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value of the financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

Classification as debt or equity

Debt and equity instruments issued by the Consolidation are classified as either financial liabilities or as equity in accordance with the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Company are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Repurchase of the Company's own equity instruments (treasury shares) is recognized and deducted directly in equity. No gain or loss is recognized in profit or loss on the purchase, sale, issue or cancellation of the Company's own equity instruments.

Financial liabilities

Financial liabilities are classified as either "at FVTPL" or "at amortized cost".

Financial liabilities, which include trade and other payables, bonds and notes payable, bank and other borrowings, are initially measured at fair value, net of transaction costs, and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

(Lanjutan/Continued)

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

h. Saling hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika Konsolidasi tersebut memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus dapat ada pada saat ini dari pada bersifat kontingen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan.

i. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial liability, or (where appropriate) a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Derecognition of financial liabilities

The Company derecognizes financial liabilities when, and only when, the Company's obligations are discharged, cancelled or they expire. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

h. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of financial position when the consolidation has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously. A right to set-off must be available today rather than being contingent on a future event and must be exercisable by any of the counterparties, both in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy.

i. Cash and Cash Equivalent

For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

(Lanjutan/Continued)

j. Piutang dan Penurunan Nilai Wajar Piutang

Piutang usaha pada Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak menjadi subjek untuk penurunan nilai secara individual karena pelaksanaan proyek pemerintah telah dianggarkan dalam APBN/APBD atau RKAP yang telah disetujui Pemegang Saham. Dilakukan penurunan nilai jika piutang usaha sudah berumur di atas 1 (satu) tahun dengan penurunan nilai piutang usaha secara individu sebagai berikut:

Umur Piutang/ Aging of Receivable	Penurunan Nilai Wajar Piutang/ Impairment of Receivables	Akumulasi Penurunan Nilai Wajar Piutang/ Accumulated Impairment of Receivables
> 12 s/d 15 bulan/month	5%	5%
> 15 s/d 18 bulan/month	5%	10%
> 18 s/d 21 bulan/month	10%	20%
> 21 s/d 24 bulan/month	10%	30%
> 24 s/d 27 bulan/month	10%	40%
> 28 s/d 30 bulan/month	20%	60%
> 30 s/d 33 bulan/month	20%	80%
> 33 s/d 36 bulan/month	20%	100%

Jika piutang usaha pada Pemerintah, BUMN dan BUMD telah berumur lebih dari 1 (satu) tahun dan setelah dilakukan analisa resiko terdapat keyakinan sulit untuk dilunasi atau tidak dapat tertagih maka dilakukan penurunan nilai secara individual dengan menggunakan DCF dan berdasarkan impairment di atas, mana yang lebih besar.

Penurunan nilai piutang usaha selain piutang diatas dihitung masing-masing individu yaitu setelah jatuh tempo pada tahun pertama menggunakan Discounted Cash Flow (DCF) dengan tingkat bunga sesuai dengan suku bunga Bank Indonesia (SBI). Tahun ke-2 dan selanjutnya berdasarkan DCF dan tingkat penurunan sesuai dengan tabel di atas, mana yang lebih besar.

k. Piutang Retensi

Piutang retensi merupakan piutang Perusahaan kepada pemberi kerja yang akan dilunasi oleh pemberi kerja setelah pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak. Piutang retensi diukur pada nilai wajar piutang berdasarkan penerimaan arus kas yang diharapkan.

j. Account Receivable and Impairment

Receivables from the Government, State Owned Enterprises (SOE) and Local Government Owned Enterprises (LGOE) are not subject for impairment individually, since government projects are funded through the central or local government budget, or the relevant enterprises budget as approved by their shareholders. Impairment is performed individually to trade accounts receivables with age of more than one year as follows:

When receivables from the Government, SOE and LGOE are outstanding for more than one year, and after risk analysis it is believed that their collectability are remote, adjustment is made individually, using DCF and impairment percentage referred to above, whichever is higher.

Impairment other than receivables above is estimated on the basis of individual receivable after the first year of its due date using Discounted Cash Flow (DCF) at the Bank Indonesia interest rate. At the second year and thereafter the basis used is DCF or the impairment rate as shown in the above table, whichever is higher.

k. Retention Receivables

Retention receivables are receivables from customers collectable after the fulfillment of the conditions as set in the contract, or until defect shave been rectified. The retentions are measured at the fair value of the consideration receivable based on the expected timing of cash inflows.

(Lanjutan/Continued)

I. Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja

Piutang yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan untuk pemberi kerja, namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan dicatat sebagai tagihan bruto kepada pemberi kerja. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi, ditambah laba yang diakui, dikurangi jumlah kerugian yang diakui dan termin.

Tagihan bruto kepada pemberi kerja diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode presentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara progress fisik pekerjaan (laporan prestasi proyek) yang belum diterbitkan faktur karena perbedaan antara tanggal berita acara prestasi fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal laporan posisi keuangan.

m. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi bersih merupakan estimasi harga jual dari persediaan dikurangi seluruh biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk penjualan.

Persediaan Bahan untuk Konstruksi

Bahan yang dibeli dicatat sebagai persediaan bahan untuk konstruksi, setiap pengambilan bahan (Bon Pemakaian Bahan) dicatat sebagai biaya bahan pada periode yang bersangkutan dengan menggunakan metode harga rata-rata bergerak. Setiap akhir periode dilakukan *stock opname* persediaan dan diadakan penyesuaian bila terjadi selisih antara nilai buku dan fisik.

n. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka terdiri dari biaya pemasaran, biaya tidak langsung, biaya sewa, biaya provisi dan biaya asuransi. Untuk biaya pemasaran dan biaya tidak langsung akan dibebankan secara proporsional dengan pendapatan yang diakui selama periode pelaksanaan proyek. Biaya sewa, provisi dan premi asuransi diamortiasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

I. Gross Invoice to Project Owners

Receivables that arise from construction contract work performed for the employer, but the work is still in execution recorded as gross invoice to the employer. Gross invoice are presented at the difference between the cost incurred, plus the recognized profits, less the amount of recognized losses and terminations.

Gross invoice to the employer are recognized as income in accordance with the method of completion percentage stated in the progress report of the physical job (project achievement report) that the invoice has not been issued due to the difference between the date of the physical accomplishment report and the billing submission at the date of the statement of financial position.

m. Inventories

Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost is determined using the weighted average method. Net realizable value represents the estimated selling price for inventories less all estimated costs of completion and costs necessary to make the sale.

Material Inventory for Construction

Purchased materials are recorded as inventory of materials for construction, each withdrawal (Note of Material used) recorded as material cost in the period concerned using the moving average price method. Every end of the period stock inventory is performed and adjustments are made when there is a difference between book and physical value.

n. Prepaid Expense

Prepaid expenses consist of marketing costs, indirect costs, rental fees, provision fees and insurance fees. For marketing costs and indirect costs will be charged proportionally with income recognized during the project implementation period. Rental fees, provision and insurance premiums are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

(Lanjutan/*Continued*)

o. Investasi Jangka Pendek

Deposito berjangka yang jatuh tempo 3 (tiga) bulan namun dijaminkan dan deposito yang jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan disajikan sebagai investasi jangka pendek dan dinyatakan sebagai nilai perolehan.

Portofolio reksadana diklasifikasikan sebagai investasi jangka pendek-sekuritas yang diperjualbelikan berdasarkan PSAK No.50-Instrumen Keuangan, Penyajian, Laba atau Rugi yang sudah terealisasi atau belum terealisasi (sesuai perubahan NAB) diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

p. Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan

Kepemilikan Langsung

Aset tetap diakui sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali tanah yang tidak disusutkan.

Setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah.

Efektif tanggal 1 Januari 2016, Perusahaan mengubah kebijakan akuntansi aset tetap tanah dan bangunan yaitu dari sebelumnya metode cost menjadi metode revaluasian.

Semua aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*), dengan tarif sebagai berikut:

	<u>Tahun/ Years</u>	
Bangunan	20	<i>Building</i>
Alat ringan	3	<i>Light weight equipment</i>
<i>Scaffolding</i>	5	<i>Scaffolding</i>
Keet & standard	3	<i>Keet & Standard</i>
Peralatan Kantor	3	<i>Office equipment</i>
Kendaraan	5	<i>Vehicle</i>
<i>Bekisting</i>	8	<i>Bekisting</i>
Peralatan Berat	8	<i>Heavy equipment</i>
<i>PCH Formwork</i>	8	<i>PCH formwork</i>

Biaya-biaya setelah perolehan awal termasuk di dalam jumlah tercatat aset dan diakui secara terpisah, jika memungkinkan, hanya jika terdapat kemungkinan bahwa biaya yang dikapitalisasi tersebut akan memberikan manfaat ekonomis bagi Perusahaan dan dapat

o. Short Term Investment

Time deposits with maturities of 3 (three) months but pledged and deposits with maturities of more than 3 (three) months are presented as short-term investments and stated as acquisition value.

Mutual fund portfolios are classified as short-term investments- securities traded under PSAK No. 50-Financial Instruments, Presentations, Realized or Unrealized Profit or Loss (in compliance with NAB) are recognized in the income statement of the current year.

p. Property and Equipment and Accumulated Depreciation

Direct Ownership

Property and equipments are recognized at cost less accumulated depreciation, except for land that is not depreciated.

Any portion of property and equipments that have significant cost to the total cost of all assets should be depreciated separately.

Effective January 1, 2016, The Company concerns the accounting policy of property and equipments land and buildings that is the cost method to be a revaluation method.

All property and equipments are depreciated using the straight line method, at the following rates:

The costs after initial acquisition are included in the carrying amount of the asset and recognized separately, if possible, only when there is a possibility that the capitalized costs will provide an economic benefit to the Company and can be measured reliably. The carrying amount of

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

diukur secara andal. Jumlah tercatat dari komponen yang diganti tidak diakui. Seluruh biaya pemeliharaan dan perbaikan lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Apabila aset tetap ditarik dari penggunaannya atau dijual, maka nilai tercatat akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan dan kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali. Nilai tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan dari nilai mana yang lebih tinggi antara harga jual bersih atau nilai pakai.

Biaya konstruksi bangunan dan prasarana serta pemasangan mesin dan peralatan diakumulasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya-biaya tersebut dikapitalisasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan secara substansial telah selesai. Penyusutan mulai dibebankan pada saat aset tersebut digunakan.

Biaya bunga dan biaya pinjaman lain seperti diskonto, baik yang secara langsung ataupun tidak langsung, digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tertentu, dikapitalisasi sampai dengan proses pembangunan secara substansial telah selesai.

Untuk pinjaman yang langsung dapat diatribusikan dengan suatu aset tertentu, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi pendapatan yang diperoleh dari investasi sementara yang berasal dari pinjaman tersebut.

Untuk pinjaman yang tidak langsung dapat diatribusikan dengan suatu aset tertentu, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap pengeluaran yang terjadi untuk aset tersebut. Tingkat kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang dari biaya pinjaman terhadap jumlah pinjaman dalam periode tertentu, tidak termasuk jumlah pinjaman-pinjaman yang secara khusus digunakan untuk mendanai proses konstruksi suatu aset tertentu.

q. Goodwill

Goodwill timbul atas akuisisi dari suatu bisnis yang dicatat pada biaya perolehan yang ditetapkan pada tanggal akuisisi dari bisnis

the replaced component is not recognized. All other maintenance and repair costs are recognized

When property and equipments are withdrawn from their use or been sold, then the accumulated depreciation carrying amount are eliminated from the financial statements, and the resulting gains or losses are recognized in the statement of comprehensive income.

When the carrying amount of assets are greater than its recoverable amount, the carrying amount is reduced to its recoverable amount, which is determined by which value is higher between net selling price and value in use.

The building construction cost and infrastructure and installation of machinery and equipment is accumulated as construction in progress. These costs are capitalized into property and equipment accounts when the construction or installation process has been substantially completed. Depreciation is charged from the time the asset is used.

Interest cost and other borrowing costs such as discounts, either directly or indirectly, are used to finance the construction of certain assets, are capitalized until the construction process has been substantially completed.

For loans that are directly attributable to a particular asset, the capitalized amount is the amount of borrowing costs that incurred during the period, less the income derived from the temporary investment originating from the loan.

For loans that are not directly attributable to a particular asset, the amount of capitalized borrowing costs is determined by multiplying the capitalization rate of expenditures incurred for the asset. The capitalization rate is the weighted average of the borrowing costs of the loan amount in a given period, excluding the amount of the loans specifically used to finance the construction process of a particular asset.

q. Goodwill

Goodwill arising on an acquisition of a business is carried at cost as established at the date of acquisition of the business less accumulated

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/*Continued*)

tersebut dikurangi akumulasi penurunan nilai, jika ada.

Untuk tujuan uji penurunan nilai, goodwill dialokasikan pada setiap unit penghasil kas dari Perusahaan (atau kelompok unit penghasil kas) yang diperkirakan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut. Unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi goodwill diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering jika terdapat indikasi bahwa unit penghasil kas tersebut mungkin mengalami penurunan nilai. Jika jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai dialokasikan pertama kali untuk mengurangi jumlah tercatat atas setiap goodwill yang dialokasikan pada unit penghasil kas dan kemudian ke aset lain dari unit penghasil kas secara prorata berdasarkan jumlah tercatat dari setiap aset dalam unit penghasil kas tersebut. Setiap kerugian penurunan nilai goodwill diakui secara langsung dalam laba rugi pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Rugi penurunan nilai yang diakui atas goodwill tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

Pada pelepasan unit penghasil kas yang relevan, jumlah yang dapat diatribusikan dari goodwill termasuk dalam penentuan laba rugi atas pelepasan.

r. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Konsolidasi menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Konsolidasi mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil

impairment losses, if any.

For the purpose of impairment testing, goodwill is allocated to each of the Company's cash-generating units (or group of cash-generating units) expected to benefit from the synergies of the combination. A cash-generating unit to which goodwill has been allocated is tested for impairment annually, or more frequently when there is an indication that the unit may be impaired. If the recoverable amount of the cash-generating unit is less than its carrying amount, the impairment loss is allocated first to reduce the carrying amount of any goodwill allocated to the unit and then to the other assets of the unit pro-rata on the basis of the carrying amount of each asset in the unit. Any impairment loss for goodwill is recognized directly in profit or loss in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. An impairment loss recognized for goodwill is not reversed in subsequent periods.

On disposal of the relevant cash-generating unit, the attributable amount of goodwill is included in the determination of the profit or loss on disposal.

r. Impairment of Non-Financial Assets

At the end of each reporting period, the Consolidation reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). When it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Consolidation estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/*Continued*)

kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi, kecuali aset tersebut dicatat pada jumlah revaluasi, dimana kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai penurunan revaluasi.

Apabila penurunan nilai selanjutnya dipulihkan, jumlah tercatat aset (atau unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat yang tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui untuk aset (atau unit penghasil kas) pada tahun tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang bersangkutan dicatat pada jumlah revaluasi, dalam hal ini pembalikan kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai kenaikan nilai revaluasi

s. Uang Muka Pemberi Pekerjaan dan Konsumen

Uang muka pemberi pekerjaan (jasa konstruksi) merupakan uang muka yang diterima dari pemberi kerja atas pekerjaan konstruksi saat kontrak kerja ditandatangani dan secara proporsional akan diperhitungkan dengan pembayaran termin yang didasarkan atas kemajuan fisik yang telah dicapai.

t. Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk semua karyawan tetapnya sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Perusahaan sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dengan penilaian aktuarial yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, perubahan dampak batas atas aset (jika ada) dan dari imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin segera sebagai pos terpisah pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas atau aset

asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at revaluation amount, in which the impairment loss is treated as revaluation decrease.

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or a cash-generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (or cash-generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the impairment loss is treated as a revaluation

s. Advances of the Project Owner and Consumer

Advances of project owners (construction services) represent advances received from the project owner on construction works when the employment contract is signed and proportionally will be calculated by the payment of terminology based on the physical progress that achieved.

t. Post Employments Benefit

The Company established defined post-employment benefit covering all the local permanent employees as required under Labor Law No. 13/2003 (the "Labor Law"). No funding has been made to its defined benefit plan.

The cost of providing benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, the effect of the changes to the asset ceiling (if applicable) and the return on plan assets (excluding interest), is reflected immediately in the statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurement recognized in other comprehensive income is reflected immediately as separate item under other comprehensive income in equity and will not be reclassified to profit or loss. Past service cost is recognized in profit or loss in the period of a plan amendment. Net interest is calculated by applying the discount rate at the beginning of the period to the net defined benefit liability or

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

imbangan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian).
- Beban atau pendapatan bunga neto.
- Pengukuran kembali

Perusahaan menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Liabilitas imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Perusahaan. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomik yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan ke program.

u. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan atas jasa persewaan diakui pada saat kontrak ditandatangani dan pekerjaan borongan *Bekisting* berdasarkan presentase penyelesaian pekerjaan. Presentase penyelesaian pekerjaan borongan *Bekisting* ditetapkan berdasarkan kemajuan fisik proyek yang dituangkan dalam laporan prestasi proyek (LPP) yang ditandatangani kedua belah pihak. Terhadap pendapatan usaha konstruksi yang telah diterbitkan fakturnya diakui sebagai piutang usaha, sedangkan yang belum diterbitkan fakturnya diakui sebagai tagihan bruto pemberi kerja.

Bunga pinjaman yang digunakan untuk pembiayaan investasi pembelian aset dibebankan pada tahun yang berjalan.

Beban diakui sesuai dengan manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (*accrual method*).

v. Laba per Saham

Labanya per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Labanya per saham dilusi dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan

asset. *Defined benefit costs are categorised as follows:*

- *Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements).*
- *Net interest expense or income.*
- *Remeasurement.*

The Company presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

The retirement benefit obligation recognized in the statement of financial position represents the actual deficit or surplus in the Company's defined benefit plans. Any surplus resulting from this calculation is limited to the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plans or reductions in future contributions to the plans.

u. Recognition of Revenue and Cost

Appreciation of rental services is recognized at the time the contract is signed and the wholesale work of Bekisting is based on the completion percentage of the work. The percentage of completion of the wholesale work is determined based on the project's physical progress as outlined in the project achievement report (LPP) signed by both parties. Against construction business earnings that its invoice has published are recognized as trade accounts receivables, while unpaid invoices are recognized as gross billing of the employer.

Loan interest which used to purchase investment in asset purchases are charged to the current year.

Expenses are recognized in accordance with the benefit derived in the relevant year (accrual method).

v. Earning per Share

Basic earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding as adjusted for the effects

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/*Continued*)

dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

of all dilutive potential ordinary shares.

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dan oleh karenanya, laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Konsolidasian

The Company has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of December 31, 2017 and 2016, and accordingly, no diluted earnings per share are calculated and presented in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

w. Perpajakan

w. Taxation

Penghasilan sewa yang diperoleh Perusahaan dikarenakan PPh 23 dan jasa borongan *bekisting* yang diperoleh Perusahaan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Rental income that earned by the Company is subject to PPh 23 and wholesale services of Bekisting that obtained by the Company is subject to PPh article 4 paragraph 2 of Law no. 36 of 2008 regarding income tax.

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak penghasilan tangguhan. Pajak tersebut diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Pajak penghasilan kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal posisi keuangan.

Income tax expense consists of current income tax and deferred income tax. The tax is recognized in the statements of comprehensive income. Current income tax is calculated using tax rate that applicable at the date of the financial position.

Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan *balance sheet liability method*, untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk masing-masing entitas.

Deferred income tax is recognized using the balance sheet liability method, for all temporary differences between the tax bases of assets and liabilities with carrying values for each entity.

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 tahun 2009 yang diundangkan pada tanggal 4 Juni 2009 yang merupakan Perubahan (Revisi) atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Republik Indonesia No. 51 tahun 2008 yang telah diundangkan tanggal 23 Juli 2008 tentang Pajak atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi sebagai Pengganti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 140 Tahun 2000, Perusahaan sebagai pelaksana konstruksi sesuai pasal 10B Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2009 dikenakan tarif 3% final untuk kontrak yang diperoleh mulai 1 Agustus 2008.

Related to the enactment of Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 40 of 2009 which was enacted on June 4, 2009 which is a revision of Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 51 of 2008 which has been enacted dated July 23, 2008 concern about Taxes on Income from Construction Services Business as a Substitute of Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 140 of 2000, the Company as the executive of construction under section 10B of Government Regulation No. 40 of 2009 is subject to a tariff 3% final for contracts obtained starting August 1, 2008.

x. Informasi Segmen

x. Segment Information

Informasi segmen disajikan menurut pengelompokan (segmen) jenis usaha sebagai bentuk pelaporan segmen primer dan segmen sekunder dikelompokkan berdasarkan unit pengendalian.

Segment information is presented based on segmentation of business type as a form of reporting of primary and secondary segment group by control unit.

Segmen usaha adalah komponen yang dapat dibedakan (*distinguishable components*) dan menghasilkan suatu produk atau jasa yang

A business segment is a distinguishable components and produces a different product or service according to the division of a different

(Lanjutan/*Continued*)

berbeda menurut pembagian industri atau kelompok produk atau jasa sejenis yang berbeda, terutama untuk para pelanggan di luar entitas Perusahaan.

industry or consolidation of products or services, especially for customers outside the Company's entity.

Segmen unit pengendalian adalah komponen Perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa pada lingkungan unit pengendalian (sifat lingkungan pengaturan), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada lingkungan unit pengendalian (sifat lingkungan pengaturan) yang lainnya.

The control unit segment is a distinguishable component of the Company that produces a products or services within the control unit environment (the nature of the setting environment), which is have a risks and benefits that are different with those of the control unit environment (the nature of the setting environment).

y. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi terhadap jumlah yang dilaporkan. Oleh karena tidak adanya kepastian dalam membuat estimasi, maka terdapat kemungkinan hasil aktual di masa yang akan datang berbeda dengan jumlah yang diestimasi tersebut.

y. Use of Estimate

The preparation of financial statements in accordance with financial accounting standards requires management to make estimations and assumptions against reported amounts. Because of the lack of certainty in making estimates, there is likely to be actual results in the future different from those estimates.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, yang dijelaskan dalam Catatan 3, direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

In the application of the Company accounting policies, which are described in Note 3, the directors are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Di bawah ini adalah pertimbangan kritis, selain dari estimasi yang telah diatur, dimana direksi telah membuat suatu proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan dan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

Below are the critical judgments, apart from those involving estimations, that the directors have made in the process of applying the Company accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements.

(Lanjutan/*Continued*)

Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan PSAK 25

Kesalahan periode sebelumnya adalah kelalaian untuk mencantumkan, dan kesalahan dalam mencatat, dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode sebelumnya yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan, atau kesalahan penggunaan, informasi andal yang :

- a. Tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut; dan
- b. Secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kesalahan tersebut termasuk dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan.

Penerapan suatu pengaturan adalah tidak praktis ketika entitas tidak dapat menerapkannya setelah seluruh usaha yang rasional dilakukan. Untuk suatu periode sebelumnya tertentu, tidak praktis untuk menerapkan suatu perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau menyajikan atau penyajian kembali retrospektif untuk mengoreksi kesalahan jika :

- a. Dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif tidak dapat ditentukan;
- b. Penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif memerlukan asumsi mengenai maksud manajemen yang ada pada periode sebelumnya tersebut; atau
- c. Penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif memerlukan estimasi signifikan atas jumlah dan tidak mungkin untuk membedakan secara objektif informasi mengenai estimasi yang:
 1. Menyediakan bukti atas keadaan yang ada pada tanggal disaat jumlah tersebut diakui, diukur atau diungkapkan; dan
 2. Tersedia ketika laporan keuangan periode sebelumnya diselesaikan dengan informasi lain.

Pajak penghasilan final

Pajak penghasilan dari aktivitas jasa konstruksi dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.40 tahun 2009 mengenai perubahan atas PP No.51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Agustus 2008, dimana perlakuan pengenaan pajak final dikenakan atas

Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors PSAK 25

The error of the previous period is the omission to include, and errors in the records, in the entity's financial statements for one or more prior periods arising from a failure to use, or misuse reliable information that :

- a. Available when the completion of the financial statement for such period, and*
- b. Rationally expected to be obtained and used in the preparation and presentation of Financial statement. Such errors include the impact of errors mathematical calculations, error the application of the accounting policy, error or mistake interpersi facts and fraud.*

The adoption of an arrangement is not practical when the entity cannot apply it after the whole erational business done. For a period previously specified, it is not practical to apply a change in accounting policy retrospectively or serves or restatement of the retrospective to correct an error if :

- a. The impact of application of retrospective or restatement of the retrospective can not be done.*
- b. The application of retrospective or restatement of the retrospective requires an assumption about the intent of management that exist in the previous period, or*
- c. The application of retrospective or restatement of the retrospective requires significant estimates on the amount and it is impossible to distinguish objectively information about the estimation:*
 - 1. Provides evidence of circumstances that existed on the date when such amounts recognized, measured or disclosed, and*
 - 2. Available when the financial statement of the previous period is resolved with other information.*

Final income tax

Income tax from construction is computed based on the Government Regulation No.40 year 2009 concerning amendments of Government Regulation No.51 year 2008 concerning income tax from the construction business which effective starting August 1, 2008, final tax at 3% is applied for contract signed starting August 1, 2008.

(Lanjutan/*Continued*)

kontrak sebesar 3% yang diperoleh mulai tanggal 1 Agustus 2008.

Pajak penghasilan final disajikan diluar beban pajak penghasilan pada laba rugi.

Perbedaan nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Pengakuan pendapatan Dan beban konstruksi

Kebijakan pengakuan pendapatan dan beban konstruksi Perseroan mensyaratkan penggunaan estimasi yang dapat mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan dan beban pokok pendapatan. Perseroan mengakui pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi berdasarkan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan (metode persentase penyelesaian).

Perusahaan melaksanakan proyek yang lamanya lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai kontrak konstruksi. Kebijakan akuntansi Perseroan untuk proyek membutuhkan pendapatan dan biaya yang akan dialokasikan pada periode akuntansi dan pengakuan berikutnya pada akhir periode atas aset atau liabilitas kontrak untuk proyek yang masih dalam proses. Penerapan kebijakan ini mengharuskan manajemen untuk menerapkan pertimbangan dalam memperkirakan total pendapatan dan total biaya yang diharapkan pada setiap proyek. Estimasi tersebut direvisi ketika proyek berlangsung untuk mencerminkan status proyek dan informasi terbaru yang tersedia untuk manajemen, perubahan estimasi tersebut diterapkan secara prospektif. Manajemen proyek melakukan tinjauan rutin untuk memastikan perkiraan terbaru yang sesuai. Perubahan atas estimasi akan dicatat prospektif. Walaupun Perseroan berkeyakinan bahwa estimasi yang dibuat adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada tahap penyelesaian actual dapat mempengaruhi secara material pendapatan dan beban pokok pendapatan dari konstruksi.

Final income tax is presented outside income tax expenses in profit or loss.

The difference between the final income tax carrying amounts of existing assets and liabilities, and their respective final tax bases are not recognised as deferred tax assets or liabilities.

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period that may have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

Revenue and expense recognition of construction contract

The policy of revenue and expense recognition of construction contract of the Company requires use of estimates which may impact the reported amount of revenues and cost of revenues. The Company recognizes revenues and expenses related to construction contracts based on the completion stage of contract activities at end of reporting period (percentage of completion method).

The Company undertakes projects that frequently span more than one accounting period and are accounted for as construction contracts. The Company's accounting policies for these projects require revenue and costs to be allocated to individual accounting periods and the consequent recognition at period end of contract assets or liabilities for projects is still in progress. The application of these policies requires management to apply judgement in estimating the total revenue and total costs expected on each project. Such estimates are revised as a project progresses to reflect the current status of the project and the latest information available to management. Project management teams perform regular reviews to ensure the latest estimates are appropriate, the changes in estimation is applied prospectively. Change to estimates is accounted for prospectively, while The Company believes that their estimates are reasonable and appropriate, significant differences to the actual completion stage may materially affect the revenues of construction contracts.

(Lanjutan/*Continued*)

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Masa manfaat setiap aset tetap dan properti investasi Perusahaan ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dan properti investasi dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 14

Penurunan Nilai Goodwill

Menentukan apakah suatu goodwill turun nilainya mengharuskan estimasi nilai pakai unit penghasil kas dimana goodwill dialokasikan. Perhitungan nilai pakai mengharuskan manajemen untuk mengestimasi arus kas masa depan yang diharapkan timbul dari unit penghasil kas yang menggunakan tingkat pertumbuhan yang tepat dan tingkat diskonto yang sesuai untuk perhitungan nilai kini. Dimana aktual arus kas masa depan kurang dari yang diharapkan, kerugian penurunan nilai material mungkin timbul.

Manfaat karyawan

Penentuan liabilitas imbalan pasca kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi aktual yang berbeda dari asumsi Perusahaanakibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya yang diakui di laba rugi dan penghasilan komprehensif lain serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Perusahaandianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pasca kerja Perusahaan. Nilai tercatat liabilitas imbalan pasca kerja diungkapkan dalam Catatan 22.

Estimated Useful Lives of Property and Equipment

The useful life of each item of the Company's property and equipment, and investment property are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of property and equipment and investment properties would affect the recorded depreciation expense and decrease in the carrying values of these assets.

The carrying values of property and equipments are disclosed in Notes 14.

Impairment of Goodwill

Determining whether goodwill is impaired requires an estimation of the value in use of the cash-generating units to which goodwill has been allocated. The value in use calculation requires the management to estimate the future cash flows expected to arise from the cash-generating unit using an appropriate growth rate and a suitable discount rate in order to calculate present value. Where the actual future cash flows are less than expected, a material impairment loss may arise.

Employee benefits

The determination of post-employment benefits obligation is dependent on selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Company's assumptions generally affect the recognized expense in profit or loss and other comprehensive income and recorded obligation in future periods. While it is believed that the Company's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions may materially affect the Company's post-employment benefit obligations. The carrying amounts of post-employment benefits obligations are disclosed in Note 22.

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

Penilaian Instrumen Keuangan

Seperti dijelaskan dalam Catatan 30 Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang meliputi input yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi untuk mengestimasi nilai wajar dari beberapa jenis instrumen keuangan. Catatan 30 memberikan informasi yang rinci mengenai asumsi utama yang digunakan dalam menentukan nilai wajar instrumen keuangan, serta analisis sensitivitas yang rinci untuk asumsi tersebut.

Valuation of financial instruments

As described in Note 30, the Company uses valuation techniques that include inputs that are not based on observable market data to estimate the fair value of certain types of financial instruments. Note 30 provides detailed information about the key assumptions used in the determination of the fair value of financial instruments, as well as the detailed sensitivity analysis for these assumptions.

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
Kas	153.728.456	8.789.525	Cash
Bank			Bank
Pihak Berelasi			Related Parties
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	81.119.452.837	62.875.362.115	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.551.824.740	1.457.296.413	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.345.845.669	5.882.210.035	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.342.538.662	123.409.787.147	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jumlah - Bank Berelasi	89.359.661.908	193.633.445.235	Total - Bank Related Parties
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Bank Syariah Mandiri	56.574.253.932	66.854.196.037	PT Bank Syariah Mandiri
PT United Overseas Bank, Tbk	22.109.989.074	44.104.998.025	PT United Overseas Bank, Tbk
PT Bank Central Asia, Tbk	17.994.746.400	71.009.167.239	PT Bank Central Asia, Tbk
PT Danamon Tbk	2.519.847.743	1.679.530.354	PT Danamon Tbk
PT Bank Jabar Banten, Tbk	810.370.410	-	PT Bank Jabar Banten, Tbk
PT Indonesia Exim Bank	261.175.242	41.381.947	PT Indonesia Exim Bank
PT Bank CIMB Niaga, Tbk	242.617.570	36.225.586	PT Bank CIMB Niaga, Tbk
PT Bank Index Selindo	978.474	-	PT Bank Index Selindo
PT DBS Tbk	8.142	189.532	PT DBS Tbk
Jumlah - Bank Pihak Ketiga	100.513.986.987	183.725.688.720	Total - Third Parties
Jumlah Kas dan Bank	190.027.377.349	377.359.133.995	Total Cash and Bank
Deposito Berjangka			Time Deposits
PT Bank Syariah Mandiri	316.553.000.000	105.000.000.000	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Jabar Banten, Tbk	124.262.938.075	150.000.000.000	PT Bank Jabar Banten, Tbk
PT Bank CIMB Niaga, Tbk	100.000.000	100.000.000	PT Bank CIMB Niaga, Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	500.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jumlah Deposito	440.915.938.075	755.100.000.000	Total Deposits
Kas setara kas	630.943.315.426	1.132.459.133.995	Cash and cashequivalent
Jangka waktu deposito berjangka	1 bulan/ <i>month</i>	1 bulan/ <i>month</i>	<i>Time deposits period</i>
Tingkat bunga deposito berjangka-tahun	6% - 6,3%	6,5% - 7,5%	<i>Annual interest rate of time-deposits</i>

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

6. PIUTANG USAHA

6. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE

	<u>31 Desember/ December 31, 2018</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2017</u>	
Pihak Berelasi	364.058.109.643	133.494.401.799	Related Parties
Pihak Ketiga	265.752.949.578	275.965.989.716	Third Parties
Jumlah Piutang Usaha - Bersih	629.811.059.221	409.460.391.515	Total Trade accounts receivable - Net

Berdasarkan segmen usaha adalah sebagai berikut

Based on business segment as follows:

	<u>31 Desember/ December 31, 2018</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2017</u>	
Pihak Berelasi			Related Parties
Jasa Konstruksi-sipil	264.722.361.519	82.478.111.313	Construction Service-civil
Persewaan	66.497.137.097	25.913.193.541	Rental
Batching Plant-ready mix	35.561.836.021	27.527.340.375	Batching Plant-ready mix
	366.781.334.637	135.918.645.230	
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(2.723.224.994)	(2.424.243.431)	Allowances for Impairment Losses
Sub Jumlah Pihak Berelasi	364.058.109.643	133.494.401.799	Sub Total Related Parties
Pihak Ketiga			Third Parties
Jasa Konstruksi-sipil	232.040.928.675	257.611.034.253	Construction Service-civil
Persewaan	59.270.940.570	36.604.572.796	Rental
Batching Plant-ready mix	3.961.678.978	1.126.889.512	Batching Plant-ready mix
	295.273.548.223	295.342.496.561	
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(29.520.598.645)	(19.376.506.845)	Allowances for Impairment Losses
Sub Jumlah Pihak Ketiga	265.752.949.578	275.965.989.716	Sub Total Third Parties
Piutang Usaha – Bersih	629.811.059.221	409.460.391.515	Trade accounts receivable - Net

Berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut

Based on aging as follows:

	<u>31 Desember/ December 31, 2018</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2017</u>	
> 1 bulan – 12 bulan			>1 month – 12 months
Belum jatuh tempo	435.927.276.090	238.282.253.691	Not due
Sudah jatuh tempo	159.168.381.516	142.448.310.741	Due
> 12 bulan – 15 bulan			>12 months – 15 months
Sudah jatuh tempo	7.522.209.373	17.879.758.530	Due
> 15 bulan – 18 bulan			>15 months – 18 months
Sudah jatuh tempo	7.137.004.255	2.315.129.598	Due
> 18 bulan – 21 bulan			>18 months – 21 months
Sudah jatuh tempo	5.407.949.807	5.607.026.976	Due
> 21 bulan – 24 bulan			>21 months – 24 months
Sudah jatuh tempo	781.809.501	1.845.713.533	Due
> 24 bulan – 27 bulan			>24 months – 27 months
Sudah jatuh tempo	2.517.542.461	5.743.167.862	Due
> 27 bulan – 30 bulan			>27 months – 30 months
Sudah jatuh tempo	986.261.811	1.005.279.993	Due
> 30 bulan – 33 bulan			>30 months – 33 months

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

Sudah jatuh tempo > 33 bulan – 36 bulan	247.500.000	1.755.530.806	Due >33 months – 36 months
Sudah jatuh tempo	42.358.948.046	14.378.970.060	Due
	662.054.882.860	431.261.141.790	
Penurunan nilai wajar piutang	(32.243.823.639)	(21.800.750.275)	Impairment of Receivable
Piutang Usaha – Bersih	629.811.059.221	409.460.391.515	Trade accounts receivable – Net

Berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

Based on customers are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
Pihak Berelasi			Related Parties
PT PP (Persero) Tbk	343.277.993.627	127.574.311.606	PT PP (Persero) Tbk
PT PP Properti Tbk	13.762.528.181	163.914.500	PT PP Infrastruktur
PT PP Urban	9.576.466.343	8.035.219.124	PT PP Properti Tbk
PT PP Energi	101.696.486	145.200.000	PTPP Energi
PT PP Infrastruktur	62.650.000	-	PT PP Infrastruktur
Sub Jumlah - Pihak Berelasi	366.781.334.637	135.918.645.230	Sub Total - Related Parties
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Bangun Karya Pratama Lestari	41.583.911.136	56.771.284.186	PT Bangun Karya Pratama Lestari
PT Putra Energi Nusantara	27.870.706.825	27.870.706.825	PT Putra Energi Nusantara
PP - Bahagia Bangunnusa	25.412.756.103	-	PP - Bahagia Bangunnusa
Konsorsium PP - ASHFRI	21.763.529.689	3.018.972.985	Konsorsium PP - ASHFRI
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	17.914.752.536	38.651.105.291	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Sriwijaya Bara Logistic	16.629.581.793	10.183.422.765	PT Sriwijaya Bara Logistic
KSO LMA CTA JO	11.483.116.520	-	KSO LMA CTA JO
PT Hutama Karya (Persero) Tbk	11.466.895.860	175.950.000	PT Hutama Karya (Persero) Tbk
PP KSO	11.357.015.992	-	PP KSO
PT Wika Gedung Tbk	10.243.514.540	2.855.245.311	PT Wika Gedung Tbk
PT Lematang Coal Lestari	9.191.112.835	24.805.769.720	PT Lematang Coal Lestari
KSO PP-PENTA	8.181.958.632	2.459.787.880	KSO PP-PENTA
PT Alfa granitama	7.218.233.500	-	PT Alfa granitama
PT Total Bangun Persada Tbk	6.046.802.207	3.494.454.384	PT Total Bangun Persada Tbk
PT Girder Indonesia	6.042.388.618	-	PT Girder Indonesia
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	5.581.528.909	-	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
KSO PP Gunung Tabor Perkasa	5.545.089.110	-	KSO PP Gunung Tabor Perkasa
PT Indah Kiat Pulp paper	5.385.783.597	-	PT Indah Kiat Pulp paper
KSO BUCG - WIKA - PP	4.997.145.700	-	KSO BUCG - WIKA - PP
PT Road Technology Indonesia	4.176.902.576	-	PT Road Technology Indonesia
PT PP - Jaya Konstruksi	3.680.271.973	422.125.000	PT PP - Jaya Konstruksi
PT Posco E&C Indonesia	3.130.250.600	1.790.153.953	PT Posco E&C Indonesia
KSO PP – BK	2.762.944.219	2.533.194.975	KSO PP – BK
KSO PP BRP	2.748.515.179	-	KSO PP BRP
PT Barasentosa Lestari	2.486.946.726	-	PT Barasentosa Lestari
KSO CRBC - WIKA - PP	2.305.299.624	13.056.880.272	KSO CRBC - WIKA - PP
KSO PP - BMP - BLJ	1.973.109.475	1.973.109.475	KSO PP - BMP - BLJ
PP - KNS Hyundai E&C	1.874.176.477	1.881.049.500	PP - KNS Hyundai E&C
KSO Adhi - Wika	1.848.970.407	1.943.970.407	KSO Adhi - Wika
PPRO – Sampoena Jaya	1.596.042.663	-	PPRO – Sampoena Jaya
KSO PP - HK	1.533.808.887	1.087.394.000	KSO PP - HK
KSO WIKA - PP	1.422.945.245	1.191.395.246	KSO WIKA - PP
Bangkit Jaya Mandiri Abadi	1.286.304.300	-	Bangkit Jaya Mandiri Abadi
PT Conbloc Infratecno	-	1.121.363.888	PT Conbloc Infratecno
PT Servo Lintas Raya	-	17.783.300.427	PT Servo Lintas Raya
PT Kukuh Mandiri Lestari	-	17.470.769.283	PT Kukuh Mandiri Lestari
PT Swarnadwipa Dermaga Jaya	-	11.759.152.037	PT Swarnadwipa Dermaga Jaya
PT Gebe Sentral Nickel	-	7.100.132.304	PT Gebe Sentral Nickel
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	-	6.318.866.808	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Vania Karunia Teguh	-	2.568.168.053	PT Vania Karunia Teguh
PT Softex Indonesia	-	2.488.808.600	PT Softex Indonesia
PT Nusa Raya Cipta	-	1.542.056.359	PT Nusa Raya Cipta

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

Lain-lain (dibawah Rp.1 Miliar)	8.531.235.772	26.286.362.331	Others (below Rp.1 Billion)
Sub Jumlah Pihak Ketiga	295.273.548.223	295.342.496.561	Sub Total – Third Parties
Jumlah	662.054.882.860	431.261.141.791	Total
Penurunan nilai wajar piutang	(32.243.823.639)	(21.800.750.275)	Impairment of receivables
Piutang Usaha – Bersih	629.811.059.221	409.460.391.515	Trade accounts receivable – Net

Mutasi atas penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

Movements for the impairment of trade accounts receivables are as follows:

	2018	2017	
Saldo awal	21.800.750.275	3.095.703.893	Beginning balance
Penambahan dari akuisisi	-	14.548.686.878	Increase from acquisition
Penurunan nilai wajar tahun berjalan	10.443.073.364	4.156.359.504	Impairment for the year
Jumlah	32.243.823.639	21.800.750.275	Total

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang usaha di kemudian hari.

The management believes that allowance for impairment losses is adequate to cover possible loss from uncollectible receivables in the future.

7. PIUTANG RETENSI

Piutang retensi proyek merupakan pendapatan Perusahaan yang ditahan oleh pemberi kerja sebagai jaminan dalam masa pemeliharaan, dengan rincian sebagai berikut:

7. RETENTION RECEIVABLES

Project retention receivables represents the Company earnings which are retained by the customers as guarantee during the maintenance period, with details as follows:

	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
Pihak Berelasi	116.845.728.431	19.335.017.660	Related Parties
Pihak Ketiga	53.506.050.888	13.396.481.139	Third Parties
Jumlah	170.351.779.319	32.731.498.799	Total

Rincian sebagai berikut:

Consist of:

	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
Pihak Berelasi			Related Parties
PT PP (Persero), Tbk.	115.759.090.284	19.271.378.669	PT PP (Persero), Tbk.
PT PP Properti, Tbk	940.950.000	-	PT PP Properti, Tbk
PT PP Urban	145.688.147	63.638.992	PT PP Urban
Sub Jumlah	116.845.728.431	19.335.017.661	SubTotal
Pihak Ketiga			Third Parties
KSO PP Bahagia Bangunnusa	16.360.852.363	-	KSO PP Bahagia Bangunnusa
KSO PP Ashfri	7.167.946.442	1.701.842.747	KSO PP Ashfri
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	6.914.353.930	2.656.626.942	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Total Bangun Persada TBK	5.165.044.061	3.323.414.511	PT Total Bangun Persada TBK
PT Kukuh Mandiri Lestari	3.326.304.144	-	PT Kukuh Mandiri Lestari
PT Nusa Raya Cipta	2.716.382.491	2.716.382.491	PT Nusa Raya Cipta
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	2.121.934.465	152.686.915	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
KSO PP Gunung Tabor Perkasa	1.799.715.087	474.035.773	KSO PP Gunung Tabor Perkasa
CRBC-WIKA-PP-JO	1.331.483.684	-	CRBC-WIKA-PP-JO
PT Indah Kiat Pulp paper	1.076.614.800	-	PT Indah Kiat Pulp paper
PT Wika Gedung Tbk	1.069.241.789	-	PT Wika Gedung Tbk

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

PT Djasa Uber Sakti	1.006.618.204	1.006.618.204	PT Djasa Uber Sakti
PP KSO	592.900.230	-	PP KSO
SCG-WIKA/WASKITA J/O	589.799.180	-	SCG-WIKA/WASKITA J/O
PT Jakarta Lingkar Barat Satu	585.816.113	-	PT Jakarta Lingkar Barat Satu
KSO BUCG-WIKA-PP	507.871.360	-	KSO BUCG-WIKA-PP
PT Utama Karya Infrastruktur	486.003.590	-	PT Utama Karya Infrastruktur
PT Posco E&C Indonesia	309.352.657	-	PT Posco E&C Indonesia
KSO PP Jaya Konstruksi	184.728.423	-	KSO PP Jaya Konstruksi
PT Bina Buana Semesta	107.738.000	107.738.000	PT Bina Buana Semesta
KSO PPRO - Sampurna Jaya	85.349.875	-	KSO PPRO - Sampurna Jaya
PT Conbloc Infratecno	-	1.257.135.556	PT Conbloc Infratecno
Sub Jumlah	53.506.050.888	13.396.481.138	SubTotal
Jumlah	170.351.779.319	32.731.498.799	Total

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang retensi tidak diperlukan karena manajemen berpendapat seluruh piutang dapat ditagih seluruhnya.

Management believes that the allowance for impairment losses on retention receivables is not necessary since all such receivables are fully collectible.

8. TAGIHAN BRUTO PEMBERI KERJA

8. GROSS RECEIVABLES FROM PROJECT OWNERS

	<u>31 Desember/ December 31, 2018</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2017</u>	
Pihak Berelasi			Related Parties
PT PP (Persero) Tbk	655.214.118.156	567.124.426.134	PT PP (Persero) Tbk
PT PP Properti Tbk	5.335.970.960	7.980.863.729	PT PP Properti Tbk
PT PP Urban	511.571.415	3.381.488.174	PT PP Urban
Sub jumlah	661.061.660.531	578.486.778.036	Sub total
Pihak Ketiga			Third Parties
KSO PP Ashfri	188.813.680.539	-	KSO PP Ashfri
KSO PP Bahagia Bangun Nusa	65.001.093.030	-	KSO PP Bahagia Bangun Nusa
KSO PP Gunung Tabor	49.018.272.988	-	KSO PP Gunung Tabor
PT Grider Indonesia	28.704.100.706	-	PT Grider Indonesia
PT Jasa Marga Kualanamou Toll Road	27.901.110.184	-	PT Jasa Marga Kualanamou Toll Road
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	27.572.877.114	50.475.911.899	PT Waskita Karya (Persero), Tbk
KSO PP (Proyek NYIA)	14.804.357.951	-	KSO PP (Proyek NYIA)
JO PPRO Samporna Jaya	14.037.136.032	-	JO PPRO Samporna Jaya
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk	12.499.912.364	-	PT Wijaya Karya (Persero), Tbk
PT Total Bangun Persada	10.721.954.465	5.554.841.075	PT Total Bangun Persada
PT Sriwijaya Bara Logistic	9.458.839.982	-	PT Sriwijaya Bara Logistic
PT Bara Sentosa Lestari	5.665.241.814	-	PT Bara Sentosa Lestari
PT Indah Kiat Pulp paper	5.556.194.474	-	PT Indah Kiat Pulp paper
PT Triyani	5.082.595.955	-	PT Triyani
PT Utama Karya (Persero), Tbk	4.908.158.000	3.480.800.000	PT Utama Karya (Persero), Tbk
PT Posco Engineering & Construction	2.626.040.787	2.414.832.443	PT Posco Engineering & Construction
KSO PP KNS Hyundai	1.163.022.650	-	KSO PP KNS Hyundai
PT Wika Gedung Tbk	455.460.772	5.767.070.778	PT Wika Gedung Tbk
Proyek JO	-	31.473.062.494	Proyek JO
PT Nusa Raya Cipta	-	2.085.811.761	PT Nusa Raya Cipta
PT Bina Buana	-	482.458.068	PT Bina Buana
KSO LMA CTA JO	-	4.737.476.418	KSO LMA CTA JO
PT Kukuh Mandiri Lestari	-	11.629.467.702	PT Kukuh Mandiri Lestari
PT Acset Indonesia	-	1.622.999.000	PT Acset Indonesia
Sub jumlah	473.990.049.807	119.724.731.637	Sub total
Dikurangi:			Less:
Penurunan Nilai Tagihan Bruto Pemberi Kerja	-	-	Impairment of Gross Receivables from Project Owners
Jumlah	1.135.051.710.338	698.211.509.673	Total

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas tagihan bruto tidak diperlukan karena manajemen berpendapat seluruh piutang dapat ditagih seluruhnya.

Management believes that the allowance for impairment losses on gross receivables is not necessary since all such receivables are fully collectible.

9. PIUTANG LAIN-LAIN

	31 Desember/ December 31, 2018
Pihak Berelasi	
Piutang Karyawan	50.000.000
Pihak Ketiga	
LMA-CTA JO	11.520.403.720
PT Chaizi	8.950.000.000
PT Yutai	4.259.000.000
PT Sumindo Perkasa Maju	3.986.100.000
PT Salamah Indah	2.179.200.000
PT Conbloc Infratecno	1.199.859.360
PT Bumi Petangis	529.700.000
PT Musi Mitra Jaya	11.815.000
PT Sarana Abadi Jaya Raya	-
PT Citos Energi Lima	-
PT Triyada Grahapertama	-
PT Halim Djaya Djayaprawira	-
Sub Jumlah Pihak Ketiga	32.636.078.080
Jumlah	32.686.078.080

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain tidak diperlukan karena manajemen berpendapat seluruh piutang dapat ditagih seluruhnya.

10. PERSEDIAAN

Merupakan persediaan bahan untuk pembuatan bekisting kolom, bekisting dinding dan bahan batching plant serta suku cadang, sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2018
Bahan baku konstruksi	55.964.034.598
Suku cadang	11.578.228.391
Solar dan oli	6.036.070.798
Lain-lain	5.593.808.613
Jumlah	79.172.142.400

Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi persediaan, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak diperlukan penyisihan atas penurunan nilai persediaan.

9. OTHER RECEIVABLES

	31 Desember/ December 31, 2017	
	60.366.796	Related Parties
		Receivables Employee
		Third Parties
	-	LMA-CTA JO
	8.950.000.000	PT Chaizi
	4.850.000.000	PT Yutai
	4.030.000.000	PT Sumindo Perkasa Maju
	-	PT Salamah Indah
	1.500.000.000	PT Conbloc Infratecno
	-	PT Bumi Petangis
	-	PT Musi Mitra Jaya
	29.067.500.000	PT Sarana Abadi Jaya Raya
	2.000.000.000	PT Citos Energi Lima
	1.700.000.000	PT Triyada Grahapertama
	27.008.661	PT Halim Djaya Djayaprawira
	52.124.508.661	Sub Total Third Parties
	52.184.875.457	Total

Management believes that the allowance for impairment losses on other receivables is not necessary since all such receivables are fully collectible.

10. INVENTORIES

Represent inventory of raw material for building of bekisting wall and column, raw material for batching plant and sparepart, as follow:

	31 Desember/ December 31, 2017	
	50.158.937.082	Construction raw material
	1.281.948.215	Spare part
	4.518.680.150	Oil and gasoline
	2.554.514.444	Others
	58.514.079.891	Total

Based on the review of the condition of the inventories, the Company's management believes that no provision for impairment of inventories is necessary.

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

11. UANG MUKA

Uang muka proyek merupakan pembayaran dimuka kepada supplier atas pembelian material untuk proyek pekerjaan sipil yang akan diperhitungkan dengan tagihan atas saldo hutang supplier tersebut. Saldo untuk 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp88.971.214.313 dan Rp94.857.048.094

11. ADVANCE

Project advances are advance payments to suppliers for the purchase of materials for civil works projects that will be accounted for by the invoice for the outstanding balance of the supplier's debt. Balances for December 31, 2018 and 2017 are Rp88,971,214,313 and Rp.94,857,048,094, respectively.

12. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Dimuka

	31 Desember/ December 31, 2018
Pajak Pertambahan Nilai	253.949.625.421
PPh Pasal 4 (2)	47.202.236.824
PPh 22	-
Jumlah	301.151.862.245

12. TAXATION

a. Prepaid Taxes

	31 Desember/ December 31, 2017	
	137.981.385.064	<i>Value Added</i>
	19.102.672.106	<i>Income Tax Article 2</i>
	70.543.108	<i>Income Tax Article 22</i>
Jumlah	157.154.600.278	Total

b. Utang Pajak

	31 Desember/ December 31, 2018
Pajak Pertambahan Nilai Keluaran Non Wapu	27.485.810.524
Hutang Cadangan PPh Final	55.371.049.235
PPh 23	181.925.484
PPh 25	299.273.081
PPh 29	62.461.452
PPh 21	865.701.608
PPh Pasal 16D	87.465.598
PPh Pasal 4 (2)	547.531.764
Jumlah	84.901.218.746

b. Taxes Payable

	31 Desember/ December 31, 2017	
	-	<i>Value added tax</i>
	14.720.404.268	<i>PPh Final Reserve Debt</i>
	474.337.423	<i>Income Tax Article 23</i>
	132.284.871	<i>Income Tax Article 25</i>
	3.487.948.865	<i>Income Tax Article 29</i>
	342.231.968	<i>Income Tax Article 21</i>
	40.454.546	<i>Income Tax Article 16D</i>
	52.851.443	<i>Income Tax Article 4 (2)</i>
Jumlah	19.250.513.384	Total

c. Pajak Penghasilan

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan konsolidasian dengan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan konsolidasian dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2018
Laba sebelum pajak Penghasilan konsolidasian	446.640.930.821
Laba sebelum pajak Penghasilan entitas anak	222.662.374.292
Laba Sebelum Pajak Penghasilan - Perusahaan	223.978.556.529

c. Income Tax

Current Tax

The reconciliation between consolidated income tax expense and the theoretical tax amount on the consolidated profit before income tax is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2017	
	257.439.188.665	<i>Profit before income tax - Consolidated</i>
	118.846.629.283	<i>Profit before income tax - Subsidiary</i>
Laba Sebelum Pajak Penghasilan - Perusahaan	138.592.559.382	Profit Before Tax – The Company

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

Koreksi fiskal positif			Positive fiscal correction
Biaya sumbangan sosial	285.913.259	105.100.000	Social donation expense
Beban cadangan pesangon	598.572.200	509.830.671	Severance reserve expenses
Beban pemasaran	-	226.000.000	Marketing expenses
			Depreciation costs for leasing
Biaya penyusutan aktiva leasing	17.590.585.241	13.094.790.725	assets
Beban langsung yang dikenakan pajak final	1.059.935.583.124	551.087.728.865	Directly subjected to final tax expenses
Pengembangan usaha	6.453.652.194	867.114.356	Business development
			Property and equipments
Pemeliharaan aktiva tetap	3.334.032.826	322.000	maintenance
STP Pajak	852.989.273	3.158.660.000	Tax SPT
Pengampunan pajak	-	939.413.863	Tax Amnesty
Jumlah	<u>1.089.051.328.117</u>	<u>569.988.960.480</u>	Total
Koreksi fiskal negatif			Negative fiscal correction
Penyusutan Fiskal	54.171.471.625	(30.090.487.503)	Fiscal Depreciation
Pendapatan jasa giro dan bunga deposito	10.260.584.557	5.001.956.641	Bank and deposit interest income
Pendapatan dikenakan pajak final	1.217.603.450.284	700.869.066.516	Income subject to final tax
Jumlah	<u>1.282.035.506.466</u>	<u>675.780.535.654</u>	Total
Laba kena pajak	30.994.378.180	32.800.984.208	Taxable income
Beban Pajak kini			Income tax expenses - Current
Perusahaan	7.748.594.545	8.200.246.052	The Company
Entitas anak	6.594.178.291	4.688.476.217	Subsidiary
Total beban pajak	14.342.772.836	12.888.722.269	Total income tax expenses
Pajak dibayar dimuka			Prepaid Taxes
Perusahaan	7.742.127.847	5.642.327.089	The Company
Entitas anak	6.538.183.537	3.758.446.315	Subsidiary
Jumlah	14.280.311.384	9.400.773.404	Total
Hutang PPh Badan	62.461.452	3.487.948.865	Corporate Income tax Payable

Penghasilan kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk tahun yang terkait yang disampaikan ke kantor Pelayanan Pajak.

Taxable income reconciliation results became the basis for the preparation of annual tax returns filed with the Tax Service Office.

Pajak Tangguhan

Perusahaan dan entitas anak tidak memperhitungkan manfaat (beban) pajak tangguhan karena tidak material.

Deferred Tax

The Company and subsidiary does not take into account deferred tax benefit (expense) because it is immaterial.

Pajak Final

Final Tax

	<u>31 Desember/ December 31, 2017</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2017</u>	
Beban pajak final			Income tax expenses - final
Perusahaan	43.143.411.186	21.026.071.995	The Company
Entitas anak	31.367.051.569	22.874.751.403	Subsidiary
Jumlah beban pajak final	74.510.462.755	43.900.823.398	Total final tax expenses

d. Administrasi

- Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan No.

d. Administration

- In connection with the implementation of Regulation of the Minister of Finance No.

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2016 dan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER/18/PJ/2016 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan dalam rangka Pengampunan Pajak. Perusahaan melaksanakan pengampunan pajak ini.

Pada tahun 2016, Perusahaan ikut berpartisipasi dalam program pengampunan pajak.

Aset pengampunan pajak yang dideklarasikan adalah kas. Jumlah aset pengampunan pajak yang berasal dari dalam negeri adalah sebesar Rp.50.000.000. Jumlah uang tebusan yang dibayarkan dalam program pengampunan pajak adalah sebesar Rp.2.500.000.

Perusahaan sudah membedakan pajak dibayar dimuka Pajak Pertambahan Nilai yang masih ada sebesar Rp.939.413.863 untuk tahun fiskal sampai dengan 2015 terkait dengan pengampunan pajak.

Perusahaan telah menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) tanggal 7 April 2017.

- Perusahaan sedang tidak dalam pemeriksaan pajak per 31 Desember 2018.

118/PMK.03/2016 concerning the Implementation of Law No. 11 of 2016 on Tax Amnesty as amended by Regulation of the Minister of Finance No. 141/PMK.03/2016 and Regulation of Directorate General of Tax No. PER/18/PJ/2016 on Redemption Payment of Excess Refund in the framework of Tax Amnesty. The Company participated the tax amnesty.

In year 2016, The Company participate in tax amnesty program.

The asset of tax amnesty which is cash. Total asset which is come from domestic is amounting to Rp.50,000,000. The redemption which is paid in program of tax amnesty is amounting to Rp.2,500,000.

The Company already distinguishes the prepaid tax on existing Value Added Tax amounting to Rp.939,413,863 for the fiscal year to 2015 related to Tax Amnesty.

The Company has received Tax Amnesty Certificate (SKPP) dated April 7, 2017.

- The Company is not under the tax audit as of December 31, 2018.

13. BIAYA DIBAYAR MUKA

Merupakan beban asuransi dibayar dimuka, sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2018
Alat berat	38.677.531.004
Pengobatan	7.192.869.780
Kendaraan	4.256.350.219
Alat dan Bekisting	543.676.238
Bangunan dan Gedung	19.774.017
Jumlah	50.690.201.258

Aset tetap berupa alat berat, PCH, Scaffolding, bekisting, dan kendaraan diasuransikan pada PT Biwandana Mitra Jasa, sedangkan untuk asuransi DPLK dan Kesehatan diasuransikan pada PT Asuransi Jiwasraya. Beban asuransi tersebut dibebankan sesuai masa berlakunya.

13. PREPAID EXPENSE

Represent prepaid of Insurance expenses, as follows :

	31 Desember/ December 31, 2017	
	17.621.691.739	Heavy Equipment
	4.305.278.096	Medical
	3.367.838.173	Vehicle
	252.462.152	Formwork and Equipment
	8.975.267	Building
Jumlah	25.556.247.428	Total

Property and equipments includes heavy equipment, PCH, Scaffolding, formwork, and vehicles are insured to PT Biwandana Mitra Jasa, while Pension and Health Insurance are insured to PT Asuransi Jiwasraya. The insurance expenses are charged on validity period.

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN
 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
 TANGGAL TERSEBUT
 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
 AND ITS SUBSIDIARY
 NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
 STATEMENTS
 DECEMBER 31, 2018 AND 2017
 AND FOR THE YEARS THEN ENDED
 (Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

14. ASET TETAP

14. PROPERTY AND EQUIPMENT

31 Desember / December 31, 2018						
1 Januari 2018/ <i>January 1, 2018</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi dan Revaluasi/ <i>Reclassification and Revaluation</i>	31 Desember 2018/ <i>December 31, 2018</i>		
Harga perolehan:					Cost	
Pemilikan langsung					Direct Ownership	
Tanah	209.767.020.000	1.890.835.000	-	14.573.244.999	226.231.099.999	Land
Bangunan	30.363.539.717	1.023.381.866	3.801.025.146	21.871.516.247	49.457.412.684	Building
Alat Ringan	9.121.296.701	474.841.800	-	-	9.596.138.501	Non Heavy Equipment
Fasilitas Proyek	13.227.327.622	513.746.131	-	-	13.741.073.753	Project Facility
Keet & Standard	3.190.407.570	-	-	-	3.190.407.570	Keet & Standard
Scaffolding	24.290.877.627	-	-	-	24.290.877.627	Scaffolding
Kendaraan	29.102.176.200	2.625.000.000	1.029.120.000	3.454.860.831	34.152.917.031	Vehicles
Batching Plant	168.493.192.000	21.753.000.000	-	-	190.246.192.000	Batching Plant
Alat Berat TC	177.492.931.529	-	-	-	177.492.931.529	Tower Crane
Alat Berat Earth Moving	1.964.287.283.915	484.092.046.246	-	192.700.000.000	2.641.079.330.161	Earth Moving Equipment
Bekisting	33.452.439.569	60.843.025.016	-	-	94.295.464.585	Formwork
PCH	174.736.478.568	5.059.625.500	-	-	179.796.104.068	PCH
2.837.524.971.018	578.275.501.559	4.830.145.146	232.599.622.077	3.643.569.949.508		
Aset dalam Penyelesaian					Assets in construction	
Bangunan	-	13.767.000.000	-	-	13.767.000.000	Building
-	13.767.000.000	-	-	13.767.000.000		
Aset sewa Pembiayaan					Leased assets	
Kendaraan	66.623.166.236	28.733.657.955	950.600.000	(3.454.860.831)	90.951.363.360	Vehicles
Alat Berat TC	26.279.938.688	-	-	-	26.279.938.688	Tower Crane
Alat Berat Earth Moving	111.359.799.311	304.422.644.185	-	(192.700.000.000)	223.082.443.496	Earth Moving Equipment
PCH	10.267.500.000	-	-	-	10.267.500.000	PCH
214.530.404.235	333.156.302.140	950.600.000	(196.154.860.831)	350.581.245.544		
Jumlah harga perolehan	3.052.055.375.253	925.198.803.699	1.979.720.000	36.444.761.246	4.007.918.195.051	Total cost
Akumulasi Penyusutan:					Accumulated Depreciation:	
Pemilikan langsung					Direct ownership	
Bangunan	2.468.017.033	1.333.008.113	3.801.025.146	-	-	Building
Alat Ringan	7.746.730.732	1.325.299.723	-	-	9.072.030.455	Non Heavy Equipment
Fasilitas Proyek	11.367.095.229	936.812.408	-	-	12.303.907.637	Project Facility
Keet & Standard	3.190.407.569	-	-	-	3.190.407.569	Keet & Standard
Scaffolding	23.536.450.144	624.457.624	-	-	24.160.907.768	Scaffolding
Kendaraan	25.974.534.835	4.558.148.452	1.029.120.000	232.395.833	29.735.959.120	Vehicles
Batching Plant	14.658.842.667	13.351.344.983	-	-	28.010.187.650	Batching Plant
Alat Berat TC	61.706.553.630	19.804.563.300	-	-	81.511.116.930	Tower Crane
Alat Berat Earth Moving	503.189.461.043	167.568.331.470	-	40.978.185.302	711.735.977.816	Earth Moving Equipment
Bekisting	12.740.118.386	3.075.532.496	-	-	15.815.650.882	Formwork
PCH	65.123.046.648	9.610.921.844	-	-	74.733.968.492	PCH
731.701.257.917	222.188.420.413	4.830.145.146	41.210.581.135	990.270.114.318		
Aset sewa pembiayaan					Leased assets	
Kendaraan	14.743.538.396	12.484.494.350	893.754.503	(232.395.833)	26.101.882.410	Vehicles
Alat Berat TC	16.718.243.366	3.201.549.241	-	-	19.919.792.607	Tower Crane
Alat Berat Earth Moving	76.154.766.264	42.165.055.930	-	(40.978.185.302)	77.341.636.892	Earth Moving Equipment
PCH	6.416.394.513	950.066.855	-	-	7.366.461.368	PCH
114.032.942.539	58.801.166.376	893.754.503	(41.210.581.135)	130.729.773.278		
Jumlah akumulasi penyusutan	845.734.200.456	280.989.586.789	5.723.899.649	-	1.120.999.887.596	Total accumulated depreciation
Nilai buku bersih	2.206.321.174.797				2.886.918.307.456	Net book value

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

31 Desember / December 31, 2017					
1 Januari 2017/ <i>January 1, 2017</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi dan Revaluasi/ <i>Reclassification and Revaluation</i>	31 Desember 2017/ <i>December 31, 2017</i>	
Harga perolehan: Pemilikan langsung					Cost Direct Ownership
Tanah	55.550.097.140	154.103.020.000	-	113.902.860	209.767.020.000 <i>Land</i>
Bangunan	1.225.266.303	26.463.327.685	-	2.674.945.729	30.363.539.717 <i>Building</i>
Alat Ringan	7.781.946.701	1.339.350.000	-	-	9.121.296.701 <i>Non Heavy Equipment</i>
Fasilitas Proyek Keet & Standard	13.261.828.172	1.758.738.438	1.793.238.990	-	13.227.327.622 <i>Project Facility</i>
Scaffolding	3.190.407.570	-	-	-	3.190.407.570 <i>Keet & Standard Scaffolding</i>
Kendaraan	24.290.877.627	-	-	-	24.290.877.627 <i>Vehicles</i>
Batching Plant	1.672.720.000	20.386.424.715	1.288.325.000	8.331.356.485	29.102.176.200 <i>Batching Plant</i>
Alat Berat TC	74.061.192.000	94.432.000.000	-	-	168.493.192.000 <i>Tower Crane</i>
Alat Berat Earth Moving	142.574.931.529	34.918.000.000	-	-	177.492.931.529 <i>Earth Moving Equipment</i>
Bekisting	328.593.377.180	1.635.693.906.735	-	-	1.964.287.283.915 <i>Formwork</i>
PCH	17.400.263.659	16.052.175.910	-	-	33.452.439.569 <i>PCH</i>
	89.488.567.371	85.247.911.196	-	-	174.736.478.568
	759.091.475.251	2.070.394.854.679	3.081.563.990	11.120.205.074	2.837.524.971.018
Aset sewa Pembiayaan					Leased assets
Kendaraan	37.019.909.683	37.682.813.038	8.798.356.485	-	66.623.166.236 <i>Vehicles</i>
Alat Berat TC	26.279.938.688	-	-	-	26.279.938.688 <i>Tower Crane</i>
Alat Berat Earth Moving	10.817.305.313	100.542.493.998	-	-	111.359.799.311 <i>Earth Moving Equipment</i>
PCH	10.267.500.000	-	-	-	10.267.500.000 <i>PCH</i>
	84.384.653.686	138.225.307.036	8.798.356.485	-	214.530.404.235
Jumlah harga perolehan	843.476.128.937	2.208.620.161.715	11.879.920.475	11.120.205.074	3.052.055.375.253
Akumulasi Penyusutan: Pemilikan langsung					Accumulated Depreciation: Direct ownership
Bangunan	281.002.983	2.187.014.050	-	-	2.468.017.033 <i>Building</i>
Alat Ringan	7.468.751.009	277.979.722	-	-	7.746.730.732 <i>Non Heavy Equipment</i>
Fasilitas Proyek Keet & Standard	10.950.686.595	613.145.346	196.736.712	-	11.367.095.229 <i>Project Facility</i>
Scaffolding	3.190.407.569	-	-	-	3.190.407.569 <i>Keet & Standard Scaffolding</i>
Kendaraan	21.035.996.194	2.500.453.950	-	-	23.536.450.144 <i>Vehicles</i>
Batching Plant	1.255.893.854	17.987.215.777	1.203.614.421	7.935.039.625	25.974.534.835 <i>Batching Plant</i>
Alat Berat TC	5.075.985.333	9.582.857.333	-	-	14.658.842.667 <i>Tower Crane</i>
Alat Berat Earth Moving	45.491.965.373	16.214.588.257	-	-	61.706.553.630 <i>Earth Moving Equipment</i>
Bekisting	43.520.728.093	459.668.732.951	-	-	503.189.461.043 <i>Formwork</i>
PCH	10.923.485.500	1.816.632.886	-	-	12.740.118.387 <i>PCH</i>
	56.668.477.351	8.454.569.297	-	-	65.123.046.648
	205.863.379.854	519.303.189.569	1.400.351.133	7.935.039.625	731.701.257.916
Aset sewa pembiayaan					Leased assets
Kendaraan	13.754.497.030	9.079.747.657	8.090.706.291	-	14.743.538.396 <i>Vehicles</i>
Alat Berat TC	14.331.067.656	2.387.175.711	-	-	16.718.243.366 <i>Tower Crane</i>
Alat Berat Earth Moving	5.376.924.308	70.777.841.956	-	-	76.154.766.264 <i>Earth Moving Equipment</i>
PCH	4.746.728.472	1.669.666.042	-	-	6.416.394.513 <i>PCH</i>
	38.209.217.465	83.914.431.366	8.090.706.291	-	114.032.942.539
Jumlah akumulasi penyusutan	244.072.597.319	603.217.620.935	9.491.057.426	7.935.039.625	845.734.200.455
Nilai buku bersih	599.403.531.618				2.206.321.174.797
					Net book value

Dalam penambahan aset tetap 31 Desember 2017, termasuk aset tetap entitas anak LMA yang diakuisisi, terdiri dari biaya perolehan sebesar Rp.1.300.283.228.742 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp.503.600.789.024.

Alat berat, Scaffolding dan PCH dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman bank dari Bank Syariah Mandiri.

Additions of property and equipment in December 31, 2017 included the property and equipment of the acquired subsidiary, LMA with acquisition cost of Rp.1,300,283,228,742 and accumulated depreciation of Rp.503,600,789,024.

Heavy equipment, Scaffolding and PCH are pledged as collaterals for bank loans from Bank Syariah Mandiri.

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

Penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation was allocated to the following:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Harga pokok pendapatan	260.595.899.312	193.797.038.915	Cost of revenue
Beban usaha	6.061.145.601	1.291.595.703	Operating expenses
Jumlah	<u>266.657.044.913</u>	<u>195.088.634.618</u>	Total

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2018.

Based on management's review, no incidents or changes in circumstances indicate a permanent decline in the value of property and equipment as of December 31, 2018.

Pengurangan selama tahun 2018 dan 2017 merupakan penjualan aset tetap. Pada tahun 2018 merupakan penjualan aset tetap yang dimiliki Perusahaan. Adapun perincian penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

Deduction in 2018 and 2017 represent sales of property, plant and equipment. In 2018 the sale of property, plant and equipment owned by Company. The details of sale of property, plant and equipment are as follows:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Harga jual	660.550.415	7.795.673.215	Selling price
Nilai tercatat	56.845.497	2.194.643.887	Net book value
Keuntungan atas penjualan	<u>603.704.918</u>	<u>4.940.629.328</u>	Gain on sale

Aset tetap kecuali tanah telah diasuransikan kepada beberapa perusahaan asuransi terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebagai berikut:

Property, plant and equipment, except land, are insured with various insurance companies against fire, theft and other possible risk, as follows:

<u>Perusahaan asuransi/ Insurance company</u>	<u>Mata uang/ Currency</u>	<u>Jumlah pertanggungan/ Sum insured 31 Desember/December 31, 2018</u>
PT Asuransi Bhakti Bayangkara	Rp	288.924.377.500
Mega Insurance Syariah	Rp	36.000.000.000
Tokio Marine Insurance Group	Rp	1.710.000.000
PT Asuransi Chubb	Rp	173.435.833
PT Asuransi Tri Pakarta	Rp	52.168.050.000
PT Asuransi Wahana Tata	Rp	1.964.655.000

Penilaian Kembali Aset Tetap

Revaluation of Land and Building

Penilaian atas nilai wajar aset tetap berupa tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai independen yang telah teregistrasi di OJK, KJPP Yanuar Bey & rekan No. 00019/2.0041-00/PI/03/0431/1/1/2019 dalam laporannya tertanggal 22 Januari 2019 untuk tahun 2018.

An assessment of the fair value of property and equipments in the form of land and buildings is carried out by an independent appraiser who has registered at OJK, KJPP Yanuar Bey & colleague No. 00019/2.0041-00/PI/03/0431/1/1/2019 in its report dated January 22, 2019 for 2018.

Laporan penilaian tersebut dilakukan sesuai dengan Kode Etik Penilai Indonesia Edisi VII – 2018 dan sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia Edisi VII - 2018. Metode penilaian yang digunakan adalah pendekatan nilai pasar dan pendekatan biaya.

The valuation report is carried out in accordance with the Indonesian Appraisal Code of Ethics Edition VII - 2018 and in accordance with Indonesian Assessment Standards Edition VII - 2018. The valuation method used is the market value approach and the cost approach.

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

	Jumlah Tercatat/ Net Carrying Value		Nilai Pasar/ Market Value		Keuntungan (Kerugian) Revaluasi/ Gain (Loss) on revaluasi		
	31 Desember / December 31,		31 Desember / December 31,		31 Desember / December 31,		
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Tanah							Land
Perusahaan	57.714.835.000	55.710.097.140	58.579.500.000	55.824.000.000	864.665.000	113.902.860	Company
LMA	153.943.020.000	153.906.042.999	167.651.599.999	153.943.020.000	13.708.579.999	36.977.001	LMA
Jumlah	211.657.855.000	209.616.140.139	226.231.099.999	209.767.020.000	14.573.244.999	150.879.861	Total
Bangunan							Building
Perusahaan	7.796.283.813	4.412.554.271	7.844.280.000	7.087.500.000	47.996.187	2.674.945.729	Company
LMA	10.474.979.940	12.634.425.320	32.298.500.000	13.241.640.000	21.823.520.060	607.214.680	LMA
Dampak akuisisi	-	-	9.314.632.684	10.034.399.717	-	-	Impact of acquisition
Jumlah	18.271.263.753	17.046.979.591	49.457.412.684	30.363.539.717	21.871.516.247	3.282.160.409	Total

15. GOODWILL

15. GOODWILL

	Jumlah/ Amount	
Saldo Awal	-	Beginning balance
Penambahan dari kombinasi bisnis	246.863.514.371	Additional from business combination
Saldo akhir	246.863.514.371	Ending balance

Uji penurunan nilai terhadap Goodwill

Impairment test on Goodwill

Dalam menguji apakah penurunan nilai goodwill diperlukan, nilai tercatat goodwill dialokasikan ke aset atau UPK yang relevan untuk mendapatkan nilai tercatat kombinasi. Nilai tercatat kombinasi tersebut dibandingkan dengan nilai terpulihkan UPK. Grup menguji penurunan nilai goodwill setiap tahun (pada tanggal 31 Desember) dan ketika keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin mengalami penurunan nilai.

In assessing whether impairment on goodwill is required, the carrying value of goodwill is allocated to the relevant assets or CGU to obtain combined carrying value. The combined carrying value is compared with CGU's recoverable amount. The Group performs testing of goodwill impairment annually (on December 31) and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired.

Untuk tujuan pengujian penurunan nilai tersebut, jumlah terpulihkan goodwill yang dialokasikan ditentukan berdasarkan "nilai pakai" (value-in-use) dengan menggunakan metode arus kas yang didiskontokan. Berikut adalah ringkasan dari asumsi utama yang digunakan:

For impairment testing purposes, the recoverable amounts of the goodwill allocated are determined based on "value-in-use" using discounted cash flows method. The following is the summary of key assumptions used:

Asumsi yang digunakan

Key assumptions used

PT Lancarjaya Mandiri Abadi

PT Lancarjaya Mandiri Abadi

Jumlah terpulihkan goodwill ditentukan berdasarkan perhitungan nilai pasar wajar LMA menggunakan arus kas yang didiskontokan dari rencana bisnis selama 10 tahun dan menggunakan nilai sisa.

The recoverable amount of goodwill has been determined based on the fair market value of LMA using discounted cash flow projections from the business plan covering 10-year period and using terminal value.

Tingkat diskonto: tingkat diskonto sebelum pajak yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar 13,99% diperoleh dari biaya modal rata-rata tertimbang setelah pajak (WACC).

Discount rate: the pre-tax discount rate used as of December 31, 2018 was 13,99% derived from the post-tax weighted average cost of capital (WACC).

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

Harga sewa: Harga sewa didasarkan pada estimasi manajemen dan data pasar yang tersedia.

Rental prices: Forecasted rental prices are based on management's estimates and available market data.

Beban operasi dan modal: Asumsi ini didasarkan pada perencanaan beban operasi dan modal Grup. Manajemen memiliki kontrol penuh atas biaya, dan yakin bahwa asumsi akan tercapai.

Operating and capital expenses: These assumptions are based on the Group's operating and capital expenses plan. The management has full control over the costs, and believes that assumptions will be achievable.

Perubahan terhadap asumsi yang digunakan oleh manajemen dalam menentukan jumlah terpulihkan, khususnya tingkat diskonto dan tingkat pertumbuhan, dapat berdampak signifikan pada hasil pengujian. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat kemungkinan yang beralasan bahwa asumsi utama tersebut di atas dapat berubah sehingga nilai tercatat goodwill yang dialokasikan pada UPK menjadi lebih tinggi dari nilai yang terpulihkan secara material.

Changes to the assumptions used by the management to determine the recoverable amount, in particular the discount rate, can have significant impact on the result of the impairment assessment. Management is of the opinion that there was no reasonably possible change in any of the key assumptions stated above that would cause the carrying amount of the goodwill allocated to the CGU to materially exceed its recoverable amount.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas goodwill tersebut di atas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang mengharuskan Grup melakukan pengujian penurunan nilai atas goodwill, selain dari pengujian tahunan yang diungkapkan pada Catatan ini.

Management believes that there were no indicators of impairment that existed on the goodwill for the year ended December 31, 2018 that require the Group to perform impairment tests on goodwill, other than the current annual test disclosed in this Note.

16. ASET TIDAK BERWUJUD

16. INTANGIBLE ASSET

	31 Desember/ December 31, 2018
Software akuntansi	4.231.261.500
Aset tidak berwujud dari entitas anak	22.104.373.598
Akumulasi amortisasi	(22.950.625.898)
Jumlah	3.385.009.200

	31 Desember/ December 31, 2017	
	-	<i>Accounting software</i>
	22.104.373.598	<i>Intangible assets from subsidiaries</i>
	(10.831.143.063)	<i>Accumulated amortization</i>
Jumlah	11.273.230.535	Total

Aset tidak berwujud terdiri dari software akuntansi dengan harga perolehan sebesar Rp4.231.261.500 yang diamortisasi selama 5 tahun dengan beban amortisasi tahun berjalan sebesar Rp846.252.300 dan aset tidak berwujud yang berasal dari akuisisi LMA dengan harga perolehan sebesar Rp22.104.373.598 dengan akumulasi beban amortisasi sebesar Rp22.104.373.598.

Intangible assets consist of accounting software with a acquisition cost of Rp4,231,261,500 which is amortized over 5 years with amortization expenses for the year amounting to Rp846,252,300 and intangible assets from the acquisition of LMA with a acquisition cost of Rp22,104,373,598 with accumulation amortization expense amounting to Rp22,104,373,598.

17. UTANG USAHA

17. TRADE ACCOUNTS PAYABLES

Merupakan utang usaha per 31 Desember 2018 dan 2017 terdiri dari:

Represent account payable as of December 31, 2018 and 2017 consist of:

	31 Desember/ December 31, 2018
Pemasok	1.135.603.866.940
Mandor	3.271.133.204
Jumlah	1.138.875.000.144

	31 Desember/ December 31, 2017	
	941.466.516.244	<i>Supplier</i>
	8.861.309.613	<i>Foreman</i>
Jumlah	950.327.825.857	Total

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

Rinciannya adalah sebagai berikut:

The detail are as follow:

	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
PT Citra Tunggal Jaya	150.136.247.008	195.425.237.109	PT Citra Tunggal Jaya
PT Tass Engineering	129.593.260.000	147.905.671.960	PT Tass Engineering
PT Komposit Maju Bersama	128.770.679.554	-	PT Komposit Maju Bersama
PT Graphindo Makmur Sejahtera	74.126.584.006	-	PT Graphindo Makmur Sejahtera
PT Tassindo Utama	70.622.545.325	8.910.000.000	PT Tassindo Utama
PT Trakindo Utama	58.778.197.223	31.582.665.330	PT Trakindo Utama
PT Semen Indonesia Logistik	27.782.770.335	-	PT Semen Indonesia Logistik
PT Cemindo Gemilang	19.955.469.851	-	PT Cemindo Gemilang
PT Holcim Beton	19.711.241.886	30.619.295.066	PT Holcim Beton
PT Batch Automation Indonesia	18.552.761.000	19.108.305.010	PT Batch Automation Indonesia
PT Teleindo Prakarsa	18.103.165.893	4.110.331.500	PT Teleindo Prakarsa
PT. KLU Infrastruktur	16.174.034.188	-	PT. KLU Infrastruktur
PT Bintang Timur Bang	15.005.918.681	-	PT Bintang Timur Bang
CV Surya Karya Prima	14.272.831.232	5.482.270.112	CV Surya Karya Prima
PT Kumkangind Engineering Indonesia	12.107.081.695	-	PT Kumkangind Engineering Indonesia
PT Indomobil Prima Energi	11.330.616.750	3.557.428.600	PT Indomobil Prima Energi
PT Detede	11.330.000.000	20.825.000.000	PT Detede
PT Traktor Nusantara	10.846.000.000	-	PT Traktor Nusantara
PT Citra Abadi Mandiri	10.096.200.000	-	PT Citra Abadi Mandiri
PT Biwandana	9.119.456.742	-	PT Biwandana
CV Jaya Teknik Diesel	8.981.210.975	-	CV Jaya Teknik Diesel
PT Karya Lima Utama	8.220.180.464	-	PT Karya Lima Utama
PT Sekawan Bayu Perkasa	7.468.103.720	-	PT Sekawan Bayu Perkasa
PT Usaha Bangun Perkasa	7.399.426.856	-	PT Usaha Bangun Perkasa
CV Teman Setia	6.814.768.000	-	CV Teman Setia
PT Lampung Manunggal	6.756.908.981	-	PT Lampung Manunggal
KSO Pandawa Infrastruktur	6.360.475.740	-	KSO Pandawa Infrastruktur
PT Daya Kreasi Cipta energi	6.168.546.936	-	PT Daya Kreasi Cipta energi
PT Daya Kobelco CMI	6.006.344.200	6.087.213.320	PT Daya Kobelco CMI
PT The Master steel	5.709.348.530	-	PT The Master steel
CV Andika Karya Persada	5.623.420.000	-	CV Andika Karya Persada
PT Tunas Omega Petrolindo	5.435.159.046	-	PT Tunas Omega Petrolindo
PT Karunia Sejahtera	5.255.454.014	-	PT Karunia Sejahtera
PT Shiva Skati Steel	4.977.516.222	-	PT Shiva Skati Steel
PT Bangun Karya Persada Nusantara	4.784.497.444	10.202.682.284	PT Bangun Karya Persada Nusantara
PT Java Petro Energi	4.564.823.360	-	PT Java Petro Energi
PT Supra Jaya Dua Ribu Satu	4.462.958.450	10.373.567.500	PT Supra Jaya Dua Ribu Satu
PT Karunia Awan Nusantara	3.997.804.435	-	PT Karunia Awan Nusantara
PT Cipadang Jayabaya	3.983.235.883	-	PT Cipadang Jayabaya
PT Putra Laskar Merdeka	3.228.605.600	-	PT Putra Laskar Merdeka
PT Sinar Perkasa Teknik	3.168.287.301	-	PT Sinar Perkasa Teknik
PT Varia Usaha Beton	3.158.806.750	8.681.606.250	PT Varia Usaha Beton
PT Gaya Makmur Tractors	2.784.828.200	33.701.752.140	PT Gaya Makmur Tractors
PT Dredko Utama	1.892.000.000	3.784.000.000	PT Dredko Utama
PT Pancaran Makmur Sejahtera	1.448.587.000	7.709.173.350	PT Pancaran Makmur Sejahtera
PT Multicrane Perkasa	1.430.558.469	6.614.080.331	PT Multicrane Perkasa
PT Dayaguna Motor Indonesia	-	76.080.000.000	PT Dayaguna Motor Indonesia
PT Motive Mulia	-	3.784.535.882	PT Motive Mulia
PT Sarana Rekondisi Indonesia	-	21.842.200.000	PT Sarana Rekondisi Indonesia
PT Columbia Chrome	-	21.503.723.120	PT Columbia Chrome
PT Hanil Jaya Steel	-	9.800.547.266	PT Hanil Jaya Steel
PT Arimbi Jaya Agung	-	9.625.000.000	PT Arimbi Jaya Agung
PT Panca Traktor Indonesia	-	10.940.761.382	PT Panca Traktor Indonesia
PT Surya Intan Sentana Jaya	-	7.327.280.000	PT Surya Intan Sentana Jaya
PT Anugrah Berkat Tehnik	-	7.040.000.000	PT Anugrah Berkat Tehnik
PT Equipindo Perkasa	-	4.816.482.000	PT Equipindo Perkasa

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

Haohan Cement	-	3.773.485.000	Haohan Cement
PT Gema Prima Mandiri	-	3.663.836.902	PT Gema Prima Mandiri
PT Bajamandiri	-	3.365.025.667	PT Bajamandiri
Audri Lutfia Jaya	-	3.326.799.402	Audri Lutfia Jaya
PT Papan Mandiri Cemerlang	-	3.263.038.350	PT Papan Mandiri Cemerlang
CV Talilo	-	3.127.269.420	CV Talilo
PT Intiniaga Sukses Abadi	-	3.115.505.250	PT Intiniaga Sukses Abadi
PT Intraco Penta Wahana	-	3.102.270.600	PT Intraco Penta Wahana
Lain-lain (dibawah Rp.3 Miliar)	179.106.948.995	149.606.818.328	Other (less than Rp.3 Billions)
Sub Jumlah	1.135.603.866.940	941.466.516.244	Sub Total
Mandor			Foreman
Sarwono	1.925.500.000	-	Sarwono
Agus Lesmono	1.345.633.204	3.227.182.439	Agus Lesmono
Bachtiar	-	1.000.160.000	Bachtiar
Lain-lain (dibawah Rp.1 Miliar)	-	4.633.967.174	Others (less than Rp.1 Billions)
Sub Jumlah	3.271.133.204	8.861.309.613	Sub Total
Jumlah	1.138.875.000.144	950.327.825.857	Total

Utang pemasok merupakan utang kepada pemasok atas pengadaan bahan bangunan sehubungan dengan pelaksanaan proyek.

Supplier payable represents payables to suppliers of material procurement related to project activities.

Utang kepada mandor merupakan utang upah mandor sehubungan dengan pelaksanaan proyek.

Payables to foreman represent payable of foremen wages in related with project activities.

18. UANG MUKA PEMBERI KERJA

18. ADVANCES FROM PROJECT OWNERS

	<u>31 Desember/ December 31, 2018</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2017</u>	
Pihak Berelasi			Related Parties
PT PP (Persero) Tbk	8.677.663.502	34.434.880.452	PT PP (Persero) Tbk
PT PP Properti Tbk	114.394.000	-	PT PP Properti Tbk
Sub Jumlah	8.792.057.502	34.434.880.452	Sub Total
Pihak Ketiga			Third Parties
PP ASHFRI Konsorsium	18.987.990.479	34.659.832.519	PP ASHFRI Konsorsium
PP - Bahagia Bangunnusa	5.244.092.478	12.082.348.100	PP - Bahagia Bangunnusa
JO PP Properti - Sampurna Jaya	2.480.225.250	-	JO PP Properti - Sampurna Jaya
JO PT Total Bangun Persada Tbk -			JO PT Total Bangun Persada Tbk -
PT Berca	2.017.936.108	-	PT Berca
PT Wika Gedung	1.051.940.238	3.679.577.470	PT Wika Gedung
PT Total Bangun Persada	718.756.334	556.401.148	PT Total Bangun Persada
PT Praja Vita Mulia	15.634.261	334.800.000	PT Praja Vita Mulia
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	-	31.659.832.519	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
KSO PP - Gunung Tabor	-	-	KSO PP - Gunung Tabor
Perkasa Konsorsium	-	151.793.968	Perkasa Konsorsium
Sub Jumlah	30.516.575.148	83.147.253.205	Sub Total
Jumlah	39.308.632.650	117.582.133.657	Total

Uang muka pemberi kerja merupakan uang muka yang diterima dari pemberi kerja yang secara proporsional akan dikompensasikan dengan tagihan yang didasarkan atas kemajuan fisik yang telah dicapai.

Advances from project owners represents advances received from customers and will be proportionately compensated to billings in accordance with physical progress of the projects.

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

19. UTANG LAIN-LAIN

	31 Desember/ December 31, 2018
Pihak Berelasi	
PT PP (Persero) Tbk	105.291.644.425
PT Lancarjaya Energi	566.308.800
PT PP Urban	165.641.960
Dana Pensiun PP	5.316.823
Koperasi Karyawan PT PP	3.564.000
YKKPP	1.909.154
Koperasi Saham	-
Sub jumlah	106.034.385.162
Pihak Ketiga	
PT Citra Abadi Mandiri	9.664.450.000
Asuransi	640.434.432
Sub jumlah	10.304.884.432
Jumlah	116.339.269.594

19. OTHER LIABILITIES

	31 Desember/ December 31, 2017	
		Related Parties
	141.209.145	PT PP (Persero) Tbk.
	540.947.880	PT Lancarjaya Energi
	165.641.960	PT PP Urban
	-	PP Pension Fund
	44.301.290	Koperasi Karyawan PT PP
	331.128.742	YKKPP
	4.820.149.206	Shares of Cooperatives
	6.043.378.223	Sub Total
		Third Parties
	9.839.511.784	PT Citra Abadi Mandiri
	174.557.590	Insurance
	10.014.069.374	Sub Total
	16.057.447.597	Total

20. UTANG BANK JANGKA PENDEK

	31 Desember/ December 31, 2018
PT United Overseas Bank Tbk	57.000.000.000
PT Bank Central Asia Tbk	55.300.000.000
PT Indonesia Exim Bank	52.000.000.000
PT Bank DBS Indonesia	30.937.499.982
PT Bank Index	1.355.148.630
PT Bank Syariah Mandiri	-
Jumlah Jangka Pendek	196.592.648.612

20. SHORT TERM BANK LOANS

	31 Desember/ December 31, 2017	
	150.000.000.000	PT United Overseas Bank Tbk
	-	PT Bank Central Asia Tbk
	-	PT Indonesia Exim Bank
	-	PT Bank DBS Indonesia
	-	PT Bank Index
	50.000.000.000	PT Bank Syariah Mandiri
	200.000.000.000	Total Short-Term

Kreditas/ Creditors	Jenis fasilitas/ Type of facilities	Fasilitas maksimum/ Maximum facility	Tanggal perjanjian/ Agreement date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017
Perusahaan/ Company							
PT United Overseas Bank Tbk	Kredit Modal Kerja/ Working Capital Credit	250.000.000.000	19 Oktober/ October 19, 2018	19 Oktober/ October 19, 2019	10,08%	57.000.000.000	150.000.000.000
PT Indonesia Exim Bank	Kredit Modal Kerja/ Working Capital Credit	52.000.000.000	16 Agustus/ August 16, 2017	16 Agustus/ August 16, 2019	9,00%	52.000.000.000	-
PT Bank Syariah Mandiri	PDB	50.000.000.000	-	November 2019	9,25%	-	50.000.000.000
LMA							
PT Bank Central Asia Tbk	Time loan Revolving dan Bank Garansi	263.000.000.000	14 September/ September 14, 2018	24 September/ September 24, 2019	9,25%	55.300.000.000	-
PT Bank DBS Indonesia	Committed Term Loan 1	150.000.000.000	23 Januari/ January 23, 2017	28 Maret/ March 28, 2019	10,50%	30.937.499.982	-
PT Bank Index	Term Loan	25.000.000.000	15 Juli/ July 15, 2018	14 Juli/ July 14, 2019	10,25%	1.355.148.630	-
						196.592.648.612	200.000.000.000

Perusahaan

PT United Overseas Bank Tbk

Perusahaan memperoleh fasilitas *multi option trade* dari PT Bank UOB Indonesia sesuai dengan perjanjian kredit modal no. 474/09/2018 tanggal 4 September 2018.

The Company

PT United Overseas Bank Tbk

The Company obtained a *multi option trade* facility from PT Bank UOB Indonesia accordance to credit agreement no. 474/09/2018 dated September 4, 2018.

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/*Continued*)

Perjanjian dijamin sesuai Perjanjian Jaminan Fidusia atas Tagihan No. 38 dan Perjanjian Gadai Rekening No. 41 dan 42 tanggal 19 Oktober 2016 dibuat dihadapan Veronica Nataadmadja, SH, Notaris di Jakarta.

PT Indonesia Exim Bank

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman KMK dari PT Indonesia Exim Bank sesuai dengan perjanjian kredit modal kerja ekspor no. 720/ADDPK/07/2018 tanggal 24 Juli 2018.

Perjanjian pinjaman juga mencakup persyaratan tertentu sebagai berikut:

- Menjual sebagian atau seluruh harta kekayaan yang sudah diserahkan sebagai jaminan.
- Menjaminkan uang kepada siapapun.
- Memberikan *corporate guarantee*

PT Bank Syariah Mandiri

Pinjaman ini dijamin dengan kendaraan, tower crane, *scaffolding*, *formworks* dan piutang usaha yang akan jatuh tempo antara November 2019 hingga Desember 2020.

Perusahaan telah melunasi seluruh utangnya pada Mei 2018.

Entitas Anak

PT Bank Central Asia Tbk

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman kredit lokal dan *multi time loan revolving* dari PT Bank Central Asia sesuai dengan perjanjian kredit no. 02846/ALK-KOM/2018 tanggal 14 September 2018.

Sehubungan dengan pinjaman-pinjaman tersebut di atas, Perusahaan diwajibkan menjaga *financial covenant* sebagai berikut:

- Rasio EBITDA minimal 1 kali
- Current Ratio minimal 1 kali
- Debt to Equity Ratio minimal 1,5 kali

PT Bank DBS Indonesia

Perusahaan memperoleh fasilitas *committed term loan 1* dari PT Bank DBS Indonesia sesuai dengan akta perubahan atas perjanjian fasilitas perbankan no. 128 tanggal 23 Januari 2017.

Perjanjian pinjaman juga mencakup persyaratan tertentu sebagai berikut:

- Mengubah susunan pemegang saham
- Mengubah jenis usaha
- Mengikat diri sebagai penjamin kepada pihak ketiga

The agreement is guaranteed in accordance Fiduciary Guarantee on Receivable Agreement No. 38, Pledge Accounts Agreement No. 41 and 42 dated October 19, 2016 Notary Veronica Nataadmadja, S.H., Jakarta.

PT Indonesia Exim Bank

The Company obtained a loan facility from PT Indonesia Exim Bank accordance to export working capital credit agreement no. 720/ADDPK/07/2018 dated July 24, 2018.

The loan agreement also includes certain covenants as follows:

- *Selling part or all of the assets that have been given as collateral.*
- *Guarantee money to anyone.*
- *Providing a corporate guarantee*

PT Bank Syariah Mandiri

The loan is collateralized by vehicle, tower crane, scaffolding, formworks and accounts receivable which will mature between November 2019 and December 2020.

The company has paid off all of its debts in May 2018.

Subsidiary

PT Bank Central Asia Tbk

The Company obtained credit investment and multi time loan revolving from PT Bank Central Asia accordance to credit agreement no. 02846/ALK-KOM/2018 dated September 14, 2018.

In connection with the loans mentioned above, the Company is required to maintain financial covenants as follows:

- *EBITDA ratio of at least 1 time*
- *Current ratio at least 1 time*
- *Debt to Equity Ratio is at least 1.5 times*

PT Bank DBS Indonesia

The Company obtained a committed term loan 1 facility from PT Bank DBS Indonesia accordance to deed of amendment to the banking facility agreement no. 128 dated January 23, 2017.

The loan agreement also includes certain covenants as follows:

- *Change the composition of shareholders*
- *Change the type of business*
- *Binding themselves as guarantor to third parties*

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

Pinjaman ini dijamin dengan alat berat milik Perusahaan sejumlah Rp.154.687.500.000.

This loan is collateralized by the Company's heavy equipment amounting to Rp.154,687,500,000.

PT Bank Index Selindo

PT Bank Index Selindo

Perusahaan memperoleh fasilitas *term loan* dari PT Bank Index Selindo sesuai dengan perjanjian kredit no. 007/SPK-STR/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018.

The Company obtained a term loan facility from PT Bank Index Selindo accordance to credit agreement no. 007/SPK-STR/VI/2018 dated Juny 6, 2018.

Pinjaman ini dijamin dengan alat berat milik Perusahaan yang diikat dengan fidusia senilai Rp.27.800.000.000.

This loan is collateralized by heavy equipment owned by the Company bound with fiduciary worth Rp.27,800,000,000.

21. LIABILITAS SEWA PEMBIAYAAN

21. FINANCE LEASE LIABILITIES

Pembayaran minimum sewa dan nilai kini pembayaran minimum sewa berdasarkan perjanjian sewa pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

The minimum lease payments and present value of minimum lease payments based on the lease agreements as of December 31, 2018 and 2017 are as follows:

	Pembayaran minimum sewa/ <i>Minimum lease payments</i>		Nilai kini pembayaran minimum sewa/ <i>Present value of minimum lease payment</i>		
	2018 Rp	2017 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Rincian liabilitas sewa berdasarkan jatuh tempo					
Tidak lebih dari satu tahun	256.415.383.446	53.211.855.664	164.772.442.213	50.007.083.747	<i>By Due Date Not later than one year</i>
Lebih dari satu tahun dan kurang dari lima tahun	338.030.628.844	338.041.788.841	309.359.380.107	273.926.842.700	<i>Later than one year and not later than five years</i>
Lebih dari lima tahun	-	-	-	-	<i>Later than five years</i>
	<u>594.446.012.290</u>	<u>391.253.644.505</u>	<u>474.131.822.320</u>	<u>323.933.926.447</u>	
Dikurangi: biaya keuangan masa depan	(120.314.189.971)	(67.319.718.058)	-	-	<i>Less: future finance charges</i>
Nilai kini pembayaran minimum sewa	<u>474.131.822.320</u>	<u>323.933.926.447</u>	<u>474.131.822.320</u>	<u>323.933.926.447</u>	<i>Present value of minimum lease payments</i>
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			<u>164.772.442.213</u>	<u>50.007.083.747</u>	<i>Current maturity</i>
Liabilitas Sewa Jangka Panjang – Bersih			<u>309.359.380.107</u>	<u>273.926.842.700</u>	<i>Long term Lease Liabilities –Net</i>
		31 Desember/ December 31, 2018		31 Desember/ December 31, 2017	
Perusahaan:					The Company:
PT Mitsubishi		76.585.814.610		34.649.333.209	PT Mitsubishi
PT Takari		66.654.075.421		56.415.454.655	PT Takari
PT Mandiri Tunas Finance		28.084.113.786		12.070.869.035	PT Mandiri Tunas Finance
PT IBJ Verena Finance		15.987.357.895		19.716.881.918	PT IBJ Verena Finance
PT Astra Credit Company		7.145.722.430		7.775.203.070	PT Astra Credit Company
PT ORIX Indonesia Finance		1.660.293.198		2.598.791.438	PT ORIX Indonesia Finance
PT Toyota Astra Finance		280.137.457		46.968.645	PT Toyota Astra Finance
Entitas Anak:					Subsidiary:
PT Mitsubishi UFJ		74.017.333.321		9.902.650.520	PT Mitsubishi
PT Mandiri Tunas Finance		53.668.226.877		35.531.105.924	PT Mandiri Tunas Finance
PT IBJ Verena Finance		38.700.000.000		-	PT IBJ Verena Finance
PT Danamon Tbk		29.333.333.333		58.666.666.667	PT Danamon Tbk
PT Bank Central Asia Syariah		26.008.163.419		-	PT Bank Central Asia Syariah
PT Astra Credit Company		24.949.039.248		28.509.384.376	PT Astra Credit Company
PT Bumiputera BOT Finance		12.954.916.269		18.212.548.253	PT Bumiputera BOT Finance

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

PT Komatsu Finance	8.822.077.922	6.964.218.595	PT Komatsu Finance
PT SMF Leasing Indonesia	7.864.541.944	18.374.113.379	PT SMF Leasing Indonesia
PT Caterpillar Finance Indonesia	775.198.560	5.051.293.270	PT Caterpillar Finance Indonesia
PT Dipo Star Finance	304.000.000	-	PT Dipo Star Finance
PT KKB Finance	183.052.208	-	PT KKB Finance
PT BCA Finance	154.424.422	2.535.115.307	PT BCA Finance
PT ORIX Indonesia Finance	-	6.913.328.186	PT ORIX Indonesia Finance
Jumlah	474.131.822.320	323.933.926.447	Total
Dikurangi: bagian jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun	164.772.442.213	50.007.083.747	Less: current portion
Jumlah Jangka Panjang	309.359.380.107	273.926.842.700	Total Long Term
	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
Kurang dari 1 Tahun	164.772.442.213	50.007.083.747	Less than 1 year
Lebih dari 1 tahun dan Kurang dari 5 tahun	309.359.380.107	273.926.842.700	More than 1 year and Less than 5 years

Perusahaan

Perusahaan menandatangani perjanjian pembiayaan untuk kendaraan dengan beberapa Perusahaan pembiayaan dengan tingkat suku bunga tetap.

Kendaraan, alat berat dan tower crane tersebut dipakai sebagai jaminan untuk liabilitas sewa pembiayaan yang bersangkutan. Perusahaan tidak memiliki batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini.

Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT Takari di tahun 2017 dengan No. Kontrak PPK00000059-001, untuk pengadaan 20 unit Hino Dump Truck JD 260 dengan jangka waktu 47 bulan yang dimulai dari 30 Maret 2017 sampai 28 Februari 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp.21.338.400.000, suku bunga 9,75%.

Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT Takari di tahun 2017 dengan No. Kontrak PPRE000000089-001, untuk pengadaan 38 unit Truck Hino 260 JM dan Tass Mixer Truck 7 CBM dengan jangka waktu 48 bulan yang dimulai dari 17 November 2017 sampai 17 November 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp.43.472.000.000, suku bunga 9,30%.

Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT IBJ Verena di tahun 2017 dengan No. Kontrak 00054-010, untuk pengadaan 5 unit Kobelco Excavator, 3 unit Bomag Vibro, 3 unit Bomag dengan jangka waktu 47 bulan yang dimulai dari 28 Maret 2017 sampai 28 Februari 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp.28.764.990.000, suku bunga 10,2%(Flat).

The Company

The Company has entered into financing agreements for vehicles with certain financing companies with fixed interest rate.

These vehicles, heavy equipments and tower crane are pledged as collateral for the underlying finance lease liabilities. The Company have no covenants under these loan facility agreements.

The Company received financing from PT Takari in 2017 with No. Contract PPK00000059-001, for the procurement of 20 units of Hino Dump Truck JD 260 with maturity of 47 months starting from March 30, 2017 to February 28, 2021 with a contract value of Rp.21,338,400,000, interest rate 9.75%.

The Company received financing from PT Takari in 2017 with No. Contract PPRE000000089-001, for the procurement of 38 units of Hino Truck 260 JM and Tass Mixer Truck 7 CBM with a period of 48 months starting from November 17, 2017 to November 17, 2021 with a contract value of Rp.43,472,000,000, the interest rate is 9.30%.

The Company received financing from PT IBJ Verena in 2017 with No. Contract 00054-010, for the procurement of 5 units Kobelco Excavator, 3 units Bomag Vibro, 3 units Bomag with maturity of 47 months starting from March 28, 2017 to February 28, 2020 with a contract value of Rp.28,764,990,000, interest rate 10.2% (Flat).

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/*Continued*)

Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT IBJ Verena di tahun 2017 dengan No. Kontrak 00054-011, untuk pengadaan 5 unit Kobelco Excavator, 1 unit Crawler Crane H, 1 unit Crawler Crane dengan jangka waktu 47 bulan yang dimulai dari 15 April 2017 sampai 15 Maret 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp.11.235.000.000, suku bunga 6%(Flat).

The Company received financing from PT IBJ Verena in 2017 with No. Contract 00054-011, for the procurement of 5 units Kobelco Excavator, 1 unit Crawler Crane H, 1 unit Crawler Crane with maturity of 47 months starting from 15 April 2017 to 15 March 2021 with contract value of Rp.11,235,000,000, interest rate 6% (Flat).

Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT Toyota Astra Finance, untuk pengadaan 9 unit Toyota Avanza dan 6 unit Toyota Inova dengan jangka waktu 36 bulan dari 13 April 2015 sampai 27 November 2018, dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.325.985.112, suku 12,5%.

The company received financing from PT Toyota Astra Finance, for the procurement of 9 units of Toyota Avanza and 6 units of Toyota Inova with 36 months from 13 April 2015 until 27 November 2018, with contract value of Rp.1,325,985,112, rate 12.5%.

Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT Astra Credit Company, untuk pengadaan 6 unit Toyota Camry dengan jangka waktu 48 bulan dari 31 Januari 2017 sampai 31 Januari 2021, suku bunga 9,34% - 11% dengan nilai kontrak sebesar Rp.14.423.487.508.

The company received financing from PT Astra Credit Company, for the procurement of 6 units of Toyota Camry with a period of 48 months from January 31, 2017 to January 31, 2021, interest rates 9.34%-11%, with a contract value of Rp.14.423.487.508.

Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT Otto Multiartha, untuk pengadaan 1 unit Opel Captiva dengan jangka waktu 36 bulan, suku bunga 10,35%, sudah dilunasi pada tahun 2017.

The Company obtained financing facility from PT Otto Multiartha, for procurement of 1 units Opel Captiva, 36 months terms, interest rate 10.35%, all such debt has been settled on 2017.

Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT Panin Bank Finance, untuk pengadaan 4 unit Mitsubishi Pajero Exceed dengan jangka waktu 36 bulan, suku bunga 15,5%.

The Company obtained financing facility from PT Panin Bank Finance, for procurement of 4 units Mitsubishi Pajero Exceed, 36 months terms, interest rate 15.5%.

Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT Mitsubishi Tunas Finance, untuk pengadaan 1 unit Toyota Avanza, 5 unit Mitsubishi Pajero, 12 unit Toyota Innova, 4 unit Motor Kawasaki KLX, 1 unit Motor Honda CB150R, 2 Unit Honda CRV, 1 unit Nisan Xtrail dengan jangka waktu 36 bulan, suku bunga 9,3% dengan nilai kontrak sebesar Rp.20.557.331.395.

The Company obtained financing facility from PT Mitsubishi Tunas Finance, for procurement of 1 unit Toyota Avanza, 5 units Mitsubishi Pajero, 12 units Toyota Avanza, 4 units Kawasaki KLX, 1 unit Honda CB150R, 2 units Honda CRV, 1 unit Nissan Xtrail, 36 months terms, interest rate 9.3% with a contract value of Rp.20,557,331,395.

Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT CSUL, untuk pengadaan 6 unit Kobelco Excavator dengan jangka waktu 36 bulan, suku bunga 10,5% dengan nilai kontrak sebesar Rp.10.598.428.000, sudah dilunasi pada tahun 2017.

The Company obtained financing facility from PT CSUL, for procurement 6 units Kobelco Excavator, 36 months term, interest rate 10.5% with a contract value of Rp.10,598,428,000 ,all such debt has been settled on 2017.

Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT Dana Unico Finance, untuk pengadaan Dump truck, excavator dan bulldozer dengan jumlah fasilitas pinjaman sebesar Rp.42.191.524.474 dengan jangka waktu 24 bulan dari 2 Oktober 2016 sampai dengan 2 Oktober 2018, suku bunga 16%.

The Company obtained financing from PT Dana Unico Finance, for the procurement of Dump trucks, excavators and bulldozers with a total loan facility of Rp.42,191,524,474 for a period of 24 months from October 2, 2016 to October 2, 2018, interest rate of 16%.

Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT Bank Mandiri Tunas Finances, untuk pengadaan 15 unit toyota innova, 2 unit mitsubishi pick up, dan 1 unit Isuzu PU FD, dengan jumlah fasilitas pinjaman

The Company obtained financing from PT Bank Mandiri Tunas Finances, for the procurement of 15 units of toyota innova, 2 units of Mitsubishi pickup and 1 unit of Isuzu PU FD, with total loan facility

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

sebesar Rp.20.557.331.395. dengan jangka waktu 48 bulan dari 3 Februari 2017 sampai 3 Januari 2021, suku bunga efektif 12,11%.

Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT Mitsubishi UFJ Lease dan Finance Indonesia di tahun 2017 dengan No. Kontrak PPK17101246, untuk pengadaan 1 Unit Motor Grader SDLG, 4 Unit Carterpillar Motor, 1 Unit Batching Plan, 2 Unit Silon Semen, 2 Unit Mixer, 3 Unit Vubrating Roller, 5 Unit Sumitomo Crawler excavator, 1 Unit Hyundai Excavator, 1 Unit Golden star stone crushing plant, 1 unit cum genset silent 65 KVA, 36.136 Unit Bekisting Horizontal dengan jangka waktu 48 bulan yang dimulai dari 31 Maret 2017 sampai 31 November 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp.33.557.700.000, suku bunga 10%.

Entitas anak

Entitas anak mendapat pembiayaan dari PT Komatsu Finance di tahun 2017 dengan No. Kontrak M04016101, untuk pengadaan 2 unit D68, 2 unit Grader, 2 unit D68E – SS, dengan jangka waktu 23 bulan yang dimulai dari 13 Mei 2017 sampai 13 April 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp.5.414.400.000 suku bunga 10%.

Entitas anak mendapat pembiayaan dari PT Caterpillar Finance Indonesia di tahun 2016 dengan No. Kontrak 2529-0-16-0007, untuk pengadaan 2 unit Caterpillar Rotary Mixer 500B dengan jangka waktu 23 bulan yang dimulai dari 13 Mei 2017 sampai 13 April 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp.11.442.816.000 suku bunga 14%.

Entitas anak mendapat pembiayaan dari PT ORIX Indonesia Finance, untuk pengadaan Dump Truck, Crane dan Ekskavator dengan jumlah fasilitas pinjaman sebesar Rp.14.616.360.000, jangka waktu 36 bulan, suku bunga 6,24%.

Entitas anak mendapat pembiayaan dari PT BCA Finance, untuk pengadaan 6 unit toyota innova dengan jumlah fasilitas pinjaman sebesar Rp.17.367.200.000 dengan jangka waktu 24 bulan, sukubunga efektif 8,67%.

Entitas anak mendapat pembiayaan dari PT SMF Leasing Indonesia, untuk pengadaan 30 unit Kobelco SK200 dengan jumlah fasilitas pinjaman sebesar Rp.30.294.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, suku bunga efektif 14%.

Entitas anak mendapat pembiayaan dari PT Bank Danamon Tbk, untuk pengadaan 100 unit Hino FM dengan jumlah fasilitas pinjaman sebesar Rp.85.250.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, suku bunga efektif 10,5% - 13,5%.

amounting to Rp.20,557,331,395. with a period of 48 months from February 3, 2017 to January 3, 2021, effective interest rate of 12.11%.

The Company received financing from PT Mitsubishi UFJ Lease and Finance Indonesia in 2017 with No. Contract PPK17101246, for procurement of 1 Unit Motor Grader SDLG, 4 Unit Carterpillar Motor, 1 Unit Batching Plan, 2 Unit Silon Cement, 2 Unit Mixer, 3 Unit Vubrating Roller, 5 Unit Sumitomo Crawler Excavator, 1 Unit Hyundai Excavator, 1 Unit Golden star stone crushing plant, 1 unit of 65 KVA silent cum genset, 36,136 Horizontal Formwork Unit with 48 month period starting from March 31, 2017 to November 31, 2021 with contract value of Rp.33,557,700,000, interest rate of 10%.

Subsidiary

Subsidiary received financing from PT Komatsu Finance in 2017 with No. Contract M04016101, for the procurement of 2 units of D68, 2 units of Graders, 2 units of D68E - SS, with a period of 23 months starting from May 13, 2017 to April 13, 2019 with a contract value of Rp.5,414,400,000 interest rate of 10%.

Subsidiary received financing from PT Caterpillar Finance Indonesia in 2016 with No. Contract 2529-0-16-0007, for the procurement of 2 units of Caterpillar Rotary Mixer 500B with 23 month period starting from May 13, 2017 to April 13, 2019 with contract value of Rp.11.442.816.000 interest rate 14%.

Subsidiaries receive financing from PT ORIX Indonesia Finance, for the procurement of Dump Trucks, Cranes and Excavators with a total loan facility of Rp.14,616,360,000, 36 month period, interest rate of 6.24%.

Subsidiary obtained financing facility from PT BCA Finance, for procurement 6 unit Toyota camry with total facility amounted Rp.17,367,200,000, 24 term months, effective interest rate 8.67%.

Subsidiary obtained financing facility from PT SMF Leasing Indonesia, for procurement 30 unit Kobelco SK200 with total facility amounted Rp.30,294,000,000, 36 months term, effective interest rate 14%.

Subsidiary obtained financing facility from PT Bank Danamon Tbk, for procurement 100 unit Hino FM with total facility amounted Rp.85,250,000,000, 36 months term, effective interest rate 10.5% - 13.5%.

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

Entitas anak mendapat pembiayaan dari PT Bumiputera, untuk pengadaan 8 unit excavator SK 480 dengan jumlah fasilitas pinjaman sebesar Rp.26.928.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, suku bunga efektif 9,9%.

Subsidiary obtained financing facility from PT Bumiputera, for procurement 8 unit excavator SK 480 with total facility amounted Rp.26,928,000,000, 36 term months, effective interest rate 9.9%.

Entitas anak dan BCA Syariah menandatangani Pembiayaan Murabahah senilai Rp.33.454.619.682 dengan Akad Pembiayaan Murabahah No. 572/MRBH/BCAS/VIII/18 dan akad pemberian limit Pembiayaan (Line Facility) No 5 Tanggal 07 Agustus 2018 Notaris Siti Nur Isminingsih S.H dengan jangka waktu 36 bulan dengan pembiayaan 36 Unit Dump Truck dengan jatuh tempo antara 8 Agustus 2018 hingga 8 Agustus 2021.

The Company and BCA Syariah signed a Murabahah Financing with total of Rp.33,454,619,682 with a Murabahah Financing Agreement No. 572 / MRBH / BCAS / VIII / 18 and the Financing limit agreement (Line Facility) No. 5 dated August 7, 2018 Notary Siti Nur Isminingsih S.H with a period of 36 months with the financing of 36 Dump Truck Units with maturity between September 2018 to August 2021.

22. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

22. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION

	<u>31 Desember/ December 31, 2018</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2017</u>	
Imbalan pasca kerja sesuai UU Ketenagakerjaan No. 13/2003	9.415.744.699	7.324.002.515	<i>Post-employment benefits under Labor Law No. 13/2003</i>
Liabilitas bersih	<u>9.415.744.699</u>	<u>7.324.002.515</u>	Net liability

Imbalan Pasca Kerja

Post-Employment Benefits

Perusahaan menyelenggarakan program pemutusan hubungan kerja sesuai UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2013 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan kerja dan Penetapan Uang Pesangon.

The Company provides post-employment benefit program to employees in accordance with the Labor Law No. 13 year 2003 on Settlement of Severance of Work Relation and Regulation of Separation Pay.

Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebanyak 327 dan 304 karyawan.

The total number of employees eligible for the benefits until Desember 31, 2018 and 2017 is 327 and 304 employees respectively.

Beban imbalan pasca kerja yang diakui dalam laba rugi komprehensif konsolidasian adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in comprehensive income in respect of the defined benefit plan are as follows:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Biaya jasa:			<i>Service cost:</i>
Biaya jasa kini	2.010.851.058	1.614.333.753	<i>Current service cost</i>
Biaya jasa lalu dan (keuntungan) kerugian atas penyelesaian	-	-	<i>Past service cost and (gain) loss from settlements</i>
Biaya bunga	536.110.871	398.868.574	<i>Interest cost</i>
Beban pesangon	-	-	<i>Severance expense</i>
Komponen dari biaya imbalan pasti yang diakui dalam laba rugi	<u>2.546.961.929</u>	<u>2.013.202.327</u>	<i>Components of defined benefit costs recognized in profit or loss:</i>
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti – neto:			<i>Remeasurement on the net defined benefit liability:</i>
Imbal hasil aset program (tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam beban bunga)	-	-	<i>Return on plan assets (excluding amounts included in interest cost)</i>
Penyesuaian untuk aset imbalan pasti yang dibatasi	-	-	

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(305.355.643)	300.054.926	Actuarial gains and losses arising from changes in financial assumptions
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	(28.355.482)	146.275.713	Actuarial gains and losses arising from experience adjustments
Komponen beban imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(333.711.125)	516.554.962	Component of defined benefit costs recognized in other comprehensive income
Jumlah	2.213.250.804	2.529.757.289	Total

Liabilitas imbalan pasca kerja Perusahaan sehubungan dengan program manfaat karyawan yang termasuk dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The amounts included in the consolidated statement of financial position arising from the Company's obligation in respect of the postemployment benefit is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
Nilai kini kewajiban	9.415.744.699	7.324.002.515	Present value of funded obligations
Nilai wajar aset program	-	-	Fair value of plan assets
Status pendanaan	9.415.744.699	7.324.002.515	Funded status
Batas atas aset yang diakui	-	-	Restrictions on assets recognized
Liabilitas bersih yang timbul dari kewajiban imbalan pasti	9.415.744.699	7.324.002.515	Net liability arising from defined benefit obligation

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

Movements in the present value of the defined benefits obligation were as follows:

	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
Kewajiban imbalan pasti – awal	7.324.002.515	5.160.246.413	Opening defined benefit obligation
Biaya jasa kini	2.010.851.058	1.614.333.753	Current service costs
Biaya bunga	536.110.871	398.868.574	Interest costs
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(305.355.643)	300.054.926	Actuarial gains and losses arising from changes in financial assumptions
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	(28.355.482)	146.275.713	Actuarial gains and losses arising from experience adjustments
Kontribusi dari partisipan program	-	-	Contributions from plan participants
Biaya jasa lalu, termasuk kerugian (keuntungan) dari kurtailmen	-	-	Past service cost, including losses (gain) on curtailments
Pembayaran manfaat	(121.508.620)	(295.776.864)	Benefits paid
Beban pesangon	-	-	Severance expense
Kewajiban imbalan pasti - akhir	9.415.744.699	7.324.002.515	Closing defined benefits obligation

Program imbalan pasca kerja memberikan eksposur Perusahaan terhadap risiko aktuarial seperti risiko investasi, risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup dan risiko gaji.

The defined benefit pension plan expose the Company to actuarial risks such as: investment risk, interest rate risk, longevity risk and salary risk.

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

Risiko Investasi

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi; jika pengembalian aset program di bawah tingkat tersebut, hal itu akan mengakibatkan defisit program. Saat ini program tersebut memiliki investasi yang relatif seimbang pada efek ekuitas, instrumen utang dan real estat. Karena sifat jangka panjang dari liabilitas program, dewan dana pensiun perlu menetapkan bahwa bagian wajar dari aset program harus diinvestasikan pada efek ekuitas dan real estate untuk meningkatkan imbal hasil yang dihasilkan oleh dana.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; Namun, sebagian akan di offset (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Risiko Harapan Hidup

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Perhitungan imbalan pasca kerja Perusahaan dihitung oleh aktuaris independen PT Bestama Aktuaria. Asumsi-asumsi aktuarial yang digunakan adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Tingkat diskonto	8,1%	6,9%	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji	8,3%	8,3%	<i>Salary increment rate</i>
Tingkat mortalitas	Tabel Mortalita Indonesia tahun 2011 (Pria)	Indonesia Mortality Table year 2011 (Men)	<i>Mortality rate</i>
Tingkat cacat	10% dari kemungkinan orang meninggal pada masing-masing usia	10% of the chances of people dying at each age	<i>Disability rate</i>
Tingkat pengunduran diri	10% pada usia 20 tahun dan menurun secara linear sampai dengan 0% pada Usia Pensiun Normal	10% at age 20 and decreases linearly up to 0% at Normal Retirement Age	<i>Resignation rate</i>

Investment Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated using a discount rate determined by reference to high quality corporate bond yields; if the return on plan asset is below this rate, it will create a plan deficit. Currently the plan has a relatively balanced investment in equity securities, debt instruments and real estates. Due to the long-term nature of the plan liabilities, the board of the pension fund considers it appropriate that a reasonable portion of the plan assets should be invested in equity securities and in real estate to leverage the return generated by the fund.

Interest Risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability; however, this will be partially offset by an increase in the return on the plan's debt investments.

Longevity Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the best estimate of the mortality of plan participants both during and after their employment. An increase in the life expectancy of the plan participants will increase the plan's liability.

Salary Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

The cost of providing post-employment benefits of the Company is calculated by independent actuary, PT Bestama Aktuaria. The followings are the actuarial assumptions used:

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan tingkat upah yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

- Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 0,5%, kewajiban imbalan pasti akan meningkat sebesar Rp2.422.921.043 (berkurang sebesar Rp2.658.687.864).
- Jika tingkat upah lebih tinggi (lebih rendah) 0,5% kewajiban imbalan pasti akan meningkat sebesar Rp2.657.864.128 (berkurang menjadi sebesar Rp2.422.619.450).

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined obligation are discount rate and salary rate. The sensitivity analysis below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

- *If the discount rate increases (decreases) by 0.5%, post-employment benefits obligation will be increased by Rp2,422,921,043 (decrease by Rp2,658,687,864).*
- *If the salary rate increases (decreases) by 0.5%, post-employment benefits obligation will be increasing by Rp2,657,864,128 (decreasing by Rp2,422,619,450).*

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the post-employment benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the post-employment benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the post-employment benefits obligation recognized in the consolidated statement of financial position.

23. UTANG BANK JANGKA PANJANG

23. LONG TERM-BANK LOANS

	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
PT Bank Syariah Mandiri	1.238.244.003.341	792.115.459.727	PT Bank Syariah Mandiri
PT Indonesia Exim Bank	77.820.622.840	51.610.000.000	PT Indonesia Exim Bank
PT Bank Jabar Banten Tbk	40.000.000.000	-	PT Bank Jabar Banten Tbk
PT Bank Index	2.465.509.020	-	PT Bank Index
PT Bank DBS Indonesia	1.145.833.333	87.083.333.311	PT Bank DBS Indonesia
PT United Overseas Bank Tbk	-	65.155.452.586	PT United Overseas Bank Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	-	55.000.000.000	PT Bank Central Asia Tbk
Sub Jumlah	1.359.675.968.534	1.050.964.245.624	Sub Total
Dikurangi:			Less:
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	-	55.000.000.000	Current maturity
Jumlah	1.359.675.968.534	995.964.245.624	Total

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

Kreditas/ Creditors	Jenis fasilitas/ Type of facilities	Fasilitas maksimum/ Maximum facility	Tanggal perjanjian/ Agreement date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017
Perusahaan/ Company							
PT Bank Syariah Mandiri	Line Facility	400.000.000.000	5 Maret/ March 5, 2018	5 September/ September 5, 2022	8,90%	1.238.244.003.341	792.115.459.727
PT Indonesia Exim Bank	Kredit investasi ekspor/ Export investment credit	97.360.000.000	24 Mei / May 25, 2018	22 Maret / March 22, 2021	9,00%	77.820.622.840	51.610.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Cash collateral/ Collateral cash	42.105.263.158	13 April/ April 13, 2018	13 April/ April 13, 2022	0,30%	40.000.000.000	-
PT Bank UOB Indonesia	Multi option trade	150.000.000.000	19 Oktober/ October 19, 2016	19 Oktober/ October 19, 2019	10,00%	-	65.155.452.586
LMA							
PT Bank Index Selindo	Term Loan	3.820.657.650	-	26 Juli / July 26, 2021	10,25%	2.465.509.020	-
PT Bank DBS	committed term loan 2	41.250.000.000	23 Januari/ January 23, 2017	25 Januari/ January 25, 2020	10,25%	1.145.833.333	87.083.333.311
PT Bank Central Asia Tbk	Kredit investasi/ Investment credit	100.000.000.000	14 September/ September 14, 2018	24 September/ September 24, 2019	9,25%	-	55.000.000.000
						1.359.675.968.534	1.050.964.245.624

Perusahaan

PT Bank Syariah Mandiri

Perusahaan memperoleh line facility berdasarkan prinsip murabaha dari PT Bank Syariah Mandiri sesuai dengan akta no. 02 tanggal 5 Maret 2018.

PT Indonesia Exim Bank

Perjanjian pinjaman mencakup persyaratan tertentu sebagai berikut:

- Menjual sebagian atau seluruh harta kekayaan yang sudah diserahkan sebagai jaminan.
- Menjaminkan uang kepada siapapun.
- Memberikan *corporate guarantee*

PT Bank Jabar Banten Tbk

Perusahaan dan Bank Jabar Banten melakukan perjanjian kerja sama berupa cash collateral, dimana perusahaan menyetorkan dana deposito ke bank senilai Rp42.105.263.158 kemudian menjadikan deposito tersebut sebagai underlying atau jaminan atas pengambilan fasilitas kredit cash collateral senilai Rp40.000.000.000 dengan spread bunga 0.3% (sama dengan selisih rate bunga deposito dan rate bunga pinjaman).

PT United Overseas Bank Tbk

Pinjaman pada United Overseas Bank Limited merupakan pinjaman KMK, dengan Fasilitas Multi

The Company

PT Bank Syariah Mandiri

The Company obtained a line facility based on murabaha principle from PT Bank Syariah Mandiri accordance to deed no. 02 dated March 5, 2018.

PT Indonesia Exim Bank

The loan agreement includes certain covenants as follows:

- Selling part or all of the assets that have been given as collateral.
- Guarantee money to anyone.
- Providing a corporate guarantee

PT Bank Jabar Banten Tbk

The Company and Bank Jabar Banten have an agreement cooperation in the fields of in the form of cash collateral, which the company depositing deposit fund to the bank proposed senior unsecured bonds programme Rp42.105.263.158 then made in the deposit interest rate was also discussed as the underlying or bail upon over the withdrawal of funds a credit facility cash collateral Rp40.000.000.000 proposed senior unsecured bonds programme spread 0.3 flowers % (equal to the difference rate of current deposit's interest rate and interest rate of loan).

PT United Overseas Bank Tbk

Loans at United Overseas Bank Limited are KMK loans, with Multi Option trade facilities to support the

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/*Continued*)

Option trade untuk mendukung kebutuhan modal kerja debitur dan untuk menjamin proses penawaran (*bidding*), pembayaran uang muka (*advance payment*), pelaksanaan (*performance*) dan pemeliharaan (*maintenance*), kontrak debitur sesuai dengan akta Nomor C-27.HT.03.02-Th.2001 tanggal 19 Oktober 2018.

Perjanjian dijamin sesuai Perjanjian Jaminan Fidusia atas Tagihan No. 38 dan Perjanjian Gadai Rekening No. 41 dan 42 tanggal 19 Oktober 2016 dibuat dihadapan Veronica Nataadmadja, SH, Notaris di Jakarta.

Perusahaan telah melunasi seluruh utangnya pada 2018.

Entitas Anak

PT Bank Index Selindo

Perusahaan dan Bank Index menandatangani Fasilitas Perbankan dalam bentuk *Committed Term Loan Facility* (Fasilitas TL) sebesar Rp3.820.657.650 dengan Surat Persetujuan Kredit No.007/SPK-STR/V1/2018 dengan peruntukan pembiayaan 5 Unit Vibrator Roller Sakai.

PT Bank DBS Indonesia

Perusahaan memperoleh fasilitas *committed term loan 2* dari PT Bank DBS Indonesia sesuai dengan akta perubahan atas perjanjian fasilitas perbankan no. 128 tanggal 23 Januari 2017.

Perjanjian pinjaman juga mencakup persyaratan tertentu sebagai berikut:

- Mengubah susunan pemegang saham
- Mengubah jenis usaha
- Mengikat diri sebagai penjamin kepada pihak ketiga

Pinjaman ini dijamin dengan alat berat milik Perusahaan sejumlah Rp.51.562.500.000.

PT Bank Central Asia Tbk

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman kredit lokal dan *multi time loan revolving* dari PT Bank Central Asia sesuai dengan perjanjian kredit no. 02846/ALK-KOM/2018 tanggal 14 September 2018.

Sehubungan dengan pinjaman-pinjaman tersebut di atas, Perusahaan diwajibkan menjaga *financial covenant* sebagai berikut:

- Rasio EBITDA minimal 1 kali
- Current Ratio minimal 1 kali
- Debt to Equity Ratio minimal 1,5 kali

debtor's working capital needs and to guarantee bidding, advance payments, performance and maintenance, debtor contracts in accordance with deed Number C-27.HT.03.02-Th.2001 dated October 19, 2018.

The agreement is guaranteed in accordance Fiduciary Guarantee on Receivable Agreement No. 38, Pledge Accounts Agreement No. 41 and 42 dated October 19, 2016 Notary Veronica Nataadmadja, S.H., Jakarta.

The company has paid off all of its debts in 2018.

Subsidiary

PT Bank Index Selindo

The Company and Bank Index signed a Banking Facility in the form of a Committed Term Loan Facility (TL Facility) in the amount Rp3,820,657,650 with a Credit Approval No.007 / SPK-STR / V1 / 2018 with allotment of funding 5 Unit Vibrator Roller Sakai.

PT Bank DBS Indonesia

The Company obtained a committed term loan 2 facility from PT Bank DBS Indonesia accordance to deed of amendment to the banking facility agreement no. 128 dated January 23, 2017.

The loan agreement also includes certain covenants as follows:

- *Change the composition of shareholders*
- *Change the type of business*
- *Binding themselves as guarantor to third parties*

This loan is collateralized by the Company's heavy equipment amounting to Rp.154,687,500,000.

PT Bank Central Asia Tbk

The Company obtained credit investment and multi time loan revolving from PT Bank Central Asia accordy to credit agreement no. 02846/ALK-KOM/2018 dated September 14, 2018.

In connection with the loans mentioned above, the Company is required to maintain financial covenants as follows:

- *EBITDA ratio of at least 1 time*
- *Current ratio at least 1 time*
- *Debt to Equity Ratio is at least 1.5 times*

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

24. MODAL SAHAM

Berdasarkan akta Keputusan Sirkular Pemegang Saham No. 11 tanggal 17 Juli 2017 Notaris Ilmiawan Dekrit S, S.H., M.H., modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp.2.400.000.000.000 yang terbagi atas 2.400.000 saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per lembar saham.

Berdasarkan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 27 tertanggal 14 Agustus 2017, para pemegang saham menyetujui perubahan nilai nominal per saham atas saham Perusahaan dari nilai nominal per saham sebesar Rp.1.000.000 menjadi nilai nominal per saham sebesar Rp.100 dan mengeluarkan saham dalam simpanan sebanyak 4.239.330.000 lembar saham baru yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Perdana Saham Perusahaan (*Initial Public Offering*) dengan nilai nominal Rp.100.

Saham Perusahaan ditawarkan perdana kepada masyarakat dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Nopember 2017 sejumlah 2.351.221.000 saham dengan nilai nominal Rp.100 per saham. Sesuai dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-442/D.04/2017 tanggal 16 Nopember 2017 seluruh saham ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan sejumlah 10.224.271.000 saham.

Komposisi pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Total saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah/ Amount	Shareholders
PT PP (Persero) Tbk. Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan Masyarakat	7.871.480.000 1.570.000 2.351.221.000	76,99% 0,01% 23,00%	787.148.000.000 157.000.000 235.122.100.000	PT PP (Persero) Tbk. Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan Public
Jumlah	10.224.271.000	100%	1.022.427.100.000	Total

Berdasarkan Keputusan Sirkular Pemegang Saham yang dituangkan dalam Akta No. 11 tanggal 1 Februari 2018 dari Notaris Fathiah Helmi S.H., Para pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar ditempatkan dan disetor tersebut di atas.

24. SHARE CAPITAL

Based on the deed of Shareholders Circular Decree No. 11 dated July 17, 2017 Notary Ilmiawan decree S, SH, M.H., the Company's authorized capital amounts to Rp.2.400.000.000.000 divided into 2,400,000 shares with a nominal value Rp.1.000.000 per share.

Based on the Notarial Deed of Fathiah Helmi, S.H., No. 27 dated 14 August 2017, the shareholders approved the change in the par value per share of the Company's shares from par value per share amounting to Rp.1,000,000 to par value per share of Rp.100 and issued shares in deposits totaling 4,239,330,000 new shares which will be offered to the public through Initial Public Offering with nominal value of Rp.100.

The Company's shares of stock were initially offered to the public and listed on the Indonesia Stock Exchange on November 20, 2017 totaling 2,351,221,000 shares with a nominal value of Rp.100 per share. In accordance with the approval of the Financial Services Authority (OJK) No. S-442 / D.04 / 2017 November 16, 2017, all issued and fully paid shares of the Company amounted to 10,224,271,000 saham.

The composition of the Company's shareholders as at December 31, 2018 and 2017 follows:

Based Circular Shareholder Decision as set forth in the Deed. 11 dated February 1, 2018 of Notary Fathiah Helmi S.H., The shareholders agreed to increase the issued and paid up authorized capital.

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

25. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Akun ini merupakan selisih antara nilai nominal saham yang diterbitkan dalam rangka IPO pada 24 November 2017 dengan hasil yang diterima, setelah dikurangi biaya penerbitan saham sebagai berikut:

	<u>2018</u>
Agio saham	775.902.930.000
Beban emisi saham	(26.342.768.461)
Jumlah	<u>749.560.161.539</u>

25. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

This account represents the difference between the total par value of new shares issued in connection with the IPO conducted in November 24, 2017 and the related proceeds, after netting off the share issuance costs are as follows:

	<u>2017</u>	
	775.902.930.000	<i>Capital paid in excess of par value</i>
	(26.342.768.461)	<i>from initial public offering</i>
	<u>749.560.161.539</u>	<i>Share issuance costs</i>
		Total

26. PENDAPATAN USAHA

	<u>2018</u>
Konstruksi	2.483.682.091.526
Persewaan Peralatan	382.538.889.515
Ready Mix	185.355.020.028
Jumlah	<u>3.051.576.001.069</u>

26. REVENUE

	<u>2017</u>	
	1.412.258.373.284	<i>Construction</i>
	240.703.869.307	<i>Equipment Rental</i>
	163.350.454.383	<i>Ready Mix</i>
	<u>1.816.312.696.974</u>	Total

Pada tahun 2018 dan 2017 penjualan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan pada PT PP (Persero) Tbk sebesar Rp.674.546.896.719 dan Rp.186.172.051.440.

In 2018 and 2017 sales exceeding 10% of total sales of PT PP (Persero) Tbk, amounting to Rp.674.546.896.719 and Rp.186,172,051,440.

27. HARGA POKOK PENDAPATAN

	<u>2018</u>
Konstruksi	
Upah	491.512.174.859
Bahan	944.944.905.891
Overhead	155.996.712.810
Penyusutan	179.827.106.387
Alat	149.392.505.510
Jumlah Pekerjaan Sipil	<u>1.921.673.405.457</u>
Persewaan Peralatan	
Upah	38.803.300.131
Bahan	107.586.659.501
Overhead	11.170.737.936
Penyusutan	57.417.447.942
Alat	33.291.673.812
Jumlah Persewaan Peralatan	<u>248.269.819.322</u>
Ready Mix	
Upah	5.026.242.329
Bahan	85.026.991.706
Overhead	9.195.651.988
Penyusutan	23.351.344.983
Alat	15.716.247.335
Jumlah Ready Mix	<u>138.316.478.341</u>
Jumlah Harga Pokok Pendapatan	<u>2.308.259.703.120</u>

27. COST OF REVENUES

	<u>2017</u>	
	231.932.386.604	<i>Construction</i>
	481.652.672.252	<i>Wages</i>
	81.969.404.802	<i>Material</i>
	108.850.127.209	<i>Overhead</i>
	161.151.879.772	<i>Depreciation</i>
	<u>1.065.556.470.639</u>	<i>Equipment</i>
		Total Civil Works
		<i>Equipment Rental</i>
	11.659.105.707	<i>Wages</i>
	47.356.216.548	<i>Material</i>
	5.019.164.506	<i>Overhead</i>
	75.364.054.374	<i>Depreciation</i>
	42.213.694.491	<i>Equipment</i>
	<u>181.612.235.626</u>	Total Equipment Rental
		<i>Ready Mix</i>
	3.526.748.615	<i>Wages</i>
	93.910.424.326	<i>Material</i>
	10.098.478.932	<i>Overhead</i>
	9.582.857.332	<i>Depreciation</i>
	6.130.778.042	<i>Equipment</i>
	<u>123.249.287.247</u>	Total Ready Mix
	<u>1.370.417.993.512</u>	Total Cost of Revenues

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

Tidak terdapat pembelian dari satu pemasok yang melebihi 10% dari jumlah pembelian.

There were no purchases exceeding 10% of the total cost of revenue paid from a single supplier.

28. BEBAN USAHA

28. OPERATING EXPENSE

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Biaya Pegawai	48.211.461.094	31.430.652.737	<i>Employment Expenses</i>
Biaya Umum	16.419.132.280	12.802.996.472	<i>Other Expenses</i>
Biaya Penyusutan Gedung	6.061.145.601	1.291.595.703	<i>Depreciation Building</i>
Biaya Pemasaran	220.127.825	-	<i>Marketing</i>
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	12.119.482.835	10.771.716.151	<i>Amortization of Intangible Assets</i>
Biaya Rumah Tangga	-	732.671.606	<i>Household Cost</i>
Jumlah	83.031.349.635	57.029.632.669	Total

29. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

29. OTHER INCOME (EXPENSES)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Pendapatan Lain-lain			Other Income
Pendapatan Diluar Usaha	30.656.395.853	10.303.513.326	<i>Revenue Beyond Business</i>
Bagi Hasil Murabahah	23.984.247.409	-	<i>Murabahah Profit Sharing</i>
Pendapatan Bunga Deposito - Net	16.812.521.459	-	<i>Deposito Interest Income-Net</i>
Pendapatan Jasa Giro - Net	1.555.726.290	5.001.956.642	<i>Revenue from Current Account-Net</i>
Jumlah Pendapatan Lain-lain	73.008.891.011	15.305.469.968	Total Other Income
Beban Lain-lain			Other Expense
Beban Bunga	167.209.805.153	89.731.603.421	<i>Interest Expense</i>
Beban Administrasi Bank	28.757.968.648	5.591.500.393	<i>Bank Administration Expense</i>
Beban Diluar Usaha	5.731.598.584	2.840.570.256	<i>Expense Beyond Business</i>
Jumlah Beban Lain-lain	(201.699.372.385)	(98.163.674.070)	Total Other Expense
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain	(128.690.481.374)	(82.858.204.102)	Total Other Income (Expense)

30. AKUISISI ENTITAS ANAK

30. ACQUISITION OF A SUBSIDIARY

Pada bulan Juni 2017, Perusahaan mengakuisisi 51% saham PT Lancarjaya Mandiri Abadi melalui pembelian 331.500 lembar saham milik Tuan Afandi dengan biaya perolehan Rp.798.000.000.000. Perusahaan mengakui/mencatat aset dan liabilitas LMA dengan menggunakan nilai wajar aset bersih pada tanggal 30 Juni 2017.

On December 2017, the Company, acquired 51% ownership of PT Lancarjaya Mandiri Abadi through the purchase of 331,500 shares from Mr. Afandi with acquisition cost of Rp.798,000,000,000. The Company recognized the assets and liabilities of LMA at fair values as of June 30, 2017.

Tujuan akuisisi ini adalah untuk memperluas cakupan bisnis Perusahaan dalam industri konstruksi.

The objective of the acquisition is to expand the Company's scope of business in the construction industry.

Tabel berikut ini merangkum imbalan yang dibayar dan jumlah aset yang diperoleh dan liabilitas yang diakui pada tanggal perolehan.

The following table summarises the consideration paid and the amounts of assets acquired and liabilities recognised at acquisition date.

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

Harga perolehan	<u>798.000.000.000</u>	Purchase consideration
Alokasi harga perolehan		Purchase price allocation
- Aset lancar	623.453.178.231	Current assets -
- Aset tetap	764.000.668.015	Property and equipments -
- Aset distribusi revaluasi goodwill	122.496.945.627	Asset distribution revaluation goodwill -
- Aset tidak berwujud	22.104.373.598	Intangible assets -
- Goodwill	246.863.514.371	Goodwill -
- Liabilitas lancar	(454.694.566.504)	Current liabilities -
- Liabilitas sewa guna usaha	(131.871.808.691)	Finance lease obligation -
- Liabilitas imbalan kerja	(3.759.693.787)	Employee benefit obligation -
- Kepentingan nonpengendali	<u>(390.592.610.860)</u>	Non-controlling interest -
Nilai wajar dari aset bersih diperoleh	<u>798.000.000.000</u>	Fair value of net assets acquired

Saldo *Goodwill* sebesar Rp.391.464.833.596 yang timbul dari akuisisi LMA di atas terutama dari potensi kenaikan nilai wajar dari sinergi pekerjaan konstruksi/sipil kepada pelanggan. *Goodwill* tidak diamortisasi namun diuji untuk penurunan nilai setiap tahun. Perusahaan akan melakukan penilaian *Goodwill* pada akhir tahun.

Goodwill amounted to Rp.391,464,833,596 arises from the above acquisition principally because of the potential increase in the fair value of synergy of construction/civil work to customers. *Goodwill* is not amortized but will be tested for impairment annually. The Company will conduct a *Goodwill* assessment at the end of the year.

Harga perolehan goodwill telah dilakukan penilaian kembali oleh KJPP Yanuar Bey & Rekan dalam laporannya No.Y&R/BV/18/0202 tanggal 9 Februari 2018. Berdasarkan laporan tersebut nilai goodwill per 31 Desember 2017 yang dapat diatribusikan ke aset tetap sebesar Rp.122.496.945.627 dan telah dibebankan penyusutannya sebesar Rp.7.436.498.890 di 2017 dan sebesar Rp.14.872.997.780 di 2018.

The cost of goodwill has been revalued by KJPP Yanuar Bey & Rekan in its report No.Y & R / BV / 18/0202 dated February 9, 2018. Based on the report, goodwill as of December 31, 2017 attributable to property and equipment amounting to Rp.122,496,945,627 and depreciation has been charged of Rp. 7,436,498,890 in 2017 and amounting to Rp.14,872,997,780 in 2018.

Sedangkan yang dapat diatribusikan ke aset tak berwujud, sebagai berikut:

While attributable to intangible assets, as follows:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Aset tidak berwujud	11.273.230.535	22.104.373.598	Intangible assets
Amortisasi	<u>(11.273.230.535)</u>	<u>(10.831.143.063)</u>	Amortization
Jumlah	-	11.273.230.535	Total

Goodwill tersebut tidak diharapkan dapat dikurangkan untuk tujuan pelaporan pajak.

Goodwill is not expected to be deductible for tax purposes.

Estimasi nilai wajar ditetapkan dengan metode nilai pasar dan pendapatan.

The fair value was estimated by applying a market approach and income approach.

Tidak terdapat aset atau liabilitas kontinjensi.

There are no contingent assets or liabilities.

Aset lancar dan aset tetap telah dicadangkan dan disusutkan dengan nilai yang cukup.

Current assets and property and equipments have been allowed and depreciated with sufficient value.

Biaya terkait akuisisi sebesar Rp.2.237.467.577 tercatat pada biaya usaha pada akun biaya pengembangan usaha.

Cost related to acquisition amounting to Rp.2,237,467,577 was recorded as business development cost in operating expenses.

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

**31. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS
OPERASI, INVESTASI DAN PENDANAAN NON
KAS**

**31. SUPPLEMENTAL DISCLOSURES ON NON CASH
OPERATING, INVESTING AND FINANCING
ACTIVITIES**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Peningkatan modal ditempatkan dan disetor	-	67.000.000.000	<i>Additional paid-in capital Increase in plant, property and equipment through incurrence of</i>
Penambahan aset tetap melalui utang sewa pembiayaan	333.156.302.139	-	<i>lease liabilities</i>

32. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

32. RELATED PARTY TRANSACTIONS

Perusahaan melakukan transaksi usaha dan lainnya dengan pihak berelasi. Transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The Company has engaged in trade and other transactions with related parties. Significant transactions and balances with related parties are as follows:

a. Sifat hubungan dan transaksi

a. Nature of Relationship and transaction

<u>Pihak – pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Sifat dari hubungan/ Nature of relation</u>	<u>Sifat dari transaksi/ Nature of transaction</u>
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.	Pemegang saham pengendali langsung Perusahaan, pemberi kerja/ <i>Direct controlling shareholder of the Company, project owner</i>	Pembayaran dividen dan pinjaman / <i>Dividend payment and loan</i> Pendapatan Usaha / Revenue Piutang Usaha / <i>Accounts receivable</i> Piutang Retensi / <i>Retention receivable</i> Tagihan Bruto / <i>Gross contractual</i> Uang Muka Pemberi Kerja / <i>Advances from Project Owners</i>
PT Pembangunan Perumahan Properti Tbk.	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Piutang Usaha / <i>Accounts receivable</i> Piutang Retensi / <i>Retention Receivables</i> Tagihan Bruto Pemberi Kerja / <i>Gross Receivables From Project Owners</i> Uang Muka Pemberi Kerja / <i>Advances from Project Owners</i> Pendapatan Usaha / Revenue
PT Pembangunan Perumahan Urban	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Piutang Usaha / <i>Accounts receivable</i> Piutang Retensi / <i>Retention receivable</i> Tagihan Bruto Pemberi Kerja / <i>Gross</i> Pendapatan Usaha / Revenue
PT Pembangunan Perumahan Infrastruktur	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Piutang Usaha/ <i>Accounts receivable</i> Pendapatan Usaha/ Revenue
PT Pembangunan Perumahan Energy	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Piutang Usaha/ <i>Accounts receivable</i> Pendapatan Usaha/ Revenue
Dewan Komisaris dan Direksi/ <i>Board of Commisisoners and Directors</i>	Personil manajemen kunci/ <i>Key management personnel</i>	Kompensasi dan remunerasi/ <i>Compensation and remuneration</i>

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

b. Saldo

	2018	
	Jumlah/ Amount	%
Aset:		
Piutang usaha	364.058.109.643	5,82%
Piutang retensi	116.845.728.431	1,87%
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	661.061.660.531	10,57%
Piutang Lain-lain	50.000.000	0,001%
Liabilitas:		
Utang lain-lain	106.034.385.162	3,07%
Uang muka pemberi Kerja - Berelasi	8.792.057.502	0,25%
Remunerasi	6.262.289.427	0,18%
Pendapatan Usaha	1.603.600.398.034	52,55%

b. Balances

	2017	
	Jumlah/ Amount	%
Asets:		
Trade accounts receivable	133.494.401.799	2,60%
Retention receivable	19.335.017.660	0,38%
Gross receivable from project owner	578.486.778.036	11,29%
Other Receivable	60.366.796	0,001%
Liabilities:		
Other payable	6.043.378.223	0,23%
Unearned revenue - Relate	34.434.880.452	1,28%
Remuneration	5.114.120.087	0,19%
Revenue	939.204.619.198	51,71%

Perusahaan mempunyai komitmen untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi, diantaranya adalah sebagai berikut :

The Company has commitments to carry out the following construction work :

Nama Proyek / Name of Project	Nilai Kontrak / Value of Contract	Pemberi Kerja / Owner Project	Tenggat Waktu / Mulai / Start	Period Selesai / End
Proyek Pengupasan Lapisan Tanah Penutup dan Pengangkutan Batubara	283.200.000.000	PT Bumi Petangis	30-Dec-18	31-Dec-19
Proyek Bekisting Amarnya View Semarang	8.307.962.400	PT PP Urban	24-Dec-16	22-Jul-17
Proyek Bekisting Verde 2 Condominium	30.393.550.000	PT Total Bangun Persada Tbk	17-Nov-16	30-Apr-18
Proyek Bekisting Aeon Used Mix Sentul	78.749.778.775	PT PP Persero, Tbk	27-Feb-17	27-Feb-18
Proyek Batching Plant Tol Trans	199.225.174.736	PT PP Persero, Tbk	8-Mar-16	18-Dec-17
Proyek Batching Plant GKL (Tower Emerald)	2.379.925.000	PT PP Persero, Tbk	23-Jun-16	23-Mar-17
Proyek Batching Plant GKL (Tower Barclay)	2.352.221.000	PT PP Persero, Tbk	2-May-16	23-Mar-17
Proyek Batching Plant Mkt 5	47.940.350.000	PT PP Persero, Tbk	6-Dec-16	31-May-17
Proyek Tol Trans Sumatera	360.164.898.000	PT HK - Tol Trans Sumatera	8-Mar-16	29-Oct-17
Proyek Tol Pandaan - Malang	615.165.371.807	PT PP - JASA MARGA	16-Nov-16	31-Oct-18
Proyek Tol Manado - Bitung	730.863.912.975	PT Jasa marga Manado Bitung	28-Dec-16	27-Dec-18
Proyek Bendung Way Sekampung	551.754.100.000	PT PU (Pekerjaan Umum)	1-Dec-16	6-Sep-20
Proyek Pengendalian Lahar Sinabung	126.629.029.921	PT PU (Pekerjaan Umum)	27-Mar-17	22-Nov-19
Proyek Bendung Leuwi Keris	456.037.590.896	PT PU (Pekerjaan Umum)	27-Mar-17	1-Mar-21
Proyek Banjir Kanal Jakarta – Sunter (Jedi)	72.824.791.300	PT PP Persero, Tbk	16-Jul-17	25-May-18
Proyek Terminal Lrt Koridor 1	36.348.993.517	PT PP Persero, Tbk	17-Jul-17	18-Nov-17
Proyek Soetta Terminal 3 Sec 2	205.000.000.000	Angkasa Pura II Persero	28-Nov-17	11-Jan-19
Proyek Pollux Batam	56.000.000.000	PT PP Properti, Tbk	14-Nov-17	31-Oct-18
Gedung ASEC	7.347.843.000	PT PP Persero, Tbk	14-Mar-18	31-Jul-18
Executive Port Merak	5.232.437.000	PT PP Persero, Tbk	17-Feb-18	30-Apr-19
Pondok Indah Mall (PIM) 3	24.601.416.000	PT Total Bangun	1-Apr-18	30-Sep-19

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

Akses Road PLTA Cisokan	122.133.609.800	Persada Tbk		
PLTD Senayan	12.150.000.000	PT PP Persero, Tbk	2-May-18	2-Jan-19
PLTD Bangkanai	66.200.000.000	PT PP Persero, Tbk	1-Jul-18	1-Dec-18
Serang Panimbang	66.551.481.400	PT PP Persero, Tbk	1-Aug-18	31-May-19
BP Takengon	53.005.668.110	PT PP Persero, Tbk	16-Jul-18	16-Jul-19
Pengendalian Banjir sungai Asahan	26.163.200.000	PP - KNS Hyundai E&C	7-Feb-18	7-Feb-19
Pek. Jasa Pengangkutan Batu Bara (coal hauling)	1.586.025.000.000	PT Sriwijaya Bara Logistik	8-Feb-17	7-Feb-22
Pek. Jasa Pengangkutan Batu Bara (coal hauling)	761.292.000.000	PT Bara Sentosa Lestari	27-Nov-17	26-Nov-20
Pek. Jasa Pengangkutan Batu Bara (coal hauling)	1.020.600.000.000	PT Hauling Triyani	2-Jan-18	1-Jan-21
Proyek Apartemen Begawan Malang	8.184.579.260	PT PP (Persero) Tbk	2-Jan-19	1-Jul-19
Proyek Apartemen Alton	22.554.956.402	PT PP (Persero) Tbk	1-Nov-18	20-Feb-20
Proyek Apartemen Amatha View 2	9.574.563.658	PT PP (Persero) Tbk	1-Nov-18	29-Jun-19
Proyek Apartemen Vasanta Innopark	26.082.600.610	PT PP (Persero) Tbk	31-Dec-18	20-Jan-20
Proyek Office Tower Olive GDL	17.185.059.320	PT PP (Persero) Tbk	28-Oct-18	26-Jul-19
Proyek Bandara Syamsudin Noor	20.651.345.000	KSO PP-WG	19-Nov-18	9-Jan-19
Proyek GKL Tower Isabella	5.805.679.970	PT PP (Persero) Tbk	27-Oct-18	25-Apr-19
Proyek Backfilling NIPA	7.489.602.340	PT PP (Persero) Tbk	0-Jan-00	14-Dec-18
Proyek Pemancangan NIPA	36.328.011.500	PT PP (Persero) Tbk	0-Jan-00	5-Jan-19
Proyek Batching Plant NIPA	85.224.700.000	PT PP (Persero) Tbk	1-Dec-18	1-Dec-19
Proyek JaLan Tol Dumai Pekanbaru	7.172.000.000	PT Hutama Karya Infrastruktur	21-Nov-18	15-Jan-19
Proyek Integrated Warehouse SGT	3.860.695.647	PT Total Bangun Persada	1-Oct-18	1-Feb-19
Proyek Bandara Kulon Progo (Landside)	44.710.898.100	PP KSO	21-Oct-18	3-Mar-19
Proyek Bandara Kulon Progo (Airside)	51.936.267.900	PP KSO	30-Oct-18	21-Apr-19
Proyek Grand Sungkono Lagoon	39.949.757.100	PT PP Properti Tbk	1-Nov-18	30-Jun-19
Jumlah	7.718.151.022.444			

33. LABA DASAR PER SAHAM

Laba dasar per saham dihitung dengan membagi laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah saham rata-rata tertimbang biasa yang beredar sepanjang tahun.

	2018	2017
Laba bersih kepada pemilik entitas induk	326.424.741.945	188.300.612.372
Jumlah rata-rata saham biasa yang beredar	10.224.271.000	4.576.393.614
Laba dasar per saham	32	41

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, tidak ada efek yang berpotensi menjadi saham biasa. Oleh karena itu, laba per saham dilusian sama dengan laba per saham dasar.

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas Perusahaan rentan terhadap berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko tingkat bunga dan risiko harga), risiko kredit, dan risiko likuiditas.

33. BASIC EARNINGS PER SHARE

Basic earning per share is calculated by dividing the profit attributable to the owners of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

	2018	2017
Net profit attributable to owners of the parent	326.424.741.945	188.300.612.372
The average number of ordinary shares outstanding	10.224.271.000	4.576.393.614
Basic earning per share	32	41

As at December 31, 2018 and 2017, there were no existing instruments which could result in the issue of further ordinary shares. Therefore, diluted earning per share is equivalent to basic earning per share.

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Company's activities are exposed to a variety of financial risks: market risk (including, interest rate risk, and price risk), credit risk and liquidity risk.

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/*Continued*)

Program manajemen risiko Perusahaan secara keseluruhan dipusatkan pada pasar keuangan yang tidak dapat diprediksi dan Perusahaan berusaha untuk memperkecil efek yang berpotensi merugikan kinerja keuangan Perusahaan.

Manajemen risiko dijalankan oleh Direksi Perusahaan. Direksi melakukan identifikasi, evaluasi, dan lindung nilai terhadap risiko-risiko keuangan, apabila dianggap perlu. Direksi bertugas menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko Perusahaan secara keseluruhan serta kebijakan pada area tertentu seperti risiko nilai mata uang, risiko suku bunga, risiko kredit, penggunaan instrumen keuangan derivatif dan instrumen keuangan non-derivatif, dan investasi atas kelebihan likuiditas.

a) Faktor-faktor risiko keuangan

1) Risiko pasar

Kebijakan manajemen risiko Perusahaan dimaksudkan untuk mengurangi dampak keuangan dari fluktuasi tingkat bunga serta meminimalisir potensi kerugian yang dapat berdampak pada risiko keuangan Perusahaan.

Perusahaan tidak terdampak terhadap risiko tingkat bunga yang berasal dari dampak perubahan tingkat bunga yang dimiliki oleh aset dan liabilitas tertentu yang mengandung komponen tingkat bunga.

Risiko tingkat suku bunga

Risiko arus kas tingkat bunga adalah risiko akibat perubahan tingkat bunga pasar yang mempengaruhi arus kas yang terkait dengan instrumen keuangan dengan tingkat bunga variabel.

Risiko tingkat suku bunga Perusahaan timbul dari pinjaman. Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat bunga mengambang mengekspos Perusahaan terhadap risiko suku bunga arus kas. Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat suku bunga tetap mengekspos Perusahaan terhadap risiko nilai wajar suku bunga. Risiko tingkat suku bunga dari kas, piutang non-usaha, piutang retensi, jumlah kontraktual tagihan bruto pemberi kerja, dan proyek dalam pelaksanaan tidak signifikan.

The Company's overall risk management programme focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimise potential adverse effects on the Company's financial performance.

Risk management is carried out by the Company's Board of Directors. The Board of Directors identifies, evaluates and hedges financial risks, where considered appropriate. The Board of Directors has the responsibility to determine the basic principles of the Company's risk management as well as principles covering specific areas, such as currency risk, interest rate risk, credit risk, the use of derivative financial instruments and nonderivative financial instruments and the investment of excess liquidity

a) Financial risk factors

1) Market risk

The Company's risk management policies are designed to mitigate the financial impact of fluctuations in interest rates and to minimise potential adverse effects on the Company's financial risk.

The Company is exposed to interest rate risk through the impact of rate changes on interest bearing assets and liabilities.

Interest rate risk

Cash flow interest rate risk is the risk that changes in market interest rates will impact cash flows arising from variable rate financial instruments.

The Company's interest rate risk primarily arises from its borrowings. Borrowings issued at floating rates expose the Company to cash flow interest rate risk. Borrowings issued at fixed rates expose the Company to fair value interest rate risk. The interest rate risk from cash, non-trade accounts receivables, retention receivables, gross contractual amount due from customers and project under construction is not significant.

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

Profil pinjaman Perusahaan adalah sebagai berikut:

The Company's borrowings profile is as follows:

	31 Desember / December 31, 2018		31 Desember / December 31, 2017		
	Rata-rata tertimbang tingkat suku bunga/ Weighted average interest rate	Saldo/Balance Dalam juta (In Millions)	Rata-rata tertimbang tingkat suku bunga/ Weighted average interest rate	Saldo/Balance	
Pinjaman bank jangka pendek	9,54%	196.593	10,25%	255.000	Short-term bank loans
Pinjaman bank jangka Panjang	9%	1.359.676	10,%	995.964	Long-term bank loans
Liabilitas sewa pembiayaan	12%	474.132	12,5%	323.933	Finance lease liabilities
Eksposure neto atas risiko arus kas tingkat suku bunga		2.030.400		1.574.898	Net exposure to cash flow interest rate risk

Pada tanggal 31 Desember 2018, jika tingkat bunga atas pinjaman dengan suku bunga mengambang lebih tinggi/rendah 100 basis poin dan variabel lain dianggap tetap, laba setelah pajak untuk tahun berjalan akan lebih rendah/tinggi sebesar Rp.20.304 Juta (2017: Rp.15.749 Juta).

As at December 31, 2018, if interest rates on floating rate borrowings had been 100 basis points higher/lower with all other variables held constant, profit after tax for the year would have been lower/higher by Rp.20,304 million (2017: Rp.15,749 million).

2) Risiko kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan.

Risiko kredit Perusahaan terutama melekat pada rekening bank, deposito berjangka, piutang usaha dan lain-lain. Perusahaan menempatkan saldo bank dan deposito berjangka pada institusi keuangan yang layak serta terpercaya.

Perusahaan memiliki kebijakan untuk memperoleh pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dengan meminimalkan kerugian yang terjadi karena eksposur risiko kredit. Karena itu, Perusahaan memiliki kebijakan untuk memastikan transaksi dilakukan dengan pelanggan yang memiliki sejarah dan reputasi kredit yang baik. Manajemen melakukan pengawasan secara terus menerus untuk mengurangi eksposur risiko kredit.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian mencerminkan eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit.

2) Market risk

Credit risk refers to the risk that a counterparty will default on its contractual obligation resulting in a loss to the Company.

The credit risk of the Company is primarily attributed to its cash in banks, time deposits, trade and other receivables. The Company places their bank balances and time deposits to the credit worthy financial institutions.

The Company has established policies to obtain sustainable revenue growth by minimizing losses due to credit risk exposure. Accordingly, the Company have established a policy to ensure that transactions are made with customers who has good credit reputation. Management conducts ongoing supervision to reduce credit risk exposure at reporting date.

The carrying amount of financial assets recorded in the consolidated financial statements, net of any allowance for losses represents the Company's exposure to credit risk.

(Lanjutan/Continued)

3) Risiko likuiditas

Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan antara lain dengan memantau profil jatuh tempo pinjaman dan sumber pendanaan, menjaga kecukupan kas, serta memastikan tersedianya pendanaan dari sejumlah fasilitas kredit yang mengikat, dan kesiapan untuk menjaga posisi pasar. Perusahaan mempertahankan kemampuannya untuk melakukan pembiayaan atas pinjaman yang dimiliki dengan cara mencari berbagai sumber fasilitas pembiayaan yang mengikat dari pemberi pinjaman yang handal serta terus memonitor perkiraan posisi kas dan utang bruto yang dimiliki Perusahaan dalam jangka pendek berdasarkan perkiraan arus kas. Selain itu, dilakukan proyeksi arus kas jangka panjang untuk membantu Perusahaan dalam merencanakan kebutuhan pendanaan dalam jangka panjang.

Perusahaan memonitor pergerakan perkiraan kebutuhan likuiditas untuk memastikan tersedianya kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional serta untuk senantiasa memelihara kelonggaran likuiditas Perusahaan terhadap fasilitas pinjaman yang belum digunakan, sehingga Perusahaan tidak melampaui batas pinjaman atau batasan-batasan untuk setiap fasilitas pinjaman yang diperoleh.

Tabel di bawah ini menganalisis liabilitas keuangan non-derivatif Perusahaan yang dikelompokkan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal pelaporan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel merupakan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

3) Liquidity risk

Purulent liquidity risk management includes managing the profile of borrowing maturities and funding sources, maintaining sufficient cash, and ensuring the availability of funding from an adequate amount of committed credit facilities and the ability to close out market positions. The Company's ability to fund its borrowing requirements is managed by maintaining diversified funding sources with adequate committed funding lines from high quality lenders and by monitoring rolling short-term forecasts of the Company's cash and gross debt on the basis of expected cash flows. In addition, long-term cash flows are projected to assist with the Company's longterm debt financing plans.

The Company monitors rolling forecasts of the liquidity requirements to ensure it has sufficient cash to meet operational needs while maintaining sufficient headroom on its unused committed borrowing facilities at all times so that the Company does not breach borrowing limits or covenants on any of its borrowing facilities.

The table below analyses the Company's non-derivative financial liabilities into relevant maturity grouping based on the remaining period at the reporting date to the contractual maturity dates. The amounts disclosed in the table are the contract undiscounted cash flows.

31 Desember /December 31, 2018 (dalam juta/in million Rupiah)					
Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	1-3 tahun/ 1-3 years	3-5 tahun/ 3-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Jumlah/ Total	
Pinjaman bank jangka pendek	196.593	-	-	196.593	Short-term bank loans
Pinjaman bank jangka panjang	-	1.359.676	-	1.359.676	Long-term bank loans
Liabilitas sewa pembiayaan	164.772	309.359	-	164.772	Financial lease liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	361.365	1.669.035	-	2.030.400	Total financial liabilities

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

31 Desember /December 31, 2017 (dalam juta/in million Rupiah)						
	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	1-3 tahun/ 1-3 years	3-5 tahun/ 3-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Jumlah/ Total	
Pinjaman bank jangka pendek	250.000	-	-	-	250.000	Short-term bank loans
Pinjaman bank jangka panjang	-	995.964	-	-	995.964	Long-term bank loans
Liabilitas sewa pembiayaan	50.007	309.359	-	-	323.933	Financial lease liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	300.007	1.269.891	-	-	1.574.898	Total financial liabilities

b) Manajemen permodalan

Tujuan Perusahaan dalam mengelola permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perusahaan guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Perusahaan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola struktur permodalan untuk memastikan struktur modal dan hasil pengembalian ke pemegang saham yang optimal, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan efisiensi modal Perusahaan, profitabilitas masa sekarang dan yang akan datang, proyeksi arus kas operasi, proyeksi pengeluaran barang modal dan proyeksi peluang investasi yang strategis. Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perusahaan menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi utang.

Perusahaan memonitor permodalan berdasarkan rasio *gearing* konsolidasian dan rasio laba yang disesuaikan terhadap bunga konsolidasian. Rasio *gearing* dihitung dengan membagi utang bersih dengan jumlah modal. Utang bersih dihitung dari jumlah pinjaman (termasuk pinjaman jangka pendek dan jangka panjang yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian) dikurangi kas dan setara kas. Jumlah modal dihitung dari "ekuitas" seperti yang ada pada laporan posisi keuangan konsolidasian ditambah utang.

b) Capital management

The Company's objectives in managing capital are to maintain the Company's ability to continue going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

The Company actively and regularly reviews and manages its capital structure to ensure optimal capital structure and shareholder returns, taking into consideration the future capital requirements and capital efficiency of the Company, prevailing and projected profitability, projected operating cash flows, projected capital expenditures and projected strategic investment opportunities. In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the amount of dividends paid to shareholders, issue new shares or sell assets to reduce debt.

The Company monitors capital on the basis of the Company's consolidated gearing ratio and consolidated interest cover. The gearing ratio is calculated as net debt divided by total capital. Net debt is calculated as total borrowings (including current and non-current borrowings as shown in the consolidated statement of financial position) less cash and cash equivalents. Total capital is calculated as "equity" as shown in the consolidated statement of financial position plus net debt.

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

Rasio pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

The ratios as at December 31, 2018 and December 31, 2017 are as follows:

	2018	2017	
*) Dalam juta			*) In million
Jumlah pinjaman	2.030.400	1.574.898	Total borrowings
Dikurangi:			Less:
Kas dan setara kas	(630.943)	(1.132.459)	Cash and cashequivalents
Liabilitas - bersih	1.840.373	442.439	Liabilities – net
Jumlah ekuitas	2.836.755	2.440.147	Total equity
Rasio utang terhadap modal	65%	18%	Net payable to equity ratio

c) Nilai wajar instrumen keuangan

Untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar pada tanggal pelaporan, pengukuran nilai wajarnya diungkapkan dengan tingkatan hirarki pengukuran nilai wajar sebagai berikut:

- 1) Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik ("harga yang tersedia dari pasar yang aktif") (Tingkat 1).
- 2) Input selain harga kuotasian dalam pasar aktif yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung ("transaksi pasar yang dapat diobservasi") (Tingkat 2).
- 3) Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi ("transaksi pasar yang tidak dapat diobservasi") (Tingkat 3).

Aset dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan nilai wajarnya adalah sebagai berikut:

c) Fair values of financial instruments

For financial instruments that are measured at fair value at the reporting date, the corresponding fair value measurements are disclosed by level of the following fair value measurement hierarchy:

- 1) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities ("quoted price in active markets") (Level 1).
- 2) Inputs other than quoted prices in active markets that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly ("observable current market transactions") (Level 2).
- 3) Inputs for the asset and liability that are not based on observable market data ("non-observable current market transactions") (Level 3).

Financial assets and liabilities which are recorded based on fair value are as follows:

	2018				
	Tingkat/ Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat/ Level 3	Jumlah/ Total	
Aset keuangan	-	-	-	-	Financial Asset
Liabilitas Keuangan					Long term financial
Jangka Panjang	1.669.035	-	-	1.669.035	Liabilities
Jumlah	1.669.035	-	-	1.669.035	Total
	2017				
	Tingkat/ Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat/ Level 3	Jumlah/ Total	
Aset keuangan	-	-	-	-	Financial Asset
Liabilitas Keuangan					Long term financial
Jangka Panjang	1.269.891	-	-	1.269.891	Liabilities
Jumlah	1.269.891	-	-	1.269.891	Total

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/*Continued*)

Jumlah tercatat aset dan liabilitas keuangan lainnya kurang lebih sama dengan nilai wajarnya.

The carrying amount of other financial assets and liabilities approximates their fair value.

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan dalam pasar aktif (misalnya efek yang tersedia untuk dijual) ditentukan berdasarkan harga pasar yang dikutip pada tanggal pelaporan. Suatu pasar dianggap aktif apabila informasi mengenai harga kuotasi dapat dengan mudah dan secara berkala tersedia dari suatu bursa, pedagang efek, atau broker, kelompok penilai harga pasar industri tertentu, regulator dan harga-harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan reguler pada tingkat yang wajar. Harga pasar yang dikutip untuk aset keuangan yang dimiliki Perusahaan adalah harga penawaran sekarang. Instrumen-instrumen tersebut termasuk dalam Tingkat 1. Instrumen yang termasuk dalam Tingkat 1 umumnya meliputi investasi ekuitas pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") yang diklasifikasikan sebagai surat berharga yang dimiliki untuk diperdagangkan atau tersedia untuk dijual.

The fair value of financial instruments traded in active markets (such as available-for-sale securities) is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, or broker, industry Company pricing service, regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's lengths basis. The quoted market price used for financial assets held by the Company is the current bid price. These instruments are included in Level 1. Instruments included in Level 1 comprise primarily Indonesia Stock Exchange ("IDX") equity investments classified as held-for-trading securities or available-for-sale

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan pada pasar aktif (misalnya *derivatif over-the-counter*) ditentukan dengan teknik penilaian.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market (for example, over-the-counter derivatives) is determined by using valuation techniques.

Teknik-teknik penilaian tersebut memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi apabila tersedia dan sedapat mungkin meminimalisir penggunaan estimasi yang bersifat spesifik dari entitas. Jika seluruh input yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan dapat diobservasi, instrumen tersebut termasuk dalam Tingkat 2.

These valuation techniques maximise the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on entity's specific estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi, instrumen ini termasuk dalam Tingkat 3.

If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in Level 3

35. SEGMENT OPERASI

Manajemen memonitor hasil operasi segmen bisnis untuk tujuan pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dinilai berdasarkan laba atau rugi operasi yang diukur dengan cara yang konsisten dengan laba atau rugi usaha dalam laporan keuangan konsolidasian.

35. OPERATING SEGMENT

Management monitors the operating results of its business segments for the purpose of decision making about resource allocation and performance assessment. Segment performance is evaluated based on operating profit or loss and is measured consistently with the operating profit or loss in the consolidated financial statements.

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN
 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
 TANGGAL TERSEBUT
 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
 AND ITS SUBSIDIARY
 NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
 STATEMENTS
 DECEMBER 31, 2018 AND 2017
 AND FOR THE YEARS THEN ENDED

(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

(Lanjutan/Continued)

a. **Aktivitas**

Bisnis utama Perusahaan dibagi menjadi tiga yaitu pekerjaan sipil, sewa alat berat, batching plant.

Informasi segmen yang diberikan kepada pengambil keputusan operasional utama untuk setiap segmen dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017.

a. **Activities**

The Company's main business is divided into civil work, heavy equipment rental, and batching plant.

The segment information provided to the chief operating decision-maker for the reportable segments as at and for seven month ended December 31, 2018 and for the year ended 31 December 2017.

31 Desember 2018 / December 31, 2018

Segmen Usaha / Business Segment

Uraian / Description	Sewa Alat / Rent Equipment	Ready Mixed	Konstruksi / Construction	Jumlah / Total
Pihak Berelasi / Related Parties	102.302.145.561	158.207.028.678	1.343.091.223.795	1.603.600.398.034
Pihak Ketiga / Third Parties	280.236.743.955	27.147.991.350	1.140.590.867.730	1.447.975.603.035
Jumlah / Total	382.538.889.515	185.355.020.028	2.483.682.091.526	3.051.576.001.069

31 Desember 2018 / December 31, 2018

Transaksi Berelasi - Pendapatan Usaha /
Related Transactions - Operating Revenues

Uraian / Description	Sewa Alat / Rent Equipment	Ready Mixed	Konstruksi / Construction	Jumlah / Total
PT PP (Persero) Tbk	98.299.516.990	158.207.028.678	1.313.762.270.175	1.570.268.815.843
PT PP Properti Tbk	2.556.000.000	-	29.328.953.620	31.884.953.620
PT PP Urban	448.178.571	-	-	448.178.571
PT PP Infrastruktur	336.450.000	-	-	336.450.000
PT PP Energi	662.000.000	-	-	662.000.000
Jumlah / Total	102.302.145.561	158.207.028.678	1.343.091.223.795	1.603.600.398.034

31 Desember 2017 / December 31, 2017

Segmen Usaha / Business Segment

Uraian / Description	Sewa Alat / Rent Equipment	Ready Mixed	Konstruksi / Construction	Jumlah / Total
Pihak Berelasi / Related Parties	130.057.184.242	161.640.409.383	647.507.025.573	939.204.619.198
Pihak Ketiga / Third Parties	110.646.685.064	1.710.045.000	764.751.347.711	877.108.077.775
Jumlah / Total	240.703.869.306	163.350.454.383	1.412.258.373.541	1.816.312.696.973

31 Desember 2017 / December 31, 2017

Transaksi Berelasi - Pendapatan Usaha /
Related Transactions - Operating Revenues

Uraian / Description	Sewa Alat / Rent Equipment	Ready Mixed	Konstruksi / Construction	Jumlah / Total
PT PP (Persero) Tbk	128.439.796.242	157.659.326.383	643.165.713.734	929.264.836.359
PT PP Properti Tbk	450.000.000	3.981.083.000	-	4.431.083.000
PT PP Urban	1.167.388.000	-	4.341.311.839	5.508.699.839
PT PP Infrastruktur	-	-	-	-
PT PP Energi	-	-	-	-
Jumlah / Total	130.057.184.242	161.640.409.383	647.507.025.573	939.204.619.198

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/Continued)

b. Segmen geografis

Perusahaan berdomisili dan beroperasi diseluruh wilayah Indonesia dan tidak ada pendapatan yang diperoleh dari pelanggan eksternal luar negeri

Berikut adalah segmen operasi berdasarkan pasar geografis:

b. Geographical segments

The Company is domiciled and operates throughout the territory of Indonesia and no revenue is obtained from external customers abroad.

The following are operating segment based on geographical market:

	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
Aset			Asset
Sumatera	1.449.798.991.175	1.754.870.074.962	Sumatera
Jakarta dan Jawa Barat	1.766.108.775.365	1.123.518.389.683	Jakarta and West Java
Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan	1.872.037.928.927	1.279.028.901.236	Central Java, East Java and Kalimantan
Bali, NTT, Sulawesi, Gorontalo, Maluku dan Papua	1.168.050.498.160	968.169.938.953	Bali, NTT, Sulawesi, Gorontalo, Maluku and Papua
	6.255.996.193.627	5.125.587.304.834	
Liabilitas			Liabilities
Sumatera	792.393.567.991	919.426.044.410	Sumatera
Jakarta dan Jawa Barat	965.273.974.179	588.643.047.475	Jakarta and West Java
Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan	1.023.169.986.285	670.119.400.933	Central Java, East Java and Kalimantan
Bali, NTT, Sulawesi, Gorontalo, Maluku dan Papua	638.402.776.843	507.251.602.263	Bali, NTT, Sulawesi, Gorontalo, Maluku and Papua
	3.419.240.305.299	2.685.440.095.081	
	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
Pendapatan Usaha			Revenue
Sumatera	1.044.781.619.601	621.859.039.585	Sumatera
Jakarta dan Jawa Barat	668.899.298.912	398.132.076.404	Jakarta and West Java
Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan	761.484.229.525	453.239.071.924	Central Java, East Java and Kalimantan
Bali, NTT, Sulawesi, Gorontalo, Maluku dan Papua	576.410.853.031	343.082.509.060	Bali, NTT, Sulawesi, Gorontalo, Maluku and Papua
	3.051.576.001.069	1.816.312.696.974	
Beban Pokok Pendapatan			Cost of Revenue
Sumatera	790.289.119.537	469.196.090.902	Sumatera
Jakarta dan Jawa Barat	505.965.867.009	300.392.857.578	Jakarta and West Java
Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan	575.998.553.192	341.971.391.029	Central Java, East Java and Kalimantan
Bali, NTT, Sulawesi, Gorontalo, Maluku dan Papua	436.006.163.383	258.857.654.004	Bali, NTT, Sulawesi, Gorontalo, Maluku and Papua
	2.308.259.703.120	1.370.417.993.512	
Laba Kotor			Gross Profit
Sumatera	254.492.500.064	152.662.948.683	Sumatera
Jakarta dan Jawa Barat	162.933.431.904	97.739.218.827	Jakarta and West Java
Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan	185.485.676.333	111.267.680.896	Central Java, East Java and Kalimantan
Bali, NTT, Sulawesi, Gorontalo, Maluku dan Papua	140.404.689.649	84.224.855.056	Bali, NTT, Sulawesi, Gorontalo, Maluku and Papua
	743.316.297.949	445.894.703.462	

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED

(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

(Lanjutan/*Continued*)

36. INFORMASI TAMBAHAN

Informasi keuangan PT PP Presisi Tbk (induk perusahaan saja) menyajikan investasi Perusahaan pada entitas anak dan entitas asosiasi berdasarkan metode biaya.

37. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan merupakan tanggung jawab manajemen dan telah disetujui oleh Direktur Perusahaan untuk diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2019.

36. SUPPLEMENTARY INFORMATION

Financial information of PT PP Presisi Tbk (parent company only) presents the Company's investments in subsidiaries and associates under the cost method.

37. COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements and the supplementary information were the responsibilities of management and were approved by the Director and authorized for issue on February 12, 2019.

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
 INFORMASI TAMBAHAN
 LAPORAN POSISI KEUANGAN
 ENTITAS INDUK
 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
 SUPPLEMENTARY INFORMATION
 STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
 PARENT ENTITY
 DECEMBER 31, 2018 AND 2017
 (Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
ASET			ASSETS
ASET LANCAR			CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	574.013.040.178	1.044.673.992.502	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp4.373.116.814 pada 31 Desember 2018 dan Rp3.253.398.991 pada 31 Desember 2017			Trade accounts receivable - allowance for impairment losses of Rp4,373,116,814 at December 31, 2018 and Rp3,253,398,991 at December 31, 2017
Pihak berelasi	289.986.507.668	79.796.993.408	Related parties
Pihak ketiga	110.405.276.698	27.668.179.620	Third parties
Piutang retensi			Retention receivables
Pihak berelasi	58.887.516.404	13.361.796.928	Related parties
Pihak ketiga	35.633.489.579	9.482.718.641	Third parties
Tagihan bruto pemberi kerja			Gross receivables from project owners
Pihak berelasi	495.070.919.650	464.995.584.127	Related parties
Pihak ketiga	341.443.247.476	45.363.244.176	Third parties
Piutang lain-lain			Other receivables
Pihak berelasi	50.000.000	60.366.796	Related parties
Persediaan	74.994.349.529	52.741.292.904	Inventories
Uang muka	56.206.517.995	42.335.800.647	Advances
Pajak dibayar dimuka	265.306.572.450	132.250.320.343	Prepaid taxes
Biaya dibayar dimuka	47.541.607.637	22.688.833.914	Prepaid expenses
Jumlah Aset Lancar	2.349.539.045.264	1.935.419.124.006	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR			NON CURRENT ASSETS
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp472.874.841.807 pada 31 Desember 2018 dan Rp342.133.411.435 pada 31 Desember 2017	1.737.329.838.719	1.409.638.735.081	Property and equipment - net of accumulated depreciation of Rp472,874,841,807 at December 31, 2018 and Rp342,133,411,435 at December 31, 2017
Investasi pada entitas anak	798.000.000.000	798.000.000.000	Investments in a subsidiary company
Aset tidak berwujud, bersih	3.385.009.200	-	Intangible assets, net
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.538.714.847.919	2.207.638.735.081	Total Non Current Assets
JUMLAH ASET	4.888.253.893.183	4.143.057.859.087	TOTAL ASSETS

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
 INFORMASI TAMBAHAN
 LAPORAN POSISI KEUANGAN
 ENTITAS INDUK
 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
 SUPPLEMENTARY INFORMATION
 STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
 PARENT ENTITY
 DECEMBER 31, 2018 AND 2017
 (Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
LIABILITAS JANGKA PENDEK			CURRENT LIABILITIES
Utang usaha			Trade accounts payables
Pihak ketiga	883.353.919.150	806.651.046.551	Third parties
Uang muka pemberi kerja			Advances from project owners
Pihak berelasi	8.792.057.502	-	Related parties
Pihak ketiga	30.516.575.148	85.922.301.139	Third parties
Utang lain - lain			Other short term liabilities
Pihak berelasi	106.034.385.162	6.043.378.223	Related parties
Pihak ketiga	640.434.432	174.557.590	Third parties
Utang pajak	83.904.844.136	18.320.483.500	Taxes payable
Utang bank jangka pendek	109.000.000.000	200.000.000.000	Bank loans
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun			Current maturity of long- term liabilities
Utang bank	-	-	Bank loans
Sewa pembiayaan	17.545.674.018	28.509.384.376	Finance lease liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.239.787.889.548	1.145.621.151.379	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG			NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas imbalan kerja	2.535.888.845	2.255.673.036	Employee benefits obligation
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			Long-term liabilities - net of current maturity
Utang bank	1.356.064.626.180	908.880.912.313	Bank loans
Sewa pembiayaan	178.851.840.779	133.273.501.969	Finance lease liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.537.452.355.804	1.044.410.087.318	Total Non-current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	2.777.240.245.352	2.190.031.238.697	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS			EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp.100 per saham			Capital stock - Rp.100 per share
Modal dasar - 24.000.000.000 saham			Authorized capital - 24,000,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor - 10.224.271.000 saham	1.022.427.100.000	1.022.427.100.000	Subscribed and paid-up - 10,224,271,000 shares
Tambahan modal disetor	749.560.161.538	749.560.161.538	Additional paid-in capital
Penghasilan komprehensif lain	3.533.370.633	2.279.017.918	Other comprehensive income
Sado Laba:			Retained Earnings:
Ditentukan penggunaannya	9.467.238.411	-	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	326.025.777.249	178.760.340.934	Unappropriated
Jumlah Ekuitas	2.111.013.647.831	1.953.026.620.390	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	4.888.253.893.183	4.143.057.859.087	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
 INFORMASI TAMBAHAN
 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
 KOMPREHENSIF LAIN
 ENTITAS INDUK
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
 SUPPLEMENTARY INFORMATION
 STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
 OTHER COMPREHENSIVE INCOME
 PARENT ENTITY
 FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2018 AND 2017
 (Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
PENDAPATAN BERSIH	1.750.683.455.897	1.031.653.417.383	NET REVENUE
HARGA POKOK PENDAPATAN	<u>(1.332.466.231.377)</u>	<u>(765.994.532.727)</u>	COST OF REVENUE
LABA KOTOR	418.217.224.520	265.658.884.656	GROSS PROFIT
Beban usaha	(31.021.601.778)	(24.176.270.430)	Operating expenses
Beban penurunan nilai piutang	(1.119.717.821)	(157.695.100)	Provision for impairment losses on receivable
Pendapatan lain-lain	62.385.348.452	11.932.825.734	Other income
Beban lain-lain	(184.398.596.997)	(75.371.471.530)	Other expense
Beban pajak final	<u>(43.143.411.186)</u>	<u>(21.026.071.995)</u>	Final tax expense
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	220.919.245.190	156.860.201.335	PROFIT BEFORE INCOME TAX
(BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			INCOME TAX (EXPENSE)
Pajak kini	(7.748.594.545)	(8.200.246.052)	Current tax
Jumlah (Beban) Pajak Penghasilan	<u>(7.748.594.545)</u>	<u>(8.200.246.052)</u>	Total Income Tax (Expenses)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	213.170.650.645	148.659.955.283	NET PROFIT CURRENT YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba (rugi)			Item that will not be reclassified subsequently to profit or loss
Selisih lebih nilai revaluasi aset tetap	912.661.187	2.788.848.589	Surplus of fixed assets revaluation
Pengkukuran kembali atas program imbangan kerja	<u>341.691.528</u>	<u>(496.874.402)</u>	Remeasurement of employee benefit obligation
	1.254.352.715	2.291.974.187	
Pos yang akan direklasifikasi ke laba (rugi)	<u>-</u>	<u>-</u>	Item that will be reclassified subsequently to profit or loss
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	214.425.003.360	150.951.929.470	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
 INFORMASI TAMBAHAN
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 ENTITAS INDUK
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
 SUPPLEMENTARY INFORMATION
 STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
 PARENT ENTITY
 FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018 AND 2017
 (Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Penghasilan komprehensif lain/ <i>Other Comprehensive income</i>				Saldo laba / <i>Retained earning</i>		Jumlah/ <i>Total</i>	
	Modal ditempatkan dan disetor/ <i>Issued and paid-up</i>	Tambahan Modal disetor/ <i>Paid-in Capital</i>	Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja/ <i>Remeasurement of Employee Benefit Liability</i>	Selisih lebih nilai revaluasi aset tetap/ <i>Surplus of fixed assets r evaluation</i>	Ditentukan penggunaannya/ <i>Appropriated</i>	Belum ditentukan penggunaannya/ <i>Unappropriated</i>		
Saldo per 1 Januari 2017	110.760.000.000	-	(12.956.269)	-	-	101.198.588.785	211.945.632.516	Balance as of January 1, 2017
Dividen tahun 2016	-	-	-	-	-	(4.098.203.133)	(4.098.203.133)	Dividend 2016
Konversi modal disetor dari laba ditahan	67.000.000.000	-	-	-	-	(67.000.000.000)	-	Conversion paid-in capital from retained earning
Tambahan modal disetor penerbitan saham	609.545.000.000	749.560.161.538	-	-	-	-	609.545.000.000	Additional paid-in capital
Laba komprehensif tahun berjalan	235.122.100.000	-	(496.874.402)	2.788.848.589	-	148.659.955.283	150.951.929.470	Issuance of shares
Saldo 31 Desember 2017	1.022.427.100.000	749.560.161.538	(509.830.671)	2.788.848.589	-	178.760.340.935	1.953.026.620.391	Comprehensive income current year
Saldo 31 Desember 2017	1.022.427.100.000	749.560.161.538	(509.830.671)	2.788.848.589	-	178.760.340.935	1.953.026.620.391	Balance as of December 31, 2017
Dividen tahun 2017	-	-	-	-	-	(56.437.975.920)	(56.437.975.920)	Dividend 2017
Cadangan	-	-	-	-	9.467.238.411	-	9.467.238.411	Reserve
Laba komprehensif tahun berjalan	-	-	341.691.528	912.661.187	-	203.703.412.234	204.957.764.949	Comprehensive income current year
Saldo 31 Desember 2018	1.022.427.100.000	749.560.161.538	(168.139.143)	3.701.509.776	9.467.238.411	326.025.777.249	2.111.013.647.831	Balance as of December 31, 2018

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN ARUS KAS
ENTITAS INDUK
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
SUPPLEMENTARY INFORMATION
STATEMENT OF CASH FLOWS
PARENT ENTITY
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018 AND 2017
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			Cash Flows From Operating Activities
Penerimaan kas dari pelanggan	1.012.201.995.808	636.060.391.243	Cash Receipts from Customers
Pembayaran kas kepada :			Payments to :
Pemasok dan subkontraktor	(579.049.638.459)	(137.807.813.121)	Supplier and Subcontractors
Karyawan dan Pihak Ketiga Lainnya	(35.234.455.085)	(23.434.130.996)	Employees and third party
Kas yang dihasilkan Operasi	<u>397.917.902.264</u>	<u>474.818.447.126</u>	Cash generated from operation
Pembayaran pajak-pajak	(118.363.897.202)	(103.591.224.415)	Taxes payment
Pembayaran bunga	(122.013.248.545)	(63.438.645.796)	Payments of interest expense
Kas Bersih diperoleh dari			Net Cash provided by Operating
 Aktivitas Operasi	<u>157.540.756.517</u>	<u>307.788.576.915</u>	 Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Akuisisi entitas anak	-	(798.000.000.000)	Acquisition of a subsidiary
Perolehan aset tetap	(1.038.091.898.009)	(900.557.246.527)	Acquisition of fixed assets
Penerimaan penjualan aset tetap	660.550.415	-	Proceed from sale of fixed asset
Penerimaan piutang lain lain	(3.385.009.200)	-	Receipts from other receivable
Kas Bersih (digunakan untuk)			Net Cash (used in) Investing
 Aktivitas Investasi	<u>(1.040.816.356.794)</u>	<u>(1.698.557.246.527)</u>	 Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			Cash Flows From Financing Activities
Penerimaan setoran modal	-	600.000.000.000	Paid-up capital
Penerimaan Pinjaman dari Induk	105.291.644.425	-	Additional Liabilities from Parents
Setoran modal dari penawaran umum perdana saham	-	235.122.100.000	Addition of share capital from initial public offering
Agio saham dari penawaran umum perdana saham	-	775.902.930.000	Paid-in capital in excess of par value from initial public offering
Beban emisi saham	-	(26.342.768.461)	Share issuance costs
Penerimaan utang bank	447.183.713.867	654.690.816.133	Receipt of bank loans
Pembayaran utang bank	(91.000.000.000)	(103.904.761.687)	Payment of bank loans
Penerimaan utang non bank	-	89.018.386.226	Receipt of non bank loans
Pembayaran utang non bank	(48.860.710.339)	-	Payment of non bank loans
Kas Bersih diperoleh dari			Net Cash provided by Financing
 Aktivitas Pendanaan	<u>412.614.647.953</u>	<u>2.224.486.702.211</u>	 Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(470.660.952.324)	833.718.032.599	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	<u>1.044.673.992.502</u>	<u>210.955.959.903</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS - BEGINNING
SALDO KAS DAN SETARA KAS - AKHIR	<u>574.013.040.178</u>	<u>1.044.673.992.502</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS ENDING

Laporan Tahunan
2018
Annual Report



PRESISI

Kantor Pusat :
Plaza PP, Wisma Robinson Lt. 3
Jl. TB Simatupang No. 57
Pasar rebo-Jakarta Timur 13760

Workshop :
Jl. Raya Narogong Km. 15
Pangkalan 6 Ciketing Bekasi Timur 17153

T : +6221-824-83255

F : +6221-823-0353

E : headoffice@pp-presisi.co.id
corsec@pp-presisi.co.id

W : www.pp-presisi.co.id